



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

2019



PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019, yang disusun karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Tahun 2019.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 HINGGA TRIWULAN II TAHUN
BERJALAN
- BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : KINERJA KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Juli 2019

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	BAB I - 1
1.1.1 Proses Penyusunan	BAB I - 3
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	BAB I - 5
1.2 Landasan Hukum.....	BAB I - 7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	BAB I - 9
1.3.1 RPJM Nasional.....	BAB I - 11
1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.....	BAB I - 12
1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	BAB I - 12
1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031.....	BAB I - 20
1.3.5 RPJMD Kota Magelang.....	BAB I - 20
1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral.....	BAB I - 22
1.3.7 Renja – OPD.....	BAB I - 22
1.4 Maksud dan Tujuan.....	BAB I - 23
1.4.1 Maksud.....	BAB I - 23
1.4.2 Tujuan.....	BAB I - 23
1.5 Sistematika RKPD.....	BAB I - 23

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	BAB II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	BAB II - 1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	BAB II - 1
2.1.1.2 Topografi.....	BAB II - 4
2.1.1.3 Geologi.....	BAB II - 7
2.1.1.4 Hidrologi.....	BAB II - 7
2.1.1.5 Klimatologi.....	BAB II - 8
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	BAB II - 9
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	BAB II - 11
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana.....	BAB II - 19

2.1.1.9	Aspek Demografi.....	BAB II - 20
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	BAB II - 26
2.1.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	BAB II - 26
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	BAB II - 36
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama.....	BAB II - 48
2.1.3	Aspek Layanan Umum.....	BAB II - 55
2.1.3.1	Fokus Urusan Pelayanan Wajib.....	BAB II - 55
2.1.3.2	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan.....	BAB II - 124
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	BAB II - 135
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	BAB II - 136
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	BAB II - 144
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	BAB II - 165
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	BAB II - 171
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan - Realisasi RPJMD.....	BAB II - 173
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	BAB II - 196
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	BAB II - 196
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	BAB II - 199
2.4	Isu Strategis	BAB II - 211

BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

3.1	Kondisi Ekonomi Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019.....	BAB III - 1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Nasional	BAB III - 1
3.1.2	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	BAB III - 2
3.1.3	Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang	BAB III - 3
3.2	Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019.....	BAB III - 5
3.2.1	Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2019.....	BAB III - 5
3.2.2	Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019.....	BAB III - 6
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	BAB III - 6
3.4.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	BAB III - 9
3.4.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	BAB III - 10

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	BAB III - 23
3.4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	BAB III - 30

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	BAB IV - 1
4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 1
4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 5
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 27
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 27
4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 29
4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang.....	BAB IV - 128
4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs).....	BAB IV - 128
4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs).....	BAB IV - 128
4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang.....	BAB IV - 131
4.4.1 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah.....	BAB IV - 131
4.4.2 Arah Pengembangan Internal Wilayah.....	BAB IV - 132
4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	BAB IV – 142
4.6 Inovasi Pembangunan	Bab IV-143

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas.....	BAB V - 1
5.1.1 Program Prioritas I.....	BAB V - 1
5.1.2 Program Prioritas II.....	BAB V - 80
5.1.3 Program Prioritas III.....	BAB V - 80

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....BAB VI-1

BAB VII PENUTUP

7.1 Penutup.....	BAB VII - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah secara proses dan hasil harus mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien. Hasil pelaksanaan pembangunan sudah tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Fase pembangunan daerah berikutnya adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang diikuti dengan fase pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Wujud hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan inilah yang menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan periode berikutnya atau penyusunan perubahan perencanaan pembangunan periode atau tahun berkenaan. Ketiga fase dimaksud merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi dampak signifikan perencanaan pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan peran penting pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamankan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah. Permendagri inilah yang menjadi pijakan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Magelang, termasuk dalam upaya penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik itu RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.

Terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dalam hal ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 343 Permendagri 86 tahun 2017 mengatur tentang ketentuan dan tata cara penyusunan perubahan RKPD, bahwa perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

Di Kota Magelang, terdapat prioritas pembangunan daerah yang memerlukan pendanaan untuk dilaksanakan di tahun 2019, sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi readiness criteria pelaksanaan program kegiatan prioritas yang harus di laksanakan di tahun 2020, atau sebagai bagian dari pentahapan kegiatan dalam rangka upaya pencapaian target akhir RPJMD periode 2016-2021.

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Setelah dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diketahui bahwa besaran SILPA APBD Kota Magelang tahun anggaran 2018 yang dapat digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2018 berada pada posisi jumlah di bawah besaran SILPA yang prediksikan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan sebagai APBD Kota Magelang tahun 2019. Di samping hal tersebut, masih terdapat hal hal dengan urgensitas tinggi yang harus dilaksanakan dengan penganggaran yang harus dituangkan dalam Perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019.

1.1.1 Proses Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD diawali dengan persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD, orientasi mengenai Perubahan RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun Perubahan RKPD terdiri dari personil lintas perangkat daerah yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk memudahkan koordinasi penyusunannya, dilakukan melalui rapat rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Perubahan Kota Magelang Tahun 2019, sebagai terobosan yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim. Untuk menjamin perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*) baik aspek kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPD Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan dengan melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/top down* maupun politis.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 ini merupakan pentahapan tahun ketiga perencanaan tahap III RPJMD 2016-2021. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini diawali dengan perumusan rancangan Perubahan RKPD tahun 2019 untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Perubahan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai dengan Triwulan II. Perubahan RKPD juga disusun karena didorong oleh suatu keadaan yang disebabkan oleh SILPA tahun anggaran sebelumnya yang nampak tidak dapat mencukupi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan di Tahun 2019.

Perumusan rancangan perubahan RKPD 2019 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2019, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Adapun sistematika penyusunan dokumen adalah pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2019, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta penutup.

Setelah diperoleh persetujuan rancangan perubahan RKPD 2019 oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai lampiran rancangan Perubahan RKPD untuk menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu

indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD, maka dilakukan verifikasi rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Saran dan rekomendasi pada saat verifikasi menjadi bahan penyempurnaan perubahan Rencana Perangkat Daerah.

- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang merupakan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

Berdasarkan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi, rancangan perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA untuk difasilitasi dengan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

- c. Penetapan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

Rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan RKPD tahun 2019. Peraturan Walikota tersebut dijadikan dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah serta pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang kemudian disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Magelang tahun 2019.

Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang tertuang dalam RKPD provinsi Jawa Tengah dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk menjaga harmoni dan konektivitas perencanaan perlu melakukan evaluasi RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansi kebijakan, maka sebuah kebijakan menjadi relevan untuk dipedomani daerah karena beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya juga dipertimbangkan memiliki dampak strategis bagi daerah pada tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019 dilaksanakan sesuai regulasi dan disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mempertanggungjawabkannya. Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1-1
Prinsip Penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang 2019 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan isu strategis
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2019

KEDALAMAN

	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2019
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2019 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota Magelang

Memperhatikan Permendagri nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019, bahwa tahapan dan tata cara penyusunan RKPD tahun 2019 dan perubahan RKPD tahun 2019 berpedoman pada peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019 berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1-2
Pendekatan Berorientasi pada Proses Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

NO	KRITERIA	PARAMETER
1	TEKNOKRATIK	Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah meliputi proses pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta penelaahan terhadap gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan, permasalahan pembangunan, RTRW, RPJMN, RPJMD provinsi.
2	PARTISIPATIF	Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan

			Bersifat inklusif terhadap masyarakat rentan termarginalkan dan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan
3	POLITIS		Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD Pembahasan dengan DPRD dilaksanakan terhadap Rancangan Awal RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, dan RAPERDA RPJMD
4	ATAS-AWAH BAWAH-ATAS	DAN	Merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kota Menyelaraskan juga dengan hasil Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD)

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

Tabel 1-3
Pendekatan Penyusunan Perubahan RKPD Berorientasi pada Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2019

NO	KRITERIA	PARAMETER
1	HOLISTIK –TEMATIK	Mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya
2	INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah
3	SPASIAL	Mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
29. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perumusan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maupun dokumen rencana spasial. Hubungan antar dokumen dimaksud terwujud dengan sinkronisasi kebijakan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun provinsi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2005-2025, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan tahunan daerah Kota Magelang dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2011-2031, yang saat ini pada proses persetujuan substansi terhadap revisi Perda RTRW Kota Magelang, dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga RKPD harus selaras dengan arah kebijakan dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

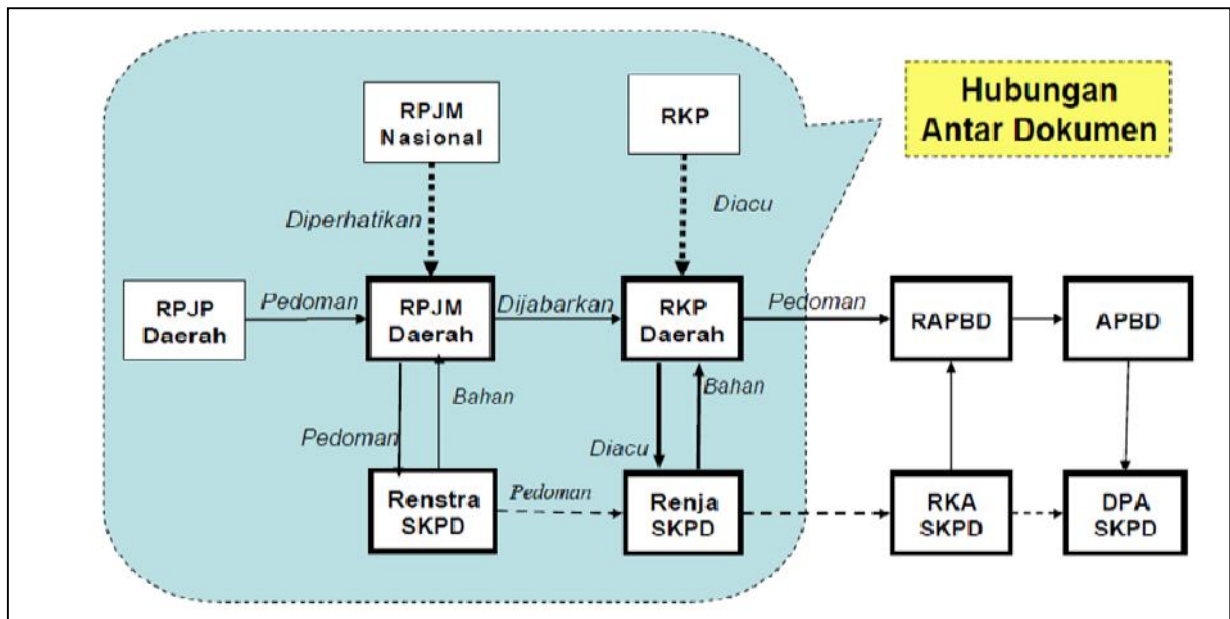
Penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2019 mengacu pula pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, untuk menyelaraskan arah kebijakan serta program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus dilaksanakan oleh Kota Magelang, termasuk dukungan terhadap upaya pencapaian target pembangunan provinsi Jawa Tengah di tahun 2019.

Pencapaian sasaran dan target pembangunan Nasional dan Provinsi memerlukan dukungan pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, tetapi sebaliknya terdapat pula sasaran dan target di Kota Magelang yang harus dicapai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk mengantisipasi dampak pembangunan nasional dan provinsi, serta strategi dan arah kebijakan untuk menangkap potensi dan peluang dengan adanya pembangunan nasional dan provinsi tersebut.

Pendekatan spasial pada penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan bertujuan untuk mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin arah kebijakan dan sasaran pada perubahan RPJMD tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan RTRW dilaksanakan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang, sebagai perubahan penjabaran tahunan ke tiga RPJM Daerah Kota Magelang tahun 2016-2021, yang mengacu pula pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

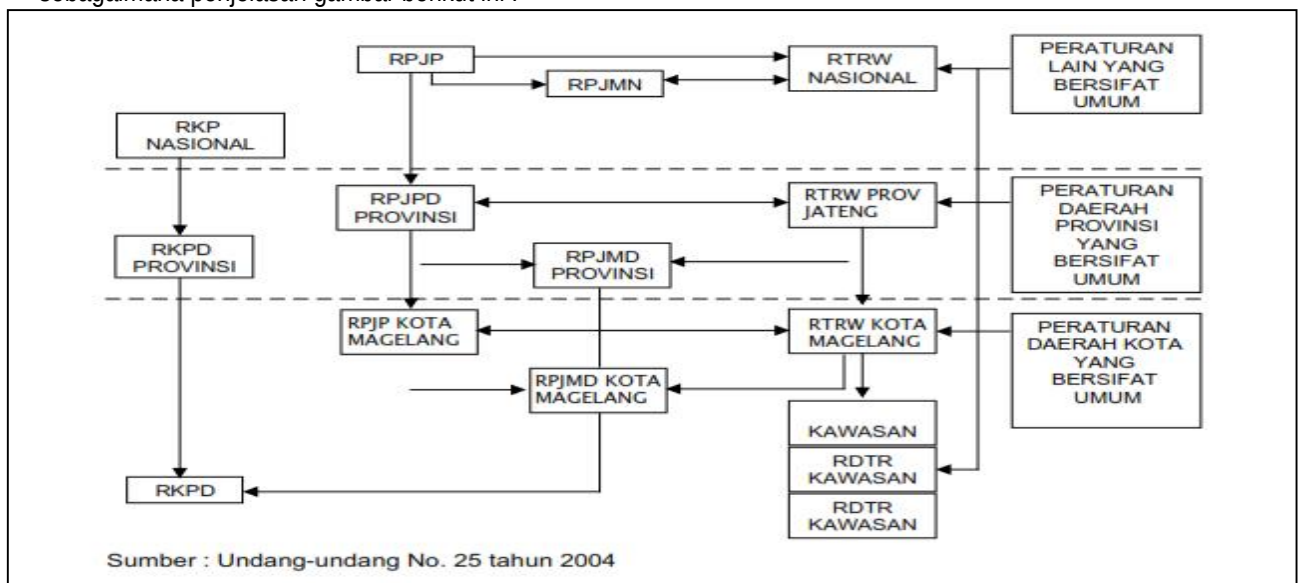
Gambaran hubungan antara dokumen perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah sebagaimana gambar berikut :



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain itu penyusunan RPKD Kota Magelang tidak terlepas dari dokumen tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan gambar berikut ini :



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1-3 Kedudukan Dokumen RPKD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RPKD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.3.1 RPJM Nasional

Sebagai penjabaran normatif perencanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, perubahan RPKD Tahun 2019 mengacu pada RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, terutama terkait

dengan agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan. Harapannya, bahwa perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga merujuk pada RKP Tahun 2019. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang dengan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2019.

1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen rujukan lain adalah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, diharapkan agar setiap daerah, Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018, guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, maka untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
5. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/ money follow programme priority yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

6. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis yang meliputi kemiskinan, pengangguran, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, daya saing perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur, kesenjangan wilayah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
7. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah.
8. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
9. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/ kemitraan/ keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
11. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota agar meneruskan dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini pada unsur Pemerintahan di bawahnya (Kecamatan, Desa dan Kelurahan).

1.3.3.2 Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.3.3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,64%, akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik (0,39%/tahun dalam periode 2013-2017) dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan Nasional (0,26%/tahun dalam periode 2013-2017).

Apabila dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan, terdapat 15 kab dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan petani, penciptaan nilai tambah hasil pertanian dengan hilirisasi/industrialisasi sektor pertanian dari on farm oriented menuju off farm oriented berbasis teknologi tepat guna dan potensi keunggulan lokal desa (local wisdom), mendorong terciptanya corporate farming dan mix farming, menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian dan pendampingan petani secara berkelanjutan.

2. Daya saing ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28 % dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Industri yang tumbuh masih didominasi oleh

industri padat karya dengan tingkat serapan buruh berpendidikan dan ketrampilan rendah, serta mengolah bahan baku impor dan barang modal impor; Investasi yang berdasarkan ketersediaan buruh dengan upah kerja yang murah masih mendominasi, investasi pada sektor jasa, pariwisata dan pengolahan atas sumber daya alam serta berteknologi tinggi masih rendah, sektor produksi masih didominasi pada skala UMKM dengan kondisi kurang efisien, lemah pada akses permodalan dan daya saing produk UMKM di pasar; kesenjangan wilayah dan antar kelompok yang masih belum baik.

3. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

IPM Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98. Angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,18. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang terbesar adalah lulusan SD. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA ancaman terbesarnya adalah penduduk usia produktif. Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat

4. Kedaulatan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan.

Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah

5. Kesenjangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Daerah Kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kurang maju dibanding wilayah Pantura dan Pusat Pemerintahan di Semarang dan Pusat pertumbuhan Surakarta. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

7. Tata kelola Pemerintahan

Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean government, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, hate speech dan hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah

1.3.3.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk “Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan”, dengan prioritas meliputi :

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :

- a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
- b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming),
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
- c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.

- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
 - e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
 - f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan

pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

- b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :
- a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
 - b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.
6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :
- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.
 - d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;

- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

1.3.3.2.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4% dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6%. Kebijakan ekonomi di Jawa Tengah difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal di daerah melalui : Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan; Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA); Pengembangan dan revitalisasi pasar desa dan kab./kota; Pengembangan berbagai kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan destinasi pariwisata potensial kab./kota. Hal tersebut juga perlu didukung dengan fasilitasi jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui kerjasama antar daerah kab/kota di provinsi dan antar daerah provinsi di Indonesia. Di samping itu juga dioptimalkan pendorongan ekspor pada produk unggulan daerah yang berdaya saing, penumbuhan sektor ekonomi riil dan menjaga tingkat pendapatan masyarakat.
2. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01%, yang akan diupayakan melalui sinergitas dan keberantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat dengan prioritas dan fokus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52%, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja. Kontribusi dari masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
4. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

1.3.3.2.4 Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, maka OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program pembangunan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan berdasarkan basis data terpadu utamanya di 15 Kabupaten (Blora, Grobogan, Purworejo, Demak, Cilacap, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen dan Wonosobo).
- 2) Pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi serta rencana tata ruang dan wilayah, antara lain :
 - a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi :
 - Pengembangan kawasan agropolitan : Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas; Girisuka (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar); Semar Boyong (Semarang, Boyolali, Magelang); Sobo Banjar (Wonosobo, Banjarnegara).
 - Kawasan Industri terpadu : Rembang, Demak – Semarang - Kendal, Brebes, Cilacap, Kebumen.
 - Pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal.
 - b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya: Kawasan Keraton Surakarta, Masjid Agung Demak, Candi Gedong Songo, Candi Dieng dan Candi Sukuh - Cetho.
 - c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup : Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Dataran Tinggi Dieng, Rawa Pening, Sindoro - Sumbing, Gunung Lawu dan Gunung Slamet.
 - d. Peruntukan Pertambangan : Kawasan Majengan, Serayu - Pantai Selatan, Gunung Slamet, Sumbing - Sindoro - Sumbing, Merapi - Merbabu - Ungaran, Gunung Muria – Pantai Utara, Kawasan Rembang, Kendeng, Lawu, Pegunungan Selatan dan Serayu - Pantai Utara.
 - e. Kawasan Peruntukan Wisata : Destinasi Pariwisata Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya, Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya, Solo -Sangiran dan sekitarnya, Borobudur - Dieng dan sekitarnya, Tegal -Pekalongan dan sekitarnya, Rembang - Blora dan sekitarnya.
 - f. Pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah Utara – Selatan sesuai potensi wilayah.
- 3) Keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional di Jawa Tengah.
- 4) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan diantaranya pada :
 - a. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan mempercepat pencapaian program strategis Provinsi/Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
 - b. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
 - c. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian, serta Pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan.
 - d. Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.
 - e. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarpras ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
 - f. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

- 5) Sinergitas kabupaten/kota dalam pencapaian skenario sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, khususnya untuk Kota Magelang diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71%, angka kemiskinan pada posisi 8,55% serta Tingkat pengangguran terbuka dalam kisaran 4,7%

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya melalui pendekatan spasial. Oleh karena itu penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap tata dan pola ruang. Dengan demikian pengendalian terhadap pelanggaran dan penggunaan lahan tetap terjaga. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Kota Magelang.

1.3.5 RPJMD Kota Magelang

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018-2019 diasumsikan bahwa :

- a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
- b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

- 1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
 - a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
 - b. pendidikan,
 - c. kesehatan
- 2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
- 3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
- 4) Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.
- 5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

- 6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
- 2) Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- 3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
- 4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
- 6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset.
- 10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- 11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- 12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- 13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
- 14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- 15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
- 19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
- 20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan

implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

- a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- b. Urusan pendidikan;
- c. Urusan kesehatan
- d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Urusan sosial;
- g. Urusan penanaman modal;
- h. Urusan komunikasi dan informatika;
- i. Urusan perdagangan;
- j. Urusan perindustrian;
- k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Urusan kebudayaan;
- m. Urusan pariwisata;

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

- a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- b. Program peningkatan daya saing daerah;
- c. Program kota cerdas;
- d. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
- h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Blueprint Universal Design, Pencapaian SDGS, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7 Perubahan Renja – OPD

Di level OPD, dokumen perubahan Renja OPD di susun dalam basis tahunan untuk menyesuaikan implementasi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019. Perubahan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam upaya pencapaian target kinerja setiap urusan dan penterjemahan terhadap Visi Misi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Penyusunan rancangan perubahan Renja

OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen perubahan Renja OPD yang definitif. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2019 sebagai bahan untuk penyusunan perubahan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2018 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2019, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017, prediksi 2018 dan proyeksi tahun 2019, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII

PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan salah satu Kota terkecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan dengan yang rata-ratanya luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km². Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang mendapatkan luasan wilayah terkait dengan perluasan batas wilayah Kota Magelang seluas 0.03 km². Total luasan wilayah Kota Magelang saat ini seluas 1.854 Ha (18,54 km²).

Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass- dataran tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Kawasan ini memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Dengan ditetapkannya Kota Magelang dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) maka Kota Magelang harus mampu melayani beberapa Kabupaten dan Kota yang berada disekitarnya yang termasuk dalam PKW

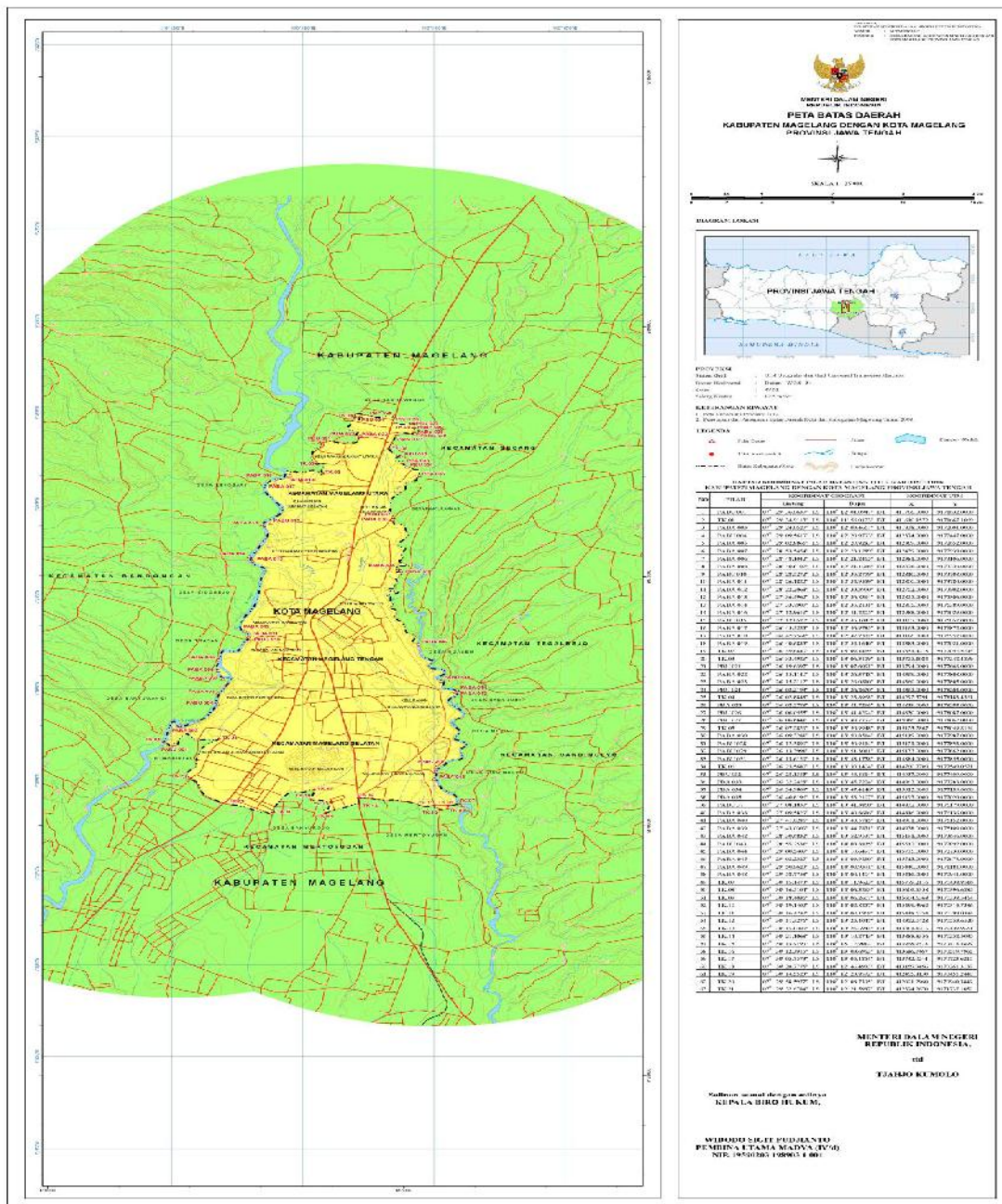
Sebagai Kota terkecil di Jawa Tengah yang hanya menempati areal sebesar 0,66% dari keseluruhan luas Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 Kelurahan, gambaran secara administrasi terlihat pada gambar di bawah :

Tabel 2 - 1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	713.15	38,47
	1. Kel. Jurangombo Utara	65.66	3.54
	2. Kel. Jurangombo Selatan	212.07	11.44
	3. Kel. Magersari	156.49	8.44
	4. Kel. Tidar Utara	110.11	5.94
	5. Kel. Tidar Selatan	131.51	7,09
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	37.31	2,01
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	510.11	27.52
	1. Kel. Magelang	123.67	6.67
	2. Kel. Kemirirejo	85.81	4,63
	3. Kel. Cacaban	85.75	4,63
	4. Kel. Rejowinangun Utara	90.50	4.88
	5. Kel. Panjang	35.52	1.92
	6. Kel. Gelangan	88.87	4,79
03.	KEC. MAGELANG UTARA	630.37	34.01
	1. Kel. Wates	118.0	6,37
	2. Kel. Potrobangsari	135.13	7,29
	3. Kel. Kedungsari	132.33	7.14
	4. Kel. Kramat Utara	99.78	5.38
	5. Kel. Kramat Selatan	145.14	7.38
	JUMLAH	1853.64	100,00

Sumber: Data Strategis Kota Magelang, 2018

Luas Kota Magelang berdasarkan Permendagri nomor 64 Tahun 2017 sebesar 1853.64 Ha sedikit lebih luas dari pada luas Kota Magelang pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1812 Ha. Adapun batas wilayah untuk Kota Magelang berdasarkan Permendagri nomor 64 Tahun 2017, sebagai berikut :



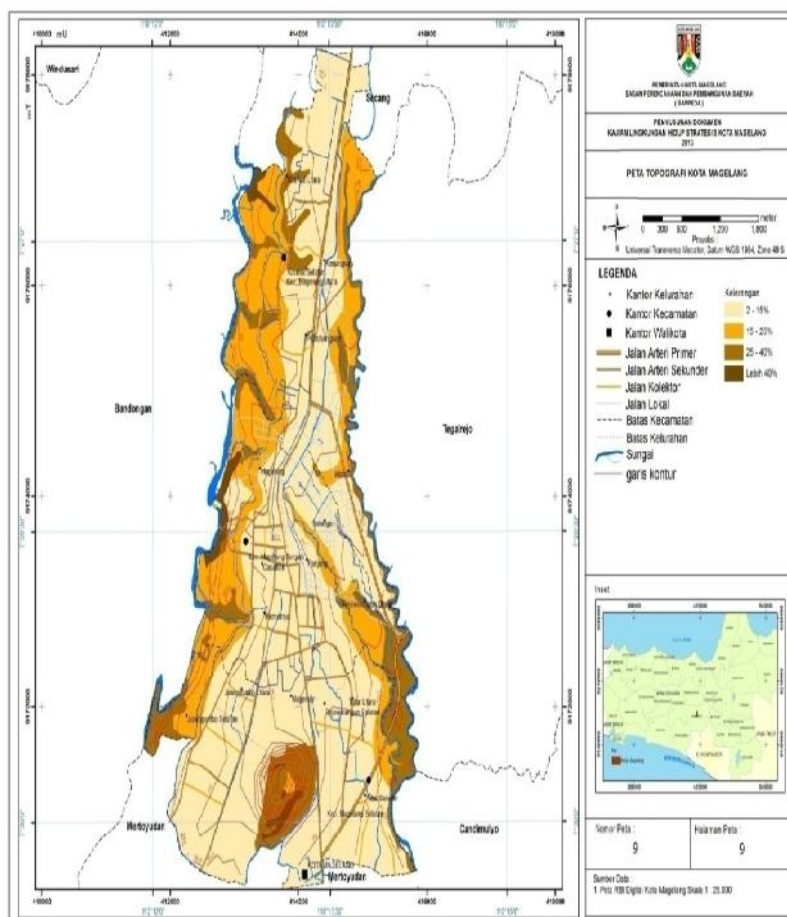
Gambar 2.2 Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendari 64 Tahun 2017

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2-5%.



Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, ber relief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl.

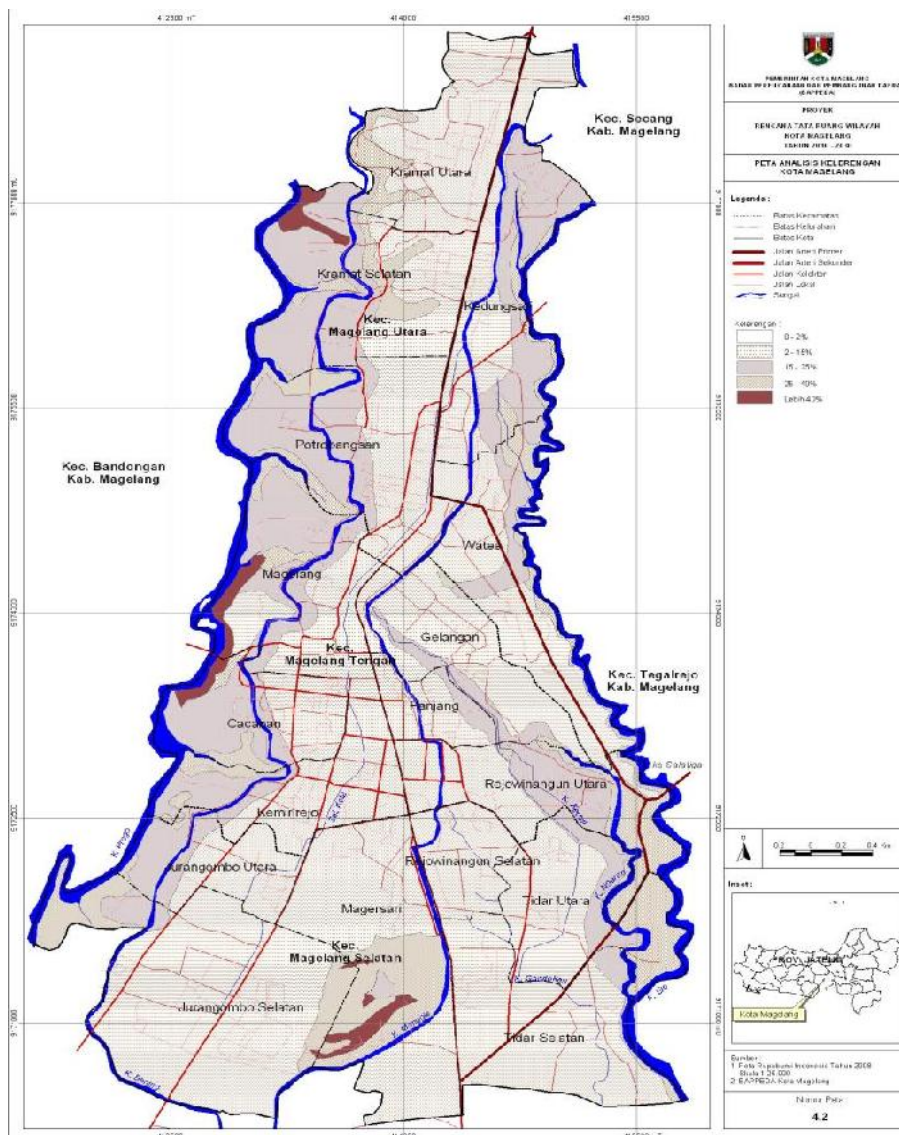


Gambar 2.3
Gambar Peta Topografi Kota Magelang

Keberadaan Gunung Tidar selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30–40% ini berada di sebelah timur kompleks AKMIL, berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk .

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan permukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kolektor kontur tajam. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah Utara dan Selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.



Gambar 2.4
Gambar Pola Kelereng Kota Magelang (Sumber : RTRW Kota Magelang 2011 – 2031)

2.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, batuan beku intrusi serta batuan endapan alluvial. Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat porous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5 kg/cm² – 19 kg/cm². Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, berrelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah Barat yang juga merupakan batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang. Kota Magelang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang. Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan saluran irigasi. Sedangkan potensi air tanahnya relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan lebih dari 20 meter.

Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada pembangunan yang dilakukan di daerah bantaran sungai dengan kelerengan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi serta tingkat kelerengan alam yang cukup curam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi.

2.1.1.4 Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan akuifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2016 sebesar 7.606.319 m³. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 7.434.942 m³ maka terjadi kenaikan kebutuhan dari penggunaan air PDAM di Kota Magelang. Sementara data tahun 2017 penggunaan air PDAM sebanyak 7.633.558 m³/ tahun. Jumlah pemakaian air minum terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Apabila perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari

maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang. Namun hal ini perlu menjadi perhatian untuk ke depan mengingat semakin hari kebutuhan akan air bersih akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk padahal untuk memenuhi kebutuhan akan air Kota Magelang masih bergantung pada mata air yang berada di daerah lain.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Data klimatologi pada tahun 2017 menurut Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2017 total rata – rata curah hujan sebanyak 238.76 mm sedangkan pada tahun 2016 total curah hujan sepanjang tahun sebanyak 257.85 mm. Data semester 1 tahun 2018 bahwa rata –rata curah hujan selama 6 bulan sebanyak 103.89 mm. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 2
Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2012-semester 1 Tahun 2018

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Semester 1 2018
01. Januari	22.58	19.04	16.61	16.92	6.86	29.71	17.92
02. Februari	23.44	18.63	22.05	27.76	20.09	19.57	23.22
03. Maret	24.69	22.00	19.21	22.09	16.66	26.29	24.33
04. April	20.28	15.74	23.47	22.50	19.05	29.29	13.47
05. Mei	11.89	17.94	17.77	6.63	15.86	28.33	19.56
06. Juni	20.40	10.44	8.25	44.67	39.27	12.70	15.40
07. Juli	10.00	17.00	13.57	0.00	19.09	13.33	-
08. Agustus	0.00	0.00	5.40	0.00	25	-	-
09. September	0.00	2.00	2.33	0.00	28.89	32.00	-
10. Oktober	16.80	20.44	16.91	0.00	25.25	11.50	-
11. November	20.42	13.00	12.56	12.87	24.2	14.76	-
12. Desember	17.70	14.25	23.12	28.55	17.63	21.28	-
Jumlah	188.20	170.48	170.59	181.99	257.85	238.76	103.89
Rata-rata	15.68	14.21	14.22	15.17	21.49	19.90	17.32

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2018 Diskominsta Kota Magelang. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Curah hujan dalam semester pertama tahun 2017, memiliki kecenderungan lebih tinggi apabila di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata curah hujan dalam enam bulan pertama di tahun 2017 sebesar 23.55 mm/hari.. Namun kondisi pada semester 2 tahun 2017 rata – rata curah hujan cenderung lebih kecil apabila di bandingkan pada semester pertama tahun 2017 walaupun pada bulan september sempat mengalami peningkatan rata – rata curah hujan yang relait tinggi yaitu 32 mm/hari.. Curah hujan tertinggi pada semester pertama 2017 biasanya terjadi pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Januari, Pebruari, Maret dan April, di mana hari hujannya sekitar 20an hari hujan. Sama

halnya dengan kondisi pada semester 1 tahun 2018 kondisi curah hujan tertinggi ada di bulan januari, perburari dan maret. Memasuki triwulan ke 2, curah hujan mulai menurun. Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Pebruari sebanyak 24 hari hujan dan 23 hari hujan. Tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu di sepanjang tahun membawa akibat seperti banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang, bencana yang di sebabkan karena adanya pohon yang tumbang tumbang dan bencana longsor.

Kondisi Topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisi Kota Magelang yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga Ke depan hal ini menjadi perhatian serta menjadi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin timbul karena cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan seperti bencana longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit perlu di antisipasi sejak dini terutama pada daerah - daerah dengan kelereng curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi lahan terbangun, dari luas lahan 1854 Ha, hampir 70 % nya merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata dan kawasan terbangun lainnya. Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang

Dalam pemetaan tata ruang, pemetaan Penggunaan Lahan Kota Magelang menggunakan data terbaru yang dimiliki pemerintah Kota Magelang. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan data peta CSRT terkoreksi, dengan menggunakan data citra Tahun 2015. Selengkapny luasan penggunaan lahan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah:

Tabel 2 - 3
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2018

PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Alun-Alun Kota	2,16	0,12
Gardu PLN	2,67	0,14
Hutan Kota	73,05	3,94
Industri	3,55	0,19
IPAL	0,61	0,03
JALAN	28,30	1,53
Kesehatan	47,72	2,57
Kolam Renang	0,18	0,01
Lapangan	9,42	0,51

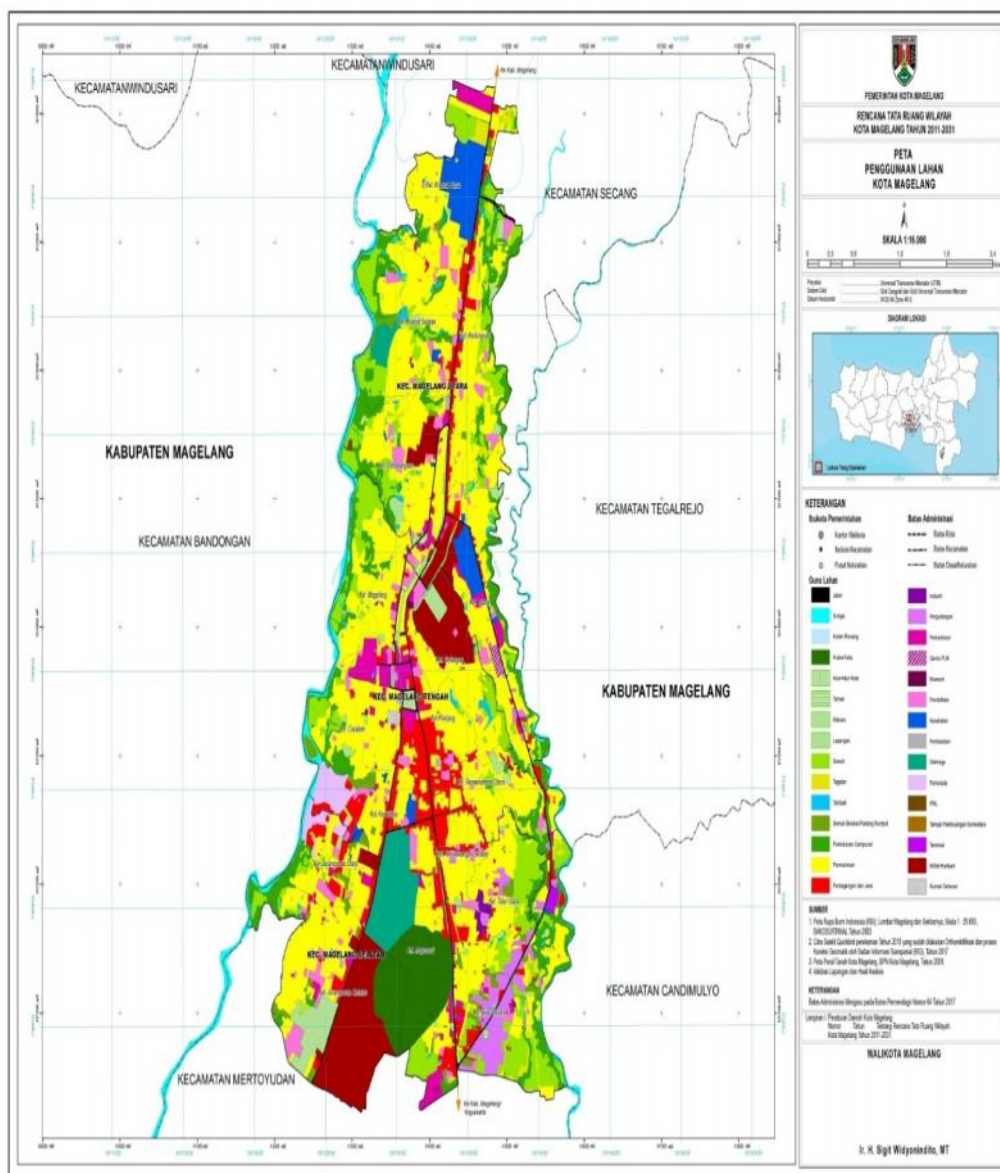
PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	LUAS (HA)	PERSentase (%)
Makam	34,61	1,87
Militer/Hankam	124,43	6,71
Museum	0,79	0,04
Olahraga	49,81	2,69
Pariwisata	19,64	1,06
Pendidikan	63,88	3,45
Perdagangan dan Jasa	124,89	6,74
Pergudangan	39,33	2,12
Peribadatan	9,86	0,53
Perkantoran	55,67	3,00
Perkebunan Campuran	155,11	8,37
Permukiman	728,43	39,30
Rumah Tahanan	1,70	0,09
Sawah	169,25	9,13
Semak Belukar/Padang Rumput	32,30	1,74
Sungai	25,26	1,36
Taman	12,32	0,66
Kolam	11,31	0,61
Tegalan	24,14	1,30
Tempat Pembuangan Sementara	0,31	0,02
Terminal	3,01	0,16
Total Luas	1853,71	

Sumber : *Survey Lapangan, Citra Satelit Quickbird perekaman 2015*

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa luas penggunaan lahan Kota Magelang tertinggi adalah berupa Permukiman dengan luas sebesar 728,43 Ha atau 39,30%, kawasan permukiman tersebut menyebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Kawasan perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang mempunyai luas 124,89 Ha dan 55,67 Ha mendominasi pada lapis pertama lahan pada koridor jaringan jalan kota. Untuk lahan terbangun lainnya seperti pendidikan, pariwisata, peribadatan, dan pergudangan menyatu dengan kawasan permukiman dan atau kawasan perdagangan dan jasa.

Untuk lahan tidak terbangun di dominasi lahan sawah dengan luas 169,25 Ha atau 9,13 %. Lahan sawah sebagian besar berada pada bagian barat dan bagian selatan wilayah Kota Magelang, serta masih terkoneksi dengan jaringan irigasi.

Lebih jelas sebaran penggunaan lahan Kota Magelang bisa dilihat pada gambar peta sebagai berikut:



Gambar 2.5

Peta Penggunaan Lahan Kota Magelang

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Kedudukan Kota Magelang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang.

Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

- a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai hinterland. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, delineasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
- b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi :

- 1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.
- c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:
- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I
 - kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
 - kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:
 - kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.
 - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:
 - kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.
 - 4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:
 - kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.
 - 5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:
 - kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara
- Kota Magelang Selain sebagai PKW Kota Magelang juga sebagai daerah penyangga Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Selain itu juga ditegaskan lagi dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam perpres tersebut Candi Borobudur menjadi destinasi pariwisata nasional bersama dengan Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Tanjung Lesung, Bromo Tengger Semeru, dan Komodo.

Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 wilayah KSN Borobudur terbagi menjadi dua, yaitu Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) yang berada pada radius 5 km, dan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang berada pada radius 5-10 km. Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) diarahkan sebagai kawasan pelestarian utama, sedangkan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya. Jika

dilihat dari gambar di bawah sampai radius 10 km dari Candi Borobudur, Kota Magelang sebenarnya tidak masuk dalam radius tersebut sehingga ditetapkan Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional tidak memberikan dampak langsung untuk Kota Magelang. Akan tetapi ditetapkan KSN Borobudur memberikan potensi bagi Kota Magelang berupa adanya potensi limpahan wisatawan dari Candi Borobudur untuk berkunjung ke Kota Magelang sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi Kota Magelang.

Di sisi lain, jika dicermati lagi mengenai arahan pengembangan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yaitu sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya, maka dapat diketahui bahwa Kawasan SP-2 tidak akan dibuat menjadi kawasan perkotaan. Hal ini menjadi peluang bagi Kota Magelang untuk dapat menarik para wisatawan dari Candi Borobudur ke Kota Magelang. Peluang ini berlatar belakang bahwa saat ini Kota Magelang merupakan kawasan perkotaan dan banyak terdapat perdagangan dan jasa yang diharapkan dapat melayani para wisatawan.

Penetapan Candi Borobudur sebagai kawasan strategis nasional juga berkorelasi dengan pengembangan jalur pergerakan. Pada beberapa tahun ke depan akan dikembangkan jalan tol dan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas di kedua kota tersebut dan konektivitas menuju Candi Borobudur. Pengembangan kedua jalur tersebut harus dapat menjadi potensi untuk membuat Kota Magelang menjadi lebih berkembang. Jangan sampai pengembangan jalur tersebut justru membuat Kota Magelang menjadi kota mati karena berkurangnya jumlah pergerakan yang melalui Kota Magelang.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Dari Kawasan – kawasan strategis yang ada di dalam RTRW Kota Magelang, focus pengembangan kawasan pada tahun 2020 di antaranya adalah : a). Pengembangan kawasan sport center di daerah Gor Samapta (Sanden); b). Pengembangan kawasan sidotopo; c). Pengembangan kawasan mantyasih; d). Pengembangan kawasan Gunung Tidar; dan e). pengembangan Kawasan Soekarno Hatta.

Pengembangan kawasan gunung Tidar ini dalam rangka mendukung wisata religious Gunung Tidar yang menjadi daya tarik dan destinasi wisata dalam beberapa tahun terakhir ini. Rencana pengembangan Gunung Tidar sebagai Kebun raya saat ini sedang dalam tahapan perencanaan oleh Pemerintah Kota Magelang. Dengan menggandeng LIPI, Pemerintah Kota Magelang melakukan uji kelayakan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya dan berdasarkan hasil penelitian dan Kajian dari LIPI pada tahun 2018, dinyatakan bahwa Kota Magelang layak sebagai Kebun Raya. Terkait dengan hal tersebut , Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2019 menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar.

Terkait dengan focus pengembangan Kawasan Soekarno Hatta , hal ini seiring dengan perubahan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan jasa dan perdagangan dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Pembangunan Jalan Tol Bawen- Jogjakarta dan Pembukaan Jalur Kereta Api Semarang- Borobudur-Yogyakarta. Pemerintah Kota Magelang melalui Anggaran KeMenPUPR mengajukan usulan untuk pembangunan Fly-Over untuk memecah kemacetan di sekitar kawasan tersebut.

Disisi lain beberapa potensi internal Kota Magelang yang menjadi generator perkembangan kota, diantaranya yaitu keberadaan Akademi Militer yang merupakan pusat pendidikan kemiliteran dengan layanan nasional sudah banyak dikenal dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kunjungan ke Kota Magelang semakin meningkat. Kebutuhan akomodasi menjadi daya Tarik investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di Kota Magelang.

Sebagaimana halnya Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer skala nasional di Kota Magelang, dengan ditetapkannya Universitas Tidar sebagai universitas negeri di Indonesia juga menyebabkan terjadinya perubahan fisik sosial di lingkungan sekitar Universitas Tidar, seperti semakin banyaknya tempat kos sebagai tempat tinggal sementara para mahasiswa, semakin menjamurnya tempat usaha untuk melayani kebutuhan mahasiswa, dan semakin banyaknya pendatang seperti mahasiswa yang belajar di Universitas Tidar. Pada nantinya keberadaan Universitas Tidar sebagai universitas negeri akan menjadi tarikan bagi masyarakat dari luar Magelang yang menyebabkan Kota Magelang menjadi semakin padat. Berkembangnya Kawasan UN Tidar akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk kepadatan permukiman, sehingga berpotensi terjadinya penurunan kualitas permukiman. Hal ini harus diantisipasi mulai dari sekarang sehingga potensi tersebut tidak terjadi.

Pengembangan Kawasan UN Tidar sendiri sudah diatur di dalam tata ruang RDTR BWP V yaitu Kawasan Sidotopo. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan terbagi menjadi kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa. Di sekitar Kawasan Sidotopo juga dikembangkan kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan pendidikan disana. Selain itu juga dilakukan peningkatan kelas jalan yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi jalan kolektor primer untuk meningkatkan konektivitas dengan Universitas Tidar di wilayah Kabupaten Magelang.

Secara umum rencana pengembangan Kota Magelang diatur dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

b. Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 701,36$ ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang

memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman, BWK III dan V.

- Kawasan Perdagangan/Jasa

Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.

- Kawasan Perkantoran

Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olahraga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.

- Kawasan Pendidikan

Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ ha.

- Kawasan Kesehatan

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V dan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.

- Kawasan Peribadatan

Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.

- Kawasan Rekreasi / Olah Raga

Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan.

Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi / olahraga antara lain fasilitas rekreasi / olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian / pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan

lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.

- Kawasan Industri / Perdagangan

Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ ha.

- Kawasan Militer

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V. Luas keseluruhan $\pm 151,05$ ha.

- Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 185,56$ ha.

- Kawasan Terbuka Non Hijau

Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa diterapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.

- Kawasan Transportasi (Terminal)

Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 4,85$ ha.

- Kawasan Pemakaman

Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada dengan luas keseluruhan $\pm 35,65$ ha.

- Kawasan Khusus Sektor Informal

Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arah pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukkan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan

unggulan). Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Sebagai upaya peningkatan perkembangan wilayah Kota, dalam perda Nomor 4 Tahun 2012 juga sudah ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Kebijakan dan strategi kawasan strategis terkait sinkronisasi pada dokumen RPJPD Kota Magelang sudah tercakup di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031. Penetapan kawasan strategis kota di Kota Magelang didapatkan dari kawasan strategis yang sebagian teridentifikasi oleh produk RPJP Kota Magelang dan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu :

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk memwadahi pendirian perguruan tinggi negeri. Kebijakan pengembangan dan Penataan Kawasan Sidotopo sebagai pusat bisnis baru di Kota Magelang (Pusat Perdagangan, rekreasi/ pariwisata, pendidikan dengan skala pelayanan lokal dan regional);
- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang memwadahi kegiatan rekreasi masyarakat Kebijakan Pengembangan Kawasan pusat Kota (CBD) sebagai aktivitas bisnis utama di Kota Magelang. ;
- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu nanti juga akan dibangun kolam renang dengan standar internasional;
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan Kebijakan pengembangan dan penataan kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat perdagangan modern dan tradisional skala regional. ;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang memwadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam pentaan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) . Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungai, yaitu: a).Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; b) Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase karena hujan dan drainage tersumbat. Alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah tinggal, ruko dan fasilitas umum berkontribusi terhadap meluapnya air hujan ketika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya daya tampung dan daya serap tanah tanah yang sudah tidak maksimal menyerap air hujan karena tertutup oleh bangunan. Penyebab kedua adalah banjir bandang atau banjir kiriman melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Selain Bencana longsor dan banjir, perlu juga di waspadai terkait dengan bahaya kebakaran terutama pada pemukiman yang padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana Kebakaran yang terjadi sampai dengan tengah tahun 2017 sebanyak 3 kejadian dengan kerugian sebanyak 3 rumah dan korban meninggal sebanyak 2 .Adapun total kerugian sebesar Rp. 50.000.000, -. Jumlah ini meningkat pada semester 2 tahun 2017. Total Bencana kebakaran pada tahun 2017 sebanyak 17 kejadian dengan kerugian sebanyak 10 rumah dan 7 bangunan lainnya dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1 orang dan korban luka – luka sebanyak 1 orang. Total kerugiannya sebesar Rp.2.253.000.000,- Sementara jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebanyak 22 lokasi. Dengan kerugian sebesar Rp. 355.000.000,00.

Data pada semester 1 tahun 2018 terdapat 1 kejadian bencana kebakaran dengan korban 1 orang dan kerugian material sebesar Rp. 3.500.000,- Bencana Kebakaran ini merupakan salah satu bencana yang identik terjadi di wilayah perkotaan yang rentan padat penduduk seperti di Kota Magelang sehingga ke depan butuh perhatian khusus dari Pemerintah agar nantinya bisa mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan meminimalisir adanya banyak korban dan kerugian material yang di sebabkan karena bahaya kebakaran tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan limbah industri atau jasa yang meresap dalam air bawah tanah serta air permukaan (selokan, kolam dan pemukiman), pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas. Indikator penentu prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dilakukan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

2.1.1.9 Aspek Demografi

Salah satu permasalahan terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk karena distribusi penduduk yang tidak merata akan menyebabkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk pada suatu wilayah karena tiap parsial kewilayahan mengalami jumlah penduduk yang tidak merata dan berimbang jumlahnya. Wilayah dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki permasalahan yang cukup kompleks seperti masalah pengangguran, kemiskinan, permasalahan akan kebutuhan lahan, kebutuhan akan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan masalah – masalah sosial lainnya. Terkair dengan Kota Magelang yang dengan wilayah relatif sangat kecil, masalah distribusi penduduk tidak membawa masalah sosial yang relatif besar namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pemerataan pembangunan di Kota Magelang. Jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.992 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,53 km², kepadatan penduduk pada tahun 2018 sebanyak 6.583 jiwa/km². Jumlah penduduk pada tahun 2017 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.673 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,53 km², kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 6.566 jiwa/km². Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup serta menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi merata bagi penduduk di atas lahan yang terbatas .

Tabel 2 - 4
Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011- 2018

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)
2011	119.210	6.579

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)
2012	119.647	6.603
2013	120.158	6.631
2014	120.615	6.656
2015	120.952	6.675
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.566
2018	121.992	6.583

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020 (proyeksi menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Keterbatasan lahan untuk permukiman merupakan masalah yang khas bagi wilayah perkotaan terutama bagi Kota Magelang yang merupakan kota kecil dengan wilayah yang terbatas. Dengan wilayah yang hanya 18.53 km² dan jumlah penduduk yang menunjukkan trend yang meningkat setiap tahun. Hal ini sangat umum terjadi di semua wilayah di Jawa Tengah. Bertambahnya jumlah penduduk dapat disebabkan karena kelahiran atau juga urbanisasi. Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa perkotaan memiliki potensi dan daya tarik yang cukup tinggi.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah di minta untuk lebih tanggap dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemenuhan sarana prasarana umum, serta kebijakan terkait tata ruang lahan kota yang terbatas. Selain itu Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk seperti bencana sosial yang biasa terjadi pada wilayah perkotaan.

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan DispendukCapil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.662 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang pada tahun tersebut sebesar 7.321 jiwa/km². Data Penduduk pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang dengan luas 18.12 km² sebesar 7.299 jiwa/km². Sementara penduduk tahun 2017 sesuai dengan hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang dilakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017, jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 130.857 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar 130.857 jiwa dan luas wilayah sesuai Permendagri 54 tahun 2017 seluas 18.53 km² maka kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebesar 7.062 jiwa/km². Sedangkan data pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk sebanyak 130.030 jiwa maka kepadatan penduduknya sebesar 7.013 jiwa/km². Data kepadatan penduduk secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2 - 5
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 - 2018

2014	2015	2016	2017	2018

Kecamatn / Kelurahan	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	4.302	7.482	4.337	7.478	7.198	3.185	4.287	7.391	4.241	6.426
Jurangombo Selatan	6.951	3.070	7.056	3.122	8.582	8.847	7.271	3.217	7.248	3.419
Magersari	8.780	6.376	8.816	6.388	4.328	7.462	8.699	4.859	8.645	5.542
Tidar Utara	8.493	8.756	8.540	8.804	5.837	4.596	8.533	8.796	8.478	7.707
Tidar Selatan	5.748	4.530	5.787	4.567	8.860	6.420	5.854	4.609	5.839	4.423
Rejowinangun Selatan	8.986	20.753	8.965	20.849	8.873	20.635	8.524	19.830	8.488	22.941
MAGELANG TENGAH										
Magelang	7.913	6.351	7.913	6.330	7.992	6.394	8.017	6.414	8.033	6.478
Kemirirejo	6.026	12.606	6.190	7.034	12.563	12.690	5.893	6.696	5.857	6.810
Cacaban	8.214	9.944	8.231	9.917	6.182	7.025	8.141	9.808	8.149	9.476
Rejowinangun Utara	12.518	12.606	12.514	12.640	8.214	9.896	12.536	12.663	12.303	13.520
Panjang	6.766	19.612	6.809	19.454	6.834	19.526	6.781	19.374	6.731	18.697
Gelangan	8.250	10.135	8.298	10.244	8.335	10.290	8.370	10.333	8.304	9.330
MAGELANG UTARA										
Wates	9.188	7.833	9.202	7.865	9.242	7.899	8.925	7.628	8.898	7.541
Potrobangsari	8.992	6.922	8.966	6.897	8.887	6.836	8.620	6.631	8.478	6.280
Kedungsari	7.475	1.334	7.533	5.664	7.605	5.718	7.506	5.644	7.448	5.642
Kramat Utara	4.860	5.625	4.955	5.763	4.966	5.774	4.843	5.631	4.815	4.864
Kramat Selatan	8.061	5.529	8.148	5.581	8.164	5.592	8.057	5.518	8.075	5.569

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2018 Diskominsta Kota Magelang (sumber data : DispendukCapil)

Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan data BPS terkait proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka sex ratio Kota Magelang Tahun 2017 sebesar $(59.864/ 61.809 \times 100) = 96.85$, sedangkan sex ratio pada tahun 2018 sebesar $(60.064/61.928 \times 100) = 96.99$ artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kota Magelang, akan terdapat pula sebanyak 97 pria di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa di katakan cukup seimbang.

Tabel 2 - 6

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2010-2018 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laki-Laki	58.445	58.686	58.905	59.160	59.384	59.591	59.662	59.864	60.064
Perempuan	60.268	60.524	60.742	60.998	61.231	61.361	61.631	61.809	61.928
Jumlah Total	118.713	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673	121.992
Sex Ratio	96,98	96,96	96,98	96,99	96,98	97,12	96.81	96.85	96.99
Laju Pertumbuhan (%)		0.42	0.37	0.43	0.38	0.28	0.28	0.31	0.26

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2018 (menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Tabel 2 - 7

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang
2010- Tahun 2018 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018 **
Laki-Laki	63.185	63.898	64.569	64.462	64.865	65.185	65.375	64.419	64.013
Perempuan	65.012	65.658	66.386	66.374	66.838	67.076	67.287	66.438	66.017
Jumlah Total	128.197	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	130.857	130.030
Laju Pertum- buhan (%)	-1.91	1.06	1.08	-0.09	0.66	0.42	0.30	-1.36	-0.63

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

** (penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemuktahiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilihan Pilkada)

Tabel 2 - 8

Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2010	128.197	38.490	3
2011	129.556	39.672	3
2012	130.955	40.623	3
2013	130.836	41.246	3
2014	131.703	41.853	3
2015	132.261	42.433	3

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2016	132.662	43.026	3
2017*	130.857	42.997	3
2018**	130.030	43.043	3

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2016. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapli

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

** (penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemuktahiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilihan Pilkada)

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk pada usia produktif 15 tahun sd 64 tahun adalah pada kelompok umur antara usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Hal ini merupakan modal apabila Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2 - 9

Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2012-Smt 1 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
0 – 4 tahun	8.732	8.246	8.154	7.968	7.893	7.797	7.836
5 - 9 tahun	9.213	9.601	9.528	9.529	9.395	9.296	9.253
10 - 14 tahun	9.564	10.101	10.234	10.061	10.062	10.016	9.920
15 - 19 tahun	10.621	10.263	10.221	10.365	10.305	10.121	10.204
20 - 24 tahun	9.128	9.954	10.076	10.170	10.333	10.167	10.059
25 -29 tahun	8.566	9.532	9.322	9.338	9.388	9.447	9.448
30 - 34 tahun	9.134	10.962	10.806	10.390	9.866	9.128	8.853
35 - 39 tahun	9.141	10.364	10.410	10.429	10.521	10.394	10.214
40 - 44 tahun	9.288	10.485	10.274	10.180	10.052	9.581	9.544
45 -49 tahun	8.763	9.833	10.158	10.115	10.251	10.092	9.824
50 - 54 tahun	7.803	9.127	9.082	9.241	9.377	9.134	9.168
55 - 59 tahun	3.974	7.431	7.746	7.978	8.133	8.217	8.264
60 - 64 tahun	3.724	5.150	5.618	6.000	6.302	6.494	6.523
65 -69 tahun	3.252	3.207	3.381	3.523	3.758	4.112	4.236
70 -74 tahun	2.533	2.983	2.897	2.880	2.911	2.537	2.512
75+	2.892	3.597	3.796	4.094	4.115	4.324	4.172

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

******(penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemuktahiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilih Pilkada)

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam ,seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang pada umumnya sebagaimana mata pencaharian penduduk di perkotaan, sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha.

Tabel 2 - 10
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012-Semester 1 tahun 2018

Mata Pencaharian	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Semester 1 tahun 2018**		
							Jumlah	%	+/-
Pertanian	215	215	217	215	195	179	189	0.18	10
Buruh Tani	60	60	61	66	73	69	67	0.065	(2)
Pengusaha	12.680	12.476	12.349	12.209	12.275	11.980	11.872	11.52	(108)
Buruh Industri	23.599	23.682	24.248	24.835	25.541	25.482	25.423	24.68	(59)
Buruh Bangunan	9.058	9.006	9.096	9.138	9.226	9.088	9.060	8.79	(28)
Pedagang	3.040	3.002	2.978	2.935	2.136	2.087	2.816	2.73	729
Angkutan	227	233	240	251	252	242	260	0.25	18
PNS/TNI/Polri	5.925	5.825	5.810	5.772	5.696	5.417	5.307	5.15	(110)
Guru/ Dosen	1.436	1.447	1.452	1.473	1.473	1.428	1.416	1.37	(12)
Pensiunan	3.772	3.667	3.608	3.601	3.570	3.465	3.420	3.32	(45)
Lain Lainnya	52.890	53.376	53.962	53.947	40.388	44.311	43.191	41.92	(1120)
JUMLAH	112.902	112.989	114.021	114.442	100.825	103.748	103.021	100	

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

******(penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemuktahiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilih Pilkada)

Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 25.423 jiwa (24.68%), Pengusaha 11.8720 jiwa (11.52%), Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 189 (0,18%) dan buruh tani 67 (0,065%).

'Kondisi Kota Magelang relatif kondusif . Konflik antar umat beragama di Kota Magelang nyaris tidak pernah terjadi di Kota Magelang. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keaneka ragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang di akui Pemerintah menjadi prioritas Pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi

Modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius dalam periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 11

Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2011-Smt 1 2018 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan							
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017*	Tahun 2018**
Islam	107.627	109.678	109.841	110.856	111.610	112.135	110.877	110.302
Kristen	12.904	12.923	12.770	12.711	12.616	12.566	12.276	12.118
Katholik	7.525	7.517	7.397	7.232	7.241	7.165	6.957	6.867
Hindu	149	146	145	149	150	143	124	123
Budha	658	664	658	639	620	628	601	597
Konghuchu	9	8	8	8	7	8	8	9
Lainnya	23	19	17	17	17	17	22	14

Sumber : Data Strategis Kota Magelang 2009-2018. Diskominsta Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2017 tumbuh 8,88% (atas dasar harga berlaku), lebih cepat dari tahun 2016 yang tumbuh 8,25%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2017 mencapai 7,639 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,9 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (14,47%), Pengadaan Listrik dan Gas (13,0%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (12,65%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2017. Meski tumbuh lambat namun beberapa lapangan usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.6. PDRB (dalam Triliun Rp) dan Indeks Perkembangan PDRB (dalam %) di Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2018 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2018 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB diprediksi mencapai 8,281 triliun rupiah (deviasi 0,71%). Di tahun 2018 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang dengan prediksi seluruh lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif.

Tabel 2-12.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2018

Lapangan Usaha	2016*	2017**	2018***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.383,19	149.480,88
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.215.266,29	1.308.449,79
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	23.009,03	24.446,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.571,97	10.274,19
Konstruksi	1.163.178,22	1.253.077,36	1.348.125,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.098.483,10	1.182.961,31
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	531.675,42	588.818,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	464.170,03	517.523,73
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	382.437,14	417.950,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	398.625,19	442.577,97
Real Estate	224.952,98	241.977,59	264.152,22
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.548,28	30.963,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	890.831,67	966.765,32

Jasa Pendidikan	529.008,56	587.146,02	619.448,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	216.839,28	236.721,71
Jasa lainnya	140.360,73	155.562,97	172.324,25
PDRB	7.015.380,09	7.638.607,53	8.280.985,32

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)

Dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2017 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,346 triliun Rupiah atau sebesar 57,26% dari total PDRB. Di tahun 2017 pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif lebih cepat setelah di beberapa tahun sebelumnya memiliki tren melambat. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (30,67%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (29,30%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,79%). Di tahun 2018 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh mencapai 4,648 triliun Rupiah.



Gambar 2.7. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhannya di Kota Magelang adhb, 2011-2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Meski didominasi oleh konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhan pengeluaran PDRB tertinggi berasal dari perubahan inventori yang di tahun 2017 mencapai sebesar 44,71%. Konsumsi rumah tangga di tahun 2017 tumbuh 8,19% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 5,9% dan konsumsi pemerintah yang tumbuh melambat hanya mencapai 2,36% setelah di tahun 2016 mampu mencapai pertumbuhan sebesar 7,58%. Secara proporsi, besarnya kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB Kota Magelang di tahun 2018 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

Tabel 2-13.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Pengeluaran	2016*	2017**	2018***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4.345.975,83	4.648.356,17
Pengeluaran Konsumsi LNPR	89,900.37	95.207,58	104.694,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1.464.837,70	1.569.572,37
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3.788.753,27	4.115.028,44
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	221.660,20	246.668,86
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	4.175.622,06	4.462.369,06
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	6.453.449,11	6.865.703,72
PDRB	7.015.380,09	7.638.607,53	8.280.985,32

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

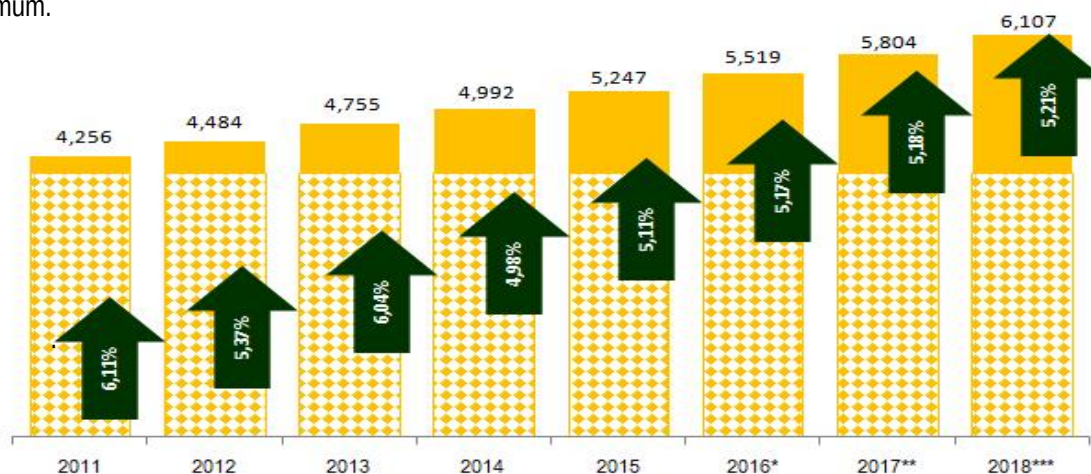
* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)

*** Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,18% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,17%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,27%.

Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2017 mencapai 5,804 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,60%), Jasa Lainnya (8,83%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,25%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.



Gambar 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) di Kota Magelang, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
 ***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,52\%$)

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2018 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2018, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai angka 5,21% (deviasi 0,52%).

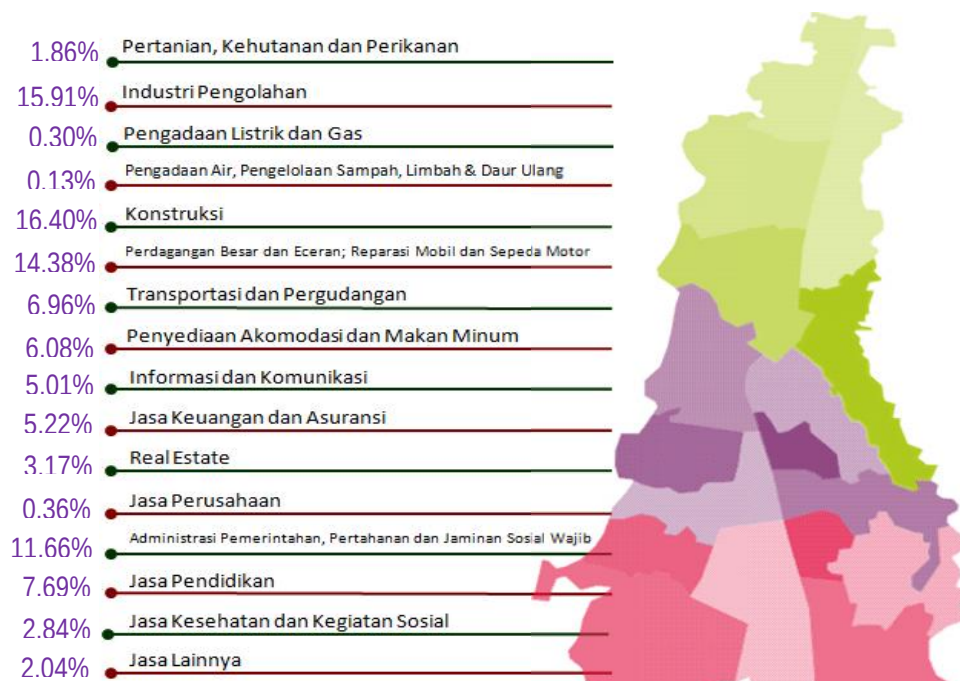
2.1.2.1.3 Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Pada tahun 2017 peran masing-masing lapangan usaha masih sama seperti struktur di tahun 2016.

Tabel 2.14.
 Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017



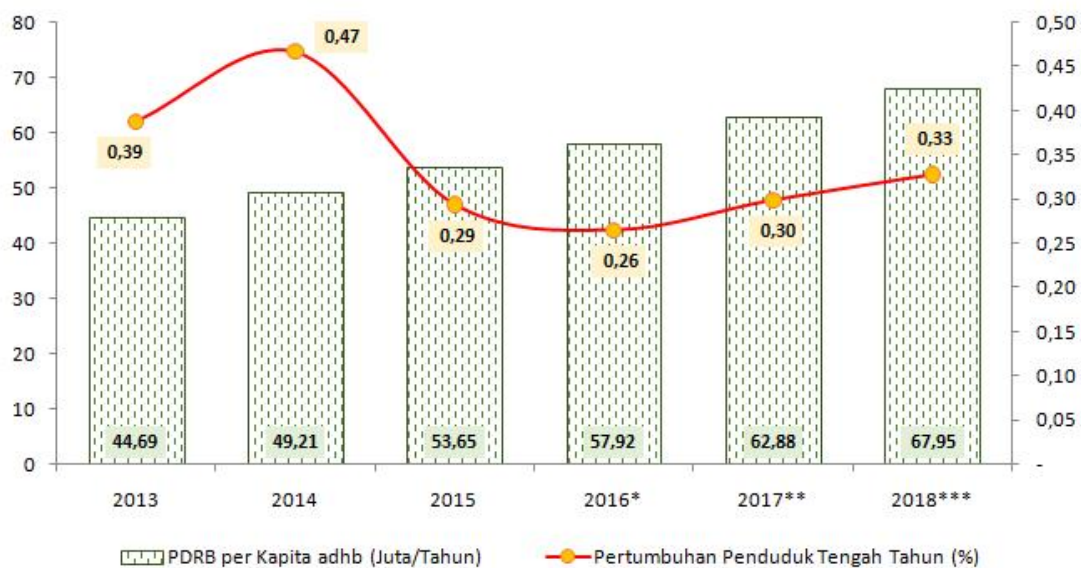
Gambar 2.9. Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

Ketergantungan aktivitas ekonomi Industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab meskipun lapangan usaha berkontribusi cukup signifikan, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2018 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2017 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 5,24 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2018, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,21% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.872 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu tumbuh 8,06%.



Gambar 2.10 . PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun Kota Magelang, 2013-2017 dan Prediksi 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Uraian	2016	2017	2018
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.638.607,53**	8.280.985,32 ***
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.311,98**	6.106.575,37***
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00	121.872,00

Uraian	2016	2017	2018
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	121.293,00	121.673,00	121.992,00

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi adhb $\pm 0,71\%$; deviasi adhk $\pm 0,52\%$)

Mengingat indikator kesejahteraan dari ukuran PDRB per kapita memiliki beberapa kelemahan, maka dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya yaitu berupa indeks gini.

2.1.2.1.5 Inflasi

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2018 tidak ditemukan gejala harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2018 antara lain adalah:

- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI)

Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.

- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
- Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan sistem DataGO
- Melaksanakan kegiatan panel harga pangan
- Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM
- Penguatan kelembagaan TPID

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48. Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan

sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Di tahun 2018 deflasi terjadi pada bulan April (0,05%), Agustus (0,21%) dan September (0,06%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,73%.

Bulan	Kota Magelang		Jawa Tengah		Indonesia	
	Bulanan	YoY	Bulanan	YoY	Bulanan	YoY
Januari	0,22%	2,16%	0,26%	2,18%	0,32%	2,82%
Februari	-0,31%	1,49%	-0,30%	1,51%	-0,08%	2,57%
Maret	0,24%	1,56%	0,30%	1,82%	0,11%	2,48%
April	0,37%	1,98%	0,45%	2,27%	0,44%	2,83%
Mei	0,26%	2,23%	0,33%	2,62%	0,68%	3,32%

Gambar 2.11. Perkembangan Inflasi Januari –Mei di Kota Magelang
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

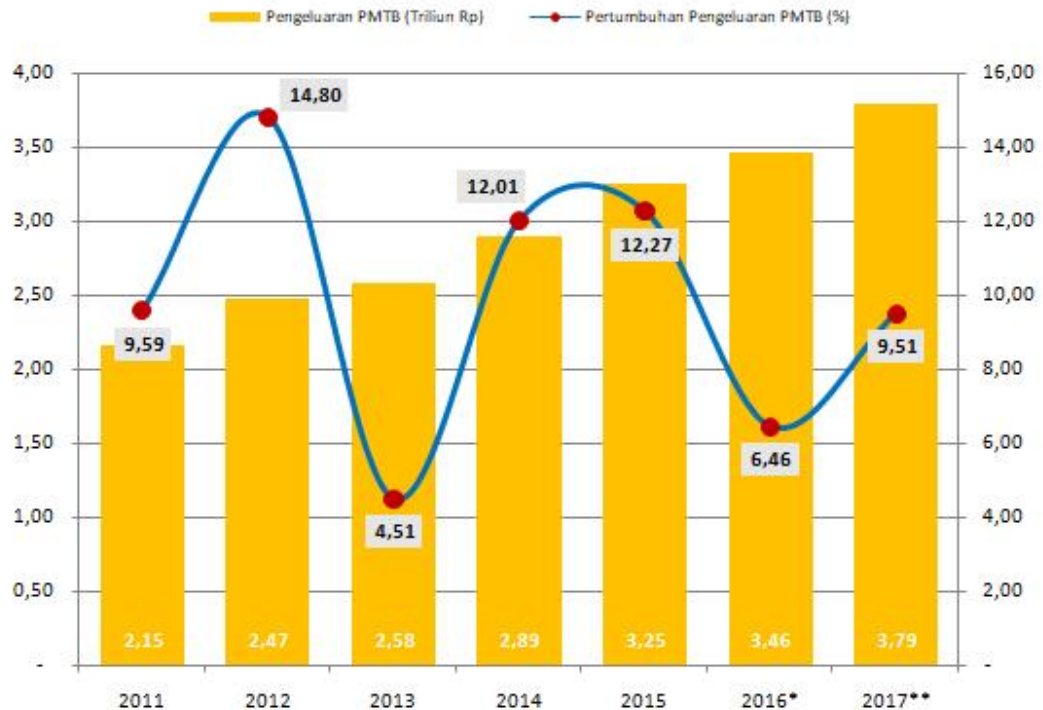
Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48. Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Sampai dengan Mei 2019 inflasi di Kota Magelang terjaga di bawah 3%. Deflasi terjadi pada bulan Februari (0,39%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Mei yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,26% (yoy 2,23%).

2.1.2.1.6 Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal juga meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Sedangkan pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal, termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain.

Pada tahun 2017 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,789 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh 9,51%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 6,46%. Dominasi PMTB di tahun 2017 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,67%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju

PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,54% per tahun sepanjang tahun 2014-2017. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,98% per tahun selama periode 2014-2016. Namun demikian di tahun 2017 pengeluaran PDRB untuk PMTB non bangunan mampu tumbuh cepat mencapai 9,07% setelah di tahun sebelumnya hanya mampu tumbuh 4,30%.



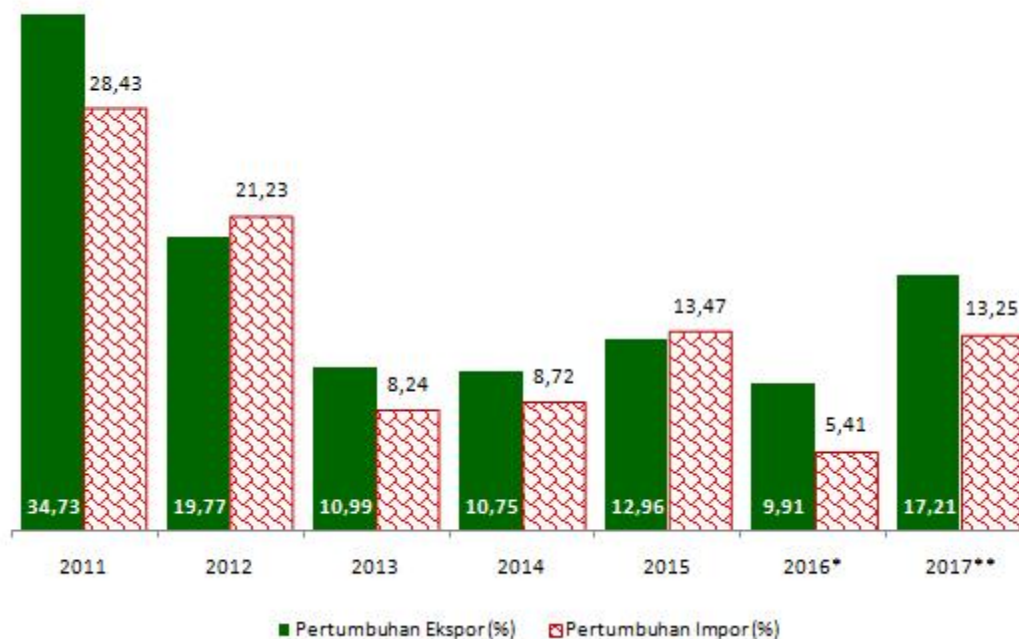
Gambar 2.12. Pengeluaran PMTB adhb(dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB (dalam %) di Kota Magelang, 2011-2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2017 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,15). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,670 triliun rupiah. Diprediksi investasi di Kota Magelang dari proksi PMTB akan terus tumbuh positif di tahun 2018 mencapai interval 4,082 triliun Rupiah sampai dengan 4,115 triliun Rupiah.

2.1.2.1.7 Ekspor Impor

Secara nominal besarnya ekspor dari sisi pengeluaran PDRB di Kota Magelang pada tahun 2017 mencapai 4,176 triliun Rupiah. Defisit neraca perdagangan masih terjadi dengan total pengeluaran PDRB untuk impor sebesar 6,453 triliun Rupiah. Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2017 yang mencapai 17,21%, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor (13,25%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah.



Gambar 2.13. Pola Pertumbuhan Ekspor dan Impor di Kota Magelang, 2011-2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2018 diprediksi pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor, dengan nominal ekspor dalam rentang 4,381 triliun Rupiah sampai dengan 4,462 triliun Rupiah.

2.1.2.1.8 Index GINI

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340.

Tabel 2.16. Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2018

Tahun	Kota Magelang	Jawa Tengah (Maret)	Nasional (Maret)
2007	0,268	0,338	0,376
2008	0,257	0,325	0,368
2009	0,282	0,319	0,367
2010	0,314	0,341	0,378
2011	0,342	0,383	0,410
2012	0,372	0,383	0,410
2013	0,330	0,387	0,413
2014	0,360	0,376	0,406

2015	0,340	0,382	0,408
2016	0,328-0,34*	0,366	0,397
2017	0,328-0,34*	0,365	0,393
2018	0,328-0,34*	0,378	0,389

Sumber: BPS, 2019

* Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat kesejahteraan. Untuk mengetahui pertumbuhan tingkat kesejahteraan sosial yang sesungguhnya, membutuhkan berbagai indikator yang lengkap yang mampu menyuguhkan kebenaran yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

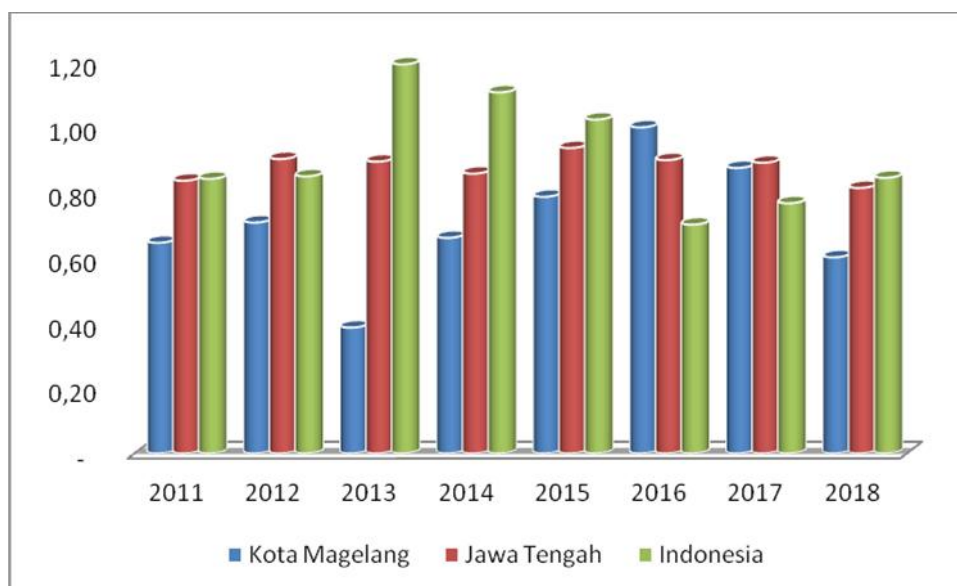
Untuk itu, dalam bahasan ini akan dideskripsikan berbagai indikator kesejahteraan sosial sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Analisis yang disajikan meliputi bagaimana posisi indikator kesejahteraan sosial Kota Magelang dibandingkan dengan wilayah hinterland, regional, maupun nasional. Indikator Kesejahteraan Sosial dalam bahasan ini diantaranya yaitu IPM, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, Dependency Ratio, Kemiskinan dan Pengangguran serta Ketimpangan Pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM yang digagas oleh UNDP pada tahun 1990 dan disempurnakan metodenya pada tahun 2010 merupakan ukuran statistik untuk mengetahui capaian pembangunan manusia. Sebagai objek dan sekaligus subyek dari pembangunan, upaya untuk membangun kualitas hidup manusia tentunya menjadi penting untuk terus ditingkatkan.

Angka IPM di Kota Magelang pada tahun 2018 sebesar 78,31 tumbuh 0,60 persen atau bertambah 0,47 poin dibandingkan IPM tahun 2017, Pertumbuhan IPM tersebut menempatkan IPM Kota Magelang berada pada posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2018 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (71,12) dan nasional (71,39). Akan tetapi dengan memiliki status IPM "Tinggi" ini Kota Magelang masih mempunyai pekerjaan rumah, karena di tahun 2018 Kota Magelang masuk ke tiga kabupaten kota di Jawa Tengah yang memiliki kemajuan pembangunan lambat (0,60%) yaitu bersanding dengan Kabupaten Semarang (0,56%) dan Kabupaten Karanganyar (0,43%).

Selama periode 2011-2018 kemajuan pembangunan manusia tercepat Kota Magelang terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,00 persen sedangkan kemajuan pembangunan manusia paling lambat terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,39 persen, Dalam periode yang sama tercatat angka IPM Kota Magelang selalu di atas angka IPM Nasional maupun Provinsi, namun lebih lambat dalam kemajuan pembangunan manusia.



Gambar 2.14

Tren Pertumbuhan IPM Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (2011-2018)

Dalam metode baru ini setiap wilayah dikategorikan status pembangunan manusianya, yaitu :

- Sangat tinggi, apabila IPM di atas 80
- Tinggi, apabila IPM antara 70-80
- Sedang, apabila IPM antara 60-70
- Rendah apabila IPM kurang dari 60

Berdasarkan status pencapaiannya Kota Magelang berada pada kondisi IPM Tinggi, namun tidak termasuk yang memiliki "Top Movers" atau daerah yang mengalami pertumbuhan IPM tinggi.

Pertumbuhan IPM pada tahun 2018 didorong oleh peningkatan komponen pembentuknya. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan merupakan komponen IPM yang mengalami pertumbuhan paling tinggi. Pada tahun 2018 pengeluaran perkapita yang disesuaikan mencapai 11,994 juta rupiah per tahun atau tumbuh 3,91% dari tahun sebelumnya. Disusul oleh komponen harapan lama sekolah hanya mengalami peningkatan sebesar 0,07% namun masih pada kisaran 13-14 tahun (setara dengan jenjang pertama pada perguruan tinggi). Sementara itu pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia lebih dari 25 tahun) cukup lambat di bawah 1%. Meskipun demikian AHH di Kota Magelang terhitung tinggi mencapai rata-rata 76,72 tahun dengan AHH untuk kaum perempuan yang lebih tinggi (78,61 tahun) dibandingkan dengan kaum laki-laki (74,90 tahun). Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik.

Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,1% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang. Sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas. Dari sisi gender, pada tahun 2018 RLS di Kota Magelang masih sedikit

diungguli oleh kaum laki-laki yang rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun, sementara kaum perempuan di Kota Magelang rata-rata memiliki lama studi sebesar 10 tahun.

Tabel 2.17
Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010- 2018

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017	76,66	13,79	10,30	11.525	77,84
2018*	76,72	13,80	10,31	11,994	78,31

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin mendekati 100 maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG tahun 2018 sebesar 96,07 semakin mendekati angka 100 yang mengindikasikan pembangunan berbasis gender di Kota Magelang sudah sangat bagus, namun menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 96,26 turun sebesar 0,2 persen.

. Tabel 2.18a
Komponen Pembentuk IPG Kota Magelang Tahun 2017-2018

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Rp .000,-)		IPM		IPG
	Laki laki	Perempuan	Laki laki	Perempuan	Laki laki	Perempuan	Laki laki	Perempuan	Laki laki	Perempuan	
2017	74,84	78,55	13,74	13,79	10,92	9,94	12.832	11,363	79,97	76,98	96,26
2018	74,90	78,61	13,75	13,80	10,93	9,95	13,356	11,636	80,44	77,28	96,07

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

Di bidang kesehatan, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2018 AHH perempuan sebesar 78,61 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 74,90 tahun. Dari aspek pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah hampir sama. Pada tahun 2018, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 13 tahun atau hingga tingkat D1 atau tahun pertama kuliah. Selama dua tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi

dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 13,80 tahun, sebesar 0,05 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 13,75 tahun. Dari sisi rata-rata lama sekolah, laki laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 10,93 tahun atau hingga kelas 10 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 9,95 tahun. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam hal ekonomi. Di bidang ini, perempuan tertinggal dibanding laki-laki. Pada tahun 2018, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 11,636 juta pertahun. Angka ini di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 13,356 juta per tahun, sedangkan pertumbuhan perkapita penduduk perempuan hanya naik 2,35 % dan untuk penduduk laki laki brada di angka 3,92%. Kondisi ini mengakibatkan turunnya Angka IPD tahun 2018 di Kota Magelang. Perlu terobosan yang lebih nyata untuk lebih memberdayakan kaum perempuan agar mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi dengan mengajak permpuan di Kota Magelang untuk lebih aktif di bidang ekonomi.

Tabel 2.18b
Nilai IPG, IDG dan IPM Kota Magelang Tahun 2013-2018

Tahun	IPG	IDG	IPM
2013	95,36	68,03	75,29
2014	95,45	78,82	75,79
2015	95,81	75,83	76,39
2016	NA	NA	77.16
2017	96,26	76,28	77.84
2018	96,07	77,83	78,31

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

IDG menitik beratkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. IDG menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Nilai IDG semakin mendekati 100 mengindikasikan pemberdayaan gender yang semakin baik. Sementara nilai masing-masing komponen IDG menunjukkan persentase keterlibatan perempuan tersebut dalam kegiatan. IDG Kota Magelang 2017 sebesar 76,28 menunjukkan partisipasi perempuan di Kota Magelang sudah cukup bagus yaitu dukungan terbesar adalah keterbandingan partisipasi perempuan terhadap laki-laki secara profesional yaitu 51,78 persen, diikuti sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebanyak 41,83 persen dibandingkan laki-laki dan keterwakilan perempuan sebesar 20 persen.

.Tabel 2.19. Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2017

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Prempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81
2016	NA	NA	NA
2017	20.00	51.78	41,83

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

2.1.2.2.3 Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan sebuah dilema pembangunan, dan di manapun penduduk miskin akan selalu ada. Pada daerah dengan pendapatan per kapita tinggi belum tentu tidak ada penduduk miskin. Hal ini yang menyadarkan bahwa ekonomi tidak hanya berbicara soal; pertumbuhan, melainkan juga pemerataan sehingga masalah kemiskinan dapat ditanggulangi. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah (kondisi sumber daya alam, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam) dan kemiskinan buatan (ketidakmampuan masyarakat mengakses sarana ekonomi dan fasilitas yang tersedia}. Terkait kondisi tersebut yang dapat diperbuat oleh pengambil kebijakan adalah menekan bagaimana agar penduduk miskin karena buatan semakin turun/berkurang, walaupun sangat sulit untuk mencapai 0% karena masalah alamiah.

Ada berbagai batasan dan cara mendefinisikan penduduk miskin, namun dalam sebuah perencanaan kebijakan yang lebih penting adalah konsistensi data. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Tabel 2.20. Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (jiwa)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.957	121.193	121.673	121.992
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	13.100	12.100	11.800	11.019	10.920	10.640	10.630	9.590
Jumlah Penduduk Miskin (persen)	11,06	10,31	9,8	9,14	9,05	8,79	8,75	7,87
P1	1,61	1,48	1,45	0,94	1,39	1,20	1,30	1,07
P2	0,36	0,33	0,37	0,20	0,31	0,23	0,32	0,21
Garis Kemiskinan	280.877	304.695	350.554	376.143	405.228	425.191	450.908	476.582

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2011-2018 terjadi peningkatan Garis Kemiskinan di Kota Magelang. Pada tahun 2018 Garis Kemiskinan di Kota Magelang meningkat sebesar 25.674 rupiah atau 5,39 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan Garis Kemiskinan tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

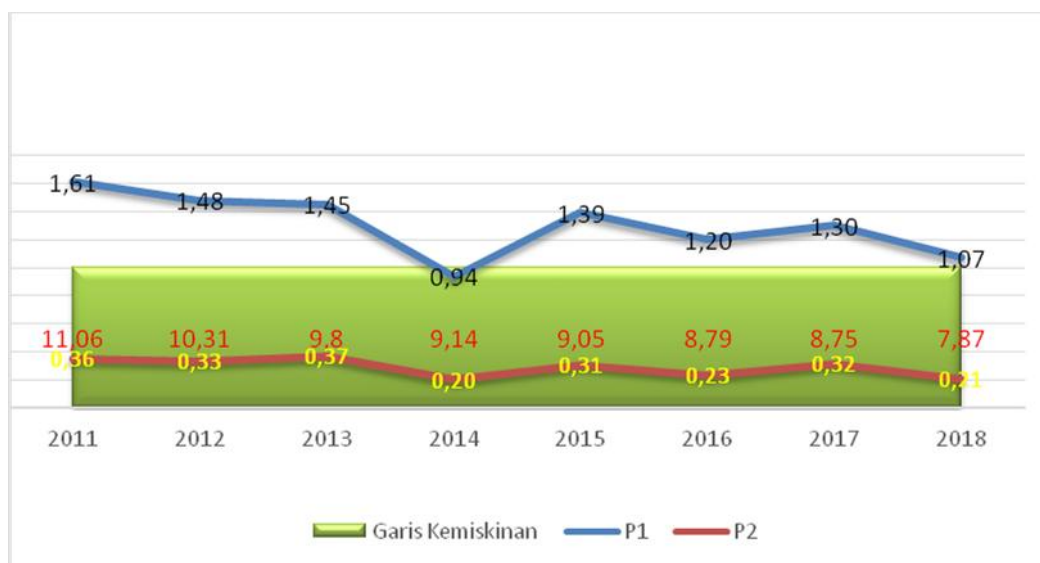
Tren penduduk miskin di Kota Magelang menurun dari periode tahun 2011-2018. Persentase penduduk miskin di Kota Magelang pada tahun 2018 sebesar 7,87 persen, menurun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 8,75

persen. Kenaikan Garis kemiskinan di Kota Magelang selama periode 2011 - 2018, berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin yang terus mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun pendapatan penduduk Kota Magelang meningkat lebih besar sehingga dapat menjaga daya belinya. Peningkatan pendapatan penduduk Kota Magelang yang lebih tinggi daripada perubahan harga ini menjadikan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun



Gambar 2.15
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Magelang
2010 -2018

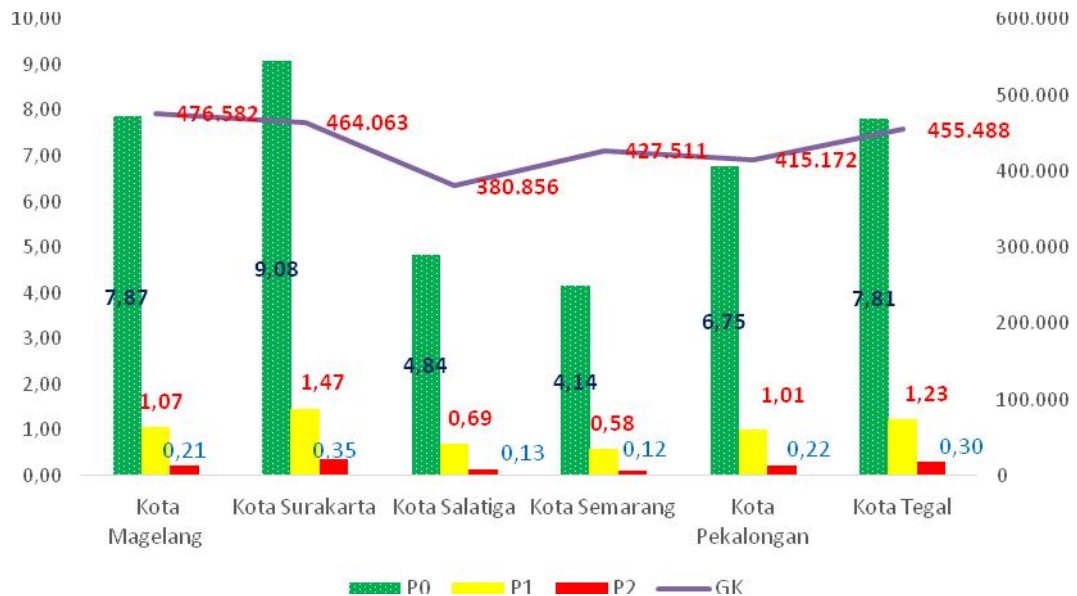
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan wilayah dalam mengurangi tingkat kemiskinan (persentase dan jumlah penduduk miskin) namun ada dimensi lain yang secara bersamaan harus turut diselesaikan. Permasalahan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan tergambarkan dalam tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keragaman pendapatan antar penduduk miskin yang tergambarkan dalam tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding 2017 yaitu dari semula 1,30 menjadi 1,07 yang berarti bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati angka garis kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan di tahun 2018 ada peningkatan pendapatan penduduk miskin di Kota Magelang dibanding 2017. Seperti halnya tingkat kedalaman kemiskinan, perkembangan nilai tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kota Magelang selama periode 2011-2018 juga terlihat fluktuatif. Nilai tingkat keparahan kemiskinan Kota Magelang tahun 2018 sebesar 0,21 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,32. Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2018 terlihat bahwa indeks semakin rendah yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.



Gambar 2.15. Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2010-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi atau bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadikan persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2018 masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kota Salatiga, Pekalongan, Semarang dan Tegal. Demikian juga dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, untuk indek kedalaman kemiskinan Kota Magelang masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Surakarta. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Kota Magelang berada di peringkat 3 setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut ada hal yang masih dapat dibanggakan, meskipun Kota Magelang memiliki garis kemiskinan paling tinggi diantara 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah namun tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan Kota Magelang tidak berada dalam posisi posisi paling tinggi Hal ini mengindikasikan bahwa meski biaya hidup untuk masyarakat miskin Kota Magelang lebih tinggi dari Kota lainnya di Jawa Tengah, namun hasil pembangunan Pemerintah Kota Magelang dapat dinikmati masyarakat miskin terbukti dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih rendah diantara beberapa wilayah kota Jawa Tengah lainnya..



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.16. Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017

Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

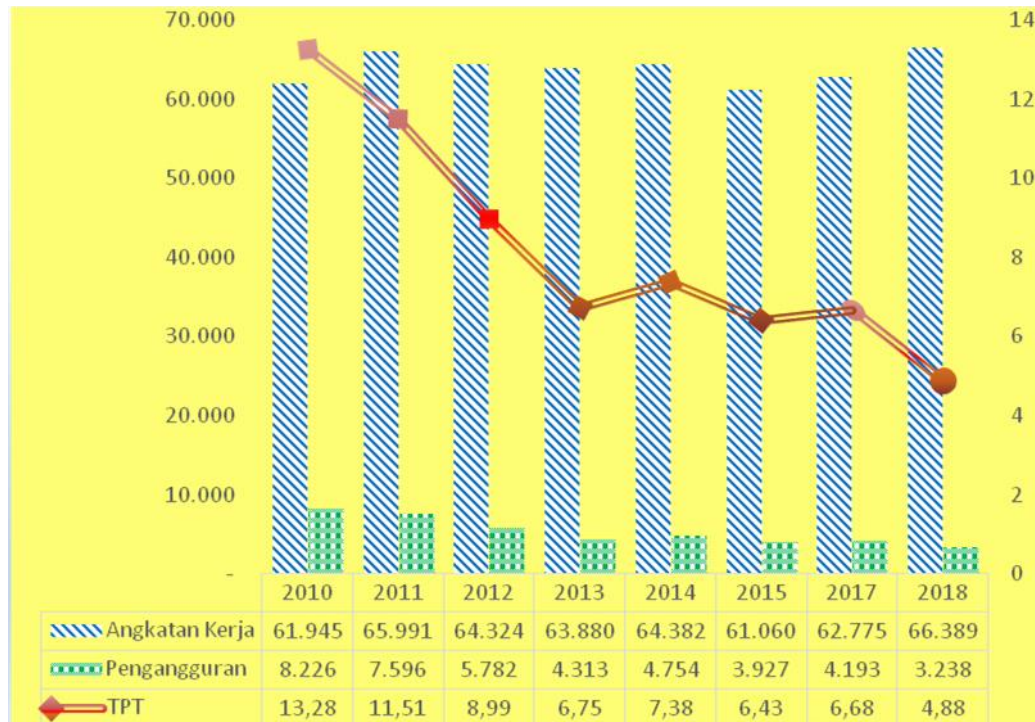
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan parsial dan sektoral. Sebaliknya harus dilakukan secara sistemik, terencana dan terintegrasi. Koordinasi lintas sektoral, sinkronisasi beragam program dan sinergi berbagai kegiatan perlu diwujudkan. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan yang telah dijalankan di Kota Magelang dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengingat lingkup persoalan lebih kecil dan operasionalisasi proses pemberdayaan dapat dilakukan berdasarkan kondisi lokal yang spesifik. Untuk itu dibutuhkan berbagai reorientasi kebijakan sehingga strategi tersebut dapat beroperasi

2.1.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian, penduduk merupakan faktor produksi penting dalam usaha memproduksi barang dan jasa. Berbeda dengan beberapa faktor produksi lainnya, tenaga kerja sangat peka terhadap perubahan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang pesat di suatu daerah, akan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja. Sebaliknya, keterlambatan pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu dapat menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja untuk keluar dari daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan memberi pengaruh yang positif terhadap masalah ketenagakerjaan. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif akan menyebabkan banyaknya pengangguran.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994), masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari situasi di mana telah terjadi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia bahkan terus bertambah, antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja. Selain itu pengangguran juga dapat disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis

ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan serta berdampak terhadap timbulnya berbagai masalah kerawanan sosial di suatu wilayah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemerintah Kota Magelang menargetkan penurunan angka pengangguran secara bertahap dari tahun ke tahun.



Gambar 2.17
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang
2010 – 2018

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode 2010 – 2018 (minus tahun 2016 karena keterbatasan sampel Sakernas) angka TPT Kota Magelang menunjukkan trend yang menurun. TPT Kota Magelang pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017 dari 6,68 persen menjadi 4,88 persen. Penurunan TPT Kota Magelang disebabkan peningkatan jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2018, juga diikuti jumlah penduduk yang bekerja dari 58.582 orang pada tahun 2017 menjadi 63.151 orang pada tahun 2018. Strategi menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 2.20. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2018

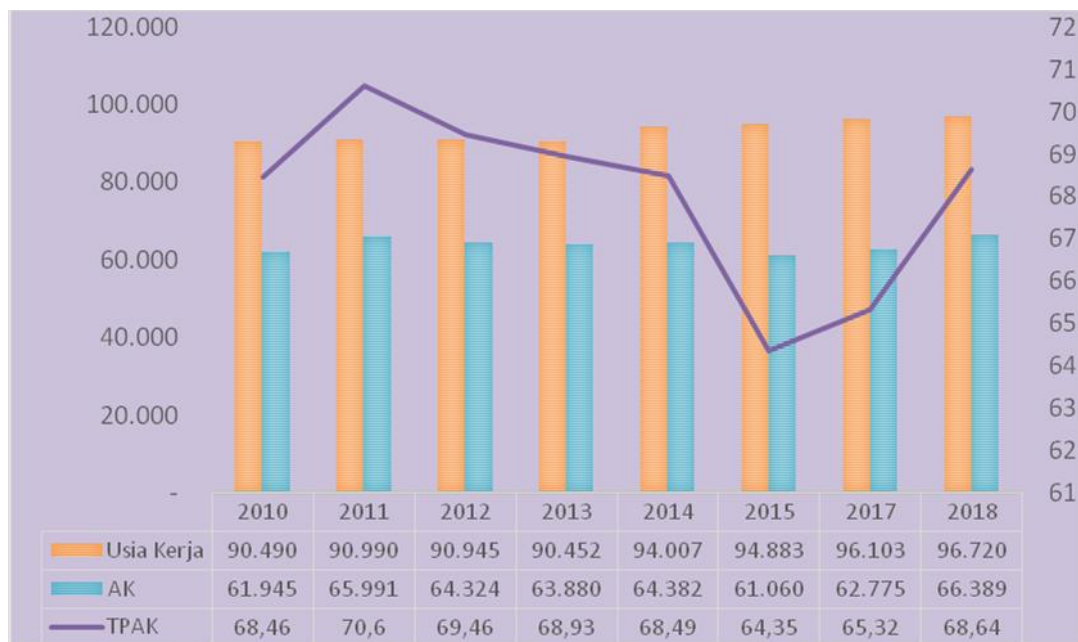
Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja (ribu orang)	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			
2010	53,719	8,226	61,945	13,28	68,46
2011	58,395	7,596	65,991	11,51	71,83
2012	58,542	5,782	64,324	8,99	69,45
2013	59,567	4,313	63,880	6,75	68,37
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	Na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32
2018	63,151	3,238	66,389	4,88	68,64

Sumber: BPS, 2018

* Tidak ada publikasi

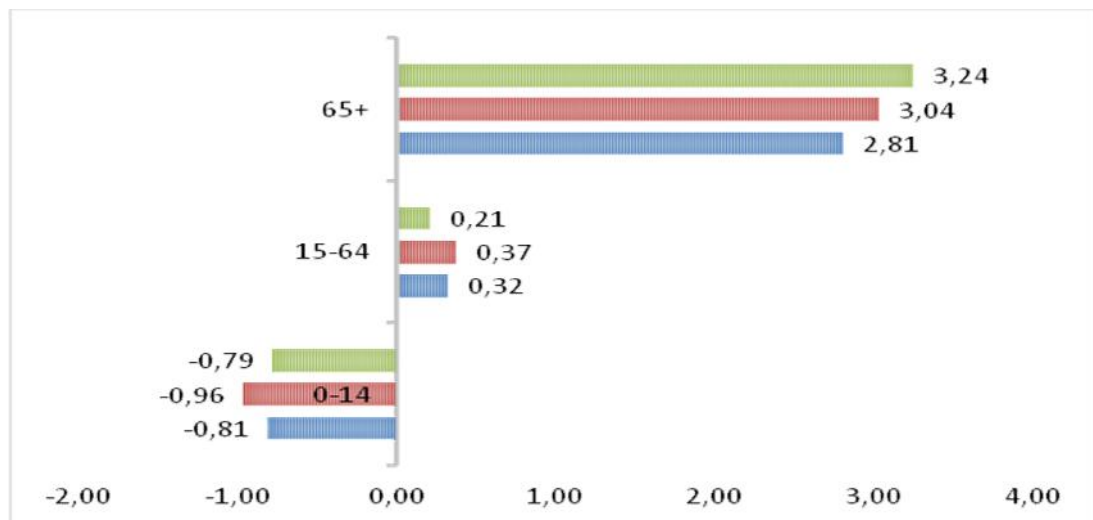
2.1.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (labour supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dari gambar di bawah dapat dilihat TPAK dalam kurun waktu 2010-2018 memiliki fluktuasi yang relative kecil, yaitu antara 64,35% (tahun 2015) dan 70,60% (tahun 2011). Namun dalam periode 3 tahun terakhir (2015-2018) TPAK di Kota Magelang menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan kondisi sosial ekonomi Kota Magelang relative membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Kota Magelang. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada.



Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Magelang 2010-2018

2.1.2.2.6 Angka Beban Tanggungan Penduduk (*Dependency Ratio - DR*)



Gambar 2.19 Perkembangan penduduk menurut kelompok umur

Pada tahun 2018 diproyeksi penduduk Kota Magelang mencapai 121.994 jiwa tumbuh 0,26 persen dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif mencapai 0,21 persen. Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dipublikasi oleh BPS Kota Magelang, dapat diketahui bahwa bonus demografi telah dinikmati oleh Kota Magelang sejak tahun 2010, dimana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk kelompok usia non produktif. Pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang cukup baik dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,5% di setiap tahunnya. Angka ketergantungan juga menunjukkan rasio yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal

tersebut menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif di Kota Magelang semakin turun.

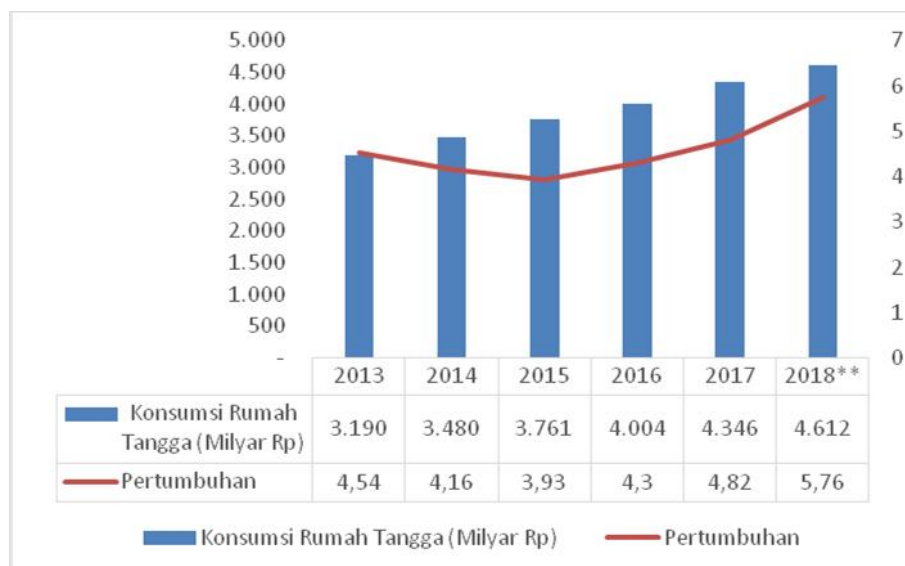
Tabel 2.21
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2018

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)	26.107	25.897	25.650	25.450
Proyeksi Pendudukk Usia 15-64 tahun (jiwa)	85.260	85.534	85.851	86.032
Proyeksi Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)	9.585	9.862	10.171	10.512
Proyeksi Penduduk Akhir Tahun (jiwa)	120.952	121.293	121.673	121.994
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	41,86	41,81	41,72	41,80

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018 (diolah)

2.1.2.2.7 Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif dengan tren meningkat sejak tahun 2013. Pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,346 triliun Rupiah atau sebesar 56,89 persen dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (30,67%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (29,30%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,79%). Di tahun 2018 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 5,17 persen dengan nominal 4,612 triliun Rupiah.



Gambar 2-20. Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2013-2018
Sumber: BPS, 2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2017 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan, kubrosiswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

Para pelaku kesenian budaya ini juga sering diminta ambil bagian dalam kegiatan FK-Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional), salah satu mitra Pemerintah Kota Magelang, dalam menyampaikan aneka pesan dari Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakat melalui jalur / media alternatif. Selain itu, ada pula event / acara yang sudah terjadwal, seperti pertunjukan di kawasan Monumen Mantyasih.

2.1.2.3.2 Olah Raga

Mulai tahun 2008, Kota Magelang membangun sebuah stadion, yaitu Stadion Madya yang berlokasi di Kelurahan Kramat Selatan. Pada tahun 2015, nama Stadion Madya berganti menjadi Stadion Moch Soebroto. Nama tersebut dipilih dengan maksud untuk mengenang dr. H. Moch Soebroto, mantan Walikota Magelang, yang menjabat tahun 1971-1981. Saat ini, stadion sudah bisa digunakan untuk berlatih dan bertanding cabang olah raga sepak bola dan atletik.

Pada tahun 2017, Kota Magelang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah perayaan puncak acara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2017. Penyelenggaraan acara dilaksanakan di Stadion Moch Soebroto pada hari Sabtu, 9 September 2017. Perayaan di tahun 2017 ini mengambil tema "Olahraga Menyatukan Kita". Selain itu, juga dikumpulkan 90 tanah dan air dari berbagai daerah di Indonesia yang diambil saat pelaksanaan Gowes Pesona Nusantara, dan disatukan di Monumen Tanah dan Air Nusantara di kawasan Gunung Tidar.

Prestasi Kota Magelang dalam bidang olah raga, di tahun 2018 ada beberapa prestasi di tingkat regional, yaitu: 4 peringkat di POPDA SD, 25 peringkat di POPDA SLTP, dan 21 peringkat di POPDA SLTA. Untuk tingkat nasional, ada 12 raihan peringkat dan Internasional 1 peringkat.

Beberapa klub olah raga yang hidup dan berkembang di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 - 22
Cabang Olahraga dan Jumlah Klub di Kota Magelang

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
01.	Sepak Bola	5	19.	Sepak Takraw	2
02.	Bulu Tangkis	20	20.	Tenis Lapangan	11
03.	Panahan	1	21.	Gulat	2
04.	Panjat Tebing	4	22.	Golf	3
05.	Basket	16	23.	Judo	1
06.	Angkat Besi Binaraga	2	24.	Catur	2
07.	Tarung Derajat	1	25.	Kempo	3
08.	Tenis Meja	2	26.	Karate	5
09.	Tinju	2	27.	Menembak	1
10.	Wushu	1	28.	Bilyard	1
11.	Bridge	2	29.	Pencak Silat	5
12.	Dansa	5	30.	Balap Sepeda	2
13.	Tae Kwon Do	10	31.	Renang	4
14.	Atletik	2	32.	Bola Volly	3
15.	Arung Jeram	1	33.	Senam	32
16.	Judo	1	34.	Selam	1
17.	Futsal	20	35.	Paralayang	1
18.	Sepatu Roda	1	Jumlah		175

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang, 2018

Untuk prasarana olah raga, terdapat beberapa di Kota Magelang:

No	Prasarana	KMU	KMT	KMS	Total
1	Lapangan Bola Voli	45	16	18	79
2	Lapangan Bola Basket	7	12	6	25
3	Lapangan Tennis	4	3	5	12
4	Lapangan Futsal	3	4	1	8
5	Stadion / Lapangan Sepak Bola				13
6	Lapangan Bulu Tangkis				51
7	Gedung Olah Raga				9
8	Kolam Renang (Umum, fasilitas Hotel tidak termasuk)				3
9	Sasana Tinju / Beladiri				8
TOTAL					206

Dari 206 fasilitas, 170 di antaranya kondisinya masih baik, dan sisanya 36 unit kondisinya kurang baik.

2.1.2.3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu unggulan dari Kota Magelang, dengan keunggulan kompetitif dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga (terutama siswa sekolah) Kota Magelang telah mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional melalui berbagai prestasi yang berhasil diraih, antara lain:

- Pada tahun 2015, 2 siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang meraih peringkat 1 pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu Nebiba Abdul (bidang Kimia) dan Muhammad Fadlil Ismail (bidang Astronomi).
- Siti Mukaromah, siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, meraih juara 3 Olimpiade Sains Terapan Nasional Siswa SMK bidang lomba Matematika non Teknologi (2015).
- Jingga Mutiara Windyarahma, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Bidang Kebumihan (2016).
- Annida Naufal Irvania, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (2016).
- Reynaldo Vergiawan Ridho, siswa SLB-B YPPALB, meraih peringkat 1 Lomba Keterampilan Siswa SMALB tingkat Provinsi, Mata Lomba Informasi dan Teknologi (2016).
- Shada Sukma Syahidah, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP) IV SMP tingkat Provinsi dengan Judul Makalah "Sosialisasi Teknik Penjernihan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Lingkungan Sekolah".
- Khanza Wiranda, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih medali perak pada 14th International Mathematic Contest yang berlangsung di Singapura pada 27-30 Juli 2018.

Selain prestasi yang diraih siswa-siswinya, ada pula prestasi yang diraih warga dari aneka kegiatan terkait IPTEK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang melalui kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2013 (kecuali tahun 2012), temuan KRENOVA Kota Magelang selalu mendapatkan penghargaan 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 perwakilan Kota Magelang berhasil meraih peringkat 15 dan juara 3 favorit pengunjung laman web Krenova Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, yang berhasil masuk ke Krenova tingkat Provinsi, pada tahun 2017: temuan dengan nama Umbaran Lipat & Sepatu Tuna Netra; dan pada tahun 2018: Bantur Grill.

Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka mulai tahun 2010 Pemerintah Kota Magelang melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan litbang daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 23
Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2010	1. Pembangkit Listrik Terbaru Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN; 2. Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari; 3. Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011	Perakitan dan pembuatan kendaraan Spyder, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012	1. Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi; 2. Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strawberry guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang; 3. Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.
2013	1. Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat "Multi Directional Cycle". 2. Pemanfaatan Tong "Takashimura" untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. 3. Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.
2014	1. Persepsi Masyarakat terhadap City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Studi kasus: Peserta didik dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Umum Kota Magelang. 2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan. Studi kasus: Peran Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.
2015	1. Efektifitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.
2016	1. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Gunung Tidar sebagai Destinasi Wisata.

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2018

Prestasi lainnya yang diraih Pemerintah Kota Magelang dalam bidang IPTEK dan penerapannya adalah:

1. Anugerah prestasi tertinggi di tingkat nasional di bidang IPTEK, yaitu penghargaan Anugerah RISTEK dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut (2009-2011). Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Kabupaten

dan Kota yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun IPTEK, sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Pada tahun 2012 penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Kabupaten/kota dialihkan pada Provinsi, sehingga pemerintah Kota Magelang tidak memiliki peluang mendapatkan Anugerah RISTEK. Pada tahun 2016, penghargaan ini kembali dilaksanakan, dan Kota Magelang berhasil menjadi nominator / finalis (3 besar) peraih penghargaan Budhipraja, serta meraih penghargaan Widigdapura. Untuk tahun 2017, Kota Magelang berhasil meraih peringkat 3 Budhipraja, dan tahun 2018 meraih peringkat 1 Budhipraja.

Budhipraja adalah apresiasi pemerintah melalui Kemenristekdikti terhadap kabupaten / kota dalam mengimplementasikan teknologi untuk peningkatan daerah yang diukur dalam 6 aspek, yaitu perencanaan dan inisiasi, SDM, infrastruktur, jaringan, dan hasil inovasi.

Widigdapura adalah anugerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota atas dasar pembinaannya terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten / kota dalam mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, terpilih nominasi daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna terbaik di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Wonogiri dan Kota Magelang sebagai Daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016.

2. Penghargaan 102 Inovasi (tahun 2010),
3. Penghargaan 103 Inovasi (tahun 2011), dan
4. Best Practice APEKSI, 2012
5. Innovative Government Award (IGA) tahun 2017, peringkat 5 kategori Kota.
6. Innovative Government Award (IGA) tahun 2018, Top 10 Kota Sangat Inovatif.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga sudah mengadopsi penerapan Smart City. Pada tahun 2015, Kota Magelang meraih predikat Smart City untuk kategori Smart Economy Kota Kecil, yang diselenggarakan oleh ITB & Kompas dalam kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI). Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan ITB mulai menyusun Roadmap Smart City, yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SmartCity di Kota Magelang. Pada Tahun 2017, pada kegiatan penilaian Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI), Kota Magelang kembali meraih predikat Kota Cerdas untuk kelompok kota kecil.

Model yang digunakan dalam Roadmap SmartCity adalah Garuda SmartCity Model (GSCM). Dengan menggunakan model ini, pada tahun 2016 Kota Magelang dapat digolongkan dalam kelompok tingkat kematangan SmartCity Scattered. Kemudian pada tahun 2017, pada kegiatan penilaian IKCI, Kota Magelang sudah mulai memasuki tahapan kematangan Integrated, sesuai target RPJMD.

Pada Model GSCM, komponen SmartCity dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Smart Economy:
 - Pusat Kegiatan ekonomi
 - Pendidikan

- Industri
- Sumber Daya
- 2. Smart Society:
 - Keamanan
 - Kesehatan
 - Layanan publik / pemerintah
 - Transportasi
 - Komunitas
- 3. Smart Environment:
 - Energi
 - Lingkungan Hidup
 - Tata Ruang
 - Air
 - Sampah
- 4. Enabler:
 - ICT
 - People
 - Governance

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga telah melengkapi diri dengan beragam teknologi, beberapa di antaranya adalah:

- Web resmi Pemerintah Kota Magelang, untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat secara cepat.
- Web resmi OPD, dimana di dalam website tersebut terdapat aplikasi dan informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- Penggunaan Sistem Informasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan, seperti e-KTP (KTP Elektronik), SIMPUS (SIM PUSKESMAS), Perijinan, SIM Keuangan, DataGO, dan lain-lain.
- Free-access WIFI & Internet di beberapa tempat umum, seperti Alun-alun.
- Traffic Management Center, yang memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik dengan menggunakan CCTV. Selain itu, juga dipasang 2 buah VMS (Video Message Service) yang dipasang di persimpangan Kebonpolo dan Perbatasan Pakelan, yang bisa diupdate untuk memberitahukan informasi penting kepada para pengguna jalan. Beberapa persimpangan juga telah menggunakan ATCS (Automatic Traffic Control System), yang secara dinamis mengkalkulasi lama nyala lampu merah / hijau pada tiap simpang, dengan memperhitungkan panjang antrian di tiap jalur.
- Media sosial Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan channel “Monggo Lapor” di Facebook, Pemerintah Kota Magelang juga membuka layanan laporan dari masyarakat terkait hal apapun di Kota Magelang.
- Pengembangan aplikasi “Magelang Cerdas” yang mengintegrasikan beberapa layanan ke dalam 1 portal.
- Interkoneksi jaringan Fiber Optic (FO) dari OPD yang ada di Kota Magelang, yaitu 29 OPD, 14 dari 17 kelurahan, 9 puskesmas / faskes, 2 pusat kuliner, 7 dari 13 SMP Negeri, dan 7 lokasi publik.

- Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar di Kota Magelang. Harga dipantau dan diperbarui tiap hari. Apabila ada gejolak di luar batas kewajaran, maka Walikota dan Gubernur akan mendapat notifikasi.
- Pelatihan e-Commerce untuk para pelaku ekonomi (terutama UMKM) di Kota Magelang.
- Di beberapa lokasi sentra kuliner, juga telah dijalin kerjasama antara para pedagang dengan beberapa bank atau aplikasi pembayaran cashless. Di gerobak mereka telah tertempel QR-Code (kadang lebih dari 1) yang dapat digunakan oleh aplikasi smartphone untuk melakukan pembayaran. Melihat perkembangan di daerah lain, bukan tidak mungkin di kemudian hari metode/aplikasi lain yang sudah banyak digunakan juga akan turut bergabung.
- Pemasangan CCTV di tiap persimpangan lalu lintas dan tempat-tempat strategis / rawan.
- Public Safety Center (PSC) 119, yang berusaha menangani kedaruratan sebelum dikirim ke rumah sakit.
- Pengembangan sumber-sumber energi alternatif / terbarukan, dengan membangun MCK Komunal dan Biodigester di TPA Banyuurip. Di MCK Komunal, limbah tinja diproses menjadi biogas, yang bisa dipakai untuk memasak, sedangkan di TPA Banyuurip, biogas dari sampah digunakan untuk pembangkit listrik, yang digunakan untuk penerangan TPA dan rumah-rumah warga sekitar TPA.
- Penggunaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Alat Pengatur Informasi Lalulintas (APILL) bertenaga surya.
- Pemantauan RTRW berbasis GIS online (web), yang memudahkan masyarakat / investor dalam melakukan pengecekan terhadap sebidang lahan di Kota Magelang, terutama terkait peruntukan dan penggunaan.

2.1.2.3.4 Agama

Sikap toleransi saling menghargai antar umat beragama di Kota Magelang merupakan salah satu kunci harmonisnya umat beragama di Kota Magelang. Rasa kebersamaan tanpa memandang status agama di Kota Magelang menjadi tolok ukur keberhasilan hidup bersama. Pada tahun 2017, penduduk Kota Magelang terdata beragama Islam sebanyak 84,73%, Kristen Protestan sebanyak 9,38%, Kristen Katolik sebanyak 5,32%, Hindu sebanyak 0,09%, Budha sebanyak 0,46%, dan Kong Huchu 0,02%.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang dapat dilihat dari jarak antara tempat ibadah berbagai agama yang tidak pernah ada perselisihan ataupun perbuatan yang saling merugikan. Menurut data tahun 2017, jumlah masjid sebanyak 160 buah, musholla sebanyak 217 buah, gereja Katolik sebanyak 2 buah, gereja Protestan sebanyak 26 buah, vihara ada 2 buah dan klenteng sebanyak 2 buah, serta rumah ibadah ada 4 buah. Suasana kondusif seperti ini tentu sejalan dengan dengan Visi Kota Magelang, yaitu "Terwujudnya Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas dilandasi masyarakat sejahtera dan religius".

Pada tahun 2017, jemaah yang berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji berjumlah 119 orang yang terdiri dari 46 pria dan 73 wanita. Jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 160 orang.

2.1.3 ASPEK LAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan urusan pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan yang termasuk dalam Misi 2 RPJM Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 10 program 46 indikator yang terdistribusi dalam 8 sasaran, dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 terlihat pada tabel di sebagaiberikut :

Tabel 2 - 24

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	67%	52.54%	78.42%	▼
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	54%	52.11%	96.49%	►
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	100.00%	121.45%	121.45%	●
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	120%	116%	122.43%	105.54%	●
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84%	80.00%	195.43%	244.28%	●
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100%	90.00%	229.79%	255.32%	●
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1:136	0.65%	0.00	►
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	1:290	0.37%	0.00	►
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	6.00%	0.37	►
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14	4.91%	0.35	►
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0.01	0.06%	5.83%	▼
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0.04	0.12%	3.01%	▼
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0.001	0.16%	159.10%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	150%	146.56%	97.71%	▶
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	165%	160%	0.00%	-	▶
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	70%	100.00%	142.86%	●
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24 pelajar	36 pelajar	17	-	●
		Cakupan kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	NA	0,5	1	200.00%	●
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	NA	90%	142.86%	158.73%	●
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	90%	100.00%	111.11%	●
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	40%	72.00%	180.00%	●
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	97.31%	0.00%	-	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	20.00%	28.75%	143.75%	●
		Jumlah Juara FASI	1	-	0	-	▼
		Jumlah Juara MTQ	2	2	0	-	▼
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35.75%	73.42%	205.36%	●
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14.23%	49.79%	349.89%	●
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	86%	92.92%	108.04%	●
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	54.15%	38.72%	71.51%	▼
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95.20%	95.76%	100.59%	●
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	67.97%	74.41%	109.47%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	70%	83.33%	119.05%	●
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	70%	100.00%	142.86%	●
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	0	-	▼
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	90%	100.00%	111.11%	●
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	48	3	6.25%	
		- Provinsi	34	32 pelajar	3	9.38%	▼
		- Nasional	18	16 pelajar	0	-	▼
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97%	92%	90.91%	98.81%	▶
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	100%	98%	100.00%	102.04%	●
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	90%	60%	100.00%	724.64%	●
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	85%	50%	100.00%	200.00%	●
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	100%	71.18%	71.18%	▼
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	60%	50%	68.68%	137.36%	●

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 46 indikator urusan pendidikan, 28 indikator di antaranya mampu memenuhi atau bahkan melebihi target capaian kinerja. Sedangkan 8 indikator capaian kinerja belum tercapai

tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir tahun 2019. Disisi lain terdapat 10 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Indikator kinerja urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 25
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	1. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	●
		2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	6.06%	-	●
		3. Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	1.34%	-	●
		4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	0.10%	-	●
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	72%	-	-	▼
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	98%	-	-	▼
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100	-	-	▼
		2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100	100.00%	100.00 %	●
		3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0.31	0.11%	171.59%	●
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Persentase rumah sehat	86,1%	84,8%	-	0%	▼

No	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
					Target 2019	Capaian TW II 2019		
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	dan	1. Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100	100.00%	100.00 %	●
			2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100	100.00%	100.00 %	●
			3. Angka Kesakitan DBD	<50	<50	42.14	-	●
			4. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<101	<103	57.47	-	●
			5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90	90	27,40%	-	●
			6. Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0.5%	0.01%	-	●
			7. Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100.00%	100.00 %	●
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	87,5%	98.46%	112.53 %	●
			2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	80%	100.00%	125.00 %	●
			3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	80	100.00%	125.00 %	●
			4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100	100 %	100 %	●
			5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	100%	100 %	100 %	●
			6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	80	100 %	125 %	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2019		Kinerja RKPd Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	-	●
		2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	-	●
		3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	100%	-	●
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	30%	43.08%	102.56 %	●
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	64,71%	47.06%	72,72%	▼
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100.00%	99.79 %	▶
		2. Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	95.89%	99.99 %	▶
		3. Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	96.41%	99.99 %	▶
		4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	24%	100.00%	416.67 %	●
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	80%	60.32%	-	▼
		2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	24%	100.00%	416.67 %	●
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1. Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	88%	0%	0%	▼
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	91.58%	101.02 %	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
		2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100.00%	100.00 %	●
		3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	93.11%	99.96 %	▶
		4. Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	100.00%	100.00 %	▼
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	1. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	AA	A	50%	▼

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2019 $\geq$ 100% target 2019 atau $\geq$ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2019 $>$ 80% target 2019 atau $>$ 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2019 $\leq$ 80% target 2019 atau $\leq$ 80 % target RPJMD)

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 27 indikator yang telah mencapai target. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 4 indikator akan tercapai, namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir tahun 2019.

Sementara itu 10 indikator lainnya masih perlu usaha keras untuk dapat mencapai target.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Penataan Ruang. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan per sub Urusan antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 26

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum s.d Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD	Kinerja	Status

			s.d. 2021	Target 2019	Capaian Kinerja Hingga Triwulan Kedua Tahun 2019	RKPD Th. 2019	Capaian
1.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	1.742 meter	1.712 meter	98,27 %	●
		2. Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	71,9%	66,65%	71,89%	107,86 %	●
2.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	86%	87,26%	101,46 %	●
		2. Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	7 bh	8 bh	114,42 %	●
3.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	76%	50%	65,78 %	▶
4.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	90%	81%	90%	●
5.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	4 kawasan	2 kawasan	50%	▶
6.	Program pengembangan wilayah perbatasan	1. Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	●
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	97%	89,47%	92,23 %	●
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	94%	93,24%	99,19 %	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD			Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian Kinerja Hingga Triwulan Kedua Tahun 2019			
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	92%	93,67%	101,81 %		●
9.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	0%	0%		▼
		2. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	100%	80%	42,94%	53,68 %		▶
10	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	0%	0%		▼

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2019 $\geq$ 100% target 2019 atau $\geq$ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2019 $>$ 80% target 2019 atau $>$ 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2019 $\leq$ 80% target 2019 atau $\leq$ 80 % target RPJMD)

Pada APBD Perubahan 2019 DPUPR tidak melaksanakan pembangunan fisik dikarenakan beberapa indikator capaian kinerja realisasinya hampir mencapai target tahun 2019 sehingga pencapaian target indikator dilaksanakan dengan kegiatan APBD 2019.

Indikator Panjang Jalan Penghubung baru yang dibangun dengan target 1.742 meter, capaian kinerjanya hampir target dengan total panjang jalan baru yang dibangun 1.712 meter yang akan dicapai membangun Jalan Penghubung Tentara Genie Pelajar – Jalan Perintis Kemerdekaan.

Indikator prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik dengan target 66,65%, capaian kinerjanya 71,89% atau 107,86% melebihi target yang direncanakan dan masih akan bertambah capaian kinerjanya karena beberapa kegiatan peningkatan trotoar masih dilaksanakan di 2019, seperti rehab/pemeliharaan jalan yang dibiayai dengan sumber dana DAK dan beberapa kegiatan yang membangun saluran .

Indikator prosentase panjang drainase dalam kondisi baik dengan target 86% capaian kinerjanya 87,26% atau tercapai 101,46% hal ini berarti dengan total panjang drainase 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 207.534

meter dan capaian ini akan bertambah karena kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi/peningkatan saluran drainase di beberapa ruas jalan diantaranya yaitu Jalan Tobong, kawasan Jalan Alun-alun Utara, Jalan Waringin dan Jalan Sidosari, Jalan Ketepeng dan Jalan Medang serta pemeliharaan rutin diseluruh saluran drainase di Kota Magelang untuk menjaga kondisinya selalu dalam keadaan baik.

Indikator jumlah shipon yang dibangun dengan target 7 buah sampai dengan tahun 2019 capaian kinerjanya 8 buah shipon atau tercapai 114,42% dengan dibangunnya shipon Sanden untuk memperlancar saluran drainase di Kelurahan Kramat Selatan pada tahun 2018 lalu.

Indikator saluran irigasi dalam kondisi baik dengan target 90% mencapai target 81% atau 90%, hal ini berarti dari panjang saluran irigasi Kalikota yang menjadi kewenangan Kota Magelang sepanjang 5.000 meter, yang dalam kondisi kurang baik yaitu 950 meter, untuk mencapai target 90% sangat berat yang menjadi kendala adalah dalam pemeliharaan irigasi masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk pemecahan masalahnya.

Indikator persentase kawasan strategis yang terbangun dengan target 4 kawasan yang dibangun di Tahun 2019, capaian kinerjanya hanya membangun 2 kawasan strategis atau 50% dari target, hal ini dikarenakan penataan Kawasan Mantyasih dan Kawasan Sidotopo sudah selesai dilaksanakan dan pengelolaan asetnya sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Untuk indikator Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 0% karena pada tahun anggaran 2018 target kinerjanya 0% di RPJMD sehingga tidak dilaksanakan kegiatan.

Indikator prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dari target 97% capaian kinerjanya hanya mencapai 89,47% atau 92,43% dan tidak akan mencapai target yang direncanakan dikarenakan pada tahun 2019 tidak menganggarkan pengadaan alat berat dikarenakan kemampuan keuangan daerah belum tersedia dan armada alat berat masih bisa dioptimalkan.

Indikator prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan target 94% capaian kinerjanya mencapai 93,24% atau 99,19% dengan artian dari total jumlah 74 buah jembatan yang kondisinya baik sejumlah 69 buah. Target tersebut dapat dicapai karena tahun 2019 dilaksanakan pembangunan jembatan Jalan Tobong (Sungai Kalibening).

Indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari target 92% capaian kinerjanya sebesar 93,67% atau melebihi target 101,81% berarti dengan total panjang jalan sepanjang 118.915 meter, jalan dengan kondisi baik panjangnya 111.385 meter, namun kondisi jalan tersebut masih akan bertambah dengan beberapa kegiatan rehab/pemeliharaan jalan yang dilaksanakan di tahun 2019.

Indikator prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi dari target 100% pada 2019 capaian kinerjanya masih 0%, hal ini dikarenakan dari 5 (lima) kegiatan pembangunan gedung fasilitas kota diantaranya pembangunan Kolam Renang, Monumen Tanah Air, Pembangunan Gedung Wanita, Pembangunan Lapangan Tennis in door dan outdoor, masih proses pelaksanaan pembangunan.

Indikator prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas dengan target 80% capaian kinerjanya masih 42,94%, tolak ukur dari kinerja ini dari kondisi trotoar kota Magelang yang memenuhi standar aksesibilitas yaitu dari panjang 237.830 meter, hanya 102.132 meter yang memenuhi syarat standar, hal ini dikarenakan dari sempitnya beberapa trotoar, di tengah trotoar ditumbuhi pepohonan dan kondisi trotoar yang rusak di beberapa ruas jalan dan perlu rehab dan penataan total keseluruhan trotoar hingga dapat memenuhi standar aksesibilitas.

Indikator prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien dari target kinerja sebesar 25% capaian kinerjanya masih 0%, hal ini diraih dengan target di penetapan sebanyak 25 proyek fisik konstruksi yang mencapai sesuai syarat masih 0 proyek, karena belum selesai dilaksanakan atau masih dalam proses pembangunan.

Sedang Kinerja pembangunan sub urusan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 -27

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2019	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	50%	8%	16%	▼
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	●
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	15%	15%	▼
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	27 %	26%	24.14%	93%	▶
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	10%	1%	0%	0%	▼
		Rasio surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	40%	35%	27.5%	80%	▶
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua		80%	42.9%	54%	▼

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator program yang dilaksanakan oleh Sub Urusan Penataan Ruang di Tahun 2019, hingga triwulan II ada 1 (dua) indikator sesuai target, 2 (dua) indicator akan tercapai di Tahun 2019, dan ada 4 (empat) indikator yang perlu upaya keras.

Untuk Program prioritas perencanaan tata ruang mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, 1 (satu) indikator tercapai 2 (dua) indikator perlu upaya keras penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai triwulan II tahun 2019 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8 % dari total 13 dokumen, sedang target di tahun 2019 sebanyak 6 dokumen yaitu 1 Perda RTRW dan 5 perda RDTRK atau sebesar 50%. Tahun 2018 revisi dokumen RTRW yang ditetapkan melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031 sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Nomor surat 650/0013221 tanggal 15 Agustus 2018. Hingga Tahun 2019 ini Reperda Revisi RTRW sudah diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, untuk dievaluasi dan mendapatkan Persetujuan Subtansi yang sebelumnya harus dibahas pada forum Lintas Sektor Kementerian.

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari target yang ditetapkan, disisi lain keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RDTRK, mulai dari penyusunan materi teknis, konsultasi publik, persetujuan DPRD, rekomendasi peta dari BIG, rekomendasi teknis dari BKPRD Provinsi, Persetujuan Subtansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta penetapan DPRD Kota Magelang. Dari 5 (lima) Raperda RDTR yang diajukan persetujuan subtansi ke provinsi sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan subtansi.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran pengajuan Persetujuan Subtansi.
5. Adanya aturan-aturan baru yang harus dipenuhi terkait dengan penyusunan dokumen RTRW, RDTRK serta Proses Persetujuan Subtansinya.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2019 ini Raperda revisi Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan hingga Tahun 2021.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.
4. Perlu ada peninjauan kembali target RPJMD Tahun 2021 dari 100% atau 6 Perda 7 Perwal dengan target optimis dengan mempertimbangkan waktu dari proses/tahapan yang harus dipenuhi. Dengan pertimbangan apabila Perda

revisi RTRW bisa ditetapkan Tahun 2019 maka di Tahun 2020 dan 2021 baru bisa menetapkan 5 Perda RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V, sedang 7 Perwal RTBL harus menunggu RDTRK ditetapkan.

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 16,67 % dari target yang ditetapkan di Tahun 2021 sebesar 100%. Dari 6 dokumen peta yang direncanakan yang terdiri 1 dokumen peta RTRW (1:25.000) dan 5 peta rencana rinci atau RDTRK baru (1 : 5.000) hingga Tahun 2018 baru 1 dokumen peta RTRW yang sudah jadi dan terinformasikan ke masyarakat.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya 5 Raperda tentang RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan menginformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang dalam 20 tahun mendatang. Tentunya sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung rencana tersebut karena hal ini demi keberlanjutan tata ruang Kota Magelang 20 tahun mendatang. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dilakukan terus menerus dan lebih luas supaya masyarakat akan lebih memahami Rencana Tata Ruang.

Untuk Program prioritas pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, hingga triwulan II Tahun 2019, 2 (dua) indikator akan tercapai, dan 2 (dua) indikator perlu upaya keras, penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 26% di triwulan II Tahun 2019 realisasi sebesar 24,14 % atau 9.800 unit bangunan ber IMB dari 40.602 unit bangunan diseluruh Kota Magelang. Perkembangan rumah ber IMB tiap tahunnya rata-rata kurang daari 1 % atau 400 unit rumah. Untuk mencapai target 33% ditahun 2021 dibutuhkan kenaikan sebesar 8.86 % atau sebanyak 3.600 unit rumah, jadi dengan sisa 2 tahun, maka diperlukan 1.800 unit rumah per tahunnya, dengan melihat trend per tahun maka kondisi tersebut sangat tidak logis untuk diselesaikan dalam masa 2 tahun.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

DPMPTSP pada Tahun 2018 telah menerbitkan kurang lebih 200 IMB baru, dan 201 IMB Pemutihan untuk bangunan lama yang dibangun kurang dari tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

1. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
3. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan.
4. Perlu peninjauan kembali target bangunan ber IMB, dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan serta waktu yang tersisa.

Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 10% di Tahun 2019 realisasi hingga Triwulan II Tahun 2019 masih 0%, hal tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan yang mengatur mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik retribusinya melalui Perda redistribusi pelayanan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri, yaitu dengan penyusunan Raperda tentang Reklame. Untuk rancangan Raperda Reklame sudah tersusun di tahun 2017 tetapi hingga kini belum dapat ditetapkan karena menunggu revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang. Sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Reklame termasuk kedalam prasarana bangunan. Dengan kondisi tersebut perlu ada peninjauan kembali terkait target ataupun indikator Rasio Reklame ber IMB karena seharusnya sudah masuk dalam target Rasio bangunan Ber IMB.

Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga Triwulan II Tahun 2019 tercapai 27.5 % dari target 35 % di Tahun 2019, jumlah teguran yang dilaksanakan hingga Triwulan II di tahun 2019 sejumlah 55 teguran dari target 200 bangunan baru yang belum ber IMB. Tidak tercapainya target tersebut bukan berarti tidak optimalnya kinerja, tetapi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber IMB dan minimnya pelanggaran tata ruang menjadikan jumlah surat teguran jadi sedikit.

Kendala yang dihadapi diantaranya, surat teguran yang dilaksanakan masih terbatas pada bangunan yang sedang dalam proses pembangunan yang belum mengajukan ijin serta pada bangunan yang melanggar peruntukan pola ruangnya. Untuk bangunan yang sudah terbangun tapi belum ber IMB masih belum dijangkau.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 2019 sebesar 35% yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Kinerja pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 28

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga Triwulan II
Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPDP Hingga Triwulan kedua Tahun 2019		Kinerja RKPDP Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian s.d Tw II Tahun 2019		
1	Program Pembangunan Infrastruktur	Rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik	100%	100%	98%	98%	▶
2	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Cacaban	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	0.42 Ha	92.53%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	5.62 Ha	5.62 Ha	5.2 Ha		
3	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Gelangan	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	5.52 Ha	32.12%	◀
		Luas Penanganan (Ha)	8.13 Ha	8.13 Ha	2.61 Ha		
4	Program Pembangunan	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	1.10 Ha	66,67%	◀

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPDPHingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPDP Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian s.d Tw II Tahun 2019		
	Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Selatan	Luas Penanganan (Ha)	3.30 Ha	3.30 Ha	2.20 Ha		
5	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Utara	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	0.00 Ha	100%	●
		Luas Penanganan (Ha)	4.24 Ha	4.24 Ha	4.24 Ha		
6	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kedungsari	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	7.90 Ha	30,70%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	11.40 Ha	11.40 Ha	3.5 Ha		
7	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kemirirejo	Luas kawasan kumuh (ha)	0 Ha	0 Ha	1.85 Ha	80,02%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	9.26 Ha	9.26 Ha	7.41 Ha		
8	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Selatan	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	0.00 Ha	100%	●
		Luas Penanganan (Ha)	9.26 Ha	9.26 Ha	9.26 Ha		
9	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Utara	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	0.19 Ha	97,12%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	6.59 Ha	6.59 Ha	6.40 Ha		
10	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magelang	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	1.70 Ha	65.29%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	4.90 Ha	4.90 Ha	3.202 Ha		
11	Program Pembangunan	Luas kawasan kumuh (ha)	0 Ha	0 Ha	1.06 Ha	85.96%	▶

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPDPHingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPDPH.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian s.d Tw II Tahun 2019		
	Kawasan Permukiman Kelurahan Magersari	Luas Penanganan (Ha)	7.55 Ha	7.55 Ha	6.49 Ha		
12	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Panjang	Luas kawasan kumuh (ha)	0 Ha	0 Ha	2.16 Ha	44.33%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	3.88 Ha	3.88 Ha	1.72 Ha		
13	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Potrobangsari	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	0.28 Ha	98.27%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	16.20 Ha	16.20 Ha	15.92 Ha		
14	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Selatan	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	1.34 Ha	80.03%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	6.71 Ha	6.71 Ha	5.37 Ha		
15	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Utara	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	4.79 Ha	64.82%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	13.62 Ha	13.62 Ha	8.829 Ha		
16	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Selatan	Luas kawasan kumuh (ha)	0 Ha	0 Ha	0.40 Ha	96.66%	▶
		Luas Penanganan (Ha)	11.98 Ha	11.98 Ha	11.58 Ha		
17	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Utara	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	4.12 Ha	51.28%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	8.46 Ha	8.46 Ha	4.338 Ha		

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian s.d Tw II Tahun 2019		
18	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Wates	Luas kawasan kumuh (Ha)	0 Ha	0 Ha	4.37 Ha	33.79%	▼
		Luas Penanganan (Ha)	6.6 Ha	6.6 Ha	2.23 Ha		
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	100%	63,08%	63,08%	▼
		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90%	90%	70.14%	77,93%	▼
		Tersedianya sistem air limbah skala kawasan	12%	10%	3.83%	33,8%	▼
20	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	19.40%	0.00%	10.49%	110,49%	●
21	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	5 unit	3 unit	3 unit	100%	●
22	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	100%	107.28%	107.28%	●
		Persentase tingkat waktu tanggap response	100%	100%	100%	100%	●

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat 6 indikator tercapai/melampaui, 8 indikator yang akan tercapai, dan 11 indikator masih perlu upaya keras. Kinerja Indikator yang masih perlu upaya keras dari 11 indikator sebagian besar terdapat pada program pembangunan kawasan permukiman pada fokus penanganan

kawasan kumuh yaitu sebanyak 8 kawasan/indikator, sedangkan 3 indikator lainnya pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Gambaran Kinerja dari penanganan kawasan kumuh tingkat kota sendiri sampai dengan Semester II Tahun 2019 sudah mencapai 100,499 Ha dari total target penanganan 137,7 Ha, atau menyisakan pekerjaan rumah sebesar 37,201 Ha. Capaian Kinerja sebesar 72.98% dalam status masih perlu upaya keras. Uaya penganggaran sudah tercover/teralokasikan untuk pembangunan fisik dan pembinaan non fisik dalam penetapan ataupun dalam rencana perubahan RKPD 2019, dalam mengatasi variabel spesifik tiap kawasan kumuh untuk menurunkan skor kumuh. Akan tetapi, fakta belum adanya pergerakan signifikan terhadap pengurangan luasan kawasan kumuh, dikarenakan belum terevaluasi luasan tertangani sampai semester II ini, dimana pekerjaan-pekerjaan fisik yang diperlukan dalam pengentasan masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa di OPD. Indikator penanganan kawasan kumuh terkait dengan indikator Rasio Infrastruktur Lingkungan Permukiman dengan Kondisi Baik yaitu dari luas kota 1854 Ha dalam kondisi baik/tidak kumuh seluas 1816,8 Ha dengan capaian kinerja sebesar 98%.

Gambaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan 3 capaian indikator yang masih perlu upaya keras pada semester II Tahun 2019. Adapun gambarannya sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum hanya berkisar sekitar 63.08% dengan gambaran data baru sekitar 27,281 KK dari sejumlah 43,247 KK. Hal tersebut tidak mengcover perhitungan sumber air penduduk/KK yang menggunakan sumber air permukaan (BJP), data tersebut memang menggambarkan kondisi riil dimana yang tercantum hanya sumber jaringan perpipaan (JP), yang mana kualitas, kauntitas, ketersediaan, dan keterjangkauan yang diutamakan. Hal tersebut masih ditambah bahwa ada 1 rumah yang dihuni lebih dari 1 KK. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa upaya keras perlu dilakukan dimana upaya sosialisasi dan persuasif kepada masyarakat untuk berpindah ke JP yan lebih terjaga keamanan air minumnya, mendorong kemantapan lembaga penyedia PDAM dalam upaya penambahan kapasitas pasokan dan pengurangan terhadap NRW/ air tak berekening yang sudah Mou bantuan hibah melalui KEMENPUPR, Bank Dunia, dan SECO Swiss difasilitasi IUWASH Plus. Untuk pengadaan sambungan rumah belum dapat diakomodir karena keterbatasan penyertaan modal daerah.
2. Realisasi Kinerja Indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, masih sebesar 77,93% dengan data sekitar 30.334 KK yang sudah terkases septic tank baik skala pribadi atau komunal skala kecil 5-10 KK dari sejumlah 43,247 KK. Program dan kegiatan penunjang indikator masih diprioritaskan untuk rumah tangga yang belum berakses ke saluran limbah domestik di kawasan kumuh.
3. Realisasi Kinerja Indikator Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan sebesar 3.83%, yaitu 1.657 KK yang sudah terakses dari 43.247 KK. Target akhir RPJMD sebesar 12% dan di Tahun 2019 sebesar 10% diprioritaskan untuk mengaktifkan kembali KSM penerima manfaat kapasitas per IPAL Terpadu sebesar 60-70 KK. Upaya yang telah dilakukan yaitu pendirian paguyuban KSM penerima manfaat dan pembinaan O dan M melalui OPD.

Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kota Magelang mengalami kenaikan yang signifikan dengan besaran daya tampung sebesar 10,49% dari jumlah penduduk kota, target 2019 tidak ada atau rasio ditetapkan 0% dengan kata lain tidak dibebani target kinerja terkait daya tampung. Kondisi Luas lahan makam yang masih kosong/tersedia di TPU seluas 46,497 m², apabila standar per petak makam seluas 3.36 m², maka daya tampung makam di Kota Magelang, utamanya TPU Makam Giri Loyo sebanyak 13.641 jiwa.

Kinerja dari indikator Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni tercapai dengan terbangunnya dan terisinya 3 buah Rusun yaitu RUSUNAWA Potrobangsari, RUSUNAWA Tidar Utara, dan RUSUN Wates, dengan capaian satuan rumah susun terhuninya sekitar 288 unit/keluarga.

Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran memenuhi capaian kinerja sebesar 107,69% dimana 1 unit kendaraan pemadam untuk melayani 20.000 penduduk, Kota Magelang memiliki total sebanyak 7 unit kendaraan yang siap pakai. baik untuk kejadian dalam dan tugas pembantuan keluar daerah sekitar. Sedangkan kinerja Persentase tingkat waktu tanggap response sudah 100 %, dimana sampai semester II terdapat 2 kejadian kebakaran dan kesemuanya telah direspon sesuai standar waktu tanggap.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 29
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	Capaian TW II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	10	5	50%	▼
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	8	4	50%	▼
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	2	0	0%	▼
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	●
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	4	133%	●
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	56.25%	100%	178%	●
		Persentase ormas yang difasilitasi	9.84%	8.66%	1.67%	19%	▼
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	78.05%	98%	▶
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	100%	●
		Perda pelarangan peredaran narkoba	0	0	0	NA	-
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	4	0	0%	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	Capaian TW II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2.57%	1.81%	3.14%	173%	●
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15.19%	9.11%	0	0%	▼
		Rasio jumlah siskamling aktif	100%	90.84%	72.08%	79%	▼
		Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47.5%	42.5%	40%	94%	►
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71%	8.82%	80%		●
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	75%	50%	67%	▼
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	75%	67.11%	89%	►
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	17.64%	11,76%	67%	▼
		- Pratama	5	3	2	67%	▼
5	Program pendidikan politik masyarakat	- Madya	1	0	2	100%	●
		- Utama	0	0	0	0	-
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	ada	100%	●
		Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	100%	●
		Tingkat partisipasi politik	-	79%	86.9%	110%	●
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	74.8%	0%	0%	▼
		Database ormas yang akurat	77%	73%	72.38%	99%	●
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	42.59%	37.66%	83%	►
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari	3 kali/ hari	3 kali/ hari	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	Capaian TW II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	95%	100%	105%	●
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	8	6	14	233%	●
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	6.41%	7.1%	111%	●
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3)	98%	96%	100%	104%	●
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	77,27	71.72	93%	▶
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	17.12%	29.7%	173%	●
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	15	6	40%	▼
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	92%	100%	109%	●
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1	1	1	100%	●
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-	-	1	100%	●
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	50%	41.38%	83%	▶
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%	5%	(7.99%)	0%	▼
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	66,67%	400%	600%	●
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	5	6	120%	●
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	10%	4.9%	49%	▼
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-	-	-	-	-

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	Capaian TW II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
		Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD	-	-	-	-	-
		Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	90%	100%	111%	●
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	15%	0%	0%	▼
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	2	1	0%	0%	▼
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	NA	-	-	-	-

Sumber : Satpol PP dan Kesbangpol Kota Magelang, 2019.

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari 50 indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan, sebanyak 24 indikator memperoleh predikat telah tercapai dan bahkan secara keseluruhan diatas target yang telah ditetapkan di tahun 2019 dan target RPJMD 2021. Disamping hal tersebut terdapat pula 5 indikator tidak dapat diukur sehingga kedepan perlu diberikan penajaman terkait definisi operasional, formulasi penghitungan maupun rasionalisasi penetapan targetnya. dan sebanyak 6 indikator dengan predikat akan tercapai atau memperoleh nilai capaian $>$ 80%. Adapun 15 indikator yang masih perlu upaya keras karena memperoleh capaian dibawah $\leq$ 80% antara lain :

1. Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat
2. Terpublikasikannya dialog antar agama
3. Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
4. Persentase ormas yang difasilitasi
5. Jumlah Kampung Bebas Narkoba
6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS
7. Rasio jumlah siskamling aktif

8. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana
9. Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana tingkat Pratama
10. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
11. Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas
12. Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat
13. Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag
14. Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan
15. Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat

Dari keseluruhan target indikator yang masih rendah tersebut, pada dasarnya dikarenakan pemenuhan dan pelaksanaannya yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun 2019, disamping adanya alasan yang lain terkait sasaran kegiatan yang akan dicapai dari beberapa indikator adalah anak sekolah yang nota bene sedang dalam masa libur panjang, sehingga pelaksanaannya menunggu waktu libur selesai

2.1.3.1.6 Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2019 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah tampak pada tabel berikut :

Tabel 2 - 30
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	63.99%	63.99 %	▼
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00%	35%	0.00%	-	▼
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	99.08%	99.08 %	▶
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	13.00%	10.27%	78.99 %	▼
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100.00 %	●
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	5	1	20.00 %	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	40%	100.00%	250.00 %	●
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	80%	15.84%	19.80 %	▼
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	67%	108.33%	161.69 %	●
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	30%	35.01%	116.71 %	●

Sumber : Dinas Sosial Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari ke-10(sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 4 indikator sudah memenuhi target. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih. Sedangkan 1 indikator akan tercapai. Sementara itu 5 indikator lainnya masih perlu usaha keras untuk dapat mencapai target.

2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 dengan Capaian Indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dari 3 (tiga) program, dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

:

:

Tabel 2 - 31

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Hingga Triwulan kedua Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian hingga Triwulan Kedua tahun 2019		
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase Wirausaha Baru	10%	5 %	0%	0%	▼
		2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	75 %	89.98%	120 %	●
		3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	70 %	0%	0%	▼
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.5%	2 %	0%	0%	▼
		5. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	70%	62.34%	89.1%	▶
		6. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.5%	0%	0%	0%	●
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	7. Coverage asuransi tenaga kerja	75%	70%	64.1%	91.6%	▶
		8. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	100%	200%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2019

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari kedelapan indikator kinerja urusan tenaga kerja, baru 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target tahun 2019 sementara 2 (dua) dipastikan akan tercapai di akhir Tahun 2019 dan 3 (tiga) indikator lainnya masih perlu upaya keras . Upaya penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu (1) pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas (2) fasilitasi penempatan tenaga kerja dan (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Wirausaha Baru

Sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 belum ada pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan sehingga belum muncul wirausaha baru. Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, pelatihan kewirausahaan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV di Tahun 2019.

2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Capaian persentase pencari kerja ditempatkan dalam Triwulan II Tahun 2019 ini telah melampaui target yang ditetapkan. Jumlah pencari kerja di Triwulan Kedua Tahun 2019 sebanyak 199 orang sementara jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 4.448 jabatan dan yang telah bekerja sebanyak 179 orang pencari kerja terdiri dari 157 orang bekerja di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan 14 orang bekerja di Luar Negeri (Pekerja Migran Indonesia). Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2-32.

Pencari kerja terdaftar, ditempatkan dan lowongan kerja Tahun 2019			
Uraian	L	P	Total
Pencari kerja terdaftar	102	97	199
Pencari kerja ditempatkan	94	85	179
Lowongan terdaftar	1.640	2.808	4.448

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2019

Pada Tahun 2019 ini telah dilaksanakan JOB FAIR yang merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, dengan jumlah pelamar dari Kota Magelang sebanyak 553 pencari kerja dan yang berhasil ditempatkan sampai dengan akhir triwulan kedua sebanyak 8 orang. Proses penempatan masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2019.

3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan

Secara rinci pelatihan ketenagakerjaan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan PERMENAKERTRANS NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Capaian untuk pelatihan berbasis kompetensi belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 62.34 persen dari target yang telah ditetapkan (70%) sementara capaian indikator pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan masih 0 (nol) persen karena kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2019.

Adapun jenis pelatihan yang telah diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Kota Magelang di Triwulan Kedua Tahun 2019 beserta jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-34

Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peminat		Jumlah Peserta	
A	Diklat Berbasis Kompetensi	154	orang	96	orang

1.	Diklat bahasa asing bagi pencari kerja	16	orang	15	orang
2.	Diklat tata boga bagi pencari kerja	22	orang	10	orang
3.	Diklat bordir bagi pencari kerja	12	orang	10	orang
4.	Diklat komputer	15	orang	11	Orang
5.	Diklat tata rias bagi pencari kerja	45	orang	20	orang
6.	Diklat menjahit	31	orang	20	orang
7.	Diklat Teknisi HP bagi pencari kerja	13	orang	10	orang
JUMLAH		154	orang	96	orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2019

4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi
Sampai akhir Triwulan Kedua Tahun 2019 jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi BNSP masih belum tercapai karena pelatihan akan dilaksanakan di Triwulan III. Dari 10 (sepuluh) jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang, baru 1 (satu) jenis pelatihan yang telah diikuti sertifikasi kompetensi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Perkayuan. Adapun jenis kompetensinya adalah finishing kayu dengan tingkatan kompetensi (1) menyiapkan pekerjaan finishing, (2) Menyiapkan permukaan benda kerja untuk finishing, (3) menyesuaikan warna finishing dan (4) mengerjakan finishing dengan teknik semprot. Dari 20 orang peserta pelatihan perkayuan hanya 5 orang peserta yang memenuhi 4 kriteria kompetensi dimaksud.
5. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP
Meskipun indikator tenaga kerja tersertifikasi BNSP di Tahun 2019 belum ditargetkan akan tetapi pada akhir tahun 2019 diharapkan akan terwujud dikarenakan adanya pelatihan bersertifikasi BNSP.
6. Coverage asuransi tenaga kerja
Capaian pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek yang mencapai 64,1 persen, masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu 70 persen. Dari 13.926 orang tenaga kerja yang terdaftar di 213 perusahaan di wilayah Kota Magelang terdapat 8.922 orang yang telah tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha telah mulai menerapkan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja, namun sebagian kecil lain belum sehingga perlu fasilitasi pemerintah dalam pencapaian kinerja ini. Norma perlindungan tenaga kerja meliputi hak-hak pekerja diantaranya mengenai upah, jaminan sosial tenaga kerja, lembur, waktu kerja dan sebagainya.
7. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB
Pada Tahun 2019 ini, kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang cukup kondusif dimana diindikasikan oleh rendahnya jumlah perselisihan pengusaha dengan pekerja. Sampai dengan triwulan kedua ada sebanyak 1 (satu) kasus, dan bisa diselesaikan melalui perjanjian bersama. Sehingga indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 - 35
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target RPJM 2021	Target 2019	Realisasi TW II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					
1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	●
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
1	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	50%	63.41%	127%	●
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					
1	Rasio KDRT	0,04%	0.04%	0.014%	286%	●
2	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	15	18	5	360%	●
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	●
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	●
6	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
7	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
8	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	●
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	●

10	Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	5%	3.19%	64%	▼
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	23%	5.07%	22%	▼
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	26%	11.38%	44%	▼
3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	79%	59.18%	75%	▼

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2019.

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018, terdapat 11 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya masih dibawah 80% atau dengan status perlu upaya keras dalam pencapaiannya, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala antara lain :

- a. Penguatan kapasitas bagi perempuan rentan yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada triwulan ke tiga tahun 2019, melalui program/kegiatan penguatan individu (pendidikan dan pelatihan) menuju kemandiri kelompok rentan, yang pada tahun 2019 terdapat 3.131 orang.
- b. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta

Indikator partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan swasta masih perlu upaya keras dalam pencapaiannya, hal tersebut tercermin dari angka capaian sampai dengan tahun 2019 ini masih jauh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada masa akhir RPJMD 2021 dan target yang telah ditetapkan di tahun 2019. Realisasi indikator partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sebesar 5.07% dengan capaian kinerja 22%, sedangkan indikator partisipasi perempuan di lembaga Swasta sebesar 11.38% dengan capaian kinerja sebesar 44%.

Dari hasil penghitungan diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwasannya masih ada kesenjangan atau gap yang cukup tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan baik yang bekerja pada sector/lembaga pemerintah maupun di swasta. Sehingga kedepan perlu dirumuskan suatu strategi untuk mempercepat pemberdayaan perempuan baik melalui wahana edukasi atau pendidikan/pelatihan, sosialisasi maupun advokasi sehingga perempuan dapat lebih kompetitif dalam lapangan kerja. Disamping hal tersebut alasan di balik minimnya jumlah tenaga kerja perempuan, satu diantaranya karena biasanya para perempuan dewasa telah disibukkan dengan urusan keluarga, yang pada akhirnya mereka harus memilih antara melanjutkan karirnya atau fokus mengurus keluarga.

- c. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan.

Sejauh ini pemenuhan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang mengacu pada indikator makro yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Capaian indikator tersebut sampai

dengan triwulan 2 tahun 2019 adalah sebesar 59.18 atau dengan kinerja capaian sebesar 75%, sehingga masih jauh dari target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 79%. Kedepan agar tidak terdapat duplikasi data, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang akan melakukan perubahan definisi operasional dalam penetapan penghitungan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan, yaitu dengan penajaman pada perhitungan partisipasi angkatan kerja perempuan pada sektor formal di Kota Magelang.

2.1.3.1.9 Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 36

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Capaian Hingga Triwulan II 2019	0,22% Kinerja RKPd Th.2019	Status Capaian
tt1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	2	1	50%	▼
	1 Pa Ketahanan pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	95%	60,22%	63,39%	▼
	2. 63% optimis tercapai krn target 2019 terdapat 49,725	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,20%	87,60%	0%	0%	▼
	3. optimis tercapai t.II sedang analisis, target TW IV.88%	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	80.50%	62.50%	71,4%	▼
	4.						

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan Capaian kinerja sebagaimana matrik diatas, dapat diketahui bahwa dari ke 4 (keempat) capaian Indikator sampai dengan triwulan II Tahun 2019 belum tercapai Adapun masing masing indikator sebagai berikut :

1. Regulasi Ketahanan Pangan target 2 baru tercapai 1 Perwal Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan No.41 Tahun 2018 dan untuk Perwal Pengembangan Pangan lokal masih dalam proses . dengan demikian baru tercapai 50% dan optimis akan tercapai.

2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) dengan target 95 dan baru tercapai 60,22% hal ini berjalan tahap demi tahap dan optimis tercapai
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masih dalam proses entry data hasil survey konsumsi pangan
4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%), Presentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangandari hasil pengujian pada tri wulan II dari total sampai yang diambil yaitu 8 sampel buah dan sayur seperti tomat, daun bawang, ketimun anggur dan seladadan dari 8 (delapan smpel tesebut yang aman diknsumsi sejumlah 5 (lima) sampel hasil negtive terhadap indikasi residu pestisda. Sedangkan untuk 3 (tiga) sampel seperti anggur, daun bawang dan anggur hitam diindikasikan positif mengandung residu pestisda.

Pangan yang sehat terutama untuk balita yang sedang dalam masa pertumbuhan untuk pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan sering abaikan makanan dengan memberikan makanan, instan yang mudah didapat akan tetapi makanan yang instan dan siap saji ini akan membahayakan untuk kesehatan dikarenakan banyaknya kandungan kimia yang tertandung, terutama untuk balita dalam hal ini perlu adanya konsumsi pangan lokal daerah, seperti sayur sayuran produksi pangan dalam negeri maupun cadangan pangan nasional. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah urusan ketahanan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan ketersediaan, dan yang mudah dijangkau serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang

Ketahanan pangan di Kota Magelang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Terkait dengan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sampai saat ini adalah masih kurangnya ketersediaan energi dan protein. Hal ini disebabkan rendahnya produksi pangan di Kota Magelang, sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian I menjadi non pertanian. Sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Magelang yang bergantung pada hasil produksi pangan daerah sekitarnya, seperti Semarang, Yogyakarta, Boyolali, Kabupaten Magelang, Salatiga, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo.

Kondisi petani Kota Magelang yang sebagian besar merupakan petani penggarap sawah dan merupakan tenaga jasa hal ini, mempengaruhi rendahnya produksi komoditas tanaman pangan. Karena petani penggarap dalam mengolah sawah tergantung dari pemilik lahan dan mengikuti pemilik lahan dalam menentukan jenis tanamannya, sementara petani hanya mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan kecuali itu untuk lahan pertanian di Kota Magelang tiap tahun akan berkurang dan semakin menyempit,

Dengan tingginya harga tanah, dikarenakan banyaknya permintaan akan perumahan dan pembangunan di Kota Magelang hal ini merupakan penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan. apabila hal ini tidak diantisipasi maka alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan dan industri. Alih fungsi lahan dari tahun ketahun semakin meningkat sebagian besar lahan pertanian di Kota Magelang terancam semakin berkurang dan menjadi bangunan permanen yang berdiri megah. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Magelang perlu mempertahankan keberadaan lahan pertanian untuk bisa dikelola sebaik-baiknya agar terwujud ketahanan pangan dan pelestarian sumber daya alam.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian diantaranya dengan membuat revisi RT RW supaya lebih jelas keberadaan peruntukan lahan di Kota Magelang dengan membuat lahan tetap hijau antara lain dengan menghidupkan kampung organik yang selama ini dipandang tidak marak seperti dulu dan

hal ini perlu adanya Sosialisasi, evaluasi tentang keberadaan kampung organik , ekonomi bagi masyarakat Kota Magelang

Untuk menghidupkan kembali keberadaan kelompok kampung organik yang tidak aktif. Dalam hal ini perlu dukungan dari instansi terkait untuk membangkitkan kembali dengan pembinaan dan pendampingan dan perlu diadakan pemantauan dikelompok tani. Dengan demikian Kota Magelang akan tetap mempunyai Ruang terbuka hijau Dalam hal ini diupayakan untuk membuat lahan pertanian produktif dari lahan milik asset pemerintah Kota dan dikelola menjadi lahan pertanian abadi serta bias menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Kota Magelang selama ini , masih bergantung pada produksi komoditas pangan luar Kota Magelang. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan pangan adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pengembangan urban farming dengan memanfaatkan lahan sempit (tidak terpakai) berbasis budidaya organik. Urban farming dengan menanam sayur dengan media air hydroponic dalam hal ini dapat melibatkan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

2.1.3.1.10 Pertanahan

Indikator kinerja urusan Pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 37

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian Hingga TW II 2019		
1.	Program penguasaan, penggunaan pemanfaatan tanah	Penataan pemilikan, dan Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	35%	30%	86%	▶
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	35%	30%	86%	▶

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Indikator kinerja urusan Pertanahan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan, dapat tercapai 86%.Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pertanahan terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan

tersedianya sistem informasi geografis pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga SIG pertanahan perlu menyesuaikan. Hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPN terkait kewilayahan.

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2018, dilaksanakan melalui 6 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup terbagi dalam 6 (enam) indikator kinerja daerah dan sasaran serta 7 (tujuh) indikator program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 38

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup hingga Triwulan Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019		
1.		IKLH (Indeks Kualitas)Lingkungan Hidup)	68,5	65	56,36	86,7%	▶
2	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	IPA (Indeks Pencemaran Air)	76,84	75,7	52	68,69%	▼
		Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100	40	40	100%	●
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IPU (Indeks Pencemaran Uda ra	79,1	70,5	84,914	120,4%	●
		Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100	100	100	100%	●
4	Program Konservasi Sumber Daya Alam	ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	48,8	38,22	78,3%	▼
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	●
		Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	●
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7	155,7	287,7	54,11%	▼
		Berkurangnya Volume Sampah dari	14	5	4,13	82,6%	▶

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019		
		sumbernya					
		Prosentase perkotaan ditangani sampah yang	100	88	87,63	99,57%	▶
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
		a. Privat	10	10	19,1	191 %	●
		b. Publik	18,50	18,42	19,6	107 %	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2019

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2019 $\geq$ 100% target 2019 atau $\geq$ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2019 $>$ 80% target 2019 atau $>$ 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2019 $\leq$ 80% target 2019 atau $\leq$ 80 % target RPJMD)

Dari ke 13 (tiga belas) indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup terdapat 7 (tujuh) indikator yang tercapai yaitu IPU (Indeks Pencemaran Udara), Luas RTH Kota, Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi, Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia, Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin

Disisi lain terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya kurang dari 100 % yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dengan capaian sebesar 86,7% , Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya dengan capaian sebesar 82,6%, dan Prosentase sampah perkotaan yang ditangani dengan capaian sebesar 99,57%.

Selain itu juga ada tiga indikator yang perlu upaya keras adalah indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) dengan capaian baru 68,69%, ITH (Indek Tutupan Vegetasi) dengan capaian baru 78,3% dan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tercapai sekitar 54,11% atau justru sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

Capain Kinerja indikator IKLH yang tidak tercapai karena dipengaruhi oleh capaian indikator indeks IPA dan ITH yang juga tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan IKLH Kota Magelang Tahun 2018 tersebut belum memenuhi target IKLH Kota Magelang Tahun 2018 yang tertuang dalam RPJM Kota Magelang Tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan karena :

- a. Target IKLH pada RPJMD Kota Magelang ditetapkan pada tahun 2015. Sementara dalam perkembangannya antara tahun 2016-2018 terjadi penyesuaian kriteria dan rumus perhitungan IKA, IKU dan IKTL yang semakin ketat. Sehingga target IKLH yang telah ditetapkan menjadi kurang relevan untuk dapat dicapai.

Penyesuaian tersebut meliputi :

- Perubahan baku mutu kualitas air yang semula menggunakan status mutu air kelas II, mulai tahun 2016-2017 menggunakan status mutu air kelas I.

- Perubahan metode pengukuran kualitas udara yang semula menggunakan metode pengukuran 1 jam menjadi passive sampler dengan pengukuran selama 24 jam.
- Perubahan kriteria dan indikator parameter dalam perhitungan indeks kualitas tutupan lahan di tahun 2018.

b. Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal :

Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan seperti perilaku manusia.

- Data dari BPS (2017) menunjukkan terdapat 1.164 KK yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Perilaku BABS di sungai mempengaruhi kualitas air sungai, sehingga parameter Fecal Coli dan Total Coliform pada perhitungan IKA tidak dapat memenuhi baku mutu.
- Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah domestik dari aktivitas MCK langsung ke sungai. Penggunaan detergen dalam kegiatan MCK dapat menyebabkan tingginya nilai fosfat pada perhitungan IKA.

Faktor eksternal :

Faktor eksternal merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan debit air sungai antara musim kemarau dan musim penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air rata-rata dari 6 (enam) titik sampel pada musim kemarau di Bulan April 2018, menunjukkan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil pengukuran pada musim penghujan di Bulan Oktober 2018.

c. Kondisi batas administrasi wilayah juga mempengaruhi nilai IKLH. Khususnya yang terkait dengan indeks kualitas air. Hal ini disebabkan karena saluran irigasi Kali Manggis dan Kali Bening yang digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air melintasi beberapa wilayah administrasi yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Dimana ruas saluran sudah melewati Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang sebelum melintasi Kota Magelang. Sehingga kualitas air saluran irigasi sudah membawa potensi beban pencemar dari kawasan hulu saluran. Maka kualitas air yang diukur di wilayah Kota Magelang merupakan akumulasi beban pencemaran dari wilayah sebelumnya.

Nilai IKLH juga terkait erat dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yaitu terjaganya kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Angka IKLH Nasional pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 adalah 68,5. Hasil perhitungan IKLH Kota Magelang Tahun 2018 masih belum mencapai dari target IKLH Nasional, sehingga perlu upaya untuk peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara dan peningkatan kualitas tutupan lahan.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2019) antara lain dengan upaya :

1. IKLH dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus dilakukan lintas sektor, tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup harus terus ditingkatkan pada pengendalian pencemaran air sungai dan udara ambien serta meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau melalui penghijauan kota.
3. Pemerintah daerah hendaknya melakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian agar luasan pertanian lahan kering maupun pertanian lahan kering campur semak / kebun campur tidak semakin berkurang.
4. Apabila terjadi alih fungsi lahan segera disertai dengan peningkatan tutupan vegetasi. Bila diperlukan bekerjasama dengan pihak swasta melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mewujudkan tutupan vegetasi non hutan.
5. Perhitungan IKLH khususnya IKA dipengaruhi oleh kualitas air sungai melewati beberapa wilayah administrasi sehingga dalam pengelolaan dan perlindungan air sungai diperlukan kerjasama antar wilayah.
6. Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang sangat strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik, perlu adanya peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Intervensi program maupun kegiatan yang harus dilakukan sangat diperlukan guna mendongkrak capaian kinerja yang belum memenuhi target. Sebaliknya, capaian kinerja yang telah memenuhi target perlu dipertahankan. Capaian target kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2 - 39

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	96,23%	96,23%	▶
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	100%	81,67%	81,67%	▶
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	99,98%	99,98%	▶

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	950	940	974,21	103,64%	●
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	60%	73,03%	121,72%	●
		Terbangunnya system pelayanan administrasi terintegrasi	100%	60%	63,64%	106,07%	●

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016 – 2021 masih terdapat 3 indikator yang belum mencapai target tahun 2019. Indikator cakupan penduduk memiliki KTP-el baru mencapai 96,23%, cakupan penduduk memiliki masih berada pada angka 81,67%, dan persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan baru tercapai 99,98%.

Cakupan penduduk memiliki KTP-el masih kendala yaitu penduduk yang terdata sudah tidak berdomisili di Kota Magelang. Sosialisasi dan jemput bola sudah dilakukan untuk menutup kekurangan target yang ada. Namun, ketika dilakukan penelusuran ke lapangan melalui RT, beberapa terkonfirmasi sudah tidak berdomisili di Kota Magelang. Hal ini dapat terjadi karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tertib administrasi kependudukan ketika pindah domisili sehingga masih tercatat.

Kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan dokumen KIA menjadi kendala yang ditemui dalam pemenuhan target kepemilikan KIA. Masih ada orang tua yang tidak menguruskan kepemilikan KIA untuk anaknya. Selain itu, anak usia 16-17 tahun, yang akan memiliki KTP, enggan membuat KIA karena mereka menganggap kegunaannya hanya sebentar sampai mereka mengajukan permohonan kepemilikan KTP. Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diantaranya sosialisasi dan jemput bola melalui sekolah-sekolah di Kota Magelang. Jemput bola tersebut dilakukan dengan kolektif pembuatan KIA melalui sekolah. Upaya yang lain yaitu dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta seperti Gardena dan Taman Kyai Langgeng. Dengan kerjasama ini, pemilik KIA mendapatkan keuntungan ketika melakukan pembelian atau kegiatan di perusahaan/ pihak yang telah melakukan kerjasama dengan dinas. Salah satu keuntungannya adalah pemberian diskon belanja bagi pemilik KIA.

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan masih dibawah target. Tentunya kondisi ini menjadi evaluasi bagi dinas terkait untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perhitungan persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan masih dilakukan secara manual yaitu dengan mengurangi jumlah pelayanan dengan jumlah aduan yang diterima. Aduan ini masih belum

dipisahkan antara aduan permasalahan dan konsultasi. Selain itu, sistem yang ada masih sangat tergantung pada pusat, sehingga aduan yang masuk terkadang harus menunggu prosedur yang cukup panjang untuk ditangani karena harus berjenjang sampai dengan sistem yang berada di kementerian.

Untuk indikator kinerja yang telah mencapai atau melampaui target tahun 2019 diantaranya Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk, Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang, Persentase kepemilikan Akte kematian, dan Terbangunnya system pelayanan administrasi terintegrasi. Indikator yang sudah mencapai target tersebut perlu dilakukan maintenance maupun peningkatan pelayanan agar capaian tersebut dapat bertahan sesuai dengan target.

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup beberapa program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 40

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target RPJM 2021	Target 2019	Capaian TW.II 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					
1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	53%	41%	35%	85%	▶
2	Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	100%	●
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					
1	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	●
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	13	13	100%	●
2	LPM berprestasi					●
	Tingkat kota	65%	53%	62%	117%	●
	Tingkat provinsi	peringkat 1	peringkat 1	Peringkat 1		●
	Tingkat nasional	peringkat 1	peringkat 1	-		▼
3	Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR)	100%	100%	100%	100%	●
4	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	71%	47%	65%	138%	●
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	●
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					

1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100%	100%	0	0%	▼
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					
1	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82,35%	61,18%			●
6	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan					
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	●

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2019.

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 12 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, secara keseluruhan sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2019 ini dapat disimpulkan secara keseluruhan optimis akan tercapai, walaupun dalam hal ini terdapat status capaian kinerja yang tidak terukur atau berwarna merah, yaitu :

a. Prestasi LPM di tingkat Nasional

Hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan ke 2 ini belum ada lomba LPM yang diselenggarakan di tingkat Nasional.

b. Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa

Capaian kinerja indikator cakupan pengurus LPM yang mengikuti pelatihan P3D sampai dengan sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2019 adalah sebesar 41% atau sebanyak 174 kader yang telah memperoleh pelatihan, baik pelatihan yang dilaksanakan pada skala kota maupun yang dilaksanakan oleh provinsi. Permasalahan dan kendala teknis dalam pencapaian indikator tersebut adalah minimnya alokasi anggaran yang disediakan baik untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan, maupun untuk kepesertaan pengurus LPM dalam mengikuti pelatihan atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan tingkat provinsi. Upaya untuk pemenuhan target 100% atau seluruh pengurus LPM di Kota Magelang sebanyak 425 kader agar memperoleh pelatihan perencanaan pembangunan Daerah (P3D) akan diupayakan di triwulan ke 3 tahun 2019 ini.

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang beberapa program dengan indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - 41
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target RPJM 2021	Target 2019	Realisasi TW II 2019	Kinerja RKPD	Capaian Status
1	Program Keluarga Berencana					
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	1.58	127%	●
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					
1	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	2%	65%	3.07%	▼
3	Program pelayanan kontrasepsi					
1	Cakupan peserta KB aktif	81,00%	79%	100 %	127%	●
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					
1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	81%	68%	66%	97%	▶
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3%	1,99%	151%	●
6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS					
1	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15,19%	-	-	-	▼
7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	3%	4%	4,09%	98%	▶
2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	79%	89%	113%	●
3	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	88%	88%	88%	100%	●
4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	100%	153%	153%	●
5	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	●

6	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	30%	30%	100%	●
7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	●
8	Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	12%	11,27%	94%	▶
9	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	62%	60,24%	97%	▶
10	Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	10%	2,08%	481%	●
11	Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	2%	1,99%	101%	●
12	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	90%	90,6%	100,67%	●
13	Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	97%	96.83%	99.82%	▶
14	Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	●
15	Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	●
16	Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	1,02%	294%	●
17	Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	1%	0,85%	118%	●
18	Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	●
19	Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	●
20	Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
21	Persentase jumlah keluarga sejahtera	93%	100%	66%	66%	▼
22	Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	90%	100%	111	●

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2019.

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 28 indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebanyak 22 indikator telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator yang optimis akan tercapai pada tahun 2019 antara lain :

1. Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan capaian 97%
2. Persentase partisipasi laki-laki dalam ber-KB dengan capaian 94%
3. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) dengan capaian 99.82%
4. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri dengan capaian sebesar 97%

Adapun indikator-indikator yang memiliki capaian rendah dan memerlukan upaya keras dalam pencapaian target di tahun 2019 antara lain :

1. Indikator Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS yang tidak dilaksanakan, dikarenakan indikator tersebut bukan merupakan kewenangannya.
2. Indikator Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun dengan capaian 3.07%

Capaian indikator prosentase kehamilan pada ibu berumur kurang dari 20 tahun di Kota Magelang sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2019 sebesar 65% atau masih sebanyak 324 kasus. Hal tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan pada masa akhir RPJMD yaitu sebesar 1% dari jumlah 498 pasangan usia subur yang isterinya berusia di bawah usia 20 tahun, sehingga dalam hal ini diperlukan upaya keras para pemangku kepentingan. Hal tersebut selain pertimbangan bahwa usia kurang dari 20 tahun adalah usia rentan untuk kehamilan baik dari aspek fisik maupun psikologis sang ibu, juga dikarenakan kehamilan pada usia tersebut terkatagori dalam kehamilan dengan resiko tinggi. Wanita usia reproduksi yang tidak menggunakan KB berpeluang besar untuk hamil dan mengalami komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas. Hal ini dapat disebabkan aborsi karena unwanted pregnancy, jarak hamil terlalu dekat, melahirkan terlalu banyak maupun komplikasi penyakit selama kehamilan, penyulit saat persalinan dan komplikasi masa nifas. Minimnya capaian kinerja diatas dikarenakan adanya beberapa permasalahan fundamental, antara lain :

- a. Masih minimnya pemahaman dan kesadaran bagi kalangan remaja atau pasangan usia subur terkait pernikahan dini, kesehatan ibu, janin dan reproduksi, pentingnya alat kontrasepsi/ber KB.
- b. Kurangnya pemahaman terkait upaya pengendalian jumlah dan jarak kelahiran, serta penurunan angka resiko kematian ibu melahirkan yang berumur kurang dari 20 tahun.

Kedepan berbagai program/kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan guna menekan angka kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 dapat diupayakan melalui :

- Menyusun rencana kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan yang dituangkan dalam RPJMD.
- Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja.

Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

- Peningkatan akses pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja).
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) merupakan suatu wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).

2.1.3.1.15 Perhubungan

Indikator kinerja urusan Perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 42

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019 sd TW II		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	3. Jumlah Pelayanan Umum	1	1	5	500%	●
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	75%	40%	53,33%	▼
		2. Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	2	1	50%	▼
		3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	78%	60.11%	77,06%	▼
		4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	93%	100%	107.5%	●
		5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	19	21	110,5%	●
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	92,5%	85%	85.30%	100,35%	●
		2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	75%	44.44%	59,25%	▼
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8136	8036	3776.	46,98 %	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019 sd TW II		
		2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4%	4%	0%	104,16%	●
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2,900,000	1,164,881	88,13%	▶
		2. Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	5.00%	4.74%	94,8%	▶
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	●

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Terdapat 5 (lima) Capaian Indikator dengan status perlu upaya keras untuk mencapai target akhir Tahun 2019, meskipun sebagian besar sudah memenuhi target pada TW II, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik, Pemerintah Kota sebenarnya sudah tidak dapat mengelola Terminal Angkutan Barang menjadi wewenang Provinsi, sehingga sampai saat ini pun tidak mendapatkan PAD, dimana lokasi eksisting bersama-sama PATWAL dan SAMSAT Pembantu akan dipindahkan ke lokasi yang baru di sebelah selatan Terminal Tipe A Tidar yang mana menjadi kawasan terpadu dengan rencana stasiun kereta api Magelang. Kondisi eksisting hanya pengkondisian lokasi agar dapat untuk digunakan sementara.
- 2). Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata, tidak tercapainya kondisi dikarenakan beberapa upaya untuk pengadaan lahan terbentur dengan minimnya lahan dan kenaikan harga lahan yang diluar jangkauan setiap tahunnya, beberapa opsi yang perlu dipertimbangkan lagi dalam penataan ruang adalah calon lokasi terminal Jl Kalimas, dan peninjauan melalui kerjasama dengan eks stasiun Magelang Kebonpolo dengan Kementerian atau PT Kai yang belum dapat terwujud. Sedangkan opsi terminal lain seperti Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo tidak ada lagi lahan yang tersedia di pinggir jalan.
- 3). Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik Jumlah keseluruhan titik parkir yang dibina oleh OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang sebanyak 183, akan tetapi sampai Triwulan II baru mencapai 110 titik yang terfasilitasi sarpras parkir dengan standar dan petugas jaga.

- 4). Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi, dimana dari sebanyak 18 APILL baru terdapat 8 yang terintegrasi dengan ATCS, dan baru diutamakan di jalan-jalan arteri sekunder dan arteri primer kota.
- 5). Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan, dari target TW II sudah melampaui target dan optimis target akan tercapai di akhir tahun.

Indikator Kinerja Pencapaian dengan status akan tercapai terdapat 2 (dua) indikator berupa:

- 1). Jumlah arus penumpang angkutan umum berdasarkan data tercatat secara agregat capai TW I dan II sudah mencapai 1,604,762 penumpang angkutan umum dengan lonjakan penumpang pada hari raya Idul Fitri, dimana target tinggal menyisakan angka sekitar 1.295.238 penumpang optimis sampai akhir tahun akan tercapai.
- 2). Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk, target pada Akhir Tahun 2019 sebesar 6500 tempat duduk untuk melayani jumlah penduduk di Kota Magelang, sampai TW II terhitung hanya tersedia 6118 tempat duduk dimana tidak terdapat penambahan lagi dari segi usaha jasa angkutan umum, kondisi ini diprediksi akan stagnan di akhir tahun.

Pencapaian Indikator Kinerja dengan status Tercapai/Melampaui target akhir Tahun 2019, menurut hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2019, sejumlah 6 (enam) indikator, berupa:

- 1). Target Kinerja berupa Jumlah Pelayanan Umum capaian 500%, Realisasi pelayanan umum perhubungan sudah mencapai 5 (lima) jenis pelayanan yang diselenggarakan pada 1 (satu) Terminal, berupa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Area Traffic Control System (ATCS), rekomendasi penggunaan Ruang Milik Jalan (RUMIJA), Perizinan Angkutan (Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang).
- 2). Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum, kondisi saat ini sejumlah 11 blok parkir yang dikelola OPD, dengan pengawasan dan pembinaan melekat, atau bertambah 1 blok parkir dari target Tahun 2019 ataupun akhir tahun RPJMD sejumlah 10 blok.
- 3). Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte), sampai semester II sudah terdapat 21 halte dari 19 halte yang ditetapkan akhir Tahun 2019, sehingga hanya tersisa target 1 halte yang harus dibangun untuk mencapai target akhir tahun RPJMD 2021
- 4). Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum, capaian berdasarkan indeks keselamatan lalu lintas yang semakin baik dari tahun ke tahun dari semula 8.49 kini meningkat menjadi 8.53
- 5). Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian, berdasarkan data yang ada semua KBWU melakukan pengujian tepat waktu dengan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 3,615 sampai semester II ini.
- 6). Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara, masih konsisten dengan melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala dengan rutin, jenis fasilitas LLAJ di Kota Magelang yang dipelihara berupa (1) Marka Jalan, (2) Rambu Lalu Lintas, (3) Pagar Pengaman Jalan, (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, (5) Delineator, (6) Paku Jalan, dan (7) Cermin Tikungan/cembung. Akomidaso terhadap usulan musrenbang dan pikir dewan pada tahun ini dapat ditampung, seperti pengadaan cermin cembung 10 buah dari hal tersebut.

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - 43

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	90%	100%	111,11%	●
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:					
		- Radio	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	180 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan	100%	●
		- Media Cetak	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	2 edisi dengan 2 materi keagamaan	16,67%	▼
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	123,53% (21)	123,53%	●
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	7	7	100%	●
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	0	0	6	100%	●
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	1	100%	●
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	4	4	100%	●
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	75%	63,75%	85%	▶
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	80%	69%	86,25%	▶
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq$ 100% Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dalam urusan komunikasi dan informatika, sepuluh indikator lainnya dalam urusan komunikasi dan informatika sudah mencapai target, tetapi terdapat satu indikator yang belum memenuhi target dan perlu upaya keras karena capaiannya yang masih 16,67%. Indikator tersebut adalah Publikasi materi keagamaan melalui media cetak. Publikasi materi keagamaan melalui media cetak yang ditargetkan terbit setiap bulan untuk 5 agama, hanya terealisasi pencetakan majalah Dinamika yang terbit setiap triwulan dan sampai dengan triwulan II baru memuat 2 materi keagamaan dari 2 edisi yang sudah diterbitkan.

Selain itu, terdapat 2 indikator yaitu Cakupan WAN (Wide Area Network) dan Cakupan data yang terpusat dan terkendali juga belum mencapai target, tetapi capaian indikatornya sudah lebih dari 80%. Target indikator ini dapat tercapai ketika command center dan kelengkapannya dapat terbangun dan terintegrasi dengan baik. Beberapa komponen command center yang terdiri dari modul aplikasi, NOC/DC, dan WAN belum mencapai target 100% untuk NOC/DC dan WAN. NOC yang ada sudah terbangun belum sesuai standar, sedangkan WAN masih dalam proses pemenuhan target.

2.1.3.1.17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Target dan capaian indikator kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga Triwulan II Tahun 2019 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 44

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	5%	12.19%	243%	●
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	10%	11.58%	115.8%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	100	229	229%	●
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	4%	35.64%	891%	●
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93.60%	94.71%	101%	●
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	30%	21.65%	72.17%	▶
		Jumlah koperasi	235	230	227	98,69%	▶
		Jumlah koperasi syariah	24	20	18	90%	▶

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari keempat program prioritas yang di dalamnya memuat 8 (delapan) indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah, 5 (lima) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan yaitu Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM, Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI, Jumlah wirausaha baru (UMKM), Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan, Prosentase koperasi aktif sedangkan 3 (tiga) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir tahun 2019 yaitu Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP dan Jumlah koperasi dan Jumlah koperasi syariah

Dari delapan indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah semua optimis bisa tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- Dalam mengampu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Modal yang memuat empat indikator capaian utama ada 3 indikator yang perlu perhatian serius yaitu Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP, jumlah koperasi dan jumlah koperasi syariah. Jumlah SDM yang tersedia dalam penyelenggaraan urusan ini sangat terbatas, kemudian regulasi yang tidak memperbolehkan penyelenggara urusan untuk mengarahkan bentuk koperasi yang akan didirikan untuk berbentuk koperasi syariah atau koperasi konvensional, kemudian pengawasan terhadap koperasi yang telah ada untuk tetap beroperasi sesuai dengan AD/ART Koperasi masih lemah.

Permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

- Rendahnya daya saing,
- Sarana promosi produk yang mendukung dengan identitas kota magelang belum tersedia dengan layak.
- Masih terbatasnya kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan teknologi.
- SDM pengelola koperasi kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas serta kerja sama antar anggota yang kurang terjalin dengan baik.

Solusi permasalahan :

- Menambah SDM yang mumpuni dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Menambah anggaran belanja yang terfokus pada pemberdayaan pelaku usaha sehingga akan benar – benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 45

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	4	3	75%	▶
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	10%	5,90%	59%	▼
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	202.68%	1351%	●
		Jumlah investor baru	200	172	2.147	545%	●

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq$ 100% Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator, diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja perlu upaya yang keras untuk dapat mencapai karena capaian masih jauh di bawah target dan 2 (dua) indikator telah tercapai.

Untuk indikator Jumlah kerjasama pemerintah dan investor dari target yang ditetapkan adalah 4 kerjasama sudah terjalin 3 kerjasama sehingga indikator ini kalau dicermati lebih dalam, target yang ditetapkan tidak akan menemui kendala yang berarti untuk dicapai pada akhir tahun 2019. Untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA, lebih disebabkan karena perusahaan yang ada di Kota Magelang belum / tidak melaporkan kegiatan penanaman modal asing ke kantor PM. Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan tersebut langsung ke BKPM Pusat, dan di kantor PM hanya sebagai tembusan, maka berdampak pada gambaran riil pertumbuhan Penanaman modal asing yang sebenarnya optimis sesuai target yang diharapkan tidak dapat kita ketahui. Permasalahannya, hanya terhadap ketersediaan laporan dari masing-masing perusahaan PMA yang ada di Kota Magelang yang langsung disampaikan ke BKPM Pusat. Untuk melengkapi data realisasi, kantor PM perlu melakukan tindakan proaktif yaitu menghubungi BKPM pusat untuk mendapatkan data yang akurat sehingga gambaran riil investasi PMA dapat dilihat pencapaiannya.

Untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMDN terlihat menunjukkan nilai yang signifikan atau bahkan dapat dikatakan tergolong sangat diatas standart namun demikian jika dihubungkan dengan indikator jumlah investor baru hal ini berbanding lurus, indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai investasi PMDN dapat diasumsikan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan merata pada skala usaha kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- Kurang falidnya informasi potensi investasi yang ada di Kota Magelang.
- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor.
- ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain).
- pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.

Solusi permasalahan :

- Memferifikasi profil investasi daerah yang memang benar – benar layak untuk mendatangkan investor.
- Obyek – obyek investasi benar – benar clean and clear dari segala hambatan yang mungkin timbul ketika ada ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah.
- Dukungan dari para pengampu kepentingan yang saling sinergi sehingga akan benar – benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 6 program yang terdiri dari 18 indikator untuk mengukur kinerja urusan. Sampai dengan triwulan II Tahun 2019, kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 46

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian

			Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019	Th.2019	
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	6	10	166,67% ●
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional				
		- Peringkat di POPDA SD	3	5	-	- ▼
		- Peringkat di POPDA SMP	9	13	-	- ▼
		- Peringkat di POPDA SMA	16	19	23	- ▼
		- Peringkat di Dulongmas	NA	2	-	- ▼
		- Peringkat di PORPROV	NA	0	-	- ▼
		Jumlah klub olah raga	183	183	-	- ▼
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah organisasi olah raga	36	35	37	105,71% ●
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91,18%	85%	-	- ▼
		Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional				
		a. Propinsi	8	7	1	14,29% ▼
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	b. Nasional	1	1	1	100% ●
		Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	98,00%	96,00%	-	- ▼
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	-	- ▼
		Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6,15%	-	- ▼
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	29,41%	29,41%	-	- ▼
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	77%	-	- ▼
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75%	75%	-	- ▼
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,81%	-	- ▼

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 18 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga, sebagian besar indikator masih belum tercapai dan jauh dari target, yaitu sebanyak 15 indikator. Dari 15 indikator tersebut, baru 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan hasilnya dibawah target yaitu Peringkat di POPDA SMA dan Prestasi pemuda di tingkat propinsi. Selain 2 indikator tersebut, indikator yang lain belum dilaksanakan sampai dengan triwulan II atau pengumpulan datanya baru bisa

dikumpulkan pada akhir tahun sehingga capaian indikatornya masih 0%. Sedangkan indikator yang sudah mencapai target diantaranya Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional, Jumlah organisasi olah raga, dan Prestasi pemuda di tingkat nasional.

2.1.3.1.20 Statistik

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan yang baik harus didasarkan data yang akurat. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah GIGO (garbage in garbage out) yang bermakna apabila input datanya sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula. Demikianlah data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah formulasi perencanaan. Kinerja Urusan Statistik terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -47

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95%	95%	97,82%	102,97%	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Kinerja urusan statistik tahun 2019 sampai dengan triwulan II sudah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini, dari target tahun 2019 sebesar 95% pemenuhan data statistik telah terpenuhi 97,82%. Kondisi ini telah melampaui target tahun 2019 dan target RPJMD yang juga sebesar 95%. Dari 367 publikasi data sektoral yang diperlukan, sudah tersedia 359 data sektoral yang dipublikasi untuk keperluan OPD. Data sektoral menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena data ini tidak disupport oleh BPS (Badan Pusat Statistik) karena BPS hanya menyediakan data makro. Data sektoral ini diinput oleh OPD terkait sesuai dengan kebutuhan data yang diajukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang lain. Proses yang harus selalu dikawal adalah verifikasi data yang diinput oleh OPD dengan data riil di lapangan agar selalu konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3.1.21 Persandian

Kinerja Urusan Persandian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -48

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian hingga Triwulan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019	Kinerja RKPD	Status Capaian

				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019	Th.2019	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	100%	100%	100%	●
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	100%	100%	100%	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi hingga Triwulan Kedua tahun 2019 $\geq 100\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\geq 100\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $> 80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Indikator kinerja urusan persandian melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa sudah semuanya mencapai target. Ketersediaan SOP persandian sampai dengan triwulan II tahun 2019 sudah terpenuhi. Sudah ada SOP Persandian yang disusun dan dilaksanakan pada instansi yang menangani urusan persandian. Indikator lainnya yaitu Tingkat kapasitas SDM persandian sudah memenuhi target tahun 2019. Tenaga khusus/ ahli di bidang persandian saat ini berjumlah 1 orang dengan kapasitas SDM satu orang 100% yang merupakan fungsional sandiman. Untuk indikator Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian sudah mencapai 100%. SOP Persandian ini hanya diterapkan pada satu OPD dimana prosedur yang dilakukan merupakan prosedur yang bersifat rahasia.

2.1.3.1.22 Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 49

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100.00%	89.74%	89.74 %	▶
		Jumlah pengunjung museum	5.600	5,350	1,814	33.91 %	▼
		Jumlah koleksi museum	15	13	65	500 %	●
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67%	15.32%	15.77%	96.25 %	▶
		Jumlah festival seni dan budaya.	14	12	13	15.38 %	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II 2019		
		Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100%	75.00 %	▼
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	227	224	98.68 %	►
		Misi kesenian 100%	50%	43%	100%	232.56 %	●
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	2	1	1	100 %	●
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	13	11	84.62 %	►
		Cakupan kajian seni 50%	80%	77%	30%	38.96 %	▼
		Cakupan fasilitas seni 30%	45%	39%	100%	256.41 %	●
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80%	79%	87.50%	110,75%	●
		Cakupan tempat 100%	100%	100%	27.27%	27.27 %	▼
		Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100.00 %	●

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang , 2019

Keterangan:..

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja urusan Kebudayaan, terdapat 6 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 4 indikator. Disisi lain terdapat 5 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

1. Cagar budaya belum terdokumentasikan dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
2. Belum adanya kesepahaman antara pemilik bangunan, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan komunitas pemerhati dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.
3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.
4. Masih kurangnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.

5. Belum adanya gedung kesenian yang dilengkapi sarana prasarana yang memadai untuk pentas seni. Meskipun begitu saat ini telah ada Pendopo Mantyasih yang dapat digunakan sebagai tempat untuk pertunjukan seni dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti tata suara dan tata cahaya.
6. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Magelang tentang sejarah dan legenda kota Magelang.
8. Masih kurangnya jalinan komunikasi interaktif antara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan pemerintah. Kota Magelang.
9. Masih kurangnya pembinaan seni dan budaya bagi kaum muda
10. Budaya belum dipandang sebagai sarana pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter bangsa

2.1.3.1.23 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di tahun 2019 ini melalui adalah program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 -50

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019 Triwulan II		
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	1. Persentase peningkatan judul buku	15,99%	9,28 %	5,66%	60,99%	▼
		2. Persentase peningkatan jumlah buku	9,89%	6,26 %	6,30%	100,64%	●
		3. Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	66,35%	56,87 %	53,41%	111,5%	●
		4. Persentase perpustakaan aktif	28,44%	23,70 %	23,42%	98,81%	▶
		5. Cakupan pelayanan melalui e-library	5 %	3%	6,25%	208,33%	●
		6. Peningkatan promosi layanan perpustakaan	25 %	16,67%	41,51%	249%	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target kinerja RPJM di tahun 2019, secara keseluruhan telah mencapai target, bahkan dua di antaranya mencapai lebih dari 200% yaitu Cakupan Pelayanan e-library dengan capaian 208,33% dan Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan dengan capaian target sebesar 249%. Capaian 2 (dua) indikator lainnya telah tercapai meskipun hanya relatif sedikit di atas 100%, dengan kisaran 100,64% dan 111,5%.

Indikator presentase peningkatan judul buku di Triwulan II ini masih perlu upaya keras untuk mencapai target tahunan, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pengadaan buku baru akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yakin akan bisa mencapai target di akhir tahun ini dengan kegiatan pengadaan buku di Dinas Perpustakaan. Untuk Indikator Persentase Perpustakaan aktif di Triwulan II ini baru mencapai 98.81% hal ini juga diyakini akan tercapai target di akhir tahun.

Mencermati capaian target kinerja urusan perpustakaan, terdapat permasalahan terhadap capaian indikator cakupan pelayanan e-library dan peningkatan promosi perpustakaan yang sudah melebihi 200% di triwulan II. Terhadap indikator ini kemudian, telah diusulkan untuk dilakukan perubahan Definisi Operasional (DO) dalam memperhitungkan capaiannya. Indikator peningkatan promosi layanan perpustakaan dengan DO semula jumlah even tahun N dan Jumlah event tahun N-1 dengan rumus perhitungan jumlah event tahun N dikurangi jumlah event tahun N-1 dibagi jumlah event tahun N-1, diganti dengan jumlah event dan jumlah target event RPJMD yang diperhitungkan dengan rumus jumlah event dibagi jumlah target event RPJMD.

Cakupan Indikator pelayanan e-library yang capaian tahun 2019 masih perlu upaya keras untuk dapat mencapai target, maka di pentahapan RPJMD yang dilaksanakan tahun 2019 dapat melampaui target kinerja sehingga mencapai 208,83%. Setelah dilakukan pencermatan oleh pengampu urusan perpustakaan maka terhadap kinerja tersebut akan dilakukan perubahan target, yang kemudian akan dituangkan dalam dokumen perencanaan perubahan RPJMD Kota Magelang 2016-2021.

2.1.3.1.24 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan dengan program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan, program peningkatan kualitas pelayanan informasi, program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah, dan program perbaikan sistem administrasi kearsipan, sehingga total melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 -51

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan hingga Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019 Triwulan II		
1.	Program pemeliharaan	Persentase sarana prasarana arsip yang terpelihara	89%	79%	100%	126,58%	●

	rutin/berkala dan sarana prasarana kearsipan						
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Cakupan pelayanan akses arsip	82%	78%	100%	128,2%	●
		2. Tingkat kompetensi SDM pengelola kearsipan	67%	45%	35,92%	79,82%	▼
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku	100%	69%	62,07%	89,95%	▶
		2. Persentase arsip dan risalah	85%	82%	?	?	
		3. Persentase penyelamatan arsip	73%	60%	56,69%	94,48%	▶
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1. Persentase implementasi e-arsip	100%	69%	58,18%	84,32%	▶
		2. Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	40%	0%	0%	▼

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Memperhatikan capaian 4 program dengan 8 indikator terhadap capaian kinerja RKPD 2019 di Triwulan II, diketahui bahwa 2 (dua) target kinerja dapat tercapai atau melampaui target, 3 (tiga) target kinerja optimis akan tercapai, 2 (dua) indikator perlu upaya keras untuk mencapai target dan 1 (satu) indikator yang tidak dapat diperhitungkan mengingat tidak adanya kejelasan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap capaian target indikator persentase arsip dan risalah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera dikoordinasikan untuk disolusikan antara perangkat daerah pengampu urusan kearsipan dan perangkat daerah yang mendokumentasikan risalah, dan atau diperlukan dengan kejelasan tentang definisi operasional yang dimaksud dengan risalah tersebut.

Untuk indikator persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, capaian kinerjanya masih belum mencapai target meskipun pada posisi optimis akan dapat tercapai 89,95%. Posisi sebenarnya adalah apabila dilihat dari sisi jumlah maka target kinerjanya sudah tercapai karena sudah tercapai target 15 satker. Namun demikian, dari 15 tersebut terpetakan pada jumlah OPD yang hanya 13 sedangkan yang 2 lainnya adalah Kelurahan yang bukan sebagai OPD, sehingga capaian kinerja yang diperhitungkan adalah 13 OPD.

Indikator yang belum dapat mencapai target, meskipun optimis lainnya adalah indikator persentase penyelamatan arsip pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dan indikator implementasi e-arsip pada program perbaikan sistem administrasi kearsipan. Ketidak tercapaian ini disebabkan karena komponen yang diperhitungkan sudah mengimplementasikan e-arsip (SIARDINA - Sistem Arsip dinamis) adalah perangkat daerah yang sudah dengan lancar memanfaatkannya. Masih terdapat 6 OPD yang sudah menerapkan e-arsip tetapi belum lancar dalam operasionalnya dan masih terus dilakukan pendampingan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Indikator yang perlu upaya lebih keras di triwulan II dan IV adalah indikator Tingkat Kompetensi SDM pengelola Kearsipan pada program peningkatan kualitas pelayanan informasi yang kegiatan akan diselenggarakan di semester II serta indikator presentase ketersediaan sarpras arsip pada program perbaikan sistem administrasi kearsipan yang rencana akan dihapus di RPJMD Perubahan yang dikarenakan indikator ini tergantung dari anggaran pengadaan sarpras arsip.

2.1.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 5 (lima indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -52

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan II Tahun 2019

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019 sd TW II		Kinerja RKPD Th. 2019	Status capaian
				Target 2019	Capaian 2019 sd TW II		
1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1. Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	1	0	0	0	▼
		2. Jumlah pengolah ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	4	4	100%	●
2	Program pengembangan budidaya perikanan	3. Produksi hasil perikanan :Produksi ikan	167.01	162.41	80	49,26%	▼
		4. Presentase unit pembudidaya ikan	50%	57,14%	57,14%	114%	●

		yang telah bersertifikasi					
	5.	Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CBIB	50%	0%	0%	0%	▼
3	Program pengembangan sistem penyuhan perikanan						
	6.	Luas lahan perikanan organik	0.6	0.40	0,30	75	▼

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dan diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator, berikut deskripsi dari tabel kinerja diatas terdapat :

Terdapat 1 (satu) indikator yang tercapai yaitu Jumlah pengolahan ikan yang benar sudah tercapai 100%. Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar, ada empat dan mengalami peningkatan satu pengolah ikan yang ditahun tahun 2019 menjadi 4 pengolah ikan yang benar yaitu :

- Bandeng magelangan kelurahan Potrobangsari
- Krupuk stik ikan, gajah super Kelurahan Gelangan
- Abon lele kelurahan jurang ombo utara
- Bakso ikan maknyus Kelurahan Potrobangsari

Presentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi telah melampaui dan ada tambahan 2 pembudidaya ikan di Kota Magelang.

Sementara itu ada beberapa indikator yang belum tercapai dan perlu usaha keras antara lain :

1. Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP belum tercapai bahkan masih 0% dikarenakan ditahun 2019 tidak ditargetkan dan akan ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 1 unit pengolahan ikan bersertifikasi
2. Produksi hasil perikanan perlu upaya keras hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan sehingga luasan produksi ikan berkurang.

3. Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CBIB masih 0% , tahun 2019 target awal sudah bersertifikasi akan tetapi diusulkan diperubahan kalo target akan tercapai di tahun 2020 dikarenakan adanya pemangkasan lahan di balai benih sehingga banyak kolam yang tidak bisa dipergunakan dan perlu adanya perbaikan kembali . ini dampak dari TPS Bojong .
4. Luas lahan perikanan organic baru tercapai 75% dan akan tercapai diakhir tri wulan IV .

2.1.3.1.26 Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam peningkatan pendapatan skala nasional maupun daerah. Keberadaan sektor ini akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan memberikan sumbangan pendapatan berupa pajak dan retribusi kepada pemerintah. Selain itu, sektor ini juga dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ditambah lagi, ketika sektor ini berkembang pesat, masyarakat secara tidak langsung akan terkena multiplier effect dari kegiatan ini. Kinerja Urusan Pariwisata terlihat pada tabel di bawah ini :

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian TW II Tahun 2019		
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata Unggulan	7	5	4	80.00%	▶
		Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	66,67%	-	-	▼
2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	11	10	90,90%	▶
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 HARI	2-4 HARI	1-2 HARI	50%	▼
		Persentase TIC yang representatif	100%	100%	0%	0%	▼
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1.138.139	515.560	45,30%	▼
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5.193	2.800	53,92%	▼

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 7 indikator kinerja urusan Pariwisata, sampai dengan triwulan II tahun 2019, hampir semua indikator belum mampu mencapai target tahun 2019. Dua indikator memiliki capaian yang sudah atau melebihi 80%, dan lima indikator

lainnya masih perlu upaya keras untuk mencapai target. Indikator yang memerlukan upaya keras diantaranya Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona, Lama Kunjungan Wisatawan, Persentase TIC yang representatif, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

2.1.3.1.27 Pertanian

Indikator kinerja urusan Pertanian melibatkan 10 Program 22 (indikator program kinerja) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 54

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian hingga Triwulan II Tahun 2019

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status capaian
				Target 2019	Capaian sd TW II Tahun 2019		
	Urusan Pilihan Pilihan	Urusan					
1	Program Kesehatan Veteriner	Pelayanan Masyarakat					
		1. Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	3,03%	3,03%	100%	●
2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
		2. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94	2.353%	0%	0%	▼
		3. Rasio petani terlatih	85%	90%	17,59%	19,54	▼
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
		4. Persentase hewan sehat	87	85%	29,501%	34,70%	▼
4	Program Kesejahteraan Petani						
		5. Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	6	7	116,67 %	●

5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan					
		6. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	6%	6,28%	104,5% 
		7. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	13	13	11	85% 
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan					
		8. Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	4,24	3,03%	3,03%	100% 
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan					
		9. Luas lahan pertanian organik	1,14	1,03	1	97,1% 
		10. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	72%	58,50%	87,94%	150,32 % 
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan					
		. Jumlah pelaku usaha peternakan organik:	15	9	6	66,67% 
		11 . Peternak ayam buras/ ayam broiler	5	3	2	66,67% 
		12. Peternak kelinci	5	3	2	66,67% 
		13. Peternak kambing/domba	5	3	2	66,67% 
		14. Rasio peternak Terlatih	90	85%	16,01 %	18,4% 
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan					
		15.Daging Ruminansia	1.401.690	1289554	442378	34,30% 
		16. Daging Unggas	5.660.315	5610449	3006106	53,6% 
		17.Telur	50.000	46000	36.056	78,38% 
		18. Susu	209000	201400	111.330	55,278 
10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan					

19. Padi	3.380.000	3.160.000	1289,60	40.8%	▼
20. Jagung	11	11	11,20	107%	●
21. Ubi kayu	15	13,50	13.50	100%	●

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Berdasarkan capaian kinerja Urusan Pertanian sebagaimana matriks di atas dapat diketahui bahwa dari ke 10 Progam 21 Indikator Capaian Indikator sampai dengan triwulan II Tahun 2019 indikator kinerja yang dapat tercapai ada 7 (tujuh) indikator , belum tercapai 3 (tiga) indikator dan yang perlu upaya keras ada 12 (dua belas) indikator.

Yang perlu usaha keras sebagai berikut :

1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP Pelaksanaan akan dimulai di Tri wulan III dan akan tercapai di Tri wulan IV.
2. Rasio petani terlatih Pelaksanaan baru terlaksana 70 orang dari total 398 orang dan hal ini akan tercapai di Tri wulan III dan IV
3. Persentase hewan sehat Survey yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana baru sebagian
4. Jumlah pelaku usaha peternakan organik, dal beternak kelinci, ayam dan domba dari targedt 9 pelaku usaha hanya 6 yang menerapkan pertanian organic ,dikarenakan susahny untuk perawatan dan juga dalam standar harga yang melampaui batas yang un organic sehingga bagi petani merasa berat untuk mejangkau harga .
5. Daging Ruminansia , optimis produksi akan tercapai
6. Telur, optimis akan tercapai
7. Susu , optimis akan tercapai
8. Padi

Keempat indikator yang tercapai/melampaui di Tri wulan ke II yaitu antara lain Prosentasi unit usaha yang telah bersertifikasi NKV, prosentase hewan sehat, jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang, prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal. Dari keempat indikator ini indikator prosentasi unit usaha yang telah bersertifikasi NKV dan indikator prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal tercapai dengan melampaui target artinya ke 2 (dua) indikator ini tidak mengalami kendala dan tidak ada masalah. Adapun jumlah kelompok tanaman hias dan bunga di Kota Magelang sampai saat ini sudah ada peningkatan tahun 2016

ada 7 kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga dan tahun 2019 ada penambahan menjadi 7 kelompok adapun kelompok pembudidaya tanaman hias di Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- Sekarsari Kelurahan Kedungsari
- Anggrek Indah, Kemirirejo
- Azahra Kelurahan Potrobangsari
- Puspa Indah , Kelurahan Kemirirejo
- Kelurahan Sanggrahan wates
- Tiza sekar Bogeman
- Mangir Garden Karang kidul.

Sementara itu indikator yang akan tercapai antara lain : Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian, Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Organik, Peternak ayam buras/broiler, Jumlah Pelaku Usaha peternak kelinci, Jumlah Pelaku Usaha Peternak Kambing/Domba, Daging Unggas, Susu, Padi, Jagung dari 9 (sembilan) indikator ini akan tercapai , seperti Jumlah komoditas agribisnis pertanian saat ini sudah mencapai 90 % artinya diakhir tahun 2019 akan tercapai. Dari 10 (sepuluh) komoditas ini antara lain : Padi (ramah lingkungan), Tanaman Hias, sayuran organik, tabulapot, jamur, pengolahan jamur, olahan lidah buaya, budidaya lidah buaya dan hidroponik, indikator yang lain juga akan tercapai di akhir tahun sesuai dengan pentahapan pelaksanaan kegiatan, seperti padi untuk saat ini baru tercapai 47% dikarenakan masa tanam dan masa panen yang tidak bersamaan yang menjadikan tidak tercapai ,hal ini bukan menjadi kendala i dan indikator ini akan tercapai diakhir tahun.

Sedangkan Untuk 9 (sembilan) indikator Capaian Kinerja termasuk dalam kriteria Perlu Kerja Keras untuk dapat mencapai target kinerja di Tahun 2019 yaitu Prosentase Petani yang melaksanakan (Good Agricultural Practices) GAP, Rasio petani terlatih, Prosentase petani yang melaksanakan (Good Handling Practices) GHP, Luas Lahan Pertanian Organik, Prosentase petani yang telah menerapkan teknologi pertanian, Rasio peternak terlatih, Produksi Ubi kayu, Daging ruminansia dan telur

Untuk indikator yang belum tercapai sama sekali dan posisi masih 0 (nol) yaitu :

- Prosentase Petani yang melaksanakan (Good Agricultural Practices) GAP dalam posisi masih 0 (nol) dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan disemester 2
- Terkait dengan Good Handling Practices (GHP) posisi masih 0 (nol) dikarenakan pelatihan belum dilaksanakan. Adapun pelatihan dalam satu kegiatan 25 peserta dan tidak semuanya akan melaksanakan GHP dikarenakan kebanyakan petani masih dengan pola lama dalam hal ini petani sulit untuk merubah kebiasaannya untuk melakukan pengerjaan dengan alat modern dan masih dengan alat tradisional ,Sebenarnya penerapan GHP ini kalo diterapkan akan sangat menguntungkan bagi petani karena akan mendapatkan hasil yang lebih baik , penerapan ini menitik beratkan penanganan hasilnya lebih berkualitas dibanding dengan alat tradisional akan tetapi para petani masih banyak yang memakai alat itu.,
- Peningkatan produksi daging ruminansia sangat kecil sehingga kesulitan untuk mencapai target.
- Untuk daging ruminansia produksi sangat kecil sehingga sering mengalami kesulitan untuk mencapai target. konsumsi daging sapi masyarakat masih kesulitan, adapun daging ruminansia diIndonesia termasuk dalam tingkat terendah di dunia. Dalam setahun, masyarakat Indonesia mengonsumsi kurang dari 5 kilogram daging. Pendapatan

per kapita yang rendah serta pengetahuan yang minim dinilai sebagai salah satu faktor penyebab, Rasio petani terlatih posisi masih 0 (nol) dikarenakan belum dilaksanakan kegiatannya dan akan dilaksanakan pada semester di bulan September dalam hal ini jumlah petani terlatih ada 425 orang yang mana kategorinya sudah mengikuti pelatihan.

- Telur tidak tercapai dan sampai dengan saat triwulan II baru tercapai 1% hal ini dikarenakan adanya kekeliruan angka dalam penulisan target
- Untuk ubi kayu sampai dengan saat ini posisi juga masih (0) yang mana ubi kayu untuk panen jangka waktunya cukup panjang, akan tetapi ubi kayu akan tercapai target bahkan tahun ini akan melampaui target karena masa panen ubi kayu itu jangka waktu tanam sampai berbuah dengan waktu agak panjang.

2.1.3.1.28 Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 55

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019		
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	65,00%	35,04%	100,1%	▶
		Jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU)		5.233	5.597	107%	●
		Jumlah KK/25		8.605	8.605	100%	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 3 (tiga) indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terdapat 3 (tiga) indikator yang optimis akan tercapai yaitu rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU), jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jumlah KK/25.

2.1.3.1.29 Perdagangan

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) program prioritas dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

:

Tabel 2 - 56

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	12 %	13.50 %	112%	●
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	14	14	100 %	●
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	23%	100 %	435 %	●
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	32 %	320 %	●
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	12 %	5.01%	41.75 %	▼
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	80 %	80 %	100%	●
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US\$1.250.000	US\$ 1.150.000	US\$ 12.530	1.08 %	▼
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	5 %	3,37 %	67 %	▶
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera	3.100	2.900	2,745	94.65 %	▶
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	60 %	20 %	33%	▼

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari keenam program prioritas yang di dalamnya memuat 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Perdagangan, 5 (lima) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan. sedangkan 2 (dua) indikator capaian optimis akan

tercapai 100% pada akhir tahun 2019 dan 3 (tiga) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut,

Dari tabel diatas nampak terdapat 3 (tiga) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut, hal tersebut hanya dikarenakan kegiatan – kegiatan pendukung pencapaian indicator tersebut belum dilaksanakan, tinggal langkah konkrit dalam melaksanakan kegiatan pendukung urusan perdagangan ini optimis tercapai.

Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan indicator Cakupan PKL yang dibina dan Jumlah shelter PKL yang dikelola menunjukkan capaian target yang cukup tinggi, namun demikian juga perlu diwaspadai daya dukung kota dalam memfasilitasi PKL karena hal ini terkait erat dengan pemanfaatan trotoar kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Solusi permasalahan :

- membatasi pertumbuhan PKL maupun pertumbuhan Shelter PKL.

2.1.3.1.30 Perindustrian

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 57

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi capaian hingga Triwulan II	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	3,20 %	1,58 %	49.37 %	▼
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	12	12	100%	●
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,20 %	4,15%	98.80 %	▶
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.14%	5.12%	99.61%	▶

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 >80% target Triwulan kedua 2019 atau > 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 ≤ 80% Triwulan kedua 2019 atau ≤ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 4 (empat) program prioritas yang di dalamnya memuat 4 (empat) indikator kinerja urusan Perindustrian , 1 (satu) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan yaitu Jumlah Sentra Industri sedangkan 2 (dua) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir tahun 2019 yaitu Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll) dan Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna dan 1 (satu) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut yaitu Peningkatan daya saing IKM Formal.

Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

- Peningkatan daya saing IKM formal masih sulit diupayakan dikarenakan perilaku higienis/keselamatan kerja belum menjadi perhatian bagi para pelaku usaha IKM Formal yang mengakibatkan produk yang dihasilkan juga kurang mempunyai daya saing di pasar
- Dukungan para pemangku kepentingan terkait promosi sentra – sentra industry kurang diperhatikan

Solusi permasalahan :

- Melakukan pembinaan intensif kepada para pelaku industry kota magelang terutama terkait dengan masalah management usaha agar produk yang dihasilkan lebih memiliki daya saing di pasar baik regional maupun nasional.
- Pengampu urusan perindustrian perlu mengelola anggaran secara cermat guna mengoptimal potensi perindustrian kota magelang yang tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1.31 Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, dan mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah. Upaya penanganan urusan ketransmigrasian di daerah asal dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu (1) pengarahan calon transmigran (2) sosialisasi potensi lokal daerah transmigran (3) fasilitasi penempatan transmigrans. Dengan melaksanakan ketiga fungsi tersebut capaian realisasi indikator urusan Ketenagakerjaan hingga Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-58

Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian hingga Triwulan II Tahun 2019
Keterangan

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD triwulan kedua Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian triwulan kedua Tahun 2019		
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	100 %	0%	0%	▼
2	Program Transmigrasi Regional	2. Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100 %	0%	0%	▼

Sumber : Dinsaker Kota Magelang, 2019

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari hasil capaian indikator diatas terlihat bahwa sampai dengan akhir Triwulan Kedua Tahun 2019 kedua target indikator kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan penempatan transmigrasi dilaksanakan pada triwulan IV setelah lokasi penempatan dinyatakan clean and clear (2 C). Sementara untuk kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019 dengan jumlah peserta 300 orang dari 17 kelurahan di Kota Magelang.

2.1.3.2 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.2.1 Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 59

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d.	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019	Kinerja RKPD Th.	Status

			2021	Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019	2019	Capaian
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100 %	100%	100%	●
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	59,7%	95,18%	131.66%	●
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	100 %	70%	70%	▼
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	75 %	70%	93,3%	▲
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100 %	100%	100%	100%	●
4	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	3	1	4	>100%	●
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	0	0	100%	●
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1	1	0	100%	●
5	Program pengelolaan barang milik daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	65%	74,36%	114,4%	●
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	75%	96,55%	128,73%	●
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	●
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	●
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019		
9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	35%	56,29%	160.83%	●
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	84,71%	107,14%	●
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	20%	10,34%	51,72%	▼
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	BB	B	100%	●
		Persentase SKPD yang direview LKJIP	75%	45%	62,07%	137,93%	●
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	95%	85,24%	89,73%	▶
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	50%	50,00%	100%	●
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	95%	85,24%	89,73%	▶
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	95%	100%	105,26%	●
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	70%	90,90%	129,86%	●
		persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	70%	93,24%	133,205	●
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan :

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2019 $\geq$ 100% target 2019 atau $\geq$ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2019 $>$ 80% target 2019 atau $>$ 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2019 $\leq$ 80% target 2019 atau $\leq$ 80 % target RPJMD)

Dari 9 program dan 27 indikator dalam urusan lain lain hampir semua indikator menunjukkan keberhasilannya mencapai target. Dari 27 indikator dengan kinerja yang kurang mencapai target, terdapat dua indikator dengan capaian dibawah 100% dan diatas 80% Antara laian:

1. Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Hal ini disebabkan karena nilai turun dari triwulan 3 disebabkan adanya pemeriksaan tematik yang tindak lanjutnya belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena waktu di TW 4 yang terlalu cepat.

2. Penyelesaian TLHP BPK meningkat

Selain itu ada 2 indikator yang dibawah target dan perlu upaya keras untuk mencapai target, Indikator tersebut antara lain:

1. Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah) dan
2. Persentase zona integritas yang terbentuk.

Untuk indikator persentase zona integritas yang terbentuk direncanakan akan merubah indikator dan target karena tahapan belum memiliki kecukupan untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Di fungsi ini juga terdapat indikator prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani yang awalnya ada di bagian Hubungan Masyarakat dikarenakan belum adanya aplikasi pengaduan masyarakat yang bisa mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan yang ada sehingga untuk memudahkan dalam monitoring, evaluasi dan pelaporannya maka penanganan pengaduan masyarakat aka digeser ke Diskominsta.pada tahun 2020 mendatang.

2.1.3.2.2 Keuangan

Target dan realisasi indikator urusan Keuangan hingga triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 -60

Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan hingga Triwulan II Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
			s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019 s.d TW II		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	70%	75,39%		●
		2 Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%		●
		3 Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%		●
		4 Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%		●
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Persentase pertumbuhan PAD	10,21%	12,83%	3,26%		▼
		2 Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	87%	100%		●

3	Program Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12%	12,33%	14,16%	●
		2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	2,91%	3,33%	2,54%	▶

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari sembilan indikator kinerja urusan keuangan, terdapat 6 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang, barang milik daerah yang didayagunakan, pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu, pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu, persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, dan indikator rasio pajak daerah terhadap PAD..

Melihat realisasi indikator rasio retribusi daerah terhadap PAD dengan target 3,33% pada tahun 2019 yang dirasa tidak akan tercapai, maka ada perubahan target pada tahun 2020. Masih terdapat 1 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target di tahun 2019 yaitu indikator persentase pertumbuhan PAD, namun optimis dapat mencapai target yang telah ditentukan.

2.1.3.2.3 Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan 11 (sebelas) indikator kinerja dan 7 (tujuh) program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 61

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Hingga Triwulan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	75	75,14%	100.18%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja			Target 2021	Target 2019	Capaian Triwulan 2 2019	Kinerja RKPD Th.2019	Status Capaian
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir			85	75	76	101,33%	●
		Persentase Masyarakat Publik Partisipasi dalam Konsultasi			55	40	44,44	111,1%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir			85%	78%	80%	102,56%	●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi			100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budayai			100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana			100	100	100	100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti			4	3	3	100%	●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan			95	90	85,71	>95,23%	▶
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan			100	100	100	100%	●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari ke 11 target yang diemban oleh penunjang perencanaan keseluruhan target mampu dilalui dengan baik, hanya masih ada 1 indikator yang belum mencapai target, akan tetapi optimis pada akhir periode akan tercapai.

2.1.3.2.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dilaksanakan dengan 6 (enam) program dengan 15 (lima belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi tahun 2019 triwulan II sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 62

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hingga Triwulan II
Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
				Target 2019	Capaian 2019 Triwulan II		
1.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi	59%	57,50 %	57,39%	99,80%	▶
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan BKD	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	46%	46%	100%	217,39%	●
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	100%	50%	50%	▼
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	100%	2000%	●
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01 %	0,08 %	0,14%	57,14%	▼
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	98%	97,50 %	97,90%	100,41%	●
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18 %	0,20 %	0,03%	15,00%	▼
3	Program Kedisiplinan Pendidikan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	96%	100%	104,16%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	100%	100%	75%	75%	▶

			Kepemimpinan						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	100%	100%	0	0%	▼		
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	90%	90%	100%	111,11%	●		
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Karakter	97%	97%	0%	0%	▼		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	95%	100%	105,26%	●		
6	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	92%	0%	0%	▼		

Sumber : BKPP Kota Magelang, 2019

Keterangan :

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target kinerja RKPD di tahun 2019, belum seluruhnya dapat mencapai target. Dari 15 indikator yang mendukung 6 program, masih terdapat 6 (enam) indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target di akhir tahun 2019 ini mencapai target, yaitu :

1. Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural dengan capaian kinerja 50%
2. Persentase ASN yang dijatuhi hukuman, pada program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan capaian kinerja 57,14%
3. Persentase pelanggaran disiplin ASN, pada program peningkatan disiplin aparatur dengan capaian kinerja 15,00%
4. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan dengan capaian 0%
5. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Karakter dengan capaian 0%
6. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dengan capaian 0%

Untuk indikator presentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural ini optimis akan tercapai target di akhir tahun 2019, untuk di triwulan II ini belum bisa tercapai dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang tergantung dari kebijakan dari kepala daerah. Indikator lain yang belum tercapai adalah indikator presentase ASN yang dijatuhi hukuman hal ini dikarenakan kegiatan atau proses belum selesai.

Kinerja persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan, sama sekali tidak nampak karena pada tahun 2019 sudah terdapat 130 CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan dari total juma CPNS 154 yang rencana akan dilaksanakan pada Semester II.

Dari 11 indikator dengan kinerja yang mencapai atau melampaui target, terdapat satu indikator dengan capaian yang sangat tinggi karena dapat mencapai angka 2000%, yaitu persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN. Hal ini dapat terjadi karena komponen perhitungan mencakup jumlah penanganan hukuman yang dilaksanakan di OPD. Setelah dilakukan pencermatan terhadap definisi operasional untuk penghitungannya, maka indikator tersebut akan dilakukan penyesuaian. Pada kasus capaian kinerja yang lain, yaitu pada persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis, target dapat terlampaui hingga mencapai 132% karena penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian, seringkali sudah menanggung biaya akomodasi, oleh karena itu anggaran biaya yang dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan ASN dengan jumlah yang melebihi dari yang direncanakan.

2.1.3.2.5 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan program yang dilaksanakan berjumlah 9 (sembilan) program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi capaian tahun 2019 nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 - 63

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan hingga Triwulan II Tahun 2019

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
					Target 2019	Capaian 2019 Triwulan II		
1.	Program Kreativitas Masyarakat	Pengembangan dan Inovasi	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	23%	17 %	46,46%	273,29%	●
			Persentase krenova OPD yang berkualitas	12%	8%	8,57%	107,12%	●
2	Program Pengkajian	Penelitian dan	Persentase hasil riset/kajian yang ditindak lanjuti	50%	40 %	46,67%	116,67%	●
			Rasio Hasil Penelitian Mandiri	NA	0%	100%	100%	●
3	Program Pengembangan dan Penerapan Iptek		Cakupan Pengembangan IPTEK	20%	15%	8,45%	56,33%	▼
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan		Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	20%	15 %	51,38%	342,5%	●
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian		Cakupan publikasi hasil hasil penelitian	80%	70 %	25%	35,71%	▼
			Cakupan publikasi artikel ilmiah pada Open Journal System	8	0%	110%	100%	●
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi		Cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi	15%	7%	5%	71,42%	▼

7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan INovasi	Persentase produk teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	12 %	34,78%	289,83%	●
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	55 %	53,33%	96,96%	▶
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan peningkatan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	55 %	71,67%	130,31%	●

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2019

Keterangan :

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>$ 80% target Triwulan kedua 2019 atau $>$ 80% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq$ 80% Triwulan kedua 2019 atau $\leq$ 80 % Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Memperhatikan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh status capaian kinerja program dengan indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan di tahun 2019 triwulan II adalah sebagian besar sudah mencapai/melampaui kinerja yang ditargetkan di tahun 2019. Namun demikian terdapat 2 program yang saat ini tidak tercantum sebagai program di dalam RPJMD 2016-2021 namun menjadi indikator program prioritas urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu :

1. Rasio hasil penelitian mandiri dengan target capaian mencapai 100%, karena ditargetkan 2 penelitian berhasil dilaksanakan
2. Cakupan publikasi artikel ilmiah pada Open Journal System (OJS) dengan capaian kinerja 100%

Capaian program pembinaan hilirisasi produk teknologi dan inovasi berhasil sesuai dengan target, melalui hasil krenova masyarakat yang berhasil menjadi juara harapan tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu Magic Grill (alat bakar sate) dan saat ini sudah mulai dikembangkan dengan produksi alat tersebut untuk dipasarkan.

Dari 12 indikator dalam urusan penelitian dan pengembangan terdapat 8 (delapan) indikator yang sudah melampaui target tahun 2019, 1 (satu) indikator yang optimis akan tercapai dan 3 (tiga) indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir Tahun 2019 ini. Indikator yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir tahun ini Antara lain:

1. Cakupan Pengembangan IPTEK dengan program pengembangan dan penerapan iptek dengan capaian kinerja 56,33%.
2. Cakupan publikasi hasil hasil penelitian dalam program pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dengan capaian kinerja 35,71%.
3. Cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi dengan capaian kinerja 71,42%.

2.1.3.2.6 Pengawasan

Target dan realisasi indikator urusan Pengawasan hingga Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 64

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan hingga Triwulan II Tahun 2019

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2019	Status Capaian
			Target 2019	Capaian 2019 s.d TW II		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	40%	66,23%	●
	2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	100%	85%	100%	●
	3	Nilai hasil LKJIP SKPD	B	BB	B	●
	4	Persentase SKPD yang direview LKJIP	75%	55%	75,86%	●
	5	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95%	96%	85,24%	●
	6	Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun	5%	40%	100%	●
	7	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	100%	85,24%	●
	8	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal	100%	100%	100%	●
Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	1	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	87%	70%	31,25%	▼
	2	Persentase aparat SPIP aktif	80%	70%	51,72%	▼
	3	Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	90%	85%	100%	●
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 3	Level 3	●
	2	Persentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	80%	75%	100%	●
	3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	75%	100%	●
Program Sinergitas Penerapan SPI pada PD	1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	55%	70%	96,56%	●

2	Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	5%	40%	0,69%	●
3	Persentase implementasi SPIP	100%	84%	55,17%	▼

Sumber : Inspektorat Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\geq$ 100% target Triwulan kedua 2019 atau $\geq$ 100% target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $>80\%$ target Triwulan kedua 2019 atau $> 80\%$ target Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi Hingga Triwulan kedua tahun 2019 $\leq 80\%$ Triwulan kedua 2019 atau $\leq 80\%$ Tahun 2019 atau Akhir RPJMD)

Dari 17 indikator yang ada, ada 3 indikator yang perlu upaya keras dan sisanya dapat tercapai bahkan melampaui target tahun 2019. Indikator cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya), indikator persentase aparat SPIP aktif dan indikator persentase implementasi SPIP masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Untuk SPIP, semua OPD sudah mendapatkan sosialisasi, namun yang dievaluasi maturitasnya baru 16 OPD, sedangkan sisanya baru akan dievaluasi secara bertahap di tahun berikutnya.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah. Inovasi dan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempercantik daerahnya dan meningkatkan nilai jual daerah akan berpengaruh dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi. Kemampuan suatu daerah dalam mengenali dan menggali potensi daerah, mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor pembentuk dan penentu daya saing kemudian menuangkannya ke dalam strategi dan kebijakan yang tepat meningkatkan daya saing suatu daerah. Selain hal yang mampu meningkatkan daya saing, Pemerintah juga harus jeli dalam memperhatikan hal – hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban di daerah, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak, buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya. “Reformasi struktural harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah mengingat kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah menanamkan investasi ke suatu daerah.

Pada bulan Desember 2018 , Walikota Magelang menerima penghargaan Predikat pertama daerah dengan Indeks Daya Saing Terbaik dalam “Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tingkat Jawa tengah Tahun 2018”. Capaian ini tentu saja membaggakan Kota Magelang, walaupun sebagai Kota kecil dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam namun mampu bersaing dengan kota – kota lain di Jawa Tengah dalam hal daya saing daerah. Capaian indeks daya saing ini di nilai dari beberapa sektor seperti sektor pendidikan,

ekonomi, inovasi, infrastruktur dan sektor lainnya. Keberhasilan Kota Magelang sebagai Kota dengan daya saing terbaik pertama di Jawa Tengah, mengungguli Kota Semarang di peringkat kedua dan Kota Wonogiri di peringkat ke tiga. Capaian Kota Magelang dalam Indeks Daya Saing tersebut bukanlah capaian yang pertama. Survey Daya saing yang dilakukan pada tahun 2016 mengukuhkan Kota Magelang sebagai Kota dengan peringkat tertinggi dalam daya saing daerah di antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Penghargaan ini juga mengukuhkan Magelang sebagai salah satu kota yang dinyatakan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah, dimana aspek ini mempunyai tiga fokus yaitu :

- a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
- b. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur;
- c. Iklim Berinvestasi
- d. Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi suatu daerah merepresentasikan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber – sumber pendapatan daerah yang berupa sumber – sumber daya daerah (factor produksi/input) yang dipergunakan untuk menghasilkan output atau pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemampuan ekonomi daerah juga menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang dilaksanakan di daerah dalam satu periode tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah sekaligus sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pendapatan karena dua hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila diimbangi dengan adanya pemerataan pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan tabel PDRB per kapita penduduk Kota Magelang dengan jumlah penduduk tengah tahun berdasarkan perhitungan BPS dengan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai berikut :

Tabel 2 - 65

PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2012-2017 dan 2018 (menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
Jumlah Penduduk pada tengah tahun (jiwa)	119.416	120.879	120.438	120.792	121.112	121.474	121.872
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	41.09 juta/th atau 3.42 juta/bln	44.69 juta/th atau 3.72 juta/bln	49.21 juta/th atau 4.10 juta/bln	53.65 juta/th atau 4.47 juta/bln	57.92 juta/th atau 4.83 juta/bln	62.88 juta/th atau 5.24 juta/bln	67.95 juta/th atau 5.66 juta/bln

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***

Sumber : Dinas KOMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2019

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka prediksi diskomista

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan PDBR per kapita penduduk . PDBR per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDBR per kapita tercatat sebesar 4.827juta/bulan atau 57.92 juta /tahun (atas dasar harga berlaku). Upaya untuk meningkatkan ukuran dari indikator ini di antaranya melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk aerta peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Kondisi di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota di level 5.19% dengan prediksi jumlah penduduk tengah tahun 2017 sebesar 121.474 jiwa maka jumlah pendapatan penduduk atas dasar harga berlaku di prediksi tumbuh mencapai 58.92 juta/tahun (4.91 juta/bulan). Sedangkan dengan prediksi PDBR Kota Magelang yang meningkat di tahun 2018 maka dengan jumlah penduduk tengah tahun sebanyak 121.872 jiwa, maka pendapatan per kapita penduduk Kota Magelang di prediksi ikut meningkat yaitu sebesar 67.95 juta / tahun

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Magelang dalam beberapa tahun ini yang direpresentasikan melalui indeks gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 di katakana bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Indeks gini di Kota Magelang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2012 meningkat kemudian sebaliknya pada tahun 2013 mengalami penurunan. Kondisi ini berulang hingga tahun 2016, dengan kisaran perubahan yang tidak terlalu ketimpangan antar kelompok pendapatan yang cenderung tidak melebar atau dengan kata lain gap antar kelompok pendapatan semakin kecil atau semakin merata. Data Indeks gini dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Indeks Gini dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berada di kisaran 0.3. Sementara untuk 3 tahun terakhir ini di prediksi indeks gini kota Magelang bertahan dan mempunyai kecenderungan yang meningkat . Hal ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan masyarakat di Kota Magelang mendekati merata namun masih menyisakan permasalahan yang berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Tabel 2 - 66

Perbandingan Indeks Glni, Kota Magelang Tahun 2014- 2015 dan prediksi tahun 2016-2018

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016 -2018*
Gini Rasio Kota Magelang	0.360	0.34	0.328-0.34*

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2017, BPS Kota Magelang 2018

Selain indeks Gini, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan kriteria Bank Dunia, di mana 40% penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan masyarakat ini di gambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan terhadap seluruh penduduk yang di golongan menjadi : a). <12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi; b). 12%-17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang; dan c). > 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Tabel 2 - 67
Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita 2011-2015

Tahun	40% rendah	40% Menengah	20% Tinggi
2011	19.40	38.24	42.36
2012	16.10	35.74	48.17
2013	19.24	39.24	41.52
2014	17.15	38.75	44.10
2015	17.20	37.09	45.71

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat di lihat dari prosentase pengeluaran non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi non makanan dengan artian bahwa semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran konsumsi non makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya di gunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2 - 68
Tabel Perbandingan % Konsumsi Makanan, % Konsumsi Non Makanan dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2011 – 2017

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)
2013	54.87	45.13	757.919
2014	55.64	44.36	787.022
2015	54.38	45.62	880.508
2016	58.22	41.78	1.125.811
2017	55.46	44.54	1.067.340

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2017, BPS Kota Magelang 2018

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah Pengeluaran Rumah Tangga. Indikator ini dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan maka ada kecenderungan meningkat pula pengeluaran untuk non makanan dan begitu pula sebaliknya. Dari tabel di atas, maka apabila didasarkan dengan teori kesejahteraan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya $\geq 50\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi non pangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan $\geq$ menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat di atas 50% sehingga apabila di dasarkan dari teori di atas , dapat di golongan ke dalam kondisi rumah tangga yang baik. Proporsi pengeluaran non makanan lebih dari 50% dengan fluktuatif yang mendekati 60%. Tahun 2016 merupakan nilai terkecil untuk persentase pengeluaran makanan atau nilai tertinggi untuk persentase pengeluaran non makanan dalam rentang enam periode. Capaian tahun 2017 untuk % konsumsi non makanan sebesar 55.46% sedangkan % konsumsi makanan sebesar 44.54%. Walaupun % konsumsi non makanan pada tahun 2017 mengalami penurunan tapi masih masuk dalam kriteria baik. Dalam beberapa terakhir ini terlihat bahwa konsumsi non makanan selalu lebih tinggi daripada konsumsi makanan walaupun nilainya berfluktuatif di setiap tahunnya dan nilainya berkisar dari 50% sampai dengan 60%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara untuk rata – rata pengeluaran per kapita per bulan selama rentang tujuh tahun dapat di lihat bahwa rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 653.780,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.125.811,- di tahun 2016 dan capaian pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.067.340,-. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa rata – rata pengeluaran per kapita mengalami sedikit penurunan dan hal ini berpengaruh pada menurunnya % konsumsi non makanan dan meningkatnya % konsumsi makanan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2018 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2017 dengan kecenderungan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

Tabel 2 - 69
PDRB Menurut Lapangan Usaha adhk dan adhb Tahun 2010-2012
dan Prediksi Tahun 2013-2016 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2013	5.356.307,45	4.755.269,18
2014	5.915.830,84	4.987.376,46
2015	6.466.971,04	5.241.660,00

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2016*	7.015.380, 09	5.518.684,55
2017**	7.638.607, 53	5.804.311,98
2018***	8.280.985,32	6.106.575,37

Sumber : Dinas KOMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2018

* Angka sementara

** Angka sangat sederhana

Indikator selanjutnya dari aspek Kemampuan Keuangan Daerah adalah Jumlah bank dan lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Magelang. Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas wilayah 18.53 km², pada tahun 2017 Kota Magelang mempunyai 49 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah, 2 lembaga perbankan milik daerah, serta 22 bank swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang. Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi : a). 36 Bank Umum (commercial Bank), terdiri 34 bank konvensional dan 2 bank syariah, b). 13 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank), yang merupakan jenis konvensional; dan 3). 3 Bank Syariah (Islamic Bank). Selain Lembaga Keuangan perbankan, jasa keuangan Non Bank yang terdapat di Kota Magelang pada tahun 2017, terdiri dari 17 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di 17 Kelurahan dan 15 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian. (sumber, Bagian Perekonomian, SIPD Kota Magelang 2017)

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2018 terdapat 219 koperasi yang terdiri dari :a). 161 koperasi konsumen dengan jumlah anggota 22.608 orang; b). 9 koperasi produsen, dengan jumlah anggota sebanyak 932 orang; c). 40 koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 31.943 orang; d). 3 koperasi sekunder dan, e). 6 koperasi jasa dengan jumlah 482 orang. Total masyarakat yang menjadi anggota koperasi sebanyak 58.342 orang. Total modal usaha Koperasi – koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun semester 1 tahun 2018 sebesar Rp.534.196.341.669,-. Modal usaha ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Modal usaha pada tahun 2017 sebesar 465.629.773.000, sementara volume usahanya sebesar Rp.443.492.700.500,-, nominal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.366.810.970.000,-. Sisa Hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.455.438.000,-. dan semester 1 tahun 2018 sebesar Rp. 11.163.560.000,-. Kondisi pada tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan trend yang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian pada tahun 2016, Modal usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp.445.341.150.000,- dengan volume usahanya sebesar Rp.302.729.304.000,-

Geliat perekonomian di kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan. Sebagai kota kecil yang tidak mempunyai lapangan industri besar, lapangan usaha yang digeluti masyarakat kota Magelang lebih pada

industri kecil dan industri menengah. Data tahun 2018 tercatat ada 600 industri kecil di Kota Magelang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.703 orang sedangkan untuk perusahaan industri menengah dengan jumlah sebanyak 21 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.557 orang. Selain sektor industri kecil dan menengah. . (sumber, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Data Strategis Kota Magelang 2019)

Kota Magelang mempunyai beberapa fasilitas perdagangan yang mendukung peran dan fungsi Kota Magelang sebagai Kota perdagangan dan Jasa. Fasilitas perdagangan di Kota Magelang mampu memberikan keunggulan dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan tersedianya sarana perdagangan baik berupa sarana perdagangan tradisional, maupun sarana perdagangan modern. Fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup mendukung dan berkontribusi di dalam menambah sektor jasa perdagangan. Pada tahun 2018 di Kota Magelang terdapat 5 pasar tradisional, 20 minimarket, 7 supermarket dan 17 grosir. Keberadaan fasilitas – fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Magelang bahkan beberapa fasilitas jasa perdagangan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di sekitar Kota Magelang dan mampu menjadi daya tarik di sektor jasa perdagangan. Selain itu, fasilitas perdagangan penting lainnya berupa pertokoan/komplek pertokoan ataupun pasar swalayan (supermarket), antara lain adalah : Komplek pertokoan di sepanjang jalan utama di tengah kota mulai dari Jl. Jend. Soedirman, Jl. Pemuda sampai dengan Jl. Jend. A Yani (Kelurahan Magersari, Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Utara, Potobangsari, Kedungsari sampai dengan Kramat Utara), serta beberapa komplek pertokoan lain seperti Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Jl. Singosari dan Jl. Tidar dan Beberapa supermarket atau pasar swalayan seperti Matahari, Gardena, Trio Plaza, Giant, Superindo dan minimarket Indomart dan Alfamart yang banyak tersebar di Kota Magelang.

Jasa Perdagangan di Kota Magelang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Dengan di dukung fasilitas dan sarana prasarana yang memadai , mampu menarik tenaga kerja yang bergerak pada sektor ini. Jumlah pedagang yang bekerja pada pasar tradisional tahun 2018 sejumlah 4.606 orang dengan perincian: a). pasar kebonpolo sejumlah 440 pedagang; b). pasar cacaban sejumlah 149 pedagang ; c). pasar gotong royong sejumlah 849 pedagang; d). pasar Rejowinangun sejumlah 2.728 pedagang dan d). pasar sidomukti sejumlah 440 pedagang.

Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk terus melakukan revitalisasi beberapa sarana jasa perdagangan di Kota Magelang khususnya Pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang dengan harapan pasar tradisional ini mempunyai daya saing tersendiri dengan memperhatikan kearifan lokal apabila di bandingkan dengan pasar modern mengingat pasar tradisional mampu menyerap ribuan masyarakat yang bergerak di sektor tersebut. Capaian membanggakan di raih Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017, dengan di raihnya penghargaan [Anugerah Pancawara 2017](#) dari Kementerian Perdagangan untuk Kategori [Pasar Rakyat](#) Pemerintah Daerah Tipe I dan II diraih Pasar Rejowinangun (Magelang) dengan inovasi 'Pengembangan [Pasar Rakyat](#) sebagai Ruang Sosial Budaya'. Anugerah Pancawara 2017 merupakan penghargaan yang pertama kalinya diselenggarakan Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengapresiasi pasar tradisional di Indonesia yang dinilai sukses membuat inovasi bagi kemajuan pasar yang dikelolanya

Indikator lain yang merepresentasikan Aspek Kemampuan Keuangan daerah adalah jumlah penginapan/ hotel yang ada di Kota Magelang beserta sarana pendukung pariwisata di Kota Magelang. Pengembangan wisata di Kota Magelang dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek produk wisata yang meliputi obyek wisata, daya tarik wisata,serta aksesibilitas. Sementara aspek yang kedua adalah pasar wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Objek

dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religius/ziarah, wisata alam dan wisata buatan. Adapun fasilitas wisata terutama di dukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata berupa hotel, rumah makan dan fasilitas lainnya.

Tabel 2 - 70
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010- 2018

Jml Kunjungan Wisata	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah wisatawan	716.850	971.163	918.232	994.187	1.139.454	1.020.040	790.066	1.108.490
Wisatawan Dalam Negeri	716.206	970.554	913.768	988.622	1.133.373	1.013.138	785.091	1.104.133
Wisatawan Luar Negeri	644	609	4.464	5.565	6.081	6.902	4.975	4.357

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang , SIPPD 2016, Bappeda Kota Magelang
Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2019

kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Magelang relatif masih kecil. Perlu dilakukan Inventarisasi dan penggalan berbagai potensi, keunikan dan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi, informasi dan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan berbagai event yang dapat menarik wisatawan hadir ke Kota Magelang serta mengembangkan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Magelang dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Magelang bisa dilihat dari kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang yang meningkat setiap tahunnya. Di bawah ini disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2 - 71
Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2014-2018 dan realisasi hingga Mei 2019

Tahun	Sumber Pendapatan Daerah				Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi terhadap PAD
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Total pajak hotel, restoran, hiburan		
2014	2.027.782.556,-	1.797.050.823,-	1.329.451.348,-	5.154.284.727,-	164.927.631.230,	3.13%
2015	2.441.943.652,-	2.104.103.322,-	1.459.002.821,-	6.005.049.795,-	186.677.410.081,	3.22%
2016	2.879.263.958,-	2.431.241.151,-	1.634.690.181,-	6.945.195.290,-	220.193.738.774,	3.15%

2017	3.304.979.480,-	3.388.469.448,-	1.884.212.564,-	8.577.661.492,-	233.392.755.573,-	3.68%
2018	3.808.132.675,-	4.317.038.777,-	3.131.630.218,-	11.256.801.670,-	249.873.268.826,0	4.56%
Mei 2019	1.812.214.329,-	2.074.883.291,-	1.377.118.468,-	5.264.216.088,-	115.009.894.091,-	4.58%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011- 2018 dan realisasi Mei 2019, BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Magelang, posisi sampai dengan bulan Mei 2019 menunjukkan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan menunjukkan trend yang positif dan optimis bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2019 akan tercapai atau bahkan di harapkan akan mampu melampaui target seiring dengan meingkatnya pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak hiburan yang mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2019.

Sebagai wilayah yang mengandalkan sektor jasa, serta karena kedekatannya dengan berbagai obyek wisata penting seperti Candi Borobudur, Candi Mendut maupun obyek wisata terkenal lainnya, di wilayah Kota Magelang tersebar berbagai macam fasilitas pendukung pariwisata, khususnya fasilitas jasa penginapan berupa hotel dan losmen. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang. Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau Amenitas yang utama selain rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang.

Fasilitas perhotelan tersebut, baik berupa hotel berbintang maupun hotel melati atau losmen, tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ada di Kota Magelang. Pada Tahun 2015 fasilitas hotel di Kota Magelang bertambah 2 yaitu Cityhub Hotel dan Hotel Safira. Pada tahun 2017 bertambah 1 hotel di jalan Sriwijaya yaitu hotel Ahava .Dengan bertambahnya 3 hotel tersebut, maka sejak Tahun 2017 Kota Magelang memiliki fasilitas Hotel sebanyak 18 hotel, terdiri dari 10 hotel kelas melati, 4 hotel bintang 2 yaitu Hotel Trio, Hotel Borobudur Indah dan Hotel Cityhub, dan Hotel Ahava, 3 hotel kelas Bintang 3 yaitu Hotel Sriti, Hotel Oxalis dan Hotel Safira, 1 buah hotel bintang 4 yaitu Hotel Atria yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, serta 1 buah hotel bintang 5 yaitu Hotel Puri Asri yang terletak di tepi sungai Progo dan bersebelahan dengan Taman Kyai Langgeng. Layanan Hotel yang ada di Kota Magelang di rasa cukup untuk menampung wisatawan dan tamu yang berkunjung di Kota Magelang bahkan pada saat event- event tertentu baik yang berskala regional maupun nasional yang di selenggarakan di Kota Magelang. Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri yang menginap di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2018 sebanyak 106.982 pengunjung. sedangkan jumlah pengunjung luar negeri yang menginap sebanyak 1.035 pengunjung. Capaian ini cukup menggembirakan, harapannya pada akhir tahun 2018 bisa melebihi capaian pada tahun 2018. Data pada tahun Tahun 2017 sebanyak 189.916 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung luar negeri yang menginap di Kota Magelang sebanyak 1.827 pengunjung. Selain penginapan yang di sediakan oleh pihak swasta, Pemerintah Kota Magelang

memanfaatkan beberapa gedung milik pemerintah yang di dayagunakan sebagai penginapan yang di sewakan untuk umum (guest house).

Selain penginapan, hal yang mendukung pariwisata di Kota Magelang adalah jumlah agen perjalanan wisata, dimana sampai dengan tahun ini tercatat jumlahnya sebanyak 19 agen perjalanan wisata. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan memajukan sektor jasa Pariwisata dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang dilaksanakan di antara penataan dan pengembangan kawasan lembah tidar untuk mendukung wisata religi Gunung Tidar, pengembangan kawasan budaya Mantyasih, pengembangan kawasan kuliner di beberapa titik di Kota Magelang.

Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Beberapa tahun ini Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2018 terdapat 20 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 964 PKL Kuliner di Kota Magelang (sumber Data Strategis Kota Magelang 2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang)

Kebijakan Pemerintah pusat yang bisa menjadi peluang bagi pengembangan Kota Magelang utamanya di sektor pariwisata adalah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Seiring dengan pengembangan kawasan strategis tersebut , apabila Pemerintah daerah bisa memanfaatkan peluang ini dengan menyiapkan segala infrastruktur pendukung dan meningkatkan daya tarik daerah maka Kota Magelang akan merasakan dampak dan keuntungan yang berupa multiplier effect dari kebijakan ini .

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastuktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Insfrastruktur yang memadai di daerah. Salah satu kewajiban dari Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi pergerakan masyarakat atau investor adalah Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai .Fasilitas Wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi sarana perkotaan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan.

Salah satu sarana prasana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di bandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah. Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Data Go Kota Magelang menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 72
Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2018

Tempat Ibadah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Masjid	153	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	224	210	217	217	217	217
Gereja Kristen	16	23	26	26	26	26
Gereja Katholik/Kapel	2	2	2	2	2	2
Wihara	2	2	2	2	2	2
Klenteng	2	2	2	2	2	2
Lainnya	-	-	4	4	4	4

Sumber : Kemenag Kota Magelang, Data Strategis Kota Magelang 2018, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 3.31 jumlah ini telah melebihi dari capaian yang di targetkan pada tahun 2018 sebesar 3%. Dengan luas wilayah yang relatif kecil maka keberadaan tempat ibadah yang ada di Kota Magelang sudah sangat memadai bagi masyarakat untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing. Selain data tersebut di atas, Kemenag Kota Magelang mencatat ada 6 rumah doa yang berdiri di Kota Magelang. Kemunculan rumah doa – rumah doa baru di Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah terutama terkait dengan pendataan dan perijinannya. Di dalam indikator RPJMD juga mengamanahkan adanya indikator tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag. Dari target 7% pada tahun 2018, tercapai 9.51%. Capaian pada tahun 2018 ini melebihi target yang canangkan pada tahun 2018. Kendala yang di hadapi terkait ketidaktercapaian indikator ini adalah belum adanya pedoman dari Dirjen Kemenag terkait standar tempat ibadah di luar agama Islam. Selain itu untuk standar tempat ibadah yang ditetapkan Kemenag terlalu tinggi atau belum menyesuaikan dengan kearifan lokal. Dari jumlah tempat ibadah di Kota Magelang yang telah memenuhi standar dari Kemenag (yang sudah di sesuaikan dengan kearifan lokal) sebanyak 41 tempat ibadah yang rinciannya terdiri dari : 21 tempat ibadah yang berupa masjid, 2 Gereja Katholik, 14 Gereja Kristen dan 2 Klenteng dan 2 vihara. Namun capaian ini masih pada tempat ibadah masjid/mushola mengingat Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/ klasifikasi tempat ibadah, sementara ini dikhususkan terlebih dahulu untuk masjid / mushola se-Kota Magelang. Adapun rincian dari kedua puluh satu tempat ibadah tersebut meliputi 17 masjid tingkat Kelurahan, 3 masjid tingkat kecamatan dan 1 masjid tingkat Kota (Masjig Agung Kota Magelang) – (sumber bagian Kesra –Setda Kota Magelang)

Untuk mendukung Misi Religius, di tiap OPD mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat ibadah yang memadai. Adapun capaian dari tempat ibadah yang memadai di tiap OPD sebesar 56.82% yang artinya dari 29 OPD yang ada di Kota Magelang, sebanyak 17 OPD. Selain tempat ibadah yang ada di OPD, sekolah yang ada di Kota Magelang juga di amanatkan untuk menyediakan fasilitas ibadah untuk siswa – siswa. Hampir di semua sekolah menyediakan fasilitas

ibadah untuk siswa-siswanya. Data pada tahun 2018 terdapat 32 mushola dan 18 masjid yang tersebar di sekolah – sekolah yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk ruangan atau tempat yang di sediakan sekolah untuk fasilitas ibadah bagi siswa – siswa mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing.

Dalam memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat Kota Magelang dan dalam rangka mendukung Kota Religius maka di perlukan adanya Religius Centre yang akan menjadi pusat – pusat kajian keagamaan dan pemberdayaan umat bagi masyarakat di Kota Magelang dan terkait dengan hal tersebut dalam perencanaan lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Magelang sudah merencanakan keberadaan dari Religius Centre tersebut dengan target minimal 2 religius centre

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur diantaranya adalah Ketaatan terhadap RTRW, Prasarana Jalan, Kondisi Permukiman dan Infrastruktur, Sumber daya Air, Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih.

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Perda RTRW

Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011– 2031 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi :

- a) penyelarasan dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
- b) peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
- c) penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah;
- d) penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan dan program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang;
- e) penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
- f) pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

Untuk mengetahui ketaatan terhadap Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Magelang. Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang.

Untuk selanjutnya hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan muatan Perda RTRW Kota Magelang yang perlu mendapat perhatian di tuangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.73

PelaksanaanPemanfaatanRuangterhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Magelang Tahun 2011-2031 Kota Magelang

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	Tujuan penataan ruang di Kota Magelang sudah sesuai dengan karakteristik Kota Magelang
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	
	2.2 Sistem jaringan prasarana	
	2.2.1 Sistem jaringan transportasi	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	
	1 Jaringan jalan	Rencana pengembangan jaringan jalan sudah sesuai dengan karakteristik daerah karena dapat mendukung infrastruktur di Kota Magelang, mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan dapat meningkatkan perekonomian. Ada beberapa ruas jalan yang terjadi kemacetan yaitu persimpangan Canguk dan Persimpangan Trio sehingga perlu dikembangkan rekayasa lalu lintas seperti pembangunan Fly Over.
	2 Jaringan jalur kereta api	Rencana pengembangan jalur kereta api di Kota Magelang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting rel saat ini sudah banyak terdapat bangunan. Jika reaktivasi menggunakan jalur eksisting akan tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi Kota Magelang
	2.2.2 Sistem jaringan sumber daya air	
	a. Jaringan air baku	Sebagian besar sumber air baku Kota Magelang berasal dari mata air yang berasal dari Kabupaten Magelang, hanya ada 1 sumber mata air Kota Magelang yang dimanfaatkan yaitu Mata Air Tuk Pecah. Untuk pengembangan perlu ada pemanfaatan sumber air baku dari mata air yang berasal dari wilayah Kota Magelang, serta pemanfaatan air baku dari air permukaan yaitu sumber air permukaan Sungai Progodan Sungai Elodeng and lakukan treatment air baku.
	2.2.3 Infrastruktur perkotaan	
	a. Penyediaan air minum kota	Pengembangan air minum yang dikelola oleh daerah melalui PDAM perlu ditingkatkan kualitas layanannya serta harus memenuhi SPM penyediaan air bersih.

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
		Pengembangan air minum yang dikelola oleh masyarakat berupa jaringan perpipaan yang berada di kawasan budidaya termasuk perpipaan mandiri berbasis masyarakat di kawasan permukiman
	b. Pengelolaan air limbah kota	
	1 IPAL	Jaringan air limbah melalui IPAL dan IPLT sampai saat ini belum ada di Kota Magelang sehingga sistem yang terintegrasi tersebut belum dapat diterapkan. Strategipengembangan yang mungkin bias diterapkanyaitudengan system Layanan Lumpur TinjaTerjadwal (LLTT)
	2 Pembuangan air limbah rumah tangga	Limbah rumah tangga di Kota Magelang sampai saat ini masih secara setempat dan membutuhkan waktu bertahap untuk menjadi terpusat
	3 Pengolahan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kawasan budidaya yang menghasilkan limbah cair B3 masih banyak yang belum dilengkapi tempat pembuangan khusus
	c. Persampahan	
	1 TPS	Kegiatan pendaurulangan sampah atau 3R di Kota Magelang masih belum maksimal sehingga belum dapat memberikan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi untuk masyarakat
	2 TPA	Volume sampah di TPA Banyuurip sampai saat ini sudah overload, ditambah dengan umur TPA Banyuurip yang seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang lagi sehingga membutuhkan TPA baru ataupun sistem lain untuk menangani permasalahan sampah
	d. Drainase	Pemeliharaandanpengembanganjaringandrainaseuntukmengurangigenangan.
	e. Jalur pejalan kaki	Pengembangan jalur pejalan kaki masihperluditata, terutamapadapusat-pusatkegiatan yang menimbulkanbangkitanpejalan kaki.
	f. Jalur evakuasi bencana	Pengembangan jalur evakuasi bencana denganmempertimbangkankeberadaanGunungMerapi, walaupununtuk Kota Magelangmasihdi luar Radius 20 km.
3.	RENCANA POLA RUANG	
	3.1 Kawasan Lindung	
	3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Kawasan yang memberikanperlindungankawasanbawahannyaitukawasan resapan air di GunungTidar,

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
		sehingga perlu upaya untuk mempertahankan fungsi dan kualitas tutupan lahan serta plasma nutfah di Gunung Tidar. Membatasi pemanfaatan kawasan budidaya di Gunung Tidar.
	3.1.2 Kawasan perlindungan setempat	
	a. Sempadan sungai	Kawasan sempadan sungai terdiri dari kawasan sempadan sungai progoda dan sungai elodengan lebar sempadan min 10 m dari bibir sungai. Dengan melindungi dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Ada beberapa titik lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai khususnya Sungai Elo, yang perlu dilakukan penertiban.
	3.1.3 RTH	Luas RTH publik sampai saat ini belum mencapai 362 Ha sehingga perlu upaya pencapaian target.
	3.1.4. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	
	a. Kawasan suaka alam	Kawasan perlindungan suaka alam berupa kawasan perlindungan plasma nutfah yang berada di Gunung Tidar dan kawasan lain yang ditetapkan lebih lanjut
	b. Kawasan cagar budaya	Pengembangan kawasan cagar budaya berupa lingkungan atau benda cagar budaya (monumen, gapura, prasasti, makam, gua) dan lingkungan bangunan cagar budaya (bangunan tempat ibadah, bangunan kawasan kesehatan, bangunan kawasan pertahanan, bangunan sekolah, bangunan perkantoran, dan bangunan rumah tinggal)
	3.2 Kawasan Budidaya	
	3.2.1. Kawasan perumahan	Pengembangan kawasan perumahan di Kota Magelang diarahkan untuk tujuan khusus sebagai pemenuhan perumahan yang layak huni dan manusiawi untuk semua lapisan masyarakat. Kawasan kumuh harus ditangani hingga tuntas, sehingga target 0 % kawasan kumuh tercapai.
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional dengan didukung penyediaan sarana prasarana seperti ruang parkir yang memadai
	3.2.3. Kawasan perkantoran	Kawasan perkantoran sudah sesuai dengan karakteristik daerah
	3.2.4. Kawasan industri	Kota Magelang tidak memungkinkan untuk pengembangan kawasan industri, terutama industri besar karena tidak memiliki hamparan seluas 50 hektar. Kondisi eksisting saat ini hanya berupa pergudangan yang lebih cenderung dalam

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
		kawasan perdagangan dan jasa. Selain itu dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang tidak diplot untuk kawasan industri besar
	3.2.5. Kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata sudah sesuai dengan karakteristik daerah, tinggal pengembang kawasan penyangga pariwisata
	3.2.6. Kawasan RTNH	Kota Magelang memang membutuhkan RTNH, tetapi tidak dalam bentuk kawasan karena luas Kota Magelang yang tidak terlalu luas
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana	Ruang evakuasi bencana sebaiknya dalam bentuk tempat, bukan dalam bentuk kawasan
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal	Peruntukan ruang bagi sektor informal sebaiknya diakomodir dalam bentuk kegiatan, bukan kawasan
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya	
	a. Kawasan pertanian	Luas LP2B di Kota Magelang telah ditetapkan seluas 120 hektar, tetapi sampai saat ini masih belum terpetakan lokasi-lokasi sawah irigasi yang ditetapkan sebagai LP2B. Di sisi lain banyak masyarakat yang menginginkan agar sawah yang mereka miliki dapat dialihfungsikan untuk permukiman karena lebih menguntungkan secara ekonomi
	b. Kawasan olahraga	Kawasan olahraga terdapat di Kawasan GOR Samapta. Perlu pengembangan menjadi kawasan sport center yang terpadu. Kebutuhan lahan yang sangat besar perlu dilakukan pentahapan dalam pengadaannya. Bar tersedia 10 ha dari kebutuhan 21 ha.
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	
	4.1 Bidang pertumbuhan ekonomi	Perlu konsistensi dalam pemanfaatan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi: • kawasan GOR Samapta • kawasan kebonpolo • kawasan sukarno hatta • kawasan taman kyai langgeng • kawasan sentra perekonomian lembah tidar • kawasan sekitar alun-alun • kawasan sidotopo

Sumber : Dokumen Peninjauan Kembali Perda 4 Tahun 2012 ttg RTRW, Analisis

Kemungkinan adanya simpangan terhadap Perda RTRW tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah melakukan Peninjauan Kembali RTRW Kota Magelang yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang dimana rencana tata ruang dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Peninjauan kembali RTRW Kota Magelang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar rencana tata ruang memiliki fungsi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, dengan hasil sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali
Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Tahun 2011-2031

No.	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
1	Kualitas RTRW	2,29	30	68,70
2	Kesahihan RTRW	1,06	30	31,80
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,50	40	100,00
Total		5,85	100	200,50
Rata-Rata Nilai Penilaian Akhir PK RTRW		1,95		66,83

Sumber : Dokumen Peninjauan Kembali Perda 4 Tahun 2012 ttg RTRW

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai akhir hasil peninjauan kembali Perda RTRW Kota Magelang adalah sebesar 66,83. Jika mengacu pada Permen ATR No. 6 Tahun 2017 bahwa Perda RTRW perlu dilakukan revisi apabila nilai akhirnya <85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 perlu dilakukan REVISI karena nilai akhir penilaiannya sebesar 66,83 atau lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh - oleh Undang – undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota.

Tabel 2 - 75

Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, Tahun 2018 Semester 1

Rinican	Jumlah	Satuan	Luas (Ha)
Taman Kota	60	Buah	8.94
Jalur Hijau	20	titik	263.39
Hutan Kota	1	titik	67.12
TPU	1	Buah	16
Jumlah	84		355.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2018

, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Secara perhitungan ideal luasan RTH di Kota Magelang memiliki kekurangan . Tersedianya luasan Kekurangan luasan RTH akan sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH. Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2018 sebesar 355.45 HA Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Magelang, dengan melibatkan masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahaan, pihak swasta dan lain sebagainya.

Belum tercapainya Ruang Terbuka Hijau khususnya publik perlu adanya upaya tersendiri untuk mengotimalkan lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai seperti memanfaatkan lahan – lahan sempit, lahan marginal dan lahan – lahan yang terabaikan untuk dijadikan RTH publik, melakukan penertiban ternadap bangunan – bangunan liar yang tidak berizin di sempadan sungai, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian amanat Undang – Undang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang kurang memenuhi target pada tahun perencanaan. Informasi tata ruang kepada masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata ruang. Sarana informasi bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata ruang, Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga tata ruang dan ikut menegakkan tata ruang di Kota Magelang.

Salah satu indikator yang merepresentasikan terhadap keataan terhadap Peraturan Tata Ruang di Kota Magelang di antaranya indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan.

Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang daerah selain hal tersebut di atas di antaranya adalah masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang yang disebabkan karena proses legalisasi Raperda RDTR masih sangat panjang. Selain itu juga masih banyak ditemui bangunan – bangunan yang belum mempunyai ijin serta bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Masalah yang lain yang juga masih menjadi PR bagi Pemerintah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai dengan aturan yang ada ditambah dengan belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat di bidang tata ruang.

Salah satu hal yang merepresentasikan ketaatan dalam pelaksanaan RTRW adalah rasio perininan mendirikan bangunan (Ijin IMB). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu: 1). Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah; 2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang; 3) Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang; 4). keterbatasan mendata dan menindak Untuk bangunan yang sudah terbangun tapi belum ber IMB masih belum dijangkau.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:1). meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan; 2). sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia dan 3). Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat

Hal lain yang merepresentasikan ketaatan terhadap Perda RTRW adalah Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan yang mengatur mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik retribusinya melalui Perda retribusi pelayanan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri, yaitu dengan penyusunan Raperda tentang Reklame, serta diharapkan dapat segera dilakukan pembahasan di DPRD.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin besar mengingat kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin besar. Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya kepedulian terhadap kaidah – kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.4.2.2 Prasarana Jalan

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir 100% dalam kondisi baik dan terawat baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan dan jembatan di Kota Magelang sudah

dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street..

Capaian kinerja terkait dengan Kondisi jalan terkait panjang trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2018 tercapai.. Pada tahun 2016 trotoar yang dibangun adalah trotoar Jl. A. Yani, Trotoar Jl. Abimanyu, Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Trotoar Jl. Sudirman. Pekerjaan pada tahun 2018 untuk perbaikan/peningkatan kualitas trotoar di sepanjang jalan Pahlawan dan Jalan Diponegoro diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat utamanya bagi pejalan kaki.

Tabel 2 - 76

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Semester 1 Tahun 2018
Panjang jalan berdasarkan kelas						
a. Jalan Nasional	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
b. Jalan Provinsi	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
c. Jalan Kabupaten /	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
Jenis Permukaan Jalan						
a. Aspal	84.306	84.306	116.352	118.92	118.92	118.92
b. Kerikil			-	-	-	-
c. tanah			-	-	-	-
d. Tidak di rinci	8.763	9.633	-	-	-	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi						
a. Jalan baik	33.81	38.35	59.64	70.08	70.08	70.08
b. Jalan sedang	29.71	29.17	33.37	38.98	36.94	36.94
c. Jalan rusak	26.54	23.45	21.56	9.15	11.19	11.19
d. Jalan rusak berat	3.00	2.97	1.78	0.7	0.7	0.7
Panjang jalan berdasarkan fungsi						
a. Jalan arteri	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
b. Jalan kolektor	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
Status Jalan						
a. Kabupaten/Kota	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Semester 1 Tahun 2018
b. Nasional	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
c. Provinsi	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan						
a. Kelas I	-	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-	-
d. Kelas IIIA	-	-	-	-	-	-
e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-
f. Kelas IIIC	84.306	84.306	116.35	118.92	118.92	118.92
g. Tidak Dirinci	8.763	9.633	-	-	-	-

Sumber : Kantor DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan DDA Kota Mgl Tahun 2013-2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2018

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Indikator Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 95% dari target 93%, artinya dari total panjang jalan kota 118.915 meter terdapat 110.591 meter dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki tambahan ruas jalan perkotaan akibat penurunan status jalan provinsi, yaitu Jl. Tidar, Jl. Kyai Mojo, Jl. Mayjend. Sutoyo, Jl. Aloon – aloon Selatan dan Jl. Gatot Subroto, kelima ruas jalan tersebut kondisinya rusak sedang. Pada tahun 2017 Pemerintah membangun jalan baru sepanjang 1.192 meter, pada tahun 2017 jalan penghubung baru yang dibangun yaitu jalan penghubung Jalan Tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Sarwo Edhie Wibowo. Jalan penghubung antara Jalan Sarwo Edi Wibowo dan jalan Sudirman untuk mengurai kemacetan.

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transportasi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penanganannya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Pelayanan transportasi darat di Kota Magelang ditopang oleh keberadaan satu buah terminal induk, yaitu Terminal Tidar, dan dua buah sub terminal yang berlokasi di Jalan Ikhlas dan Kebonpolo. Terminal Tidar merupakan terminal antar kota dengan Kelas A di Kota Magelang, akan tetapi melihat kondisi saat ini masih diperlukan adanya sub terminal pada kawasan-kawasan perbatasan misalnya Sambung, perbatasan Sindas, Jl. Alibasah Sentot depan Diknas, untuk menampung angkutan dari luar Kota Magelang. Fungsi utama Terminal Tidar, sebagai terminal induk Kota Magelang adalah sebagai tempat transit angkutan umum; sebagai salah satu pembangkit kegiatan ekonomi dan sebagai salah satu cara dalam meratakan pembangunan perkotaan. Terminal tersebut melayani kendaraan angkutan umum Bis AKAP; Bis AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Tipe C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Tipe C sesuai standar. Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung,

Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas. Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum berfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Selain angkutan kota, di Kota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 - 77
Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

2.1.4.2.3 Drainase

Jaringan drainase seringkali disebut jaringan air hujan, jaringan pematusan, jaringan pelimpasan, jaringan riol, dan sebagainya. Saluran drainase berfungsi mengalirkan luapan/ limpasan air hujan (run off), yang umumnya berupa saluran terbuka (selokan/got/kanal/sungai) dengan "rute" dari area tangkapan hujan (catchment area) berupa

lahan tertutup/ terbangun seperti jalan, halaman, dan lain lain ke muara (out-fall) yang juga bisa berupa sungai, waduk, polder, dan lain lain. Di dalam lingkungan permukiman, jaringan drainase dikembangkan di kanan kiri jalan dimanfaatkan sebagian besar untuk pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan air hujan. Sistem jaringan drainase umumnya mencakup seluruh saluran yang ada, mulai dari selokan di halaman bangunan, saluran tersier yang umumnya berupa selokan di tepi jalan, saluran sekunder yang umumnya berupa kanal yang lebih lebar dan menuju saluran primer, hingga saluran primer yang umumnya berupa aliran sungai besar, serta waduk penampungan.

Sistem jaringan drainase di Kota Magelang terdiri dari sistem jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Sistem jaringan drainase tersier merupakan jaringan drainase yang rumah per rumah, jaringan sekunder yang menghubungkan antara jaringan tersier dan primer.

Drainase di Kota Magelang banyak menggunakan drainase tertutup utamanya pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kota Magelang pada dasarnya telah diatur sebagaimana pola permukiman yang ada, namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk meningkat dan secara fisik mengalami perkembangan terutama adalah target pemenuhan kualitas lingkungan hidup, penurunan permukaan tanah, peningkatan debit air, kerusakan – kerusakan ekologi lingkungan. Secara umum, setiap kawasan permukiman telah memiliki saluran drainase sekunder dan tersier sampai ke tiap – tiap rumah dan terintegrasi ke dalam saluran drainase primer namun genangan pada musim penghujan akibat dari naiknya debit air pada saluran drainase primer dan adanya penurunan sudut elevasi pada saluran drainase sekunder sehingga air yang seharusnya mengalir dari saluran drainase tersier menuju saluran drainase sekunder kemudian berakhir di saluran drainase berbalik arah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk memperbaiki sarana drainase di Kota Magelang.

Kondisi jaringan drainase di Kota Magelang mencakup seluruh system jaringan tersebut, diatas dengan pengecualian tidak terdapat waduk penampungan. Dalam hal ini, fungsi waduk penampungan sebagai muara (out fall) seluruh saluran tersebut, digantikan oleh S. Progo dan S. Elo yang sekaligus merupakan saluran primer. Bahkan karakteristik khusus wilayah Kota Magelang yang masih mempertahankan sekitar 12 % luas wilayahnya sebagai area persawahan, dalam kondisi tertentu lahan persawahan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penampungan limpasan air hujan.

Permasalahan yang muncul dalam sistem drainase di Kota Magelang adalah sudut elevasi saluran yang tidak seimbang sehingga permukaan dasar saluran sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan dasar saluran tersier hal ini dipengaruhi oleh kontur lahan yang cukup bervariasi. Permasalahan lainnya adalah bahwa jaringan drainase perkotaan juga menjadi saluran pembuangan limbah rumah tangga. Jaringan drainase primer di Kota Magelang terdiri dari sungai Manggis dan Sungai Bening yang menampung limpahan air hujan dari seluruh jaringan drainase kota. Permasalahan lain terkait dengan system drainase di Kota Magelang diantaranya: a).belum optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim hujan, b). jaringan teknis irigasi masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan, c). adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/ perumahan baru pada setiap tahunnya, akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi serta d).belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.

Panjang drainase dalam kondisi baik baru tercapai 98% . total panjang drainase 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 202.156 meter. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai target kegiatan yang

dilaksanakan adalah rehabilitasi/peningkatan saluran drainase di beberapa ruas jalan diantaranya yaitu Jalan Sunan Bonang, kawasan Jalan Letjend Suprpto, Jalan Sultan Agung dan Kawasan Jalan Teuku Umar, serta pemeliharaan rutin diseluruh saluran drainase di Kota Magelang untuk menjaga kondisinya selalu dalam keadaan baik. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Magelang merencanakan untuk membangun 8 shipon untuk memper lancar saluran drainase

saluran irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang sebagian besar terpelihara dalam kondisi baik. Saluran irigasi Kalikota yang menjadi kewenangan Kota Magelang sepanjang 5.000 meter, yang dalam kondisi kurang baik yaitu 950 meter, yang menjadi kendala adalah dalam pemeliharaan irigasi masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Implementasi pengembangan jaringan drainase di Kota Magelang dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi jaringan sungai dan jaringan drainase utama yang ada, berperan sebagai main drain (drainase induk). Pola jaringan drainase yang dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan yang dikembangkan. Untuk beberapa kawasan yang cepat mengalami sedimentasi maka perlu adanya normalisasi irigasi (tanggul, saluran) secara bertahap. Upaya untuk perbaikan jaringan drainase perkotaan diupayakan untuk meminimalisir merusak atau mengganggu keberadaan jalur hijau jalan mengingat kita masih mempunyai kewajiban untuk mencapai batas minimal 30% ruang hijau di Kota Magelang.

2.1.4.2.4 Kondisi Permukiman dan Infrastruktur

Tantangan bagi suatu kota salah satunya adalah menyediakan sarana permukiman bagi penduduk di dalam lahan yang terbatas. Pemerintah Kota Magelang dengan keterbatasan lahan yang di milik berusaha mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama di kawasan - kawasan yang padat penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas prasarana pelayanan dasar permukiman perkotaan prasarana pemukiman yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan untuk permukiman, di dalam RPJMD Pemerintah Kota Magelang menargetkan untuk pembangunan Rusunawa. Beberapa program pengurangan rumah tidak layak huni yang sudah terlaksana di Kota Magelang melalui berbagai pembiayaan APBD Kota, APBD Provinsi, ataupun dari anggaran Pemerintah Pusat. Dalam mensikapi Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan di arahkan pada pembangunan rumah susun. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki 2 (dua) unit Twin Block Rusunawa yang berada di Kelurahan Porobangsari dan Kelurahan Tidar Utara . Pada Tahun 2018 ini mendapatkan bantuan berupa Pembangunan 1 (satu) unit Rusunawa dan 1 (satu) kawasan rumah khusus di Kelurahan Wates dari KEMENPUPR. Pada saat ini tahapannya masih pada pematangan lahan karena konstruksi fisik memerlukan syarat bahwa Daerah harus segera melakukan pematangan lahan, selain itu Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi dan solusi kepada dan bagi warga sekitar yang terkena dampak pembangunan. Perlu untuk diketahui bahwa pembangunan kawasan baik Rusun maupun Rusus melalui skema Multi-Years, karena bukan hanya bangunan inti saja, akan tetapi dengan lingkungannya (fasum-fasos) pendukung.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemerintah daerah terkait dengan Key Performance Indicators – akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh 0% dan akses sanitasi layak 100%. Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan dan juknis, sehingga penanganannya belum maksimal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga berkurangnya luasan kumuh di Kota Magelang dapat terpenuhi sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan.

Kondisi yang ada di Kota Magelang pada saat ini adalah masih adanya lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang, belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, belum optimalnya upaya pemeliharaan sarana permukiman yang ada guna mendukung perpanjangan usia pakai sarana tersebut serta masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan yang meliputi prasarana lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan serta prasarana sanitasi lingkungan. Program merupakan tolak ukur dalam mensukseskan gerakan nasional 100-0-100 di Daerah sampai dengan Tahun 2019, dimana 0% yaitu ditempuh melalui program Nasional yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang berhasil menyusun dan mengesahkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Magelang, Data dasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang tertanggal: 19 November 2015, Nomor: 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang “Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang”, dikeluarkan berdasarkan kajian dari sisi top down yaitu pengidentifikasian, analisa, dan penetapan dilaksanakan oleh OPD, dikarenakan urgensi mendesak/atas dasar ketentuan Pemerintah Pusat. Perubahan data tersebut dari seluas 121,09 Ha. menjadi hanya seluas 67.405 Ha pada Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang merupakan studi lanjutan yang lebih komprehensif dari pendekatan teknokratis dan partisipatif, dimana hasil dokumen tersebut dalam kerangka mencapai target nasional 100-0-100/program kota tanpa kumuh (KOTAKU), maka mulai tahun 2018 target capaian pengurangan luasan perumahan dan kawasan permukiman Kumuh Kota Magelang secara umum berkurang secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan data dasar.

Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara PD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Permasalahannya yaitu sebagian besar penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilikan aset yang belum jelas..

Data Strategis Kota Magelang tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2008 sebanyak 3.683 sedangkan rumah layak huni sebanyak 26.264 unit. Adapun jumlah rumah di Kota Magelang 29.947 unit rumah. (jumlah rumah berdasarkan data baseline P2KPKP Kota Magelang,

data rumah tidak layak huni berdasarkan data pengurangan jumlah rumah dengan jumlah tidak layak huni pada data baseline RTLH tahun 2015). Pemerintah yaitu terkait dengan keberadaan penduduk di permukiman kumuh. Data 2017 menyebutkan bahwa upaya Pemerintah Kota Magelang dalam menyurangi kawasan kumuh telah berhasil mengurangi luasan kumuh 57.935 Ha sehingga saat ini terdapat 2.188 jiwa atau 547 KK yang tinggal di perumahan kumuh seluas 67.405 Ha.

Terkait dengan sanitasi rumah tinggal, pada tahun 2016 rumah dengan fasilitas air bersih sebanyak 29.055 unit, rumah yang memiliki pembuangan tinja 28.320 unit sedangkan rumah dengan memiliki tempat pembuangan sampah sebanyak 21.237 unit Tersedianya system air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki system pengelolaan limbah yang memadai. . Khusus untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan septic tankcomunal dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyukseskan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, karena masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai BAB. Perlu upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat serta untuk bersama – sama Pemerintah menyukseskan program – program sanitasi di Kota Magelang.

2.1.4.2.5 Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua yaitu Sungai dan Sumber Mata Air. Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. WS Progo-Opak-Serang memiliki luas total 4.993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa akuifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km². Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II. Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kali Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5.000 m saluran irigasi Kali Kota, 9.700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7.850 m saluran irigasi Kali Bening.

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang. Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat

mata air yang ditutup untuk bangunan. Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran – saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu.

2.1.4.2.6 Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun semester 1 tahun 2018 sebanyak 26.751 dengan total pemakaian pada semester 1 tahun 2018 sebesar 3.860.357 liter/ tahun. Sementara apabila di dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 26.252 dan tingkat penggunaan air bersih pada tahun 2017 sebesar 7.633.558 liter/ tahun. Data Strategis Kota Magelang 2017 menyebutkan bahwa pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan leding /perpipaan sebanyak 25.103 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.606.319 liter/ tahun. Total jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sebanyak 102.228 penduduk. Berdasarkan data strategis Kota Magelang Tahun 2018 Pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 24.505 pelanggan Jumlah ini sedikit meningkat apabila di dibandingkan dengan tahun 2017 di mana jumlah pelanggan kelas 2 sebanyak 24.039 pelanggan..

Tabel 2 - 78

Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2013 –2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pelanggan Air Minum	23.785	24.289	24.652	25.103	26.252	27.300
Total Pemakaian Air (m ³)	7.507.332	7.405.096	7.434.942	7.606.319	7.633.558	7.851.440
Jumlah Rumah tangga	41.246	41.853	42.433	43.026	42.997	43.247
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	57.67%	58.03%	58.10%	58.34%	61.06%	63.126%

Sumber: Sumber : PDAM Kota Magelang, Data Strategis Kota Magelang 2019 Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang , jumlah penduduk data Dispenduk Capil Kota Magelang, data diolah

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menjadi Pelanggan PDAM sebesar 62.15%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil

dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan Penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti hydrant pada pusat-pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan air bersih, maka diperlukan perhatian serius untuk menambah volume atau debit air gunaantisipasi tahun-tahun mendatang. Sistem penyediaan/ pelayanan air bersih pada umumnya terdiri dari bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi air baku, instalasi produksi, jaringan transmisi, bak penampung (reservoir) dan jaringan distribusi. Demikian halnya sistem penyediaan air bersih di Kota Magelang, prasarana pendukung yang ada meliputi :

1. Bangunan pengambil air baku, berada di lokasi sumber air, yaitu masing-masing adalah Mata Air (MA) Kalimas I & II, MA Kanoman I & II, MA Wulung, MA Kalegen, dan MA Citrosono dengan kapasitas total sumber air sebesar $\pm 705,5$ liter/detik.
2. Instalasi produksi merupakan bangunan penampungan, khusus untuk air bersih dari MA Kalegen dan MA Wulung, yaitu BPT Kaputran, BPT Keringan, BPT Tonoboyo dan BPT Bandongan, sementara air bersih dari mata air lainnya langsung didistribusikan. Total kapasitas produksi terpasang air bersih maksimal sebesar ± 425 liter / detik.
3. Reservoir merupakan bangunan penampungan terakhir sebelum air bersih didistribusikan yaitu Reservoir Bandongan (1.400 m³), Reservoir (menara) Alun-alun (1.750 m³), Reservoir Tidar (1.000 m³) dan Reservoir Akmil (500 m³). Total kapasitas seluruh reservoir tersebut adalah ± 4.650 m³.
4. Jaringan perpipaan, meliputi jaringan transmisi air baku atau jaringan transmisi primer ($\varnothing$ 9". 12") jaringan transmisi sekunder ($\varnothing$ 4". 8"), jaringan distribusi primer ($\varnothing$ 1". 3"), jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah ($<\varnothing$ 1").

2.1.4.2.7 Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik

Hampir seluruh kebutuhan listrik penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan listrik yang telah mencakupi (coverage area) hampir di seluruh bagian wilayah Kota Magelang, khususnya kawasan permukiman. Kebutuhan listrik di Kota Magelang telah dipenuhi dengan baik oleh PLN. Kebutuhan ini juga dipermudah dengan keberadaan APJ (Asosiasi Pelayanan Jaringan) Listrik Magelang dengan skala pelayanan UPJ Tegalrejo, UPJ Kota Magelang, UPJ Purworejo, UPJ Temanggung. Pusat pelayanan listrik bagi kabupaten di sekitar Kota Magelang. Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang. Untuk pelayanan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, sumber energi listrik ditransmisikan melalui SUTET dari wilayah Kabupaten Semarang dan masuk ke gardu listrik PLN yang terdapat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Wates

Dalam bidang pelayanan listrik kepada masyarakat akan kebutuhan listrik pada semester 1 Tahun 2018 mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 27.486 pelanggan listrik dengan pemakaian pada semester 1 Tahun 2018 sebanyak 74.643.948 KWh. Pemakaian terbanyak dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 23.753 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 16.759.436 KWh. Sedangkan pemakaian listrik terendah oleh kelompok

industri, yaitu sebanyak 162 pelanggan dengan pemakaian listrik selama semester 1 tahun 2018 sebesar 48.669.811 Kwh.

Pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 26.543 dengan jumlah pemakaian listrik pada tahun 2017 sebesar 149.200.639 kwh. Pemakaian listrik oleh rumah tangga terbanyak menggunakan 900 watt sebanyak 13.914 KK, Rumah tangga yang menggunakan daya 450 watt sebanyak 12.236 KK, yang menggunakan daya 1300 watt sebanyak 3.944 KK, sementara sisanya 2.252 KK menggunakan daya listrik 2200 watt dan > 2200 watt. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum. Pemakaian terbanyak dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 23.215 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 33.521.318 Kwh. Sedangkan pemakaian listrik terendah oleh kelompok industri, yaitu sebanyak 114 pelanggan dengan pemakaian listrik selama tahun 2017 sebesar 97.303.386 Kwh

2.1.4.2.8 Kondisi Pengelolaan Sampah

Sistem jaringan persampahan di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH). Sistem pengangkutan sampah dilakukan melalui 2 tahap yaitu dari rumah tangga dan kegiatan lain ke transfer Depo/ TPS dan dari TPS ke TPA. Pengangkutan sendiri dibagi menjadi dalam beberapa jenis angkutan antara lain adalah Becak Sampah, Dump Truck dan Mini Truck. Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Selain dilihat dari aktivitas yang menghasilkan sampah, bentuk produksi sampah di Kota Magelang dapat diidentifikasi berdasarkan persentase jenisnya. Jumlah persentase sampah terbesar berupa sampah organik 43.6%, sampah plastic sebesar 21.5% dan sampah kertas sebesar 18.80% Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena sampah organik merupakan sampah yang mudah untuk terurai. Sementara untuk bahan non organik perlu upaya untuk mengurangi volumenya mengingat sampah tersebut sulit terurai.

Sistem pengangkutan yang dilakukan dikelola oleh beberapa pihak antar lain adalah Dinas Pertamanan dan Tata Kota Magelang, Kelurahan, dan Dinas Pasar. Sistem pengangkutan yang dilakukan diawali dengan pengelolaan sampah oleh rumah tangga atau kegiatan lain secara swadaya untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dengan gerobak/ truk sampah. Kawasan merupakan kawasan yang seluruhnya dilalui oleh sistem pengangkutan gerobak sampah, sehingga sistem pembuangan sampah di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Sampah yang diangkut dengan gerobak sampah kemudian diangkut ke TPS atau Transfer Depo, dan dilanjutkan dibawa ke TPA.

Tabel 2 - 79
Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2013 - 2018

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2013	217.92	186.72	85.68
2014	139.39	118.54	85.04
2015	160.58	136.75	85.16
2016	280.19	240.4	85.80
2017	289.32	249.49	86.23
2018	324.06	280.23	86.47

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2010-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industri menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik serta membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Jumlah bank sampah dan kampong organik yang terbentuk saat ini ada 124 unit dengan rincian 58 kampung organik dan 66 bank sampah yang tersebar di beberapa RT, RW, sekolah dan instansi di Kota Magelang. bank sampah yang terdapat di Kota magelang tersebut dapat mengolah sampah dengan volume 11.610 kg. Jumlah volume sampah yang di kelola pada tahun 2018 lebih banyak apabila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 8.434 kg.

Upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampong organik, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 15 buah, jumlah IPL (Instalasi Pengolahan Limbah- waste treatment plant) sejumlah 1. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yan digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Jumlah prasarana TPS dan Transfer depo Kota Magelang sebagaimana table berikut:

Tabel 2 - 80
Lokasi TPS dan Transfer Depo

No.	TPS	Transfer depo
1	Maluku (Kebonpolo)	Pasar Cacaban
2	Depok	Kyai Langgeng
3	Getuk Marem	Jl. Tarumanegara
4	Jurangombo	Telagawarna
5	Perum Korpri	Pasar Gotong Royong
6	Dalangan	Jl. Sunan Giri
7	Karet	Tidar Baru

No.	TPS	Transfer depo
8	Cacaban	Lapangan Rindam
9	Sanden	Sekretariat Pemkot
10	Kuncen	Lapangan Parkir MT
11	Magersari	Meteseh
12	Sidotopo	Pajang
13		Shopping/BCA
12 Lokasi		13 Lokasi

Sumber: DLH Kota Magelang, 2019

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh: a).Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal; b). Keamanan, politik dan sosial budaya; c).Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; d)Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. e). Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur. Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi diantaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha.

:

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha, dengan data sebagaimana tabel tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -81

Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2012 – Semester 1 2018

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	2018
1	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	6	5	14	16	10	2
	Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	0	3	1
	Unjuk rasa bidang ekonomi	1	3	2	4	2	-
	Unjuk rasa bidang lainnya	5	2	12	12	5	1
2	Kasus pertikaian antar warga	0	0	4	7	3	6
	Antar etnis	-	-	-	-	-	-
	Antar wilayah desa	-	-	1	1	1	3
	Antar agama	-	-	-	-	-	-
	Antar simpatisan partai	-	-	-	-	-	-
	Antar pelajar	-	-	-	2	2	3
	Rusuh masal/pengeroyokan	-	-	3	4	-	-

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	2018
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-	-
4	Kasus sengketa pengusaha dan pekerja	1	-	-	-	5	-
5	Sarana prasarana keamanan						
	Jumlah aparat keamanan (polisi)	546	583	597	588	578	569
	Jumlah pos keamanan (polisi)	10	13	13	13	10	13
	Jumlah mobil kebakaran	5	5	5	5	5	5
	Aparat Pamong Praja	56	59	60	60	58	82
	Jumlah patroli petugas satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	262	262	262	262	360	360
	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	782	782	832	832	832	778
	Jumlah pos Siskamling	262	262	262	262	262	264
6	Angka Kriminalitas	10.99	12.35	14.14	14.02	13.31	12.54
7	Jumlah Tindak Kriminal						
	Jumlah Kasus Narkoba	14	25	26	20	30	33
	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	1	0	0	0
	Jumlah kasus Seksual	3	0	1	0	1	1
	Jumlah Kasus Penganiayaan	5	3	15	18	12	6
	Jumlah Kasus Pencurian	19	20	23	56	69	56
	Jumlah Kasus Penipuan	9	1	15	20	10	14
	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran, senpi, kenakalan remaja, pengeroyokan, pemerasan bawa sajam, pengrusakan KDRT, perlindungan anak dll)	na	na	na	na	18	25
	penggelapan	na	na	na	na	13	15
	perjudian	na	na	na	na	9	3

Sumber : SIPD Kota Magelang 2019 Bappeda Kota Magelang (Sumber data Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota) Polresta Magelang Kota ,2019

Terkait dengan Angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa tahun terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang sampai dengan Triwulan 4 tahun 2018 sebanyak 153 kasus. Data dari Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota pada triwulan 1 tahun 2019, terkait dengan kejadian kriminalitas di Kota Magelang terlihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.82 a Kejadian Kriminalitas di Kota Magelang
Triwulan 1 Tahun 2019**

No	Kejadian Kriminalitas	Jumlah
1.	Jumlah Kasus Narkoba	16
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-
3.	Jumlah kasus Seksual	-
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	2
5.	Jumlah Kasus Pencurian	15
6.	Jumlah Kasus Penipuan	2
7.	Jmlah Kasus Pemalsuan uang	-
8.	Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran, senpi, kenakalan remaja, pengeroyokan, pemerasan bawa sajam, pengrusakan KDRT, perlindungan anak dll)	5
9.	penggelapan	-
10.	perjudian	1
Jumlah		41 kejadian

**Tabel 2 - 82
Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2013 – 2018**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH KEJAHATAN YANG TERJADI DI KOTA MAGELANG	132	149	171	170	162	153
JUMLAH PENDUDUK (data Dispendukcapil)	130.836	131.703	132.261	132.662	130.857	130.007
JUMLAH PENDUDUK (dataBPS)	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673	121.992
ANGKA KRIMINALITAS	10.09 / 10.99	11.31 / 12.35	12.93 / 14.14	12.81 / 14.02	12.37/ 13.31	11.77/ 12.54

Sumber : 1. Bappeda Kota Magelang, Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang 2015, data diolah
2. Data Strategis Kota Magelang 2011-2017. Dinas Kominfo, data diolah (penurunan jumlah penduduk dikarenakan adanya pemuktahiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilihan Pilkada)
3. Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020, BPS Kota magelang

Data di bawah ini menunjukkan Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2018 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2 -83
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2018

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2013	132	90	68.18	7.49
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08
2016	170	120	70.59	9.89
2017	162	118	72.84	8.88
2018	153	115	75.16	8.88
Triwulan 1 2019	41	32	78.05	2.62

Sumber : Polres Magelang Kota, 2013-2019

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

Terkait dengan jumlah kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang dan Polres Magelang Kota sampai dengan tahun 2018 sebanyak 153 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 115 kasus sehingga rasio jumlah kriminalitas yang terselesaikan sebesar 75.16%

Tabel 2 - 84
Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah Demo/ Unjuk Rasa	6	5	14	16	10	2
a	Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	0	3	1
b	Unjuk rasa bidang ekonomi	1	3	2	4	2	
c	Unjuk rasa bidang lainnya	5	2	12	12	5	1

Sumber : Bappeda Kota Magelang, SIPD 2018, data KesbangLinmas dan Polres Magelang Kota data tahun 2010-2018

Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Data dari BPPKAD Kota Magelang sampai dengan Tahun 2018 melaporkan bahwa perolehan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 249.873.268.826,- sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.85
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010-2018

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	Prosentase (%) Potensi terhadap realisasi	Prosentase (%) Target terhadap realisasi
2013	120.378.596.250,00	96.302.877.000,-	107.739.838.961,00	89.50 %	111.88%
2014	172.114.484.610,00	124.432.498.000,-	164.906.266.142,00	95.81%	132.53%
2015	207.682.651.625,00	152.806.995.000,-	186.677.410.081,00	89.89%	122.17%
2016	269.616.256.588,00	197.465.478.000,-	220.217.864.000,00	81.68%	111.52%
2017	297.261.794.010,00	218.085.185.000,-	233.392.755.573,00	78.51%	107.02%
2018	297.261.794.010,00	225.916.332.000,-	249.873.268.826,00	84.06%	110.60%
Mei 2019	240.276.687.120,00	222.247.414.000,-	115.009.894.091,00	47.87%	51.69%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2013-2019 sumber BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan tabel di atas, potensi pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sementara prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah.

Iklim Investasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota Magelang diharapkan ke depan akan berdampak pada kenaikan PAD Kota Magelang sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. tabel di bawah ini menyajikan kenaikan / Penurunan PAD Kota Magelang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berikut:

Tabel 2.86
Tabel Kenaikan / Penurunan PAD Tahun 2013-2018

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	% Kenaikan / Penurunan PAD
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013	107.739.838.961,-	17.99 %
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014	164.906.266.142,-	53.06 %
6	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015	186.667.410.081, -	13.20 %
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016	204.220.414.045, -	9.40 %
8	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017	233.392.755.573 -	14.28 %
9	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019	249.873.268.826,00	7.06%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2018 (data diolah)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang lebih rendah apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan di bawah target yang di tetapkan tahun 2018 yaitu sebesar 19.18% disebabkan karena PAD sudah mendekati dengan potensi yang ada sehingga menurunkan laju pertumbuhan PAS, selain itu capaian realisasi dan komponen PAD yaitu lain – lain pendapatan yang berasal dari BLUD RSUD tidak naik secara signifikan di sebabkan oleh penurunan jumlah pasien sebagai dampak dari pembangunan RSUD yang belum selesai dan juga adanya kebijakan baru dari BPJS yang mensyaratkan bagi pengguna BPJS yang akan berobat harus melalui Faskes berjenjang.

Rasio Retribusi daerah terhadap PAD sebesar 2.29%, masih di bawah target tahun 2018 yaitu sebesar 3.63% di sebabkan karena adanya penyesuaian dengan regulasi tingkat pusat yaitu terbitnya Permendagri 19 tahun 2017 tentang pencabutan Ijin gangguan maka Perda nomor 19 tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu mesti di rubah dan disesuaikan yang otomatis menghapus penerimaan Retribusi Ijin Gangguan. Selain itu beberapa pos penerima yang tadinya masuk ke pos rekening penerimaan retribusi daerah berpindah ke pos penerimaan Lain – lain pendapatan yang sah pada sub rincian penerimaan hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa.

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya : 1)Sebagian Wajib Pajak belum memasukkan tarif pajak sebesar 10% untuk jasa usaha restoran dalam pembayaran pajak restoran oleh konsumen; 2). Belum ada desk penerimaan dana transfer untuk menentukan/mengetahui besaran dana transfer yang sesuai dan seharusnya diterima oleh daerah; 3). Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah); 4) Beberapa jenis retribusi daerah dihilangkan untuk tidak dipungut. Adapun Solusi yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Kota Magelang di antaranya: 1). Perubahan aturan Perda Retribusi Daerah baik itu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, maupun Retribusi Perijinan Tertentu guna mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah; 2).Pengusulan perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3). Sosialisasi kepada WP restoran bekerja sama dengan PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) agar mereka memasukkan tarif 10% ke dalam perhitungan pembayaran pajak restorannya; 4). Mengadakan kegiatan desk WP (Wajib Pajak) dengan membandingkan data studi potensi dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP dengan dan selanjutnya diminta mereka agar membayar sesuai hasil potensi.

Benyak terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu :

- a. Penerapan IPAD (Integrasi Pendapatan Asli Daerah) dan sinkronisasi dengan sistem CMS (Cash Manajemen System) dari Bank Jateng.
- b. Pemasangan taping box untuk memonitoring data hasil usaha WP apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh WP.
- c. Penerapan e_tax dan e_retribusi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem online.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 87
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2013 - 2018

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Naik / Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2013	26.604	84.448	9.105	42.29	0.33
2014	26.376	84.903	9.334	42.06	0.23
2015	26.107	85.260	9.585	41.86	0.20
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	0.06
2017	25.650	85.852	10.171	41.72	0.09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2018, data diolah

Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa Angka Beban Tanggungan penduduk di Kota Magelang relatif stabil walaupun berfluktuatif rendah dan masih pada kisaran angka 41-43. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk berupaya menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan profesional sehingga mempunyai daya saing serta berupaya untuk menekan angka pengangguran. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat di lihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka bebant ketergantungan karena dengan semakin kecilnya angka ketergantungan maka

akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri. Angka Beban Kerja di Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang membaik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 besar angka Beban Tanggungan sebesar 43.16 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 41.72. Angka ini mempunyai arti bahwa untuk setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Berdasarkan data publish kependudukan dikeluarkan BPS pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk sebanyak 121.673 jiwa lahu pertumbuhan penduduk mencapai 0.37%. Apabila data ini dikaitkan dengan bonus demografi yang sudah dinikmati penduduk Kota Magelang sejak tahun 2010, di mana rasio penduduk usia produktif rata – rata mencapai dua kali lipat dibandingkan penduduk kelompok usia non produktif sehingga hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Magelang yang cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun atau memperlihatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin kecil.

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang dikatakan usia produktif namun tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, sekitar 70an persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar harus diimbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlak yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.

2.1.4.4.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan ketrampilan yang dimiliki serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Adapun hal ini bisa diasumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diharapkan dia akan mempunyai kemampuan/ketrampilan dan keahlian yang tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga harapannya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun (wajib 9 tahun)

Tabel 2 - 88
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
1.	2013	130.836	12.045	921
2	2014	131.703	12.053	915
3.	2015	132.261	12.105	915
4.	2016	132.662	12.162	917
5.	2017*	130.857	12.045	920

6.	2018*	130.007	12.188	937

Data Strategis Kota Magelang 2013-2019. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

*data penduduk 2017 hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017

Data Strategis Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat). data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan pendidikan yang di tamatkan di atas pendidikan SMA cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun cukup berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi demikian harus di pertahankan dan terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang di miliki Kota Magelang. Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi.

Tabel 2 - 89

Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Kota Magelang Tahun 2015-2018

Tahun	Tidak/belum Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2/S3
2015	1.937	17.212	13.950	34.733	424	10.334	11.967
2016	1.870	16.886	13.937	35.526	429	4.013	12.162
2017	1.794	16.270	13.633	35.334	428	3.956	12.045
Semester 1 2018	1.699	15.637	13.418	35.488	427	3.950	12.188

Data Strategis Kota Magelang 2010-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Hasil Pencapaian Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019

Hasil Evaluasi pencapaian sasaran RPJMD sampai tahun berjalan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 90

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2019

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.									
					2018	2019	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
							Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian		
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat															
1	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	82,63%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					2	Capaian SPM Kota Magelang	86,09%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	47,00%	52,00%	48,33%	92,95%	50,04%	96,24%				
			2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini atas LKPD	WTP	WDP	-	0,00%	WTP	100,00%				
					2	Indeks EKPPD	3,215	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Hasil implementasi SAKIP	55,78	56,00	B (60,05)	107,23%	B (60,05)	107,23%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
				4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	65,08%	55,00%	61,94%	112,62%	62,78%	114,14%			
				a	KMU			47,50%		50,00%				
				b	KMT			58,54%		58,54%				
				c	KMS			79,79%		79,79%				
				5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%			
	2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive	48,28%	60,60%	0,00%	0,00%	80,00%	132,01%			
				2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik									
				1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	100,00%	90,00%	100,00%	111,11%	100,00%	111,11%			
				2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	100,00%	70,00%	100,00%	142,86%	100,00%	142,86%			

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
			3 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	93,18%	93,00%	36,14%	38,87%	43,37%	46,64%				
				2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90,99%	70,00%	91,01%	130,01%	93,73%	133,90%				
3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	34,80%	29,82%	29,75%	99,77%	36,64%	122,87%				
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	61,18%	69,67%	72,10%	103,49%	67,28%	96,57%				
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00%	62,00%		0,00%	0,00%	0,00%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
	masyarakat			2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62%	65,52%		0,00%	0,00%	0,00%				
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	8,82%	3,96%	0,00%	0,00%	6,76%	170,71%				
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	87,24%	47,00%	67,03%	142,62%	67,03%	142,62%				
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional :										
				a. Regional	6	5	1	20,00%	1	20,00%				
				b. Nasional	-	2	-	0,00%	-	0,00%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
				c. International		-	-	0,00%	-	0,00%				
				2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional										
				a. Regional	125	10	58	580,00%	74	740,00%				
				b. Nasional	19	5	-	0,00%	16	320,00%				
				c. International	19	2	-	0,00%	-	0,00%				
2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.													
1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indek Pembangunan Manusia	1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	9,14	10,46	10,29	98,37%	10,29	98,37%			
					2 Persentase sekolah berstandar nasional									
					a. SD	41,33%	45,66%	57,14%	125,14%	57,14%	125,14%			
					b. SMP	72,73%	75,00%	78,26%	104,35%	78,26%	104,35%			
					3 Angka Melek Huruf	98,57%	97,99%	98,77%	100,80%	98,77%	100,80%			
					4 Persentase kunjungan perpustakaan	81,10%	74,25%	22,38%	30,15%	38,47%	51,81%			
					5 Jumlah kunjungan perpustakaan	107.260	98.500	29.606	30,06%	50.883	51,66%			

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
					2018	2019	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
			2 Meningkatkan kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	97,00%	77,00%	100,00%	129,87%	100,00%	129,87%				
				2 Angka Harapan Hidup	76,66	76,76	76,66	1,00	76,66	99,87%				
				3 AKI/ 1.000 KH	192,43	120,00	0,00	1,00	0,00	100,00%				
				4 AKB/ 1.000 KH	12,18	14,00	19,18	0,73	9,36	149,57%				
				5 AKABA	1,924	0,150	19,18	0,01	9,36	1,60%				
				6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,21	0,31	0,11	2,82	0,23	134,78%				
				7 Angka Kesakitan DBD	54,65	50,00	3,01	16,61	3,82	1308,90 %				
				8 Angka Prevalensi Kasus TB	105,00	104,00	32,86	0,00%	32,86	316,49%				
				9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,03%	0,05%	0,03%	166,67%	0,05%	100,00%				

N O	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
					10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	95,96%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB		16,43%	-	0,00%	-	0,00%		
				4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	50,00%	30,00%	50,00%	166,67%	50,00%	166,67%		
					2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%	39,68%	198,41%			

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%				
2	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	46,47	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 Indeks Pencemaran Udara	85,67	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	57,24	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m3)	249,66	155,70	267,13	0,58	280,59	0,55				
			2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1 Persentase Ruang Terbuka Hijau										
				a. Privat	19,11%	10,00%	19,10%	191,00%	19,10%	191,00%				
				b. Publik	19,60%	18,42%	19,60%	106,41%	19,62%	106,51%				
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	4,92%	9,38%	4,92%	52,49%	6,93%	73,83%				

N O	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
					2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,88%	11,76%	5,88%	50,02%	5,88%	50,02%				
				4 Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	24,00%	25,00%	23,33%	93,32%	23,58%	94,31%				
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat														
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	82,62%	83,00%	82,62%	99,54%	82,98%	99,98%				
			2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	100,00%	11,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					2 Tercapainya 100 - 0 -100										
					a. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air	87,88%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
				minum										
				b. Luas kawasan kumuh (Ha)	67,40	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3,73%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				3 Prosentase RTLH	65,76%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,78%	8,50%	8,42%	99,06%	8,45%	99,41%				
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi										
				a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0,19%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	16,85%	15,00%	1,87%	12,47%	3,94%	26,27%				

N O	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.								
							2018	2019	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	
			2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian an milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75,00%	80,00%	75,00%	93,75%	75,00%	93,75%					
					2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	30,84%	29,00%	25,44%	87,72%	25,44%	87,73%					
				3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	13.637	12.882	3.534	27,43%	7.350	57,06%				
	3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65,00%	65,00%	77,77%	119,65%	77,77%	119,65%				
				2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunannya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	9,61%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	100,00%	2	100,00%				
5	Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 Menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,37%	20,00%	2,00%	10,00%	10,00%	50,00%				
				2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	14,06%	23,00%	2,00%	8,70%	8,70%	37,83%				
				3 Rasio KDRT	0,035%	0,055%	0,023%	239,13%	0,037%	147,80%				
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang													
1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,00%	14,50%	1,78%	12,28%	4,02%	27,72%				

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
				2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	35	10	8	80,00%	35	350,00%			
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan							
					a. Nusantara (orang)	#####	1.138.140	102,00%	0,00%	648.775	57,00%			
					b. Mancanegara (orang)	17.162	5.193	104,62%	0,02%	2.904	55,92%			
5														
	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1,06%	3,00%	16,61%	553,59%	28,98%	965,84%	
				2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13,31	12,64	3,61	350,45%	6,39	197,81%	
						2	Prosentase penurunan kasus narkoba	6,00%	3,00%	3,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
						3	Angka kriminalitas yang tertangani	9,70%	12,00%	2,62%	0,22	5,25%	0,44	

N O	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi kinerja 2019 s.d.							
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							2018	2019	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian
					4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,22%	3,00%	3,22%	107,33%	3,22%	107,33%			
					2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)		1	0	0,00%	0	0,00%				

2.2.2 Evaluasi Hasil pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada periode tahun 2019

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Pada prinsipnya secara berjenjang pencapaian indikator kinerja dimulai dari eksekusi indikator output kegiatan, indikator kinerja outcome program, indikator kinerja intermediate outcome sasaran hingga indikator kinerja ultimate outcome. Evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah pada RPJMD untuk periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 91
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Akhir Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,04% ± 0,25%	5,18%	5,05% ± 0,25%	5,21%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	63.394.588,17	58,920,000.00	68.656.817,64	NA	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,36% - 4,94%	3,9 %	3,15% - 4,73%	2,65%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,343 - 0,3569	0,328	0,3421 - 0,3523	0,340*	0,341 - 0,3489	0,3397 - 0,3461	0,338 - 0,3438	0,338 - 0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0804	0,0798	0,0725	NA	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	7,41% – 8,09%	8,75%	6,98% – 7,38%	7,87%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,9		77,26		77,61	78	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun	10 tahun	10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,45 Tahun	13,88 tahun	13,63 Tahun		13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
	c. Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,71 Tahun	76,66 Tahun	76,76 Tahun	76,66	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	11.083.570	11,384,000	11.281.140		11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,9	96,45	95,99		96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	79,2	79,3	79,35		86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6% - 5%	6,68 %	5,8% - 5%	4,8%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,244%	-1,36%	0,384%		0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
a	Pendidikan									
1	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun		10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
2	Persentase sekolah berstandar nasional									
	- SD	30,66%	40,66%	98,66%	45,66%	57,14%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	70%	72,73%	75%	78,26%	80%	85%	90%	90%
3	APM SD	96,51%	97,31%	82,84%	97,71%	92,74%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
4	APK SD	108,15%	112%	126,70%	114%	101,54%	116%	118%	120%	120%
5	APM SMP	74,62%	76%	74,96%	78%	77,70%	80%	82%	84%	84%
6	APK SMP	81,92%	85%	94,19%	88%	94,74%	90%	96%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	97%	97,67%	98,57%	97,99%		98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
8	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	50%	30%	50%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan									
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	5 buah (15%)	100%	7 buah (54%)	100%	10 buah (77%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)
2	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	126	192,43	120	130	110	95	70	70
3	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	14,5	12,18	14	13,10	13,5	13	12,5	12,5
4	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,155	0,1920	0,15	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,19	0,31	0,24	0,31	0,31	0,31	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	54,65	<50	42,74	<50	<50	<50	<50
8	Angka Prevalensi TB	128.33	<105	156	<104	150,55	<103	<102	<101	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	0,03%	<0,5%	0,02%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
10	Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	97%	95,96%	97%	97,99%	98%	98%	98%	98%
11	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	39,68%	20%	50%	30%	40%	50%	50%
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau									
	- Privat	10%	10%	19,10%	10%	19,10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	19,60%	18,42%	19,62%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24%	24%	25%	24,14%	26%	27%	33%	33%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12%	100%	11,5%	80%	11%	10,5%	10%	10%
2	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	92,30%	87,88%	97,30%	93,78%	100%	100%	100%	100%
3	Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	39,65 Ha	59,21%	12,12 Ha	37 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
4	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	3%	3,73%	2%	3,01%	0%	0%	0%	0%
5	Prosentase RTLH	4,40%	2,90%	2,49%	2,30%	11,61%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	6,68%	6,71%	9,38%	7,27%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	5,80%	6,00%	11,76%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
3	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3,18%	3%	3%	3%	3%
4	Angka kriminalitas	14,14%	13,14%	11,21%	12,64%	9,59%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
5	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	72,84%	12%	6,97%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
6	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	6%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial									
1	Persentase Penurunan PMKS	14%	15%	9,61%	16%	5,07%	17%	18%	19%	19%
2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3,22%	3%	3,31%	3%	3%	3%	3%
3	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	0	0	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar									
a	Tenaga Kerja									
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	65%	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Rasio KDRT	0,07%	0,060%	0,04%	0,055%	0,11%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	17%	6,37%	20%	20%	23%	26%	30%	30%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	20%	14,05%	23%	23%	26%	30%	35%	35%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
c	Pangan									
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.831 Ton	13.637 ton	12.882 Ton	13820	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	Lingkungan Hidup									
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	62	62,54	65	56,36	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,65	46,47	75,7	52	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	61,8	85,67	70,5	84,9	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,55	57,24	48,8	38,22	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	158,7	249,66	155,7	287,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	58,62%	58,62%	65,52%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	46%	87,24%	47%	74,06%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan									
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8,25	8,40	8,5	8,49%	8,75	9	9,25	9,25
h	Komunikasi dan Informatika									
	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	60%	100%	70%	100%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal									
	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0,19%	5%	5,9%	10%	10%	15%	15%
	2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16,85%	15%	169,96%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga									
	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5 buah	6 buah	6	7 buah	449	7 buah	8 buah	8 buah	8 buah
	- Regional	4 buah	4 buah	4	5 buah	368	5 buah	6 buah	6 buah	6 buah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	- Nasional	1 buah	2 buah	2	2 buah	80	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	- international	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14 buah	17 buah	163	17 buah	447	17 buah	17 buah	20 buah	20 buah
	- Regional	8 buah	10 buah	125	10 buah	366	10 buah	10 buah	11 buah	11 buah
	- Nasional	4 buah	5 buah	19	5 buah	80	5 buah	5 buah	6 buah	6 buah
	- international	2 buah	2 buah	19	2 buah	1	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah
k	Statistik									
1	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	91%	70%	85,71%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan									
1	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	14%	14%	14,5%	NA	15%	15,5%	16%	16%
2	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	14%	15%	14,5%	17,41%	15%	15,5%	16%	16%
3	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	5	35	10	35	15	20	25	25
m	Perpustakaan									
1	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	72,52%	81,10%	74,25%	84,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
2	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	96.200	107,261	98.500	112230	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan									
1	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	48%	47%	52%	53,29%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan									
a	Pariwisata									
1	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,60%	7,93%	3,80%	NA	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
2	Jumlah Wisatawan									
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.136.435	1.269.949	1.138.140	1.309.326	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.185	6.341	5.193	6.359	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan									
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	16,15%	20,75%	16,43%		16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
2	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	60%	40%	60%	60%	60%
3	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a	Perencanaan									
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	90%	93,18%	93%	73,91%	95%	98%	100%	100%
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	60%	60%	62%	62%	65%	68%	70%	70%
b	Keuangan									
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	26,34%	34,81%	30,33%	NA	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
2	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	25,86%	25,82%	29,82%	37,47%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
3	Rasio ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	73,66%	61,18%	69,67%	63,12%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	97%	82,63%	97%	83,52%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	Penelitian dan Pengembangan									
1	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	28%	30,84%	29%	37,10%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain									

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
1	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	60%	86,09%	70%	93,24%	80%	100%	100%	100%
2	Indeks EKPPD	2,92	3	3,215	3,1	3,2	3,12	3,13	3,14	3,14
3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (54,00)	B(60,05)	CC (56,00)	B(60,05)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	45%	65,08%	55%	67,69%	65%	75%	85%	85%
5	Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	3,06%	8,82%	3,96%	35,14%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
6	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	48,48%	48,28%	60,60%	62,07%	72,72%	84,84%	100%	100%
7	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	APEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,26	57,00	68,22	57,51	NA	58,00	58,51	59,00	59,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	75 (B)	78,19 (B)	77 (B)	B	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
3	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	82%	82,62%	83%	85,34	84%	85%	86%	86%
4	Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (51,6 – 54,5)	Integrated (63,7)	Scattered (54,6 – 57,5)	Integrated (63,70)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
5	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun Triwulan II Tahun 2019 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Belum optimal dan belum efektifnya penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
2. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pendidikan
3. Strategi pengembangan pendidikan yang belum berjalan optimal
4. Distribusi sarana prasarana pendidikan masih belum merata
5. Kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih belum merata
6. Manajemen sekolah dan Komite Sekolah belum berfungsi optimal
7. Masih adanya kesenjangan mutu pada satuan pendidikan
8. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan
9. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10. Perlunya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada program pendidikan kesetaraan
11. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal
12. Kajian Pendirian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 2 (dua) TK Negeri Pembina.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2018 ada 2 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.527, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 130,9. Angka ini lebih dari target tahun 2018 sebesar 120. Kondisi ini secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh rumusan penghitungan AKI yang dihitung per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka

kelahiran hidup di Kota Magelang hanya pada kisaran angka 1.500 sehingga apabila terjadi 2 kasus kematian saja angkanya akan menjadi tinggi.

2. Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2018 terdapat 20 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 13,1. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2018 sebesar 14 akan tetapi dengan adanya 20 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.
3. Kelurahan Siaga Aktif dengan Strategis mandiri, baru di 8 kelurahan
4. Angka prevalensi kasus TB yang tinggi serta angka penemuan kasus TB yang rendah dikarenakan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
5. Data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta karena belum terbangunnya integrasi data antar fasilitas pelayanan kesehatan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RDTRK
2. Banyaknya alih fungsi lahan, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang perlu diakomodir sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Revisi Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang saat ini masih dalam proses persetujuan substansi kementerian ATR, disisi lain sampai saat ini belum terlaksana harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran pengajuan Persetujuan Subtansi.
4. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang.
5. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
8. SDM untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang masih kurang.
9. Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
10. Aksesibilitas infrastruktur pelengkap jalan masih kurang memadai
11. Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang di bawah pengelolaan pemerintah Kota Magelang.
12. Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang.
13. Kondisi drainase kota yang sudah cukup baik tetapi masih tercampur dengan air limbah rumah tangga

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman yaitu:

1. Masih adanya rumah tinggal yang belum terlayani air minum dan belum bersanitasi layak serta kawasan kumuh, yang menjadi tuntutan untuk mencapai akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.
2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
3. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
6. Adanya permukiman kumuh dan RTLH yang berada di kawasan-kawasan ilegal yang tidak memungkinkan ditangani dengan anggaran pemerintah.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam prioritas pembangunan.
2. Peningkatan jumlah tim relawan siaga bencana, baik melalui pola kemitraan ataupun rekrutmen di tingkat kelurahan-kelurahan.
3. Peningkatan/pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana yang sejauh ini masih minim.
4. Peningkatan jumlah Kelurahan Rintisan Tangguh Bencana, beserta pemenuhan indikator-indikatornya.
5. Perekrutan anggota Linmas
6. Peningkatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak anggota Linmas sebagai insentif bagi upaya peningkatan minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas.
7. Peningkatan jumlah kampung bebas Narkoba
8. Pengawasan intensif terhadap ruang-ruang publik agar tidak disalahgunakan, baik melalui intensifitas patroli maupun peningkatan pemenuhan penerangan dan memperbanyak sarana CCTV. Hal tersebut untuk mengantisipasi masih tingginya pengaduan dari warga Kota Magelang.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial serta belum optimalnya akses pelayanan sosial bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena program-program bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan yang ada masih mengandalkan program-program dari pemerintah pusat yang sifatnya terbatas, sementara itu masih banyak PMKS

yang belum memperoleh program-program bantuan tersebut, sehingga sangat perlu dan mendesak bagi pemerintah Kota Magelang untuk membuat program-program sejenis melalui penganggaran APBD Kota.

2. Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penambahan jumlah lanjut usia terlantar tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial. Saat ini anggaran masih tergantung dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan jumlahnya masih terbatas, belum mampu mencakup seluruh lanjut usia terlantar tidak potensial yang ada.
3. Data Kemiskinan yang belum valid. Dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, agar tingkat keberhasilannya tinggi dan tepat sasaran dibutuhkan data kemiskinan yang valid. Sementara ini data kemiskinan yang ada masih banyak kekurangannya, sehingga diperlukan upaya verifikasi dan validasi agar data tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.
4. Kurangnya sarana sosial untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dalam meningkatkan Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut seperti kantor pelayanan maupun shelter untuk penanganan PMKS.

2.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah:

1. Perlunya perencanaan pelatihan dan penyuluhan kepada pencari kerja untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan 5.0
2. Kurangnya daya saing pencari kerja Kota Magelang di pasar kerja baik skill/ketrampilan maupun mental (hard skill dan soft skill) terutama untuk jabatan-jabatan tertentu.
3. Kurangnya motivasi bekerja pada beberapa peserta pelatihan kerja
4. Kurangnya kesesuaian antara tempat/layout ruang serta sarana pelatihan dengan kondisi dunia kerja
5. Belum adanya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa kejuruan menengah atas untuk persiapan memasuki dunia kerja.
6. Masih rendahnya jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan BNSP
7. Belum terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja Negeri dan Swasta

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Optimalisasi rintisan program-program pemberdayaan keluarga guna meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, baik pemberdayaan individu maupun keluarga.
2. Optimalisasi program-program bagi Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal.

3. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
4. Perencanaan Penganggaran Responsif Anak (PPRA).
5. Pendataan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, serta angkatan kerja perempuan sebagai tolak ukur sekaligus base data dalam penetapan program-program pengarusutamaan dan menghilangkan subordinasi serta diskriminasi gender di Kota Magelang.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu:

9. Pola konsumsi pangan kurang beragam dan memenuhi kebutuhan gizi
10. Pengaman mutu dan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan
11. Berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya produksi pangan sehingga perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan sentra produksi dari daerah sekitar
12. Pemanfaatan pekarangan rumah tangga masih belum optimal
13. Masih tingginya ketergantungan masyarakat dalam mengkonsumsi beras dan tepung terigu
14. Masih belum optimalnya system data ketahanan pangan .

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Belum optimalnya data asset tanah milik Pemerintah Kota Magelang
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia pemerintah dalam proses pengadaan lahan
3. Keterbatasan lahan di Kota Magelang sehingga perlu mengelola pemanfaatan lahan secara efektif dan tepat guna agar diperoleh hasil dan manfaat yang optimal
4. Aset tanah pemerintah Kota Magelang belum semuanya bersertifikat
5. Belum adanya penjelasan atau aturan kewenangan OPD yang melaksanakan pengadaan tanah

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri kecil, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan

3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.
4. Keterbatasan lahan untuk membangun IPAL terpadu industri kecil.
5. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat.
7. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
8. Minimnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya disebabkan peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik
9. Belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam, sempadan sungai, dan fasum.
10. Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal dalam pengelolaan RTH kota.
11. Belum adanya sinergitas pemerintah kota dengan masyarakat dalam pengelolaan RTH kota.
12. Belum optimalnya keterlibatan CSR dan pelaku usaha dalam pengelolaan RTH kota.
13. Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
14. Secara teknis TPA Banyuurip sudah tidak bisa menampung sampah lagi.
15. Belum selesainya proses revisi RTRW yang berpotensi menghambat proses / tahapan pembangunan TPS3R Induk.
16. Belum memadainya sarpras perkantoran

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, khususnya KTP-el dan KIA.
2. Masih adanya data penduduk yang sudah tidak berdomisili di Kota Magelang tetapi masih tercatat dalam database kependudukan di Kota Magelang.
3. Sistem yang masih tergantung pemerintah pusat terkadang memperlambat proses revisi data dari komplain yang disampaikan masyarakat.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Memantapkan sistem pendataan profil kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.
2. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

1. Anggaran Responsif Gender (ARG) kedepan untuk dimasukkan menjadi indikator kinerja, sehingga dalam hal ini dapat diketahui seberapa besar komitmen pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan sesuai dengan bidang tugas atau urusannya.
2. Adanya pernikahan dini (dibawah usia 20 tahun) dan jarak kehamilan yang kurang dari 3 tahun, sebagian besar terjadi karena married by accident (hamil sebelum menikah) biasanya disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, karena kurangnya perhatian orang tua, dan konten pornografi, sehingga kedepan perlu diupayakan optimalisasi fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa melalui program edukasi sex dan sejenisnya.
3. Penyusunan kebijakan/regulasi daerah terkait kawasan bebas rokok.
4. Sertifikasi taman ramah anak di Kota Magelang yang meliputi ketersediaan sarana/wahana bermain anak, letak tidak berada dipinggir jalan, dan adanya pembatas antara ruang bermain anak dengan prasarana umum.
5. Sosialisasi hak-hak anak di tingkat Rukun Tetangga dan Keluarga
6. Optimalisasi partisipasi laki-laki dalam ber-KB, melalui pemberian reward khususnya bagi peserta dari keluarga terkatagori miskin. Jenis insentif atau reward yang diberikan diharapkan dapat menjadi stimulan atau perangsang bagi peningkatan pendapatan keluarga, contohnya seperti hewan ternak, alat perbengkelan, dan lain-lain.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

1. Terminal angkutan barang yang ada belum memadai (kurangnya lahan, kurang fasilitas dan bercampur dengan fungsi lain
2. Belum tersedianya terminal type C di wilayah perbatasan.
3. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memadai

4. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.
5. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun
6. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis
7. Belum tersedianya terminal barang di Kota Magelang.
8. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
9. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih belum optimal.
10. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Diskominfo selaku OPD pelaksana pencapaian indikator persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah baik melalui radio maupun media cetak kesulitan dalam pengadaan materi publikasi. Upaya kerjasama dengan narasumber tokoh agama sudah dilaksanakan melalui Kantor Kemenag dan Forum Komunikasi Umat Beragama akan tetapi masih belum membuahkan hasil positif untuk materi agama Budha, Hindu, Konghuchu dan kepercayaan. Pelaksanaan publikasi melalui media cetak sebanyak 12 kali untuk 5 agama juga terkendala oleh jangka waktu terbit Majalah Dinamika setiap triwulan (4 kali dalam setahun) sebagai media cetak milik Pemerintah Kota Magelang.
2. Titik yang belum terealisasi cakupan WAN sebagian besar berlokasi di pinggir yang secara lokasi maupun spesifikasi membutuhkan teknik khusus sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan kebutuhan dana dalam upaya pencapaian target cakupan WAN kota.
3. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi dan informatika tidak mencakup pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi, padahal secara aturan (PERDA) kajian izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Magelang masih melekat di Diskominfo. Secara kewenangan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Rekomendasi Izin Menara lebih dekat dengan penyelenggaraan penataan ruang prasarana, sarana, dan utilitas. Hal ini memerlukan kajian agar pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi ke depan dapat dilakukan dengan tepat.
4. Operasional LPPL saat ini masih melekat dalam APBD dan belum ada pemasukan iklan, sehingga sepenuhnya masih bergantung pada anggaran daerah. Hingga saat ini belum ada kajian mengenai kelembagaan yang tepat terkait operasional LPPL.
5. Hingga saat ini belum ada dasar hukum integrasi aplikasi dan sistem informasi yang menjadi tupoksi Diskominfo sehingga hingga saat ini pengembangan aplikasi dan sistem informasi masih dilakukan secara mandiri oleh OPD.

6. Belum merata dan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang memiliki keahlian di bidang TI. Persebarannya hanya di 20 dari total 29 OPD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

3. Untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi diperlukan petugas yang telah memiliki sertifikat penilaian kesehatan koperasi, Berdasarkan Perpp No 06 tahun 2016 tentang penilaian kesehatan KSP, diperlukan aparatur sipil Negara bersertifikat dibidang perkoperasian yang mampu melakukan penilaian kesehatan koperasi, sedangkan di dinas Perindag Kota Magelang hanya mempunyai 2 orang ASN yang memenuhi kriteria sebagai penilai kesehatan koperasi, sehingga jumlah penilaian yang dilakukan masih terbatas dengan kurangnya SDM yang ada.
4. Jumlah koperasi tidak memenuhi target dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai pejabat yang berwenang mengesahkan badan hukum koperasi, sebelum tanggal 8 april 2016 pengesahan badan hukum koperasi ditandatangani oleh Walikota, namun setelah tanggal tersebut pengesahan badan hukum koperasi diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang menyebabkan proses lebih lama(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi BAB IV pasal 12)
5. Rendahnya daya saing KUM karena masih rendahnya mentalitas dan SDM pelaku usaha
6. SDM pengelola KUM yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan
7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah
8. kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan teknologi pelaku KUM yang masih terbatas

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

6. Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang;
7. kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor,
8. ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain),
9. keterbatasan lahan yang clean and clear yang siap sebagai obyek untuk menarik investor

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

1. Ketatnya persaingan dengan daerah lain.
2. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.

3. Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi berakibat terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain.
5. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan olahraga.
7. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya pengetahuan, ketrampilan, daya tangkal, kepedulian, keterbatasan akses dan kemitraan, serta lemahnya lembaga kepemudaan.
8. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda.
9. Lemahnya sistem informasi dan database pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
10. Kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Masih perlunya peningkatan ketersediaan data dasar dan data makro yang akurat dan up to date.
2. Masih adanya inkonsistensi dan validitas data dari Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan data;
4. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
5. Masih terdapat data-data penting yang sulit didapatkan/dihitung secara akurat dan tepat waktu.
6. Belum efektifnya manajemen pengumpulan data dan sistem informasi data.
7. Masih terjadinya perbedaan data antar sumber-sumber data.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian yaitu:

1. Keterbatasan SDM persandian dalam hal kualitas maupun kuantitas
2. Infrastruktur jaringan belum cukup memadai
3. Masih ada beberapa tenaga persandian yang belum didiklat, kaderisasi SDM persandian perlu dilakukan.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

1. Cagar budaya belum terdokumentasikan dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
2. Belum adanya kesepahaman antara pemilik bangunan, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan komunitas pemerhati dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.

3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.
4. Masih kurangnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.
5. Belum adanya gedung kesenian yang dilengkapi sarana prasarana yang memadai untuk pentas seni. Meskipun begitu saat ini telah ada Pendopo Mantyasih yang dapat digunakan sebagai tempat untuk pertunjukan seni dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti tata suara dan tata cahaya.
6. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Magelang tentang sejarah dan legenda kota Magelang.
8. Masih kurangnya jalinan komunikasi interaktif antara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan pemerintah. Kota Magelang.
9. Masih kurangnya pembinaan seni dan budaya bagi kaum muda
10. Budaya belum dipandang sebagai sarana pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter bangsa

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
4. Perpustakaan digital belum menjadi fokus program

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

1. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
2. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
3. Digitalisasi arsip belum menjadi fokus kebijakan

2.3.3 URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang, sebagai akibat dari alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.
2. Belum optimalnya jumlah kelompok masyarakat perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPIB dan Kelayakan Pengolahan.
3. Masih adanya perikanan yang belum ramah lingkungan di Kota Magelang, sehingga berpotensi merusak kelestarian dan mengganggu keamanan ekosistem air tawar.
4. budidaya perikanan di lahan sempit (tidak terpakai) di Kota Magelang dan hal ini masih perlu dioptimalkan.
5. Belum optimalnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama perikanan (pembudidaya, pemasar dan pengolah)

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata seperti kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi destinasi pariwisata
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata
3. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya
4. Belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata promosi yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri
5. Belum optimalnya penyelenggaraan event pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung
6. Masih lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik.
7. TIC belum representatif.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebagai Kota Jasa termasuk kecil.
9. Lemahnya daya dukung terwujudnya Desa Wisata dan obyek wisata yang memiliki daya tarik.
10. Kurangnya informasi terkait obyek wisata (sejarah/rincian obyek, rute/peta, fasilitas, keterkaitan antar obyek, dsb).
11. Kurangnya produk spesifik cenderamata.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

1. Pelaksanaan Agricultural Practices (GAP) yang masih sulit untuk diterapkan pada petani Kota Magelang karena petani kota Magelang sebagian besar sebagai penggarap sawah.

2. Belum optimalnya pendampingan dan monitoring evaluasi pasca pelatihan sehingga berdampak pada tidak dimanfaatkannya hasil pelatihan untuk meningkatkan taraf hidupnya, Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian diperkotaan
3. penerapaaan teknologi belum dilaksanakan secara optimal maksimal, petani penggarap sawah sebagian masih menggunakan alat manual / tradisional dan masih terbatasnya alat sehingga tidak maksimal dalam pengerjaannya.
4. Belum adanya sarana pemasaran pasar bunga di Kota Magelang sehingga belum optimal dalam pengembangan agribisnis tanaman hias di masyarakat Kota Magelang.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Urban Farming, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan urban farming dan belum berkembangnya pertanian perkotaan (Urban farming) dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Pola pikir petani yang praktis dalam budidaya tanaman dan menggunakan bahan kimia tanpa memikirkan efek terhadap lingkungan. Dalam hal ini pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Magelang masih bersifat konvensional, sehingga berdampak negative bagi lingkungan yang berupa kerusakan lingkungan air, udara maupun mahluk hidup
7. Masih terdapat produk pangan asal hewan yang tidak Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
8. Masih belum memadainya SDM medis dan paramedis di Puskewan
9. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular strategis/ zoonosis pada manusia

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Belum optimalnya upaya penghematan energi .
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.

2.3.3.5 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
3. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah

2.3.3.6 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Terkendalanya proses perijinan di bidang perindustrian karena OSS belum bisa diterapkan sampai keluarnya ijin dan banyak IKM yang belum siap karena terkendala persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;

3. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
4. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
5. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
6. Belum memadainya sarana promosi dan pemasaran produk IKM
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah sentra industri

2.3.3.7 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah:

1. Transmigrans terutama yang masih tahun-tahun awal belum bisa mandiri sepenuhnya karena waktu yang diperlukan untuk adaptasi di wilayah penempatan berbeda beda tergantung pada masing-masing transmigrans.
2. Pemerintah daerah setempat tidak dapat memenuhi kebutuhan transmigrans untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup transmigrans.

2.3.4 FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi
2. Masih dijumpai kesulitan dan miskordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi..
3. Belum optimalnya pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD utamanya antara kasubag program dengan seksi atau bidang pada OPD.
4. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global

2.3.4.2 Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan adalah:

1. Laporan BMD belum informatif.

2. Belum semua objek sewa (tanah/bangunan) dinilai karena keterbatasan SDM dan anggaran penilaian harus menggunakan Penilai Publik/Penilai Pemerintah.
3. Adanya penyesuaian dengan regulasi tingkat pusat yaitu dengan terbitnya Permendagri No.19 tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan maka Perda No.19 tahun 2011 mengakibatkan beberapa jenis retribusi daerah dihilangkan untuk tidak dipungut.
4. Sebagian wajib pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.
5. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap aturan pengelolaan BMD.

2.3.4.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum semuanya memuaskan
2. Pengisian jabatan ASN belum seluruhnya berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja
3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
4. Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian
6. Penegakan disiplin pegawai belum didukung dengan penerapan sistem reward dan punishment yang terintegrasi

2.3.4.4 Fungsi Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pengawasan yaitu:

1. Manajemen pengawasan masih lemah disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance.
2. Masih perlunya peningkatan kompetensi APIP.
3. Hasil implementasi SAKIP masih mengalami keterbatasan sample dari OPD, renaksi dan monev.
4. Pencegahan KKN lemah disebabkan rendahnya komitmen aparatur pemerintah daerah

2.3.4.5 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementrian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
2. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
3. Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbangan
4. Kurang kuatnya dalam menjalani fungsi koordinasi
5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
6. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
7. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)

2.4 ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan..

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;

- 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Kemananan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
- 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
- 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah

14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

3.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam sebagai berikut:

Tabel 3-6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 - 2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220,315,848,525	233,557,714,356	249,873,268,826	222,478,414,000	241.344.921,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	25,974,837,133	31,206,960,485	34,283,039,991	32,500,000,000	34,200,800,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,663,308,913	6,243,021,736	5,634,746,979	5,001,088,000	5,038.360,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,182,279,953	7,711,404,121	8,693,813,515	9,982,607,000	9,982,607,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181,495,422,703	188,396,328,014	201,261,668,341	174,994,719,000	192.123.154,000
1.2	Dana Perimbangan	567,636,707,545	553,115,007,612	570,455,641,253	590,290,453,000	590,611.504,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30,333,059,082	26,685,769,289	24,423,094,444	24,412,946,000	24,733.997,000
1.2.2	DAU	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	455,177,029,000	455,177,029,000
1.2.3	DAK	89,394,073,463	86,387,994,323	105,991,302,809	110,700,478,000	110,700,478,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	52,090,070,278	122,853,140,952	87,756,441,462	99,197,714,000	123.662.723,000
1.3.1	Hibah	0	24,050,844,059	18,087,893,878	16,757,600,000	16,757,600,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37,179,177,579	41,855,667,000	46,788,343,659	40,043,975,000	55.273.984,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	47,039,466,000	18,250,000,000	42,396,139,000	42,396,139,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,146,495,000	9,701,162,500	3,916,290,000	0	9.235.000.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	764,397,699	206,001,393	713,913,925	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	840,042,626,525	909,525,862,920	908,085,351,541	911,966,581,000	955.619.148,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2016-2018 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2019

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pajak Daerah diperkirakan naik dengan interval kenaikan diasumsikan antara 5 – 6 %
- Retribusi Daerah diperkirakan sedikit mengalami kenaikan, yang berasal dari:

Kenaikan Retribusi Jasa Umum, adanya kenaikan dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pasar: Peralatan, Los, dan Kios, Penyedotan Kakus serta Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Kenaikan Retribusi Jasa Usaha, adanya kenaikan dari: Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan, Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik, dengan adanya kenaikan dari: Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.
- d. Dana Perimbangan mengalami kenaikan: Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak naik, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
- e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya naik menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya menyesuaikan dengan DPA-PPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 00412/DPA/2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2019.

3.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk

intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 meningkat dan diharapkan tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2014-2018 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-7
Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
01.	2014	164,927,631,230	459,785,205,171	110,403,278,006	735,116,114,407
02.	2015	186,677,410,081	462,804,716,465	131,853,672,963	781,335,799,509
03.	2016	220,315,848,702	567,636,707,545	52,090,070,278	840,042,626,525
04.	2017	233,557,714,356	553,115,007,612	122,853,140,952	909,525,862,920
05.	2018	249,873,268,826	570,455,641,253	87,756,441,462	908,085,351,541

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014 – 2018 merupakan realisasi anggaran.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1, angka 18 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, oleh karena itu pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat, bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.

- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. Memperkuat proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- f. Penggunaan e-tax (Pajak Online) dalam pelayanan pajak daerah, untuk mempercepat, mempermudah dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis "web service" sehingga Wajib pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
- g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/wajib pajak.
- h. Meningkatkan pengawasan, dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanpajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2014-2018 di Kota Megelang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-8

Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan Daerah (%)
01.	2014	164,927,631,230	735,116,114,407	22,44
02.	2015	186,677,410,081	781,335,799,509	23,89
03.	2016	220,315,848,702	840,042,626,525	26,22
04.	2017	233,557,714,356	909,525,862,920	25,68
05.	2018	249,873,268,826	908,085,351,541	27,52

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014 - 2018 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-9
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Pajak thd PAD (%)
01.	2014	22,107,435,949	164,927,631,230	13,40
02.	2015	26,185,301,675	186,677,410,081	14,02
03.	2016	25,974,837,133	220,315,848,702	11,78
04.	2017	31,206,960,485	233,557,714,356	13,36
05.	2018	34,283,039,991	249,873,268,826	13,72

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-10
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
01.	2014	6,058,580,948	164,927,631,230	3,67
02.	2015	6,999,474,592	186,677,410,081	3,74
03.	2016	6,663,308,913	220,315,848,702	3,02

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
04.	2017	6,243,021,736	233,557,714,356	2,67
05.	2018	5,634,746,979	249,873,268,826	2,26

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-11
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2014	6,242,609,307	164,927,631,230	3,79
02.	2015	6,598,774,537	186,677,410,081	5,53
03.	2016	6,182,279,953	220,315,848,702	2,80
04.	2017	7,711,404,121	233,557,714,356	3,30
05.	2018	8,693,813,515	249,873,268,826	3,48

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-12
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2014	130,519,005,026.00	164,927,631,230.00	79,14
02.	2015	146,893,859,277.00	186,677,410,081.00	78,68
03.	2016	181,495,422,703.00	220,315,848,702.00	82,37
04.	2017	188,396,328,014	233,557,714,356	80,66
05.	2018	201,261,668,341	249,873,268,826	80,55

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2014-2018 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun pada tahun 2015, 2017 dan 2018 mengalami penurunan), diharapkan tahun-tahun berikutnya akan naik kembali, baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) rata-rata berkisar 60 - 70 persen dari total Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-13
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2014	459,785,205,171	735,116,114,407	62,55
02.	2015	462,804,716,465	781,335,799,509	59,23
03.	2016	567,636,707,545	840,042,626,525	67,57
04.	2017	553,115,007,612	909,525,862,920	60,81
05.	2018	570,455,641,253	908,085,351,541	62,82

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-14
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	20,207,973,171	459,785,205,171	4,40

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
02.	2015	18,772,034,465	462,804,716,465	4,05
03.	2016	30,333,059,082	567,636,707,545	5,34
04.	2017	26,685,769,289	553,115,007,612	4,82
05.	2018	24,423,094,444	570,455,641,253	4,28

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-15
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Umum Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	417,211,449,000	459,785,205,171	90,74
02.	2015	418,257,922,000	462,804,716,465	90,37
03.	2016	447,909,575,000	567,636,707,545	78,90
04.	2017	440,041,244,000	553,115,007,612	79,56
05.	2018	440,041,244,000	570,455,641,253	77,14

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-16
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	22,365,783,000	459,785,205,171	4,86
02.	2015	25,774,760,000	462,804,716,465	5,56
03.	2016	89,394,073,463	567,636,707,545	15,74
04.	2017	86,387,994,323	553,115,007,612	15,62
05.	2018	105,991,302,809	570,455,641,253	18,58

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan APBD yang mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini dikarenakan Tunjangan Profesi Guru yang semula pendapatannya masuk dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 masuk Dana Alokasi Khusus pada Dana Perimbangan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

:Tabel 3-17

Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan Daerah(%)
01.	2014	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00	15.02
02.	2015	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00	16,87
03.	2016	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00	6,20
04.	2017	122,853,140,952	909,525,862,920	13,51
05.	2018	87,756,441,462	908,085,351,541	9,66

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-18
Kontribusi Pendapatan Hibah
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pendapatan Hibah (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2014	0	110,403,278,006	0,00
02.	2015	0	131,853,672,963	0,00
03.	2016	0	52,090,070,278	0,00
04.	2017	24,050,844,059	122,853,140,952	19,58
05.	2018	18,087,893,878	87,756,441,462	20,61

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-19
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2014	26,421,159,000	110,403,278,006	23,93
02.	2015	36,869,367,174	131,853,672,963	27,96
03.	2016	37,179,177,579	52,090,070,278	71,37
04.	2017	41,855,667,000	122,853,140,952	34,07
05.	2018	46,788,343,659	87,756,441,462	53,32

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-20
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2014	74,974,179,000	110,403,278,006	67,91
02.	2015	79,988,204,000	131,853,672,963	60,66
03.	2016	0	52,090,070,278	0,00
04.	2017	47,039,466,000	122,853,140,952	38,29
05.	2018	18,250,000,000	87,756,441,462	20,80

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Tabel 3-21
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2014	9,007,940,006	110,403,278,006	8,16
02.	2015	14,964,620,257	131,853,672,963	11,34
03.	2016	14,146,495,000	52,090,070,278	27,15
04.	2017	9,701,162,500	122,853,140,952	7,90
05.	2018	3,916,290,000	87,756,441,462	4,46

Tabel 3-22
Kontribusi Pendapatan Lainnya Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2014	0	110,403,278,006	0,00
02.	2015	31,481,532	131,853,672,963	0,02
03.	2016	764,397,699	52,090,070,278	1,46
04.	2017	206,001,393	122,853,140,952	0,17

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
05.	2018	713,913,925	87,756,441,462	0,81

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2014-2018, maka pendapatan sampai dengan tahun 2019 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

- Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) atau instrument lain yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada wajib pajak.
- Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- Optimalisasi SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
- Penerapan konsep "Ear marking" dalam pendapatan daerah dimana setiap pungutan dari masyarakat (Pajak Daerah, Retribusi Daerah) akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan secara menyeluruh di Kota Magelang.

3.1.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri; hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.1.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
- d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pemerintah Kota tidak menganggarkan Belanja Bagi Hasil.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

3.1.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2014-2018, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-23
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2014	340,526,165,129	341,697,705,278	682,223,870,407
02.	2015	357,657,431,281	378,683,006,469	736,340,437,750
03.	2016	350,201,266,658	521,657,863,945	871,859,130,603
04.	2017	284,176,958,291	595,231,223,156	879,408,181,447
05.	2018	280,174,190,595	657,165,555,828	937,339,746,423

Sumber: Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-24
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
02.	2014	333,318,007,729	682,223,870,407	48.86
03.	2015	345,555,340,681	736,340,437,750	46,92
04.	2016	344,173,396,158	871,859,130,603	39,47
05.	2017	270,261,944,831	879,408,181,447	30,73
06.	2018	262,442,804,917	937,339,746,423	28,00

Sumber : Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-25
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN 2019	PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2019
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.201.266.658	284.176.958.291	280.174.190.595	333.615.691.000	335.286.060,000
	Belanja Pegawai	344.173.396.158	270.261.944.831	262.442.804.917	307.867.090.000	316.381.352,000
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	1.486.806.000	8.297.155.620	10.447.285.378	16.490.370.000	11.580.370,000
	Belanja Bantuan Sosial	3.192.264.000	4.926.411.000	6.623.398.000	5.092.290.000	4.412.290,000
	Belanja Bantuan Keuangan	641.828.500	560.702.300	660.702.300	560.703.000	560,703,000
	Belanja Tak Terduga	706.972.000	130.744.540	0	3.605.238.000	2.351.345,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	521.657.863.945	595.231.223.156	657.165.555.828	698.350.890.000	754.741.888,000
	BELANJA DAERAH	871.859.130.603	879.408.181.447	937.339.746.423	1.031.966.581.000	1.090.027.948,000
	Surplus/Defisit	-31.816.504.078	30.117.681.473	-29.254.394.882	-120.000.000.000	-134.408.800,000

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.

2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2019

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2019 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Membiayai Program dan Kegiatan yang Menjadi Prioritas Kota Magelang;
2. Membiayai Program dan Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Visi dan Misi Walikota Magelang;
3. Memenuhi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Harus Dilaksanakan;
4. Memenuhi Pelaksanaan Program yang Berstandar Pelayanan Minimal dan Operasional;
5. Mengedepankan Program-program yang menunjang Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan;

6. Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Guna menjamin Kelangsungan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat;
7. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Total Belanja Daerah;
8. Alokasi Belanja Urusan Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja APBD diluar Gaji Mematuhi Ketentuan Penggunaan Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum untuk Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Minimal 25% dari DAU dan DBH setelah dikurangi 10% Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja Infrastruktur Daerah merupakan Belanja yang Langsung terkait dengan Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik dan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Penyediaan Pelayanan Publik antar Daerah yang dihitung dari Total Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan namun tidak termasuk Belanja Modal dan Pemeliharaan untuk Aparatur seperti Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Gedung Pemerintahan yang Fungsi Utamanya untuk Pelayanan Administrasi dan Kendaraan Dinas.
9. Mematuhi Pelaksanaan Penggunaan Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan seperti DBHCHT, Dana Transfer Khusus dan Dana Otonomi Khusus.
10. Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Mengupayakan Percepatan Pelaksanaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar.

3.1.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan:

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2016 -2018 dan prediksi perubahan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-26
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016-2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN 2019	PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2019
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	201,248,404,030	165,042,740,403	184,727,608,326	120,000,000,000	134.408.800,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	201,227,094,865	162,344,899,952	180,992,538,327	120,000,000,000	134.408.800,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah		0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	21,309,165	47,840,451	7,069,999	0	0
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan		2,650,000,000	3,728,000,000	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,078,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,078,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	0	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		0	0	0	0

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN 2019	PREDIKSI PERUBAHAN TAHUN 2019
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir		0	0	0	0
	Pembiayaan netto	194,161.404,030	150,875,083,403	163,664,834,326	120,000,000,000	134.408.800.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	162,344,899,952	180,992,764,876	134,410,439,444	0	0

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang APBD Kota Magelang TA. 2019

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- Optimalisasi Penerimaan Investasi Daerah dari Dana Bergulir.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2019 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga deviden yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Ketiga, yaitu tahun perencanaan 2018 untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS".

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4-1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya). Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (b) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); (c) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendoornng pencapaian kinerja pemerinrintahan); (d) Sumber daya manusia aparatur (SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (e) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (f) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (g) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (h) Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) (Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa budaya kerja).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (penggunaan internet) di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing, dan sebagainya) sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan TI akan memungkinkan pemerintah untuk: (a) mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, tepat, bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi (Good Corporate Governance); (b) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan; dan (c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (collective commitments) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan kepemimpinan yang kondusif (condusif leadership), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pada giliran berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, good corporate governance juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 (empat) kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai “komunitas hijau”, dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemerintah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/ distribution of income) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan antara lain dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR), sehingga golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of privilege); dan sebagainya.

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Magelang. Semua itu dilakukan secara berkesinambungan (sustainable) dan diupayakan mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkembangkan kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Dalam konteks pembangkitan spiritualitas masyarakat, perlu dibangun cara pandang bahwa pariwisata merupakan jendela mensyukuri nikmat Tuhan, pusat-pusat keagamaan dapat menjadi obyek kunjung yang memiliki daya tarik, dan upacara-upacara keagamaan sebagai atraktif yang dapat mengundang pesona.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat disarikan antara lain: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk

meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum toleransi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu karakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Selebihnya, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendekiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;

3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
 - 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
 - 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
 - 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.
2. Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment;

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
 - 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
 - 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
 - 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
 - 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
 - 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
 - 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.
3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
- 10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

- 1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel 4-2. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 4-3.

Tabel 4-2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang tahun 2019)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat																
1	1	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%		
						2	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%		
						3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%		
				2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		
						2	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14		
						3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)		
	2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%		
						2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
								2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
				3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
				2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8
				a. Regional	4	4	4	5	5	6	6	6
				b. Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2
				c. International	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	20	20
				a. Regional	8	10	10	10	10	10	11	11
				b. Nasional	4	5	5	5	5	5	6	6
				c. International	2	2	2	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan													
2	1	Indek Pembangunan Manusia	1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,41	10,46	10,50	10,55	10,59	10,59	
				2	Persentase sekolah berstandar nasional									
					a. SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%	
					b. SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
				3	Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%	
			4	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%		
			5	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305		
			2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)
					2	Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94
					3	AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
					4	AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
					5	AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
					6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
					7	Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
					8	Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
					9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%
	10	Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat			98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%		
	3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah			1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan	1	Persentase sarana prasarana penyedia	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)								
				2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	2 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
				2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
			2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10
				b. Publik	18,37	18,37	18,37	18,42	18,44	18,46	18,50	18,50
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
				2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
			4 Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
	3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat										
3	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
			2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok	1 Tercapainya 100 - 0 -100								

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	aksesibilitas		pendapatan	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
				b. Rasio Luas kawasan kumuh	121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
				2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
				3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25
	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatkan kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi								
				a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
				b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
			2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
				2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			3 Meningkatkan ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037
	3 Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunannya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	4 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
	5 Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
				2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
				2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang														
4	1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
						2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan a. Nusantara b. Mancanegara	1.133.373 5.171	1.134.846 5.178	1.136.435 5.185	1.138.140 5.193	1.139.961 5.201	1.141.899 5.210	1.143.954 5.219	1.143.954 5.219
5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani														
5	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
						2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64
				2	Prosentase penurunan kasus narkoba			-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				3	Angka kriminalitas yang tertangani			11,08	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5	12,5
				4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama			75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3	3	3
						2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2

Tabel 4-3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang Tahun 2019)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesiona dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah			v	v	v	v
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4 Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	10 Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional								
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan								
1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6 Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11 Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7 Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyaraakatan budaya perilaku hidup sehat	12 Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v
		13 Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8 Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14 Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4 Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9 Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan							
5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15 Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk		v	v	v		
6 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana		menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan						
8 Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang								
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat								
1 menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11 Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16 Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v
2 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat								
3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan								
4 Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12 Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah	17 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v		
5 Meningkatnya ketahanan pangan	13 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kesejahteraan sosial								
7 Meningkatnya lapangan kerja								
8 Menurunnya angka kemiskinan								
9 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan								

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Menurunnya kesenjangan gender											
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang											
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	1 9	Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial										
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani											
1	Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15	Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20	Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2	Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat										
3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilihan tempat peribadatan sesuai standar										

Kota Magelang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dan provinsi ke dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, menyatakan bahwa pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pasal 260 menyatakan bahwa rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesesuaian sasaran pembangunan Kota Magelang yang menjadi dasar RKPD 2019 dengan sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah digambarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.4
Matrik Kesesuaian Sasaran Pembangunan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
1.1.	1.1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	6.3	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
			6.4.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
	1.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	12.2.	Bidang Aparatur		
			6.2	Penegakan hukum	3.b	Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri
			6.3.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
					3.d.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
1.2.	1.2.1.	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	6.3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	3.c	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
						bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
			12.2.	Bidang apartur		
			13.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
1.2.	1.2.2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	14.10	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	3.g.	Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
			9.1.	Pembangunan Iptek	1.g	Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
			14.13.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tercapainya tingkat TIK literasi nasional		
			14.14.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan prinsip keamanan cyber nasional		
	1.2.3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
					3.f	pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
					3.e	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
			8.15	Data dan Informasi Statistik	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
1.3.	1.3.1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	8.2.	Keuangan negara	2.e	Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.
1.4.	1.4.1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
	1.4.2.	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
					3.a	Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
					3.b	Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri
			2.6.	Pembangunan Masyarakat	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
			7.7.	Kesejahteraan sosial		
	1.4.3.	Meningkatnya kualitas dan	7.4.	Pemuda an Olahraga	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional				yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
2.1	2.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	2.2.	Pendidikan	1.a	Meningkatnya kualitas SDM, yaitu dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
					1.b	Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
	2.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	2.3.	Kesehatan	1.c	Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan
	2.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8.9	Perdagangan dalam negeri	2.a.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
			8.7.	Ekonomi Kreatif	2.d	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industri-alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
			8.5.	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2.d	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industri-alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
	2.1.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	13.7.	Kawasan strategis	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
			14.18	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur : Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor.	5.c	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
	2.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.5.	Sasaran pembangunan sektor unggulan: Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran
			15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:	4.a	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi.
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pestaarian dan Pemanfaatan Keekonomian	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke-ayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
			15.10	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan	4.d	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
	2.2.2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:	4.a	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pestaarian dan Pemanfaatan Keekonomian	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke-ayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
	2.2.3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	15.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	4.d	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
	2.2.4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke-ayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
				Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian		untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
3	3.1.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	7.7.	Kesejahteraan Sosial	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
			3.5.	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran
	3.1.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	4,	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. ;
			4.1.	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi		
			5	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah	5.c	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
			5.1.	Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah		
	3.1.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	14.9	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN GRK) di sektor transportasi	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. ;

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
	3.2.1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	8.	Sasaran Bidang Ekonomi	2.a	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
					2.b.	Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
			8.5	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2.d	Meningkatnya perkembangan per- industri, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industri- alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
			8.8	Penguatan Investasi		
	3.2.2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	8.7.	Ekonomi Kreatif	2.b.	Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
	3.2.3	Meningkatnya ketahanan pangan	15.1.	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	2.c.	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok yang dapat dipertahankan pada tingkat aman.
			3.1.	Kedaulatan Pangan		
3.3.	3.3.1	Meningkatnya lapangan kerja	4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif	2.d.	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok yang dapat dipertahankan pada tingkat aman.
	3.3.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	7.7.	Kesejahteraan Sosial	6.b	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
					6.a	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
			4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif		
3.4.	3.4.1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	6.a	Menurunnya jumlah penyandang masalah

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		lingkungan				kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
			2.1.	Kependudukan dan Keluarga Berencana		
3.5.	3.5.1	menurunnya kesenjangan gender	2.4.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	6.d	Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
4.1.	4.1.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	7.5	Kebudayaan	6.f	Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah.
	4.2.1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	8.6.	Pariwisata	2.b.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata
			3.4.	Pariwisata dan Industri Manufaktur		
5.1.	5.1.1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	7.6	agama	6.c	Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.
	5.1.2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	10.1.	Politik Dalam Negeri	6.a	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Jawa Tengah.
			2.6.	Pembangunan masyarakat	6.g	Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah dari segala tindak kejahatan
					6.f	Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah.

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
5.2.	5.2.1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	7.6.	Agama	6.c	Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

. Dari matrik di atas nampak bahwa seluruh sasaran pembangunan kota Magelang 2016-2021 yang menjadi dasar RKPD 2019 memiliki keterkaitan dengan semua sasaran pembangunan nasional 2014-2019 yang menjadi dasar RKP 2019, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat.

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019

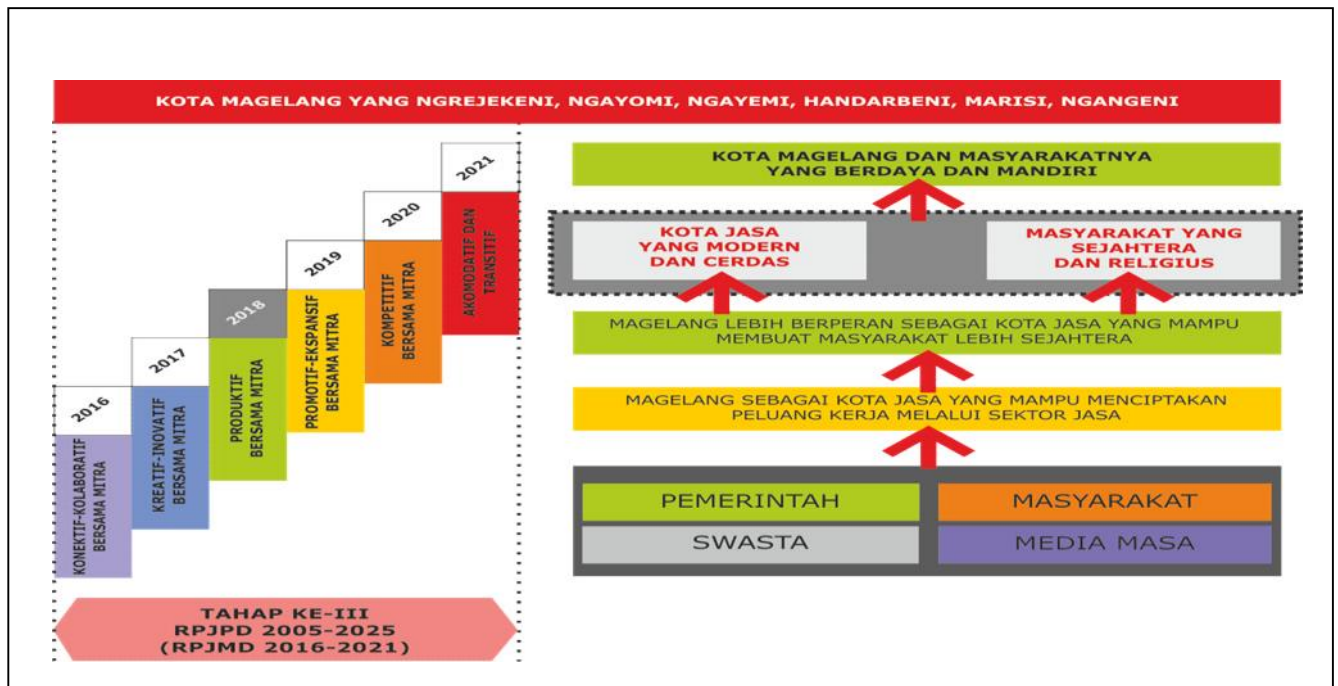
Dalam RKP Tahun 2019, tema pembangunan yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan substansi pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2019 adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah Produktif Bersama Mitra Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2018 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2019. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- (i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

. Deskripsi komprehensif atas Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019 nampak pada gambar berikut :



Gambar 4-1

Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2019

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional . Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4-5

Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Tema RKP Tahun 2019	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019	Benang Merah keterkaitan

Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat	Produktif Bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah hasil kreativitas dan inovasi tahun lalu diupayakan untuk naik pada level produktif yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2019

4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Prioritas pembangunan merupakan pilihan keputusan lokasi dan distribusi sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah secara terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembanguan daerah. Harmonisasi tersebut diatur dalam amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Disebutkan bahwa perlu dilakukan integrasi dan penyelarasan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara RPJMD-RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP.

Matrik berikut akan memaparkan peta harmonisasi prioritas pembangunan kota Magelang dengan prioritas nasional dan provinsi. Matrik berikut sebagai ringkasan yang akan dijabarkan pada penjelasan berikutnya.

Tabel 4.6
Harmonisasi Prioritas Pembangunan Kota Magelang tahun 2019 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Kode	Prioritas Kota Magelang 2019	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas nasional	Kode	Prioritas Provinsi
1.	Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan	1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1	Tata kelola pemerintahan
		4	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	2	Penguatan daya saing ekonomi daerah
				3	Kualitas hidup dan daya saing SDM
				1	Penanggulangan Kemiskinan
2	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	7	Tata kelola pemerintahan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	3	Kualitas hidup dan daya saing SDM
		5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		
3.	Awal pelebagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas	1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	7	Tata kelola pemerintahan
		5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		
4.	Pelebagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	6.f	Tata kelola pemerintahan
		5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Kode	Prioritas Kota Magelang 2019	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas nasional	Kode	Prioritas Provinsi
5	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	5.	Penanggulangan kemiskinan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Peningkatan daya saing ekonomi daerah
		5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Kesenjangan wilayah
6.	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2	Penanggulanagn kemiskinan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Ketahanan pangan dan energi
		5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
		4	Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air		
		3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif		
			Perkembangan iklim investasi dan iklim usaha		
7	Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.	5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Tata kelola pemerintahan

Sumber: Racangan RKP 2019, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan SEB Mendagri dan MPPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016

4.2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014-2019

Memperhatikan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa di dalam Buku I RPJM Nasional disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi nasional tersebut dan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegus kebhinekaan dan mempertkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesembilan agenda prioritas tersebut diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

a. Dimensi Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- 1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- 2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- 3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5-4,5%;
3. Indeks Gini sebesar 0,38-0,39;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5%;

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8%-5,2%

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2019

Secara lebih spesifik dalam RKP Tahun 2019, tema yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Tema dimaksud untuk menjawab beberapa isu strategis yang harus di solusikan pada tahun 2019 antara lain :

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit
- 2) Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif
- 4) Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air
- 5) Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis

Oleh karena itu pada tahun 2019 Pemerintah menempatkan 5 prioritas nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- 4) Pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk “Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat”,

Tema tersebut sebagai pendekatan solusi atas 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Daya saing ekonomi
3. Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia
4. Kedaulatan pangan dan energy
5. Kesenjangan wilayah

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

7. Tata Kelola Pemerintahan

Dengan mendasarkan pada pemecahan isu tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pada :

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :

- a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
- b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming),
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
- c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
- e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
- f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan;

kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :
 - a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada :
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana,

pengembangan sistem informasi penganggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
- b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.

6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :

- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
- b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.
- d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;

meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2017-2018 diasumsikan bahwa :

- a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
- b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Tema tersebut mencoba untuk mengatasi berbagai isu strategis pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Jika disandingkan antara isu strategis level nasional, provinsi dan kota Magelang pada tahun 2019 akan nampak koneksitas isu strategis sebagai berikut :

Tabel 4-7

Koneksitas antar isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit	▪ Kemiskinan ▪ Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar
2	Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan	Kesenjangan wilayah	Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif	▪ Daya saing ekonomi ▪ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
4	Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air	Kedaulatan pangan dan energy	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

- 1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
 - a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
 - b. pendidikan,
 - c. kesehatan
- 2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
- 3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
- 4) Pelembagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

- 5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian dapat diilustrasikan keterkaitan antar fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Tabel 4-8
Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Penanggulan kemiskinan Penguatan daya saing ekonomi daerah	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Tata kelola pemerintahan	
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian industri dan jasa produktif	Kesenjangan Wilayah Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha Pelebagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan
4	Pementapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Ketahanan pangan dan energi	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	

4.2.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
- 2) Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- 3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
- 4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
- 6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset.
- 10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- 11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- 12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- 13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
- 14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- 15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
- 19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.

20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4-9
Keterkaitan antara Fokus Prioritas dengan Arah Kebijakan Tahun 2019

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, b. pendidikan, c. kesehatan	▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan. ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah. ▪ Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat. ▪ Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan. ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	▪ Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya ▪ Penataan organisasi perangkat daerah (sotk) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur ▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi ▪ Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota. ▪ Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.

Awal pelebagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas. Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	▪ ▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. ▪ Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah. ▪ Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4-10
Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawab Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS TAHUN 2019
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, b. pendidikan, c. kesehatan	▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri
Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.	▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
Pelembagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	• Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Penguatan reformasi birokrasi
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

4.2.1.3.2 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

- a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- b. Urusan pendidikan;
- c. Urusan kesehatan
- d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Urusan sosial;
- g. Urusan penanaman modal;
- h. Urusan komunikasi dan informatika;
- i. Urusan perdagangan;
- j. Urusan perindustrian;
- k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Urusan kebudayaan;
- m. Urusan pariwisata;

4.2.1.3.3 Program Unggulan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

- a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- b. Program peningkatan daya saing daerah;
- c. Program kota cerdas;
- d. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
- h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2019 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Tabel 4. 11
Koneksitas antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Prioritas Tema Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019, dan isu strategis

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
1. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada : a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas	A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 1. Penurunan Angka kemiskinan 2. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja 3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan B. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 1. Pemuda dan Olah Raga 2. Membangun Kemitraan 3. Penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak 4. Pemerataan Pembangunan C. Pengembangan dan pemanfaatan potensi	1. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga 2. Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan 3. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah 4. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi. b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan). c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar	daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah D. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 1. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah 2. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi 3. Smart City 4. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Branding Kota Magelang	kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.		
i. Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)	5.Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada : a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan,	E. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 3. Ketahanan Pangan	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen. b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.		
	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada : a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan	F. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming), b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan. c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman	2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan G. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan; 1. Kebudayaan 2. Pariwisata	masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah 2. Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan 3. Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu. d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM. e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata. f. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.		
III. Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agraria, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan	6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada : a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: - peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura –	H. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 4.Pemerataan Pembangunan I. Pengembangan dan pemanfaatan potensi	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional	pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun). b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya. c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.	daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah	kategori baik di provinsi Jawa Tengah 2. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga 3. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)		
	1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada : a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan. b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis	J. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 5. Penurunan Angka kemiskinan 6. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lahan kerja 7. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 8. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan K. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan 2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan 3. Ketahanan Pangan	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.		
	4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada : a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran		1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau. b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunkan kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.		
IV Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi	7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada : a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik; b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan	C. Penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pengelolaan Aset Daerah 3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 4. Penataan Organisasi 5. Penataan Tatalaksana 6. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 7. Penguatan Pengawasan 8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja L. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah	1. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN; c. kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreneur” dalam tata kelola pemerintahan. d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.		
1. Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada : a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit,	M. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; c. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah d. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming), b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan. c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan	e. Smart City f. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi g. Branding Kota Magelang	

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu. d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM. e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata;		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata. f. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.		

4.2.1.3.5 Koneksitas Sasaran, Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Jika dilihat dari Sasaran dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap dukungan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2019 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

KONEKSITAS PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KOTA MAGELANG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang ndemicial dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Persentase pegawai berkinerja baik	97,5%	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran ASN	97,5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,20%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,08%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase unit kerja yang menerapkan finger print	95%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang dan Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan:				Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
							- Pendidikan S1	48%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
							- Pendidikan S2	9,5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
					Program Pendidikan Kedinasan	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	96%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	90%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	1	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	90%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Capaian SPM Kota Magelang	70%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	persentase SPM yang mencapai target nasional	70%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi/ Tapem	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	52%	1	Optimalisasi sistem persandian daerah	1	Ketersediaan SOP persandian	100%	Persandian	PD Urusan Persandian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kesenjangan Wilayah
						2	Tingkat kapasitas SDM persandian	2	Persandian	PD Urusan Persandian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						3	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SOP Persandian	28	Persandian	PD Urusan Persandian		
				1	Program peningkatan kualitas pelayanan arsip	1	Cakupan pelayanan akses arsip	78%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Tingkat Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan	45%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan		
				1	Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	69%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarpras Kearsipan	1	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,79	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
				1	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	Persentase Penyelamatan Arsip	60%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	1	Cakupan ijin penggunaan arsip	90%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	1	Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Persentase penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Indeks EKPPD	3,1	2	Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan	2	Persentase penyelenggaraan urusan berkinerja sangat tinggi	90%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Hasil implementasi SAKIP	CC (56,00)	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Nilai hasil evaluasi LKJip SKPD	BB	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	55%	1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Penurunan temuan kasus LKPD	1	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	87%	Penunjang Keuangan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2 Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP	85%	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	85%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	85%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 rasio laporan APBD, DAK, Bankeu tepat waktu	95%		PD Penunjang Setda Bagian Pembangunan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Prosentase jumlah SKPD yang di review LkjIP	55%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan	1	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	96%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				kebijakan KDH	2	Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	
					3	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	
					4	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	
			1	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
					2	Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	
					3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	75%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	
			1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Cakupan pemeriksaaan	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
										Tata Kelola Pemerintahan
										Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Persentase implementasi SPIP	84%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Temuan Administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP menurun	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP menurun	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Persentase Aparat SPIP aktif	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Zona Integritas yang dibentuk	30%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
1.3	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan ndemi yang responsif	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	60,60%	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Nilai survey kepuasan pengguna layanan PD	95	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Organisasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3		2	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	75%	Penunjang/ Fungsi Lain	Fungsi lain :PTSP	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Tingkat ketersediaan pokok-pokok pikiran Dewan	100%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Pengembangan Data/ Informasi	1	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	90%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1	Persentase Penyebaran Informasi	90%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Umum	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	Admuduk dan Capil	PD Urusan Admuduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
							Cakupan penduduk memiliki KIA	100%			Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
						2	Persentase implementasi SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan	60%	Admuduk dan Capil	PD Urusan Admuduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	940	Admuduk dan Capil	PD Urusan Admuduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan KK	100%	Admuduk dan Capil	PD Urusan Admuduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.4	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik										Pelayanan Dasar	
				3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan Akta Kematian	60%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Persentase PD menerapkan e-Gov	90%	1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Interoperabilitas antar system informasi	4	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
		Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	70%									
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	75%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											penguatan konektivitas dan kemaritiman	
						2	Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	
				2	Program Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	Peningkatan SDM bidang kominfo	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	Persentase implementasi e-arsip	69%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
1.5	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	93%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		
		Persentase Publikasi data dan informasi sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	80%			3	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				3	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				4	Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penanggulang an Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.6	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan ndem daerah	Derajat Otonomi Fiskal	31,96%	5	Perencanaan bidanag fisik prasarana	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik prasarana	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
				6.	Program Penguatan Inovasi Daerah	1	Cakupan Penguatan SIDA	55%	Penelitian dan Pengemban gan	PD Urusan Penelitian dan Pengembang an	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program pengembangan data/informasi/ndemic i daerah	1	Persentase pemenuhan data	95%	Statistik	PD Urusan Statistik	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
1.6	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan ndem daerah	Derajat Otonomi Fiskal	31,96%	1	Peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12,33%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											pertanian, industry dan jasa produktif	
						2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,33%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
		Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	67.45%	1	Program Peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,54%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Perekonomian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	12,83%	Penunjang	PD penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
											Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	70%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Barang milik daerah yang didayagunakan	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
1.7	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	65%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	75,86%			2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	45%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase perkembangan kerjasama daerah	4,76%	1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	17%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
							Presentase krenova OPD yang berkualitas	8%				
				2	Program Penelitian dan Pengkajian	1	Persentase hasil riset/kajian yang ditidakanjuti	40%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	15%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				4	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	1	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	55%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				5	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	1	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	15%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	1	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	7%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	1	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	12%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				8	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	70%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Jumlah KIM per kelurahan	1	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.8	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan										konektivitas dan kemaritiman	
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan untuk interaksi	7	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	1	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	Penunjang Pemerintahan umum	PD Penunjang Pemerintah umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Kerjasama Pembangunan	1	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	4	Penunjang Perencanaan Pembangunan	PD Penunjang Perencanaan Pembangunan	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan	48%	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Cakupan LPM berprestasi	52%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	47%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		bersama pemerintah		2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaasn Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				4	Program Infrastruktur Pedesaan	1	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaasn Masyarakat dan Desa	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				5	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	1	PKK aktif	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaasn Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	41,12%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaasn Masyarakat dan Desa	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				2	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	1	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaasn Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	7	1	Peningkatan peran serta kepemudaan	1	Prosentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95,00%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		a. Regional	5			2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		b. Nasional	2			3	Prosentase pengangguran pemuda	6,15%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	0	1	Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda	1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	85%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan	17	2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda	1	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		internasional										
		a. Regional	10	1	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		b. Nasional	5			2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	77%	Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
		c. International	2	2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1	Peningkatan cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6	Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						3	Jumlah klub olahraga	183	Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
						4	Jumlah organisasi olahraga	35	Kepemudaan dan Olahraga	PD Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
	Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan											

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	10,50	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	APK SD/SDLB/MI/Paket A	116%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	80%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						5	Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						6	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						7	Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						8	Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						3	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun	0,001	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						4	Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		Persentase sekolah berstandar nasional				5	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	160%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		a. SD	50,66%			6	Persentase sekolah yang menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai ndemici dan pendidikan karakter bagi siswa	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		b. SMP	80%			7	Penurunan angka kenakalan pelajar	36 pelajar	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		Angka Melek Huruf	98,31%			8	Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa		Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%			9	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
		Jumlah kunjungan perpustakaan	100.113			10	Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						11	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	67%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
						2	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	54%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Pendidikan Non Formal	1	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,31%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						3	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						4	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						5	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,75%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
						1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,23%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						1	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						1	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	54,15%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						1	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						1	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67,97%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	92%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
						2	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	98%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						3	Prosentase sekolah melaksanakan CBT SD/MI	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
						4	Prosentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Pendidikan Berkelanjutan	1	Persentase pandemic pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	
				1	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	50%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
				1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase peningkatan judul buku	9,28	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase peningkatan jumlah buku	6,26	Perpustakaan an	PD Urusan Perpustakaan		
						3	Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	56,87%	Perpustakaan an	PD Urusan Perpustakaan		
						4	Presentase perpustakaan aktif	23,70%	Perpustakaan an	PD Urusan Perpustakaan		
						5	Cakupan pelayanan melalui e-Library	3%	Perpustakaan an	PD Urusan Perpustakaan		
						6	Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	16,67%	Perpustakaan an	PD Urusan Perpustakaan		
						7	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						8	Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
2.2	Meningkatnya kualitas sarana, layanan dan derajat kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	13 bh (100%)	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	1	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	AA	Kesehatan	RSU Tidar	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	80%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	87,5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	
		Angka Harapan Hidup	76,8	4	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Cakupan Puskesmas Ramah Anak	24%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		AKI/ 1.000 KH	110	5	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	24%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		AKB/ 1.000 KH	13.5	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		AKABA	0,145	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4	95%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31			2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	
		Angka Kesakitan DBD	<0.50			3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	92%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka Prevalensi Kasus TB	<103			4 Cakupan Pelayanan Nifas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,05%	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Cakupan pandemic dengan komplikasi yang ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%			2 Cakupan Kunjungan Bayi	96%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3 Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2 cakupan balita gizi buruk mendapar perawatan	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3 Prevalensi Gizi Buruk	<0.31	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Penemuan dan penanganan Penderita DBD	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Angka Kesakitan DBD	<50	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Angka Prevalensi (Case Notification Rate = CDR) TB	90	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
					4	Prevalensi Hiv dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan			
				6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2 Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3 Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarkes strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	80%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				8	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1 Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	88%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1 Cakupan pengawasan obat dan makanan	72%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				10	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1 Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1 Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	98%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1 Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2 Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
2.3	Meningkatnya kontribusi sektor ndemic usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,65%	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1 prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM	5%	Wajib Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	program peningkatan kemampuan teknologi industri	1 Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,14%	Pilihan – perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1	Prosentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	5%	Pilihan – perdaganganan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1	Prosentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						Koperasi UKM						
				1	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	1	Prosentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	4%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						Koperasi UKM						
				1	Program pengelolaan pasar	1	persentase pasar tradisional yang dikelola	80%	Pilihan – perdaganganan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase penurunan kejadian pandemik di lingkungan pasar	23%	Pilihan – perdaganganan	PD Urusan Perdagangan		
						3	Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	Pilihan – perdaganganan	PD Urusan Perdagangan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						4 Cakupan Pedagang Pasar yang dibina	12%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
				1	Program pembinaan PKL dan asongan	1 Cakupan PKL yang dibina	12%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2 Jumlah shelter PKL yang dikelola	15	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
2.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	40%%	1	Program wajar dik das 9 tahun	1 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	30%	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1 Persentase Sarana Prasarana Kesehatan memenuhi universal design	30%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	40%	1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana Prasarana Perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang yang memenuhi universal design	60%	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
2.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	75,8	1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	40%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Persentase Sumber Daya Alam yang terkonservasi	67,7%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
		Indeks Pencemaran Udara	77,7	1 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	1 Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Indeks Tutupan Vegetasi	49,05	1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1 Jumlah Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
		Volume sampah yang dibuang ke TPSA	153,7							Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	5,3	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	90%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Persentase rumah sehat	84,8%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	Luas lahan pertanian organik	1,03	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	58,50%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				1	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1	Jumlah pelaku usaha peternakan ndemic:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Peternak ayam buras/ ayam broiler	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							b. Peternak kelinci	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							c. Peternak kambing/domba	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							d. Rasio peternak terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				2	Program pengembangan system penyuluhan perikanan	1	Luas lahan perikanan organik	0,4	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
2.6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau		1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1	Luas RTH Kota	18%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Privat	10%									
		b. Publik	18,44%									
2.7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	12,08%	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Cakupan masyarakat paham mitigasi bencana	75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	17,64%			2	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	42,5%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
						3	cakupan peningkatan penanggulangan bencana	75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						4	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	17,64%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						1	Cakupan penanganan korban bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas	
				1	Program penataan peraturan perundangan	1	Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
				2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan
						2	Persentase tingkat waktu tanggap response	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman	
2.8	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	1	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PD Urusan PU dan Tata Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan
						2	Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3 Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						4 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						5 Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	8%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						6 Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	35%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2	Program Pemanfaatan Ruang	1 Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3	Program pengembangan wilayah perbatasan	1	Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat												
3.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam Kondisi baik	84%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1742 m	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	94%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	92%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,65%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1 Rasio ketercukupan PJU	67%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sektor Unggulan	Kesenjangan Wilayah
				1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1 prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
					2 jumlah shipon yang dibangun	7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1 Program pembangunan jalan dan jembatan	1 Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,65%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				2 Program rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	1 prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1 Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1 Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program pengaturan jasa konstruksi	2	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				3	Program pengawasan jasa konstruksi	1	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	76%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						1	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3,manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Persentase penyediaan perumahan bai masyarakat	11%	1	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
		Tercapainya 100 – 0 - 100		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	100%							
		b. Rasio Luas kawasan kumuh	0 Ha	1 Program Pengelolaan Area Pemakaman	1 Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	22,6%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
		c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	0%	1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 Prosentase penduduk berakses air minum	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Prosentase RTLH	1,70%							
				1 Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1 Rasio Luas kawasan kumuh	0 ha	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2 Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	10	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
3.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,75	1	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum	8,5	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2 Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS)	75%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				1	Program peningkatan pelayanan angkutan	1 jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2 Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				2	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	2	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						3	Rasio prasarana parker dengan kondisi baik	78%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						4	Tingkat pelayanan parker di tepi jalan umum	93	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						5	Rasio prasarana dengan kondisi baik	78%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						6	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	19	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				3	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasara dan fasilitas LLAJ	1	Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				4	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8036	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.4	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan investasi		1 Program penataan peraturan perundang-undangan	1 Jumlah review PERDA/ PERWAL	1	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
		a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	10%		2 Jumlah RAPERDA/ RAPERWAL baru tentang investasi	0	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Hukum		
		b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1 Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	10%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
					2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15,00%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
					3 Jumlah investor baru	172	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Implementasi pemanfaatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	80%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1 Jumlah wirausaha baru	100 UMKM	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
					2 Prosentase peningkatan kualitas pelaku usaha KUM	3%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		
				1 Program pengembangan ndemic kecil dan menengah	1 Peningkatan daya saing IKM Formal	3,2%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				2 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Persentase koperasi aktif	93,6%	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
					2 Persentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	30%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 program pengembangan sentra-sentra ndemic potensial	1 Jumlah sentra industri	13	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1 Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI dll)	4,20%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 Jumlah ekspor produk LN	US\$1.150.000	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1 program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1 Jumlah alat UTTP yang ditera	2.900	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1 Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	23,53%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1 Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	6%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1 Rasio petani terlatih	90%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1 Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	1 Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	3,03%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	50%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan		
				2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1 Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					2 Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	4	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	6	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
3.5	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	80%	1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	17%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
					2 Presentase krenova OPD yang berkualitas	8%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
					3 Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	40%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
		Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	30%	2 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				3 Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah			Penunjang Sekretariat	PD Penunjang Setda Bagian Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				4 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				7	Program pembinaan PKL dan asongan		Cakupan PKL yang dibina	12%			Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
			12.933				Jumlah shelter PKL yang dikelola	15				
3.6	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaa n pangan utama beras (ton)		1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	Pangan	PD Urusan Pangan	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	Pangan	PD Urusan Pangan		
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,60	Pangan	PD Urusan Pangan		
						3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	Pangan	PD Urusan Pangan		
				2	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Produksi tanaman pangan:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Padi	3160	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							b. Jagung	11				
							c. Ubi kayu	13,5				

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 Program peningkatan produksi hasil peternakan	1 Produksi hasil peternakan:		Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
					a. Daging Ruminansia	1.289.554				
					b. Daging Unggas	5.610.449				
					c. Telur	460.000				
					d. Susu	201.400				
				3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1 Persentase hewan sehat	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Produksi hasil perikanan:		Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
					a. Ikan	164,2	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
3.7	Meningkatnya lapangan kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%	1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Persentase pencari Kerja ditempatkan	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
					2 Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
					3 Pertumbuhan wirausaha baru	7%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						4	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
						5	Persentase Tenaga Kerja tersertifikasi BNSP	65%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
				2	Program Perlindungan pengembangan ketenagakerjaan	1	Cakupan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial	70%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang bisa terselesaikan melalui perjanjian bersama	50%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
				1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Penanggulangan Kemiskinan
				2	Program Transmigrasi Regional	1	Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.8	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	17%	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	13%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	30%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	35%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	80%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	40%	Sosial	PD Urusan Sosial		
				4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	67%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Ekonomi	Penanggulang an Kemiskinan
				3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan	5	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							sosial				Pemilu	
				4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
3.9	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	1	Program Keluarga Berencana	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Persentase perempuan di bawah 19 tahun yang menjadi ibu dan atau melahirkan anak pertama	2%	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				3	Program pelayanan kontrasepsi	1	Cakupan peserta KB aktif	79%	Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	68%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulang an Kemiskinan
				6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%	5%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					yang ber-KB (87%)					
					5 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					6 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					7 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					8 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						100% setiap tahun				
					9	Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	12%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					10	Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	62%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					11	Prosentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	10%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					12	Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					13	Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga	90%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					Balita (BKB)					
					14 Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	97%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					15 Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					16 Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					17 Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					18	Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					19	Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					20	Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					21	Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					22	Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.10	Menurunnya kesenjangan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	23%	1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	23%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	26%			2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	26%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
		Rasio KDRT	0,050%			3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	79%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
				2	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1	Rasio KDRT	0,04%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					2 Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					3 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					5 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
					7 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang												
4.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkandan situs cagar budaya yang dilestarikan	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15%	1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	227	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
		Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	15	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,77%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2	Jumlah festival seni dan budaya.	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		Penguatan daya saing ekonomi daerah
				3	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Jumlah gedung kesenian	1	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2	Sarana penyelenggaraan seni	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						dan budaya					
						3 Cakupan kajian seni 50%	77%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						4 Cakupan fasilitas seni 30%	39%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						5 Cakupan gelar seni 75%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						6 Misi kesenian 100%	43%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						7 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	79%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						8 Cakupan tempat 100%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						9 Cakupan organisasi 34%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1 Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2 Jumlah pengunjung museum	5350	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						3 Jumlah koleksi museum	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
4.2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	Jumlah Wisatawan		1	Program pengembangan destinasi pariwisata	1 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1139961	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Nusantara	1.139.961			2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5201	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
		b. Mancanegara	5.201			3	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	5	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 hari	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase TIC yang representatif	100%	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				2	Program pengembangan kemitraan	1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	11	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
	Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani											
5.1	Terbentuknya karakter ndemici masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	1	Program penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Antar Umat Beragama	1	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial	4	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
			2	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	jumlah kegiatan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra			

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah		Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
					a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan				
					b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 Jumlah Kebijakan / peraturan tentang pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	1	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ndemic Tahun	1 Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					di semua tingkatan					
					2 Adanya kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1 Program Peningkatan Mutu pendidikan dasar Sembilan tahun	1 Prosestase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	50%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Prosentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang menerapkan kegiatan Bina Suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program pendidikan Non Formal	1 Penurunan jumlah pelaku kenakalan dan tindak kriminalitas pelajar	25%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Jumlah Pelajar berprestasi	48	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	2 Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	8	Pemuda dan Olahraga	PD Urusan Pemuda dan Olahraga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Prosentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	90%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2 Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1 Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	50%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	1 Cakupan kelompok Sadar Ketahan Keluarga	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD UrusanPembudayaan Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan bina suasana dan kegiatan – kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing – masing di tiap SKPD	50%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1 Prosentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
5.2	Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	12,14%							
		Prosentase penurunan kasus narkoba	3%							

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka kriminalitas yang tertangani	12%									
		Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%									
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Keberadaan kebijakan yang mengatur control informasi media massa	0	Kominfo	PD Urusan Kominfo dan PD Urusan Trantibum Linmas (Kesbangpolin mas dan Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham – paham yang tidak sesuai dengan nilai ndemici dan nilai – nilai luhur Pancasila	0	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1	Perda yang mengatur Kontrol Tempat Hiburan	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Pariwisata	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					Perda yang mengatur Pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-				
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Keberadaan Perda yang mengatur pelarangan peredaran narkoba	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Perdagangan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	1 Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	Komunikasi dan Informasi	PD Urusan Komunikasi dan Informasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	74,8%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
					1 Rasio jumlah siskamling aktif	0,91	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	95%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
					2 Cakupan ndemi petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	3 kali sehari	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
					3 Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95,5%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
					4 Jumlah Satpol PP	NA	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1 Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Prosentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1	Prosentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	9%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
				1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	42,59%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1	Prosentase penanganan penyakit masyarakat	92%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Kesbangpolinmas, Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	77,27	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
						2	Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	15	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3	Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	17,12%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		
						4	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	13,33%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Satpol PP)		
				1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	Cakupan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terlatih dalam deteksi dini	56,25%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan bagian Kesra)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Tingkat partisipasi politik	79%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2 Frekuensi Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas dan Bagian Kesra)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Frekuensi dialog yang dipublikasikan	10	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Persentase ormas yang difasilitasi	8,66%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolin mas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
5.3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3	1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	10%	Sosial	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Bagian Kesra)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		Tata Kelola Pemerintahan
		Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat	0	1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama)	1 Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		keagamaan (religious centre)		1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD	20%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ndemic Tahun	1 Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%	Sosial	PD Urusan Pendidikan dan PD Urusan Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi post MDGs menuju Sustainable Development Goals (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Tujuan memberantas kemiskinan didekati antara lain melalui : a) Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, b) peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, c) pemberian akses permodalan, d) perluasan akses pasar/promosi, e) peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan ketahanan pangan, b) Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming, serta c) peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.

3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, c) peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, d) Pelayanan kesehatan masyarakat; e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; f) penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

4. Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program yang dilakukan antara lain : a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), b) pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, c) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, d) perbaikan manajemen pendidikan, serta e) Peningkatan minat baca masyarakat

5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan

Pendekatan program yang dilakukan melalui pendekatan: a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

6. Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.

Hal ini dapat dilakukan melalui : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), c) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan d) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

7. Tujuan 7: Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: a) perkuatan sistem inovasi daerah, b) fasilitasi riset unggulan daerah terkait energi alternatif dan terbarukan.

8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.

Program peningkatan kesempatan kerja; b) Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja, c) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi, d) Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi, e) Pengembangan Destinasi Wisata, f) Pengembangan Pemasaran Wisata, g) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, h) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara : a) Program pembangunan jalan dan jembatan, b) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, c) program pembangunan infrastruktur pedesaan, d) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan dan ke sembilan akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.

11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya: a) Program Pengembangan Perumahan, b) Program Lingkungan sehat perumahan, c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan

12. Tujuan 12: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

13. Tujuan 13: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

14. Tujuan 14: Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui : a) program Pengembangan budidaya perikanan, b) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

15. Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

Dapat dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, b) Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program konservasi sumber daya alam.

16. Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten;

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), diantaranya:

- a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
- b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomangung), meliputi blok peruntukan ruang di Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.
- c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan mix use (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
- d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
- e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
- f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
- g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

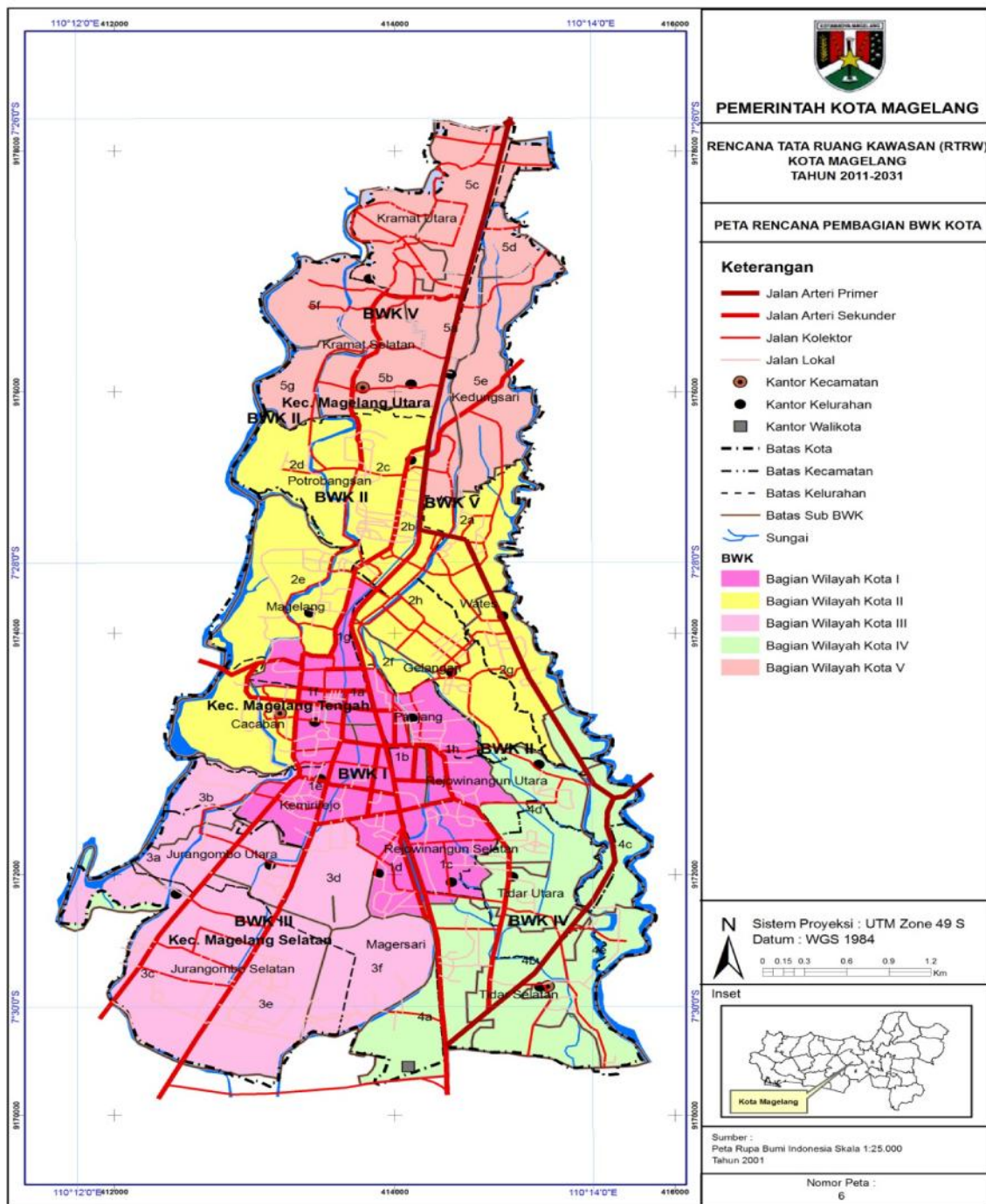
4.3.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pertimbangan dalam Penetapan BWK di Kota Magelang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana

dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.

- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK.
- c. Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .
- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f. Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.



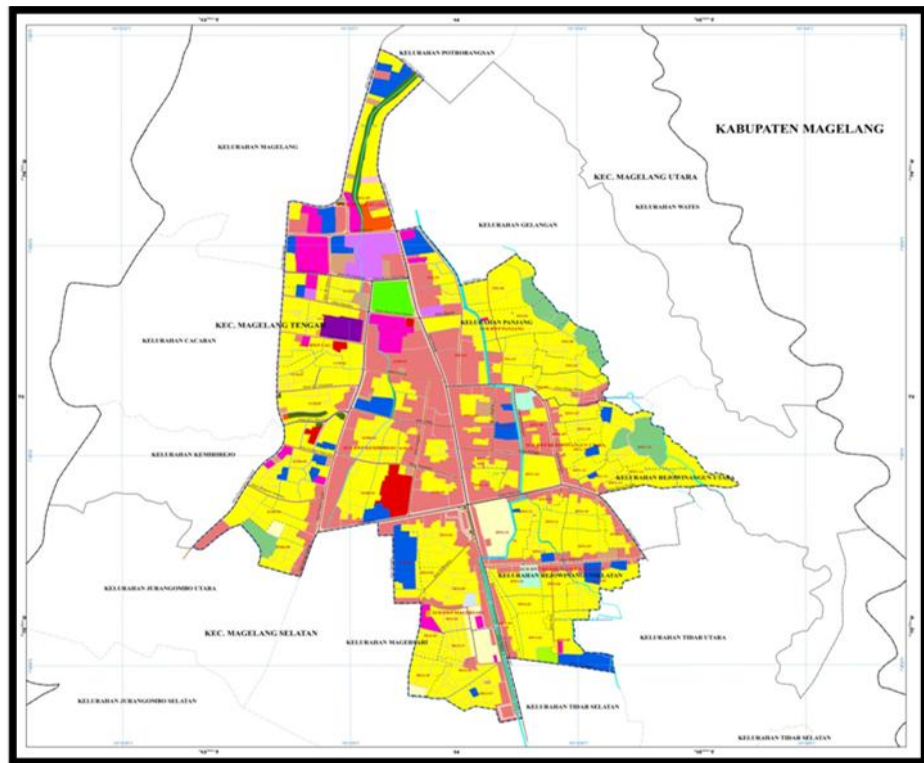
Gambar 4-3
Peta Rencana Pembagian BWK

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Dengan luas kurang lebih 255 Ha, BWK I memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan

Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar 4-4

Peta Pola Ruang BWK I

Sedangkan Arahan Pengembangan BWK I adalah sebagai berikut:

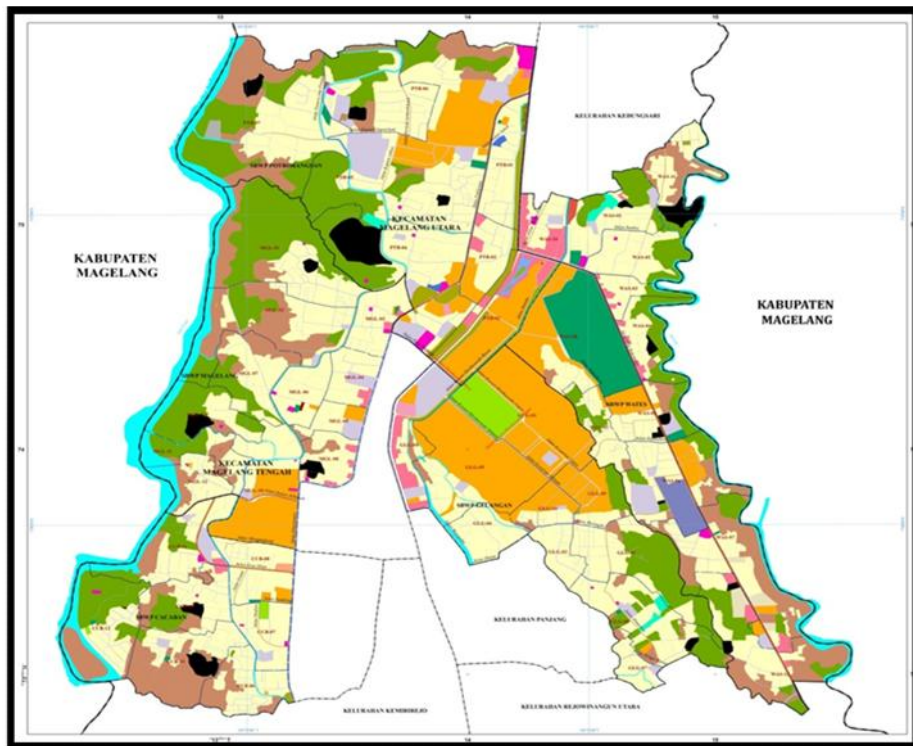
- mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau

Di BWK I ada beberapa Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

1. Kawasan Alun Alun dan sekitarnya. sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. penataan RTH Taman Kota;
 - b. penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
 - c. penataan jaringan pergerakan di seluruh kawasan dan sekitarnya;
 - d. penataan lalu lintas;
 - e. penataan papan reklame pada zona perdagangan.
2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dengan skala pelayanan daerah dan regional. Rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. pembangunan selter Pedagang Kaki Lima;
 - b. pembangunan terminal tipe c;
 - c. pengembangan pasar Sidomukti;
 - d. Penataan RTH kawasan.

4.3.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

Dengan luas kurang lebih 370 Ha, BWK II berfungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsari; sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 4-5
Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II :

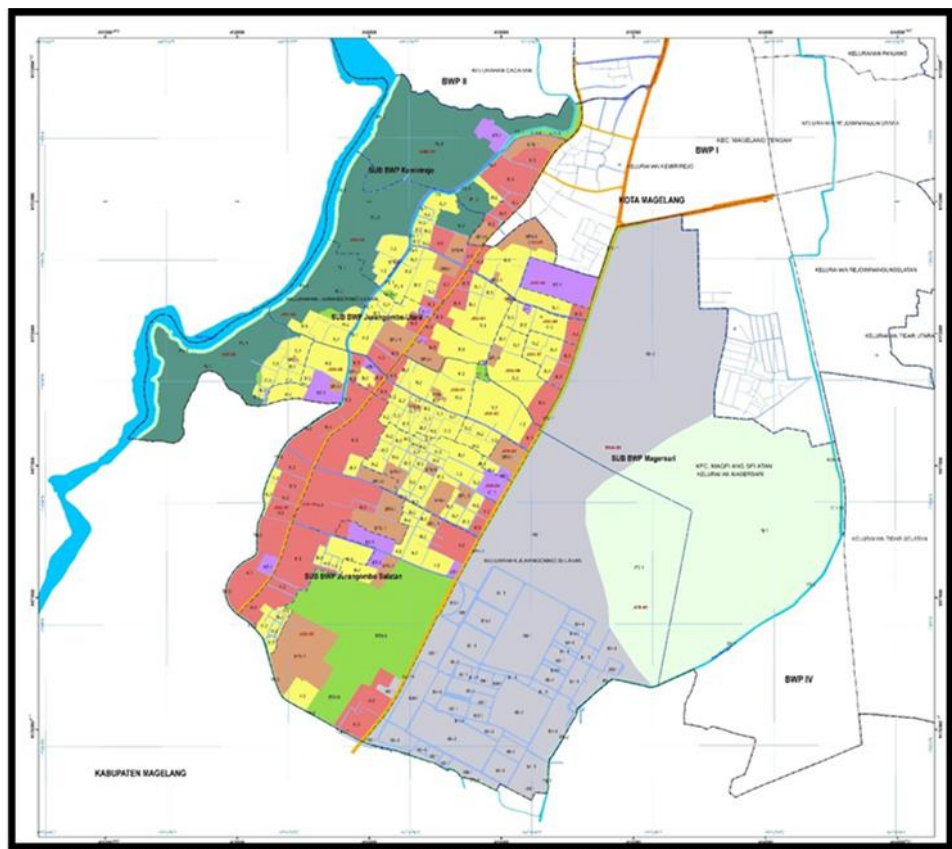
- a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu: Kawasan Mantiyasih. Yang berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Penataan kawasan Mantiyasih;
- b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;
- c. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.3.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar 4-6

Peta Pola Ruang BWK III

Arahan Pengembangan BWK III :

- d. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkatan darat
- e. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- f. mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota;
- g. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;

- h. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- i. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- j. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- k. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

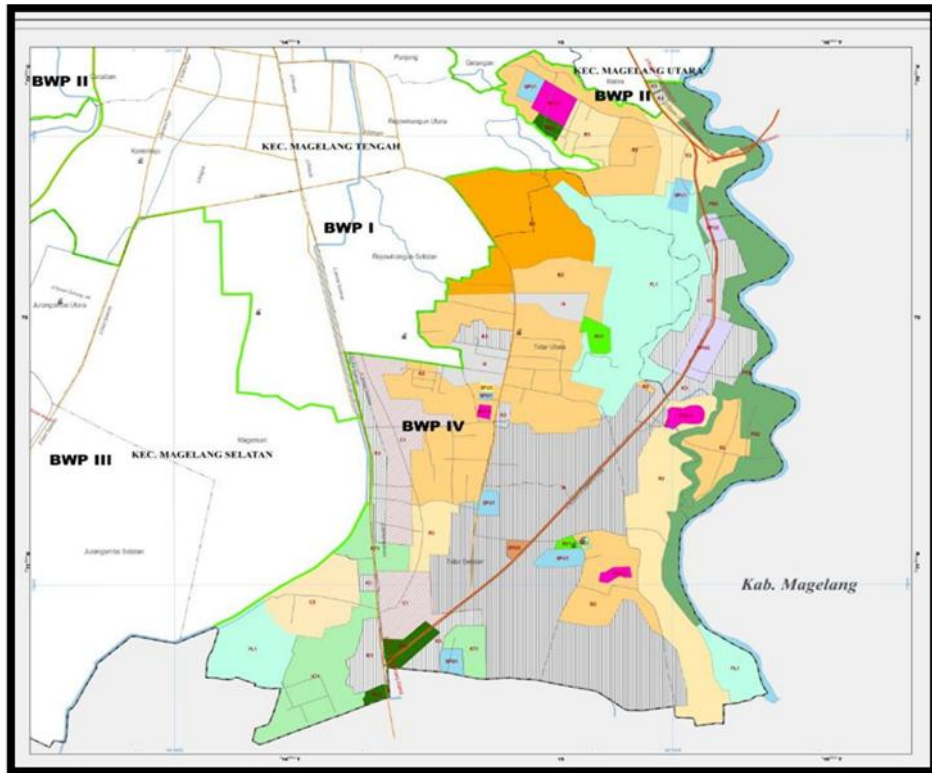
Di BWK III ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar, Fungsi kawasan adalah sebagai kawasan plasma nutfah Daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

- a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
- b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
- c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
- d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
- e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

4.3.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Wates, dan seluruh Kelurahan Tidar Utara dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Cangkuk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 4-7

Peta Pola Ruang BWK IV

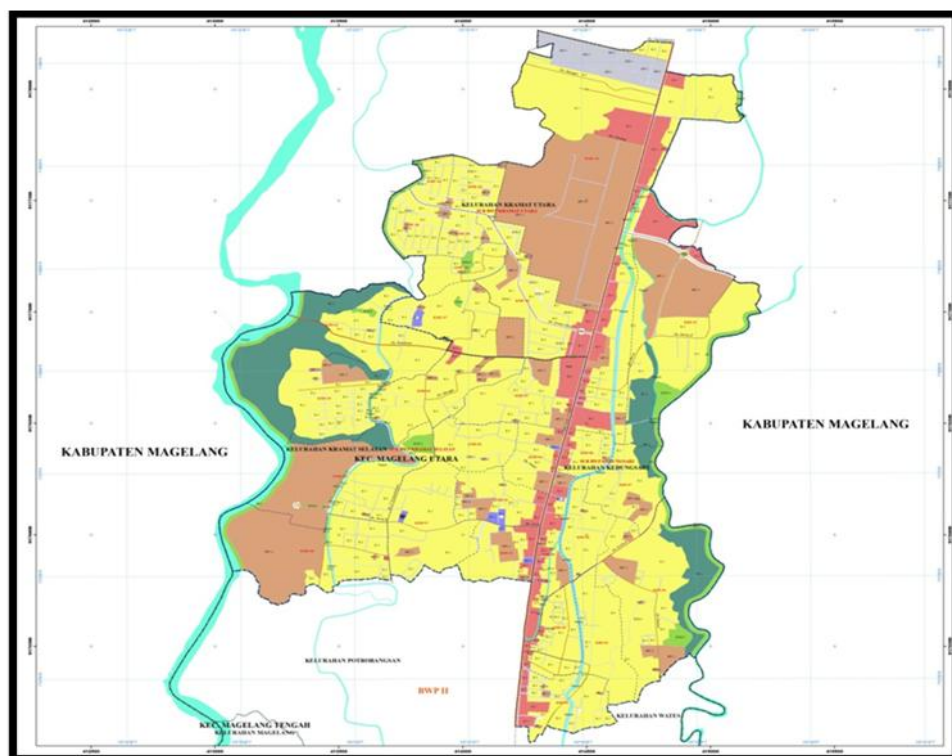
Arahan Pengembangan BWK IV :

- a. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;
- b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
- e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai sub pusat pelayanan kota;
- g. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- h. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- i. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan

- j. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

- Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
- Pembangunan fasilitas pergudangan;
- Penataan RTH kawasan;

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V:

- a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan strategis Gor Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencana pengembangan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
- b. revitalisasi Gor Samapta dan sekitarnya;
- c. penataan RTH Kawasan.

4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja OPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota Magelang, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 3 daerah pemilihan yang meliputi 3 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkul banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Magelang lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2019, KUA PPAS dan APBD tahun 2019.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah daerah, pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD Kota Magelang untuk RKPD tahun 2019 dirangkum sebagaimana tabel berikut:

Urusan/OPD	Jumlah
Penataan Ruang dan pekerjaan umum	192
Koperasi dan UMKM	30
Kesehatan	21
Lingkungan Hidup	20
Pendidikan	18
Perumahan rakyat dan pemukiman	11

Pemuda dan olahraga	10
Perhubungan	9
Pertanian	9
Tenaga Kerja	8
Kebudayaan	5
Ketentraman dan ketertiban	5
Perencanaan pembangunan	5
Perdagangan	4
Perumahan rakyat	4
Rutin	3
Kesra	2
Pariwisata	2
Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
Pedagangan	1
Perikanan dan kelautan	1
Jumlah	362

4.6 Inovasi Pembangunan

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam

Pembangunan daerah yang dimanifestasikan melalui tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus mampu mempercepat tujuan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan dalam cakupan yang lebih universal. Dalam era modern dewasa ini, dimana permasalahan dan tuntutan masyarakat semakin kompleks, maka harus diupayakan pendekatan out of the box dan bersifat terobosan tanpa meninggalkan regulasi yang ada. Sebagai organisasi pembelajar (learning organization) dan organisasi yang bertumpu pada pengembangan (improvement driven organization) Pemerintah Kota Magelang melakukan inovasi baik secara proses perencanaan maupun pada tataran program/kebijakan.

4.6.1 Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Beberapa inovasi pada proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13

Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Inovasi	Later belakang Inovasi	Nilai Tambah/Dampak positif yang diharapkan	Ilustrasi Inovasi
1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Carut Marut penyusunan Renja dan Renstra	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya	
2	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (track back) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat	
3	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,	
4	Sistem Informasi Geografis (Tata Ruang, Perumahan, Jalan dan Jembatan)	Perlunya aksesibilitas terhadap kondisi geospasial dan infrastruktur di Kota Magelang	Memberikan aspek kontrol dan evaluasi atas kondisi secara geospasial	
5	Pemanfaatan Media Sosial (WhatsApps) dalam Koordinasi Penyusunan RKPD		Akselerasi proses penyusunan dan keterbukaan diskusi atas penyusunan RKPD	

6	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanaan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD	
7	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD	
8	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang	
9	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, sehingga menghasilkan planning scrap pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang	
10	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanaan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA	
11	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalah dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.	

	dikembangkan sebagai dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)			
12	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas solusi isu strategis dan permasalahan pembangunan	
13	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas	
14	E-scoring	Kesulitan prioritasi usulan kegiatan	Mampu melakukan scoring dan pembobotan usulan secara online	
15	Integrasi eplanning dan ebudgetting	Double inputting dan kesulitan traceability, pengendalian dan evaluasi usulan pada level perencanaan dan penganggaran	Peningkatan konsistensi, traceability dan monitoring dan evaluasi setiap tahap pada perencanaan penganggaran	

4.6.2 Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan

Beberapa inovasi pada proses perencanaan pembangunan Kota Magelang Tahun 2019 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.18

Inovas Program/Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

No	Inovasi	Latar Belakang/Dampak positif Inovasi	Nilai Tambah Inovasi
1	Implementasi Blueprint Universal Design	Masih belum maksimalnya kehadiran pemerintah bagi kaum difabel terutama untuk aksesibilitas pada infrastruktur dan fasilitas publik	Peningkatan aksesibilitas terdapat fasilitas Kota termasuk bagi para kaum difabel
2	Implementasi Masterplan Smartcity	Kota Magelang masih dalam posisi scattered untuk kategori capaian indeks smart city dalam Garuda Smart City Model	Akselerasi pencapaian target indeks smart city Kota Magelang
3	Penguatan Implementasi Masterplan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Masih perlunya penguatan dalam kiprah kota Magelang dalam kancah MEA	Makin kuatnya kontribusi Kota Magelang dalam strategi ofensif dan defensif menghadapi MEA
4	Penguatan Implementasi Magelang sebagai Kota Layak Anak	Perlunya kesinambungan dalam positioning kota sebagai Kota Layak Anak	Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak
5	Integrasi Jamkesda ke BPJS	Kejelasan status Jamkesda di kaitkan dengan Undang Undang tentang BPJS	Makin ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
6	Manajemen Persampahan : Kampung Organik dan Bank Sampah	Umur hidup TPA Banyuurip yang sudah habis; Kapasitas tempat sampah yang semakin kurang tidak sebanding dengan meningkatnya sampah	Pengurangan sampah dari sumbernya serta peningkatan pendapatan masyarakat dari pengolahan sampah
7	Penguatan dan Penataan PKL	Perlunya mempertahankan kondusivitas, ketertiban dan	Ketertiban, keindahan sekaligus kesejahteraan

		keindahan dengan tetap mengakomodir para PKL	masyarakat meningkat
8	Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Perlunya akselerasi pencapaian indikator MKSB	Percepatan pencapaian indikator MKSB
9	Pendidikan Gratis	Masih perlunya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan yang murah dan tetap berkualitas	No one left behind dalam menikmati pendidikan dasar di Kota Magelang

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 memuat program-program prioritas sebagaimana tema yang diusung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh OPD. Program ini secara langsung dalam bentuk outcome mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program-program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing-masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5-1
Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Inter5ensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3	Prioritas III	merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun ketiga adalah Produktif Bersama Mitra.

Program yang sesuai dengan Tema ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5-2
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan	Persentase seleksi terbuka untuk	

	pemerintah	Pengembangan Aparatur	jabatan struktural	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	BPKAD
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibiina dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	
			Interoperabilitas antar system informasi	
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	DPU-PR

		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Bappeda
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	
			Cakupan penanganan korban bencana	
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonser5asi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Kemitraan			

pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan			

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pada setiap level Musrenbang.

Tabel 5.3
Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2019

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertamanan dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satpol PP
2	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenaga listrik	Rasio ketercukupan PJU	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Infrastruktur pedesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	DPU PR
4	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Persentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
6	Perlindungan dan konservasi SDA	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengendalian pencemaran	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang	Dinas Lingkungan Hidup

	dan merusak lingkungan hidup	ditaati	
10	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Peningkatan kesejahteraan petani/ peternak	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pengembangan budidaya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	1. Padi 2. Jagung 3. Ubi kayu	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Pengembangan budi daya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Pengelolaan keragaman budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Pembinaan dan pemasarakatan olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
19	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
20	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	Dinas Perindustrian dan perdagangan

21	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	Dinas Perindustrian dan perdagangan
22	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	Dinas Perindustrian dan perdagangan
23	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	Dinas Perindustrian dan perdagangan
24	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
25	Program peningkatan kapasitas iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	Dinas Perindustrian dan perdagangan
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja
27	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
28	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
29	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun	DPU-PR
32	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	DPU-PR
33	Program lingkungan sehat perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
34	Program pembangunan turap/talud/bronjong		DPU-PR
35	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
36	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
37	Program upaya kesehatan masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan

38	Program perbaikan gizi masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
39	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
40	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
41	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		Dinas Kesehatan
42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan
43	Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	
44	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

48	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
49	Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB Mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satpol PP
51	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satpol PP

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama stakeholders, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 beberapa FGD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-4

Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penanggulangan Kemiskinan	Membahas langkah langkah yang bersifat perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di bawah angka saat ini 9,05 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan

		layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persampahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi Smart City	Upaya meningkatkan eksekusi atas Smart city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke level berikutnya
6	Program 100-0-00	Bagaimana upaya agar target 100-0-100 pada tahun 2019 dapat tercapai
7	Memperkuat implementasi Kemitraan	Pola kemitraan dan skenario yang sudah disusun untuk dapat dioptimalkan
8	Percepatan Pencapaian Indikator Makro Daerah	Cukup strategis untuk pengendalian pencapaian indikator makro daerah
9	Sustainable Development Goals.	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program yang diprioritaskan berdasarkan tema FGD yang akan dilaksanakan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan indikasi program :

Tabel 5-5
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial

	sosial lainnya)		
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate =	Dinas Kesehatan

		CDR) TB 6. Prevalensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat Persentase kawasan strategis yang terbangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
21	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	Dinas Pendidikan

		4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organik 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	SEKDA
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
41	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.2 Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak, tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik maupun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-6
Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten 4. Presentase perpustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Keluruhan UCI (Uni5ersal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satuan Polisi Pamong praja
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Satuan Polisi Pamong praja

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		5. Cakupan penanganan korban bencana	
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HI5/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Badan Kesbangpolinmas
31	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPRO5 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase lapangan olahraga yang dire5italisasi 2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.3 Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuwir yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah dan seluruh elemen mencari inisiasi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada sejak tahun 2019 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD Manajemen Persampahan dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan inisiasi dari berbagai pihak. Selain strategi 3 R (Reduce, reuse dan recycle) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana manajemen persampahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Sejak tahun 2019 hingga ke depan seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 5-7
Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya 50% Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 50% Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang	Dinas Lingkungan

	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	ditaati	Hidup
3	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola	Dinas Perindag

5.1.1.3.4 Penguatan Implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan “Kota Sejuta Bunga” sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna Kota Sejuta Bunga sebagai identitas atau branding Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2019, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga , dengan program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel 5-8
Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Dinas Perhubungan
3	Program	1. Berkurangnya 5olume Sampah dari	Dinas Lingkungan Hidup

	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 50 volume Sampah dari sumbernya	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Kota	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Pertanian dan Pangan
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja

		7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP 2. Rasio petani terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representatif 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100% 7. Cakupan organisasi 34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.1.1.3.5 Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang , hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5-9
Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Dinas Tenaga Kerja
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional - Propinsi - Nasional - Persentase SD/MI berakreditasi minimal B - Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B - Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs - Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 - Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik - Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 - Persentase Guru SD bersertifikat pendidik - Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 - Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik - Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi - Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	- Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan - Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah re5iew PERDA/PERWAL - Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi - Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik - Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah - Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar - Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik - Penurunan kasus temuan LKPD - Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan	Semua Perangkat Daerah

		tepat waktu - Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah - Nilai survei kepuasan penggunaan layanan PD - Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Jumlah pengunjung museum - Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: - Radio - Media cetak - Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin - Jumlah KIM - Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. - Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa - Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Lama Kunjungan Wisatawan - Persentase TIC yang representatif - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	- Implementasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Industri Daerah) - Implementasi pemanfaatan SPIPISE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik - Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata - Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik - Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum - Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	Dinas Perhubungan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: - Radio - Media cetak	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku 2. Persentase arsip dan risalah 3. Persentase Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.1.1.3.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut :

Tabel 5-10
Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Kesehatan Promosi dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun Dasar	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
8	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organik 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

		4. perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 9. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
25	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

Dan program program yang mendukung dan mengarah pada FGD FGD pada tema yang lain, akan tersaji pada Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telaahan baik oleh Bappeda maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

Tabel 5.11
Hasil Akomodasi Pokok Pikiran DPRD Kota Magelang Tahun 2019

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
1	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya	Kebondalem I RT 9/1	Kebudayaan	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang pendidikan	Rp 405.000.000	
2	Pengadaan sarana dan prasarana kesenian rebana	RT 01 RW 07 KRAMAT SELATAN	Kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
3	Pembuatan sanggar seni	MATESEH KEL. MAGELANG	Kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
4	Pengadaan alat kesenian keroncong	Jl. Veteran No 4 Magelang	kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
5	Pengadaan alat kesenian rebana	RW 9 Kwayuhan Kelurahan Gelangan	kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
6	Pembuatan jamban	Kliwonan	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan

7	Pembuatan kartu Jamkesda	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp 7.274.819.200	
8	Pembuatan kartu Jamkesda	Gelangan RT 2 RW 8	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp 7.274.819.200	
9	Perbaikan sarana prasarana sanitasi rusunawa Protrobangsari	Tulung	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
10	Pembuatan septic tank	Ibu Yuni Rt 06 Rw 04 Kelurahan Kemirirejo	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
11	Fogging DBD	RW 08 KEDUNGSARI	Kesehatan	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Rp 240.570.550	
12	Perbaikan dan pemeliharaan WC Umum	RW 04 POTROBANGSAN	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
13	Pengadaan kursi tunggu pasien di Poli RSUD	RW 04 POTROBANGSAN	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
14	Pembuatan WC Umum	PERUM DEPKES	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
15	Pengadaan tenaga perawat untuk kegiatan lansia	RT 02 RW 06 CACABAN	Kesehatan			Kegiatan didukung tenaga kesehatan dari Puskesmas

16	Pengadaan PMT lansia dan balita	LURAH CACABAN	Kesehatan	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya (PMT untuk balita gizi buruk dan gizi kurang)	Rp	181.697.350	
17	Pengadaan penimbangan balita posyandu	JAGOAN RT 03 RW 06 JURANGOMBO UTARA	Kesehatan	Penyuluhan kesehatan lansia (Pemberian dalam bentuk multivitamin)	Rp	186.653.450	
18	Pengadaan PMT Balita	KEL. MAGELANG	Kesehatan	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Rp	75.510.250	
19	Fogging	Rt 05 Rw 07 Kedungsari	kesehatan	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya (PMT untuk balita gizi buruk dan gizi kurang)	Rp	181.697.350	
20	Pembuatan kartu jamkesda	Rt 02 Rw 06 Kedungsari	kesehatan	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Rp	240.570.550	
21	Fasilitasi bantuan kesehatan dasar	Rt 02 Rw 06 Kedungsari	kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp	7.274.819.200	
22	Pembuatan kartu jamkesda		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
23	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses kesehatan dasar dasar		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp	7.274.819.200	

24	Pengembangan Rumah Sakit Tipe D Pendidikan		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 7.274.819.200	
25	Pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Puskesmas Magelang Selatan	Kesehatan	Pengadaan tanah untuk rumah sakit	Rp 20.000.000.000	
26	Pengembangan SPGT/PSC		Kesehatan			- Kekurangan pada lahan - Akan dibangun RS Tipe C - Jumlah RS di Kota Magelang cukup banyak dan aksesnya mudah
27	Anggaran Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah		Kesra	Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Rp 579.033.440	
28	Anggaran Perayaan Natal Korpri-TNI-Polri – Gereja Kota Magelang		Kesra	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	46,220,000	
29	Pemberantasan Miras	Botton I RT 5 RW V Magelang	Ketentraman dan ketertiban	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	136.733.000	
				Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	230.452.000	

30	Pelatihan kepemudaan	RW 02KEDUNGSARI	Ketentraman dan ketertiban	Diakomodir Disporapar		
31	Bantuan pada korban bencana	RW 04 CACABAN	Ketentraman dan ketertiban	Dipertimbangkan OPD		
32	Pembinaan wawasan kebangsaan pelajar SMK		Ketentraman dan ketertiban	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	33.438.000	
				Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	45.053.000	
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	32.894.000	
33	Operasi Pekat	Seluruh Kota Magelang	Ketentraman dan ketertiban	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		
34	Bantuan modal bergulir usaha	Jurangombo Utara	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
35	Pelatihan sablon	Ngaglik Utara Jurangombo	Koperasi dan UMKM			Sasaran masyarakat yang diampu Disnaker

36	Bantuan modal bergulir usaha	Ngaglik Jurangombo Selatan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
37	Pelatihan mengemudi	Kiringan	Koperasi dan UMKM			Sasaran masyarakat yang diampu Disnaker
38	Bantuan Modal bergulir budidaya semut ngrangrang	Jembangan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

39	Bantuan modal bergulir usaha dagang	Kedungsari RT1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
40	Bantuan modal bergulir usaha	Perum Depkes A2/25	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
41	Pelatihan wirausaha bagi karang taruna	JL. Ahmad Yani 258 Kedungsari	Koperasi dan UMKM			Diaspora / Disnaker
42	bantuan modal bergulir home industri	Pajangan RT 4/5 Kramat Selatan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

43	Bantuan modal bergulir ternak lele	Kluyon RT 1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
44	Pengadaan sarana dan prasarana usaha menjahit	Perum depkes	Koperasi dan UMKM			Disnaker
45	Bantuan bergulir untuk usaha	Kedungsari RT1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
46	Bantuan modal bergulir usaha	Semplon RT 6 /1 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

47	Bantuan modal bergulir usaha	Kp Tulung RT 2/8 Magelang	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
48	Bantuan modal bergulir usaha	Gg Kantil RT 3 RW 8	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
49	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi remaja	Nambangan RT 4 RW 19 Rejo Utara	Koperasi dan UMKM			Dispera/Disnaker
50	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Nambangan RT 1/18 Rejo Utara	Koperasi dan UMKM			Dispera/Disnaker
51	Pelatihan pembuatan kuliner nusantara	Gg Kantil 3 RT 4 RW 8 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM	Pelatihan pembuatan roti (dana DBHCHT)		
52	Pelatihan pembuatan kuliner nusantara	Gg Kantil 3 RT 4 RW 8 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM	Pelatihan pembuatan roti (dana DBHCHT)		

53	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Jl. Telaga Warna Panjang	Koperasi dan UMKM			Disnaker
54	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Kwayuhan	Koperasi dan UMKM			Disnaker
55	Pelatihan budidaya burung berkicau	Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Dinas Pertanian
56	Pelatihan pembuatan meubel	Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Disnaker
57	Pelatihan	Yohan Rt 04 Rw 04 Kelurahan Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Tidak jelas
58	Bantuan dana bergulir modal usaha	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

59	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEBONPOLO RW 10 WATES	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
60	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEDUNGSARI	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
61	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEDUNGSARI	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

62	Bantuan dana bergulir modal usaha	PELAKU UMKM	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
63	Bantuan Modal Pengrajin Tahu di	Kelurahan Tidar Selatan dan Magersari	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
64	Pembuatan lubang bipori	Sanden RT 2/7	Lingkungan Hidup	Diakomodir tahun 2019	Peningkatan Kepedilian masyarakat	
65	Pengadaan tempat sampah	Rw 09 Sanden Kramat	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
66	Pengadaan tempat sampah	Warga Sanden	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
67	Uji laboratorium kualitas air lingkungan	PERUM DEPKES	Lingkungan Hidup	Diakomodir tahun 2019	kegiatan pemantauan kualitas lingkungan	

68	Pengadaan angkutan sampah	TIDAR DUDAN TIDAR UTARA	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
69	Pengadaan angkutan sampah	TRUNAN RW 09 KEL. TIDAR SELATAN	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
70	Penambahan lahan hijau produktif	Jl. Sumba 313 Wates	Lingkungan Hidup			
71	Pelatihan bank sampah	Rt 07 Rw 07 Kedungsari	Lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan bintek pengelolaan sampah	
72	Penertuban pembuangan sampah di sungai	Rt 02 rw 04 Potrobangsari	Lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan bintek pengelolaan sampah	
73	Pembuatan taman bermain anak pada ruang terbuka hijau		lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan penataan alon-alon	
74	Pengadaan fasilitas persampahan dan kebersihan		lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
75	Pengadaan tempat sampah	RT 4 RW 5 Kramat Utara	lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
76	Pembuatan sumur resapan	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			Lokasi harus masuk fasilitas umum
77	Pengadaan tempat sampah organik dan non organik	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
78	Pengadaan komputer	RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat

79	Motor Sampah		lingkungan hidup			4 buah tiap kelurahan dan harus masuk ke aset Kecamatan/kelurahan
80	Pembuatan sumur resapan	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			Lokasi harus masuk failitas umum
81	Pengadaan tempat sampah	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
82	Pengadaan komposter	RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
83	Penerangan lampu jalan	RW.2 Gelangan	lingkungan hidup	Tiap kelurahan 4 titik		
84	Fasilitasi pengembangan desa wosata	Tidar Campur	Pariwisata			Data hasil verifikasi belum masuk
85	Fasilitasi Pengembangan dan pembangkitan kembali budaya lokal	Magelang Selatan dan sekitarnya	Pariwisata			Data hasil verifikasi belum masuk
86	Monitoring barang bersubsidi		Pedagangan	Diakomodir tahun 2019	Termasuk keg pemantauan barang ilegal	
87	Pelatihan tata kelola pemerintahan aparaturn kelurahan	LURAH CACABAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Bukan kewenangan DP4KB, Masuk ke Tapem

88	Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	LURAH CACABAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Diakomodir tahun 2019		
89	Pengadaan sarana prasarana olahraga sepakbola	3 RW 7 Tidar Krajan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
90	Pengadaan sarana prasarana olahraga sepakbola	Kebondalem I	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
91	Pengadaan sarana prasarana olahraga voli	Ibu Rini Rt 02 Rw 08 Kelurahan Kemirirejo	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
92	Pengadaan sarana prasarana olahraga tenis meja	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
93	Pembuatan lapangan bola voli	Rt 06 Rw 02 Menowo	Pemuda dan Olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
94	Perbaikan lapangan olahraga		Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
95	Pembuatan gedung kesenian	Kota Magelang	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
96	Pengadaan alat-alat olahraga bola voley	RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
97	Rehab Lapangan Bola Volley Gajahmada	Lokasi RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk

98	Gedung Kesenian Kota Magelang	Kota Magelang	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
99	Pengaspalan jalan lingkungan	Ngaglik Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
100	Pengaspalan jalan lingkungan	Tidar krajan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
101	Pengaspalan jalan lingkungan	Tidar Krajan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
102	Pembuatan saluran air lingkungan	Malangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			lokasi belum ditemukan
103	Pembuatan saluran air lingkungan	Ganten	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
104	Pembuatan saluran air lingkungan	Sanggrahan RT4 RW5 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
105	Pemeliharaan saluran air lingkungan	JL. Ahmad Yani 258 Kedungsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewenangan DPUPR

106	Pembuatan jembatan penyebrangan	Kebondalem I	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewenangan DPUPR
107	Pengaspalan jalan lingkungan	Kedungsari RT 7/7	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
108	Pengaspalan jalan lingkungan	Keungsari RT 7/7	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
109	Pelebaran jembatan penghubung dari tuguran ke potrobangsari	Potrobangsari RT9/5	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK		
110	Pengaspalan jalan lingkungan	SAnden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
111	Pembuatan saluran air lingkungan	SAnden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			kontak person tidak dapat dihubungi
112	Pengaspalan jalan lingkungan	Gg Kantil 3 RT 4 RW 08	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
113	Pembuatan talud lingkungan	Meteseh Utara RT 01 RW 13 Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR

114	Pengaspalan jalan lingkungan	Nambangan RT 01/18 Rejo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Tupoksi DPUPR		
115	Pengaspalan jalan lingkungan	Kwayuhan RT 3 RW 8 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
116	Pengaspalan jalan lingkungan	Kwayuhan RT 9 RW 8 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
117	Penataan kebijakan lahah pertanuan tidak dijadikan lahan perumahan	Gelangan RT 2 RW 8	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
118	Pembuatan saluran air lingkungan	Bogeman RT 08/07	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
119	Pembuatan tampungan air (embung) aliran air hujan	Kwayuhan RT 9 RW 8	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Perlu klarifikasi aset untuk lokasi
120	Pembuatan pengaman jalan lingkungan	Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
121	Pembuatan saluran air lingkungan	cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

122	Pembuatan saluran air lingkungan	Rt 03 Rw 07 Dumpoh Kelurahan Keramat	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
123	Pemeliharaan saluran air lingkungan	Rt 04 Rw 08 Armada Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
124	Pengaspalan jalan lingkungan	Rw 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
125	Pengaspalan jalan lingkungan	Ibu Rusniwati Rt 01 rw 11 Malanggaten Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
126	Pengaspalan jalan lingkungan	Selamet Pawujo, Jaranan Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
127	Pembuatan PJU	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
128	Pengaspalan jalan lingkungan	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
129	Pembuatan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		

130	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
131	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
132	Pembuatan PJU	KEBONPOLO RW 10 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
133	Normalisasi sungai lingkungan	KEBONPOLO RW 10 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
134	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
135	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
136	Pembuatan PJU	RW 02KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
137	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 04 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah dikerjakan DPUPR di tahun 2017		

138	Pemeliharaan pintu air	RW 04 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
139	Pengaspalan jalan lingkungan	WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
140	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 01 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
141	Pembuatan PJU	PERUM DEPKES RW 01 BLOK C,	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
142	Pembuatan talud lingkungan	RW 07 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
143	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 11 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
144	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 04 POTROBANGSAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
145	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 02 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2019		

146	Pembuatan PJU	RW 09 KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
147	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 09 KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
148	Pemeliharaan tanggul	RW 03 KEBONDALEM	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Pemeliharaan/rehab jaringan irigasi		
149	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 03 KEBONDALEM	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi yang tepat berada di RW 1, dan belum bisa diusulkan karena posisi saluran-saluran berada di bawah rumah-rumah sehingga diperlukan penataan ulang
150	Pembuatan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan	RW 10 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
151	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RT 02 RW 06 CACABAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR

152	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 03 KEMIRIREJO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
153	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 11 CACABAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
154	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RT 07 RW 07 KELURAHAN KEMIRIREJO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
155	Pembuatan saluran air lingkungan	WENDI KURNIAWAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Usulan tidak jelas
156	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 01 RW 15 KLIWONAN KEL. REJOWINANGUN SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
157	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 03 RW 10 TIDAR SARI KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
158	Pembuatan saluran air lingkungan	MALANGAN RT 04 RW 13 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
159	Pembuatan PJU	RT 02 RW 02 TIDAR SAWE KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH

160	Pengaspalan jalan lingkungan	JAGOAN RT 03 RW 06 JURANGOMBO UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
161	Pemeliharaan saluran air lingkungan	SARYANTO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
162	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KIRINGAN RT 02 RW 03 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2020		
163	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 3 RW 10 KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
164	Pembuatan talud lingkungan	RT 3 RW 10 KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
165	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 01 RW 02 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
166	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 01 RW 02 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
167	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		

168	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
169	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
170	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
171	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
172	Pembuatan talud lingkungan	KEL. MAGELANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
173	Pembuatan PJU	RW 06 SAMBAN KIDUL KEL. PANJANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
174	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 06 SAMBAN KIDUL KEL. PANJANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
175	Pembuatan saluran air lingkungan	MALANGGATEN RT 01 RW 11 KEL. REJOWINANGUN UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

176	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 GELANGAN	KEL. Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
177	Pembangunan jembatan	RW 07 GELANGAN	KEL. Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
178	Perbaikan saluran penampungan air bersih	RW 6 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
179	Pembangunan selokan sepanjang $\pm$ 300 m	Perbatasan Perum Korpri Ngembik Lor RW I	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Pembangunan saluran drainase jalan menuju kelurahan Kramat Utara		
180	Normalisasi dan Pembangunan selokan yang mengalir ke arah Sungai Progo	Ngembik Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Tahun 2018 ada pembangunan shipon		
181	Pembuatan Talud lingkungan	Kampung Pongangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Sudah dikerjakan warga
182	Pembuatan gorong-gorong		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
183	Pembuatan sumur artesis		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

184	Perbaikan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
185	Pembuatan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
186	Pengaspalan jalan lingkungan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
187	Pembuatan resapan air hujan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
188	Perbaikan jalan lingkungan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
189	Pembuatan selokan air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
190	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 1 RW2 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
191	Pembuatan tutup selokan	RT 2 RW 4 Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		

192	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 6 RW 1 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
193	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 1 RW 4 Potrobangsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Sudah dilaksanakan oleh internal PKS
194	Pelebaran jembatan	RT 9 RW 5 Potrobangsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
195	Pembuatan tutup selokan	RT 3 RW 2 Kiringan Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
196	Pembangunan tembok makam	bekas makam Ganten	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
197	Perbaikan selokan	Jalan Sumba Wates RW 1 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
198	Pembuatan talud	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
199	Pembuatan selokan	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

200	Pembuatan jalan lingkungan	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
201	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 3 RW 7 Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
202	Perbaikan jalan lingkungan	RT 02 RW 12 Meteseh Kel. Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
203	Pembuatan saluran air	RT 02 RW 06 Tempelsari Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
204	Pavingisasi halaman SDIT Ihsanul Fikri	SDIT Ihsanul Fikri Sanden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
205	Pengadaan cermin cembung	Barat Masjid RSI Kota Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi Dishub
206	Pembuatan saluran air	RT1 RW02 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
207	Pembuatan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

208	Pembuatan Saluran Tertutup panjang	RT 3 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
209	Pavingisasi jalan	Jl. Arum 2 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
210	Pembuatan talud	RT 02 RW 01 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
211	Betonisasi jalan	RT 01, 05 RW X Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
212	Rehabilitasi Posyandu Dan Paud	RW 03, Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewenangan DPUPR
213	Perbaikan jalan	RT 05 RW 03, perbatasan RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
214	Betonisasi jalan	RT 01 RW 04 Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
215	Pembuatan Saluran Tertutup panjang	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

216	Pembuatan penerangan jalan umum	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
217	Pengaspalan jalan	RT 05 s/d RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
218	Betonisasi jalan	RT 08 RW 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
219	Rehap penutupan Saluran Irigasi	RT 7 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
220	Pembangunan selokan air	RT 04 s/d RT 05 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
221	Pembangunan selokan air	RT 05 RW 11 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
222	Betonisasi jalan	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
223	Rehab MCK	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		

224	Pembangunan selokan air	RT 02, 03 RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
225	Pembangunan selokan air	RT 03, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
226	Pembangunan selokan air	RT 06, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
227	Pembangunan selokan air	Progo 1 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
228	Pembangunan selokan air	Progo 2 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
229	Pembuatan saluran drainase	RT 4 RW 6 Jambon Tempel Sari Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
230	Pembangunan selokan air	RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
231	Renovasi Jalan Paving	RT 1 RW VI Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak

232	Pembuatan tutup selokan	Tidar Warung	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
233	Pembangunan Senderan/ Talud	Panjang 20 meter Tinggi 2,5 meter Lokasi RT 2 RW 2 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
234	Betonisasi jalan	Lebar 2 meter Panjang 25 meter Lokasi RT 2 RW 9 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
235	Pavingsasi	Luas 50 meter ² Lokasi Musholla Nur Hidayah RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
236	Pembuatan Saluran Tertutup	RT 3 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
237	Pavingsasi Jalan	Jl. Arum 2 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
238	Pembuatan talud	RT 02 RW 01 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
239	Rehabilitasi jalan dan saluran	RT 01, 05 RW X Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

240	Rehabilitasi Posyandu Dan Paud	RW 03, Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
241	Perbaikan jalan	RT 05 RW 03, perbatasan RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
242	Rehabilitasi jalan dan saluran	RT 01 RW 04 Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
243	Pembuatan tutup saluran irigasi	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
244	Pengaspalan jalan	RT 05 s/d RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
245	Betonisasi jalan	RT 08 RW 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
246	Pembuatan selokan air	RT 7 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
247	Pembuatan selokan air	RT 04 s/d RT 05 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

248	Pembuatan Drainase	RT 05 RW 11 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
249	Betonosasi Jalan	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
250	Rehabi MCK	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
251	Pembuatan selokan air	RT 02, 03 RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
252	Pembuatan selokan air	RT 03, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
253	Pembuatan selokan air	RT 06, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
254	Pembuatan selokan air	Progo 1 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
255	Pembuatan selokan air	Progo 2 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

256	Pembuatan Drainase	RT 4 RW 6 Jambon Tempel Sari Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
257	Pembuatan Drainase	RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
258	Pembuatan penerangan jalan umum	Sepanjang Sungai Kali Bening (depan KPU Kota Magelang)	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
259			Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
260	Pelebaran jalan	Sepanjang Jalan Kyai Mojo	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
261			Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
262	Pembuatan Drainase	Wates RT 7 RW 1 kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
263	Pembuatan Drainase	Wates RT 7 RW 1 kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak

264	Perbaikan dan Peninggian Pagar Lapangan Candi Nambanga	RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
265	Pembuatan Talud	RT 02 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
266	Pembuatan selokan	Wilayah Karang Kidul dan Tidar Campur	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
267	Pembangunan lahan Parkir		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
268	Pavingisasi Jalan	RT 04,05,06 RW 04 Kel. Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
269	Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 06 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
270	Pengaspalan Jalan	RT 07 RW 06 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
271	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 10 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
272	Pengaspalan Jalan	RT 10 RW 06 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
273	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
274	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
275	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
276	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

277	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 04 RW 07 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
278	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
279	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
280	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 03 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
281	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 10 RW 06 Kel Panjang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
282	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 07 RW 06 Kel Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
283	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 05 RW 07 Kel Rejowinangun Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
284	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 03 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
285	Pembuatan saluran drainase tertutup	RW 4 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan	diusulkan di tahun 2019		

Sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Daerah Magelang, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahunan (IKK) pada akhir tahun.

Indikator kinerja meliputi keluaran, hasil, manfaat. Hal ini menjadi dasar sebagai petunjuk kemajuan.

Indikator terdapat dalam dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan tujuan pelayanan menyangkut pelayanan mengabaikan kebijakan dan RPJP Kota Magelang.

Tabel penetapan Kinerja Penyelenggara berikut :

286	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2020		
287	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
288	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 07 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
289	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 07 Kel Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
290	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 07 Kel Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
291	Pemberian insentif bagi guru sekolah swasta non PNS	Kramat	Pendidikan	Pemberian kesejahteraan pendidik PAUD	Rp 1.023.762.000	
292	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kedungsari RT 7/7	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
293	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 4 RW 8	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
294	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kp Tulung RT 2/8 Magelang	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	

295	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Nambangan RT 1/18 Rejo Utara	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
296	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 4 RW8 Kemirirejo	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
297	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 5 RW 8	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
298	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
299	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kwayuhan RT 3 RW 8 Gelangan	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	

300	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kwayuhan RT 9 RW 8 Gelangan	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
301	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Bogeman Wetan Rt 4/8 Panjang	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
302	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	RT 03 RW 08 SANDEN	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
303	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	KEL. PANJANG	Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
304	Perbaikan PAUD		Pendidikan				
305	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	

306	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
307	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp	206.380.000	
308	Sosialisasi bahaya narkoba	Seluruh Kota Magelang	Pendidikan	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikad dasar (SD dan SMP)	Rp	35.000.000	
309	Pasar murah untuk peningkatan kelancaran distribusi sembako dan ketahanan pangan	Tidar Warung RT 3 RW 6	Perdagangan	Kerjasama dengan BULOG dilaksanakan di pasar-pasar (Operasi Pasar)			
310	Pengadaan/fasilitasi lokasi PKL yang layak	Kebondalem I RT9/1	Perdagangan	Keg Rehab dan pemeliharaan rutin			
311	Peluasan lahan PKL	Bayeman Mudal Rt 4 RW 7 Kemirirejo	Perdagangan	Keterbatasan lahan mengadakan kerjamasa sewa lahan			
312	Pembuatan showroom UKM	UMKM KEL CACABAN	Perdagangan	Sementara bisa bergabung di UMKM Center di Lantai 2 Pasar Rejowinangun			
313	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksanakan melalui MPM Dinas Sosial			

314	Validasi Data kemiskinan	RT 1 RW 6 Kel. J O U	Perencanaan pembangunan	Dilaksanakan melalui MPM Dinas Sosial		
315	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksanakan melalui MPM Dinas Sosial		
316	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksanakan melalui MPM Dinas Sosial		
317	validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksanakan melalui MPM Dinas Sosial		
318	Pembuatan marka jalan jalur sepeda	Sanden RT 2/7	Perhubungan			Perlu adanya kajian terkait lebar jalan, apakah memungkinkan dibuat marka jalan sepeda
319	Penertiban jalur lambat yang tidak sesuai dengan fungsinya.	Sanden RT 2/7	Perhubungan			Perlu adanya kajian terkait jalur lambat
320	Pengadaan cermin cembung	PERUM DEPKES	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
321	Pengadaan cermin cembung	RW 10 KEDUNGSARI	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
322	Pengadaan cermin cembung	PERUM DEPKES BLOK D1 NO 27	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
323	Pengadaan cermin cembung	RT 4 dengan dalangan Kramat Utara (seputaran makam dalangan)	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		

324	Pengadaan cermin cembung		Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
325	Pembuatan penerangan jalan umum		Perhubungan			Penerangan jalan bukan kewenangan Dishub
326	Pembuatan penerangan jalan umum	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Perhubungan			Penerangan jalan bukan kewenangan Dishub
327	Bantuan Bibit ikan bawal	Rt 02 Rw 07 Kampung Dumpoh	Perikanan dan kelautan			Data hasil verifikasi belum masuk
328	Pelatihan budidaya burung	JL Panjang semplon RT 6 RWI Kemirirejo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
329	Fasilitasi pemasaran hasil hasil budidaya lidah buaya	Kemirirejo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
330	Pengadaan polibag pupul budidaya lidah buaya	Warga Sanden	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
331	Pengadaan sarana prasarana pengembangan budidaya lidah buaya	Rw 03 Kelurahan Wates	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
332	Pelatihan budidaya alovera	RT 06 RW 02 KEL. WATES	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
333	Pelatihan budidaya jamur	RT 06 RW 02 KEL. WATES	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk

334	Bantuan bibit love bird	Rt 02 rw 10 Sidotopo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
335	Pembuatan kampung organik	Kelurahan Wates	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
336	Bantuan Bibit Tanaman Kelengkeng Crystal Super	Jurangombo Selatan	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
337	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	Bogeman Wetan Rt 4/8 Panjang	Perumahan rakyat	Sudah terakomodir di musrenbang		
338	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	RW 10 KEL. CACABAN	Perumahan rakyat			Masuk dalam program RTLH
339	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	RW 9 KELURAHAN MAGERSARI	Perumahan rakyat			Masuk dalam program RTLH
340	Pembuatan tembok makam	Ganten	Perumahan rakyat			Tupoksi DLH
341	pembuatan MCK	Rt 03 Rw 06	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah dilaksanakan tahun 2017		
342	pembuatan MCK	Rt 02 Rw 06	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah dilaksanakan tahun 2017		

343	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan
344	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan
345	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan
346	Pengadaan Perangkat Pangrukti Layon Krenda Stainless Steel Pengusung Jenazah		Perumahan rakyat dan pemukiman			Data hasil verifikasi belum masuk
347	Pengadaan Meja Tempat Merawat Jenazah dari pipa besi kotak		Perumahan rakyat dan pemukiman			Data hasil verifikasi belum masuk
348	Bantuan Sosial Pembangunan RTLH	An Bp Pawira Wiryadi Kelurahan Magersari	Perumahan rakyat dan pemukiman	Masuk dalam program RTLH		
349	Peningkatan selokan jalan	RT.01/RW.08 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah terakomodir di musrenbang		
350	Peningkatan selokan jalan	RT.05/RW.02 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	Kondisi masih layak		

351	Peningkatan jalan lingkungan	RT. 01, RT. 2 RW.2 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	diusulkan di tahun 2019		
352	Pengadaan Meubeler	Kel. Wates	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
353	Pengadaan Meubeler	Potrobanngsan	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
354	Pengadaan pakaian seragam	Kel. Wates	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
355	Job Fair	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
356	Job Fair	Gg Kantil 3 Rt 4 RW 8	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
357	Job Fair	Rw 09 Sanden Kramat	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
358	Job Fair	Rw 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
359	Job Fair	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
360	Job Fair	KEDUNGSARI	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
361	Job Fair	RT 02 RW 02 TIDAR SAWE KEL. TIDAR SELATAN	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		

362	Job Fair	Rt 06 Rw 03 Menowo	tenaga kerja	Diakomodir tahun 2019		

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.1.3 Program Prioritas III

Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap OPD.

Tabel 5.12
Matriks Perubahan Rencana Kerja OPD Kota Magelang Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PENETAPAN APBD 2019	PAGU PERUBAHAN RENJA OPD 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.464.067.000	55.477.634.000
2	Dinas Kesehatan	46.430.693.000	48.987.569.000
3	BLUD RSU Tidar	225.800.207.000	257.428.207.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.295.896.000	78.606.370.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.545.412.000	34.332.855.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.360.791.000	7.536.851.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.676.401.000	2.676.401.000
8	Dinas Sosial	3.866.518.000	3.746.184.000
9	Dinas Tenaga Kerja	5.892.438.000	5.826.394.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	42.499.538.000	50.573.311.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.693.126.000	2.693.126.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.456.683.000	6.157.902.000
13	Dinas Perhubungan	7.415.242.000	7.490.823.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.752.864.000	12.787.448.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.866.094.000	2.893.676.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	17.820.519.000	17.844.931.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.046.436.000	4.096.194.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	7.895.497.000	8.021.737.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.466.431.000	19.772.103.000
20	Sekretariat Daerah	27.492.190.000	30.782.135.000
21	Sekretariat DPRD	26.390.938.000	24.226.734.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7.020.586.000	7.194.458.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PENETAPAN APBD 2019	PAGU PERUBAHAN RENJA OPD 2019
23	Kecamatan Magelang Tengah	8.540.867.000	8.645.118.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.880.162.000	7.948.742.000
25	Inspektorat	11.034.996.000	11.522.179.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.001.618.000	7.700.355.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.031.174.000	18.900.666.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.148.038.000	8.306.317.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.565.468.000	2.565.468.000
	TOTAL	725.846.873.000	754.741.888.000

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 URUSAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.325.800.000		2.212.872.000		2.258.036.000				
1	1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	245.000.000	12	223.480.000	12	223.480.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 unit	28.500.000	48 unit	29.200.000	48 unit	29.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	122 orang	860.000.000	122 orang	827.548.000	122 orang	827.548.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100	175.000.000	100	187.946.000	100	201.662.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	88.000.000	12 bulan	50.651.000	12 bulan	50.651.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	78.000.000	12 bulan	77.775.000	12 bulan	77.775.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18	10.500.000	18	10.321.000	18	10.321.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	7.000.000	12 bulan	5.970.000	12 bulan	5.970.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	3 koran harian dan 1 majalah mingguan selama 12 bulan	19.000.000	3 koran har	20.100.000	3 koran haria	20.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	12 bulan	2.800.000	12 bulan	1.968.000	12 bulan	1.968.000	Dinas Pendidikan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	145.000.000	12 bulan	129.480.000	12 bulan	129.480.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	400.000.000	100	289.050.000	100	319.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	24 orang	245.000.000	24 orang	319.392.000	24 orang	301.016.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	1.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya sosialisasi manajemen kepegawaian	2 kegiatan , 110 orang	22.000.000	2 kegiatan ,	39.991.000	2 kegiatan , 1	59.015.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.050.000.000		743.390.000		934.911.000				
					169,264,331,000								
1	1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor.	53 item	110.000.000		0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pembuatan aplikasi	4 alat, 1 paket software	75.000.000		0		100.021.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pemeliharaan taman)	1	110.000.000	1	101.705.000	1	101.705.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 unit	620.000.000	48 unit	370.895.000	48 unit	370.895.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU
5	1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31	75.000.000	31	75.000.000	31	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	100	60.000.000	100	195.790.000	100	120.790.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi kendaraan dinas	1 Unit		1 Unit	0	1 Unit	166.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			141.275.000		126.135.000		126.135.000				
1	1.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	14.500.000	1 dokumen	8.509.000	1 dokumen	8.509.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	6.500.000	1 dokumen	6.571.000	1 dokumen	6.571.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	21.000.000	1 dokumen	11.295.000	1 dokumen	11.295.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 dokumen, 2 sosialisasi	12.000.000	2 dokumen	17.996.000	2 dokumen, 2	17.996.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	2 dokumen, 4 pembinaan	55.000.000	2 dokumen	52.548.000	2 dokumen, 4	52.548.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD	Tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1 dokumen, 1 sosialisasi	17.500.000	1 dokumen	14.441.000	1 dokumen, 1	14.441.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.1.6.30	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya kegiatan perubahan renstra OPD		14.775.000	1 Kegiatan	14.775.000	1 Kegiatan	14.775.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.331.400.000		891.331.000		998.045.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya pelatihan tenaga pendidik KBTK	2 pelatihan KB 96, TK 76	100.000.000	2 pelatihan	116.468.000	2 pelatihan	108.850.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	TK 118, KB 103	37.500.000	TK 118, KB	47.045.000	TK 118, KB 1	47.045.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
3	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	1 PAUD	23.500.000	1 PAUD	59.276.000	1 PAUD	47.708.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
4	1.1.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100	13.500.000	100	13.965.000	100	13.965.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
5	1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelajaran	2 lomba, 150 peserta	110.000.000	2 lomba, 15	28.414.000	2 lomba, 150	28.414.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terlaksanannya lomba - lomba semarak anak	40 perorangan KB, 25 beregu KB, 30 TK	77.000.000	40 perorangan	91.768.000	40 perorangan	91.768.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
7	1.1.15.71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksananya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	40 peserta, 2 lomba	7.000.000	40 peserta,	18.232.000	40 peserta, 2	19.132.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
8	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	100	18.500.000	100	17.856.000	100	17.856.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
9	1.1.15.83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya gebyar PAUD	Anak KB TK, 5 jenis lomba	22.000.000	Anak KB TK,	89.029.000	Anak KB TK, 5	89.029.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.15.88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersaluranya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraa n PAUD sesuai Juknis	1 TK Negeri	3.767.400.000	1 TK Negeri	60.000.000	1 TK Negeri	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Kota Layak Anak
11	1.1.15.89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	6 Bunda PAUD, 9 Gugud Paud	30.000.000	6 Bunda PA	26.140.000	6 Bunda PAU	26.140.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
12	1.1.15.95	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Terpenuhinya buku koleksi PAUD	100%		100%	40.000.000	100%	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Kota Layak Anak
13	1.1.15.87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksanannya lomba KB TK	10 lomba , 1 sosialisasi		10 lomba , 1	101.488.000	10 lomba , 1	101.488.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
14	1.1.15.96	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	100%		100%	161.650.000	100%	161.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Kota Layak Anak
15	1.1.15.90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD	100 persen		100 persen	20.000.000	100 persen	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
16	1.1.15.94	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya Ruang kelas di TK Negeri Pembina	100%	125.000.000	100%		0 100%	125.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Kota Layak Anak
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			870.000.000		1.015.691.000		1.041.491.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	17 keluraha n	285.000.000	17 keluraha n	388.200.000	17 kelurahan	414.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	2.16.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	1 kali pementasan	405.000.000	1 kali pementasan	402.292.000	1 kali pementasan	402.292.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.15.8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang	75 orang peserta		75 orang peserta	89.829.000	75 orang peserta	89.829.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.15.6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	6 kegiatan	180.000.000	6 kegiatan	135.370.000	6 kegiatan	135.370.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			63.246.000		62.038.000		62.038.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100	33.075.000	1 Kegiatan	31.926.000	1 Kegiatan	31.926.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.17.15.26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100	30.171.000	1 Kegiatan	30.112.000	1 Kegiatan	30.112.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			19.360.834.000		22.206.228.000		21.899.071.000				
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.61%									
			APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%									
			APM SMP/SMPLB/M Ts/Paket B	78.00%									
			APK SMP/SMPLB/M Ts/Paket B	88.00%									
			Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,13611									
			Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,24306									
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16									
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14									
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01									
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002									
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%									
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA	157%									
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%									
			Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	42 pelajar									
			Adanya kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	85%									
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	87%									
			Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%									
1	1.1.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	2 kali pelatihan, 800 tenaga pendidik	48.000.000		56.305.000		76.960.000	KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum		SDGs, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	3 PKBM	75.000.000	100%	142.505.000	100%	144.029.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	80 orang	215.000.000	100%	279.286.000	100%	283.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
4	1.1.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar	125 orang	55.000.000		15.054.000		15.054.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.1.16.89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendali mutu SMP	6600 Siswa Kelas VIII dan IX SMP	235.000.000		119.467.000		119.467.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
6	1.1.16.97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.352.000	1 Tahun	177.238.000	1 Tahun	170.115.000	SD Negeri Kedungsari 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
7	1.1.16.98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	86.854.000	1 Tahun	118.778.000	1 Tahun	105.575.000	SD Negeri Kedungsari 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.16.99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	135.340.000	1 Tahun	150.838.000	1 Tahun	140.199.000	SD Negeri Kedungsari 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.1.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.432.000	1 Tahun	164.256.000	1 Tahun	154.101.000	SD Negeri Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	279.744.000	1 Tahun	247.822.000	1 Tahun	246.737.000	SD Negeri Kedungsari 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.176.000	1 Tahun	117.751.000	1 Tahun	107.596.000	SD Negeri Kramat 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	1.1.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.836.000	1 Tahun	108.106.000	1 Tahun	97.443.000	SD Negeri Kramat 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	87.392.000	1 Tahun	99.478.000	1 Tahun	87.799.000	SD Negeri Kramat 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.592.000	1 Tahun	124.430.000	1 Tahun	114.275.000	SD Negeri Kramat 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.530.000	1 Tahun	117.360.000	1 Tahun	104.157.000	SD Negeri Kramat 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsang 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	70.158.000	1 Tahun	79.698.000	1 Tahun	66.495.000	SD Negeri Potrobangsang 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
17	1.1.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsang 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.558.000	1 Tahun	164.396.000	1 Tahun	154.237.000	SD Negeri Potrobangsang 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	152.698.000	1 Tahun	162.536.000	1 Tahun	152.381.000	SD Negeri Potrobangsang 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
19	1.1.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	93.934.000	1 Tahun	103.772.000	1 Tahun	95.141.000	SD Negeri Potrobangsang 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.436.000	1 Tahun	148.274.000	1 Tahun	139.643.000	SD Negeri Wates 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.262.000	1 Tahun	158.520.000	1 Tahun	151.413.000	SD Negeri Wates 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	99.170.000	1 Tahun	109.008.000	1 Tahun	98.853.000	SD Negeri Wates 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	151.380.000	1 Tahun	161.228.000	1 Tahun	152.597.000	SD Negeri Wates 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.236.000	1 Tahun	91.074.000	1 Tahun	79.395.000	SD Negeri Wates 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	164.312.000	1 Tahun	174.150.000	1 Tahun	174.150.000	SD Negeri Cacaban 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	1.1.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	140.500.000	1 Tahun	150.464.000	1 Tahun	140.816.000	SD Negeri Cacaban 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
27	1.1.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	139.818.000	1 Tahun	162.672.000	1 Tahun	130.864.000	SD Negeri Cacaban 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	134.604.000	1 Tahun	144.442.000	1 Tahun	136.318.000	SD Negeri Cacaban 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
29	1.1.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.640.000	1 Tahun	159.444.000	1 Tahun	149.640.000	SD Negeri Cacaban 6	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	104.456.000		114.294.000		100.074.000	SD Negeri Gelangan 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.734.000	1 Tahun	91.572.000	1 Tahun	80.400.000	SD Negeri Gelangan 24	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	125.338.000		134.879.000		126.775.000	SD Negeri Gelangan 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	174.964.000	1 Tahun	184.802.000	1 Tahun	176.678.000	SD Negeri Gelangan 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.034.000	1 Tahun	90.368.000	1 Tahun	77.672.000	SD Negeri Gelangan 7	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.444.000	1 Tahun	268.226.000	1 Tahun	261.626.000	SD Negeri Kemirirejo 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	303.740.000	1 Tahun	315.978.000	1 Tahun	310.859.000	SD Negeri Kemirirejo 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
37	1.1.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	278.402.000	1 Tahun	260.934.000	1 Tahun	253.834.000	SD Negeri Magelang 2/7	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
38	1.1.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.596.000	1 Tahun	153.194.000	1 Tahun	145.070.000	SD Negeri Magelang 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
39	1.1.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.390.000	1 Tahun	146.156.000	1 Tahun	134.477.000	SD Negeri Magelang 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	1.1.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	105.132.000	1 Tahun	141.145.000	1 Tahun	131.497.000	SD Negeri Magelang 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
41	1.1.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.610.000	1 Tahun	268.498.000	1 Tahun	265.498.000	SD Negeri Magelang 6	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
42	1.1.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.808.000	1 Tahun	123.762.000	1 Tahun	112.590.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	77.050.000	1 Tahun	101.888.000	1 Tahun	90.716.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
44	1.1.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	68.242.000	1 Tahun	78.092.000	1 Tahun	75.404.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	127.254.000	1 Tahun	137.092.000	1 Tahun	128.968.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
46	1.1.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.086.000	1 Tahun	147.778.000	1 Tahun	141.178.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
47	1.1.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	147.064.000	1 Tahun	156.914.000	1 Tahun	149.171.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
48	1.1.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	142.174.000	1 Tahun	152.012.000	1 Tahun	142.174.000	SD Negeri Jurangombo 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
49	1.1.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	146.584.000	1 Tahun	156.294.000	1 Tahun	146.485.000	SD Negeri Jurangombo 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
50	1.1.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	175.996.000	1 Tahun	181.795.000	1 Tahun	170.114.000	SD Negeri Jurangombo 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
51	1.1.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	162.522.000	1 Tahun	172.360.000	1 Tahun	163.729.000	SD Negeri Jurangombo 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
52	1.1.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	88.420.000	1 Tahun	113.258.000	1 Tahun	101.579.000	SD Negeri Magersari 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.062.000	1 Tahun	152.900.000	1 Tahun	142.745.000	SD Negeri Magersari 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	1.1.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.482.000	1 Tahun	104.320.000	1 Tahun	94.165.000	SD Negeri Magersari 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
55	1.1.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.788.000	1 Tahun	158.852.000	1 Tahun	148.697.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
56	1.1.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	168.256.000	1 Tahun	177.836.000	1 Tahun	168.256.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
57	1.1.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	108.270.000	1 Tahun	118.108.000	1 Tahun	110.965.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
58	1.1.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.704.000	1 Tahun	146.542.000	1 Tahun	141.917.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
59	1.1.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	156.738.000	1 Tahun	166.576.000	1 Tahun	157.945.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
60	1.1.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	131.854.000	1 Tahun	141.212.000	1 Tahun	131.854.000	SD Negeri Tidar 1	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
61	1.1.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.240.000	1 Tahun	158.078.000	1 Tahun	147.923.000	SD Negeri Tidar 3	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
62	1.1.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.536.000	1 Tahun	142.374.000	1 Tahun	129.171.000	SD Negeri Tidar 4	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
63	1.1.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	170.670.000	1 Tahun	181.034.000	1 Tahun	172.403.000	SD Negeri Tidar 5	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
64	1.1.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.966.000	1 Tahun	142.778.000	1 Tahun	132.623.000	SD Negeri Tidar 6	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
65	1.1.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	116.010.000	1 Tahun	126.311.000	1 Tahun	116.156.000	SD Negeri Tidar 7	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
66	1.1.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	776.811.000	1 Tahun	675.507.000	1 Tahun	692.679.000	SMP Negeri 1 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
67	1.1.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	833.940.000	1 Tahun	729.720.000	1 Tahun	748.008.000	SMP Negeri 2 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	1.1.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	783.441.000	1 Tahun	684.035.000	1 Tahun	696.227.000	SMP Negeri 3 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
69	1.1.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	559.936.000	1 Tahun	486.336.000	1 Tahun	495.480.000	SMP Negeri 4 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
70	1.1.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	739.198.000	1 Tahun	641.598.000	1 Tahun	652.266.000	SMP Negeri 5 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
71	1.1.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	571.130.000	1 Tahun	489.270.000	1 Tahun	498.414.000	SMP Negeri 6 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
72	1.1.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	100	621.563.000	1 Tahun	544.633.000	1 Tahun	556.825.000	SMP Negeri 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
73	1.1.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	735.283.000	1 Tahun	636.117.000	1 Tahun	651.357.000	SMP Negeri 8 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
74	1.1.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	677.964.000	1 Tahun	586.321.000	1 Tahun	596.989.000	SMP Negeri 9 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
75	1.1.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	699.905.000	1 Tahun	614.285.000	1 Tahun	626.477.000	SMP Negeri 10 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
76	1.1.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	611.707.000	1 Tahun	533.707.000	1 Tahun	548.947.000	SMP Negeri 11 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
77	1.1.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	570.258.000	1 Tahun	492.345.000	1 Tahun	501.489.000	SMP Negeri 12 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
78	1.1.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	782.286.000	1 Tahun	678.686.000	1 Tahun	692.402.000	SMP Negeri 13 Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
79	1.1.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	274 siswa pendidikan dasar	23.737.000		23.737.000	1	23.737.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	1.1.16.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Terpenuhinya AC di Sekolah	2 Unit AC (SMPN 10)	24.605.000	2 Unit	0	2 Unit	18.605.000	SMP Negeri 10 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
81	1.1.16.203	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya	100%			360.449.000		360.449.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
82	1.1.16.202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	100%			180.000.000		180.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
83	1.1.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP beserta perabotnya	100%			90.000.000		90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
84	1.1.16.92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Terselurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	100	883.500.000	2 sekolah	883.500.000	2 sekolah	883.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
85	1.1.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP	Mebeluer Sekolah (SMPN 10)	300.000.000		0		63.230.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
86	1.1.16.88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar	4800 siswa kelas 5 SD			60.357.000		60.357.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1.1.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikan nya bantuan pakaian seragam sekolah	2200 SD, 3000 SMP			2.041.126.000		2.041.126.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
88	1.1.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah	10 Sekolah Dasar			103.868.000		103.868.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Program prioritas RPJM
89	1.1.16.200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya	100%			712.900.000		712.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
90	1.1.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa	700 siswa kelas 6 SD dan kelas IX SMP			48.745.000		48.745.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
91	1.1.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	100%		1 Tahun	117.422.000	1 Tahun	109.298.000	SDN Gelangan 6	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
92	1.1.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpenuhinya rehab bangunan sekolah		175.000.000	1 sekolah	175.000.000	1 sekolah	175.000.000	SD Negeri wates 4	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			1.178.014.000		1.130.853.000		1.111.352.000				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah pengunjung museum	5,250									
			Jumlah koleksi museum	12									
1	2.16.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	1 museum	150.000.000	100%	126.669.000	100%	134.241.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	1 kali pementasan	65.000.000		89.424.000		89.424.000	Kota Semarang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	1 buku	15.000.000		13.620.000		13.620.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.16.8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	1 film	105.000.000		101.004.000		101.004.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terlaksananya pelatihan PERMADANI bagi siswa dikdas	40 siswa dikdas	38.000.000		34.517.000		30.069.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	1 kegiatan	145.000.000		145.000.000		145.000.000	TMII Jakarta	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.16.16.1.1	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya didaerah		2 kegiatan	22.625.000		22.625.000		0	Kota Magelang			
8	2.16.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	10 rekomendasi	155.000.000		92.980.000		92.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.16.16.18	Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)	Terpenuhinya Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara		35.555.000	1 Kegiatan	35.555.000	1 Kegiatan	35.555.000	Kota Mgelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.16.16.19	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	terlaksananya KORMONEV		19.459.000	1 dokumen	19.459.000	1 dokumen	19.459.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.16.16.20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan museum		450.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	5 Kegiatan	450.000.000	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			365.000.000		609.455.000		609.455.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	166.736.000	1 kegiatan	166.736.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	2.16.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2 kegiatan	47.500.000	2 kegiatan	31.856.000	2 kegiatan	31.856.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	9	72.500.000	9 kegiatan	72.500.000	9 kegiatan	72.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	120.961.000	1 kegiatan	120.961.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
5	2.16.17.9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terselenggaranya Karnaval Pembangunan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	217.402.000	1 Kegiatan	217.402.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			638.250.000		892.910.000		892.910.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%									
			Jumlah Juara FASI	4									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	325 warga belajar	56.000.000	325 warga b	148.701.000	325 warga be	148.701.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	90 orang	99.000.000	90 orang	84.421.000	90 orang	84.421.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	90 orang	79.000.000	90 orang	80.529.000	90 orang	80.529.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
4	1.1.18.20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	12 bulan	27.000.000	12 bulan	33.311.000	12 bulan	33.311.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
5	1.1.18.21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 peserta	16.250.000	170 peserta	13.400.000	170 peserta	13.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.1.18.22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	170 Peserta Paket C dan 155 Peseerta Paket B	35.000.000	170 Peserta	81.220.000	170 Peserta	81.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.1.18.29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	175 Peserta	25.000.000	175 Peserta	23.960.000	175 Peserta	23.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.1.18.31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120 Peserta	15.500.000	120 Peserta	14.751.000	120 Peserta	14.751.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.18.32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2	63.000.000	2 kegiatan	59.978.000	2 kegiatan	59.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.18.33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90 Peserta	42.500.000	90 Peserta	34.603.000	90 Peserta	34.603.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
11	1.1.18.41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	52 Orang	180.000.000	52 Orang	318.036.000	52 Orang	318.036.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			188.000.000		442.345.000		465.118.000				
					4,279,381,000								
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	225									
			Misi kesenian 100%	39%									
1	2.16.18.3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1	188.000.000	1	442.345.000	1	442.345.000	Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS)	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.18.7	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	Terpromosikannya seni budaya Kota Magelang	2 Kegiatan		2 Kegiatan		0 2 Kegiatan	22.773.000	Kab/Kota Seluruh Indonesia	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			87.500.000		143.150.000		134.650.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		1		1					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan	1	40.000.000	1	79.913.000	1	71.413.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1 raperwal	47.500.000	1 raperwal	63.237.000	1 raperwal	63.237.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.789.000.000		1.463.478.000		1.520.420.000				
			DISDIK		2,335,421,550								
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14%									
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%									
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53%									
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%									
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68%									
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.50%									
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14.05%									
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%									
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53.15%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.10%									
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67.67%									
			Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama	65%									
			Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%									
1	1.1.20.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	440 orang , 2 kegiatan	49.500.000	440 orang ,	42.448.000	440 orang , 2	42.448.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.1.20.4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	450 orang	468.000.000	450 orang	287.306.000	450 orang	288.830.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.1.20.14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	400 orang	343.000.000	400 orang	300.982.000	400 orang	302.506.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.1.20.17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	9 Pengawas	22.000.000	9 Pengawas	10.575.000	9 Pengawas	10.575.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.1.20.36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75 orang	66.000.000	75 orang	56.203.000	75 orang	56.203.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.1.20.52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	200 orang terdiri dari unsur PKBM, KB, Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	165.000.000	200 orang	149.001.000	200 orang	144.501.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.1.20.57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	1 kegiatan, 10 cabang lomba, 100 peserta	73.500.000	1 kegiatan,	56.898.000	1 kegiatan, 1	56.898.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.1.20.74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru	150 guru		150 guru	46.000.000	150 guru	46.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.20.75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK	73 Kepala Sekolah TK		73 Kepala S	63.502.000	73 Kepala Se	63.502.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	1.1.20.59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	160 pendidik dan tenaga kependidikan formal	118.000.000	160 pendid	60.990.000	160 pendidik	60.990.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	1.1.20.61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100%	49.000.000	100%	37.200.000	100%	37.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	1.1.20.70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	12 bulan, 300 peserta	151.000.000	12 bulan, 30	179.104.000	12 bulan, 300	180.628.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	1.1.20.76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru	6 cabang lomba (1 tematik, 5 mapel)		6 cabang lo	51.752.000	6 cabang lom	51.752.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	1.1.20.19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22 Kepala SMP	59.000.000	22 Kepala S	42.840.000	22 Kepala SM	42.840.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
15	1.1.20.18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	77 Kepala SD	225.000.000	77 Kepala S	78.677.000	77 Kepala SD	78.677.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	1.1.20.79	Pengembangan Karakter SDM Guru	Meningkatkan karakter sumber daya guru	100 Guru		100 Guru		0 100 Guru	56.870.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.831.980.000		1.681.779.000		1.743.023.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :	46									
			a. Propinsi	31 pelajar									
			b. Nasional	15 pelajar									
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90%									
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	97%									
			Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	45%									
			Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	35%									
1	1.1.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100	16.500.000	100	44.192.000	100	44.192.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	12.000.000	100	10.571.000	100	10.571.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.1.22.11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	3 PSB : TK, SD, SMP	180.000.000	3 PSB : TK, SD, SMP	84.617.000	3 PSB : TK, SD, SMP	54.617.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	1.1.22.13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100	206.380.000	100	72.035.000	100	72.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	1.1.22.22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksana fungsi kontroling	100	98.600.000	100	52.310.000	100	52.310.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	1.1.22.23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak siswa	4 kegiatan dan 11 sidak	50.000.000	4 kegiatan dan 11 sidak	33.925.000	4 kegiatan dan 11 sidak	33.925.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.1.22.24	Pelaksanaan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	84.621.000	1 kegiatan	84.621.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.1.22.25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84 sekolah	33.500.000	84 sekolah	30.592.000	84 sekolah	30.592.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	1.1.22.26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	35.000.000	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	21.657.000	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	21.657.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.1.22.29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	1 kegiatan	42.500.000	1 kegiatan	65.949.000	1 kegiatan	101.097.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.1.22.33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	1 Kepsek TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	53.000.000	1 Kepsek TK	21.978.000	1 Kepsek TK,	21.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	1.1.22.35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	1300 guru PNS	99.000.000	1300 guru P	75.999.000	1300 guru PN	75.999.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	1.1.22.38	Manajemen pendataan pendidikan	Sistem informasi berbasis masyarakat	100	67.500.000	100	0	100	50.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.1.22.41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	225 buah	18.000.000	225 buah	14.959.000	225 buah	14.959.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	1.1.22.42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	4 kegiatan	37.500.000	4 kegiatan	47.260.000	4 kegiatan	47.260.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	1.1.22.47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	3 kegiatan	62.500.000	3 kegiatan	48.434.000	3 kegiatan	48.434.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
17	1.1.22.49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	50 orang	42.500.000	50 orang	32.882.000	50 orang	32.882.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
18	1.1.22.52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	100	17.500.000	100	15.271.000	100	15.271.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	1.1.22.77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100	475.000.000	100	436.101.000	100	436.101.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	1.1.22.58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100%		100%	30.055.000	100%	30.055.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
21	1.1.22.56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan		1 kegiatan	46.702.000	1 kegiatan	46.702.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
22	1.1.22.59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan		1 kegiatan	75.578.000	1 kegiatan	77.102.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
23	1.1.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	195.000.000	2 kegiatan	96.365.000	2 kegiatan	96.365.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
24	1.1.22.57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya movev bosda	4 kegiatan		4 kegiatan	140.879.000	4 kegiatan	145.451.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
25	1.1.22.54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)	2 lomba, 1 sosialisasi		2 lomba, 1 sosialisasi	48.860.000	2 lomba, 1 sosialisasi	48.860.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
26	1.1.22.80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP	1 kegiatan, 100 peserta		1 kegiatan,	49.987.000	1 kegiatan, 100 peserta	49.987.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.1.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1.898.000.000		2.029.650.000		2.029.650.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	45%									
1	1.1.23.1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	34.210.000	1 kegiatan	34.210.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.1.23.5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	4800 peserta	94.500.000	4800 peserta	66.525.000	4800 peserta	66.525.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.1.23.9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	150 siswa	46.000.000	150 siswa	25.611.000	150 siswa	25.611.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.1.23.11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat	2 kegiatan	49.000.000	2 kegiatan	38.402.000	2 kegiatan	38.402.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.1.23.17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100	79.000.000	100	121.947.000	100	121.947.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.1.23.18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	4800 peserta	178.500.000	4800 peserta	157.221.000	4800 peserta	157.221.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.1.23.19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	3300 Peserta	105.000.000	3300 Peserta	137.026.000	3300 Peserta	137.026.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.1.23.20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	6600 Peserta	152.500.000	6600 Peserta	340.089.000	6600 Peserta	340.089.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	1.1.23.21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	2 kegiatan	27.500.000	2 kegiatan	18.463.000	2 kegiatan	18.463.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	1.1.23.27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	5 kegiatan	441.000.000	5 kegiatan	553.207.000	5 kegiatan	553.207.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.1.23.28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	120	275.000.000	120	87.112.000	120	87.112.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	1.1.23.31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	2 event	65.000.000	2 event	36.740.000	2 event	36.740.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
13	1.1.23.33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	2 kegiatan, 680 peserta	350.000.000	2 kegiatan,	346.576.000	2 kegiatan, 6	346.576.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	1.1.23.25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP	1 kegiatan		1 kegiatan	66.521.000	1 kegiatan	66.521.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1.1.25	Program Pendidikan Berkelanjutan			150.641.000		150.641.000		150.641.000				
			Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	92.74%									
			Meningkatkan nasionalisme dan pendidikan karakter bagi siswa	100%	150.000.000								
1	1.1.25.1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya fasilitas pembinaan Nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan		150.641.000		150.641.000		150.641.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.1.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			16.491.121.000		16.662.121.000		19.500.688.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.26.20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		140.000.000	1 Tahun	140.000.000	1 Tahun	170.848.000	SDN Cacaban 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
2	1.1.26.21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terselenggarannya Pendidikan Dasar 9 Tahun		128.800.000	1 Tahun	128.800.000	1 Tahun	168.102.000	SD N Cacaban 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
3	1.1.26.42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		143.200.000	1 Tahun	143.200.000	1 Tahun	173.209.000	SD Rejowinangun Utara 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
4	1.1.26.1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		151.200.000	1 Tahun	151.200.000	1 Tahun	165.884.000	SD N Kedungsari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
5	1.1.26.31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		286.400.000	1 Tahun	286.400.000	1 Tahun	335.170.000	SD N Kemirirejo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
6	1.1.26.62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		738.976.000	1 Tahun	738.976.000	1 Tahun	807.008.000	SMP Negeri 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
7	1.1.26.63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		759.976.000	1 Tahun	759.976.000	1 Tahun	871.130.000	SMP Negeri 2 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
8	1.1.26.37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		284.800.000	1 Tahun	284.800.000	1 Tahun	331.795.000	SD N Magelang 2/7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
9	1.1.26.66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		713.975.000	1 Tahun	713.975.000	1 Tahun	717.197.000	SMP Negeri 5 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
10	1.1.26.25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terselenggarannya Pendidikan Dasar		101.600.000	1 Tahun	101.600.000	1 Tahun	144.231.000	SD N Gelangan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.1.26.24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		151.200.000	1 Tahun	151.200.000	1 Tahun	198.082.000	SD N Cacaban 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
12	1.1.26.22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terselenggarakan Pendidikan Dasar 9 Tahun		144.000.000	1 Tahun	144.000.000	1 Tahun	190.873.000	SD N Cacaban 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
13	1.1.26.64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		560.975.000	1 Tahun	731.975.000	1 Tahun	734.336.000	SMP Negeri 3 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
14	1.1.26.23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		132.800.000	1 Tahun	132.800.000	1 Tahun	144.025.000	SD N Cacaban 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
15	1.1.26.65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		560.975.000	1 Tahun	560.975.000	1 Tahun	633.598.000	SMP Negeri 4 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
16	1.1.26.26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		62.400.000	1 Tahun	62.400.000	1 Tahun	101.085.000	SD N Gelangan 24	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
17	1.1.26.67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		568.744.000	1 Tahun	568.744.000	1 Tahun	653.061.000	SMP Negeri 6 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
18	1.1.26.27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		100.800.000	1 Tahun	100.800.000	1 Tahun	102.508.000	SD N Gelangan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
19	1.1.26.28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		153.600.000	1 Tahun	153.600.000	1 Tahun	223.938.000	SD N Gelangan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
20	1.1.26.68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		574.975.000	1 Tahun	574.975.000	1 Tahun	588.583.000	SMP Negeri 7 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	1.1.26.29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		130.400.000	1 Tahun	130.400.000	1 Tahun	152.450.000	SD N Gelangan 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
22	1.1.26.30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		59.200.000	1 Tahun	59.200.000	1 Tahun	72.676.000	SD N Gelangan 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
23	1.1.26.69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		704.975.000	1 Tahun	704.975.000	1 Tahun	753.101.000	SMP Negeri 8 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
24	1.1.26.70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		658.975.000	1 Tahun	658.975.000	1 Tahun	737.730.000	SMP Negeri 9 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
25	1.1.26.32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		304.800.000	1 Tahun	304.800.000	1 Tahun	388.155.000	SD N Kemirirejo 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
26	1.1.26.33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		141.600.000	1 Tahun	141.600.000	1 Tahun	241.308.000	SD N Magelang 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
27	1.1.26.34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		136.800.000	1 Tahun	136.800.000	1 Tahun	162.050.000	SD N Magelang 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
28	1.1.26.71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		639.975.000	1 Tahun	639.975.000	1 Tahun	657.722.000	SMP Negeri 10 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
29	1.1.26.35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		114.400.000	1 Tahun	114.400.000	1 Tahun	153.943.000	SD N Magelang 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
30	1.1.26.36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		311.200.000	1 Tahun	311.200.000	1 Tahun	364.101.000	SD N Magelang 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	1.1.26.72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		564.000.000	1 Tahun	564.000.000	1 Tahun	578.523.000	SMP Negeri 11 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
32	1.1.26.38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		121.600.000	1 Tahun	121.600.000	1 Tahun	149.310.000	SD Rejowinangun Utara 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
33	1.1.26.73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		546.000.000	1 Tahun	546.000.000	1 Tahun	549.275.000	SMP Negeri 12 Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
34	1.1.26.39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		72.800.000	1 Tahun	72.800.000	1 Tahun	84.367.000	SD Rejowinangun Utara 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
35	1.1.26.40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		59.200.000	1 Tahun	59.200.000	1 Tahun	64.291.000	SD Rejowinangun Utara 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
36	1.1.26.74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		677.000.000	1 Tahun	677.000.000	1 Tahun	723.320.000	SMP Negeri 13 magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
37	1.1.26.41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		100.800.000	1 Tahun	100.800.000	1 Tahun	119.117.000	SD Rejowinangun Utara 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
38	1.1.26.43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		118.400.000	1 Tahun	118.400.000	1 Tahun	120.986.000	SD Rejowinangun Utara 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
39	1.1.26.2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		92.000.000	1 Tahun	92.000.000	1 Tahun	113.101.000	SD Kedungsari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
40	1.1.26.61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terseleenggarann Pendidikan Dasar		123.200.000	1 Tahun	123.200.000	1 Tahun	166.265.000	SD Negeri Tidar 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	1.1.26.3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terselenggaraan ya Pendidikan Dasar		134.400.000	1 Tahun	134.400.000	1 Tahun	169.540.000	SD N Kedungsari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
42	1.1.26.60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terseleggarann ya Pendidikan Dasar		113.600.000	1 Tahun	113.600.000	1 Tahun	135.117.000	SD Negeri Tidar 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
43	1.1.26.4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terselenggaraan ya Pendidikan Dasar		157.600.000	1 Tahun	157.600.000	1 Tahun	162.013.000	SD N Kedungsari 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
44	1.1.26.5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terselenggaraan ya Pendidikan Dasar		278.400.000	1 Tahun	278.400.000	1 Tahun	590.917.000	SD N Kedungsari 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
45	1.1.26.6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terselenggaraan nya Pendidikan Dasar		145.600.000	1 Kegiatan	145.600.000	1 Kegiatan	170.638.000	SD Negeri Kramat 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
46	1.1.26.59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terseleggarann ya Pendidikan Dasar		156.000.000	1 Tahun	156.000.000	1 Tahun	221.522.000	SD Negeri Tidar 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
47	1.1.26.7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terselenggaraan nya Pendidikan Dasar		74.400.000	1 Kegiatan	74.400.000	1 Kegiatan	98.814.000	SD Negeri Kramat 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
48	1.1.26.8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terselenggaraan nya Pendidikan Dasar		75.200.000	1 Kegiatan	75.200.000	1 Kegiatan	84.514.000	SD Negeri Kramat 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
49	1.1.26.58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terseleggarann ya Pendidikan Dasar		146.400.000	1 Tahun	146.400.000	1 Tahun	186.925.000	SD Negeri Tidar 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
50	1.1.26.44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terselenggaraan ya Pendidikan Dasar		156.000.000	1 Tahun	156.000.000	1 Tahun	191.698.000	SD N Jurangombo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	1.1.26.45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		126.400.000	1 Tahun	126.400.000	1 Tahun	198.967.000	SD N Jurangombo 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
52	1.1.26.57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		144.000.000	1 Tahun	144.000.000	1 Tahun	170.030.000	SD Negeri Tidar 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
53	1.1.26.9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		102.400.000	1 Kegiatan	102.400.000	1 Kegiatan	124.893.000	SD Negeri Kramat 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
54	1.1.26.46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		148.000.000	1 Tahun	148.000.000	1 Tahun	181.042.000	SD N Jurangombo 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
55	1.1.26.56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		149.600.000	1 Tahun	149.600.000	1 Tahun	165.809.000	SD negeri Tidar 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
56	1.1.26.10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		111.200.000	1 Kegiatan	111.200.000	1 Kegiatan	159.518.000	SD Negeri Kramat 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
57	1.1.26.47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		158.400.000	1 Tahun	158.400.000	1 Tahun	209.820.000	SD N Jurangombo 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
58	1.1.26.55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		123.200.000	1 Tahun	123.200.000	1 Tahun	136.244.000	SD Rejowinangun Selatan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
59	1.1.26.54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Siswa		134.400.000	1 Tahun	134.400.000	1 Tahun	173.613.000	SD Rejowinangun Selatan 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
60	1.1.26.53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		116.800.000	1 Tahun	116.800.000	1 Tahun	138.354.000	SD Rejowinangun Selatan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	1.1.26.48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	114.606.000	SD N Magersari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
62	1.1.26.52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		145.600.000	1 Tahun	145.600.000	1 Tahun	174.330.000	SD Rejowinangun Selatan 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
63	1.1.26.49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		143.200.000	1 Tahun	143.200.000	1 Tahun	148.532.000	SD N Magersari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
64	1.1.26.51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terseleenggarannya Pendidikan Dasar		140.800.000	1 Tahun	140.800.000	1 Tahun	152.818.000	SD Rejowinangun Selatan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
65	1.1.26.50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		88.000.000	1 Tahun	88.000.000	1 Tahun	135.690.000	SD N Magersari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
66	1.1.26.11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		84.000.000	1 Kegiatan	84.000.000	1 Kegiatan	108.424.000	SD Negeri Potrobangsari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
67	1.1.26.12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		168.800.000	1 Kegiatan	168.800.000	1 Kegiatan	258.533.000	SD Negeri Potrobangsari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
68	1.1.26.13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		139.200.000	1 Kegiatan	139.200.000	1 Kegiatan	183.838.000	SD Negeri Potrobangsari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
69	1.1.26.14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	119.307.000	SD Negeri Potrobangsari 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
70	1.1.26.15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terselenggarakan Pendidikan Dasar		132.800.000	1 Kegiatan	132.800.000	1 Kegiatan	141.026.000	SD Negeri Wates 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	1.1.26.16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		124.000.000	1 Kegiatan	124.000.000	1 Kegiatan	218.637.000	SD Negeri Wates 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
72	1.1.26.17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		59.200.000	1 Kegiatan	59.200.000	1 Kegiatan	71.601.000	SD Negeri Wates 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
73	1.1.26.18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		116.800.000	1 Kegiatan	116.800.000	1 Kegiatan	132.781.000	SD Negeri Wates 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
74	1.1.26.19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terselenggaranya Pendidikan Dasar		60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	64.123.000	SD Negeri Wates 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Program prioritas RPJM
				TOTAL	52.760.061.000		52.464.067.000		55.477.634.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Kesehatan
 URUSAN : Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
	1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.333.199.000		1.880.549.000		1.981.655.000			
1	1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang dikelola	5 item	3.847.000	5 item	3.315.000	5 item	3.567.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan	12 bulan	302.016.000	12 bulan	199.980.000	12 bulan	202.440.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	53 unit	71.208.000	54 unit	19.910.000	53 unit	23.910.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	38 orang	507.368.000	33 orang	361.336.000	100%	395.116.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan dan jasa kebersihan	12 bulan	263.587.000	22 item; 2 orang	53.029.000	22 item; 2 orang	56.190.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	6 item	29.995.000	11 item	13.290.000	11 item	13.290.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60 item	49.193.000	47 item	27.316.000	47 item	27.316.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	17 item	16.449.000	18 item	11.839.000	100 %	15.339.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	10 item	12.112.000	10 item	10.000.000	10 item	7.086.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 bulan	10.874.000	12 bulan	11.400.000	12 bulan	11.400.000	DKK dan UPTD	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	1.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12.893.000	31 kali; 576 liter	11.389.000	31 kali; 576 liter	9.805.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	16 item	131.621.000	16 item	71.555.000	16 item	60.262.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
13	1.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	160 kali	310.724.000	211 kali	151.150.000	211 kali	212.610.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	1.2.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/ honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	44 orang	584.444.000	45 orang	906.240.000	45 orang	914.524.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	1.2.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	26.868.000	12 bulan	28.800.000	100%	28.800.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			179.287.000		626.936.000		584.195.000			
			Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%								
1	1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	52.619.000	4 gedung	70.080.000	4 gedung	73.080.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	59 unit	33.837.000	55 unit	34.535.000	100 %	17.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	70 unit	92.831.000	56 unit	50.708.000	100 %	17.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpenuhi			65 unit	0	16 unit	0	Dinas Kesehatan Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berkala kendaraan	53 unit		55 unit	471.613.000	100 %	354.202.000	DKK	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat terpenuhi				0	7 unit	36.000.000	Dinas Kesehatan Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.2.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung yang direhab				0	5 paket	67.050.000	Dinas Kesehatan Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur terpenuhi				0	23 unit	19.863.000	Dinas Kesehatan Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	1.2.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Kebutuhan daya listrik terpenuhi				0	3 paket	0	Dinas Kesehatan Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			52.332.000		44.452.000		44.452.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek cara pembuatan DUPAK	50 orang	9.075.000	50 orang	9.075.000	50 orang	9.075.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	300 orang	33.880.000	300 orang	23.827.000	300 orang	23.827.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.2.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek yang diterbitkan	400 dokumen SIP	9.377.000	400 dokumen SIP	11.550.000	400 dokumen SIP	11.550.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			76.411.000		64.025.000		64.025.000			
1	1.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	4 dokumen	27.186.000	4 dokumen	9.367.000	4 dokumen	9.367.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	1.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	2 dokumen	10.914.000	2 dokumen	5.357.000	2 dokumen	5.357.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	31.110.000	2 dokumen	28.751.000	2 dokumen	28.751.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	1.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD yang disusun	1 dokumen	7.201.000	1 dokumen	12.308.000	1 dokumen	12.308.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.2.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Jumlah dokumen Perubahan Renstra yang tersusun			1 dokumen	8.242.000	1 dokumen	8.242.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			2.760.045.000		3.406.998.000		3.406.998.000			
1	1.2.15.1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli	5 paket	2.541.000.000	5 paket	2.870.196.000	5 paket	2.870.196.000	Dinas Kesehatan	DAK dengan Pendamping DAU,	Percepatan
2	1.2.15.4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta sosialisasi untuk tenaga farmasi di RS, Apotek dan Klinik	50 orang	9.680.000	50 orang	8.700.000	50 orang	8.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.2.15.5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina	100 orang	29.427.000	60 orang	10.040.000	60 orang	10.040.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.2.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi	4 laporan	1.936.000	4 laporan	12.197.000	4 laporan	12.197.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.2.15.7	Pengadaan bahan kimia	Tersedianya bahan kimia	1 paket	149.519.000	1 paket	422.807.000	1 paket	422.807.000	Dinas Kesehatan	DBHCHT	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.2.15.8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	12 bulan	28.483.000	350 item	27.613.000	350 item	27.613.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan
7	1.2.15.9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Presentase Instalasi Farmasi	12 bulan		45	55.445.000	45 persen; 95	55.445.000	Instalasi farmasi	Dana Alokasi	Percepatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			13.379.721.000		20.301.562.000		20.749.047.000			
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%								
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%								
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%								
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%								
	1.2.16.3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah sarpras dan alkes puskesmas yang dibeli			0	0	26 unit	248.556.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
1	1.2.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	56 orang	22.385.000	56 orang	5.824.000	56 orang	5.824.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	400 orang	66.460.000	400 orang	255.134.000	400 orang	255.134.000	Kota Magelang	DBHCHT	SDGs
3	1.2.16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	30 orang	14.247.000	30 orang; 30 orang	33.000.000	30 orang; 30 orang	33.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
4	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan P3K yang dilaksanakan	180 kali	72.712.000	180 kali	100.000.000	180 kali	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.2.16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pengambilan sample lingkungan dan reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air kolam renang, alat medis dan udara	2000 sampel	344.850.000	2000 sampel	296.028.000	2000 sampel	376.028.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
6	1.2.16.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3 kegiatan	29.040.000	3 kegiatan	28.612.000	3 kegiatan	28.612.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	1.2.16.21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan yang dilaksanakan	2 Posko	28.097.000	2 posko	33.483.000	100%	33.483.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	1.2.16.22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	100 orang	14.367.000	100 orang	18.774.000	100 orang	18.774.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Mempertegas Skenario Kemitraan
10	1.2.16.23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	383 orang	42.350.000	383 orang	51.124.000	383 orang	51.124.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
11	1.2.16.24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	1 laporan	3.267.000	7 laporan	2.068.000	7 laporan	2.068.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	1.2.16.25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan	1 laporan	2.928.000	1 laporan	2.758.000	1 laporan	2.758.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	1.2.16.28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Terlaksanannya sosialisasi	1 kegiatan untuk 50 orang	18.150.000	150; 100 sampel dan 50 orang	10.113.000	150; 100 sampel dan 50 orang	10.113.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program 100-0-100
14	1.2.16.36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	29 unit	54.450.000	29 unit	69.143.000	29 unit	69.143.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
15	1.2.16.38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	2500 sampel	84.524.000	2500 sampel	228.259.000	2500 sampel	298.259.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
16	1.2.16.42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terpeliharanya kesehatan masyarakat Magelang	25000	11.138.797.000	25000 orang	7.225.000.000	25000 orang	7.157.380.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
17	1.2.16.44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan penanganan kasus emergency dan jambore PSC (Public Safety Center)	2 kegiatan	160.780.000	2 kegiatan	595.793.000	12 bulan	578.155.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Implem entasi Master plan Smartci ty
18	1.2.16.45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	terlaksannnya raker pemb kesda	2 kegiatan	16.679.000	1 kegiatan	15.252.000	1 kegiatan	15.252.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencan a
19	1.2.16.48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5 Puskesmas	965.000.000	5 puskesmas	2.469.000.000	5 puskesmas	2.469.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
20	1.2.16.52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatkan Keselamatan Ibu Dan bayi	12 bulan	174.595.000	12 bulan	162.896.000	12 bulan	162.896.000	Rumah Bersalin Paten	Dana Alokasi Umum	SDGs
21	1.2.16.53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Sosialisasi PTM	692 orang, 70 Sekolah	112.128.000	692 orang	131.776.000	692 orang	131.776.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Progra m priorita s RPJM
22	1.2.16.54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa	150 Orang	13.915.000	150 orang	41.232.000	150 orang	41.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencan a
23	1.2.16.56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Pelaksanan kegiatan UKM di Kota Magelang	12 bulan		12 bulan	567.000.000	12 bulan	567.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
24	1.2.16.57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya askep Paska Keguguran dan review kompetensi perawat	88 Orang		88 orang; 100 %	46.899.000	128 orang	113.466.000	Kota Magelang	DBHCHT	Rencan a
25	1.2.16.50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya prasarana dan alkes klinik Kesehatan Kota Magelang	1 paket		1 paket	3.500.000.000	1 paket	3.500.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Percep atan Pencap aian Indikat or Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
26	1.2.16.20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Pengadaan Ambulance, Genset, Alat Kesehatan	3 paket		4 paket	1.973.854.000	6 paket	1.973.854.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
27	1.2.16.59	Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK)	Alat deteksi dini da tindak lanjut kanker yang terbeli	1 paket		1 paket	87.050.000	1 paket	87.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
28	1.2.16.60	Pengadaan Peralatan Pos Pembinaan Terpadu (DAK)	Jumlah peralatan posbindu yang tersedia			118 paket	2.101.490.000	118 unit	2.101.490.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Program prioritas RPJM
29	1.2.16.61	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BOK dan Jampersal			12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.16.63	Purifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)					0		67.620.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			116.462.000		176.392.000		176.392.000			
			Cakupan pengawasan obat dan makanan	70%								
1	1.2.17.1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah, makanan dan minuman menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2020 yang diuji	550 sampel	31.460.000	550 sampel	26.800.000	550 sampel	26.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2	1.2.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	550 sampel	60.500.000	550 sampel	136.879.000	550 sampel	136.879.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
3	1.2.17.7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotek dan industri rumah tangga yang dibina	50 apotik dan PIRT 30	24.502.000	70; 40 apotek dan 30 IRTTP	12.713.000	70; 40 apotek dan 30 IRTTP	12.713.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			857.190.000		615.490.000		615.490.000			
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%								
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan promosi kesehatan melalui media	800 orang	200.860.000	1820 orang	187.669.000	1820 orang	187.669.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	1.2.19.10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	12 bulan	66.525.000	12 bulan	66.940.000	12 bulan	66.940.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Mempertuakan Implementasi Master plan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
3	1.2.19.11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PHBS	35000 Rumah Tangga	145.018.000	35000 RT	91.000.000	35000 RT	91.000.000	Kelurahan	DBH Pajak Rokok	SDGs, Program prioritas RPJM
4	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan kader posyandu dan penyehat tradisional (Hatra)	2 kegiatan	184.449.000	100 orang	74.010.000	100 orang	74.010.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
5	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	17 FGD dan Forkom	184.449.000	1560 orang	124.745.000	1560 orang	124.745.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.2.19.19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi informasi jaminan kesehatan masyarakat	595 orang	75.889.000	595 orang	71.126.000	595 orang	71.126.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			222.391.000		341.442.000		341.442.000			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100								
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100								
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31								
1	1.2.20.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, anemia, antropometri, pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk	850 Balita	176.157.000	850 balita	195.000.000	850 balita	195.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
2	1.2.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pembinaan Kader Masyarakat Sadar Gizi	70 orang	19.836.000	70 orang	14.773.000	70 orang	14.773.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program
3	1.2.20.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas dan posyandu	198	26.398.000	198 kader	21.668.000	198 kader	21.668.000	Kota Magelang	Dana Alokasi	SDGs
4	1.2.20.8	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	Banyaknya obat gizi yang dibeli	6 paket		6 paket	110.001.000	6 paket	110.001.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			128.838.000		157.044.000		157.044.000			
			Persentase rumah sehat	84,3%								
1	1.2.21.5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah pengambilan sample air	158 titik	43.997.000	209; 2 kegiatan (pertemuan pengelola tempat-tempat umum: 50 orang, pengambilan sampel ttu: 159)	33.534.000	209; 2 kegiatan (pertemuan pengelola tempat-tempat umum: 50 orang, pengambilan sampel ttu: 159)	33.534.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
2	1.2.21.6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Terlaksanannya Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	170 orang	84.841.000	17 kelurahan	123.510.000	17 kelurahan	123.510.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program 100-0-100
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1.225.584.000		1.241.724.000		1.241.724.000			
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100								
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100								
			Angka Kesakitan DBD	<50								
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104								
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90								
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%								
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS									
1	1.2.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk	100 lokus	241.469.000	100 lokus	240.570.000	100 lokus	240.570.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
2	1.2.22.6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantau jentik di 17 kelurahan dan 5 sosialisasi	2720 rumah	145.850.000	2720 rumah; 2720 rumah	92.025.000	2720 rumah; 2720 rumah	92.025.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
3	1.2.22.8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	1880 anak	157.899.000	1880 anak; 20194 anak; 30 orang	74.489.000	1880 anak; 20194 anak; 30 orang	74.489.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.2.22.9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200 kasus	22.865.000	200 kasus;	12.200.000	200 kasus; 200 kasus	12.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program
5	1.2.22.12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji yang dilaksanakan	300 orang	7.148.000	300 orang; 300 orang	44.000.000	300 orang; 300 orang	44.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
6	1.2.22.13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/ sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10500 anak	84.218.000	10500 anak; 10500 anak	51.970.000	10500 anak; 10500 anak	51.970.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
7	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	12 bulan	465.698.000	11 kegiatan	410.000.000	11 kegiatan	410.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
8	1.2.22.18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	110 orang	100.437.000	110 orang	41.421.000	110 orang	41.421.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program
9	1.2.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersedianya data TB yang valid dan akurat	4 dokumen		4 dokumen; 4 dokumen	33.290.000	422 paket	33.290.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
10	1.2.22.19	Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK)	Alat penyimpanan vaksin yang dibeli	21 unit		21 unit	201.580.000	21 unit	201.580.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
11	1.2.22.20	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)	Banyaknya bahan habis pakai pemeriksaan HIV yang terbeli	1 paket		1 paket	40.179.000	1 paket	40.179.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
	1.2.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.546.451.000		1.852.472.000		1.633.946.000			
			Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	82.50%								
			Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	60%								
			Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	80								
			Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100								
			Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	80%								
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	75								
1	1.2.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya desk sarana pelayanan kesehatan yang di data	1 dokumen	9.680.000	1 dokumen	10.727.000	1 dokumen	10.727.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.23.8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan	4 Laporan	42.955.000	4 laporan	36.523.000	4 laporan	36.523.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.2.23.9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	15 Tenaga Kesehata n Teladan	33.275.000	15 tenaga kesehata n teladan	30.022.000	15 tenaga kesehatan teladan	30.022.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
4	1.2.23.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Terlaksananya monev dana kapitasi	4 Laporan	77.836.000	20 laporan	31.337.000	20 laporan	31.337.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	1.2.23.13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Terakreditasi Laboratorium Kesehatan	1 Unit	599.009.000	5 unit	1.153.904.000	5 unit	982.298.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum, DAK	Program prioritas RPJM
6	1.2.23.14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan BLUD	5 Puskesmas	222.134.000	5 puskesmas	86.934.000	100%	86.934.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
7	1.2.23.15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas	5 Puskesmas	25.410.000	5 puskesmas	24.038.000	100%	24.038.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	1.2.23.16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah pengadaan barang jasa	Kegiatan	536.152.000	12 laporan	478.987.000	12 laporan	432.067.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			12.523.000		12.348.000		12.348.000			
			Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%								
			Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%								
			Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	1.2.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesda)	4 laporan	12.523.000	4 laporan	12.348.000		12.348.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penang gulangan Kemiskinan
	1.2.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			0		280.840.000		633.478.000			
3	1.2.25.27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)	Terpenuhinya pelayanan kegawatdaruratan medik bagi masyarakat kota magelang			1 unit	280.840.000	1 unit	298.478.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Implem entasi Master plan Smartci ty
	1.2.25.28	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tanah yang terbeli					1 paket	335.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Implem entasi Master plan Smartci ty
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			79.557.000		52.375.000		52.375.000			
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%								
1	1.2.28.2	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi dan monev penyakit menular	680 orang, dan 30 petugas	79.557.000	680 orang dan 30 petugas; 340 orang	52.375.000	680 orang dan 30 petugas; 340 orang	52.375.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Akomo dasi Musren bang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			111.591.000		109.463.000		109.463.000			
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%								
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%								
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%								
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%								
1	1.2.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK dan 1 lomba balita sehat	160 orang, 34 Balita	24.338.000	160 orang, 34 balita	39.463.000	160 orang, 34 balita	39.463.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.29.9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3 paket	87.253.000	3 paket	70.000.000	3 paket	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			35.672.000		138.425.000		138.425.000			
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%								
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%								
1	1.2.30.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5 Laporan	3.045.000	5 laporan	3.056.000	5 laporan	3.056.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
2	1.2.30.8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Penyuluhan Lansia	500 lansia, 40 kader	32.627.000	500 lansia, 40 kader	135.369.000	500 lansia, 40 kader	135.369.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.2.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			56.204.000		54.563.000		54.563.000			
			Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	1.2.31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	80 orang	18.997.000	80 orang	19.911.000	80 orang	19.911.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.31.3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya Pengawasan Makanan Di Rumah Makan dan Restoran	30 restaurant	7.865.000	30 restaurant	6.878.000	30 restaurant	6.878.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.2.31.5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	80 IRTP	29.342.000	80 IRTP	27.774.000	80 IRTP	27.774.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			998.119.000		617.088.000		617.088.000			
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%								
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%								
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%								
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%								
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	380 orang	119.592.000	380 orang	92.717.000	380 orang	92.717.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.32.5	Pembinaan dukun bayi	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	12 orang	7.327.000	12 orang	6.656.000	12 orang	6.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.2.32.6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	4 kali	87.428.000	4 kali	45.465.000	4 kali	45.465.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Terlaksananya penyuluhan kelurahan peserta penyuluhan	3 kali	275.546.000	3 kali	30.250.000	3 kali	30.250.000	Kecamatan di wilayah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas
5	1.2.32.8	Jaminan Persalinan	Terjaminnya pelayanan kesehatan	450 orang	508.226.000	510 orang	442.000.000	510 orang	442.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi	Penang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			6.975.728.000		12.806.505.000		14.723.419.000			
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA								
			Meningkatnya mutu pelayanan									
			Meningkatnya mutu pelayanan									
1	1.2.33.5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan	12 bulan	1.700.000.000	12 bulan	1.463.400.000	12 bulan	1.922.153.000	Puskesmas Magelang Selatan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM
2	1.2.33.6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Jurangombo	12 bulan	1.362.097.000	12 bulan	1.225.200.000	12 bulan	1.450.449.000	Puskesmas Jurangombo	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM
3	1.2.33.7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah	12 bulan	1.454.554.000	12 bulan	1.653.000.000	12 bulan	3.139.273.000	Puskesmas Magelang Tengah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM
4	1.2.33.8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Kerkopan	12 bulan	569.319.000	12 bulan	958.019.000	12 bulan	1.238.922.000	Puskesmas Kerkopan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM
5	1.2.33.9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	12 bulan	1.889.758.000	12 bulan	1.622.959.000	12 bulan	2.957.267.000	Puskesmas Magelang Utara	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM
6	1.2.33.10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D	Rumah sakit tipe D dapat beroperasi dengan baik			9 bulan	5.883.927.000	5 bulan	4.015.355.000	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			0		1.650.000.000		1.650.000.000			
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%								
1	1.2.26.34	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit	Pelayanan kesehatan pada masyarakat			11 paket	1.650.000.000	11 paket	1.650.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Implem entasi Master plan Smartci ty
				TOTAL	31.147.305.000		46.430.693.000		48.987.569.000			

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

URUSAN : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			100.000.000.000		70.800.207.000		87.428.207.000				
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%		20%		20%					
1	1.2.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah sakit	55.000.000.000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah sakit	23.893.615.000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah sakit	23.893.615.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.26.18	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah sakit		Terpenuhinya kebutuhan alat rumah sakit	1.906.592.000	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah sakit	1.906.592.000	RSUD Tidar Kota Magelangn	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.26.1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	Terpenuhi nya kebutuhan sarana rumah sakit	45.000.000.000	Terpenuhi nya kebutuhan sarana rumah sakit	45.000.000.000	Terpenuhi nya kebutuhan sarana rumah sakit	61.628.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			155.000.000.000		155.000.000.000		170.000.000.000				
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA		AA		AA					
1	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	Terlaksananya Layanan	Terpenuhi nya	155.000.000.000	Terpenuhi nya	155.000.000.000	Terpenuhi nya sarana,	170.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan	95	Percepatan Pencapaian
				TOTAL	255.000.000.000		225.800.207.000		257.428.207.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 URUSAN : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.368.336.000		1.491.584.000		1.492.338.000				
1	1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya administrasi surat menyurat	12 Bulan	220.000	12 Bulan	275.000	12 Bulan	100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	188.760.000	12 Bulan	336.000.000	12 Bulan	345.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan	31.544.000	1 Kegiatan	45.050.000	1 Kegiatan	45.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	58.575.000	12 Bulan	74.580.000	12 Bulan	25.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksanannya jasa pengelola keuangan	12 bulan	325.000.000	12 bulan	315.011.000	12 bulan	315.011.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	156.908.000	12 Bulan	148.065.000	12 Bulan	157.209.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	25.861.000	12 Bulan	25.861.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	45.981.000	12 Bulan	18.397.000	12 Bulan	19.479.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	15.400.000	12 Bulan	8.398.000	12 Bulan	8.398.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12 Bulan	4.356.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	2.280.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas	12 Bulan	3.080.000	12 Bulan	1.968.000	12 Bulan	1.860.000	DPU Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	56.235.000	12 Bulan	44.034.000	12 Bulan	54.484.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
13	1.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	328.938.000	12 Bulan	213.360.000	12 Bulan	213.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
14	1.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga honorar daerah	12 bulan	50.371.000	12 bulan	246.659.000	12 bulan	268.270.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
15	1.3.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian	12 Bulan	36.968.000	12 Bulan	10.926.000	12 Bulan	10.926.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.044.621.000		12.861.690.000		12.891.250.000				
1	1.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	185.440.000	12 Bulan	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	568.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	285.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	13.412.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	16.973.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.3.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12	152.226.000	12	100.000.000	12	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.3.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Wanita	1 paket	3.964.010.000	1 paket	12.225.000.000	1 paket	12.225.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
7	1.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Tersedianya daya listrik yang mencukupi kebutuhan kantor				56.250.000		56.250.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
8	1.3.2.16	Perencanaan Bangunan Gedung	tersedianya dokumen perencanaan bangunan gedung DPUPR				0		0	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	1.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC di Gedung Wanita				0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	ExBAU
	1.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0		92.354.000				
1	1.3.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas karyawan DPUPR dalam melaksanakan tupoksi				0		92.354.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			139.394.000		102.290.000		102.290.000				
1	1.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 dokumen	44.035.000	4 dokumen	16.654.000	4 dokumen	16.654.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.139.000	1 dokumen	9.139.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	8.750.000	1 dokumen	10.636.000	1 dokumen	10.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2 dokumen	26.559.000	2 dokumen	19.014.000	2 dokumen	19.014.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	24 dokumen	44.771.000	24 dokumen	24.037.000	24 dokumen	24.037.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya LKj IP	8 buku	7.279.000	8 buku	7.810.000	8 buku	7.810.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.3.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	tersedianya dokumen perubahan renstra OPD				15.000.000		15.000.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			0		2.110.000.000		2.110.000.000				
					24,073,300,001								
			Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1342 m		1342 m		1342 m					
			Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66.34%		66.34%		66.34%					
1	1.3.15.25	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Panjang jalan baru yang dibangun	700 m'		700 m'	2.110.000.000	700 m'	2.110.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
	1.3.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			500.000.000		492.000.000		516.066.000				
			Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%		86%		86%					
			Jumlah shipon yang dibangun	7		7		7					
1	1.3.16.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3 kecamatan	500.000.000	3 kecamatan	492.000.000	3 kecamatan	516.066.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			6.900.000		25.000.000		25.000.000				
			PERPUS		18,500,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,5		0,5					
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terkelola dan tersimpannya arsip	12 Bulan	6.900.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			16.915.000.000		18.769.285.000		18.745.494.000				
			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	91%		91%		91%					
			Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,5%		88,5%		88,5%					
			Rasio ketercukupan PJU	65%		65%		65%					
			Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%		100%		100%					
			Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%		80%		80%					
1	1.3.18.94	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket		1 paket	444.000.000	1 paket	444.000.000	Jl. kalibening III Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.18.95	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan penghuni	1 paket		1 paket	632.000.000	1 paket	632.000.000	jalan perum depkes Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.18.3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	12 bulan	915.000.000	12 bulan	882.000.000	12 bulan	752.059.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
4	1.3.18.23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatnya kualitas jalan di Kota Magelang	4 ruas jalan	16.000.000.000	4 ruas jalan	15.732.741.000	4 ruas jalan	15.732.741.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	85	Program prioritas RPJM
5	1.3.18.73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik	5 ruas		5 ruas	1.078.544.000	5 ruas	1.078.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.18.75	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	Tersedianya dokumen perencanaan/DED pemeliharaan jalan				0		106.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB
	1.3.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			100.000.000		82.000.000		135.750.000				
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	84%		84%		84%					
1	1.3.24.10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	12 bulan	100.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	82.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	1.3.24.48	Identifikasi Saluran Irigasi Kota Magelang	Tersedianya dokumen saluran irigasi Kota Magelang				0		53.750.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB
	1.3.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			0		1.715.000.000		1.715.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase sungai dan suber daya air dalam keadaan baik	100%		100%		100%					
1	1.3.26.11	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai	terwujudnya talud pengaman sungai dalam kondisi baik	1 paket		1 paket	1.715.000.000	1 paket	1.715.000.000	Kel Magelang Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
	1.3.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			0		24.387.069.000		24.350.770.000				
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	4 kawasan		4 kawasan		4 kawasan					
1	1.3.29.73	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	12 bulan		12 bulan	963.912.000	12 bulan	1.118.032.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	1.3.29.74	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya jogging track dan lapangan tenis indoor tahap 2 kawasan sport centre	2 paket		2 paket	11.482.738.000	2 paket	11.482.738.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
3	1.3.29.67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Terwujudnya monumen Satu Nusa Satu Tanah Air	1 monumen		1 monumen	1.250.000.000	1 monumen	1.250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	1.3.29.70	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	Terbangunnya Kolam Renang Yang Representatif	100%		100%	10.500.000.000	100%	10.500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	1.3.29.75	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)	terbangunnya gardu pandang Gunung Tidar	1 paket		1 paket	190.419.000	1 paket	0	Gunung Tidar Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1.3.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			132.000.000		128.521.000		128.521.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%		74%		74%					
1	1.3.31.4	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	80 orang	85.000.000	80 orang	44.456.000	80 orang	44.456.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.31.5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	50	17.000.000	50	22.012.000	50	22.012.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.31.2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12	30.000.000	12	38.288.000	12	38.288.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.31.1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Tersampaikannya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi	80 orang		80 orang	23.765.000	80 orang	23.765.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.33	Program pengawasan jasa konstruksi			500.000.000		482.388.000		482.388.000				
			Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%		25%		25%					
1	1.3.33.6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	431.816.000	12 Bulan	431.816.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Pemberantasan Korupsi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.33.3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	1		1	24.572.000	1	24.572.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.33.7	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Terpenuhinya Nilai Taksiran Barang Milik Daerah	12 bulan		12 bulan	26.000.000	12 bulan	26.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	1.3.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			500.000.000		9.323.650.000		14.493.730.000				
1	1.3.51.31	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	Terpeliharanya saluran drainase yang dapat menampung air hujan	1 paket		1 paket	1.990.000.000	1 paket	1.990.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.51.76	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara	tersedianya saluran drainase				500.000.000		500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
3	1.3.51.72	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin	tersedianya saluran drainase				575.300.000		575.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
4	1.3.51.74	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya	tersedianya saluran drainase				685.300.000		685.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
5	1.3.51.75	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang	tersedianya saluran drainase				1.064.000.000		1.064.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
6	1.3.51.60	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	Meningkatnya saluran drainase yang baik	200 m'		200 m'	1.609.825.000	200 m'	1.609.825.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
7	1.3.51.73	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari	tersedianya saluran drainase				740.000.000		740.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.3.51.25	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan	tersedianya saluran drainase		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.3.51.34	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban	tersedianya saluran drainase				234.225.000		234.225.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.3.51.63	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	meningkatkan saluran drainase untuk menampung air hujan	1 paket		1 paket	1.425.000.000	1 paket	1.425.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Akomodasi Musrenbang
11	1.3.51.64	Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)	meningkatkan saluran drainase untuk menampung air hujan	1 paket		1 paket	0	1 paket	5.170.080.000	Saluran Drainase Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	99	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.52	Program Perencanaan Tata Ruang			440.000.000		869.269.000		913.401.000				
			Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%		100%		100%					
			Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%		100%		100%					
			Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%		100%		100%					
			Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		1,5 ha		1,5 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh										
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		2,5 ha		2,5 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		2,5 ha		2,5 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		2 ha		2 ha					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		1,5 ha		1,5 ha					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		1 ha		1 ha					
1	1.3.52.25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	6 laporan	200.000.000	6 laporan	162.830.000	6 laporan	165.442.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.52.18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah Raperda RDTR	2 raperda	240.000.000	2 raperda	319.661.000	2 raperda	361.181.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.52.7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang	2 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)		2 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)	386.778.000	2 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)	386.778.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
	1.3.53	Program Pemanfaatan Ruang			72.000.000		234.990.000		188.916.000				
			Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	25%		25%		25%					
			Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	6%		6%		6%					
1	1.3.53.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200 Rekomendasi Teknis	50.000.000	200 Rekomendasi Teknis	175.268.000	200 Rekomendasi Teknis	175.268.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.53.5	Survey dan pemetaan	jumlah bangunan yang terpetakan	5	22.000.000	5	29.648.000	5	13.648.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.53.7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3	0	3	30.074.000	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			130.000.000		207.141.000		209.083.000				
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	33%		33%		33%					
1	1.3.54.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	12	100.000.000	12	158.137.000	12	160.079.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.54.9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	Tersedianya Kajian Teknis Andal Teknis	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	49.004.000	12 Bulan	49.004.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
	1.3.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			0		14.019.000		14.019.000				
1	1.3.22.5	Penyusunan data dan profil OPD	tersedianya dokumen data capaian dan profil OPD				14.019.000	2 dokumen	14.019.000	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	25.848.251.000		73.295.896.000		78.606.370.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 URUSAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.368.336.000		785.099.000		865.565.000				
1	1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12 Bulan	220.000	12 Bulan	150.000		150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	188.760.000	12 bulan	76.220.000		76.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.4.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perlengkapan Hut RI	1 kegiatan	31.544.000	1 kegiatan	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	48 unit	58.575.000	48 unit	5.247.000	12 unit	5.247.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12 bulan	325.000.000	12 bulan	222.961.000	12 bulan	228.675.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 bulan	156.908.000	12 bulan	110.777.000	12 bulan	117.089.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	66.000.000	12 bulan	16.335.000		16.335.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	45.981.000	12 bulan	11.314.000		11.314.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	15.400.000	12 bulan	4.940.000		4.940.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12 Bulan	4.356.000	12 Bulan	3.360.000		3.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12 bulan	3.080.000	12 bulan	1.973.000		1.973.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai	12 bulan	56.235.000	12 bulan	25.802.000		25.802.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	328.938.000	12 bulan	175.125.000	12 Bulan	233.528.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	1.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	12 bulan	50.371.000	12 bulan	117.219.000	12 bulan	127.256.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	1.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian(K GB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12 bulan	36.968.000	12 bulan	13.676.000		13.676.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.160.611.000		348.790.000		947.705.000				
1	1.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	330.000.000	12 bulan	199.010.000		199.010.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	568.000.000	12 bulan	132.785.000	12 Bulan	162.733.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	13.412.000	12 bulan	4.000.000	12 Bulan	9.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	16.973.000	12 bulan	8.000.000	12 Bulan	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor	2 Unit	70.000.000	2 Unit	0	2 Unit	15.188.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	1.4.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	3 Unit	10.000.000	3 Unit	0	3 Unit	19.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	1.4.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Terpeliharanya alat berat	12	152.226.000	12	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.4.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	Alat-alat pertukangan	5	0	5	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	1.4.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Jaringan listrik menuju stadion moch soebroto	1	0	1	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	1.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	5 jenis		5 jenis	4.995.000		4.995.000	Disperkim	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	10 Unit		10 Unit	0	10 Unit	124.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	1.4.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	400.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			112.785.000		118.054.000		118.054.000				
1	1.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4 laporan	44.035.000	4 laporan	18.234.000		18.234.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.4.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1 laporan	8.000.000	1 laporan	7.019.000		7.019.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.4.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 laporan	8.700.000	1 laporan	10.023.000		10.023.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020	2 dokumen		2 dokumen	33.000.000		33.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2 dokumen	44.771.000	2 dokumen	35.276.000		35.276.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1 laporan	7.279.000	1 laporan	4.458.000		4.458.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.4.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Laporan Hibah/bansos	2 dokumen		2 dokumen	10.044.000	1 dok	10.044.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.4.15	Program Pengembangan Perumahan			2.450.000.000		4.468.943.000		5.419.456.000				
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	98		98							
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	3		3							
1	1.4.15.42	Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa	Tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa				22.960.000	1 dok	22.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.4.15.45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Khusus	Tersedianya sarana prasarana rumah khusus yang baik				0	3 paket	558.100.000	Rusus Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.4.15.29	Sosialisasi perumahan	Tersosialisasinya kegiatan perumahan di kota magelang	197 peserta		197 peserta	22.247.000		22.247.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.4.15.14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	3 Rusunawa	1.300.000.000	3 Rusunawa	1.221.882.000		1.323.427.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.4.15.17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitas bantuan Hukum	12 bulan		12 bulan	436.440.000		436.440.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	1.4.15.41	Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)	Terwujudnya dokumen UKL-UPL				200.000.000	4 dokumen	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	1.4.15.25	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	Tersedianya jalan akses menuju Rusunawa Tidar Utara	150 m		150 m	549.984.000		549.984.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.4.15.30	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	terlaksananya publikasi perumahan dan kawasan permukiman	6 kali		6 kali	11.944.000		11.944.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	1.4.15.16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rusunawa	Tersedianya sarana prasarana rusunawa yang baik		0		0	23 unit +1 PAKET CCTV	119.458.000	Rusunawa Potrobangsari, Rusunawa Tidar Utara, Rusun Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
10	1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi stakeholder perumahan untuk updating data perumahan	17 Kelurahan	50.000.000	17 Kelurahan	54.860.000		54.860.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.4.15.11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis, monev dan fasilitasi kegiatan Rehab Rumah Swadaya	250 RTLH	100.000.000	250 RTLH	210.707.000		210.707.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
12	1.4.15.10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	Terlaksananya pembangunan pagar, jalan halaman, bangunan gedung, penataan lingkungan, cctv, taman, mainan outdoor, jaringan listrik	3 Rusunawa	1.000.000.000	3 Rusunawa	1.166.374.000		1.312.624.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	1.4.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data RTLH	29000 rumah	0	29000 rumah	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
14	1.4.15.20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendampingan Teknis Kelompok kerja PKP	12 bulan		12 bulan	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	1.4.15.39	Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di magelang				83.500.000	160 RTLH	83.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
16	1.4.15.27	Pengelolaan Rumah Khusus	Terkelolanya bangunan rumah khusus	12 bulan		12 bulan	83.558.000		108.718.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	1.4.15.40	Penyusunan Konsep Rancangan Perwal tentang Penghunian Rumah Khusus	Terwujudnya Rancangan Perwal Rumah Khusus				22.960.000	1 dok	22.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	1.4.15.12	Penyusunan Database Perumahan	Terciptanya tertib data perumahan MBR	1 Kecamatan		1 Kecamatan	323.252.000		323.252.000	Kec. Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.4.15.5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terselenggaranya koordinasi dengan pengembang dan perbankan dalam rangka penyediaan perumahan	17 Kelurahan		17 Kelurahan	58.275.000		58.275.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	1.4.15.46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Khusus	Tersedianya Sarana prasarana Rumah khusus		0		0	0	0	Rumah Khusus Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			839.000.000		7.688.134.000		6.337.310.000				
					4,068,071,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitas	24 KPP 200 orang	39.000.000	24 KPP 200 orang	37.459.000		37.459.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Program prioritas RPJM
2	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terbangunnya MCK Umum dan IPAL untuk SR masyarakat sekitar	6 unit	800.000.000	6 unit	541.500.000	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.4.16.29	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah	Tersedianya IPAL di Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan	6 unit		6 unit	357.000.000	0	0	Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
4	1.4.16.30	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara	Tersedianya IPAL di Kelurahan Kedungsari	2 unit		2 unit	120.000.000	0	0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.4.16.31	Pembangunan SPALD-S (DAK)	terbangunya IPAL Setempat yang memadai	21 unit		21 unit	1.494.800.000		1.494.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program 100-0-100
6	1.4.16.28	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan	Tersedianyar IPAL di Kelurahan Tidar Utara	2 unit		2 unit	120.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
7	1.4.16.8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Pendampingan seleksi lokasi SLBM perencanaan dan pengawasan	11 lokasi		11 lokasi	29.165.000		29.165.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
8	1.4.16.56	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Meningkatnya kesehatan masyarakat				2.730.000.000	2 jenis	2.730.000.000	Kota Magelang	Banprov & DAU		Program 100-0-100
9	1.4.16.22	Pembangunan sistem sanitasi setempat	Terbangunnya IPAL Setempat	44 unit		44 unit	667.000.000		667.000.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
10	1.4.16.24	Lomba Sanitasi	Terlaksananya lomba sanitasi	24 KPP		24 KPP	29.728.000		29.728.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
11	1.4.16.16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan pembangunan sarpras sanitasi	2 unit		2 unit	212.324.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	1.4.16.32	Pembangunan SPALD-T (DAK)	terbangunya IPAL Komunal yang memadai	2 Unit		2 Unit	1.349.158.000		1.349.158.000	Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Wates	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program 100-0-100
13	1.4.16.33	Pembangunan IPAL Komunal (BANPROV)	IPAL Komunal	2 Unit		2 Unit	0	0	0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Program 100-0-100
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			20.105.000.000		5.702.628.000		5.712.628.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	45%		45%							
1	2.4.16.11	Penilaian Harga Tanah	Adanya harga tanah	1	55.000.000	1	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.4.16.12	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi warga yang lahannya terkena dampak kegiatan	100 KK	50.000.000	100 KK	0	0	0	Kampung Nambangan Kel. Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.4.16.5	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan lahan pengembangan Sport Center dan Kawasan Cangkuk	2 lokasi	20.000.000.000	2 lokasi	550.000.000		550.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	2.4.16.8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Terwujudnya legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah milik Pemda	4 sertifikat		4 sertifikat	55.787.000	4 Sertifikat	65.787.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.4.16.14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk lokasi pembangunan Rusunawa dan Rumah Khusus	2 Lahan		2 Lahan	5.072.272.000		5.072.272.000	Kel. Gelangan dan Kel. Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.4.16.16	Relokasi warga yang terdampak program pemerintah	Terlaksananya relokasi warga terdampak program pembangunan	100 KK		100 KK	24.569.000		24.569.000	Kel Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan			40.625.000		42.810.000		59.327.000				
1	1.4.17.8	Sosialisasi Keciaptakaryaan	Terlaksananya sosialisasi permukiman dan perumahan dan keikutsertaan publikasi di karnaval	300 peserta dan 1 karnaval	40.625.000	300 peserta dan 1 karnaval	42.810.000		59.327.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
2	1.4.17.2	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	meningkatnya keswadayaan masyarakat	2 kegiatan		2 kegiatan	0	0	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			6.900.000		6.900.000		6.900.000				
			PERPUS		18,500,000								
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,5							
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 bulan	6.900.000	12 bulan	6.900.000		6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			260.980.000		885.948.000		1.092.948.000				
1	1.3.30.5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	Terpeliharanya jalan dan saluran air lingkungan	12 bulan	260.980.000	12 bulan	411.150.000		411.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya MCK se Kota Magelang	5 kelurahan (Gelangan, Magelang, JumboSel, Tidar Selatan, Rejo Utara)			294.798.000		294.798.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.30.24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Permukiman Kota Magelang	Terlaksana Pelaporan Kegiatan Infrastruktur permukiman kota Magelang yang baik				47.000.000	1 kegiatan	47.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.3.30.32	Pemeliharaan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan	Pemeliharaan saluran drainase gorong-gorong kota magelang		0			100%	207.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.3.30.22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	Terlaksananya fasilitasi Satker PIP dan LKM Kota Magelang	12 bulan		12 bulan	77.000.000		77.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.30.21	Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya Perencanaan DED				56.000.000	1 paket	56.000.000	Kel Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.3.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			1.574.094.000		1.336.600.000		999.550.000				
1	1.3.35.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	1.574.094.000	1 paket	113.700.000		113.700.000	RW. 5, 7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.35.78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya Rehab Saluran Drainase	1 paket		1 paket	114.000.000	2 paket	204.000.000	RW. 12	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.35.77	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	114.000.000		114.000.000	RW. 11	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.35.73	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	114.000.000		114.000.000	RW. 7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.35.70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terlaksananya Rehab Saluran drainase	1 paket		1 paket	168.000.000		168.000.000	RW. 4	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.35.57	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	0	0	0	RW. 4	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.35.56	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	103.000.000		103.000.000	RW. 3	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.35.69	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terehabnya Saluran drainase	1 paket		1 paket	427.050.000	0	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
9	1.3.35.63	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terehabnya jalan	1 paket		1 paket	106.400.000		106.400.000	RW X	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.35.76	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terehabnya Saluran Drainase	1 paket		1 paket	76.450.000	1 paket	76.450.000	RW X	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			0		850.050.000		850.050.000				
1	1.3.36.14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	100.500.000		100.500.000	RW. 6	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.36.46	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terehabnya Saluran Drainase	1 paket		1 paket	285.000.000		285.000.000	RW. 5	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.36.39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	154.000.000		154.000.000	RW. 6	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.36.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terehabnya jalan lingkungan	1 paket		1 paket	187.000.000		187.000.000	RW. V	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.36.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	123.550.000		123.550.000	RW. VIII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			670.058.000		1.764.950.000		1.764.950.000				
1	1.3.37.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Saluran drainase	1 paket	670.058.000	1 paket	483.300.000		483.300.000	RW. 8, 9	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.37.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	198.000.000		198.000.000	RW. VII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.37.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	486.000.000		486.000.000	RW. IV	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.37.52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Tersedianya aksesibilitas saluran drainase dan gorong-gorong yang baik				76.450.000		76.450.000				
								1 paket		RW VI	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.37.50	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	521.200.000		521.200.000	RW. IV	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			0		763.150.000		702.274.000				
1	1.3.38.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	289.700.000		289.700.000	RW. 7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	191.500.000		47.500.000				
								1 Paket		RW. 6	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.38.69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	86.250.000		86.250.000	RW. 2	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan	1 Paket		1 Paket	0	0	0	RW. II	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.38.68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	138.200.000		138.200.000	RW. II	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.38.79	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	57.500.000		57.500.000	RW. XIII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.38.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Lancarnya saluran Air Drainase	70 m		70 m	0	70 m	49.758.000	Kelurahan Tidar Utara RW VII RT 02	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.38.4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	0	259.4 m2	33.366.000	Kelurahan Tidar Utara RW IV RT 1	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan				0		0	100.732.000				
1	1.3.39.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terehabnya saluran Saluran drainase			0		0	35.000.000	RW 2 Kel Tidar Sealatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.39.54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkungan	90 m		90 m		0	23.000.000	Kelurahan Tidar Selatan RW V RT 1	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.39.61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan	188 m2		188 m2		0	42.732.000	Kelurahan Tidaar Selatan RW XII RT 2	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates				90.983.000			711.900.000				
1	1.3.40.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran drainase	1 paket		1 paket	77.000.000		77.000.000	RW. 2	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.40.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket		90.983.000	1 Paket		378.850.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.40.50	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	terehabnya Jalan Lingkungan	1 Paket		1 Paket	128.000.000		128.000.000	RW. I	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.40.56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	57.250.000		57.250.000	RW. 07	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.40.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya aksesibilitas saluran drainase dan gorong-gorong yang baik				70.800.000	1 paket	70.800.000	RW I	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			408.671.000		490.850.000		525.850.000				
1	1.3.41.44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	408.671.000	1 paket	168.500.000		168.500.000	RW. 1 dan 3	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.30	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terehabnya Jalan Lingkungan		0		0	1 paket	35.000.000	RW I Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.41.40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran drainase	1 paket		1 paket	184.600.000		184.600.000	RW. 4	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.41.32	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Aspal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	137.750.000		137.750.000	RW. III	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
	1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			321.440.000		493.300.000		593.300.000				
1	1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	321.440.000	1 paket	115.400.000		115.400.000	RW. 1, 7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.55	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran drainase		0		0	1 paket	100.000.000	RW 4 Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.42.52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	78.000.000		78.000.000	RW. 1	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.42.56	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran drainase	1 paket		1 paket	86.600.000		86.600.000	RW. 5	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.46	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Jalan Paving	1 paket		1 paket	35.100.000		35.100.000	RW. 5	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.42.54	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terehabnya Saluran drainase	1 paket		1 paket	178.200.000		178.200.000	RW. 3	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			155.394.000		368.900.000		200.400.000				
1	1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	155.394.000	1 paket	168.500.000	0	0	RW. 3, 5	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase	1 paket		1 paket	57.700.000		57.700.000	RW. 8	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	142.700.000		142.700.000	RW. 7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
	1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			0		1.948.975.000		1.364.525.000				
1	1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehab jalan lingkungan	1 paket	0	1 paket	563.500.000		563.500.000	RW. 3 dan 5	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	150.000.000		150.000.000	RW. 5	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.47	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Aspal dan Paving	1 paket		1 paket	249.125.000		249.125.000	RW. 2	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	187.900.000		187.900.000	RW. 2	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran drainase	1 paket		1 paket	798.450.000		214.000.000	RW. 3	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
	1.3.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			0		390.040.000		390.040.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.45.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket		1 Paket	390.040.000		390.040.000	RW. VII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			825.599.000		688.550.000		716.550.000				
1	1.3.46.21	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terlaksananya pembangunan sal drainase gorong gorong RW IX		0		0	1 paket	80.000.000	RW IX	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
2	1.3.46.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	825.599.000	1 paket	287.090.000		287.090.000	RW. 5, 10	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.46.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	112.000.000	0	0	RW. 11	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.46.66	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Lancarnya aliran air				46.750.000	1 paket	46.750.000	RW V	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.3.46.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terehabnya Jalan Lingkungan	1 Paket		1 Paket	242.710.000		242.710.000	RW. VI	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.46.9	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan RW IX		0		0	1 paket	60.000.000	RW IX	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			0		508.600.000		625.600.000				
1	1.3.47.116	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Lancarnya Saluran Drainase				0	90 m	82.000.000	Kelurahan Rejowinangun Utara RW X	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.47.105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	jalan lingkungan	1 paket		1 paket	55.400.000		55.400.000	RW. 18	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.47.104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	Terehabnya Jalan Lingkungan		0		0	1 paket	35.000.000	RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.47.115	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Lancarnya aliran air				75.600.000	1 paket	75.600.000	RW IX	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.3.47.117	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase	1 paket		1 paket	183.450.000		183.450.000	RW XI	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.47.53	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	terpeliharanya jalan dan jembatan	1 paket		1 paket	147.400.000	1 paket	147.400.000	RW XI	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.47.88	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Aksebilitas meningkat				46.750.000	1 paket	46.750.000	RW III	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			0		235.100.000		353.100.000				
1	1.3.48.79	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	Terlaksananya Rehab Saluran drainase dan gorong-gorong				70.800.000	1 paket	70.800.000	RW XIII	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.48.67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terehabnya Saluran drainase dan gorong gorong		0		0	1 paket	118.000.000	RW 1 Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.48.56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	meningkatnya kualitas jalan lingkungan di kelurahan RW III				93.500.000	1 paket	93.500.000	RW III	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.3.48.65	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	meningkatnya kualitas jalan lingkungan di kelurahan RW XII	1 paket		1 paket	70.800.000		70.800.000	RW. 12	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			125.267.000		575.050.000		575.050.000				
1	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	125.267.000	1 paket	171.000.000		171.000.000	RW. 1, 3, 8	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.49.39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	121.300.000		121.300.000	RW. 6	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.49.47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran lingkungan	1 paket		1 paket	169.000.000		169.000.000	RW.7	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.49.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terehabnya Saluran drainase	1 paket		1 paket	113.750.000		113.750.000	RW 7	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1.3.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			0		628.500.000		760.500.000				
1	1.3.50.49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	162.500.000		162.500.000	RW. 8	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase lingkungan	1 paket		1 paket	105.500.000		105.500.000	RW. 8	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.50.52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab Saluran drainase		0		0	1 paket	90.000.000	RW I Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.3.50.48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terehabnya Jalan Lingkungan	2 paket		2 paket	169.000.000	600 m2	211.000.000	RW VII	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.50.43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket		1 paket	191.500.000		191.500.000	RW II	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.3	Program peningkatan disiplin aparatur			31.150.000		11.784.000		11.784.000				
			Meningkatkan Disiplin Aparatur	3 jenis		3 jenis							
1	1.4.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam lapangan	10 THL	31.150.000	10 THL	11.784.000		11.784.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		40.000.000		40.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber daya Aparatur OPD	1 kegiatan		1 kegiatan	40.000.000		40.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			1.575.000.000		1.861.107.000		1.926.107.000				
			Persentase penduduk berakses air minum	97		97							
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	89		89							
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	9		9							
1	1.3.27.16	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Limbah Domestik	Terwujudnya peraturan tentang pengelolaan limbah domestik		0		65.000.000	1 dok	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.27.17	Penyusunan Profil Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terwujudnya infrastruktur SPAM yang baik				56.000.000	1 dok	56.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
3	1.3.27.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Terlaksananya pendampingan akses air minum	200 MBR	1.500.000.000	200 MBR	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
4	1.3.27.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev pengelolaan SPAM	41 SPAM	75.000.000	41 SPAM	69.588.000		69.588.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.3.27.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Terwujudnya layanan air minum yang memadai	60 unit		60 unit	1.670.519.000		1.670.519.000	Kelurahan Magersari dan Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program 100-0-100
6	1.3.27.25	Pendampingan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP)	Penampungan Kelompok		0		0	1 keg	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1.3.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			0		560.700.000		560.700.000				
1	1.3.34.78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	jalan lingkungan	1 paket		1 paket	342.200.000		342.200.000	RW. 2	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.34.83	Rehab / Peningkatan Saluran	Terehabnya	1 paket		1 paket	112.000.000		112.000.000	RW VII	Dana Alokasi		Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.34.91	Rehab / Peningkatan Saluran	terehabnya	1 paket			106.500.000		106.500.000	RW XV	Dana Alokasi		Pokok Pikiran DPRD
				TOTAL	32.121.893.000		34.275.412.000		34.332.855.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
 URUSAN : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			731.425.000		622.488.000		712.832.000				
1	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12	65.180.000	12	45.000.000	12	51.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	30 unit	25.762.000	30 unit	24.829.000	30 unit	30.714.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan laporan keuangan dan SPJ	11 orang	75.000.000	11 orang	120.464.000	11 orang	120.464.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis dan 2 orang	47.633.000	20 Jenis dan 2 orang	43.732.000	20 Jenis dan 2 orang	46.888.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.5.1.10	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34 jenis	18.632.000	34 jenis	14.920.000	34 jenis	19.765.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20 jenis	6.093.000	20 jenis	4.568.000	20 jenis	4.568.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2 jenis 12 bulan	2.613.000	2 jenis 12 bulan	2.580.000	2 jenis 12 bulan	2.580.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 kali	4.210.000	24 kali	3.000.000	24 kali	3.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	6 jenis	49.955.000	6 jenis	36.735.000	6 jenis	39.775.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50 orang / giat	211.677.000	50 orang / giat	125.875.000	50 orang / giat	195.284.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terlaksanannya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6 orang	219.170.000	6 orang	183.329.000	6 orang	178.738.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	200000 lembar dan 4 jenis	5.500.000	200000 lembar dan 4 jenis	5.477.000	200000 lembar dan 4 jenis	7.477.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksanannya penataan arsip pegawai	2 giat	0	2 giat	11.979.000	2 giat	11.979.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.145.881.000		850.729.000		913.906.000				
					7,245,909,000								
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor	12	65.442.000	12	29.975.000	12	19.975.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30 unit	325.993.000	30 unit	354.576.000	30 unit	334.490.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10 unit	4.869.000	10 unit	3.250.000	10 unit	6.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	11.827.000	12	5.178.000	12	5.178.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.5.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksannya gedung sekretariat PPNS dan garasi kendaraan	2 unit	280.000.000	2 unit	0	2 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional		457.750.000		457.750.000		457.750.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC 1 PK				0		5.526.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	1.5.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya perbaikan dan peninggian atap garasi				0		84.737.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			136.125.000		63.452.000		63.452.000				
1	1.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersediannya PDL I bagi Karyawan Satpol PP	70 stel	136.125.000	70 stel	63.452.000	70 stel	63.452.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			39.507.000		33.701.000		33.701.000				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya RfK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	5.766.000	4 dokumen	5.766.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	2 dokumen	2.900.000	2 dokumen	1.571.000	2 dokumen	1.571.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2.750.000	2 dokumen	2.748.000	2 dokumen	2.748.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	4.989.000	2 dokumen	4.989.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	2 dokumen	7.750.000	2 dokumen	6.409.000	2 dokumen	6.409.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP, LKJP dan LPPD	1 dokumen	2.900.000	1 dokumen	2.011.000	1 dokumen	2.011.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.5.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya perubahan renstra		10.207.000		10.207.000		10.207.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			3.577.210.800		3.841.186.000		3.848.917.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		92%		92%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,46		6,46					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		11,67		11,67					
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3)	95%		95%		95%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		74,25		74,25					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		14.26%		14.26%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		12		12					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga Banpol, Linmas dan petugas pengamanan obyek vital	12 bulan	1.360.900.000	12 bulan	2.301.277.000	12 bulan	2.389.258.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	40 orang	34.260.000	40 orang	28.576.000	40 orang	28.576.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Program prioritas RPJM
3	1.5.15.4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksanannya kegiatan penertiban PKL	4	70.180.000	4	0	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas dan Damkar/ VVIP	150 giat	1.852.900.000	150 giat	1.055.677.000	150 giat	975.427.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan
5	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore trantib	46 giat	135.737.800	46 giat	186.581.000	46 giat	186.581.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	1.5.15.13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Terlaksanannya sidak / penertiban pedagang rokok	12 giat	123.233.000	12 giat	105.697.000	12 giat	105.697.000	Kota Magelang	DBHCHT		Rencana, Implementasi RAD MEA
7	1.5.15.15	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksanannya rekrutmen anggota Linmas baru	50 orang		50 orang	102.792.000	50 orang	102.792.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.5.15.14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terlaksananya pengiriman data pelanggaran secara online berbasisi SIG	12 giat		12 giat	18.732.000	12 giat	18.732.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	1.5.15.12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya sidang tipiring	2 giat		2 giat	41.854.000	2 giat	41.854.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			1.092.850.000		1.186.125.000		1.254.462.000				
			Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%		100%		100%					
			Persentase tingkat waktu tanggap response	100%		100%		100%					
1	1.4.19.9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150	129.250.000	150	91.986.000	150	9.486.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.4.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Pembayaran petugas penanggulangan kebakaran	12 bulan	963.600.000	12 bulan	1.067.424.000	12 bulan	1.149.011.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.4.19.1	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya pedoman upaya pencegahan dini bahaya kebakaran	1 dokumen		1 dokumen		0 1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.4.19.5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta Diklat penanggulangan kebakaran	20 orang		0 20 orang	18.675.000	20 orang	87.925.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.4.19.8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya sarana penanganan bahaya kebakaran	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	0	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	0	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.4.19.7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran	100 persen		100 persen	8.040.000	100 persen	8.040.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			315.420.000		267.746.000		267.746.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		92%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		1		1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		1		1					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksanannya sosialisasi pencegahan praktek prostitusi bagi pengusaha penginapan/hotel/losmen/tempat kos	50 orang	129.569.000	50 orang		0 50 orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.20.9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksanannya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	36 giat	90.851.000	36 giat	137.218.000	36 giat	137.218.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.20.10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksanannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	30 giat	95.000.000	30 giat	130.528.000	30 giat	130.528.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			150.957.000		209.021.000		217.136.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		0		0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		5,88		5,88					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		50%		50%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		50%		50%					
			Cakupan penanganan korban bencana	100%		100%		100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		11,76%		11,76%					
			#NAME?	2		2		2					
			#NAME?	0		0		0					
			#NAME?	0		0		0					
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada		ada					
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah leaflet informasi bencana	3000 lembar	11.023.000	3000 lembar	0	3000 lembar	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.22.5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat Satpol PP dan solusi penanggulangan bencana	70 orang Satpol PP dan 100 orang masyarakat	71.828.000	70 orang Satpol PP dan 100 orang masyarakat	12.810.000	70 orang Satpol PP dan 100 orang masyarakat	12.810.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.22.6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	150 orang	68.106.000	150 orang	28.532.000	150 orang	28.532.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.5.22.11	Kontijensi Mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen kontinjensi mitigasi bencana banjir	1 dokumen		1 dokumen	26.717.000	1 dokumen	26.717.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
5	1.5.22.9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	2 kelurahan		2 kelurahan	0	2 kelurahan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.5.22.3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana OPD Satpol PP	6 jenis		6 jenis	0	6 jenis	8.115.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.5.22.10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	2 Kelurahan		2 Kelurahan	140.962.000	2 Kelurahan	140.962.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			67.070.000		113.417.000		113.417.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		1		1					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		3		3					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.47%		1.47%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		6%		6%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,84		0,84					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya koordinasi kantrantibmas dan pengiriman KST pada gelar pasukan	6		6	67.283.000	6	67.283.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Pokok Pikiran DPRD
2	1.5.16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	6 giat	67.070.000	6 giat	46.134.000	6 giat	46.134.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.5.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			281.571.000		172.926.000		111.282.000				
1	1.5.23.3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Terlaksanya pelatihan pengamanan Pileg dan Pilpres bagi anggota linmas	300 orang		300 orang	61.644.000	300 orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.23.5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	650 orang	45.000.000	650 orang	34.381.000	650 orang	34.381.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.23.6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	100 orang/hari	236.571.000	100 orang/hari	76.901.000	100 orang/hari	76.901.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
				TOTAL	7.538.016.800		7.360.791.000		7.536.851.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 URUSAN : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			596.573.000		521.457.000		530.867.000				
1	1.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200 lembar	1.064.000	200 lembar	800.000	200 lembar	800.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12 bulan	58.298.000	4 jenis/12 bulan	55.800.000	4 jenis/12 bulan	60.600.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	14 unit	12.245.000	14 unit	6.982.000	14 unit	6.982.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12 laporan	101.373.000	10 orang/bulan serta 12 laporan	91.559.000	10 orang/bulan serta 12 laporan	91.559.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37 item	55.335.000	2 orang/12 bulan serta 23 item	51.485.000	2 orang/12 bulan serta 23 item	54.638.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	49 item	31.576.000	51 item	12.834.000	51 item	12.834.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	6 jenis dan 40000 lembar	31.604.000	6 jenis dan 40000 lembar	11.899.000	6 jenis dan 40000 lembar	11.899.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	11 item	6.974.000	11 item	1.976.000	11 item	1.976.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 jenis/ 12 bulan	4.871.000	3 jenis/12 bulan	4.920.000	3 jenis/12 bulan	4.920.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	6 tabung	1.198.000	6 tabung dan 1 unit	4.824.000	6 tabung dan 1 unit	1.944.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	44 kegiatan dan 12 bulan	62.167.000	44 kegiatan dan 12 bulan	39.134.000	35 kegiatan dan 12 bulan	35.581.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	45 kegiatan	208.450.000	45 kegiatan	141.086.000	45 kegiatan	141.086.000	Diluar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam kantor, pengemudi dan penerima tamu kantor	3 orang/12 bulan	21.418.000	5 orang/12 bulan	98.158.000	5 orang/12 bulan	106.048.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			500.825.000		203.885.000		205.110.000				
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	11.872.000	1 paket	27.022.000	1 paket	27.022.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	228.028.000	14 unit	144.883.000	14 unit	144.883.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	6.488.000	7 jenis	12.919.000	6 jenis	11.985.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	21.962.000	4 jenis	17.061.000	4 jenis	14.623.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	1 paket	2.475.000	1 paket	2.000.000	1 paket	1.000.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	1 unit	180.000.000	1 unit		0 1 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 item		0 1 unit		0 1 unit	5.597.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 item	50.000.000	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			56.017.000		52.695.000		52.695.000				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34 laporan	15.575.000	34 laporan	10.949.000	34 laporan	10.949.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 buku	5.772.000	3 buku	4.404.000	3 buku	4.404.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 dokumen	8.385.000	2 dokumen	6.410.000	2 dokumen	6.410.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 buku	20.426.000	30 buku	14.835.000	30 buku	14.835.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1 dokumen	5.859.000	1 dokumen	6.741.000	1 dokumen	6.741.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.5.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Perubahan Renstra OPD			1 dokumen	9.356.000	1 dokumen	9.356.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			743.406.000		1.140.073.000		1.134.733.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	12 buku	144.012.000	12 buku	179.846.000	12 buku	179.846.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang	17 kelurahan	15.962.000	17 kelurahan	44.972.000	17 kelurahan	44.972.000	Kelurahan se-Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30 buku	132.374.000	30 buku	185.780.000	30 buku	185.780.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.5.16.7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6 buku	8.783.000	6 buku	10.146.000	6 buku	10.146.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.5.16.8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pengawasan orang asing dan sosialisasi pemantauan orang asing kepada masyarakat	12 kali dan 200 orang	49.721.000	12 kali dan 200 orang	104.109.000	12 kali dan 200 orang	104.109.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 laporan	63.525.000	365 laporan	120.111.000	365 laporan	120.111.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.5.16.10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12 kali	109.646.000	12 kali	74.033.000	12 kali	74.033.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	1.5.16.11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN	1700 orang	81.185.000	1700 orang	228.752.000	1700 orang	228.752.000	Kelurahan se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	1.5.16.12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulanga n narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan test urine	500 orang dan 100 orang	63.198.000	300 orang dan 100 orang	52.698.000	300 orang dan 100 orang	52.698.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	1.5.16.13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta test urine untuk deteksi narkoba	500 orang	75.000.000	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.5.16.15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 raperda		1 raperda	86.763.000	1 raperda	81.423.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	1.5.16.14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Terbentuknya kampung bebas narkoba	4 kampung		1 kampung	52.863.000	1 kampung	52.863.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			31.446.000		13.081.000		13.081.000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	31.446.000	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	13.081.000	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	13.081.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			193.700.000		191.997.000		190.182.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	200 orang	33.500.000	200 orang	29.586.000	200 orang	29.586.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200 orang	33.100.000	200 orang	28.819.000	200 orang	28.819.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	200 orang	31.479.000	200 orang	29.355.000	200 orang	29.355.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	100 orang dan 1 kegiatan	23.500.000	100 orang dan 1 kegiatan	43.943.000	100 orang dan 1 kegiatan	43.943.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.5.17.8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 40 buku	72.121.000	12 bulan dan 40 buku	35.356.000	12 bulan dan 40 buku	33.541.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upacara Hari Bela Negara	1 kegiatan		1 kegiatan	24.938.000	1 kegiatan	24.938.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.5.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			173.800.000		267.435.000		265.455.000				
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10									
			Terpublikasikan nya dialog antar agama	6									
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	2									
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
1	1.5.18.1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	200 orang	33.100.000	200 orang	29.874.000	200 orang	29.874.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.18.2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150 orang	30.600.000	150 orang	33.438.000	150 orang	31.458.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.5.18.7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4 kegiatan	54.300.000	4 kegiatan	82.396.000	4 kegiatan	82.396.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.5.18.8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4 kegiatan	55.800.000	4 kegiatan	76.980.000	4 kegiatan	76.980.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.5.18.10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Peserta dialog tentang antisipasi paham radikalisme	240 orang		240 orang	44.747.000	240 orang	44.747.000	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			147.346.000		57.780.000		56.280.000				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.19.2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	240 orang	59.100.000	110 orang	41.034.000	80 orang	39.534.000	Kab/Kota se-Jateng	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota Magelang	12 kali	88.246.000	12 kali	16.746.000	12 kali	16.746.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.5.21	Program pendidikan politik masyarakat			95.800.000		227.998.000		227.998.000				
			Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1									
			Tingkat partisipasi politik	67									
1	1.5.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180 orang	35.400.000	180 orang	39.944.000	180 orang	39.944.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.21.3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36 orang	17.400.000	36 orang	42.732.000	36 orang	42.732.000	Hotel Safira	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.21.6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Diseminasi, Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol dan penyerahan bantuan keuangan parpol	3 kegiatan	10.100.000	3 kegiatan	27.665.000	3 kegiatan	27.665.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.5.21.7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu serta Laporan perkembangan politik daerah	200 orang serta 10 laporan	32.900.000	200 orang serta 10 laporan	117.657.000	200 orang serta 10 laporan	117.657.000	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
				TOTAL	2.538.913.000		2.676.401.000		2.676.401.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Sosial
 URUSAN : Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial									
	1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			546.048.000		527.754.000				
1	1.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko dan surat tercatat	160 surat	3.500.000	160 surat	3.500.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	47.400.000	12 bulan	47.400.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	11 kendaraan	6.098.000	11 kendaraan	6.098.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang	123.015.000	9 orang	125.865.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	26.751.000	12 bulan	28.329.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	11.408.000	12 bulan	11.408.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.870.000	12 bulan	8.870.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12 bulan	2.091.000	12 bulan	2.091.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	1.6.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya spanduk	4 buah	6.528.000	4 buah	6.528.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	4.800.000	12 bulan	4.800.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya tabung gas	12 bulan	1.920.000	12 bulan	1.920.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12 bulan	54.400.000	12 bulan	54.400.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.6.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	95.760.000	12 bulan	115.015.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
14	1.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	12 bulan	137.869.000	12 bulan	95.892.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	1.6.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12 bulan	15.638.000	12 bulan	15.638.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.6.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			739.999.000		739.999.000				
1	1.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	17 m2	20.000.000	17 m2	20.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	166.178.000	11 unit	166.178.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	8 jenis	7.799.000	8 jenis	7.799.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	6 jenis	6.820.000	6 jenis	6.820.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.6.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	539.202.000	1 unit	539.202.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			134.067.000		125.432.000				
1	1.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya capaian kinerja	4 dokumen	13.318.000	4 dokumen	13.318.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	11.904.000	1 dokumen	11.904.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 dokumen	8.557.000	2 dokumen	8.557.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	17.465.000	2 dokumen	17.465.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
5	1.6.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	8 bulan	60.692.000	8 bulan	52.057.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
6	1.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	penyusunan Dokumen LKjIP	1 dokumen	10.227.000	1 dokumen	10.227.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	11.904.000	1 dokumen	11.904.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			117.123.000		127.858.000				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%							
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	11.00%							
1	1.6.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	12 bulan	98.591.000	12 bulan	109.326.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggung nangan Kemiskinan , Program prioritas RPJM
2	1.6.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	68 orang	18.532.000	68 orang	18.532.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1.134.352.000		1.144.252.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%							
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%							
1	1.6.16.36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi	17 orang	28.989.000	17 orang	28.989.000	Dinas Sosial	DBHCHT		Penanggung nangan Kemiskinan , Akomodasi Musrenban g

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
2	1.6.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	peserta sosialisasi penanganan PMKS terlanter	180	21.718.000	180	21.718.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
3	1.6.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	50 orang	37.169.000	50 orang	37.169.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.6.16.12	Penanganan orang terlanter	Jumlah orang terlanter yang ditangani	150 orang	17.630.000	150 orang	17.630.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
5	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	153 lansia	34.284.000	153 lansia	34.284.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
6	1.6.16.15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	30 orang	17.030.000	30 orang	17.030.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	1.6.16.16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	4 dokumen	62.185.000	4 dokumen	63.385.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
8	1.6.16.17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	85 orang	109.740.000	85 orang	109.740.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	1.6.16.44	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	2 dokumen	35.963.000	2 dokumen	35.963.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
10	1.6.16.18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	36 orang	59.714.000	36 orang	59.714.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
11	1.6.16.30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	12 kegiatan	153.752.000	12 kegiatan	151.652.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
12	1.6.16.45	Operasional Tim Reaksi Cepat	tertanganinya permasalahan PMKS	17 kelurahan	76.502.000	17 kelurahan	87.302.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
13	1.6.16.49	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	peserta character building	115 anak	82.455.000	115 anak	82.455.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
14	1.6.16.47	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	20 kegiatan	21.926.000	20 kegiatan	21.926.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
15	1.6.16.46	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan KUBE e Warong	5 e-Warong	18.694.000	5 e-Warong	18.694.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
16	1.6.16.48	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan	2 kegiatan	356.601.000	2 kegiatan	356.601.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
	1.6.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			136.004.000		137.582.000				
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	20%							
1	1.6.18.3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta pelatihan	25 orang	46.168.000	25 orang	46.168.000	Dinas Sosial	DBHCHT		SDGs, Akomodasi Musrenbang
2	1.6.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	35 orang	89.836.000	35 orang	91.414.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			13.076.000		13.076.000				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	58%							
1	1.6.19.8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	13 lembaga	13.076.000	13 lembaga	13.076.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
	1.6.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			298.062.000		206.462.000				
			Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	75%							
1	1.6.20.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial peserta pelatihan	45 orang	11.063.000	45 orang	11.063.000	Dinas Sosial	DBHCHT		Rencana, Program prioritas RPJM
2	1.6.20.6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110 orang	286.999.000	110 orang	195.399.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.6.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			719.619.000		693.541.000				
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%							
			Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	4							
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30%							
1	1.6.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	100 perusahaan	111.342.000	100 perusahaan	77.192.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
2	1.6.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	170 orang	193.464.000	170 orang	193.464.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
3	1.6.21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi lansia dan Tagana	15 anggota TAGANA	13.258.000	15 anggota TAGANA	13.258.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.6.21.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500 m2	301.798.000	5500 m2	309.870.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
5	1.6.21.8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 kegiatan	70.000.000	1 kegiatan	70.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.6.21.9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	5 WKSBM	29.757.000	5 WKSBM	29.757.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			28.168.000		30.228.000				
			DISNAKERTRANSOS								
			KESBANGPOL								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%							
			Database ormas yang akurat	71.00%							
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%							
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	1 kegiatan	28.168.000	1 kegiatan	30.228.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	3.866.518.000		3.746.184.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Tenaga Kerja
 URUSAN : Dinas Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			585.434.250		603.661.000		619.441.000				
1	2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	490 surat	2.000.000	490 surat	1.500.000	490 surat	1.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	48 langgan	85.000.000	48 langganan	102.200.000	48 langganan	102.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	18 unit	7.500.000	18 unit	7.000.000	18 unit	7.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 orang	93.000.000	12 orang	96.830.000	12 orang	96.830.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	2 jenis	110.000.000	2 jenis	112.778.000	2 jenis	120.668.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	30 item	51.500.000	30 item	14.000.000	30 item	14.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 jenis	20.540.000	2 jenis	9.698.000	2 jenis	9.698.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 item	13.157.000	12 item	9.318.000	12 item	9.318.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	8 kegiatan	1.844.000	8 kegiatan	2.160.000	8 kegiatan	2.160.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	4.000.000	12 bulan	3.960.000	12 bulan	3.960.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	3.020.000	12 bulan	4.872.000	12 bulan	4.872.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	12.887.250	12 bulan	33.615.000	12 bulan	33.615.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72 kegiatan	102.142.000	72 kegiatan	95.638.000	72 kegiatan	95.638.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	5 orang	70.244.000	5 orang	98.156.000	5 orang	106.046.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	2.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	26 Pegawai	8.600.000	26 Pegawai	11.936.000	26 Pegawai	11.936.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			201.700.000		227.051.000		240.251.000				
1	2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	800 m2	40.000.000	800 m2	90.000.000	800 m2	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18 unit	135.000.000	18 unit	116.997.000	18 unit	116.997.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10 unit	7.500.000	10 unit	9.259.000	10 unit	9.259.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	20 unit	19.200.000	20 unit	10.795.000	20 unit	10.795.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	0		0		1 unit	13.200.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			33.250.000		40.483.000		40.483.000				
1	2.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	4.984.000	12 Bulan	4.984.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan	5.000.000	1 laporan	2.498.000	1 laporan	2.498.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.645.000	2 Dokumen	5.645.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2 Dokumen	8.500.000	2 Dokumen	11.944.000	2 Dokumen	11.944.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.250.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD	1 Dokumen	10.162.000	1 Dokumen	10.162.000	1 Dokumen	10.162.000	Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.068.900.000		1.058.516.000		1.088.094.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	5%									
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	65%									
			Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	5%									
1	2.1.15.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	terpeliharanya sarana dan prasarana BLK	600 m2	24.000.000	2000 m2	150.000.000	2000 m2	150.000.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.1.15.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun 2018 di Kota Magelang	230 peserta	5.100.000	230 peserta	7.244.000	230 peserta	7.244.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.1.15.11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	40 Orang	92.000.000	16 Orang	78.143.000	16 Orang	78.143.000	Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
4	2.1.15.13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	11 LPK	11.800.000	11 LPK	6.448.000	11 LPK	6.448.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.1.15.16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	20 orang	205.000.000		121.898.000		121.898.000	Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.1.15.17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20 orang	99.000.000		59.049.000		59.049.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.1.15.18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20 orang	123.000.000		64.009.000		64.009.000	Kota Magelang	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.1.15.19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11 Orang	85.000.000	16 orang	70.518.000	32 orang	70.518.000	Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
9	2.1.15.20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknisi HP	11 orang	84.000.000	0 orang	0	0 orang	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
10	2.1.15.24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	45 Orang	180.000.000	16 Orang	42.422.000	0 orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.1.15.26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan perkayuan	20 Orang	160.000.000	0 orang	0	0 orang	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.1.15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base dan rencana tenaga kerja daerah	1 Dokum en			264.835.000		264.835.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	2.1.15.8	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Terehabnya sarana dan prasarana BLK	64 m2			0	1 unit	60.000.000	Kota Magelang	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	2.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	tersedianya peralatan pelatihan di BLK	1 Unit			88.500.000	20 unit	88.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	2.1.15.30	Pengelolaan Akses informasi lowongan kerja	terinformasinya Lowongan Pekerjaan	1000 Orang		1000 Orang	105.450.000	1000 Orang	117.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											
	3.8.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			259.000.000		104.009.000		109.273.000				
			Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	100%									
1	3.8.15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2 Lokasi	77.000.000	2 Lokasi	32.164.000	2 Lokasi	33.088.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan
2	3.8.15.5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5 KK 1 lokasi	130.000.000	3 KK 1 lokasi	51.955.000	3 KK 1 lokasi	52.295.000	Daerah penempatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan
3	3.8.15.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2 lokasi	52.000.000	2 lokasi	19.890.000	2 lokasi	23.890.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			4.117.000.000		3.457.969.000		3.334.503.000				
			Persentase wirausaha baru	6%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%									
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan										
1	2.1.16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	108.420.000	12 Laporan	129.120.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.1.16.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2 Kegiatan	38.000.000	2 Kegiatan	22.319.000	2 Kegiatan	23.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.1.16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	50 Orang	150.000.000	50 Orang	294.933.000	50 Orang	294.933.000	Kota Magelang	DBHCHT		Penanggulanga n Kemiskinan
4	2.1.16.8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17 lokasi	16.500.000	17 lokasi	14.395.000	17 lokasi	14.395.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang
5	2.1.16.11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17 lokasi 510 tenaga	1.635.000.000	17 lokasi 510 tenaga	1.449.073.000	17 lokasi 510 tenaga	1.449.073.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulanga n Kemiskinan
6	2.1.16.14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	50 Perusahaan	287.500.000	50 Perusahaan	96.850.000	0	0	Kota Magelang	DBHCHT		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.1.16.15	Padat Karya Non Bahan	Terlaksananya padat karya non bahan	17 lokasi	1.720.000.000	17 lokasi	1.380.179.000	17 lokasi	1.380.179.000	Kota Magelang	DBHCHT		Penanggulanga n Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
8	2.1.16.17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Terlaksananya sistem manajemen ISO 9001 : 2015	1 Sertifikat	115.000.000	1 Sertifikat	91.800.000	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	2.1.16.19	Konsultasi Pencari Kerja	kesempatan kerja memadai				0	400 orang	43.050.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			219.350.000		367.667.000		367.667.000				
			Coverage asuransi tenaga kerja	70%									
			Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	50%									
1	2.1.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10 kasus	15.500.000	10 kasus	17.188.000	10 kasus	17.188.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan	100 orang	29.000.000	100 orang	13.222.000	100 orang	13.222.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.1.17.9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	4 kali	36.000.000	4 kali	194.900.000	4 kali	194.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.1.17.10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4 kali	26.500.000	4 kali	34.900.000	4 kali	34.900.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.1.17.14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	150 perusahaan	8.250.000	150 perusahaan	15.489.000	150 perusahaan	15.489.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.1.17.15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	120 perusahaan	25.000.000	120 perusahaan	17.271.000	120 perusahaan	17.271.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.1.17.27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasilitasinya peringatan Hari Buruh Internasional	1 kegiatan		1 kegiatan	24.506.000	1 kegiatan	24.506.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.1.17.25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja		21.600.000	120 orang	21.211.000	120 orang	21.211.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.1.17.26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	80 Perusahaan	17.000.000	80 Perusahaan	14.627.000	80 Perusahaan	14.627.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.1.17.21	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Perusahaan yang terdaftar, terbin a dan termonitor	120 orang	40.500.000	120 orang	14.353.000	120 orang	14.353.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											
	3.8.17	Program Transmigrasi Regional			41.000.000		26.682.000		26.682.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					277,926,000								
			Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%									
1	3.8.17.1	Penyuluhan transmigrasi regional	masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	300 Orang	41.000.000	300 Orang	33.082.000	150 Orang	26.682.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
				TOTAL	6.525.634.250		5.892.438.000		5.826.394.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN : Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		1.714.651.000		1.678.472.000				
1	2.5.1.25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1 tahun		1 tahun	1.700.000	1 tahun	4.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	13 orang		13 orang	469.542.000	13 orang	425.229.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun	20 jenis		20 jenis	15.482.000	20 jenis	15.482.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis		55 jenis	28.744.000	55 jenis	28.744.000	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 bendel		100 bendel	15.851.000	100 bendel	15.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	350 kegiatan		12 bulan	295.360.000	12 bulan	295.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5 jenis		11 jenis	414.403.000	11 jenis	414.403.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan	12 bulan		12 bulan	5.700.000	12 bulan	5.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 kali		16 kali	2.064.000	16 kali	2.064.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama setahun	35 jenis		28 jenis	69.812.000	28 jenis	74.546.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat	60 lembar		60 lembar	750.000	60 lembar	750.000	Kota Megelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bulan		12 bulan	115.800.000	12 bulan	116.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	75 unit		90 unit	70.000.000	90 unit	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan tertib administrasi	106 pns		12 bulan	205.060.000	12 bulan	205.060.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	2.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	20 jenis		15 jenis	4.383.000	15 jenis	4.383.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0		1.735.728.000		1.483.556.000				
1	2.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan roda 2	4 unit		2 unit	51.150.000	2 unit	51.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	2.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	50 unit		41 unit	26.780.000	41 unit	26.780.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6 unit		9 unit	9.372.000	9 unit	9.372.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 unit		17 unit	3.500.000	17 unit	3.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 unit		4 unit	94.883.000	4 unit	94.883.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	54 unit		80 unit	1.550.043.000	80 unit	1.260.621.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kompor Gas	1 unit		0	0	1 unit	800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
9	2.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Laptop, Komputer dan Printer	4 unit		0	0	4 unit	36.450.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		358.917.000		358.917.000				
1	2.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan kinerja aparatur	477 orang		485 orang	358.917.000	485 orang	358.917.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0		127.845.000		127.845.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100		100		100					
1	2.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja 2019 dan Renja Perubahan 2018	2 dokumen		2 dokumen	7.256.000	2 dokumen	7.256.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Monitoring 165 kegiatan di DLH	165 kegiatan		165 kegiatan	12.500.000	165 kegiatan	12.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun anggaran 2018	1 laporan		1 laporan	8.197.000	1 laporan	8.197.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja fisik dan keuangan	12 laporan		12 laporan	12.500.000	12 laporan	12.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 dokumen		2 dokumen	8.724.000	2 dokumen	8.724.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/DPA 2019 dan RKA/DPA perubahan 2018	4 dokumen		4 dokumen	30.202.000	4 dokumen	30.202.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP DLH Tahun 2018	1 dokumen		1 dokumen	8.300.000	1 dokumen	8.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen		1 dokumen	7.006.000	1 dokumen	7.006.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.5.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Tersinkronnya laporan aset dan keuanganDLH	2 Dokumen		2 Dokumen	18.244.000	2 Dokumen	18.244.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	2.5.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Renstra Perubahab OPD			1 dokumen	14.916.000	1 dokumen	14.916.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		21.564.086.000		19.513.910.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		4,3		4,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		89%		89%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		4,3%		4,3%					
1	2.5.15.67	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Pelatihan	50 orang		120 orang	26.882.000	120 orang	46.412.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah (kampung organik dan bank sampah)	3 lomba		3 lomba	97.058.000	3 lomba	97.058.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.5.15.6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan TPST	10 kali, 3 kali		12 kali, 3 kali	75.231.000	12 kali, 3 kali	75.231.000	Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
4	2.5.15.66	Pematangan Lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi		1 lokasi	3.000.000.000	1 dokumen	102.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	2.5.15.54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya fasilitasi penilaian Adipura	2 ekspose, 3 koordinasi, 1 dokumen		6 ekspose dan koordinasi adipura	317.084.000	6 ekspose dan koordinasi adipura	276.584.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan persampahan	6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontainer		6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontainer	294.151.000	6 transfer depo, 110 gerobag/bin beroda/kontainer/mesin press	439.569.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengelolaan persampahan transfer depo	12 buku		12 buku	27.510.000	12 buku	27.510.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
8	2.5.15.52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	pengelolaan TPS 3R Magersari	12 Bulan		12 Bulan	31.750.000	12 Bulan	42.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.5.15.18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Tersedianya sarpras persampahan	55 komposter komunal, 25 bin pemilahan		30 komposter komunal, 25 bin pemilahan	75.764.000	30 komposter komunal, 25 bin pemilahan	75.764.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
10	2.5.15.24	Penanganan sampah kota	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	45.000 m3		45.000m3	4.031.037.000	45.000m3	4.305.601.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
11	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	gerobak sampah, bin beroda, tempat sampah pemilahan, armroll, motor roda 3 pengangkut sampah	68 buah, 30 buah, 60 buah, 2 unit, 17 unit		98 unit	629.103.000	98 unit	629.103.000	kota magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
12	2.5.15.58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Buku volume sampah harian	1 dokumen		1 dokumen	35.071.000	1 dokumen	35.071.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
13	2.5.15.48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Terlaksananya pelatihan fasilitator lingkungan	50 orang		50 orang	29.224.000	50 orang	29.224.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
14	2.5.15.50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST	5 TPST		5 TPST	672.449.000	5 TPST	711.623.000	TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	17 Kelurahan		17 Kelurahan	20.000.000	17 Kelurahan	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
16	2.5.15.42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta pelatihan daur ulang	60 orang		60 orang	23.013.000	60 orang	23.013.000	Kota Magelang	DBHCHT		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
17	2.5.15.55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Laporan pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai dasar Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah	1 dokumen		16 sampel	13.294.000	16 sampel	13.294.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
18	2.5.15.49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan persampahan untuk Fasilitator Lingkungan	12 bulan		21 fasilitator	204.368.000	21 fasilitator	204.368.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
19	2.5.15.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terwujudnya sistem manajemen dan pelaporan sampah secara online	1 software sistem		1 software sistem	31.342.000	1 software sistem	31.342.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
20	2.5.15.7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	terlaksananya pembinaan tenaga kebersihan dan karyawan DLH	2 keg		2 keg	65.589.000	2 keg	65.589.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	2.5.15.25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPST	73000 m3		73000 m3	1.854.166.000	73000 m3	2.252.554.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
22	2.5.15.51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik	3 bulan		3 bulan	10.000.000	3 bulan	10.000.000	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
23	2.5.15.64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	Tertatanya akses jalan menuju TPST	1 lokasi		1 lokasi	10.000.000.000	1 lokasi	10.000.000.000	Bojong	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		912.873.000		917.607.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		30%		30%					
1	2.5.16.50	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup	25 usaha/kegiatan		25 usaha/kegiatan	7.237.000	25 usaha/kegiatan	7.237.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.16.24	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara, NO, CO, SO, Kebisingan	20 sampel		20 sampel	76.671.000	20 sampel	76.671.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.5.16.37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	15 usaha/dokumen lingkungan		15 usaha/dokumen lingkungan	16.472.000	15 usaha/dokumen lingkungan	16.472.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.5.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air	34 sampel		34 sampel	44.729.000	34 sampel	44.729.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kerja bakti	2.400 orang, 6 kegiatan		2.400 orang, 6 kegiatan	41.771.000	2.400 orang, 6 kegiatan	41.771.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	2.5.16.35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kirab Adipura dan Tasyakuran Adipura	2 keg, kirab dan tasyakuran		2 keg, kirab dan tasyakuran	240.033.000	2 keg, kirab dan tasyakuran	240.033.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	2.5.16.41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	70 lubang		70 lubang	76.525.000	70 lubang	81.259.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.5.16.38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 bulan		12 bulan	50.345.000	12 bulan	50.345.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.5.16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pmonev engelolaan sampah TPSA Banyuurip	12 bulan		12 bulan	37.342.000	12 bulan	37.342.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	2.5.16.26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Tertanganinya Pengaduan Kasus Lingkungan	4 pengaduan kasus lingkungan		4 pengaduan kasus lingkungan	10.657.000	4 pengaduan kasus lingkungan	10.657.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	2.5.16.29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Terpantaunya Kualitas Air Limbah yang dibuang ke badan air oleh pemraksarsa kegiatan/usaha	54 sampel		54 sampel	47.556.000	54 sampel	47.556.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.5.16.33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Terpeliharanya kualitas mata air di Kota Magelang dan sumur sekitar TPA	20 lokasi / 40 sampel		40 sampel	47.746.000	40 sampel	47.746.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	2.5.16.42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Tercapainya pelayanan dalam penerbitan SPPL	120 dokumen		120 dokumen	25.634.000	120 dokumen	25.634.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	2.5.16.43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL UPL	8 dokumen		9 dokumen	48.902.000	9 dokumen	48.902.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
15	2.5.16.44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terverifikasinya izin PPLH	10 dokumen rekomendasi perijinan		8 dokumen rekomendasi perijinan	40.432.000	8 dokumen rekomendasi perijinan	40.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	2.5.16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1 unit		1 unit	35.890.000	1 unit	35.890.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
17	2.5.16.47	Pembentukan Komisi Amdal	Terbentuknya Komisi Amdal	100 persen		100 persen	16.045.000	100 persen	16.045.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
18	2.5.16.48	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	Tersedianya panduan operasional laboratorium lingkungan	1 dokumen		1 dokumen	48.886.000	1 dokumen	48.886.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			0		407.900.000		407.900.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%		76%		76%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Kualitas Udara	78%		78%		78%					
			Indeks Tutupan Hutan	49%		49%		49%					
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7		57,7		57,7					
			Jenis flora	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis					
			Jenis fauna	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
1	2.5.17.45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya Lomba K3	68 peserta		30 juara	161.610.000	30 juara	161.610.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.17.44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan	8 kegiatan		8 kegiatan	55.497.000	8 kegiatan	55.497.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	2.5.17.39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Anggota Saka Kalpataru	80 orang		80 orang	26.719.000	80 orang	26.719.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.5.17.43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Terwujudnya Sekolah Adiwiyata	6 Sekolah		6 Sekolah	93.740.000	6 Sekolah	93.740.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	2.5.17.42	Pengadaan Sumur Resapan	Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi	8 unit sumur resapan		8 unit sumur resapan	49.433.000	8 unit sumur resapan	49.433.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	2.5.17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim	1 kampung iklim		1 kampung iklim	20.901.000	1 kampung iklim	20.901.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	3,5	Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.5.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			0		7.296.778.000		7.680.439.000				
1	3.5.17.8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Terbayarnya rekening listrik pju	12 bulan		12 bulan	6.492.000.000	12 bulan	6.492.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.5.17.3	Pemeliharaan lampu PJU	Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang listrik pju	5150 titik		5150 titik	478.967.000	5150 titik	548.698.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	3.5.17.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)	12 buku		12 buku	20.627.000	12 buku	23.795.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	3.5.17.2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelang	44 titik		44 titik	205.400.000	44 titik lampu pju, 145 lampu hias, 4 sound system	431.162.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	3.5.17.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PJU Kota	Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK (penarik kabel udara) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety		Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit 100.00 Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK (penarik kabel FO udara) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety 16 bh, Las Listrik 1 bh, Bor 1 bh	99.784.000	Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit 100.00 Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK (penarik kabel FO udara) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety	184.784.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			0		859.875.000		859.875.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah		6 buah		6 buah					
1	2.5.19.22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	terinformasinya indeks kualitas lingkungan hidup kota magelang	1 dokumen		1 dokumen	6.138.000	1 dokumen	6.138.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.19.25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan hukum untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	12 laporan		1 tahun	436.208.000	1 tahun	436.208.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.5.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 dokumen		1 dokumen	40.875.000	1 dokumen	40.875.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.5.19.24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	Terpublikasinya Pelayanan kepada masyarakat	143 tayang		100 kali	126.070.000	100 kali	126.070.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	1 dokumen		20 sampel	13.936.000	20 sampel	13.936.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.5.19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan	2 pameran, 1 lomba foto, 1 sosialisasi		2 pameran, 1 lomba foto, 1 sosialisasi	82.047.000	2 pameran, 1 lomba foto, 1 sosialisasi	82.047.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
7	2.5.19.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Terpantaunya kualitas air	1 dokumen		1 dokumen	40.548.000	1 dokumen	40.548.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.5.19.27	Inventarisasi lingkungan hidup	tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup	1 dokumen		1 dokumen	57.447.000	1 dokumen	57.447.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
9	2.5.19.28	Penyusunan Data dan Profil DLH	Tersedia data dan Profil DLH	1 Dokumen		1 Dokumen	56.606.000	1 Dokumen	56.606.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.20	Program pengelolaan areal pemakaman			0		955.610.000		1.074.066.000				
			DISNAKERTRANS		215,000,000								
			DKPT		623,650,000								
			Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	26,6%		26,6%		26,6%					
1	1.4.20.16	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Terbinanya tenaga lapangan	75 orang		75 orang	10.166.000	75 orang	10.166.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.4.20.14	Verifikasi Data Pemakaman	Terlaksananya trtib administrasi TPU Giriloyo	180 lembar		180 lembar	14.583.000	180 lembar	14.583.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.4.20.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengendalian pengelolaan TPU Giriloyo	12 laporan		12 laporan	64.908.000	12 laporan	64.908.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.4.20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	6 unit		6 unit	506.960.000	6 unit	538.519.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.4.20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya gapura, saluran dan jalan paving pemakaman	1 unit		2 paket	305.241.000	3 paket	379.095.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	1.4.20.5	Pemberian perijinan pemakaman	Terwujudnya ijin pemakaman baru, pemesanan petak makam, perpanjangan petak makam, dan perpanjangan makam	1300 ijin		1300 ijin	53.752.000	1300 ijin	53.752.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.4.20.13	Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman	Mesin Potong Rumput					2 unit	13.043.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			0		27.867.000		27.867.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%		100%		100%					
1	2.5.20.18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	terpantaunya gas rumah kaca 5 sektor	1 dokumen		1 dokumen	15.209.000	1 dokumen	15.209.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.5.20.19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data penghasil Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B3	8 usaha/kegiatan		12 usaha/kegiatan	12.658.000	12 usaha/kegiatan	12.658.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		4.432.558.000		15.170.807.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya pengecatan pooh turus jalan	1300 pohon		1300 pohon	68.143.000	1300 pohon	68.143.000	Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	2.5.24.36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Terwujunya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota	8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman		8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman	76.072.000	10 jenis tanaman 1 paket menara air bersih	231.750.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
3	2.5.24.18	Penataan Taman Aloon-aloon	Terwujudnya taman bermain dan olahraga outdoor di kawasan aloon aloon	1 area olahraga outdoor dan 1 area bermain anak		1 area olahraga outdoor dan 1 area bermain anak	400.000.000	1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak	400.600.000	aloon aloon	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.5.24.45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Tercapainya penghijauan tepi jalan	100 tabebu ya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek		100 tabebuya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek	225.399.000	100 tabebuya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek	225.399.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
5	2.5.24.10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12 buku		12 buku	19.671.000	12 buku	24.291.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
6	2.5.24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Terlaksananya lomba taman	1 lomba taman		2 lomba taman	178.910.000	2 lomba taman	215.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.5.24.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota	623 buah umbul-umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air		623 buah umbul-umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air	358.453.000	551 buah umbul-umbul/bendera, 235 m1 spanduk, 34 set dekorasi taman, 1 paket mobil hias, 5 sprayer, 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 4 pompa air, 2 unit penghisap debu, 1 paket taman pergola	330.312.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
8	2.5.24.26	Perawatan Pohon Peneduh	Terpeliharanya pohon peneduh kota	200 Pohon Peneduh Kota		200 Pohon Peneduh Kota	47.766.000	200 Pohon Peneduh Kota	157.792.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
9	2.5.24.85	Penanganan Pohon Tumbang	Terlindungnya masyarakat kota magelang dari bencana pohon tumbang	10 kegiatan		10 kegiatan	50.060.000	10 kegiatan	50.060.000	Kota	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	53 taman		53 taman	2.878.147.000	53 taman	3.282.373.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
11	2.5.24.30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	11 buah		11 buah	89.679.000	11 buah	89.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
12	2.5.24.29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya pagar, tiang bendera, dan pipa medium	212 buah		212 buah	40.258.000	212 buah	40.258.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2.5.24.99	Pengadaan tanah untuk taman	Tersedianya tanah untuk taman						10.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
13	2.5.24.98	Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikota	Dokumen DED Taman Tanggul Kalikota					1 dokumen	55.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		104.850.000		104.850.000				
1	2.5.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya wawasan PNS di DLH	106 orang		106 orang	104.850.000	106 orang	104.850.000	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			0		2.000.000.000		1.167.200.000				
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	45%		45%		45%					
1	2.4.16.3	Pengadaan tanah	Tersedianya tanag SidotopoKedungsari			1 lokasi	2.000.000.000	1 lokasi	1.167.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				TOTAL	0		42.499.538.000		50.573.311.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 URUSAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			698.408.000		688.522.000		698.128.000				
1	2.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	kelancaran kegiatan OPD	396 surat	1.750.000	396 surat	1.750.000	396 surat	1.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
2	2.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kelancaran kegiatan OPD	5 jenis	219.980.000	5 jenis	160.200.000	5 jenis	151.380.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
3	2.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Kendaraan	5.260.000	13 Kendaraan	6.336.000	13 Kendaraan	6.336.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
4	2.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kelancaran kegiatan OPD	12 laporan	95.000.000	12 laporan	89.499.000	12 laporan	89.949.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
5	2.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kelancaran kegiatan OPD	1540 m2	40.000.000	1540 m2	44.459.000	1540 m2	50.616.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
6	2.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran kegiatan OPD	66 jenis	26.000.000	66 jenis	15.166.000	66 jenis	15.166.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
7	2.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	13.000.000	2 Jenis	10.498.000	2 Jenis	10.498.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
8	2.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11Jenis	5.500.000	11Jenis	2.904.000	11Jenis	2.904.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.6.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	6 Jenis	750.000	6 Jenis	805.000	6 Jenis	805.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	3.800.000	2 Jenis	2.640.000	2 Jenis	2.640.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	4 Jenis	3.000.000	4 Jenis	8.208.000	4 Jenis	8.208.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	511 Orang	20.000.000	511 Orang	32.507.000	511 Orang	38.116.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

13	2.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	40 kegiatan	200.000.000	40 kegiatan	234.921.000	40 kegiatan	234.921.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	4 Orang	64.368.000	4 Orang	78.629.000	4 Orang	84.839.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.6.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			974.264.000		307.837.000		268.250.000				
					1,193,488,000								
1	2.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	200.000.000	2 Jenis	0	2 Jenis	1.800.000	Jl. Veteran no 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 gedung	70.750.000	3 gedung	101.233.000	3 gedung	105.233.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 unit	106.000.000	13 unit	150.037.000	13 unit	104.290.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	24 Jenis	15.000.000	24 Jenis	15.581.000	24 Jenis	10.625.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	45 unit	143.514.000	45 unit	40.986.000	45 unit	28.900.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 jenis	439.000.000	3 jenis	0	3 jenis	17.402.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan			77.675.000		66.547.000		66.547.000				
1	2.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan	4 laporan	11.700.000	4 laporan	15.419.000	4 laporan	15.419.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
2	2.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan	1 dokumen	6.549.000	1 dokumen	2.950.000	1 dokumen	2.950.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
3	2.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan	1 dokumen	9.926.000	1 dokumen	6.509.000	1 dokumen	6.509.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
4	2.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	9.103.000	2 dokumen	9.103.000	Jl. Veteran no. 7 magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
5	2.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan	2 dokumen	17.500.000	2 dokumen	13.092.000	2 dokumen	13.092.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
6	2.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	4.474.000	1 dokumen	4.474.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
7	2.6.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.562.079.000		1.615.530.000		1.645.511.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000	935		935		935					
			Persentase kepemilikan KK di	100%		100%		100%					

			Persentase kepemilikan akte	50%		50%		50%					
			Terbangunnya sistem pelayanan	40%		40%		40%					
1	2.6.15.41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	30 buku		30 buku	35.905.000	30 buku	35.905.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
2	2.6.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating,	Tertib Administrasi Kependudukan	1 kelancaran operasionalit	161.667.000	1 kelancaran	142.996.000	1 kelancaran operasionalit	147.730.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping		Percepatan Pencapaian
3	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1200 surat	75.573.000	1200 surat	26.848.000	1200 surat	26.848.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	24000 pemohon	334.000.000	24000 pemohon	300.807.000	24000 pemohon	311.852.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping		Percepatan Pencapaian
5	2.6.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	120 orang peserta sosialisasi	6.000.000	120 orang peserta sosialisasi	15.232.000	120 orang peserta sosialisasi	15.232.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
6	2.6.15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1700 orang	155.910.000	1700 orang	153.496.000	1700 orang	153.496.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.6.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 laporan	53.442.000	4 laporan	15.169.000	4 laporan	15.169.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.6.15.17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40 orang	34.000.000	40 orang	22.076.000	40 orang	22.076.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
9	2.6.15.43	Penyusunan Buku Data Penduduk	Tertib administrasi kependudukan	30 buku		30 buku	16.498.000	30 buku	16.498.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
10	2.6.15.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	Tertib Administrasi Kependudukan	3500	173.050.000	3500	187.229.000	3500	193.541.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU		Tema RKPD 2019
11	2.6.15.28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21 tempat	14.624.000	21 tempat	10.755.000	21 tempat	10.755.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Tema RKPD 2019
12	2.6.15.29	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	12000 KTP el	249.678.000	12000 KTP el	148.360.000	12000 KTP el	151.516.000	Jl. Veteran no 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU		Program prioritas RPJM
13	2.6.15.30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 kali (3 kecamatan)	0	6 kali (3 kecamatan)	18.277.000	6 kali (3 kecamatan)	18.277.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
14	2.6.15.33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 kali	17.325.000	6 kali	21.052.000	6 kali	21.052.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

15	2.6.15.38	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Tertib Administrasi Kependudukan	5000 keping KIA	264.500.000	5000 keping KIA	182.829.000	5000 keping KIA	187.563.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	2.6.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	17.600.000	4	19.101.000	4	19.101.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	2.6.15.7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	3 jenis	4.710.000	3 jenis	252.294.000	3 jenis	252.294.000	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	2.6.15.42	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	Tertib pemanfaatan data sesuai peraturan yang berlaku	1 instansi lintas sektor		1 instansi lintas sektor	46.606.000	1 instansi lintas sektor	46.606.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			137.906.000		14.690.000		14.690.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln					
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		52%		52%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		53%		53%					
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	1 tahun	137.906.000	1 tahun	14.690.000	1 tahun	14.690.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
				TOTAL	3.450.332.000		2.693.126.000		2.693.126.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 URUSAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			605.250.000		652.967.000		666.640.000				
1	2.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	1.600.000	12 bulan	2.200.000	12 bulan	2.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor dan tambah daya listrik untuk Balai Penyuluhan KB	12 bulan	95.165.000	12 bulan	105.840.000	12 bulan	108.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas serta biaya balik nama kendaraan	43 unit	16.756.000	40 Unit	30.129.000	40 Unit	32.129.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12 bulan	108.069.000	12 bulan	98.110.000	12 bulan	98.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	31.571.000	12 bulan	57.152.000	12 bulan	60.596.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	21.296.000	12 bulan	17.502.000	12 bulan	17.502.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	17.690.000	12 bulan	16.467.000	12 bulan	16.467.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14 jenis	13.310.000	14 jenis	16.305.000	14 jenis	16.305.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 bulan	4.791.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 tabung	4.525.000	20 tabung	2.788.000	20 tabung	2.788.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 bulan	35.757.000	12 bulan	37.906.000	12 bulan	45.716.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	181.149.000	12 bulan	132.668.000	12 bulan	142.668.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak penjaga malam dan pengemudi tetap	12 bulan	64.254.000	12 bulan	119.061.000	12 bulan	107.320.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	9.317.000	12 bulan	13.839.000	12 bulan	13.839.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			438.369.000		347.124.000		390.225.000				
1	2.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	144.000.000	2 unit	80.000.000	2 unit	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	43 unit	232.800.000	40 unit	196.989.000	40 unit	211.964.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 unit	54.848.000	60 unit	38.235.000	60 unit	38.235.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79 unit	6.721.000	29 unit	1.900.000	29 unit	1.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Baliho di 10 titik	10 unit		10 unit	30.000.000	10 unit	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.7.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sepeda motor untuk kendaraan operasional	1 unit		1 unit	0	1 unit	18.126.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya scanner untuk kelancaran tugas data digital	1 unit		1 unit	0	1 unit	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			6.110.000		5.600.000		5.600.000				
1	2.7.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 orang	6.110.000	15 orang	5.600.000	15 orang	5.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			44.319.000		78.381.000		78.381.000				
1	2.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan DP4KB	4 laporan		4 laporan	13.732.000	4 laporan	13.732.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	5.882.000	1 laporan	4.255.000	1 laporan	4.255.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	11.236.000	1 laporan	7.467.000	1 laporan	7.467.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 dokumen	9.253.000	2 dokumen	9.153.000	2 dokumen	9.153.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	11.334.000	2 dokumen	9.347.000	2 dokumen	9.347.000	DP4KB	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 laporan	6.614.000	1 laporan	4.427.000	1 laporan	4.427.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.7.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya perubahan Renstra OPD			1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaporan hibah bansos			4 kegiatan	15.000.000	4 kegiatan	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			181.548.000		178.758.000		278.518.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan pembinaan LPMK se Kota	2 kegiatan	95.033.000	3 keg	86.850.000	3 keg dan 17 kelurahan	142.810.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	2.7.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil kelurahan tingkat kota	21 buku	86.515.000	21 buku	0	21 buku	43.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.7.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan	1 keg		1 keg	35.912.000	1 keg	35.912.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator
4	2.7.15.8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba UP2K PKK Tingkat Kota dan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	55.996.000	3 Kegiatan	55.996.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulang an Kemiskinan
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			56.033.000		1.067.111.000		1.067.111.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.2	Pelayanan KIE	Tersampainya informasi tentang pengendalian penduduk dan keluarga	3 Kegiatan	21.150.000	3 Kegiatan	32.167.000	3 Kegiatan	32.167.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemeriksaan pupsmea	100 orang	23.170.000	100 orang	15.825.000	100 orang	15.825.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB	87 orang	11.713.000	87 orang	20.936.000	87 orang	20.936.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.8.15.17	Pembinaan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pembinaan pengendalian kependudukan di Kota Magelang	226 orang		226 orang	17.000.000	226 orang	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	2.8.15.16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokasi dan	12 bulan		12 bulan	673.183.000	12 bulan	673.183.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D		Rencana
6	2.8.15.19	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di sekolah	150 pelajar		150 pelajar	8.000.000	150 pelajar	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.8.15.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB	Tersedianya prasarana penunjang Balai Penyuluhan KB	2 balai		2 balai	300.000.000	2 balai	300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D		Percepatan Pencapaian Indikator
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			95.350.000		76.503.000		76.503.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%		100%					
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		30.00%		30.00%					
1	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	500 orang	53.000.000	500 orang	44.351.000	500 orang	44.351.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario
2	1.6.16.23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	150 orang	42.350.000	150 orang	32.152.000	150 orang	32.152.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			631.606.000		604.552.000		605.242.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		47.37%		47.37%					
1	2.2.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	30	272.788.000	12 bulan	219.829.000	12 bulan	220.519.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program
2	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak	17 Kelurahan	158.000.000	17 Kelurahan	134.605.000	17 Kelurahan	134.605.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
3	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum anak se kota magelang	400 anak	134.000.000	400 anak	66.002.000	400 anak	66.002.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
4	2.2.16.7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan,kecamatan,kota dan	250 orang, 8	66.818.000	250 orang, 8 buka laporan	75.525.000	250 orang, 8 buka laporan	75.525.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Percepatan
5	2.2.16.8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Terlaksananya evaluasi KLA tingkat kecamatan dan tersusunnya buku evaluasi KLA	300 orang dan 10 buku		300 orang dan 10 buku	36.479.000	300 orang dan 10 buku	36.479.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan
6	2.2.16.21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersusunnya buku profil anak dan perempuan	2 buku		2 buku, 150 orang	44.002.000	2 buku, 150 orang	44.002.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
7	2.2.16.11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak	300 orang		300 orang	28.110.000	300 orang	28.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			38.148.000		45.000.000		69.000.000				
1	2.7.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi LKK per triwulan, pendampingan administrasi LKK	3 Kegiatan	38.148.000	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.7.16.9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjangkaran TTG Kota Magelang	4 unit		4 unit	45.000.000	4 unit	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			14.665.000		11.782.000		11.782.000				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%		2%					
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	80	14.665.000	80 pelajar	11.782.000	80 pelajar	11.782.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			66.550.000		40.903.000		40.903.000				
			Rasio KDRT	0.05%		0.05%		0.05%					
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	20		20		20					
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		100%		100%					
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	100%		100%		100%					
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial	100%		100%		100%					
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani	100%		100%		100%					
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan	100%		100%		100%					
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%		100%		100%					
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	4%		4%		4%					
1	2.2.17.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tersedianya data perempuan yang bekerja di pemerintah dan parlemen	150 orang	39.930.000	150 orang, 2 buku	17.851.000	150 orang, 2 buku	17.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.2.17.10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan ABH di Kota Magelang	250 orang	26.620.000	250 orang	23.052.000	250 orang	23.052.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Akomodasi
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			69.357.000		463.936.000		1.138.936.000				
1	2.7.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan temu kader DP4KB	2 kegiatan		0 2 kegiatan	43.506.000	2 kegiatan	43.506.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional	5 kegiatan	43.857.000	3 kegiatan	79.802.000	3 kegiatan	79.802.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.7.17.6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB	60 orang	25.500.000	60 orang	25.244.000	60 orang	25.244.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.7.17.13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan	6 Kegiatan	0	6 Kegiatan	315.384.000	6 Kegiatan	315.384.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
5	2.7.17.14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya kegiatan TMMD	3 Kelurahan		3 Kelurahan	0	3 Kelurahan	675.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Akomodasi Musrenbang
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.17	Program pelayanan kontrasepsi			108.160.000		61.659.000		61.659.000				
			Cakupan peserta KB aktif	78.00%		78.00%		78.00%					
1	2.8.17.1	Pelayanan konseling KB	Tersampaiannya informasi yang benar tentang KB kepada masyarakat	213 konselor	24.558.000	213 konselor tingkat kelurahan	21.252.000	213 konselor tingkat kelurahan	21.252.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.8.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	125 orang	47.000.000	125 orang	9.730.000	125 orang	9.730.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.8.17.4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayannya masyarakat menjadi peserta KB MOP	20 orang	36.602.000	20 orang	30.677.000	20 orang	30.677.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			105.076.000		120.686.000		120.686.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan, Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	17 Kelurahan	105.076.000	17 Kelurahan	120.686.000	17 Kelurahan	120.686.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			453.650.000		173.936.000		173.936.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		20%		20%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		23%		23%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		78,50%		78,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4 kegiatan	84.000.000	3 kegiatan	96.060.000	3 kegiatan	96.060.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario
2	2.2.18.7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50	41.500.000	50 orang	27.876.000	50 orang	27.876.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.2.18.8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan Hari anak Nasional	500 anak	328.150.000	500 anak	50.000.000	500 anak	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			161.150.000		181.890.000		163.890.000				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		66%		66%					
1	2.8.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas lain	215	99.658.000	215 orang	135.654.000	215 orang	117.654.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.18.2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	446 orang	34.606.000	446 orang	26.036.000	446 orang	26.036.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya pendataan keluarga	639	26.886.000	639 orang	20.200.000	639 orang	20.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			18.200.000		15.864.000		15.864.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		97%		97%					
1	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	150 orang	18.200.000	60 orang	15.864.000	60 orang	15.864.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			511.575.000		975.120.000		830.225.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		35%		35%					
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		11		11					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		47%		47%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		35%		35%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		61%		61%					
			PKK Aktif	100%		100%		100%					
1	2.7.19.1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 orang	20.000.000	175 orang	75.000.000	175 orang	75.000.000	Kota Magelang	DBHCHT		Penanggungulan Kemiskinan
2	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 kegiatan, G	150.000.000	2 kegiatan, GOW, Dharma Wanita	117.040.000	2 kegiatan, GOW, Dharma Wanita	117.040.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggungulan Kemiskinan
3	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	341.575.000	1 organisasi dan 1 gedung	783.080.000	1 organisasi dan 1 gedung	638.185.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggungulan Kemiskinan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			316.000.000		196.682.000		196.682.000				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	meningkatnya gizi anak sekolah	900 anak	316.000.000	900 anak	196.682.000	900 anak	196.682.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Penanggulang
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			18.368.000		43.536.000		43.536.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%		3%		3%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		6%		6%					
1	2.8.20.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa	60 orang	9.184.000	60 orang	37.286.000	60 orang	37.286.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.20.2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	terlaksananya kegiatan PIK Remaja	40 orang	9.184.000	40 orang	6.250.000	40 orang	6.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.8.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			11.696.000		10.796.000		10.796.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe- nuhi	4%		4%		4%					
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	78%		78%		78%					
			Cakupan PUS peserta KB Ang- gota Usaha Peningkatan Pen- dapatan Keluarga Sejahtera	88%		88%		88%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/	100%		100%		100%					
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/	100%		100%		100%					
			Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	30%		30%		30%					
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap	100%		100%		100%					
			Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	11%		11%		11%					
			Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	60%		60%		60%					
			Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	12%		12%		12%					
			Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		3%		3%					
			Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina	90%		90%		90%					
			Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina	95%		95%		95%					
			Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		100%		100%					
			Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		100%		100%					
			Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%		3%		3%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%		1%		1%					
			Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%		100%		100%					
			Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%		100%		100%					
			Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%		100%		100%					
			Persentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	89%		89%		89%					
			Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka	35%		35%		35%					
1	2.8.23.2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	75 orang	11.696.000	17 kelurahan	10.796.000	17 kelurahan	10.796.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		103.897.000		111.787.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	terfasilitasinyakegiatan KPAD Kota Magelang			12 bulan	103.897.000	12 bulan	111.787.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
				TOTAL	3.951.180.000		5.456.683.000		6.157.902.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 URUSAN : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			578.358.000		629.005.000		417.890.000				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000	12 laporan	107.712.000	12 laporan	107.712.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	1 perwal	105.000.000	1 dokumen	133.563.000	1 perwal	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000	12 laporan	63.296.000	12 laporan	46.664.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000	4 laporan	29.606.000	4 laporan	29.606.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000	29 OPD	218.564.000	29 OPD	157.644.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000	7 Laporan	76.264.000	7 laporan	76.264.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.301.011.000		2.251.988.000		2.136.791.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000	1 raperda	460.882.000	1 raperda	451.882.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	1 dokumen	243.813.000	1 dokumen	264.798.000	1 dokumen	261.294.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 raperda	372.118.000	1 Raperda	378.100.000	1 raperda	339.667.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000	2 raperwal	352.348.000	2 raperwal	314.320.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000	2 dokumen	175.157.000	2 dokumen	169.157.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000	2 dokumen	92.086.000	2 dokumen	92.086.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000	2 dokumen	149.445.000	2 dokumen	136.865.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000	2 dokumen	92.345.000	2 dokumen	92.345.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000	29 OPD	42.123.000	29 OPD	40.071.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000	29 OPD	46.302.000	29 OPD	42.802.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	74.783.000	29 OPD	72.351.000	29 OPD	67.151.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000	2 laporan	37.866.000	2 laporan	45.966.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000	29 OPD	43.151.000	29 OPD	41.651.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000	29 OPD	45.034.000	29 OPD	41.534.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			401.731.000		399.859.000		401.659.000				
1	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000	74 sekolah	217.831.000	74 sekolah	219.631.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000	73 pegawai	86.445.000	60 pegawai	86.445.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000	12 laporan	95.583.000	12 laporan	95.583.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			876.826.000		840.758.000		855.732.000				
1	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000	500 berkas	123.993.000	6 laporan	142.963.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	3000 SP2D	158.713.000	3000 SP2D	148.115.000	3000 SP2D	163.247.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000	10 jenis	53.764.000	29 OPD	53.764.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000	800 SPM	34.372.000	700 SPM	34.372.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000	10 kegiatan	29.786.000	29 OPD	29.786.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000	800 berkas	141.461.000	800 berkas	118.098.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000	1100 SP2D	38.671.000	1100 SP2D	38.671.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000	1500 berkas	107.557.000	1500 berkas	107.557.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000	4 jenis informasi	24.218.000	4 jenis dokumen	24.218.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000	470 daftar gaji	138.821.000	470 daftar gaji	143.056.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.533.474.000		1.534.056.000		1.479.010.000				
1	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000	1 aplikasi	232.322.000	1 aplikasi	215.680.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000	12 dokumen	202.699.000	12 dokumen	200.677.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000	348 laporan OPD	111.196.000	348 laporan OPD	103.996.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000	12 laporan	108.027.000	12 laporan	108.817.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000	12 laporan	61.118.000	12 laporan	61.118.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000	120 orang	254.275.000	120 orang	224.303.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000	1 dokumen	43.782.000	1 dokumen	43.782.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000	12 laporan	465.853.000	12 laporan	465.853.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000	2 kegiatan	54.784.000	2 kegiatan	54.784.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			223.968.000		175.330.000		169.250.000				
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000	12 dokumen	45.216.000	12 laporan	43.416.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000	2 laporan	13.608.000	2 laporan	13.608.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000	2 dokumen	7.874.000	2 laporan	7.874.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000	1500 berkas	65.197.000	1500 berkas	61.037.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000	1 dokumen	6.161.000	1 dokumen	6.161.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tercapainya perubahan perencanaan dan strategi OPD		15.000.000	1 dokumen	10.042.000	1 dokumen	10.042.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000	2 dokumen	27.232.000	2 dokumen	27.112.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			366.120.000		366.120.000		188.400.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000	12 bulan	365.120.000	12 bulan	187.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.641.494.000		1.714.605.000		1.797.976.000				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000	12 bulan	874.396.000	12 bulan	861.196.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000	65 kendaraan	20.440.000	65 kendaraan	16.415.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000	22 jenis/item	60.271.000	22 jenis/item, 2 orang	63.951.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000	48 jenis	34.223.000	48 jenis	34.223.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000	15 jenis	25.971.000	15 jenis	25.971.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000	17 jenis	7.571.000	17 jenis	7.571.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000	3 jenis	15.400.000	3 jenis	15.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000	3 jenis	10.127.000	3 jenis	5.643.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000	12 bulan	105.862.000	12 bulan	134.626.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000	12 bulan	219.960.000	12 bulan	274.560.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honorar daerah	169.479.000	9 orang	208.740.000	9 orang	226.776.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000	82 file	131.644.000	82 file	131.644.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			56.356.000		56.354.000		56.354.000				
1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000	1 dokumen	56.354.000	1 dokumen	56.354.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			396.521.000		405.458.000		385.958.000				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000	1 perda	199.965.000	1 Perda	192.465.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000	1 perwal	205.493.000	1 Perwal	193.493.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.307.269.000		3.308.487.000		3.401.818.000				
1	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000	36200 SPPT	130.700.000	36.200 SPPT	130.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek pajak PBB	219.676.000	1 peta obyek pajak PBB	239.876.000	1 peta obyek pajak PBB	237.735.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000		93.595.000	100 laporan	96.235.000	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	5 laporan, 1 kegiatan	317.051.000	5 laporan	318.457.000	5 laporan; 1 kegiatan	401.101.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000	4 laporan	50.739.000	4 laporan	42.803.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000	12 laporan	134.196.000	12 laporan; 1200 WP	131.096.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000	12 laporan	146.757.000	4 laporan	146.757.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000	120 data wajib pajak	162.878.000	120 data WP	164.268.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000	3 kegiatan	317.581.000	3 kegiatan	371.911.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000	12 bulan	383.023.000	12 bulan	371.023.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000	12 bulan	166.329.000	12 bulan	163.969.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000	12 bulan	118.448.000	12 bulan	121.088.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000	6 LHP atas wajib pajak	63.228.000	4 LHP atas Wajib Pajak	62.028.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000	17 kelurahan	281.043.000	17 kelurahan	272.643.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.863.000	50 SK	103.580.000	50 SK	97.604.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000	28 laporan	199.351.000	28 laporan	199.351.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000	16 laporan	146.387.000	16 laporan	146.387.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	540 wajib pajak	54.674.000	540 wajib pajak	54.670.000	540 Wajib Pajak	47.470.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000	12 laporan	53.058.000	12 laporan	53.058.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000	800 SKPD	144.591.000	800 SKPD Pajak Reklame; 960 SKPD PAT; 12 Laporan Penataush. Pjk Reklame; 12 laporan Penataush.PAT	144.591.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			697.303.000		696.608.000		745.482.000				
1	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000	1 unit	83.962.000	1 unit	83.962.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000	52 unit	359.912.000	52 unit	317.015.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000	39 unit	36.984.000	39 unit	30.365.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	10 jenis	207.000.000	6 jenis	206.500.000	10 jenis	158.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	29 buah	9.250.000	27 buah	9.250.000	29 buah	12.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	ruang rapat	1 ruang rapat	0	0	0	1 ruang rapat	119.940.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC	2 unit	0	0	0	2 unit	23.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			150.858.000		137.214.000		137.214.000				
					839,992,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000	40000 dokumen	137.214.000	40000 dokumen	137.214.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.511.658.000		6.515.332.000		6.727.132.000				
1	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000	223 bidang	66.900.000	223 bidang	66.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	17 unit	433.984.000	17 unit	442.883.000	17 unit	446.039.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000	4 laporan	51.276.000	4 laporan	51.276.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000	20 SPPT	30.000.000	20 SPPT	30.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.19.34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	12 orang	489.250.000	12 orang	485.608.000	12 orang	538.362.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000	1 laporan	86.495.000	1 laporan	86.495.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	120.925.000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	119.384.000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	94.584.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000	3 kegiatan penelitian	43.287.000	3 keg penelitian	43.287.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000	8 jenis	256.559.000	8 jenis laporan; 1 aplikasi SIM Aset	366.715.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolaan barang	92.220.000	29 OPD	86.861.000	185 pejabat pengelolaan barang	84.221.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000	10 dokumen	124.516.000	10 dokumen	114.746.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.19.16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000	12 bulan	214.990.000	12 bulan; Papan Kepemilikan Tanah	307.490.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000	2 lapangan	64.111.000	2 lapangan	67.267.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000	4 paket	52.521.000	4 paket	52.521.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000	12 kegiatan	90.045.000	12 keg	85.590.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000	7 rumah dinas/mess	628.281.000	7 rumah dinas/mess	565.536.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000	4 kegiatan	71.486.000	7 kegiatan	107.654.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	25.617.000	4 kegiatan	25.466.000	6 keg	36.244.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.19.15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000	3 paket	87.592.000	3 paket	63.992.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	328.807.000	12 bidang	326.557.000	12 bidang	321.981.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
21	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000	17 unit	38.400.000	17 unit	38.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000	3 kegiatan	54.027.000	3 Kegiatan	131.722.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
23	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000	11 kegiatan	132.706.000	4 kegiatan	132.706.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 paket	354.195.000	3 unit	354.024.000	3 paket	312.047.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
25	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000	2 bidang	18.070.000	2 bidang; 100 patok tanah	18.070.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000	3 kecamatan	55.455.000	3 kecamatan	55.455.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
27	4.4.19.38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000	1 Perwal	55.358.000	1 Perwal	55.358.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
28	4.4.19.39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000	2 Bus	2.452.474.000	2 bus	2.452.474.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	19.042.947.000		19.031.174.000		18.900.666.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Perhubungan
 URUSAN : Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan											
	2.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.006.500.000		944.170.000		1.028.805.000				
1	2.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2 jenis	2.000.000		1.200.000	2 kali pengiriman	700.000	Dishub	DAU		ExBAU
2	2.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan	1	105.000.000		167.196.000		167.196.000	Dishub	DAU		ExBAU
3	2.9.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terlaksananya pelayanan	27 unit	14.500.000		14.671.000		14.671.000	Dihub	DAU		ExBAU
4	2.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	175.000.000		163.106.000		163.106.000	Dishub	DAU		ExBAU
5	2.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	140.000.000		112.929.000	12 bulan	120.807.000	Dishub	DAU		ExBAU
6	2.9.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	31.000.000		24.500.000		24.500.000	Dishub	DAU		ExBAU
7	2.9.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	17.500.000		13.830.000		13.830.000	Dishub	DAU		ExBAU
8	2.9.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Terlaksananya pelayanan	1	20.000.000		20.651.000		20.651.000	Dishub	DAU		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.9.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1	14.000.000		7.429.000	6 set	17.029.000	Dishub	DAU		ExBAU
10	2.9.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	10.000.000		9.180.000		9.180.000	Dishub	DAU		ExBAU
11	2.9.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	2.500.000		1.640.000		1.640.000	Dishub	DAU		ExBAU
12	2.9.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	62.500.000		55.610.000	12 bulan	50.610.000	Dishub	DAU		ExBAU
13	2.9.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	250.000.000		184.800.000	12 bulan	244.852.000	Dishub	DAU		ExBAU
14	2.9.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	150.000.000		157.152.000	12 bulan	169.757.000	Dishub	DAU		ExBAU
15	2.9.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	12.500.000		10.276.000		10.276.000	Dishub	DAU		ExBAU
	2.9.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.105.000.000		444.093.000		718.871.000				
1	2.9.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan	6	80.000.000		0	6 jenis	30.500.000	Dishub	DAU		ExBAU
2	2.9.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan	8	250.000.000		0	2 set	53.000.000	Dishub	DAU		ExBAU
3	2.9.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarana dan	1	90.000.000		130.000.000	12 bulan	123.000.000	Dishub	DAU		ExBAU
4	2.9.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan	26	350.000.000		231.751.000	12 bulan	235.051.000	Dishub	DAU		ExBAU
5	2.9.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan	1	20.000.000		16.450.000	12 bulan	25.650.000	Dishub	DAU		ExBAU
6	2.9.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan	9	315.000.000		65.892.000	12 bulan	75.320.000	Dishub	DAU		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.9.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	terlaksananya tambah daya dan terpasangnya jaringan listrik gedung pengujian kendaraan	1	0		0	1 paket	176.350.000	Dishub	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.9.3	Program peningkatan disiplin aparatur			73.000.000		35.076.000		35.076.000				
1	2.9.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai	60	73.000.000		35.076.000		35.076.000	Dishub	DAU		ExBAU
	2.9.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			91.312.000		92.501.000		92.501.000				
1	2.9.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	dokumen renstra	1			15.000.000	1	15.000.000	Dishub	DAU		Tema RKPD 2019
2	2.9.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Peningkatan Capaian Kinerja	12	35.974.000		24.981.000		24.981.000	Dishub	DAU		Rencana
3	2.9.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja	2	18.000.000		13.943.000		13.943.000	Dishub	DAU		Rencana
4	2.9.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Peningkatan Capaian Kinerja	2	26.034.000		22.793.000		22.793.000	Dishub	DAU		Rencana
5	2.9.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)	Peningkatan Capaian Kinerja	1	11.304.000		8.572.000		8.572.000	Dishub	DAU		Rencana
6	2.9.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	2 dokumen			7.212.000		7.212.000	Dishub	DAU		Rencana
	2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			328.910.000		567.876.000		272.836.000				
			DISHUB		65,000,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%									
			Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata	2									
			Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	66%									
			Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	90									
			Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	18									
1	2.9.15.2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	dokumen penentuan lokasi terminal	5 dokumen	99.627.000		155.500.000	0	0	Kota magelang	DAU		Rencana
2	2.9.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya pengelolaan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 terminal	85.376.000		103.106.000	12 bulan	12.106.000	Terminal Type C	DAU		Program prioritas RPJM
3	2.9.15.11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	terfasilitasinya koordinasi eksternal bidang perhubungan	5 kali koordinasi	0		43.540.000	0	0	eks karesidenan kedu	DAU		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.9.15.12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	terfasilitasinya proses penilaian WTN	1 penilaian	71.064.000		36.410.000		36.410.000	Kota Magelang	DAU		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.9.15.13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya forum lalu lintas	4 kali koordinasi	43.179.000		36.295.000		36.295.000	Dishub	DAU		Program prioritas RPJM
6	2.9.15.14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Terlaksananya survey dan analisis simpang	5 simpang bersinyal dan tidak bersinyal	29.664.000		13.100.000		13.100.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
7	2.9.15.15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Terlaksananya amdal	30 rekomendasi	0		92.309.000		92.309.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
8	2.9.15.16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terlaksananya publikasi	2 kegiatan	0		52.462.000	2 Kegiatan	47.462.000	Dishub	DAU		Rencana
9	2.9.15.18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan	4 kegiatan			12.530.000		12.530.000	Dishub	DAU		Rencana
10	2.9.15.17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Terkelolanya TI di bidang Perhubungan	4 media			22.624.000		22.624.000	Dishub	DAU		Rencana
	2.9.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			360.300.000		389.874.000		263.224.000				
			Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7									
1	2.9.16.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan prasarana fasilitas perhubungan	10 jenis	160.300.000		121.800.000		121.800.000	Dishub	DAU		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.9.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faisilitas LLAJ yang terpelihara	1 unit	75.000.000		106.000.000	0	0	Dishub	DAU		Rencana
3	2.9.16.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faisilitas LLAJ yang terpelihara	9 jenis	125.000.000		162.074.000	9 jenis	141.424.000	Dishub	DAU		Rencana
	2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			859.168.000		682.872.000		659.872.000				
			Jumlah arus penumpang angkutan umum	2,900,000									
			Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%									
1	2.9.17.3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan pelayanan angkutan	270 peserta	25.000.000		41.530.000		41.530.000	Dishub	DAU		Rencana
2	2.9.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	15 lokasi	194.328.000		87.320.000	12 bulan	84.320.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
3	2.9.17.6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3 kegiatan	111.568.000		124.244.000		124.244.000	Terminal	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.9.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya survey load faktor	2 lokasi (terminal tidak dan kebonpolo)	60.542.000		11.775.000		11.775.000	Dishub	DAU		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.9.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskibra pada HUT RI	2 layanan angkutan	178.128.000		158.400.000	2 Kegiatan	138.400.000	Dishub	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.9.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah ijin trayek yang dilayani	65 surat ijin	136.242.000		27.362.000		27.362.000	Dishub	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.9.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Lomba pemilihan awak angkutan umum teladan	60 orang	30.596.000		22.199.000		22.199.000	Dishub	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.9.17.18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terbinanya remaja pelopor keselamatan lalu lintas	360 orang	122.764.000		210.042.000		210.042.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
	2.9.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			569.596.000		702.495.000		652.495.000				
			DISHUB		3,954,113,000								
			Jumlah pelayanan umum	1									
1	2.9.18.8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	dokumen DED terminal tipe c	1 dokumen DED			50.000.000	0	0	kota magelang	DAU		Program prioritas RPJM
2	2.9.18.7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perparkiran	400 peserta	91.026.000		68.103.000		68.103.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
3	2.9.18.9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pendampingan	12 kegiatan	478.570.000		384.392.000		384.392.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
4	2.9.18.12	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit			200.000.000		200.000.000	Kota Magelang	DAU		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.9.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			1.434.345.000		3.322.824.000		3.441.056.000				
			DISHUB		6,026,762,000								
			Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	8?									
			Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	60%?									
1	2.9.19.16	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	terlaksananya pengamanan jalur lalu lintas	10 lokasi			692.800.000	12 bulan	799.626.000	kota magelang	DAU		Program prioritas RPJM
2	2.9.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalin	50 rambu	59.148.000		41.075.000		41.075.000	Kota Magelang	DAU		Akomodasi Musrenbang
3	2.9.19.2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	5000 m'	261.718.000		130.830.000		130.830.000	Kota Magelang	DAU		Akomodasi Musrenbang
4	2.9.19.4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Tersedianya lampu flashing	2 unit	261.982.000		181.500.000		181.500.000	Kota Magelang	DAU		Akomodasi Musrenbang
5	2.9.19.5	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya trafic light ATCS	5 lokasi	460.000.000		1.732.996.000		1.732.996.000	Kota Magelang	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.9.19.7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Tersedianya pita kejut, cermin cembung, water barrier dan traffic count	50 traffic cone, 21 pita kejut,	279.987.000		200.500.000	10	248.000.000	Kota Magelang	DAU		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.9.19.10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Terwujudnya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	5 lokasi	88.352.000		57.980.000		57.980.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
8	2.9.19.11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Terlaksananya survey ruas jalan	5 jalan	23.158.000		10.182.000		10.182.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
9	2.9.19.14	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD	600 siswa PAUD			40.581.000	4 Kegiatan	11.897.000	Kota Magelang	DAU		Kota Layak Anak
10	2.9.19.13	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	Jumlah laporan inspeksi/ audit jalan kota	2 dokumen			45.000.000		45.000.000	Kota Magelang	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.9.19.15	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Jumlah kegiatan car free day dan car free night	20 kegiatan			189.380.000	12 bulan 16 Kegiatan	181.970.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
	2.9.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			960.000.000		233.461.000		326.087.000				
					6,933,635,000								
			DISHUB		392,000,000								
			Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7,986									
			Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4									
1	2.9.20.4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	4300 KBWU	945.000.000		217.668.000	12 bulan	310.294.000	Dishub	DAU		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.9.20.5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Terlaksananya pembinaan pembinaan pengujian kendaraan bermotor	5 kegiatan	15.000.000		15.793.000		15.793.000	Kota Magelang	DAU		Rencana
				TOTAL	6.788.131.000		7.415.242.000		7.490.823.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 URUSAN : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.156.900.000		3.841.702.000		3.919.613.000				
1	2.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominsta	2 jenis	2.000.000	2 jenis	1.030.000	2 jenis	1.030.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Aktifitas Kerja	4 langganan	1.060.000.000	4 langganan	3.390.333.000	4 langganan	3.412.533.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	15 unit	14.500.000	16 unit	5.730.000	16 unit	5.730.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	12 laporan keuangan	175.000.000	12 laporan keuangan	150.368.000	12 laporan keuangan	150.368.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.10.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	12 bulan	325.000.000	12 bulan	30.869.000	12 bulan	32.390.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.10.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	42 jenis	35.000.000	40 jenis	14.933.000	40 jenis	14.933.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	17 jenis	26.400.000	16 jenis	10.511.000	16 jenis	10.511.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.10.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 jenis	14.000.000	3 jenis	9.500.000	3 jenis	9.500.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.10.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	5 jenis	10.000.000	5 jenis	8.472.000	5 jenis	8.472.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU

10	2.10.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	36 tabung	2.500.000	36 tabung	3.600.000	36 tabung	3.600.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.10.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	32 orang	62.500.000	12 bulan	20.337.000	12 bulan	25.337.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.10.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	70 kegiatan	250.000.000	12 bulan	126.252.000	12 bulan	172.400.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.10.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	3 orang	150.000.000	2 orang	39.378.000	2 orang	42.420.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.10.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi Kepegawaian	2 dokumen	12.500.000	2 dokumen	19.883.000	2 dokumen	19.883.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	2.10.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	17.500.000	2 jenis	10.506.000	2 jenis	10.506.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.10.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			690.000.000		517.697.000		532.579.000				
1	2.10.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	16 unit	350.000.000	16 unit	124.262.000	16 unit	149.262.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.10.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 jenis	90.000.000	2 jenis	4.800.000	2 jenis	4.800.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.10.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	15 jenis	0	16 jenis	295.635.000	16 jenis	221.595.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.10.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatkan kelancaran aktifitas kerja dengan adanya alat kantor yang memadai	4 jenis	250.000.000	4 jenis	93.000.000	4 jenis	156.922.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.10.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			88.312.000		61.321.000		61.321.000				
1	2.10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 laporan	35.974.000	12 laporan	11.638.000	12 laporan	11.638.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.10.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 dokumen	0	2 dokumen	8.562.000	2 dokumen	8.562.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU

3	2.10.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	2 dokumen	26.034.000	2 dokumen	10.422.000	2 dokumen	10.422.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.10.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1 dokumen	11.304.000	1 dokumen	7.984.000	1 dokumen	7.984.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.10.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya Perubahan Renstra Diskominsta	1 dokumen	15.000.000		15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.10.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya laporan akhir tahun	2 Dokumen		2 Dokumen	7.715.000	2 Dokumen	7.715.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.053.000.000		1.489.372.000		1.482.675.000				
				-	5,139,479,000	-		-					
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln					
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		80%		80%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					

			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		1		1					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang	17 kelompok, 6 kegiatan sosialisasi	185.000.000	17 kelompok, 6 kegiatan sosialisasi	96.700.000	17 kelompok, 6 kegiatan sosialisasi	96.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Program prioritas RPJM
2	2.10.15.6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembinaan untuk pengelola PPID	6 kegiatan	58.000.000	6 kegiatan	141.710.000	6 kegiatan	146.710.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.10.15.8	Siaran Radio	Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui media Radio bagi Masyarakat	12 Bulan	390.000.000	12 Bulan	535.546.000	12 Bulan	550.749.000	Jl. Pahlawan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.10.15.10	Penerbitan majalah	Penerbitan Majalah Dinamika	4 edisi	125.000.000	4 edisi	125.040.000	4 edisi	125.040.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website secara berkala	30 web	45.000.000	12 Bulan	157.907.000	12 Bulan	157.907.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

6	2.10.15.22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasikannya Informasi Pembangunan Daerah	12 bulan	40.000.000	7 kegiatan	61.765.000	7 kegiatan	61.765.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	2.10.15.23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terlaksananya pemantauan Isi siaran sesuai P3SPS	7 Lembaga Penyiaran	85.000.000	9 Lembaga Penyiaran	47.189.000	9 Lembaga Penyiaran	47.189.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	2.10.15.24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif oleh Pimpinan Daerah	12 Kegiatan	125.000.000	12 Kegiatan	166.163.000	12 Kegiatan	139.263.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
9	2.10.15.26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Lomba dalam rangka hari jadi magelang FM	8 orang pemenang		1 kegiatan	105.752.000	1 kegiatan	105.752.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	2.10.15.36	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	Terlaksananya literasi media massa kepada masyarakat	6 kegiatan		6 kegiatan	51.600.000	6 kegiatan	51.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			120.000.000		512.489.000		514.408.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		35,19%		35,19%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.13	Manajemen Data Daerah	Terkelolanya data daerah dalam data go	50 buku	120.000.000	80 buku	424.783.000	50 buku	425.382.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.14.15.22	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Tersedianya data hasil survey Sosial Ekonomi	30 buku		1 kegiatan	67.021.000	1 kegiatan	68.341.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memper kuat Impleme ntasi Masterpl an Smartcity , Program prioritas RPJM
3	2.14.15.10	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Data	1 kegiatan		2 kegiatan	20.685.000	2 kegiatan	20.685.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian											

	2.15.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			0		142.144.000		145.185.000				
					125,000,000								
			Ketersediaan SOP persandian	100%		100%		100%					
			Tingkat kapasitas SDM persandian	100%		100%		100%					
			Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	90%		90%		90%					
1	2.15.15.8	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Terlaksananya survey kepuasan	1 kegiatan		1 kegiatan	10.002.000	1 kegiatan	10.002.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.15.15.3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi berjalan dengan lancar	12 bulan		12 bulan	132.142.000	12 bulan	135.183.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			86.000.000		381.362.000		381.362.000				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1		1		1					
			Interoperabilitas antar system informasi	2		2		2					
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%		50%		50%					
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%		70%		70%					
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%		100%					

1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang	6 kegiatan	86.000.000	6 kegiatan	45.842.000	6 kegiatan	45.842.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
2	2.10.16.2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 laporan	0	12 laporan	335.520.000	12 laporan	335.520.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			260.000.000		306.792.000		306.792.000				
1	2.10.18.6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional	7 kegiatan	260.000.000	9 kegiatan	281.356.000	9 kegiatan	281.356.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.10.18.8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Pelaksanaan upacara bela negara	1 kegiatan	0	2 kegiatan	25.436.000	2 kegiatan	25.436.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.10.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			0		5.166.806.000		5.140.374.000				
1	2.10.19.2	Pembangunan WAN Kota	Tersedianya jaringan WAN Kota tahap 6	30 titik terminasi	0	30 titik terminasi	1.956.229.000	30 titik terminasi	1.956.229.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

2	2.10.19.3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12 bulan	0	12 bulan	164.558.000	12 bulan	167.601.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.10.19.9	Pembangunan Command Center	Terbangunnya command center	1 paket		1 paket	2.594.755.000	1 paket	2.594.755.000	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
4	2.10.19.7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi	12 bulan		12 bulan	135.970.000	12 bulan	146.104.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
5	2.10.19.4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terupdatenya data MCity Magelang Cerdas	12 bulan		12 bulan	205.074.000	12 bulan	205.074.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

6	2.10.19.10	Pengelolaan Command Center	Terkelolanya Command Center	3 bulan		3 bulan	110.220.000	3 bulan	70.611.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			235.000.000		245.518.000		215.478.000				
1	2.10.20.9	Pelayanan operasional LPSE	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	235.000.000	12 bulan	245.518.000	12 bulan	215.478.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			87.661.000		87.661.000		87.661.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		1					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0		0					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		1		1					

1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya perubahan Perda Pengelolaan Menara Telekomunikasi		87.661.000		87.661.000		87.661.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
				TOTAL	4.776.873.000		12.752.864.000		12.787.448.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			762.498.000		718.425.000		736.020.000				
1	2.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	90 surat	560.000	90 surat	1.575.000	90 surat	1.575.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	5 jenis	74.500.000	5 jenis	127.800.000	5 jenis	115.020.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.12.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23 unit	7.200.000	23 unit	9.431.000	23 unit	9.431.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya LaporanPengelola Keuangan Daerah	12 laporan	115.997.000	12 laporan	131.256.000	12 laporan	131.256.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	484 m2	49.750.000	484 m2	55.394.000	484 m2	58.525.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.12.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	60 jenis	27.000.000	60 jenis	13.125.000	60 jenis	13.125.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	35.200.000	7 jenis	11.570.000	7 jenis	11.570.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	5 jenis	7.200.000	5 jenis	1.650.000	5 jenis	1.650.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	8.200.000	3 jenis	6.600.000	3 jenis	6.600.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.12.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	4 jenis	7.750.000	4 jenis	3.350.000	4 jenis	2.300.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.12.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	3 keg/bln	38.000.000	3 keg/bln	22.566.000	3 keg/bln	22.566.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.12.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	18 kegiatan	280.527.000	18 kegiatan	160.440.000	60 kegiatan	175.240.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.12.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	5 org/bln	102.100.000	5 org/bln	165.154.000	8 org/bln	178.648.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.12.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	9 jenis	8.514.000	9 jenis	8.514.000	9 jenis	8.514.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			460.600.000		315.250.000		363.280.000				
1	2.12.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC ruang server	5 unit	79.100.000	0	0	5 unit	27.220.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.12.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 keg	28.000.000	2 keg	78.610.000	2 keg	78.610.000	DPMP TSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	22 unit	212.500.000	22 unit	202.260.000	22 unit	202.260.000	DPMP TSP Modal Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.12.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 jenis	14.000.000	6 jenis	14.930.000	6 jenis	10.600.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.12.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 jenis	35.250.000	5 jenis	18.050.000	5 jenis	25.250.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.12.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	4 buah	1.750.000	4 buah	1.400.000	4 buah	1.400.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.12.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Komputer PC, Monitor	2 unit	90.000.000	0	0	2 unit	17.940.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur			10.080.000		10.080.000		10.080.000				
1	2.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	28 pegawai	10.080.000	28 pegawai	10.080.000	28 pegawai	10.080.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.12.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			67.131.000		63.483.000		63.483.000				
1	2.12.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD	12 laporan	13.790.000	12 laporan	11.176.000	12 laporan	11.176.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.12.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran OPD	1 dokumen	4.200.000	1 dokumen	4.167.000	1 dokumen	4.167.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.12.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis OPD	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.042.000	1 dokumen	2.042.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.12.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	3.849.000	1 dokumen	3.849.000	DPMPPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.12.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Perubahan OPD	2 dokumen	8.700.000	2 dokumen	11.725.000	2 dokumen	11.725.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.12.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA DPPA OPD	4 dokumen	14.000.000	4 dokumen	12.731.000	4 dokumen	12.731.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.12.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	1 dokumen	5.900.000	1 dokumen	4.252.000	1 dokumen	4.252.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.12.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD	1 Dokumen	13.541.000	1 Dokumen	13.541.000	1 Dokumen	13.541.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			884.569.710		826.502.000		762.682.000				
					687,414,000								
			Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	3									
1	2.12.15.1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama strategis	15 LOI	28.422.900	15 LOI	24.452.000	15 LOI	24.452.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.12.15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1 kegiatan	19.022.410	1 kegiatan	19.548.000	1 kegiatan	19.548.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.12.15.12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7 jenis	93.000.000	7 jenis	66.785.000	7 jenis	66.785.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.12.15.4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	1 kegiatan	16.174.400	1 kegiatan	6.908.000	1 kegiatan	6.908.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.12.15.15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya dokumen kajian potensi sumber daya investasi, Buku Potensi dan Peluang Investasi	1 dokumen	117.240.000	1 dokumen	117.250.000	1 dokumen	117.250.000	DPMPSTP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	2.12.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terealisasinya LOI	15 LOI	4.310.000	15 LOI	4.310.000	20 LOI	12.740.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.12.15.19	Fasilitasi Pameran Investasi	Terfasilitasinya pameran investasi	6 kali	560.300.000	6 kali	538.300.000	6 keg	466.050.000	Luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.12.15.18	Penyelenggaraan Forum Investasi	terselenggaranya bisnis meeting dan pameran investasi	5 LOI	46.100.000	5 LOI	48.949.000	5 LOI	48.949.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			14.000.000		14.000.000		14.000.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			702.110.500		677.397.000		680.680.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%				100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%				60%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.17.6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan 2 sosialisasi, Karnaval, CFD	4 kegiatan	64.645.000	4 kegiatan	67.747.000	4 kegiatan	67.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.17.7	Survey Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	144 survey	389.625.500	144 survey	370.088.000	96 survey	373.371.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.1.17.8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	10 pengaduan	43.328.000	10 pengaduan	35.000.000	10 pengaduan	35.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.17.19	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Terlaksananya audit internal dan eksternal ISO	5 kegiatan	48.728.000	5 kegiatan	48.778.000	5 kegiatan	48.778.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.17.21	Fasilitasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Fasilitasi Perizinan berusaha di Kota Magelang	6 perusahaan	155.784.000	6 investor	155.784.000	40 perusahaan	155.784.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			105.600.000		105.600.000		95.250.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya perwal RUPM(Rencana Umum Penanaman Modal)	1 dokumen	105.600.000	1 dokumen	105.600.000	1 Dokumen	95.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			137.077.000		135.357.000		168.201.000				
			Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%									
			Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15.00%									
			Jumlah investor baru	168									
1	2.12.16.18	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP-el	5 kegiatan	34.261.000	4 kegiatan	34.261.000	4 kegiatan, 1 aplikasi	65.539.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.12.16.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal	16 buku	8.465.000	16 buku	8.465.000	16 buku	8.465.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.12.16.13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan Izin Berusaha OSS	2 kegiatan	6.049.000	2 dokumen	7.049.000	2 Dokumen	7.049.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.12.16.14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	120 perusahaan	17.900.000	60 perusahaan	17.840.000	60 Perusahaan	17.840.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.12.16.15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Kegiatan sosialisasi Penanaman Modal, Kegiatan Bintek LKPM kepada pengusaha	120 orang	32.902.000	120 orang	30.242.000	120 orang	30.242.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	2.12.16.17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan Penanaman Modal	4 laporan	37.500.000	4 laporan	37.500.000	4 laporan	39.066.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	3.143.666.210		2.866.094.000		2.893.676.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
 URUSAN : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			940.357.000		909.267.000		947.938.000				
1	2.13.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12 bulan	1.208.000	12 bulan	600.000	0 bulan	0	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.13.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 bulan	67.379.000	12 bulan	114.400.000	12 bulan	119.800.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.13.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	18 kendaraan	11.638.000	18 kendaraan	8.206.000	18 kendaraan	8.206.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.13.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan daerah dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	12 bulan	162.077.000	12 bulan	153.704.000	12 bulan	151.204.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.13.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan	90.000.000	12 bulan	152.527.000	12 bulan	150.211.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.13.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	42.262.000	12 bulan	21.000.000	12 bulan	21.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.13.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 bulan	16.121.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.13.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor dan bangunan olahraga	12 bulan	9.660.000	12 bulan	20.136.000	12 bulan	20.136.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.13.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	5.100.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.13.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai	12 bulan	2.657.000	12 bulan	3.168.000	12 bulan	2.272.000	Disporapar Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.13.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat, dan tamu	12 bulan	40.355.000	12 bulan	33.796.000	12 bulan	26.846.000	disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.13.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	301.900.000	12 bulan	139.230.000	12 bulan	179.464.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU

13	2.13.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	12 bulan	190.000.000	12 bulan	243.900.000	12 bulan	250.199.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.13.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			402.220.000		5.393.321.000		5.342.822.000				
1	2.13.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan GOR Samapta	12 bulan	112.298.000	12 bulan	409.530.000	12 bulan	421.530.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.13.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	18 kendaraan	251.281.000	18 kendaraan	213.841.000	18 kendaraan / 12 bulan	173.607.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.13.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.227.000	12 bulan	9.365.000	12 bulan	9.365.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.13.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	24.150.000	12 bulan	5.585.000	12 bulan	5.585.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.13.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	12 bulan	10.264.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.13.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya bangunan Gedung kantor Disporapar	1 unit	0	1 unit	4.750.000.000	1 unit	4.727.735.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.13.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			9.747.904.000		95.400.000		95.400.000				
1	2.13.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	12 bulan	15.921.000	12 bulan	14.922.000	12 bulan	14.922.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.13.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	1 laporan	3.868.000	1 laporan	4.576.000	1 laporan	4.576.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.13.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Pertanggungjawab Keuangan APBD	10 laporan	5.646.000	10 laporan	6.362.000	10 laporan	6.362.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.13.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Penetapan 2020 dan Perubahan Renja 2019 dengan baik dan benar	2 dokumen	19.834.000	2 dokumen	15.493.000	2 dokumen	15.493.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.13.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020	2 dokumen	32.545.000	2 dokumen	26.756.000	2 dokumen	26.756.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.13.6.9	Penyusunan LAKIP OPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2018	1 dokumen	9.657.586.000	1 dokumen	5.697.000	1 dokumen	5.697.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.13.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersusunnya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	1 kegiatan	12.504.000	1 kegiatan	6.594.000	1 kegiatan	6.594.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	2.13.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	0	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			56.426.000		35.031.000		35.031.000				
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	85%		85%		85%					
			Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional										
			a. Propinsi	7 pemuda		7 pemuda		7 pemuda					
			b. Nasional	1 pemuda		1 pemuda		1 pemuda					
1	2.13.15.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Tersusunnya buku database kepemudaan	50 buku	26.552.000	50 buku	12.481.000	50 buku	12.481.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.13.15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Pembinaan mental dan sepirtual pemuda	200 orang	29.874.000	200 orang	22.550.000	200 orang	22.550.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,2	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata											
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			3.000.871.000		2.490.932.000		2.329.075.000				
			Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 hari		2-4 hari		2-4 hari					
			Persentase TIC yang representatif	100%		100%		100%					
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.139.961		#####		#####					
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.201		5.201		5.201					
1	3.2.15.11	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Peralatan dan perlengkapan TIC		0			Laptop 1 unit, Kamera 1 unit	28.019.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga, Program prioritas RPJM
2	3.2.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata keluar daerah dan luar negeri	3 kegiatan	91.650.000	3 kegiatan	63.650.000	3 kegiatan	48.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

3	3.2.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 kegiatan	362.250.000	4 kegiatan	506.268.000	4 kegiatan	292.706.000	Se indonesia	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	3.2.15.7	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Tersusunnya buku database kepariwisataaan	150 buku	362.250.000	150 buku	31.174.000	150 buku	31.174.000	Lokasi Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	3.2.15.9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 orang	310.400.000	14 orang	321.972.000	14 orang	321.972.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	3.2.15.12	Pekan Seni Pariwisata	Kegiatan Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3 kegiatan	1.259.978.000	3 kegiatan	993.481.000	3 kegiatan	1.051.601.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	3.2.15.15	Gelar Wisata Magelang	Pertunjukan wisata Kota Magelang	1 kegiatan	70.136.000	1 kegiatan	75.149.000	0 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	3.2.15.14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 kegiatan	544.207.000	1 kegiatan	499.238.000	1 kegiatan	554.953.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.063.686.175		1.690.151.000		1.549.411.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	96,00%		96,00%		96,00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,15%		6,15%		6,15%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28 kelompok	285.124.000	28 kelompok organisasi	254.039.000	28 kelompok organisasi	231.539.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.13.16.3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan bakti sosial pemuda	300 orang	24.140.000	300 orang	15.615.000	300 orang	15.615.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.13.16.4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda tingkat Propinsi	2 kegiatan	71.954.000	2 kegiatan	46.182.000	2 kegiatan	55.982.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.13.16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200 orang	25.600.000	200 orang	24.056.000	0 orang	0	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

5	2.13.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	50 orang	15.806.175	50 orang	9.743.000	50 orang	9.743.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.13.16.10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	180 orang	17.148.000	180 orang	13.399.000	180 orang	13.399.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.13.16.11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50 orang	17.400.000	50 orang	15.563.000	50 orang	15.563.000	Disporabudpar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	2.13.16.14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggaranya pelatihan pramuka penegak	80 orang	18.400.000	80 orang	26.880.000	80 orang	26.880.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	2.13.16.21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	3 kegiatan p	259.553.000	3 kegiatan paskibra Tk.kota/ Prop/Nasional	691.039.000	3 kegiatan paskibra Tk.kota/Prop/Nasional	691.039.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	2.13.16.29	Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Ide Organisasi Kepemudaan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	155.000.000	1 kegiatan	100.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	2.13.16.25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	75 Orang	52.584.000	75 Orang	50.144.000	75 Orang	50.144.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	2.13.16.26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 kegiatan	198.727.000	1 kegiatan	72.811.000	1 kegiatan	72.811.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	2.13.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100 pemuda	28.750.000	100 pemuda	15.851.000	100 pemuda	15.851.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
14	2.13.16.6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2 kegiatan	48.500.000	2 kegiatan	34.918.000	2 kegiatan	34.918.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	2.13.16.27	Lomba Pramuka	terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs	3 kegiatan	0	3 kegiatan	48.984.000	0 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	2.13.16.28	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Terselenggaranya Lomba TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	2 kegiatan	0	2 kegiatan	215.927.000	2 kegiatan	215.927.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,2	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata											
	3.2.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			126.000.000		1.477.642.000		1.647.638.000				
			Destinasi Wisata Unggulan	5		5		5					

			Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	66,67%		66,67%		66,67%					
1	3.2.16.14	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan kontruksi bangunan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	80.510.000	1 kegiatan	156.410.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.2.16.3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Penyelenggaraan One day tour dan Sosialisasi Event Wisata	2 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	85.463.000	2 kegiatan	63.554.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	3.2.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terselenggaranya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat di sekitar Desa Wisata	3 kegiatan	56.000.000	3 kegiatan	55.715.000	0 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	3.2.16.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Tersusunnya dokumen perencanaan desa wisata	1 Dokumen	0	1 Dokumen	37.930.000	1 Dokumen	37.930.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	3.2.16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya pembangunan Toilet (Rest Area) (7 unit), Kios Kuliner/Souvenir (6 unit), penataan Lanskap (1 Paket)	1 lokasi	0	1 lokasi	1.156.584.000	Toilet (Rest Area) (7 unit), Kios Kuliner/Souvenir (6 unit), Lanskap (1 Paket)	1.156.584.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Rencana, Program prioritas RPJM
6	3.2.16.9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Penyelenggaraan penyuluhan, perencanaan dan studi banding	3 kegiatan	0	3 kegiatan	61.440.000	3 kegiatan	61.440.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	3.2.16.15	Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo	Tersedianya Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo		0			1 dokumen	79.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
8	3.2.16.16	Penyusunan DED Penataan Lanskap	Tersedianya DED Penataan Lanskap Jl. Urip Sumoharjo		0			1 Dokumen	92.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	3.2.17	Program Pengembangan Kemitraan			99.842.000		1.063.271.000		968.076.000				
					1,004,742,000								
			Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	11		11		11					

1	3.2.17.11	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Terselenggaranya Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pelatihan Pemandu Wisata Alam, Pelatihan Pemandu Wisata Buatan, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	7 kegiatan	0	7 kegiatan	913.038.000	7 kegiatan	913.038.000	Disporapar kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi MKSB
2	3.2.17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terselenggaranya pembinaan usaha jasa pariwisata	2 kegiatan	21.034.000	2 kegiatan	33.576.000	2 kegiatan	33.576.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	3.2.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2 kegiatan	48.989.000	2 kegiatan	95.195.000	0 kegiatan	0	Disporapar	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.2.17.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepariwisataan	4 kegiatan	29.819.000	4 kegiatan	21.462.000	4 kegiatan	21.462.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		90.020.000		90.020.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		1					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		0		0					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		1		1					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	1 Raperda Kepemudaan (Magelang sebagai kota layak pemuda)	1 Raperda K	0	1 Raperda Kepemudaan (Magelang sebagai kota layak pemuda)	90.020.000	1 Raperda Kepemudaan (Magelang sebagai kota layak pemuda)	90.020.000	DISPORABU DPAR	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			3.780.011.000		4.575.484.000		4.839.520.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		6					

			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			- Peringkat di POPDA SD	5		5		5					
			- Peringkat di POPDA SMP	13		13		13					
			- Peringkat di POPDA SMA	19		19		19					
			- Peringkat di Dulongmas	2		2		2					
			- Peringkat di Porprov	NA		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		35					
1	2.13.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terlaksananya seleksi cabor unggulan (sepakbola,tarung derajat, judo,renang,panahan taekwondo dan tenis lapangan)	110 orang	453.950.000	110 orang	635.092.000	110 orang	635.092.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.13.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya Porkel (Pekan Olahraga Kelurahan)	235 orang	122.500.000	235 orang	108.043.000	235 orang	108.043.000	Disporabud ar kota magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	2.13.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenis lapangan dan beladiri	32 team	303.000.000	32 team	725.732.000	32 team	725.732.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.13.20.7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	3 kegiatan	62.600.000	3 kegiatan	230.313.000	3 kegiatan	281.553.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.13.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Pelaksanaan gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2, dan sepeda motor	4 kegiatan	276.961.000	4 kegiatan	293.345.000	4 kegiatan	230.526.000	Disporabud par kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pendataan keolahragaan, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	3 kegiatan	275.000.000	3 kegiatan	65.096.000	3 kegiatan	102.596.000	Disporabud par kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.13.20.18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	570 siswa	280.000.000	570 siswa	323.511.000	570 siswa	323.511.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.13.20.21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	230 orang	50.000.000	230 orang	53.177.000	230 orang	53.177.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.13.20.22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	25 sekolah	176.000.000	25 sekolah	48.293.000	25 sekolah	48.293.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	2.13.20.25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	620 siswa	358.000.000	620 siswa	358.239.000	620 siswa	358.239.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

11	2.13.20.26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	620 orang	357.000.000	620 orang	351.406.000	620 orang	351.406.000	Disporabud par kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	2.13.20.28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	420 siswa	176.000.000	420 siswa	43.446.000	420 siswa	43.446.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	2.13.20.29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	380 siswa	50.000.000	380 siswa	51.693.000	380 siswa	51.693.000	Disporabud par kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	2.13.20.35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25 orang	407.000.000	25 orang	807.083.000	25 orang	831.698.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
15	2.13.20.36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750 siswa	297.000.000	750 siswa	297.433.000	750 siswa	297.433.000	Disporabud par Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan jalan sehat hari jadi dan HUT RI kegiatan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	114.765.000	2 kegiatan	114.765.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	2.13.20.32	Pospeda	Terlaksananya kegiatan seleksi olahraga antar pondok pesantren	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	39.167.000	1 kegiatan	39.167.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
18	2.13.20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit dan pelatih yang berprestasi	55 atlet	80.000.000	55 atlet	29.650.000	60 atlet , 38 pelatih	243.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	19.217.317.175		17.820.519.000		17.844.931.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 URUSAN : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			728.685.000		1.058.495.000		1.136.409.000				
1	2.17.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	2 jenis	2.750.000	1 jenis	1.953.000	1 jenis	1.953.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.17.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik	12 bulan	235.400.000	4 jenis 12 bulan	363.000.000	4 jenis 12 bulan	339.900.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.17.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	12 kendaraan	8.328.000	12 kendaraan	8.475.000	17 kendaraan	9.242.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.17.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	12 bulan	85.786.000	12 laporan	149.357.000	12 laporan	149.357.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.17.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan	31 jenis	107.699.000	21 jenis ; 6 orang	167.212.000	21 jenis ; 6 orang	176.680.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.17.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	41 jenis	16.500.000	44 jenis	11.668.000	44 jenis	11.668.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.17.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan	14 jenis	9.500.000	12 jenis	12.453.000	12 jenis	12.453.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.17.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan	12 jenis	49.731.000	19 jenis	19.665.000	19 jenis	19.665.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.17.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	2 jenis	1.300.000	2 jenis	6.072.000	2 jenis	2.900.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.17.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum	6 jenis	45.322.000	6 jenis; 1 orang	44.715.000	6 jenis; 1 orang	44.715.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.17.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 kegiatan	127.427.000	41 kegiatan	116.874.000	1 tahun	198.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.17.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan pembuat	8 orang	38.942.000	8 orang	157.051.000	8 orang	169.676.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.17.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			430.094.000		552.667.000		473.817.000				
1	2.17.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas gedung yang terpelihara	2634 m2	95.000.000	2634m2	271.984.000	2634m2	218.724.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.17.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan	12 kendaraan	180.640.000	12 kendaraan	165.000.000	17 kendaraan	158.410.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.17.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terperumnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	69.454.000	10 jenis	40.836.000	10 jenis	40.836.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.17.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan	10 jenis	85.000.000	12 jenis	74.847.000	12 jenis	55.847.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.17.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	meningkatnya kinerja	8 unit		-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	2.17.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya alat komunikasi	1 paket		-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.17.2.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeler kantor	34 buah	0	--	0	--	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.17.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	22 buah	0	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.17.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	18 jenis	0	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.17.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan ~~capaian kinerja dan keuangan~~			47.992.000		47.681.000		47.681.000				
1	2.17.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	dokumen laporan keuangan	4 laporan	11.066.000	4 laporan	10.994.000	4 laporan	10.994.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.17.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	dokumen renja	2 dokumen	12.760.000	2 dokumen	13.418.000	2 dokumen	13.418.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.17.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	dokumen RKA	2 dokumen	13.100.000	2 dokumen	18.471.000	2 dokumen	18.471.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.17.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	dokumen LKjIP	1 dokumen	11.066.000	1 dokumen	4.798.000	1 dokumen	4.798.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0		0				
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	pengembangan portal website perpustakaan Kota Magelang	1 tahun	0		0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.290.130.000		1.439.847.000		1.457.337.000				
1	2.17.15.54	Penyusunan buku kearifan lokal	Tersedianya buku tentang kearifan lokal	90 buku		90 buku	31.519.000	90 buku	31.519.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.17.15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300 orang	86.018.000	300 org; 150 org	71.447.000	300 org; 150 org	71.447.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 eksemplar*	147.895.000	1419 eksmplar ; 584 terbitan	181.800.000	1419 eksmplar ; 584 terbitan	181.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	2.17.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan	20 perpustakaan	19.000.000	20 perpustakaan	19.058.000	20 perpustakaan	19.058.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.17.15.17	Pameran dan bursa buku	jumlah peserta pameran	10000 orang	270.000.000	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3000 eksmpl ar	41.770.000	3000 eksplr	46.553.000	3000 eksplr	38.508.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	2.17.15.30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola	120 orang	62.000.000	120 orang	72.323.000	120 orang	72.323.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.17.15.31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	4 kegiatan	58.000.000	4 kegiatan	106.367.000	3 kegiatan	86.228.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.17.15.32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	4 laporan ; 30000	50.078.000	20.000 org ; 4 laporan	127.874.000	20.000 org ; 4 laporan	134.188.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
10	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan	4 laporan	248.611.000	65.000 org; 4 laporan	322.475.000	65.000 org; 4 laporan	301.098.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	2.17.15.37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	4 kegiatan	77.758.000	4 kegiatan; 2000 org	106.320.000	4 kegiatan; 2000 org	106.320.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	2.17.15.39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80 siswa SD	48.500.000	80 siswa SD	58.064.000	80 siswa SD	58.064.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
13	2.17.15.42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan	14 kegiatan	34.000.000	14 kegiatan	57.411.000	14 kegiatan	57.411.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	2.17.15.44	Lomba literasi	jumlah peserta	60 siswa	30.000.000	60 siswa	24.154.000	60 siswa	24.154.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
15	2.17.15.47	Penyusunan Buletin	penyebarluasan informasi	2 buletin	10.000.000	2 buletin	21.753.000	2 buletin	22.853.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	2.17.15.21	Lomba sinopsis	terselenggaranya lomba sinopsis bagi	80 siswa	38.500.000	80 siswa	35.591.000	80 siswa	35.591.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
17	2.17.15.46	Workshop Bercerita	terselenggaranya workshop bercerita untuk	90 orang	30.000.000	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	2.17.15.35	Seminar Lingkar Pena	terselenggaranya seminar lingkaran pena	150 orang	36.000.000	150 org	30.404.000	150 org	30.404.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	20 jenis	2.000.000	10 rak buku	71.225.000	10 rak buku; 1 unit komptr adm ktr; 4 meja lesehan; 10 kursi susun; 1 set kursi sofa; 3 rak sepatu; 1 tempat cas HP; 1 biling waktu: 1	130.862.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	2.17.15.23	Pemilihan duta baca	terpilihnya duta baca	1 kegiatan	0	100 orang	28.854.000	100 orang	28.854.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
21	2.17.15.51	Penyelenggaraan Workshop Penulisan Artikel	Terselenggaranya workshop menulis artikel	65 orang		-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	2.17.15.57	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Meningkatnya kemampuan pengelola	50 orang		50 orang	26.655.000	50 orang	26.655.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
23	2.17.15.58	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	menambah jumlah judul dan koleksi	1 kegiatan	0	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Kota Layak Anak
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			794.265.000		655.744.000		688.948.000				
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang	150 dos	222.320.000	150 dos	173.689.000	150 dos	180.002.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.16.5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 dos	234.665.000	150 dos	181.262.000	150 dos	187.575.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.18.16.8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	29 OPD	21.500.000	17 kelurahan	27.838.000	17 kelurahan	27.838.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.18.16.3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai	1000 CD	171.280.000	1000 CD/DVD	69.341.000	1000 CD/DVD	70.919.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.18.16.7	Pemusnahan Arsip	terjaminnya kemanan fisik dan informasi	20 dos	24.000.000	20 dos	10.419.000	20 dos	10.419.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	2.18.16.11	Preservasi Arsip	terwujudnya tertib administrasi	500 muka		800 lembar	77.119.000	800 lembar	77.119.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	terwujudnya tertib administrasi	10 OPD	120.500.000	150 dos	68.700.000	150 dos	68.700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.18.16.12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	3 Jadwal Retensi		1 SKKAD	30.948.000	1 SKKAD	30.948.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.18.16.14	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	1 Perwal		-	0	1 Perwal	19.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	2.18.16.17	Pengelolaan Arsip Statis	terkelolanya arsip statis	150 dos		150 dos	16.428.000	150 dos	16.428.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			155.650.000		151.301.000		151.301.000				
1	2.18.18.8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	1 judul film dan	155.650.000	1 film ; 100buku	62.750.000	1 film ; 100buku	62.750.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.18.6	Orientasi Otomasi Kearsipan	meningkatnya kemampuan SDM pengelola	74 unit pengelola	0	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.18.18.2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatnya minat dan kepedulian	9 set diorama		3 dekorasi	88.551.000	3 dekorasi	88.551.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			50.000.000		36.616.000		36.616.000				
1	2.18.15.8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	tersedianya data base informasi kearsipan	1 kegiatan	0	600 data	36.616.000	600 data	36.616.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.18.15.7	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	terpeliharanya peralatan jaringan	1 kegiatan	50.000.000	-	0	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			127.333.000		104.085.000		104.085.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya sarana dan prasarana	10 unit	8.800.000	10 unit	4.400.000	10 unit	4.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana	750 dos	28.853.000	700 dos	29.450.000	700 dos	29.450.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.18.17.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	74 unit pengelola arsip	89.680.000	84 pengelola arsip	70.235.000	84 pengelola arsip	70.235.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJMD
				TOTAL	3.624.149.000		4.046.436.000		4.096.194.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan
 URUSAN : Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.894.398.000		1.869.520.000		2.005.219.000				
1	3.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	5.810.000	12 bulan	4.800.000	12 bulan	4.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	3.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4	494.450.000	4 rekening	561.780.000	4 rekening	580.793.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	73	51.029.000	66 STNK; 1	36.770.000	66 STNK; 16 kendaraan x 2 kali	36.770.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12	260.490.000	288 orang	318.651.000	288 orang bulan	318.651.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	74.735.000	12 bulan	90.008.000	12 bulan	96.320.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	3.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37	50.838.000	37 jenis	31.985.000	37 jenis	31.985.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	3.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11	78.988.000	15 jenis	24.329.000	15 jenis	20.579.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	3.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	26.625.000	11 jenis jer	23.173.000	11 jenis jenis	23.173.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	3.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12	15.607.000	2 jenis	13.800.000	2 jenis	13.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	3.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	12	17.516.000	12 buah	16.715.000	12 buah	16.715.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	3.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12	107.973.000	326 orang;	89.856.000	326 orang; 12 orang bulan	82.639.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	3.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	330.513.000	54 kali	188.753.000	54 kali	288.493.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	3.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12	137.824.000	12 orang	249.700.000	12 orang	271.301.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	3.7.1.20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2	215.000.000	2 obyek	200.600.000	2 obyek	200.600.000	Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	3.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12	27.000.000	12 bulan	18.600.000	12 bulan	18.600.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			926.942.000		599.598.000	0	582.163.000				
1	3.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	12	166.789.000	3910 m2	100.678.000	3910 m2	102.256.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

2	3.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	704.172.000	66 unit	463.017.000	66 unit	444.004.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis perlengkapan yang dipelihara	12	20.473.000	11 jenis	10.973.000	11 jenis	10.973.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 peralatan yang terawat	12	30.273.000	27 unit	21.430.000	27 unit	21.430.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelair yang terpelihara	12	5.235.000	16 unit	3.500.000	16 unit	3.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			182.797.000		165.328.000	0	165.328.000				
1	3.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18	24.000.000	18 laporan	18.280.000	18 laporan	18.280.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	3.7.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2	18.500.000	2 laporan	17.244.000	2 laporan	17.244.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2	18.500.000	1 dokumen	18.311.000	1 dokumen	18.311.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
4	3.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2	20.253.000	2 dokumen	5.357.000	2 dokumen	5.357.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
5	3.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	47.426.000	2 dokumen	23.916.000	2 dokumen	23.916.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
6	3.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan movev	4	33.102.000	1500 buah	60.943.000	1500 buah	60.943.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

7	3.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1	9.200.000	1 laporan	9.461.000	1 laporan	9.461.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
8	3.7.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersedianya dokumen Perubahan Renstra OPD		11.816.000	1 dokumen	11.816.000	1 dokumen	11.816.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0					
	2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			424.629.000		177.645.000	0	177.645.000				
			DISKOPERINDAG		301,739,600			0					
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	4%				0					
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%				0					
1	2.11.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertifikat halal	30 sertifikat	85.000.000	30 sertifikat	74.168.000	30 sertifikat	74.168.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.11.15.18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah KUM yang dibina	150 KUM	284.629.000	150 KUM	64.989.000	150 KUM	64.989.000	Kota Magelang	DBHCHT		Rencana
3	2.11.15.23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah KUM yang dibina	300	55.000.000	300 KUM	38.488.000	300 KUM	38.488.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						0					
	3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			290.663.000		2.244.185.000	0	2.174.597.000				
				-	5,170,500,000			0					
			Jumlah alat UTP yang ditera	2,800				0					
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA				0					
1	3.6.15.4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Terlaksananya tera ulang,pengawasan	2800 alat	290.663.000	12 bulan	162.726.000	12 bulan	169.038.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

2	3.6.15.1 5	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Pendampingan	1 pendampingan		12 laporan	334.692.000	12 laporan	258.792.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	3.6.15.1 7	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat	17 komoditas kebutuhan po		12 laporan	40.472.000	12 laporan	40.472.000	Pasar-pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	3.6.15.1 9	Monitoring dan eavaluasi kemetrolagian	Jumlah Laporan Monev	3 laporan		3 laporan	12.996.000	3 laporan	13.996.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	3.6.15.2 0	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah UTTP di tempat pakai	2700 buah		2700 buah	119.530.000	2700 buah	118.530.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	3.6.15.2 1	Pendataan alat UTTP	update data UTTP	4 kali		4 kali	13.862.000	4 kali	13.862.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	3.6.15.1 1	Sosialisasi Kemetrolagian	Peserta tersosialisasi	80 peserta		2 kali	6.112.000	2 kali	6.112.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	3.6.15.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terawasinya peredaran barang dan jasa	60 lokasi		60 lokasi	53.795.000	60 lokasi	53.795.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Implementasi RAD MEA
9	3.6.15.3 0	Pengadaan Kendaraan Kemetrolagian	Jumlah kendaraan R4 dan kendaraan R2	1 unit kendaraan R4, 2 unit		1 unit kend	750.000.000	1 unit kendaraan R4, 4 unit kendaraan R2	750.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	3.6.15.2 9	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolagian	Timbangan elektronik	3 unit		10 unit	750.000.000	10 unit	750.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						0					
	3.7.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			39.735.000		40.324.000	0	40.324.000				
			Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,15%				0					
1	3.7.15.4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	75	9.040.000	75 orang	11.920.000	75 orang	11.920.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

2	3.7.15.5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu	20 industr	30.695.000	1 kali	28.404.000	1 kali	28.404.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0					
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			498.957.000		95.603.000	0	95.603.000				
			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM				0					
1	2.11.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3 lap	15.229.000	3 laporan	15.804.000	3 laporan	15.804.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.16.18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50 koperas	11.514.000	50 koperas	30.290.000	50 koperasi	30.290.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.11.16.22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80 peserta	72.214.000	80 orang	42.154.000	80 orang	42.154.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.11.16.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	terjalannya kerjasama dengan toko modern (MoU)	30 kerjasa	400.000.000	30 UMKM	7.355.000	30 UMKM	7.355.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan						0					
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			22.170.000		22.170.000	0	22.170.000				
					839,992,000			0					
			SETWAN	12 bln	26,000,000			0					
			DPPKD		143,000,000			0					
			KESBANGPOL		28,587,000			0					
			BKD		15,000,000			0					
			DPP		25,830,200			0					
			LITBANG		50,000,000			0					
			PERPUS		247,075,000			0					
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%				0					
			Persentase arsip dan risalah	82%				0					

			Persentase Penyelamatan Arsip	53%				0					
								0					
			Kemudahan pencarian dokumen yang diarsip	100	23.384.000			0					
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Peningkatan arsip yang dikelola	12 bulan	22.170.000	12 bulan	22.170.000	12 bulan	22.170.000	Disperindag Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						0					
	3.7.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			345.013.000		782.045.000	0	711.730.000				
				-	799,126,000			0					
			Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%?				0					
1	3.7.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	1	44.500.000	1 tahun	65.085.000	1 tahun	68.241.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.7.16.8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	70	99.120.000	70 IKM	76.621.000	70 IKM	76.621.000	Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
3	3.7.16.1.2	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi dan sarasehan	3 pameran	183.200.000	3 pameran	399.800.000	3 pameran	399.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.7.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah industri yang dibina	20	18.193.000	20 IKM	73.471.000	20 IKM	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	3.7.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM Formal	20		20 IKM	10.863.000	20 IKM	10.863.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	3.7.16.1.4	Pendataan industri kecil dan menengah	buku direktori IKM	25 buku		25 buku	96.999.000	25 buku	96.999.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	3.7.16.1.5	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri	4 laporan monev		4 laporan	34.482.000	4 laporan	34.482.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	3.7.16.1.9	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah peserta pelatihan Good Manufacture Practices (GMP)	30 orang		30 orang	24.724.000	30 orang	24.724.000	Kota Magelang	DBHCHT		Mempertegas Skenario Kemitraan

	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0					
	2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			245.444.000		545.864.000	0	577.423.000				
			Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%				0					
1	2.11.17.12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300	190.444.000	300 rekomendasi	486.911.000	300 rekomendasi	518.470.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.17.13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	58.953.000	1 dokumen	58.953.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						0					
	3.6.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			5.501.000		7.113.000	0	7.113.000				
			Jumlah ekspor produk ke LN	US\$ 1.100.000				0					
1	3.6.17.8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20 pelaku	5.501.000	20 pelaku	7.113.000	20 pelaku usaha	7.113.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						0					
	3.7.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			12.544.000		9.865.000	0	9.865.000				
			Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,09%				0					
1	3.7.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20 IKM	12.544.000	20 IKM	9.865.000	20 IKM	9.865.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0					

	2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			131.395.000		195.528.000	0	195.528.000				
					705,727,000			0					
			Prosentase koperasi aktif	93,40%				0					
			Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	27%				0					
			Jumlah koperasi	228				0					
			Jumlah koperasi syariah	18				0					
1	2.11.18.10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120	41.336.000	120 orang	47.544.000	120 orang	47.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.18.11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	5 koperasi	29.012.000	5 koperasi	50.414.000	5 koperasi	50.414.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.11.18.14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10 buku	7.504.000	10 buku	7.026.000	10 buku	7.026.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.11.18.15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15 koperasi	6.987.000	15 koperasi	15.539.000	15 koperasi	15.539.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	2.11.18.16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150 koperasi	39.015.000	150 koperasi	26.885.000	150 koperasi	26.885.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	2.11.18.19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50 orang	7.541.000	50 orang	7.563.000	50 orang	7.563.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.11.18.20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah KSP/USP	60 koperasi		60 koperasi	40.557.000	60 koperasi	40.557.000	Disperindag Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						0					
	3.6.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			846.137.000		999.071.000	0	1.024.627.000				
			Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	4%				0					

1	3.6.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	7 pameran	846.137.000	7 pameran	999.071.000	7 pameran	1.024.627.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang
	3.6.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			414.500.000		766.331.000	0	772.627.000				
			Cakupan PKL yang dibina	10%				0					
			Jumlah shelter PKL yang dikelola	14				0					
1	3.6.19.3 3	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	buku laporan monev PKL dan Asongan	4 laporan		4 laporan	17.973.000	4 laporan	17.973.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	3.6.19.3 1	Penempatan PKL	Jumlah PKL yang ditempatkan di shelter	70 orang		70 orang	29.997.000	0	0	Shelter PKL	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
3	3.6.19.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina	20 paguyuban	63.000.000	20 paguyuban	33.996.000	20 paguyuban	33.996.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
4	3.6.19.9	Pendataan pedagang kaki lima	Buku Data PKL dan TDU	400 TDU dan 30 buku data PKL	16.500.000	400 TDU dan 30 buku data PKL	49.062.000		49.062.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	3.6.19.1 9	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	90 hari	90.000.000	90 hari	122.240.000	90 hari	122.240.000	Jalan jalan protokol di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	3.6.19.2 0	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	18 shelter	75.000.000	18 shelter	31.976.000	18 shelter	31.976.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	3.6.19.2 6	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	tersedianya jasa keamanan shelter PKL	20 orang	170.000.000	23 orang	464.396.000	23 orang	500.689.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	3.6.19.3 2	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah Security shelter yang dilatih	20 orang		20 orang	16.691.000	20 orang	16.691.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						0					
	3.7.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			21.693.000		3.191.703.000	0	3.191.703.000				

			Jumlah sentra industri	12				0					
1	3.7.19.5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	2 sentra	21.693.000	2 sentra	44.753.000	2 sentra	44.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
2	3.7.19.6	Revitalisasi Sentra IKM	Pembangunan IPAL tahu skala kawasan Tidar Campur Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1 paket		1 paket	3.146.950.000	1 paket	3.146.950.000	Tidar Selatan	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program 100-0-100
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						0					
	3.6.20	Program Pengelolaan Pasar			4.134.700.000		8.754.538.000	0	7.913.632.000				
			Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	23%				0					
			Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%				0					
			Cakupan pedagang pasar yang dibina	10%				0					
			Persentase pasar tradisional yang dikelola	80%				0					
1	3.6.20.4 2	Pematangan Lahan Pasar Induk	Teramatangkannya lahan pembangunan pasar induk		1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	3.6.20.2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban	12 bulan	13.500.000	12 bulan	13.997.000	12 bulan	13.997.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

3	3.6.20.3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.581.000	12 bulan	48.581.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
4	3.6.20.5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8 keg	38.000.000	8 kegiatan	64.086.000	8 kegiatan	64.086.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	3.6.20.6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12	25.000.000	12 bulan	29.136.000	12 bulan	29.136.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	3.6.20.7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12	28.500.000	12 bulan	36.157.000	12 bulan	36.157.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	3.6.20.1 1	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	58 petugas	855.000.000	61 orang	1.199.890.000	61 orang	1.296.145.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
8	3.6.20.1 3	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	16.500.000	12 bulan	28.200.000	12 bulan	28.200.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	3.6.20.1 4	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	11.000.000	12 bulan	12.499.000	12 bulan	12.499.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	3.6.20.1 5	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12bulan	13.700.000	12 bulan	12.712.000	12 bulan	12.712.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	3.6.20.1 6	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	9.300.000	12 bulan	8.201.000	12 bulan	8.201.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	3.6.20.1 7	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	40 petugas	880.000.000	45 petugas	966.581.000	45 petugas	1.037.589.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	3.6.20.1 8	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.929.000	12 bulan	17.917.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	3.6.20.1 9	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	18.500.000	12 bulan	18.690.000	12 bulan	14.702.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

15	3.6.20.20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang dilombakan	4 pasar	71.000.000	4 pasar	31.499.000	4 pasar	31.499.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	3.6.20.36	Pelatihan pengendalian kamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan	280 peserta		280 peserta	45.701.000	280 peserta	45.701.000	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	3.6.20.23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	6	26.500.000	6 pasar	88.287.000	6 pasar	88.287.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
18	3.6.20.24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	51.000.000	5 pasar	63.182.000	5 pasar	63.182.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	3.6.20.25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12	100.000.000	12 laporan	51.665.000	12 laporan	55.165.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	3.6.20.27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10	45.000.000	10 laporan	34.692.000	10 laporan	34.692.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
21	3.6.20.28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	0	0	0	0	0	407.911.000	pasar Rejowinangun, Sasana Kukiladan Sisomukti 1	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	3.6.20.29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	5 pasar	210.000.000	5 pasar	321.287.000	5 pasar	321.287.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
23	3.6.20.30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	7 kali	500.000.000	7 kali	105.040.000	7 kali	91.460.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
24	3.6.20.32	Verifikasi Permohonan SITU	Surat Izin Tempat Usaha	350 lembar		350 lembar	25.877.000	350 lembar	29.877.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
25	3.6.20.8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah organisasi pedagang pasar yang efektif	200 orang	165.000.000	200 orang	32.938.000	200 orang kali	32.938.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

26	3.6.20.3 7	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	laporan monev	4		4 laporan	21.503.000	4 laporan	21.503.000	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
27	3.6.20.3 4	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	peserta pelatihan	280		280 orang	33.848.000	280 orang	33.848.000	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
28	3.6.20.3 5	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	laporan monev	4		4 laporan	21.904.000	4 laporan	21.904.000	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
29	3.6.20.3 8	Pengadaan Lahan Pasar Induk	Tersedianya lahan pasar induk	1 lahan		1 lahan	3.939.456.000	1 lahan	3.939.456.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
30	3.6.20.3 9	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	Dokumen AMDAL	1 dokumen		1 dokumen	485.000.000	1 dokumen	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		SDGs, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program 100-0- 100
31	3.6.20.4 4	Kajian pengembangan pasar Kota Magelang	Jumlah kajian					5 buku 0 kajian, 20 buku profil	75.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						0					
	3.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0	0	104.806.000				
1	3.7.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pembinaan				0	110 orang kali	104.806.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
				TOTAL	10.437.218.000		20.466.431.000		19.772.103.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Dinas Pertanian dan Pangan
 URUSAN : Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian												
	3.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.042.863.000		828.968.000		902.510.555	934.413.000				
1	3.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865	3.461.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	3.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12	199.650.000		171.000.000		159.000.000	159.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47	17.996.000		15.876.000		15.876.000	15.876.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	143.816.000		124.950.000		124.950.000	124.950.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24	61.816.000		58.573.000		61.729.000	61.729.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
6	3.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39	38.500.000		33.098.000		33.098.000	33.098.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	3.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	23.830.000		17.877.000		35.419.000	28.377.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	3.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	12.500.000		12.499.000		12.499.000	12.499.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	3.3.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	3.850.000		3.153.000		3.153.000	3.153.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	3.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12	5.990.000		4.620.000		4.620.000	4.620.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	3.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460	40.616.000		23.703.000		21.223.000	21.223.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	3.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12	44.508.000		43.657.000		43.657.000	43.657.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
13	3.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84	315.000.000		172.960.000		228.460.000	267.405.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magel	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	3.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12	131.330.000		144.502.000		156.326.555	156.326.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			804.099.000		403.837.000		1.173.872.000	440.037.000				
1	3.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2	50.000.000		31.145.000		31.145.000	0	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	3.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47	330.000.000		313.947.000		261.142.000	261.142.000	Dinas pertanian peternakan dan perikanan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33	16.500.000		20.995.000		20.995.000	20.995.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	5.000.000		5.600.000		5.600.000	5.600.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1	10.500.000		19.400.000		61.000.000	81.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
6	3.3.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3	300.000.000			0	564.990.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	3.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	3	11.400.000		12.750.000		12.750.000	8.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	3.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya media informasi dan pembangkit energi listrik	2	80.699.000			0	216.250.000	42.300.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
		Pengadaan Peralatan gedung Kantor								20.500.000				
	3.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			12.506.000		5.738.000		5.738.000	5.738.000				
1	3.3.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8	12.506.000		5.738.000		5.738.000	5.738.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			97.815.000		88.335.000		88.335.000	88.335.000				
1	3.3.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya perubahan renstra OPD	1			6.000.000		6.000.000	6.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	9.820.000		9.820.000		9.820.000	9.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	3.3.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	6.381.000		4.580.000		4.580.000	4.580.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	2	5.627.000		6.394.000		6.394.000	6.394.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2	10.382.000		7.204.000		7.204.000	7.204.000	Dinas pertanian dan pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	3.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	4	9.269.000		8.928.000		8.928.000	8.928.000	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	3.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	10	50.712.000		41.702.000		41.702.000	41.702.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	3.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10	5.624.000		3.707.000		3.707.000	3.707.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan												
	2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			290.000.000		559.210.000		565.520.000	565.520.000				
			Jumlah regulasi ketahanan pangan	2										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%										
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,3										
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%										
1	2.3.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan, pemetaan, kerawanan pangan	20 balita	26.000.000		17.045.000		17.045.000	17.045.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
2	2.3.15.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340 petugas	29.000.000		33.447.000		33.447.000	33.447.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.3.15.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1 Unit	10.000.000		7.888.000		7.888.000	7.888.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
4	2.3.15.9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	50 orang	19.000.000		60.016.000		63.171.000	63.171.000	Kota Magelang	DBHC HT		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
5	2.3.15.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	2 gabungan kelompok tani	35.000.000		76.639.000		76.639.000	76.639.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
6	2.3.15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distribusi pangan	18.000.000		70.357.000		73.512.000	73.512.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
7	2.3.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	100 anak sekolah dan 7 jenis sayur 3 jenis buah	42.000.000		40.520.000		40.520.000	40.520.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.3.15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal, lomba cipta menu	40 orang, 1 festival pangan, 3 lomba cipta menu	111.000.000		162.281.000		162.281.000	162.281.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.3.15.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Tersedianya laporan DKP tingkat pusat dan kota	2 laporan			91.017.000		91.017.000	91.017.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian												
	3.3.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			354.250.000		498.650.000		516.007.000	495.982.000				
			Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	5										
1	3.3.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pelatihan tanaman hias dan anggrek	90 peserta	224.509.000		128.219.000		128.219.000	128.219.000	Kota Magelang	DBHC HT		Memperkuat Implementasi MKSB, Akomodasi Musrenbang
2	3.3.15.6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pendampingan kelompok budidaya tanaman hortikultura	6 kelompok	129.741.000		20.025.000		20.025.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
3	3.3.15.7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Luas RTH (kebon bibit) yang dipelihara	8000 bibit			350.406.000		367.763.000	367.763.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			41.866.000		32.310.000		24.074.000	24.074.000				
					839,992,000									
			SETWAN	12 bln	26,000,000									
			DPPKD		143,000,000									
			KESBANGPOL		28,587,000									
			BKD		15,000,000									
			DPP		25,830,200									
			LITBANG		50,000,000									
			PERPUS		247,075,000									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%										
			Persentase arsip dan risalah	82%										
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%										
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2	41.866.000		32.310.000		24.074.000	24.074.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian												
	3.3.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			746.730.000		373.421.000		359.227.000	346.789.000				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	3%										
			Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	11										
1	3.3.16.2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pameran agriflori expo	1 pameran	116.330.000		203.379.000		203.379.000	203.379.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	3.3.16.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikutsertaan pameran tingkat regional dan nasional	3	630.400.000		133.885.000		119.691.000	119.691.000	Disperpa	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	3.3.16.14	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya pelatihan pemasaran produksi	90 petani			36.157.000		36.157.000	23.719.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	3.3.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			171.032.000		180.132.000		209.603.000	209.603.000				
			DISPETERIKAN	1	188,500,000									
			Luas lahan pertanian organik	0,98										
			Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	51.70%										
1	3.3.17.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan penerapan teknologi tepat guna	12 kali	64.315.000		22.370.000		22.370.000	22.370.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	3.3.17.6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1 hektar	47.617.000		16.997.000		16.997.000	16.997.000	Kota Magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
3	3.3.17.8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)	10000 anggrek			87.843.000		117.314.000	117.314.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
4	3.3.17.9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelaku yang dilatih pasca panen lidah buaya dan jamur	120 masyarakat			33.939.000		33.939.000	33.939.000	Kota Magelang	DBHC HT		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	3.3.17.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah masyarakat terlatih kultur jaringan	40 masyarakat	59.100.000		18.983.000		18.983.000	18.983.000	Kota Magelang	DBHC HT		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	3.3.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			52.214.000		550.711.000		550.711.000	550.711.000				
			Padi	3180										
			Jagung	11										
			Ubi kayu	13,5										
1	3.3.18.26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	data verifikasi pupuk subsidi	12 data verifikasi			19.636.000		19.636.000	19.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	3.3.18.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	52.214.000		42.372.000		42.372.000	42.372.000	Kota Magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
3	3.3.18.27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	luas lahan yang diintensifkan	4 Ha			36.385.000		36.385.000	36.385.000	Kota Magelang	DBHC HT		Rencana
4	3.3.18.29	Pengembangan Urban Farming	Peserta terlatih yang mengembangkan urban farming	50 peserta terlatih			377.223.000		377.223.000	377.223.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	3.3.18.28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kelompok tani dan kios pupuk	18 kelompok dan 4 kios			45.511.000		45.511.000	45.511.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	3.3.18.30	Peningkatan kemampuan lembaga petani	meningkatnya kemampuan lembaga petani	17 kelompok tani			29.584.000		29.584.000	29.584.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3.3.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			103.150.000		84.987.000		89.721.000	89.721.000				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	11,76%										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Rasio petani terlatih	85%										
1	3.3.19.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	40 petani swadaya	18.150.000		15.067.000		15.067.000	15.067.000	Kota Magelang	DBHC HT		Rencana
2	3.3.19.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	5	85.000.000		69.920.000		74.654.000	74.654.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan												
	3.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan			204.440.000		382.704.000		499.740.000	382.277.000				
			Produksi hasil perikanan:											
			Produksi Ikan	162,41										
			Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%										
			Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	40%										
1	3.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya petani ikan	25 orang	19.770.000		25.733.000		25.733.000	25.733.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
2	3.1.20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	25 orang	20.785.000		56.451.000		56.451.000	30.198.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	3.1.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya lomba kelompok pelaku utama perikanan	125 pelaku utama perikanan	26.843.000		48.244.000		48.244.000	48.244.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	3.1.20.25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	2 BBI	106.494.000		189.985.000		307.021.000	215.811.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	3.1.20.26	Pelatihan Ikan Hias	Terlatihnya petani pembudidaya ikan hias pemula	15 peserta	30.548.000		33.511.000		33.511.000	33.511.000	Kota Magelang	DBHC HT		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
6	3.1.20.29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Terlatihnya petani perikanan organik	50 peserta			28.780.000		28.780.000	28.780.000	Kota Magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian												
	3.3.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			295.357.800		439.461.000		459.974.000	456.165.000				
			Persentase hewan sehat	83										
1	3.3.20.1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1 dokumen	20.664.000		36.138.000		37.716.000	37.716.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	3.3.20.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1450 ternak	61.240.000		76.529.000		78.107.000	78.107.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	3.3.20.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang diperiksa	380	49.670.000		60.000.000		63.156.000	63.156.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	3.3.20.6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4355 ternak	38.508.800		38.509.000		38.509.000	38.509.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	3.3.20.10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan diperiksa	600 hewan	125.275.000		228.285.000		242.486.000	238.677.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	3.3.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			12.000.000		11.483.000		11.483.000	8.933.000				
			Daging Ruminansia	1.233.486										
			Daging Unggas	5.366.516										
			Telur	440,000										
			Susu	197,600										
1	3.3.21.20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	65 ternak	12.000.000		11.483.000		11.483.000	8.933.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3.3.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			137.297.000		248.262.000		249.840.000	249.840.000				
			Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	2,42										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1	3.3.22.7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	4 event	51.492.000		163.026.000		163.026.000	163.026.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.3.22.8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	200 orang	24.496.000		23.971.000		23.971.000	23.971.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	3.3.22.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16 dokumen	34.817.000		35.884.000		37.462.000	37.462.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	3.3.22.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3 pelaku usaha peternakan	11.000.000		10.431.000		10.431.000	10.431.000	kota magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
5	3.3.22.14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	jumlah pelaku usaha bersertifikat NKV	2 pelaku usaha	15.492.000		14.950.000		14.950.000	14.950.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan												
	3.1.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			1.255.428.000		271.801.000		376.112.000	291.166.000				
					1,798,411,000									
			Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3										
1	3.1.23.12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	40 orang	550.643.000		14.500.000		61.623.000	14.500.000	Kota Magelang	DBHC HT		Rencana
2	3.1.23.13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 Unit	80.000.000		68.565.000		102.025.000	74.852.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	3.1.23.14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	100 pedagang	495.782.000		35.346.000		36.924.000	36.924.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	3.1.23.15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Terselenggaranya kegiatan gemar makan ikan	4 event	129.003.000		153.390.000		175.540.000	164.890.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian												
	3.3.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			68.776.000		85.607.000		85.607.000	85.607.000				
			DISPETERIKAN		64,350,000									
			DISPETERIKAN		112,259,000									
			Jumlah pelaku usaha peternakan organik:											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Peternak ayam buras/ ayam broiler	2										
			Peternak kelinci	2										
			Peternak kambing/domba	2										
			Rasio peternak terlatih	85%										
1	3.3.23.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya pelaku usaha paska panen peternakan	40 pelaku usaha	47.158.000		24.300.000		24.300.000	24.300.000	Kota Magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
2	3.3.23.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3	21.618.000		46.246.000		46.246.000	46.246.000	Kota Magelang	DBHC HT		Program prioritas RPJM
3	3.3.23.9	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlatihnya pelaku agribisnis peternakan	15 pelaku usaha			15.061.000		15.061.000	15.061.000	Kota Magelang	DBHC HT		Rencana
	3.3.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			818.787.000		1.525.475.000		1.541.255.000	1.541.255.000				
					7,596,450,000									
			Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	2,42%										
1	3.3.24.1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12 bulan	35.550.000		35.550.000		37.128.000	37.128.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.3.24.2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	50 orang	29.302.000		23.300.000		23.300.000	23.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	3.3.24.3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4 kali	50.539.000		50.066.000		50.066.000	50.066.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	3.3.24.5	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4355 ternak	263.396.000		281.048.000		295.250.000	295.250.000	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	3.3.24.7	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	40 orang	40.000.000		36.635.000		36.635.000	36.635.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	3.3.24.4	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	Tersusunnya DED RPH	1 dokumen	200.000.000		200.000.000		200.000.000	200.000.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	3.3.24.6	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	Terpenuhinya sarpras RPH	4 jenis	200.000.000		898.876.000		898.876.000	898.876.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			668.000.000		1.324.405.000		1.339.783.000	1.255.571.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%										
			Indeks Kualitas Udara	78%										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						HASIL RASIONALISASI INTERN	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			Indeks Tutupan Hutan	49%										
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7										
			Jenis flora	10 Jenis							24242904			
			Jenis fauna	3 Jenis										
1	2.5.17.4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	15 jenis flora dan fauna, 3 sarpras pendukung	490.000.000		868.072.000		876.750.000	879.750.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Operasional UPTD Gunung Tidar	12 bulan	143.000.000		404.874.000		414.255.000	327.043.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.5.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250 orang	35.000.000		51.459.000		48.778.000	48.778.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
				TOTAL	7.176.610.800		7.895.497.000		18.098.225.110	8.021.737.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			236.454.570		109.078.000		141.632.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14 item	13.625.810		7.137.000		7.137.000	setda kota magelang bagian tapem	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8 item	13.324.520		6.037.000		6.037.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3 jenis	3.218.600		2.640.000		2.640.000	SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12 bulan	36.050.740		12.954.000		19.708.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kegiatan	170.234.900		80.310.000		106.110.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			6.485.600		7.855.000		17.855.000				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 Jenis			4.980.000		4.980.000	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4 jenis	6.485.600		2.875.000		2.875.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 jenis			0	1 jenis	10.000.000	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			50.868.400		33.629.000		33.629.000				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil pembinaan Pemerintahan Kecamatan	2 dokumen	50.868.400		33.629.000		33.629.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			376.367.870		331.166.000		331.166.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB									
			Persentase SKPD yang direview LKJIP	45%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%									
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban Walikota kepada DPRD	75 buku	220.602.150		201.493.000		201.493.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.2.15.15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55 buku	140.276.510		118.719.000	1 KEG	118.719.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.2.15.16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10 buku	15.489.210		10.954.000		10.954.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			1.006.693.490		1.064.245.000		1.924.345.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24 kunker	89.236.290		69.944.000	12 bulan	69.944.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.16.7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12 laporan	917.457.200		903.477.000	12 laporan	1.781.677.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terfasilitasinya koordinasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12kali			90.824.000	8 kali	72.724.000	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			170.376.470		150.235.000		150.235.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1 rangkaian kegiatan hari jadi	170.376.470		150.235.000		150.235.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			363.055.660		577.383.000		448.773.000				
			Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%									
1	4.1.18.6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	4 MOU	57.096.270		54.533.000	Terjalannya kerjasama daerah dengan pihak terkait	58.783.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.18.8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI	3 kegiatan	267.079.670		491.490.000		358.630.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.18.9	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1 kegiatan	38.879.720		31.360.000		31.360.000	Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			37.058.670		117.202.000		136.155.000				
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.20.22	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang	Tersusunnya Peraturan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang	1 Raperwal				01 Rancangan Peraturan Walikota	34.828.000	Bagian Tata Pemerintahan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.20.18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	37.058.670		15.875.000		0	Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.20.12	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	Tersedianya dokumen pembakuan nama rupabumi unsur buatan	1 dokumen			101.327.000		101.327.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			169.888.000		169.888.000		169.888.000				
1	1.5.23.2	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tercapainya dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum		169.888.000		169.888.000	Laporan desk pemilihan umum tahun 2019	169.888.000	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
				TOTAL	2.417.248.730		2.560.681.000		3.353.678.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			49.664.000		113.550.000		112.023.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sediaan alat tulis kantor	100%	15.236.000		12.596.000	100%	12.596.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	15.061.000		10.000.000	100%	10.000.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sediaan bahan bacaan	100%	2.614.000		2.400.000	100%	2.160.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	100%	16.753.000		14.104.000	100%	12.817.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100%	0		74.450.000	100%	74.450.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			33.149.000		5.751.000		13.368.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	2 unit	32.338.000		0	2 unit	7.752.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja yang terpelihara	100%	811.000		1.000.000	100%	865.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	100%	0		4.751.000	100%	4.751.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TOLAK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			200.000.000		335.193.000		318.738.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB									
			Persentase SKPD yang direview LKJIP	45%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%									
			Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%									
			Capaian Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan	70%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	3 kegiatan	75.000.000		101.687.000	3 kegiatan	92.155.000	Bagian Organisasi	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.2.15.28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	4 dokumen	62.000.000		47.263.000	4 dokumen	44.553.000	Bagian Organisasi	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.2.15.30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018	1 dokumen	63.000.000		98.303.000	1 dokumen	97.883.000	Bagian Organisasi	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.2.15.9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Dokumen Monitoring Implementasi SAKIP	1 dokumen			84.147.000	1 dokumen	84.147.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.2.15.41	Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	Tersedianya aplikasi e-sakip	1 aplikasi			3.793.000	-	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0			216.104.000		208.196.000			
					6,926,097,000								
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	47%									
			Pendidikan S2	9%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46									
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%									
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%									
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.08%									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.5.15.17	Penyusunan Analisis Jabatan	Termonitornya pelaksanaan kelembagaan perangkat daerah	1 laporan				139.028.000	1 laporan ha	132.809.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.5.15.36	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisa Beban Kerja	1 laporan				77.076.000	1 laporan	75.387.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			26.000.000			80.933.000		91.105.000			
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%									
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?									
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%									
1	4.2.17.3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Perangkat Daerah Kota Magelang	3 dokumen	26.000.000			27.348.000	3 dokumen	37.520.000	Bagian Organisasi S	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.2.17.13	Internalisasi Reformasi Birokrasi	Dokumen Internalisasi Reformasi Birokrasi	1 dokumen				53.585.000	1 dokumen	53.585.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			26.000.000			213.640.000		241.638.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CAI	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%									
1	4.1.20.13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Laporan hasil kajian kelembagaan perangkat daerah	2 laporan	26.000.000		30.783.000	3 Laporan	46.140.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.20.15	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	Raperwal perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah	9 raperwal	0		182.857.000	9 Raperwal	195.498.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.20.9	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Termonitornya pelaksanaan kelembagaan perangkat daerah				0	1 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			175.242.000		292.745.000		269.055.000				
1	4.1.21.8	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Dokumen	1 dokumen			51.867.000	1 dokumen	36.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.1.21.3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat ke Unit Pelayanan Publik (UPP)	40 Unit	83.000.000		92.837.000	40 unit pelay	93.630.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.1.21.4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggara n Pelayanan Publik	1 Laporan	82.742.000		62.138.000	1 laporan	58.245.000	Bagian Organisasi	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.1.21.2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Inovasi	9.500.000		85.903.000	1 inovasi	80.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TOLAK UKUR	TARGET 2019	REKAPITULASI 2019	TARGET APBD 2019	REKAPITULASI 2019	REKAPITULASI 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			9.000.000		15.221.000		15.221.000				
1	4.3.21.40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1 dokumen	9.000.000		15.221.000		15.221.000	Bagian Organisasi	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
				TOTAL	519.055.000		1.273.137.000		1.269.344.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			156.681.000		73.213.000		79.063.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai dan pengiriman paket	2 jenis	5.400.000		1.205.000		1.205.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17 jenis	18.000.000		13.750.000		13.750.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	9.002.000		7.439.000		7.439.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	2 jenis	10.769.000		3.000.000		3.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	3 jenis kegiatan	13.510.000		9.000.000		9.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18 kegiatan	100.000.000		38.819.000		44.669.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			71.904.000		11.870.000		72.870.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan kantor	3 jenis	55.000.000		0	3 jenis	57.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	4 jenis	2.904.000		2.400.000		2.400.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	14.000.000		9.470.000		9.470.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur di Bagian Hukum Setda	4 item			0	Terpeliharanya Mebeleur	4.000.000	Bagian Hukum	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.710.515.000		1.879.351.000		1.801.241.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	5 kegiatan	65.000.000		50.937.000		50.937.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.19.9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	600 peserta	262.500.000		191.418.000	600 peserta	202.218.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.19.10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53 petugas	74.680.000		64.254.000		64.254.000	Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.19.14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12 kegiatan	106.000.000		86.911.000		86.911.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.19.18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	10 kegiatan	75.287.000		57.780.000		57.780.000	Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.19.28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	2 kegiatan	44.046.000		69.554.000		69.554.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.19.42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Properda	2 Dokumen	14.557.000		11.875.000	2 dokumen	18.325.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.19.43	Harmonisasi, Pembedaan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10 raperda	270.115.000		377.135.000	10 raperda	380.015.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.1.19.44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan MoU	625 produk hukum	121.140.000		323.311.000		323.311.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.1.19.46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12 laporan	179.000.000		102.025.000	12 laporan	99.385.000	Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.1.19.47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1 kegiatan	33.520.000		21.598.000		21.598.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.1.19.48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4 kegiatan	185.200.000		145.666.000	Tertanganin ya permasalahan hukum di Kota Magelang	50.066.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.1.19.56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	6 Rekomendasi	47.800.000		45.511.000		45.511.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.1.19.57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 keg	231.670.000		231.739.000		231.739.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4.1.19.62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan	625 produk hukum			32.213.000		32.213.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan	1 raperda			67.424.000		67.424.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	1.939.100.000		1.964.434.000		1.953.174.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIPORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			128.626.000		93.920.000		113.055.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	18.200.000		12.279.000		12.279.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	10.700.000		9.500.000		9.500.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	2.160.000		2.400.000		2.400.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian pegawai rapat dan tamu, terpenuhinya konsumsi pegawai, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 bulan	28.166.000		30.421.000		30.421.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	69.400.000		39.320.000		58.455.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			83.000.000		8.030.000		38.964.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	1 jenis			2.211.000	1 jenis AC	737.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Paralatan Gedung Kantor	1 jenis	33.000.000		0	1 jenis PC	21.000.000	bagian pembangun	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	4 jenis,	50.000.000		5.819.000	1 pemelihara	17.227.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			25.200.000		24.456.000		24.456.000				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB									
			Persentase SKPD yang direview LKJIP	45%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%									
			Capaian Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan	70%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja kota Magelang Tahun 2017	1 laporan	25.200.000		24.456.000		24.456.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			590.000.000		535.858.000		535.858.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3									
1	4.3.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	8 paket	590.000.000		535.858.000		535.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			649.760.000		614.261.000		602.088.000				
1	2.10.20.10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12 bulan	600.000.000		563.785.000	75 paket pek	563.785.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	2 dokumen	49.760.000		50.476.000	2 dokumen	38.303.000	bagian pembangun	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			659.630.000		776.473.000		764.247.000				
1	4.3.21.68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPR	Laporan TEPR	12 laporan bulanan			62.740.000	12 laporan	61.740.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019	1 kegiatan	310.000.000		395.252.000	3 kegiatan	391.602.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.21.22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	3 laporan	23.000.000		21.756.000	3 laporan	19.399.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TUJUAN	RENCANA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	RENCANA P 2019	RENCANA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.3.21.32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari dana pemerintah pusat	12 laporan	72.000.000		62.638.000	12 laporan	56.653.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.3.21.33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	laporan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi	12 laporan	58.000.000		50.746.000	12 laporan	52.248.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.3.21.53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	4 laporan	61.000.000		60.710.000		60.710.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.3.21.65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12 laporan	66.500.000		63.334.000	12 laporan	62.598.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.3.21.67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	12 laporan	69.130.000		59.297.000		59.297.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		42.272.000		37.872.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1									
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	raperval pengadaan langsung	1 raperval	0		42.272.000		37.872.000	bagian pembangun	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan											
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			0		103.454.000		82.184.000				
1	4.6.16.9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang barang jasa				103.454.000	3 pembinaan	82.184.000	Bagian Pembangun	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
				TOTAL	2.136.216.000		2.198.724.000		2.198.724.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian
Perekonomian
URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian
Perekonomian

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			216.150.000		153.913.000		153.913.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko dan paket pengiriman	12 bulan	660.000		260.000	100%	260.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	16.200.000		9.833.000	12 bln	9.833.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	9.460.000		7.137.000	12 bln	7.137.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	12 bulan	2.530.000		2.400.000	12 bln	2.400.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	12 bulan	22.300.000		10.600.000	12 bln	10.600.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kegiatan	165.000.000		123.683.000	12 bln	123.683.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			17.000.000		9.784.000		9.784.000				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	1 jenis			2.100.000	12 bln	2.100.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	4 jenis	17.000.000		7.684.000	12 bln	7.684.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			218.180.000		119.555.000		119.555.000				
			DISKOPERINDA G		301,739,600								
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	4%									
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.11.15.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan lembaga Keuangan Mikro	4 kegiatan	57.200.000		37.655.000	4 keg	37.655.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
2	2.11.15.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUR	6 laporan	160.980.000		81.900.000	6 laporan	81.900.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			115.500.000		97.437.000		97.437.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%									
			Persentase pemenuhan data statistik	95%									
1	2.14.15.11	Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Pengendalian Laju Inflasi di Kota Magelang	6 kegiatan	115.500.000		97.437.000		97.437.000	Bag. Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,6	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			0		140.794.000		140.794.000				
				-	5,170,500,000								
			Jumlah alat UTP yang ditera	2,800									
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3.6.15.28	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan DBHCHT	12 bulan			140.794.000		140.794.000	Bagian Perekonomian	DBHCHT		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			130.240.000		129.100.000		129.100.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%									
1	1.6.16.27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai	6 laporan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)	130.240.000		59.800.000		59.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.16.33	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi upaya percepatan akses keuangan di Kota Magelang	4 kegiatan			69.300.000		69.300.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			87.505.000		125.602.000		125.602.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	4 laporan	87.505.000		63.866.000		63.866.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	2.5.16.49	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Terlaksananya Pengelolaan Sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah			61.736.000		61.736.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		SDGs
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			65.000.000		50.396.000		51.196.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya	2 kegiatan	65.000.000		50.396.000		51.196.000				
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup						2 keg		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			204.490.000		166.061.000		163.561.000				
			Indeks Kualitas Air,	76%									
			Indeks Kualitas Udara	78%									
			Indeks Tutupan Hutan	49%									
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7									
			Jenis flora	10 Jenis									
			Jenis fauna	3 Jenis									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.17.9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Data dan laporan hemat energi, LPG dan BBM	36 laporan (SDG, LPG, dan BBM @ 12 laporan bulanan)	165.990.000		129.649.000		127.149.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	2.5.17.47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	Sosialisasi penghematan energi dan air serta pemanfaatan energi terbarukan pada OPD, BUMD serta unsur dari masyarakat	2 kegiatan sosialisasi	38.500.000		36.412.000		36.412.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		145.310.000		145.310.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1									
			Jumlah RAPERDA/RAPE RWAL baru tentang investasi	0									
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan peraturan daerah	2 Raperda	0		113.060.000		113.060.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Rancangan Peraturan Walikota	1 Raperwal			32.250.000		32.250.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,7	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah			348.300.000		288.975.000		283.975.000				
1	3.7.20.1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	12 laporan bulanan	148.000.000		124.752.000		122.252.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.7.20.2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	RKAP dan Perubahan RKAP Perusahaan Daerah	10 laporan (5 bumd @ 2 laporan)	52.000.000		29.600.000		29.600.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.7.20.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Laporan Evaluasi RKAP Perusahaan Daerah	12 laporan bulanan	104.300.000		94.623.000		92.123.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.7.20.8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah	5 dokumen	44.000.000		40.000.000		40.000.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	1.402.365.000		1.426.927.000		1.420.227.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIPORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			187.966.000		116.034.000		117.863.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	22 jenis	22.770.000		10.000.000		10.000.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan	36300 lembar	7.260.000		6.600.000	36300 lembar	6.845.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	2 media	2.687.000		2.400.000		2.400.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum harian pegawai dan rapat	10 pegawai	13.570.000		7.984.000	10 pegawai	9.568.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kali	141.679.000		89.050.000	25 kali	89.050.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			16.850.000		8.410.000		4.285.000				
1	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	16.850.000		8.410.000	4 jenis	4.285.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU	
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			103.310.000		86.575.000		86.575.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	ARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TU	RE 2019	RE 2019	RE 2019	RE 2019	RE 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Dialog/audiensi dalam kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	4 kegiatan	103.310.000		86.575.000		86.575.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			78.000.000		66.323.000		57.673.000				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CAI	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	11.00%									
1	1.6.15.6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian sesuai ketentuan	12 bulan	78.000.000		66.323.000		57.673.000				
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						12 bulan		Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Ker
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			30.396.000		26.418.000		26.418.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya koordinasi tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	150 ora	30.396.000		26.418.000		26.418.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana	
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			294.800.000		209.343.000		202.643.000				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%									
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%									
1	1.6.16.22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	12 bulan	294.800.000		209.343.000		202.643.000	12 bulan	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CAI	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			71.650.000		55.626.000		49.912.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47,37%									
1	2.2.16.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Laporan Indeks Pembangunan Gender	4 laporan	71.650.000		55.626.000	4 laporan	49.912.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			353.500.000		322.216.000		322.216.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CAI	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITAS	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Malam Tasyakuran Hari Jadi Magelang	1 kegiatan	65.200.000			67.893.000		67.893.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan HUT RI, Hari Ibu, dan Hari AIDS Tingkat Kota Magelang	3 kegiatan	288.300.000			254.323.000		254.323.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			518.990.000			516.549.000		505.990.000			
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%									
			Jumlah Juara FASI	4									
			Jumlah Juara MTQ	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
			TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.18.14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Magelang	2 kegiat	237.000.000		225.318.000		225.318.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.1.18.16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Magelang	2 kegiat	216.800.000		218.404.000	2 Kegiatan	207.845.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.1.18.17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Terkirimnya peserta MTQ Pelajar dan MTQ Umum ke Tingkat Provinsi Jateng	2 kegiat	65.190.000		72.827.000		72.827.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			42.900.000		40.961.000		40.961.000				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	58%									
1	1.6.19.7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya pengajian dan buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1 kegiat	42.900.000		40.961.000		40.961.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			190.757.000		197.545.000		181.106.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TOLAK UKUR	TARGET 2019	RENCANA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	RENCANA 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga (senam, volley ball, tenis, sepak bola)	4 kegiatan	190.757.000		197.545.000	4 kegiatan	181.106.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			79.785.000		58.867.000		57.862.000				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APB	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%									
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulanga n bencana	50%									
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%									
			#NAME?	2									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulanga n bencana	ada									
1	1.5.22.9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulanga n bencana	4 laporan		79.785.000		58.867.000	4 laporan	57.862.000	Bagian Kesra Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.5.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama				0		833.919.000		885.282.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	ATOR KINERJA CAI	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	RIORITA	STATUS
				TOLOK UKUR	ARGET 20	RENJA 2019	TARGET APBI	APBD 2019	GET RENJA P 2	RENJA P 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	35%									
			Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%									
			Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	60									
			Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	6									
			Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	7%									
			Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAKUPAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
				TARGET 2019	RENCANA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENCANA P 2019	RENCANA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	15%									
			Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-									
			Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%									
1	1.5.24.3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Bagi Warga Masyarakat				295.267.000	5 kegiatan	275.457.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.24.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Tabligh Akbar Peringatan Tahun Baru Islam				264.593.000	1 Kegiatan	335.766.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.5.24.2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	terselenggaranya kegiatan pengiriman TPHD dan P3H				245.781.000	3 Kegiatan	245.781.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.5.24.4	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Tingkat Kota Magelang				28.278.000	1 kegiatan	28.278.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	1.968.904.000		2.538.786.000		2.538.786.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian
 Hubungan Masyarakat
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian
 Hubungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			345.729.000		227.275.000		303.687.000				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	22.301.000		18.900.000		18.900.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	32.700.000		25.602.000		25.602.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan harian surat kabar dan majalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan wawasan	12 bulan	75.800.000		69.240.000		69.240.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan logistik bagi pegawai, serta konsumsi bagi tamu dan peserta rapat	12 bulan	35.608.000		21.721.000		21.721.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	179.320.000		91.812.000	3 bulan	168.224.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			258.493.000		37.456.000		293.956.000				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	9 jenis	200.000.000			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	256.500.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin	3 jenis	28.193.000		24.185.000		24.185.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan yang mendukung kinerja kehumasan dan keprotokolan	9 jenis	30.300.000		13.271.000		13.271.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.873.948.000		2.570.823.000		2.529.957.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pelaksanaan kegiatan Bakohumas Kota Magelang, dan terkumpulnya berita/informasi kegiatan di OPD/Instansi terkait	4 kegiatan	453.100.000		66.853.000	12 bulan	86.853.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.10.15.9	Siaran keliling	Terpublikasikan nya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	12 bulan	18.804.000		11.700.000		11.700.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.10.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Publikasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang melalui media cetak dan elektronik, serta terdokumentasi nya informasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang	12 bulan	393.000.000		1.410.568.000	3 bulan	1.268.846.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
4	2.10.15.20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Kerjasama dengan wartawan media cetak dan elektronik	5 kegiatan	570.854.000		466.520.000	12 bulan	446.720.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	91	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.10.15.25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumentasi dan buletin kegiatan acara resmi Pemerintah Kota Magelang, serta naskah sambutan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12 bulan	438.190.000		615.182.000	12 bulan	690.182.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
6	2.10.15.41	Pengelolaan Media Sosial	Pengelolaan akun media sosial		0		0	1 kegiatan	25.656.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			0		221.898.000		232.398.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pelaksanaan acara resmi Pemerintah Kota Magelang dengan lancar	12 bulan			221.898.000	12 bulan	232.398.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			176.000.000		128.149.000		118.604.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Pelaksanaan upacara hari jadi Kota Magelang, upacara HUT RI, dan upacara tanggal 17 di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan nilai-nilai patriotisme	4 kegiatan	176.000.000		128.149.000		118.604.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			101.800.000		122.897.000		116.447.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%									
1	4.1.17.15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang	12 bulan	101.800.000		122.897.000		116.447.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			0		0		47.535.000				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan hasil data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil analisa isu publik				0	3 bulan	47.535.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			243.700.000		192.467.000		175.067.000				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1									
			Interoperabilitas antar system informasi	2									
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%									
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%									
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%									
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 bulan	243.700.000		192.467.000	12 bulan	175.067.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				TOTAL	2.999.670.000		3.500.965.000		3.817.651.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian
Program, Keuangan dan
Perlengkapan

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian
Program, Keuangan dan
Perlengkapan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.215.610.000		1.848.333.000		1.902.407.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1375 buah	5.500.000		6.000.000	1375 buah	2.550.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR, Pengurusan Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK	99 unit kendaraan dinas	85.000.000		75.117.000	104 unit kendaraan dan 47 dokumen	52.840.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi barang	12 Bulan	932.000.000		855.108.000	12 laporan administrasi keuangan dan 2 2 laporan administrasi barang	839.578.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31 orang, 7 item alat kebersihan	736.000.000		593.655.000	7 jenis alat dan bahan kebersihan, 26 tenaga kebersihan	637.189.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	15 jenis	47.850.000		35.000.000	15 jenis	35.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis barang cetak	20.500.000		15.000.000	5 jenis barang cetakan, 5000 lembar penggandaan	15.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	10 jenis	55.800.000		60.000.000	34 jenis	60.000.000	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan Bahan bacaan	2 jenis	3.830.000		2.400.000	2 jenis	2.400.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan Tabung gas	2 jenis	95.070.000		19.842.000	BBM Genset dan pengisian tabung gas 12 bulan	16.688.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai dan konsumsi rapat	2 jenis	23.470.000		19.390.000	Makan dan Minum 12 bulan	17.024.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	145.590.000		97.221.000	15 kegiatan	142.148.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kebutuhan operasional pimpinan dan perlengkapan kegiatan Setda	12 bulan	65.000.000		69.600.000	Pelayanan 12 bulan	81.990.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.707.088.000		2.400.837.000		4.159.752.000				
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	MPV dan Sepeda Motor	2 Jenis				2 unit mobil, 2 unit sepeda motor	0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah	2 jenis	242.000.000		0	10 jenis	650.235.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur	2 jenis	257.340.000		0	8 jenis	292.049.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman lingkungan	4 lokasi	595.804.000		492.000.000	3 gedung dan 2 lokasi taman	673.797.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan KDH & WKDH	2 unit	217.921.000		186.400.000	2 unit	179.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 dan Bus	99 unit	1.341.000.000		839.071.000	Pemeliharaan 5 jenis kendaraan, BBM 7 jenis kendaraan	968.817.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	14.920.000		15.255.000	3 jenis	20.350.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja dan kantor	8 jenis	25.688.000		16.505.000	4 jenis	13.505.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5 jenis	12.415.000		6.566.000	5 jenis	12.300.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pagar Depan Kantor Walikota Magelang dan Ruang Command Center Kota Magelang	2 paket			845.040.000	3 paket pekerjaan	865.490.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
11	4.1.2.35	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kanopi				0	1 unit	45.000.000	Rumah Dinas Sekda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
12	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor				0	5 jenis	37.500.000	Bagian Program, Keuangan, dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan Rumah Dinas Sekda dan Rumah Jabatan KDH/WKDH				0	7 jenis	224.909.000	Rumdin Sekda dan Rumjab KDH/WKDH	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
14	4.1.2.34	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Ruang Kedap Suara				0	1 unit	176.800.000	Rumah Jabatan KDH	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			250.822.300		209.650.000		200.113.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan/anggaran	12 laporan	73.735.000		44.965.000	12 kegiatan	44.965.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1 laporan	12.415.000		8.232.000	1 laporan	8.232.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1 laporan	14.160.000		8.706.000	1 laporan	8.706.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan Setda	2 jenis	15.070.000		12.567.000	2 jenis	12.567.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Setda	2 kegiatan	51.000.000		32.500.000	2 kegiatan	32.500.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	4.1.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 laporan	73.362.300		76.450.000	12 laporan	66.913.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 laporan	11.080.000		11.230.000	1 laporan	11.230.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
8	4.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RENSTRA				15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
				TOTAL	5.173.520.300		4.458.820.000		6.262.272.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian
 Umum
 URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian
 Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.931.562.780		5.212.570.000		5.412.050.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, paket pengiriman dan jasa kotak pos	1.340 buah perangko, 4 kali pengiriman paket dan 1 kali belanja jasa kotak pos	8.228.000		6.500.000	1.340 buah perangko, 4 kali pengiriman paket dan 1 kali belanja jasa kotak pos	5.500.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	Kantor Sekretri at Daerah , 2 Rumah Jabatan dan 1 Rumah Dinas	2.307.228.000		1.872.000.000	Kantor Sekretariat Daerah, 2 Rumah Jabatan dan 1 Rumah Dinas	1.872.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan dan seragam tenaga kebersihan	16 jenis peralatan, 9 orang tenaga kebersihan dan 18 stel seragam kerja	201.043.920		269.367.000	16 jenis peralatan, 9 orang tenaga kebersihan dan 18 stel seragam kerja	254.718.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	27 jenis alat tulis kantor	48.400.000		45.000.000	27 jenis alat tulis kantor	45.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	15 jenis barang cetakan, 40.200 lembar penggandaan dan 72 jilid	142.029.800		125.000.000	barang cetakan dan penggandaan 15 jenis barang cetakan, 40.200 lembar penggandaan dan 72 jilid	121.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	5 jenis peralatan listrik	22.277.310		19.050.000	5 jenis peralatan listrik	24.050.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan karangan bunga, tempat cinderamata dan cinderamata	150 buah karangan bunga dan 43 buah cinderamata	318.230.000		283.000.000	3 jenis	303.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12 jenis alat rumah tangga	37.207.500		40.750.000	12 jenis alat rumah tangga	38.150.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	2 jenis alat rumah tangga	3.823.600		2.400.000	2 jenis surat kabar	2.400.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	475 liter solar dan 120 buah tabung gas kapasitas 12 Kg	81.071.210		21.080.000	475 liter solar dan 120 buah tabung gas kapasitas 12 Kg	22.400.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	6 jenis makanan dan minuman harian, 75 kali jamuan rapat, 750 kali jamuan tamu	1.292.885.000		1.192.565.000	6 jenis makanan dan minuman harian, 75 kali jamuan rapat, 700 kali jamuan tamu	1.290.075.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali perjalanan dinas dalam prov jateng dan 30 kali perjalanan dinas luar prov jateng	1.085.551.500		1.006.053.000	30 kali perjalanan dinas dalam prov jateng dan 30 kali perjalanan dinas luar prov jateng	1.092.152.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Pegawai honorar/tenaga kontrak	3 orang tenaga kontrak/ honorar daerah	101.856.590		84.179.000	3 orang tenaga kontrak/ honorar daerah	91.819.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	5 orang	24.200.000		12.500.000	5 orang	5.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	dokumen kepegawaian dari 9 bagian	30.685.600		52.221.000	12 bulan	50.901.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
16	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 bulan	226.844.750		180.905.000	1 jenis pelayanan	193.285.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			523.548.850		328.155.000		597.330.000				
1	4.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH & WKDH	2 rumah jabatan	162.140.000		209.200.000	2 rumah jabatan	409.200.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1 rumah	62.665.900		30.000.000	1 rumah	40.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	10 item perlengkapan rumah jabatan / dinas	19.747.200		18.500.000	10 item perlengkapan rumah jabatan/ dinas	14.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	7 item perlengkapan gedung kantor	44.770.000		7.250.000	7 item perlengkapan gedung kantor	7.250.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 jenis peralatan gedung kantor	30.764.250		13.205.000	3 jenis peralatan gedung kantor	13.205.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	65 buah mebeleur			50.000.000	75 buah mebeleur	65.000.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor	4 unit personal komputer, 2 unit peralatan personal komputer	203.461.500			4 unit personal komputer, 2 unit peralatan personal komputer	48.675.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			34.320.440		92.700.000		114.700.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	168 arsip	34.320.440		29.550.000	168 arsip	29.550.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.16.13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Pendokumentasian naskah dinas daerah	arsip yang dikelola di 9 bagian Setda dan OPD lainnya			63.150.000	arsip yang dikelola di 9 bagian Setda dan OPD lainnya	85.150.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			2.316.119.080		1.940.084.000		1.844.799.000				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%									
1	4.1.16.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	24 dialog/audiensi	219.905.400		181.060.000	24 dialog/audiensi	181.060.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	1 kali kunjungan kerja, 12 inspeksi ke SKPD dan institusi lainnya	563.467.960		324.250.000	1 kali kunjungan kerja, 12 inspeksi ke SKPD dan institusi lainnya	175.425.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	67 kali koordinasi	578.839.800		701.824.000	67 kali koordinasi	742.824.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota magelang	4 orang tenaga kerumahahtangan, 1 orang tenaga pengaman walikota, 2 stel PDH, 2 stel PDU, 1 stel korpri	953.905.920		732.950.000	4 orang tenaga kerumahtanggaan, 1 orang tenaga pengaman walikota, 2 stel PDH, 2 stel PDU, 1 stel korpri	745.490.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	8.805.551.150		7.573.509.000		7.968.279.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Sekretariat DPRD
 URUSAN : Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.274.495.350		10.159.653.000		7.752.559.000				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	2000 surat dan 12 pengirim man paket	400.000		2.050.000	1 tahun	500.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	212.700.000		305.300.000	5 kegiatan	271.700.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk tertibnya administrasi dan kenyamanan pengguna kendaraan	32 kendaraan dinas	37.600.000		19.864.000		19.864.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	259.543.000		256.003.000	12 bulan	254.203.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	12	161.599.000		300.297.000		324.681.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana	45 item	26.076.000		20.002.000	45 item	28.498.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	12 bulan	55.427.000		35.798.000	12 bulan	43.548.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	12	14.308.000		20.002.000	item	26.284.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5 item	59.350.000		105.491.000	item	116.973.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	1 koran lokal, 5 koran regional, 1 majalah nasional, 13 buku peraturan	12.800.000		14.000.000	item	11.750.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	12	10.972.600		21.923.000	item	19.271.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12 bulan	74.460.750		328.664.000	12 bulan	299.612.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12 bulan	6.947.200.000		8.235.150.000	12 bulan	5.804.750.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tenaga mekanikal, Administrasi, Tersedia nya penjaga malam, driver	Mekani kal 1 orang, admini strasi 4 orang, penjaga malam 9 orang, penge mudi 2 orang	229.032.000		341.252.000	12 bulan	343.640.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.1.1.24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD sedini mungkin	25 anggota DPRD	143.875.000		62.500.000		62.500.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
16	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12 bulan	29.152.000		91.357.000	12 bulan	112.290.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
17	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga				0	15 item	12.495.000	Rumah dinas	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.035.846.000		892.150.000		1.435.686.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 unit rumah dinas	104.091.000		50.018.000	12 bulan	103.144.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit gedung kantor	193.668.000		215.091.000	12 bulan	213.336.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	31 (18 kendar aan roda 2, 13 kendar aan roda 4)	548.658.000		334.833.000	12 bulan	265.692.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 item	41.750.000		40.350.000	12 bulan	41.570.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kinerja	4 item	20.679.000		13.768.000		13.768.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terfasilitasinya mebeleur	4 item			57.693.000	1 Item	285.102.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	8 item	0		180.397.000	12 bulan	400.187.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	1 item	127.000.000		0	1 Item	112.887.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			188.171.000		364.063.000		364.063.000				
1	4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	175 pakaia n dinas	188.171.000		364.063.000		364.063.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			872.000.000		886.300.000		813.276.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6 kegiatan	872.000.000		886.300.000	12 bulan	813.276.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			45.273.000		65.070.000		64.630.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 triwulan	8.872.000		12.031.000		12.031.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	2.780.000		2.500.000		2.500.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 kegiatan	0		2.652.000		2.652.000	setwan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 kegiatan	8.971.000		11.785.000		11.345.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2 kegiatan	17.221.000		18.000.000		18.000.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya Renstra	1 kegiatan	0		9.006.000	1 kegiatan	9.006.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	Tersusunnya LKjIP	1 kegiatan	7.429.000		9.096.000		9.096.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			4.539.838.000		13.635.609.000		13.388.529.000				
			SETWAN		3,559,383,000								
			Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda yang ditetapkan	20 raperda	531.802.000		2.202.662.000	12 bulan	2.202.567.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7 alat kelengkapan dewan	280.097.000		7.747.865.000	12 bulan	7.748.760.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	35 rapat paripurna	204.754.000		330.541.000		330.541.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	4.1.15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	2 kali reses	987.735.000		924.585.000		836.560.000	Dapil 1, 2, dan 3	Dana Alokasi Umum	40	Pokok Pikiran DPRD
5	4.1.15.9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	120 risalah	36.330.000		31.015.000		31.015.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6	4.1.15.11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	6 kegiatan	2.373.450.000		2.087.100.000		1.925.850.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	4.1.15.10	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	Tersusunnya memori bhakti	249 buku	125.670.000		73.648.000		73.648.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
8	4.1.15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Raperwal			238.193.000	8 raperwal	239.588.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			40.436.000		40.436.000		43.440.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200 buku	40.436.000		40.436.000		43.440.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			57.298.000		36.851.000		36.851.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdapat dan tertatanya dokumen/arsip	Arsip 3 bagian	57.298.000		36.851.000		36.851.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			159.600.000		191.850.000		208.744.000				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarluasnya informasi	4 item media publikasi	159.600.000		191.850.000	item	208.744.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			118.956.000		118.956.000		118.956.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Terbitnya buletin	4 buletin	118.956.000		118.956.000	-	118.956.000	Setwan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
				TOTAL	15.331.913.350		26.390.938.000		24.226.734.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan

URUSAN : Kecamatan Magelang Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			834.028.000		739.658.000		777.253.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.656.000	12 bulan	37.800.000	12 bulan	48.516.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	12 buah	3.485.000	12 buah	2.140.000	12 buah	2.140.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	1 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	3.449.000	1 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	2.325.000	1 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	1.825.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54 orang	429.254.000	54 orang	378.573.000	54 orang	377.073.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	93.316.000	12 bulan	81.526.000	12 bulan	87.838.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	34.630.000	12 bulan	16.228.000	12 bulan	16.228.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.519.000	12 bulan	5.410.000	12 bulan	3.699.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	8.605.000	12 bulan	4.674.000	12 bulan	4.674.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.122.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	1.920.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12 bulan	4.798.000	12 bulan	4.420.000	12 bulan	4.364.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	22.785.000	12 bulan	26.171.000	12 bulan	27.462.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 kegiatan	81.905.000	8 kegiatan	33.810.000	8 kegiatan	49.260.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	2 orang	19.473.000	2 orang	39.263.000	2 orang	42.419.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12 bulan	75.031.000	12 bulan	104.318.000	12 bulan	109.835.000	Kantor Kecamatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			164.091.000		198.759.000		163.468.000				
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya pengelolaan sampah di masyarakat	1 unit		1 unit	40.950.000	1 unit	40.950.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	150 M2	6.280.000	150 M2	5.192.000	150 M2	5.192.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	700 M2	60.409.000	700 M2	47.419.000	700 M2	42.126.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit	81.857.000	11 unit	64.370.000	11 unit	62.470.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	25 unit (ubah per jenis)	7.716.000	25 unit (ubah per jenis)	5.406.000	25 unit (ubah per jenis)	5.406.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis	7.829.000	5 jenis	5.472.000	5 jenis	5.472.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terlaksananya pengelolaan sampah organik di masyarakat	1 unit		1 unit	29.950.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			131.628.000		73.282.000		74.182.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 laporan	28.794.000	12 laporan	13.672.000	12 laporan	13.672.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya rencana kerja OPD	2 dokumen	24.681.000	2 dokumen	11.785.000	2 dokumen	12.685.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2 dokumen	36.173.000	2 dokumen	20.037.000	2 dokumen	20.037.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1 dokumen	15.220.000	1 dokumen	5.264.000	1 dokumen	5.264.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1 dokumen	12.896.000	1 dokumen	4.307.000	1 dokumen	4.307.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	13.864.000	1 dokumen	6.407.000	1 dokumen	6.407.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	terlaksananya penyusunan dokumen renstra perubahan				11.810.000		11.810.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			9.221.000		10.533.000		10.533.000				
			APK PAUD	66%		66%		66%					
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		53%		53%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120 peserta	9.221.000	120 peserta	10.533.000	120 peserta	10.533.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			17.120.000		14.350.000		14.350.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76 orang	17.120.000	76 orang	14.350.000	76 orang	14.350.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		8.235.000		8.235.000				
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kecamatan	1 kegiatan		1 kegiatan	8.235.000	1 kegiatan	8.235.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			7.091.000		4.281.000		4.281.000				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		35,19%		35,19%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1 jenis dokumen	7.091.000	1 jenis dokumen	4.281.000	1 jenis dokumen	4.281.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			102.487.000		89.524.000		89.524.000				
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	102.487.000	12 bulan	89.524.000	12 bulan	89.524.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			55.398.000		45.787.000		45.787.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		30%		30%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2 kegiatan	55.398.000	2 kegiatan	45.787.000	2 kegiatan	45.787.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			10.983.000		7.272.000		7.272.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%		2%					
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	70 orang	10.983.000	70 orang	7.272.000	70 orang	7.272.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			11.946.000		30.146.000		30.146.000				
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1 kegiatan	11.946.000	1 kegiatan	12.146.000	1 kegiatan	12.146.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terlaksananya kegiatan Upacara memperingati HUT RI tingkat kecamatan				18.000.000		18.000.000	wilayah Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			26.512.000		28.406.000		28.406.000				
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	26.512.000	1 kegiatan	28.406.000	1 kegiatan	28.406.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			33.590.000		34.459.000		34.459.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275 orang	33.590.000	275 orang	34.459.000	275 orang	34.459.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan			6.497.000		10.131.000		10.131.000				
1	2.7.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90 orang	6.497.000	90 orang	10.131.000	90 orang	10.131.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			31.340.000		23.630.000		23.630.000				
1	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 orang	14.481.000	60 orang	6.240.000	60 orang	6.240.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12 Bulan	16.859.000	12 Bulan	17.390.000	12 Bulan	17.390.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			11.626.000		9.355.000		9.355.000				
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	90 orang	11.626.000	90 orang	9.355.000	90 orang	9.355.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			5.242.000		6.287.000		6.287.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	4 kegiatan	5.242.000	4 kegiatan	6.287.000	4 kegiatan	6.287.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			36.618.000		27.705.000		27.705.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya kegiatan sarasehan musrenbang	125 orang	15.606.000	125 orang	12.296.000	125 orang	12.296.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	1 jenis dokumen	21.012.000	1 jenis dokumen	15.409.000	1 jenis dokumen	15.409.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			11.641.000		9.206.000		9.206.000				
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan	90 orang	11.641.000	90 orang	9.206.000	90 orang	9.206.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			15.169.000		12.754.000		12.754.000				
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	90 orang	15.169.000	90 orang	12.754.000	90 orang	12.754.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			9.979.000		9.359.000		9.359.000				
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta penyuluhan	75 orang	9.979.000	75 orang	9.359.000	75 orang	9.359.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			0		45.000.000		45.000.000				
			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM					
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya kegiatan pameran produk UMKM				45.000.000		45.000.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			0		10.027.000		10.027.000				
			Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan					
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan Magelang Selatan				10.027.000		10.027.000	wilayah Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		9.359.000		9.359.000				
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular				9.359.000		9.359.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0		16.428.000		16.428.000				
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya kegiatan FKDM				16.428.000		16.428.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		0		29.950.000				
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengadaan mesin pencacah sampah				0	1 unit	29.950.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
				TOTAL	1.532.207.000		1.473.933.000		1.505.235.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Rejowinangun
Selatan
URUSAN : Kelurahan Rejowinangun
Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			112.800.000		133.972.000		132.388.000				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam	12 bulan		12 bulan	19.632.000	12 bulan	21.210.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12	22.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendara an dinas	9 motor	3.000.000	9 motor	2.502.000	9 motor	2.502.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12 bulan	0	12 bulan	24.345.000	12 bulan	25.923.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12	18.000.000	12 bulan	10.141.000	12 bulan	10.141.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12	9.000.000	12 bulan	4.041.000	12 bulan	4.041.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12	2.000.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12	5.000.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	2.160.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan isi ulang tabung gas	12	800.000	12 bulan	1.364.000	12 bulan	1.364.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12	23.000.000	12 bulan	14.547.000	12 bulan	11.247.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	30.000.000	1 kegiatan	27.300.000	1 kegiatan	27.300.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			54.000.000		28.566.000		35.239.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1	12.000.000	1 kegiatan	7.984.000	1 kegiatan	7.984.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	14.198.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12	12.000.000	12 bulan	5.582.000	12 bulan	5.582.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
5	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	1	0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	15.000.000	0	0	4 unit	7.475.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan kantor			0	0	0	0	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			19.000.000		10.648.000		10.648.000				
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1	19.000.000	4 kegiatan	10.648.000	4 kegiatan	10.648.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			7.000.000		6.021.000		6.021.000				
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45	7.000.000	45 orang	6.021.000	45 orang	6.021.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			7.000.000		5.987.000		5.987.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50	7.000.000	50 orang	5.987.000	50 orang	5.987.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			43.021.000		53.418.000		52.778.000				
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12	31.021.000	12 bulan	44.938.000	12 bulan	44.298.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1	12.000.000	1 kegiatan	8.480.000	1 kegiatan	8.480.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			28.000.000		75.855.000		80.589.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Laporan kependudukan	12	0		0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12	28.000.000	12 bulan	75.855.000	12 bulan	80.589.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			12.000.000		19.382.000		19.382.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82	12.000.000	82 orang	10.389.000	82 orang	10.389.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya RTRW	82 orang		82 orang	8.993.000	82 orang	8.993.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			31.000.000		37.739.000		37.901.000				
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12	31.000.000	12 bulan	37.739.000	12 bulan	37.901.000	Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			9.500.000		6.931.000		6.931.000				
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1	9.500.000	1 kegiatan	6.931.000	1 kegiatan	6.931.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			130.000.000		185.223.000		185.223.000				
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12	130.000.000	12 bulan	185.223.000	12 bulan	185.223.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.000.000		7.191.000		7.191.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1	6.000.000	1 kegiatan	7.191.000	1 kegiatan	7.191.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.000.000		5.565.000		5.565.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	1	6.000.000	1 kegiatan	5.565.000	1 kegiatan	5.565.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			24.000.000		7.370.000		3.992.000				
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12	24.000.000	12 bulan	7.370.000	12 bulan	3.992.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			14.000.000		9.142.000		9.142.000				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3									
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4	14.000.000	4 kegiatan	9.142.000	4 kegiatan	9.142.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			16.000.000		35.061.000		35.061.000				
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1	16.000.000	1 kegiatan	20.803.000	1 kegiatan	20.803.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi	2 kegiatan		1 kegiatan	5.383.000	1 kegiatan	5.383.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi	1 kegiatan		1 kegiatan	8.875.000	1 kegiatan	8.875.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			12.000.000		15.935.000		15.935.000				
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1	12.000.000	1 kegiatan	15.935.000	1 kegiatan	15.935.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			7.500.000		12.834.000		12.834.000				
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	15	7.500.000	15 RW	12.834.000	15 RW	12.834.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			6.500.000		5.522.000		5.522.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1	6.500.000	1 kegiatan	5.522.000	1 kegiatan	5.522.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	terlaksananya SMD dan MMD				0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.200.000		5.217.000		5.217.000				
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1	7.200.000	1 kegiatan	5.217.000	1 kegiatan	5.217.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			22.000.000		32.197.000		32.197.000				
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam PORKEK antar Kelurahan	1	22.000.000	1 kegiatan	32.197.000	1 kegiatan	32.197.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.200.000		18.989.000		18.989.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120	12.000.000	120 orang	15.091.000	120 orang	15.091.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1	4.200.000	1 kegiatan	3.898.000	1 kegiatan	3.898.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			9.700.000		8.373.000		8.373.000				
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	45	9.700.000	45 orang	8.373.000	45 orang	8.373.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertemuan WPA dan pemeriksaan VCT	4 ok			0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.300.000		5.300.000		5.300.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor	1	5.300.000	1 kegiatan	5.300.000	1 kegiatan	5.300.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			6.900.000		9.114.000		9.114.000				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%									
1	1.2.28.12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1	6.900.000	1 kegiatan	9.114.000	1 kegiatan	9.114.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			22.300.000		14.170.000		14.170.000				
1	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	15	22.300.000	15 posyandu	14.170.000	15 posyandu	14.170.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			14.500.000		7.766.000		7.766.000				
1	1.2.30.6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	10	14.500.000	10 posyandu lansia	7.766.000	10 posyandu lansia	7.766.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.500.000		6.425.000		6.425.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	35	5.500.000	35 peserta	6.425.000	35 peserta	6.425.000	Masyarakat sehat	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			0		111.675.000		111.675.000				
1	1.3.34.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Pemeliharaan jalan RW. 1	1 kegiatan	0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.3.34.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan RW. 4	1 kegiatan	0	P :120 MD : 50	40.050.000	P :120 MD : 50	40.050.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
3	1.3.34.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Pemeliharaan jalan RW. 5	1 kegiatan	0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
4	1.3.34.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan RW. 9		0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	1.3.34.49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Pemeliharaan saluran RW. 4		0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	1.3.34.53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase RW. 8	1 kegiatan	0	0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
7	1.3.34.55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase rw. 10		0	P : 45 MD : 30	19.125.000	P : 45 MD : 30	19.125.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrstruktur	1 kegiatan		0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
9	1.3.34.44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terpeliharanya jalan RW. 14	1 kegiatan	0	P : 9	11.250.000	P : 9	11.250.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.3.34.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terpeliharanya saluran air	1 kegiatan		0	0	0	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
11	1.3.34.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya infrastruktur	P.25 MD. 30		P : 35 MD : 30	14.875.000	P : 35 MD : 30	14.875.000	RT. 4 RW. VI	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
12	1.3.34.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya infrastruktur jalan	P 70M2		P : 70	15.750.000	P : 70	15.750.000	RT. 2, 4, 5, 6	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
13	1.3.34.52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya infrastruktur	P.25 MD. 30		P : 25 MD : 30	10.625.000	P : 25 MD : 30	10.625.000	RT.04	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
14	1.3.34.59	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	terpeliharanya infrastruktur				0		0	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		8.800.000		10.243.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terlaksananya sosialisasi			1 kegiatan	8.800.000	1 kegiatan	10.243.000	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		10.000.000		10.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	terbentuknya KIM			1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			0		18.200.000		18.200.000				
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	tersedianya PMT bagi Posyandu balita dan lansia			4 kegiatan	18.200.000	4 kegiatan	18.200.000	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		30.510.000		30.510.000				
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	terlaksananya kegiatan PKK			12 bulan	30.510.000	12 bulan	30.510.000	kelurahan rejowinangun selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
				TOTAL	654.921.000		949.098.000		956.508.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Magersari
 URUSAN : Kelurahan Magersari

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			149.239.000		170.407.000		175.898.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	27.240.000		27.240.000		25.776.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya ketersediaan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 mobil sampah, 7 kendaraan operasional roda 2	3.150.000	1 unit mobil sampah & 7 unit kendaraan dinas roda 2	3.136.000	1 unit mobil sampah & 7 unit kendaraan dinas roda 2	3.136.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 bulan	39.678.000		40.420.000		43.576.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 bulan	12.000.000		5.834.000		5.834.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.756.000	12 bulan	4.041.000	12 bulan	4.041.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	12 bulan	1.159.000	12 bulan	1.159.000	12 bulan	1.802.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	3.780.000	12 bulan	4.248.000	12 bulan	4.248.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terfasilitasi ketersediaan barang logistik kanton (BBM Potong Rumpit ,Tabung Pemadam Kebakaran & Isi Ulang Gas Elpiji)	12	2.336.000	12 bulan	2.792.000	12 bulan	2.792.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dan tamu	12	24.140.000	12 bulan	15.058.000	12 bulan	15.058.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	30.000.000	5 kegiatan	27.216.000	5 kegiatan	27.216.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Pokok Pikiran DPRD
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak / Honorar / Tidak Tetap	12 Bulan		12 bulan	39.263.000	12 bulan	42.419.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			26.505.000		27.712.000		29.312.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Magersari dan Gedung Riyadi	1060	5.800.000	1060 m2	3.703.000	1060 m2	3.703.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 7 unit (roda dua)	12	19.755.000	7 unit kendaraan dinas roda 2	21.297.000	7 unit kendaraan dinas roda 2	21.297.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Telepon , Sound System , TV , LCD)	12 Bulan (4 Unit)	950.000	telepon , sound system , tv , LCD	812.000	telepon , sound system , tv , LCD	812.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Pemeliharaan komputer, printer dan laptop)	12 Bulan (3 unit)		4 unit PC , 1 unit laptop , 4 unit printer	1.900.000	4 unit PC , 1 unit laptop , 4 unit printer	3.500.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.728.000		5.051.000		5.051.000				
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini	1	4.728.000	1 kegiatan	5.051.000	1 kegiatan	5.051.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			21.796.000		5.210.000		5.210.000				
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya pengetahuan linmas	12	21.796.000	40 orang , 1 kegiatan	5.210.000	40 orang , 1 kegiatan	5.210.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			83.646.000		107.457.000		106.270.000				
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselenggaranya pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12	71.416.000	12 bulan	94.274.000	12 bulan	93.087.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Tersedianya Pengelolaan Persampahan & Berkembangnya Kampung Organik di RW-RW	1	12.230.000	1 RW	13.183.000	1 RW	13.183.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			17.905.000		67.709.000		72.443.000				
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik administrasi	12 Bulan (2 orang)	17.905.000	12 bulan	67.709.000	12 bulan	72.443.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			7.671.000		13.280.000		13.280.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	12 Bulan (13 RW dan 75 RT di Kelurahan Magersari)	7.671.000	88 orang	7.830.000	88 orang	7.830.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan Rt / Rw	75 ketua rt , 13 ketua rw		13 orang Ketua RW dan 75 orang ketua RT	5.450.000	13 orang Ketua RW dan 75 orang ketua RT	5.450.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			18.000.000		22.463.000		22.571.000				
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan Masyarakat	12 Bulan (2 orang)	18.000.000	2 orang x 12 bulan	22.463.000	2 orang x 12 bulan	22.571.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		1.962.000		1.962.000				
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya Data / Informasi Profile Kelurahan Magersari	1 buku	0	1 dokumen	1.962.000	1 dokumen	1.962.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4.358.000		5.660.000		5.660.000				
1	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan tentang WPA	30	4.358.000	50 orang	5.660.000	50 orang	5.660.000	kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			159.136.000		225.137.000		225.437.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya koordinasi Stabilitas Kantrantibmas	12	159.136.000	12 bulan	225.137.000	12 bulan	225.437.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.479.000		6.681.000		6.681.000				
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba k3	1	7.479.000	1 kegiatan	6.681.000	1 kegiatan	6.681.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10.444.000		10.244.000		10.244.000				
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	30	10.444.000	30 orang , 4 kegiatan	10.244.000	30 orang , 4 kegiatan	10.244.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			13.271.000		4.194.000		4.194.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dan penataan arsip daerah di Kelurahan Magersari	12	13.271.000	12 bulan	4.194.000	12 bulan	4.194.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.378.000		25.902.000		25.902.000				
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya malam tirakatan dan HUT Kota Magelang	2	18.378.000	2 kegiatan	19.662.000	2 kegiatan	19.662.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan toleransi dan kerukunan beragama	1 Kegiatan		1 kegiatan	6.240.000	1 kegiatan	6.240.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.270.000		41.110.000		41.110.000				
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terbinanya grup kesenian	6 kesenian		4 kelompok kesenian	26.570.000	4 kelompok kesenian	26.570.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya	1	11.270.000	1 kegiatan	14.540.000	1 kegiatan	14.540.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			15.010.000		19.710.000		19.710.000				
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan BBGRM	2	15.010.000	1 kegiatan	19.710.000	1 kegiatan	19.710.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			18.950.000		15.237.000		15.237.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.6	Kader piket bersama dawis	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	12 bulan	18.950.000	12 bulan	15.237.000	12 bulan	15.237.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya Penyuluhan		0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksanya Penyuluhan kesehatan			1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			14.935.000		15.986.000		15.986.000				
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan terlaksananya pengiriman Atlet Porkel Kelurahan Magersari sehingga terwujudnya kesehatan jasmani masyarakat	4	14.935.000	1 kegiatan 4 cabor	15.986.000	1 kegiatan 4 cabor	15.986.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.972.000		16.126.000		16.126.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Magersari	130	11.422.000	1 kegiatan	11.442.000	1 kegiatan	11.442.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan (Jumlah Lokasi Survey di 13 RW Kelurahan Magersari)	13 RW	5.550.000		4.684.000		4.684.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			15.400.000		28.403.000		28.403.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau & Taman Lingkungan	3	15.400.000		28.403.000		28.403.000	Halaman kantor Kelurahan Magersari dan lereng gunung	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.060.000		4.973.000		4.973.000				
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya Penyuluhan Kesehatan anak Balita	40	5.060.000		4.973.000		4.973.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			4.710.000		4.824.000		4.824.000				
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya Status kesehatan Lansia	40	4.710.000		4.824.000		4.824.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			0		68.900.000		68.900.000				
1	1.3.35.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terpeliharanya Saluran drainase dan gorong-gorong	30 m2			34.500.000		34.500.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.35.25	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terpeliharanya saluran drainase dan gorong-gorong RW XII	60 m2			34.400.000		34.400.000				
						RW VII		RW VII		RW XII Tidar Baru	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		11.590.000		11.590.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				3.240.000		3.240.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
						12 bulan		12 bulan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan anak			2 kegiatan	8.350.000	2 kegiatan	8.350.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		10.566.000		10.566.000				
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peran serta PKK dalam pembangunan			12 bulan	10.566.000	12 bulan	10.566.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		4.280.000		4.280.000				
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya Pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan penyakit menular			1 kegiatan	4.280.000	1 kegiatan	4.280.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		6.120.000		6.120.000				
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			12 bulan	6.120.000	12 bulan	6.120.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0		29.957.000		29.957.000				
1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya pembangunan lapangan volley			1 unit lapangan volley	29.957.000	1 unit lapangan volley	29.957.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
				TOTAL	644.863.000		976.851.000		987.897.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Jurangombo Utara

URUS : Kelurahan Jurangombo Utara

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			132.961.860		127.865.000		130.791.000				
1	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa keamanan kantor kelurahan	1 orang		1 orang	19.632.000	1 orang	21.210.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	25.555.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.200.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	9 Kendaraan	2.117.500	9 kendaraan	2.463.000	9 kendaraan	2.463.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	22.307.560	12 bulan	22.516.000	12 bulan	24.094.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	9.680.000	12 bulan	8.500.000	12 bulan	8.500.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	7.260.000	12 bulan	5.400.000	12 bulan	5.400.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan kantor	12 bulan	1.815.000	12 bulan	1.845.000	12 bulan	1.845.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan	4.864.200	12 bulan	4.140.000	12 bulan	4.140.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12 bulan	23.062.600	12 bulan	18.685.000	12 bulan	18.739.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kegiatan	36.300.000	3 kegiatan	25.200.000	3 kegiatan	25.200.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan BBM Genset	12 bulan		12 bulan	1.484.000	12 bulan	0	kelurahan jurangombo utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			212.010.500		47.958.000		47.958.000				
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan Jurangombo Utara	12 bulan		12 bulan	17.000.000	12 bulan	17.000.000	Kantor Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor	8	41.079.500	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 unit	23.432.000	7 unit	23.100.000	7 unit	23.100.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	3.872.000	3 jenis	5.384.000	3 jenis	5.384.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan informasi	11	6.897.000	0	0	0	0	Pos Paud Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis		2 jenis	2.474.000	2 jenis	2.474.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	42.350.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	9.680.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kebutuhan kantor	1	24.200.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	1	60.500.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.673.020		4.421.000		4.421.000				
		APK PAUD	66%									
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 Pos PAUD	4.673.020	3 Pos PAUD	4.421.000	3 Pos PAUD	4.421.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			27.084.640		6.475.000		6.475.000				
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	20 orang	27.084.640	20 orang	6.475.000	20 orang	6.475.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			68.873.200		84.602.000		84.872.000				
1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	1 tahun	68.873.200	12 bulan	84.602.000	12 bulan	84.872.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			27.546.860		65.760.000		70.494.000				
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	27.546.860	12 bulan	65.760.000	12 bulan	70.494.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			8.355.050		12.440.000		12.440.000				
1	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	45 orang	8.355.050	45 orang	6.833.000	45 orang	6.833.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW se Kelurahan Jurangombo Utara	1 Kegiatan		1 kegiatan	5.607.000	1 kegiatan	5.607.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs, Rencana
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			11.495.000		20.774.000		20.882.000				
1	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	11.495.000	12 bulan	20.774.000	12 bulan	20.882.000	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	Program Pengembangan data/informasi			3.025.000		3.761.000		3.761.000				
1	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	3.025.000	1 dokumen	3.761.000	1 dokumen	3.761.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			84.628.000		115.026.000		115.026.000				
1	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2 kegiatan	84.628.000	4 kegiatan	115.026.000	4 kegiatan	115.026.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.788.000		5.626.000		5.626.000				

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	1 kegiatan	6.788.000	1 kegiatan	5.626.000	1 kegiatan	5.626.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Akomodasi Musrenbang
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.465.000		4.152.000		4.152.000				
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	35 Orang	4.465.000	30 orang	4.152.000	30 orang	4.152.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			27.830.000		5.101.000		5.101.000				
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	27.830.000	12 bulan	5.101.000	12 bulan	5.101.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			11.470.000		19.011.000		19.011.000				
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 Kegiatan	11.470.000	2 kegiatan	13.158.000	2 kegiatan	13.158.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 Kegiatan		1 kegiatan	5.853.000	1 kegiatan	5.853.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			12.578.000		11.250.000		11.250.000				
1	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 Kegiatan	12.578.000	1 kegiatan	11.250.000	1 kegiatan	11.250.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.455.000		9.114.000		9.114.000				
1	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	10.455.000	1 kegiatan	9.114.000	1 kegiatan	9.114.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			13.987.000		10.500.000		10.500.000				
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK	2 kegiatan	13.987.000	1 kegiatan	10.500.000	1 kegiatan	10.500.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga			14.605.000		13.100.000		13.100.000				
1	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 kegiatan	14.605.000	1 kegiatan	13.100.000	1 kegiatan	13.100.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			23.329.000		31.336.000		31.444.000				
1	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12 bulan	23.329.000	12 bulan	31.336.000	12 bulan	31.444.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	Program perencanaan pembangunan daerah			14.340.000		12.976.000		12.976.000				
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan tahunan	1 jenis dokumen	10.478.000	1 dokumen	8.910.000	1 dokumen	8.910.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvei	8 lokasi	3.862.000	8 lokasi	4.066.000	8 lokasi	4.066.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			4.428.000		7.475.000		7.475.000				
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu balita	6 posyandu balita	4.428.000	6 posyandu balita	7.475.000	6 posyandu balita	7.475.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.663.000		10.525.000		10.525.000				
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia	4 posyandu Lansia	5.663.000	4 posyandu lansia	10.525.000	4 posyandu lansia	10.525.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			174.154.000		97.831.000		97.831.000				
1	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tersedianya saluran yang memadai	51,5 m2				0	0	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Tersedianya penutup saluran yang memadai	1	27.381.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Tersedianya saluran MD dan tutup saluran	1	42.955.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya infrastruktur kelurahan	1 tahun	42.350.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksananya pemeliharaan jalan	1	24.200.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pavingisasi dan jalan beton	1	19.118.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya tutup saluran	1	18.150.000	0	0	0	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai	58,2 m2		0	0	0	0	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya saluran yang memadai	50 m2		50m2	34.850.000	50m2	34.850.000	RW. I Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Tersedianya jalan yang memadai	44,2 m2		44,2	11.733.000	44,2	11.733.000	RW. VI Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai			58.20 m2	15.518.000	58.20 m2	15.518.000	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
12	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tersedianya saluran yang memadai			51.50 m 2	35.730.000	51.50 m 2	35.730.000	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		8.024.000		8.024.000				
		Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan			30 orang	8.024.000	30 orang	8.024.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		5.714.000		5.714.000				
1	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA			40 orang	5.714.000	40 orang	5.714.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggulan gan Kemiskinan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
		Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta penyuluhan pola hidup sehat			60 orang	0	60 orang	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina			30 orang	0	30 orang	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		8.253.000		8.253.000				
1	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan	8.253.000	2 kegiatan	8.253.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		3.521.000		3.521.000				

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
		TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH			40 m 2	3.521.000	40 m 2	3.521.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
			TOTAL	904.745.130		752.591.000		760.737.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Jurangombo Selatan

URUSAN : Kelurahan Jurangombo Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			190.512.000		161.763.000		166.497.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.012.000	12 bulan	28.920.000	12 bulan	28.920.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan operasional dinas	9 unit	2.900.000	9 unit	2.543.000	9 unit	2.543.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	43.797.000	12 bulan	43.377.000	12 bulan	46.533.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	19.389.000	12 bulan	10.142.000	12 bulan	10.142.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.473.000	12 bulan	1.980.000	12 bulan	1.980.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.155.000	12 bulan	4.140.000	12 bulan	4.140.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam dan bbm genset	12 bulan	791.000	12 bulan	2.132.000	12 bulan	2.132.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	30.195.000	12 bulan	19.504.000	12 bulan	19.504.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kegiatan	36.300.000	3 kegiatan	24.393.000	3 kegiatan	24.393.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Penjaga Malam	12 bulan		12 bulan	19.632.000	12 bulan	21.210.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			61.125.000		53.538.000		53.538.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	1.000 m2	22.014.000	1000 m2	23.531.000	1000 m2	23.531.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 unit	22.638.000	7 unit	21.126.000	7 unit	21.126.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	6 unit	10.973.000	6 unit	4.757.000	6 unit	4.757.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	5.500.000	4 unit	4.124.000	4 unit	4.124.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.950.000		6.508.000		6.508.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 PAUD	5.950.000	3 PAUD	6.508.000	3 PAUD	6.508.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10.092.000		12.216.000		12.216.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	45 orang	10.092.000	45 orang	12.216.000	45 orang	12.216.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			84.077.000		95.218.000		95.488.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12 bulan	84.077.000	12 bulan	82.505.000	12 bulan	82.775.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja kampung organik	2 Kampung Organik			12.713.000	2 kampung organik	12.713.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			33.997.000		71.893.000		76.627.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	33.997.000	12 bulan	71.893.000	12 bulan	76.627.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			46.475.000		23.338.000		23.338.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	57 orang	46.475.000	57 orang	17.473.000	57 orang	17.473.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan RW yang dilantik	57 orang		57 orang	5.865.000	57 orang	5.865.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			25.652.000		23.765.000		23.873.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	25.652.000	12 bulan	23.765.000	12 bulan	23.873.000	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.465.000		2.784.000		2.784.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	3.465.000	1 dokumen	2.784.000	1 dokumen	2.784.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			103.788.000		135.863.000		135.863.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	103.788.000	12 bulan	135.863.000	12 bulan	135.863.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.692.000		5.047.000		5.047.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	45 orang	6.692.000	45 orang	5.047.000	45 orang	5.047.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			26.723.000		4.449.000		4.449.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	26.723.000	12 bulan	4.449.000	12 bulan	4.449.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			19.700.000		29.050.000		29.050.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3 kegiatan	19.700.000	3 kegiatan	20.710.000	3 kegiatan	20.710.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 kegiatan		1 kegiatan	8.340.000	1 kegiatan	8.340.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.000.000		12.410.000		12.410.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	11.000.000	1 kegiatan	12.410.000	1 kegiatan	12.410.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			20.529.000		18.862.000		18.862.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	20.529.000	3 kegiatan	18.862.000	3 kegiatan	18.862.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			13.923.000		31.863.000		31.863.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	5 cabang olahraga dan senam	13.923.000	6 cabang olahraga (5 porkel dan senam)	31.863.000	6 cabang olahraga (5 porkel dan senam)	31.863.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			18.677.000		17.480.000		17.480.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	1 jenis dokumen	13.740.000	1 jenis dokumen	12.883.000	1 jenis dokumen	12.883.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvei	9 lokasi	4.937.000	9 lokasi	4.597.000	9 lokasi	4.597.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.050.000		4.922.000		4.922.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	1 kegiatan	6.050.000	1 kegiatan	4.922.000	1 kegiatan	4.922.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			27.500.000		10.780.000		10.780.000				
			Luas RTH Kota	18%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	27.500.000	12 bulan	10.780.000	12 bulan	10.780.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			0		110.200.000		110.200.000				
1	1.3.37.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang saluran drainase yang dipelihara	100 m	0	100 m2	75.050.000	100 m2	75.050.000	RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.37.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Panjang Jalan yang dipelihara	100 m		100 m2	35.150.000	100 m2	35.150.000	RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		5.200.000		5.200.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan	20 anak		20 anak	5.200.000	20 anak	5.200.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			0		5.746.000		5.746.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan SKD Tingkat Kelurahan	12 bulan			5.746.000	12 bulan	5.746.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggung jawaban Kemiskinan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		15.657.000		15.657.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kesejahteraan masyarakat	12 bulan			15.657.000		15.657.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				12 bulan		12 bulan					
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0		60 orang (40 orang dan 20 karang taruna)		60 orang (40 orang dan 20 karang taruna)	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya SMD dan MMD	0	0			0	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			0		0		0				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0									
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%									
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%									
			#NAME?	2									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada									
1	1.5.22.10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	0	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		8.030.000		8.030.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya Pertemuan Kelompok KIM Tingkat Kelurahan	2 kegiatan			8.030.000	2 kegiatan	8.030.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		6.245.000		6.245.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba K3 Kelurahan	1 kegiatan			6.245.000	1 kegiatan	6.245.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			0		15.180.000		15.180.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Lansia dan Balita yang mendapatkan makanan tambahan	590 Orang		590 orang (390 balita dan 200 lansia)	15.180.000	590 orang (390 balita dan 200 lansia)	15.180.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggung jawaban Kemiskina n
				TOTAL	715.927.000		888.007.000		897.853.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Tidar Utara
 URUSAN : Kelurahan Tidar Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			145.653.000		160.767.000		174.401.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	17.500.000	12 bulan	23.400.000	12 bulan	27.900.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/ operasional	10 unit	3.263.000	10 unit	2.717.000	10 unit	2.717.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	40.272.000	12 bulan	21.998.000	12 bulan	23.576.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	14.330.000	12 bulan	10.132.000	12 bulan	10.132.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6.753.000	12 bulan	5.410.000	12 bulan	5.410.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	3.528.000	12 bulan	3.256.000	12 bulan	3.256.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	3.970.000	12 bulan	4.140.000	12 bulan	4.140.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, BBM genset dan tabung pemadam kebakaran	12 bulan	1.653.000	12 bulan	1.884.000	12 bulan	1.884.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12 bulan	21.309.000	12 bulan	20.799.000	12 bulan	25.199.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	12 bulan	33.075.000	12 bulan	25.788.000	12 bulan	25.788.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor	12 bulan		12 bulan	39.263.000	12 bulan	42.419.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak	6 buah		6 buah	1.980.000	6 buah	1.980.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			70.286.000		50.991.000		69.191.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620 m2	30.593.000	620 m2	13.543.000	620 m2	13.543.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	28.906.000	9 unit	29.347.000	9 unit	27.547.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	8 unit	10.787.000	8 unit	5.539.000	8 unit	5.539.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit		3 unit	2.562.000	3 unit	2.562.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarana komputer untuk kantor	3 unit			0	3 unit	20.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.103.000		7.583.000		7.583.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 PAUD	8.103.000	3 PAUD	7.583.000	3 PAUD	7.583.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		6.365.000		6.365.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti penyuluhan	65 orang		65 orang	6.365.000	65 orang	6.365.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			21.500.000		38.160.000		39.923.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik	2 kampung organik		2 kampung organik	13.000.000	2 kampung organik	13.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah dan komposter komunal	1 tahun	21.500.000	12 bulan dan 1 bank sampah	25.160.000	12 bulan dan 1 bank sampah	26.923.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.655.000		69.036.000		73.770.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	15.655.000	12 bulan	69.036.000	12 bulan	73.770.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.581.000		17.609.000		7.987.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	198 orang	10.581.000	198 orang	9.622.000		0	Kel Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW yang dilantik	68 orang		68 orang	7.987.000	68 orang	7.987.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			10.143.000		10.981.000		11.635.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12 bulan	10.143.000	12 bulan	10.981.000	12 bulan	11.635.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			20.429.000		20.058.000		20.058.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1 dokumen	20.429.000	1 dokumen	20.058.000	1 dokumen	20.058.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			111.711.000		162.020.000		162.502.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	111.711.000	12 bulan	162.020.000	12 bulan	162.502.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.170.000		5.350.000		5.350.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47 orang	5.170.000	47 orang	5.350.000	47 orang	5.350.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.962.000		27.280.000		27.280.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	1 kegiatan	10.473.000	1 kegiatan	9.340.000	1 kegiatan	9.340.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 kegiatan	8.489.000	2 kegiatan	17.940.000	2 kegiatan	17.940.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			16.719.000		11.380.000		11.380.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	1 kegiatan	16.719.000	1 kegiatan	11.380.000	1 kegiatan	11.380.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			12.943.000		11.069.000		11.069.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13 RW	12.943.000	13 RW	11.069.000	13 RW	11.069.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs, Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			46.404.000		44.070.000		44.070.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100									
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100									
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31									
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yang menerima makanan tambahan	720 balita dan 550 lansia	46.404.000	720 balita dan 550 lansia	44.070.000	720 balita dan 550 lansia	44.070.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			15.637.000		24.604.000		24.604.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEKEL dan senam lansia	5 cabang olahrag a dan lansia	15.637.000	5 cabang olahraga dan lansia	24.604.000	5 cabang olahraga dan lansia	24.604.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			18.874.000		16.639.000		16.639.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	1 jenis dokum en	11.796.000	1 jenis dokumen	12.339.000	1 jenis dokume n	12.339.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13 lokasi	7.078.000	13 lokasi	4.300.000	13 lokasi	4.300.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.665.000		4.680.000		4.680.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	1 kegiatan	4.665.000	1 kegiatan	4.680.000	1 kegiatan	4.680.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			3.858.000		4.184.000		4.184.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 kegiatan	3.858.000	1 kegiatan	4.184.000	1 kegiatan	4.184.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			250.000.000		308.000.000		308.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.38.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Panjang jalan yang terpelihara	92 meter		92 meter	20.500.000	92 meter	20.500.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Panjang jalan yang terpelihara	24 meter	0	24 meter	6.000.000	24 meter	6.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	panjang saluran yang terpelihara	148 meter	75.000.000	148 meter	32.600.000	148 meter	32.600.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Panjang jalan yang terpelihara	72 meter	70.000.000	72 meter	10.000.000	72 meter	10.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.38.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	200 meter	0	200 meter	90.000.000	200 meter	90.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.38.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	40 meter	20.000.000	40 meter	16.000.000	40 meter	16.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	panjang saluran yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.38.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur di Kelurahan Tidar Utara	13 RW			0	0	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
9	1.3.38.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Panjang jalan yang terpelihara	320 meter	60.000.000	320 meter	46.900.000	320 meter	46.900.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
10	1.3.38.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	Panjang jalan yang terpelihara	250 meter	25.000.000	250 meter	56.000.000	250 meter	56.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
11	1.3.38.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara	150 meter	0	150 meter	30.000.000	150 meter	30.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			23.436.000		2.898.000		2.898.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12 bulan	23.436.000	12 bulan	2.898.000	12 bulan	2.898.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		5.200.000		5.200.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan			2 kegiatan	5.200.000	2 kegiatan	5.200.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat				0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi tenaga penyuluh kesehatan				0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggula ngan Kemiskinan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		17.160.000		17.160.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan peranperempuan di kelurahan				17.160.000		17.160.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggula ngan Kemiskinan, Akomodasi Musrenban g

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		7.880.000		7.880.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangankomunikasi, informasi dan media massa			2 kegiatan	7.880.000	2 kegiatan	7.880.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		5.704.000		5.704.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan			1 kegiatan	5.704.000	1 kegiatan	5.704.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggula ngan Kemiskinan, Kota Sejuta Bunga
				TOTAL	830.729.000		1.039.668.000		1.069.513.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Tidar Selatan
 URUSAN : Kelurahan Tidar Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			176.822.000		136.987.000		142.035.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.500.000	100 %	21.480.000	100 %	21.480.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	7 kendaraan roda dua, 1 mobil sampah	3.500.000	100 %	2.321.000	100 %	2.321.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12 bulan	25.000.000	100 %	21.432.000	100 %	23.010.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 bulan	16.000.000	100 %	5.834.000	100 %	7.672.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	5.500.000	100 %	5.411.000	100 %	5.411.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	2.250.000	100 %	2.500.000	100 %	2.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	4.400.000	100 %	4.140.000	100 %	4.140.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12	800.000	100 %	1.436.000	100 %	1.436.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	22.000.000	100 %	27.601.000	100 %	27.655.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	2	37.000.000	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan	34.872.000	100 %	19.632.000	100 %	21.210.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			25.000.000		29.417.000		95.417.000				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	7 kendaraan roda dua, 1 mobil sampan	18.000.000	100 %	13.867.000	100 %	13.867.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	1.500.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.500.000	100 %	3.300.000	100 %	3.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	2	0	100 %	9.250.000	100 %	9.250.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1	0	100 %	0	100 %	42.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya pembangunan gedung kantor			100 %		100 %	24.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.000.000	100 %	4.128.000	100 %	2.290.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2	7.000.000	100 %	4.128.000	100 %	2.290.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			7.300.000	100 %	5.445.000	100 %	5.445.000				
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	70	7.300.000	100 %	5.445.000	100 %	5.445.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			38.100.000	100 %	57.090.000	100 %	57.791.000				
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12 bulan	29.500.000	100 %	43.270.000	100 %	43.971.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1	8.600.000	100 %	13.820.000	100 %	13.820.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.500.000	100 %	93.716.000	100 %	100.028.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12	15.500.000	100 %	93.716.000	100 %	100.028.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			12.400.000	100 %	12.624.000	100 %	12.678.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12	12.400.000	100 %	12.624.000	100 %	12.678.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			4.300.000	100 %	2.812.000	100 %	2.812.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1	4.300.000	100 %	2.812.000	100 %	2.812.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			90.000.000	100 %	140.084.000	100 %	140.084.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	90.000.000	100 %	140.084.000	100 %	140.084.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.900.000	100 %	11.415.000	100 %	11.415.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40	6.900.000	100 %	11.415.000	100 %	11.415.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			21.258.000	100 %	7.360.000	100 %	7.360.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12	21.258.000	100 %	7.360.000	100 %	7.360.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			25.100.000	100 %	32.928.000	100 %	32.928.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1	9.200.000	100 %	9.120.000	100 %	9.120.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2	15.900.000	100 %	23.808.000	100 %	23.808.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			14.000.000	100 %	17.955.000	100 %	17.955.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2	14.000.000	100 %	17.955.000	100 %	17.955.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.500.000	100 %	10.620.000	100 %	10.620.000				
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12	10.500.000	100 %	10.620.000	100 %	10.620.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			13.000.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24	13.000.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			14.000.000	100 %	18.014.000	100 %	18.014.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemsarakatan olahraga	1	14.000.000	100 %	18.014.000	100 %	18.014.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			13.500.000	100 %	17.712.000	100 %	17.712.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	10.500.000	100 %	12.622.000	100 %	12.622.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12 RW	3.000.000	100 %	5.090.000	100 %	5.090.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.500.000	100 %	6.040.000	100 %	6.040.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terciptanya ruang terbuka hijau	1	6.500.000	100 %	6.040.000	100 %	6.040.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			0		156.687.000		156.687.000				
1	1.3.39.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terwujudnya infrastruktur perdesaan			100 %	31.000.000	100 %	31.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.3.39.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran	18 m		100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	RW. II Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.3.39.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan			100 %	30.000.000	--	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.3.39.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan			100 %	27.250.000	100 %	57.250.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.3.39.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan			100 %	33.437.000	100 %	33.437.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.500.000	100 %	10.490.000	100 %	10.490.000				
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1	7.500.000	100 %	10.490.000	100 %	10.490.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			0	100 %	76.294.000	100 %	76.294.000				
1	1.3.30.19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. III dan RW. VI	100,8 m	0	100 %	76.294.000	100 %	76.294.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	100 %	14.289.000	100 %	14.289.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW			100 %	6.289.000	100 %	6.289.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan RT dan RW			100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0	100 %	28.633.000	100 %	28.633.000				
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin			100 %	28.633.000	100 %	28.633.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0	100 %	7.663.000	100 %	7.663.000				
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	2 kegiatan		100 %	7.663.000	100 %	7.663.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0	100 %	9.035.000	100 %	9.035.000				
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan			100 %	9.035.000	100 %	9.035.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
				TOTAL	508.680.000		940.438.000		1.016.715.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Utara
 URUSAN : Kecamatan Magelang Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			874.030.000		944.209.000		873.411.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	49.500.000	4 item	48.000.000	4 item	55.250.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	9 unit	7.150.000	9 unit	9.084.000	9 unit	9.084.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12 bulan	385.740.000	12 bulan	402.590.000	12 bulan	402.590.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	453 m2	66.550.000	453 m2	167.608.000	453 m2	74.068.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	31.750.000	64 item	16.228.000	64 item	16.228.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	9.900.000	5 jenis	8.468.000	5 jenis	8.468.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	5.820.000	14 jenis	4.388.000	14 jenis	4.388.000	Kecamatan Magelang utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	0	4 item	4.076.000	4 item	4.076.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2.450.000	2 jenis	4.200.000	2 jenis	4.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 jenis	2.210.000	2 jenis	2.709.000	2 jenis	2.709.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	35 orang	30.660.000	35 orang	20.320.000	35 orang	23.620.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	8 kegiatan	90.590.000	8 kegiatan	58.268.000	8 kegiatan	58.268.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 orang	19.180.000	1 orang	20.016.000	1 orang	21.540.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 bulan	172.530.000	12 bulan	178.254.000	12 bulan	188.922.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			154.380.000		93.113.000		221.602.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	4 item	0	0	0	4 item	20.490.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	2 item	0	0	0	2 item	47.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90 m2	13.200.000	90 m2	15.120.000	90 m2	15.120.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453 m2	33.780.000	453 m2	12.231.000	453 m2	23.830.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	10 unit	55.450.000	10 unit	54.098.000	10 unit	54.098.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	8 jenis	3.930.000	8 jenis	3.580.000	8 jenis	3.580.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8 jenis	13.020.000	8 jenis	8.084.000	8 jenis	8.084.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	0	0	0	2 unit	48.950.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			94.210.000		148.548.000		148.548.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 dokumen	29.370.000	1 dokumen	56.242.000	1 dokumen	56.242.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2 dokumen	20.620.000	2 dokumen	18.756.000	2 dokumen	18.756.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2 dokumen	32.480.000	2 dokumen	45.406.000	2 dokumen	45.406.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1 dokumen	11.740.000	1 dokumen	8.144.000	1 dokumen	8.144.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya perubahan Renstra OPD	1 dokumen	0	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Tema RKPD 2019, Program prioritas RPJM
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			25.020.000		27.425.000		27.425.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20 orang	6.520.000	20 orang	8.579.000	20 orang	8.579.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
2	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 orang	18.500.000	9 orang	18.846.000	9 orang	18.846.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			7.360.000		7.337.000		7.337.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampainya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50 orang	7.360.000	50 orang	7.337.000	50 orang	7.337.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.340.000		164.070.000		176.262.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8 jenis	3.340.000	8 jenis	164.070.000	8 jenis	176.262.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			27.420.000		5.000.000		5.000.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 orang	27.420.000	35 orang	5.000.000	35 orang	5.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2.450.000		2.355.000		2.355.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelenggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	2.450.000	1 lokasi	2.355.000	1 lokasi	2.355.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			113.830.000		116.499.000		116.499.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12 laporan	113.830.000	12 laporan	116.499.000	12 laporan	116.499.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			41.310.000		52.121.000		52.121.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2 perlombaan	41.310.000	2 perlombaan	52.121.000	2 perlombaan	52.121.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			10.410.000		6.212.000		6.212.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12 bulan	10.410.000	12 bulan	6.212.000	12 bulan	6.212.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			16.590.000		27.342.000		27.342.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	1 kegiatan	0	1 kegiatan	9.700.000	1 kegiatan	9.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	175 orang	16.590.000	175 orang	17.642.000	175 orang	17.642.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			13.760.000		16.739.000		16.739.000				
			DISPORA		2,200,359,320								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 macam	13.760.000	1 macam	16.739.000	1 macam	16.739.000	Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			31.820.000		37.093.000		37.093.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%									
			Jumlah Juara FASI	4									
			Jumlah Juara MTQ	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 orang	31.820.000	24 orang	37.093.000	24 orang	37.093.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan			2.700.000		3.942.000		3.942.000				
1	2.7.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	4 laporan	2.700.000	4 laporan	3.942.000	4 laporan	3.942.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			13.630.000		32.644.000		32.644.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40 orang	13.630.000	40 orang	32.644.000	40 orang	32.644.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.910.000		11.879.000		11.879.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang	7.910.000	50 orang	11.879.000	50 orang	11.879.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			14.400.000		13.332.000		13.332.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40 orang	14.400.000	40 orang	13.332.000	40 orang	13.332.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			26.680.000		22.092.000		31.165.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2 dokumen	26.680.000	2 dokumen	22.092.000	2 dokumen	22.092.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
2	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	50 orang	0	0	0	50 orang	9.073.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.300.000		6.876.000		6.876.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampainya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50 orang	7.300.000	50 orang	6.876.000	50 orang	6.876.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			12.250.000		10.952.000		10.952.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50 orang	6.710.000	50 orang	7.012.000	50 orang	7.012.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4 laporan	5.540.000	4 laporan	3.940.000	4 laporan	3.940.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			65.380.000		59.993.000		9.993.000				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	65.380.000	1 paket	59.993.000	1 paket	9.993.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			18.230.000		20.939.000		20.939.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertarikan umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 laporan	18.230.000	4 laporan	20.939.000	4 laporan	20.939.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		10.421.000		10.421.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	25 anak	0	25 anak	10.421.000	25 anak	10.421.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		72.604.000		72.604.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2 item	0	2 item	72.604.000	2 item	72.604.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		4.712.000		4.712.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan / kelurahan	1 dokumen	0	1 dokumen	4.712.000	1 dokumen	4.712.000	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			0		46.342.000		46.342.000				
			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM									
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terfasilitasinya pengembangan sarana promosi hasil produksi	1 kegiatan	0	1 kegiatan	46.342.000	1 kegiatan	46.342.000	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
				TOTAL	1.584.410.000		1.964.791.000		1.993.747.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Potrobangsari
 URUSAN : Kelurahan Potrobangsari

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			156.240.000		145.958.000		158.166.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	17.420.000	4 item	17.880.000	4 item	20.880.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit	3.520.000	6 unit	3.582.000	6 unit	3.582.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	650 m2	23.220.000	650 m2	23.223.000	650 m2	24.747.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	15.730.000	64 item	10.121.000	64 item	10.121.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	4.840.000	2 item	5.400.000	2 item	5.400.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	1.930.000	5 item	2.470.000	5 item	2.470.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	4.420.000	1 jenis	4.320.000	1 jenis	4.320.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 macam	3.380.000	2 macam	3.984.000	2 macam	3.984.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	24.400.000	60 orang	26.136.000	60 orang	32.296.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 jenis kegiatan	36.300.000	1 jenis kegiatan	25.200.000	1 jenis kegiatan	25.200.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 orang	21.080.000	1 orang	20.016.000	1 orang	21.540.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis		4 jenis	3.626.000	4 jenis	3.626.000	kelurahan potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			57.250.000		37.545.000		37.895.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	650 m2	7.050.000	650 m2	10.500.000	650 m2	10.500.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	5 unit	22.950.000	5 unit	20.785.000	5 unit	18.285.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	6 macam	1.450.000	6 macam	2.210.000	6 macam	1.010.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	6 macam	5.800.000	6 macam	4.050.000	6 macam	4.050.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	20.000.000	1 unit		0 1 unit	4.050.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.570.000		4.610.000		4.610.000				
			APK PAUD	66%		66%		66%					
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		53%		53%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	5.570.000	30 orang	4.610.000	30 orang	4.610.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15.120.000		17.040.000		17.040.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		92%		92%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,46		6,46					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		11,67		11,67					
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%		95%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		74,25		74,25					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		14.26%		14.26%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		12		12					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	280 orang	8.630.000	280 orang	7.664.000	280 orang	7.664.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 orang	6.490.000	50 orang	9.376.000	50 orang	9.376.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			90.480.000		115.926.000		118.498.000				
					37,792,592,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		4,3		4,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		89%		89%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		4,3%		4,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7 RW	77.190.000	7 RW	107.755.000	7 RW	110.327.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	40 orang	13.290.000	40 orang	8.171.000	40 orang	8.171.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8.600.000		28.001.000		29.525.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		935		935					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		50%		50%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		40%		40%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 macam	8.600.000	3 macam	28.001.000	3 macam	29.525.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			30.830.000		32.679.000		29.129.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	15.620.000	25 orang	11.778.000	25 orang	11.778.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71 RT RW	15.210.000	71 RT RW	10.651.000	71 RT RW	7.101.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terselenggaranya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	71 orang		71 orang	10.250.000	71 orang	10.250.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			8.470.000		11.616.000		11.616.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		5,6		5,6					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		6,26					
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	52,13		52,13		52,13					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		21,33		21,33					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		2%		2%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		12.50%		12.50%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	8.470.000	1 lokasi	11.616.000	1 lokasi	11.616.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			8.800.000		7.324.000		7.324.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 orang	8.800.000	30 orang	7.324.000	30 orang	7.324.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			134.030.000		173.388.000		173.388.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		1		1					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		3		3					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.47%		1.47%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		6%		6%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,84		0,84					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 laporan	134.030.000	12 laporan	173.388.000	12 laporan	173.388.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.870.000		6.176.000		6.176.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		47.37%		47.37%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	7.870.000	20 orang	6.176.000	20 orang	6.176.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			11.550.000		10.407.000		10.407.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		30%		30%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 perlombaan	11.550.000	1 perlombaan	10.407.000	1 perlombaan	10.407.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			8.600.000		7.390.000		4.870.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		95.00%		95.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,40%		6,40%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	50 orang	8.600.000	50 orang	7.390.000	50 orang	4.870.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.460.000		8.541.000		8.541.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln					
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		52%		52%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		53%		53%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	9.460.000	12 bulan	8.541.000	12 bulan	8.541.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			23.540.000		29.740.000		29.740.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		72,2%		72,2%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		71.00%		71.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		35,19%		35,19%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 jenis acara	23.540.000	2 jenis acara	20.770.000	2 jenis acara	20.770.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 orang		100 orang	8.970.000	100 orang	8.970.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			13.210.000		12.005.000		12.005.000				
			DISPORA		2,200,359,320								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,32		15,32					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		12		12					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 jenis acara	13.210.000	1 jenis acara	12.005.000	1 jenis acara	12.005.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.590.000		15.120.000		15.120.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kelurahan	19.590.000	1 kelurahan	15.120.000	1 kelurahan	15.120.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			14.970.000		13.528.000		13.528.000				
					1,730,060,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		35%		35%					
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		11		11					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		47%		47%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		35%		35%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143		143					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)- PKK aktif	61%		61%		61%					
			PKK Aktif	100%		100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	70 orang	14.970.000	70 orang	13.528.000	70 orang	13.528.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			34.260.000		31.080.000		31.080.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		6					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		6		6					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			#NAME?	15		15		15					
			#NAME?	20		20		20					
			#NAME?	NA		NA		NA					
			#NAME?	20		20		20					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		35					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100 orang	34.260.000	100 orang	31.080.000	100 orang	31.080.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			22.460.000		20.840.000		20.840.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 dokumen	18.060.000	2 dokumen	16.158.000	2 dokumen	16.158.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 dokumen	4.400.000	1 dokumen	4.682.000	1 dokumen	4.682.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.300.000		5.773.000		5.773.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<104		<104					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napsa, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	7.300.000	30 orang	5.773.000	30 orang	5.773.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.390.000		10.505.000		13.385.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	5.390.000	1 lokasi	10.505.000	1 lokasi	13.385.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			6.000.000		4.665.000		4.665.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		18%		18%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	35 orang	6.000.000	35 orang	4.665.000	35 orang	4.665.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			6.540.000		5.316.000		5.316.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%		75%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		18%		18%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	30 orang	6.540.000	30 orang	5.316.000	30 orang	5.316.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			85.000.000		391.283.000		391.283.000				
1	1.3.41.22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	50 m'		0 50 m'	30.411.000	50 m'	30.411.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170 m'		0 170 m'	104.211.000	170 m'	104.211.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.41.25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	100 m'		0 100 m'	83.825.000	100 m'	83.825.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	35.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	24 m'	50.000.000	24 m'	22.511.000	24 m'	22.511.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.41.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	150 m'		150 m'	100.325.000	150 m'	100.325.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.610.000		12.405.000		12.405.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		92%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	30 orang	5.610.000	30 orang	12.405.000	30 orang	12.405.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			4.400.000		6.786.000		6.786.000				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		66%		66%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	25 orang	4.400.000	25 orang	6.786.000	25 orang	6.786.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		4.964.000		4.964.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya sosialisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	30 orang		30 orang	4.964.000	30 orang	4.964.000	Kelurahan Potrobangsari	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		10.000.000		6.220.000				
				-	5,139,479,000	-		-					
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln					
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		80%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		1		1					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi di masyarakat	35 orang		35 orang	10.000.000	35 orang	6.220.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		7.034.000		7.034.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		80%		80%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya profile kelurahan	1 dokumen		1 dokumen	7.034.000	1 dokumen	7.034.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			0		3.940.000		3.400.000				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Koordinasi Lembaga Ekonomi Kelurahan	4 laporan		4 laporan	3.940.000	4 laporan	3.400.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		4.661.000		4.661.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		20%		20%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		23%		23%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		78,50%		78,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	30 orang		30 orang	4.661.000	30 orang	4.661.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	801.140.000		1.196.246.000		1.205.390.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Kedungsari
 URUSAN : Kelurahan Kedungsari

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			177.310.000		148.139.000		152.711.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	15.040.000	12 bulan	15.840.000	12 bulan	15.840.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	7 unit	1.730.000	7 unit	2.123.000	7 unit	2.123.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	20.117.000	12 bulan	22.809.000	12 bulan	24.333.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 jenis	14.000.000	32 item	8.277.000	32 item	8.277.000	Kantor Kelurahan Kantor	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	5.500.000	6 item	3.411.000	6 item	3.411.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	3.000.000	5 item	1.708.000	5 item	1.708.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	4.647.000	4 item	3.966.000	4 item	3.966.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	4.500.000	1 jenis	4.320.000	1 jenis	4.320.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 jenis	2.500.000	2 jenis	2.658.000	2 jenis	2.658.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	21.404.000	19 orang	19.885.000	19 orang	19.885.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 kegiatan	40.000.000	2 kegiatan	21.000.000	2 kegiatan	21.000.000	pemerintah daerah / instansi lain	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2 orang	44.872.000	2 orang	40.032.000	2 orang	43.080.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	3 jenis		3 item	2.110.000	3 item	2.110.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			66.010.000		37.145.000		68.189.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0 pengadaan almari	8.000.000	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0 pengadaan kursi lipat	16.948.000	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285 m2	37.145.000	280 m2	7.275.000	280 m2	7.275.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 unit	13.500.000	6 unit	21.852.000	6 unit	21.852.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	10 unit	7.500.000	11 unit	5.744.000	11 unit	5.744.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	7 unit	7.865.000	3 unit	2.274.000		2.274.000	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0 pengadaan monitor komputer	6.096.000	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.500.000		5.015.000		5.015.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	5.500.000	30 orang	5.015.000	30 orang	5.015.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10.500.000		11.869.000		11.869.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	25 orang	10.500.000	56 linmas	11.869.000	56 linmas	11.869.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			29.572.000		72.843.000		41.799.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	10 RW	16.072.000	10 RW	25.982.000	10 RW	25.982.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	30 orang	13.500.000	1 kelompok	10.817.000	1 kelompok	10.817.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana, Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terkelolanya persampahan	1 unit		1 unit timbangan sampah	36.044.000	1 unit timbangan sampah	5.000.000	Kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.000.000		23.488.000		25.012.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	7 jenis	4.000.000	3 macam	23.488.000	3 macam	25.012.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			28.000.000		32.172.000		32.172.000				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	terlaksananya pelantikan Ketua RT dan RW	68 orang		68 orang	6.661.000	68 orang	6.661.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	14.500.000	25 orang	12.112.000	25 orang	12.112.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68 orang	13.500.000	120 orang	13.399.000	120 orang	13.399.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.000.000		9.412.000		9.412.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 bulan	7.000.000	1 lokasi	9.412.000	1 lokasi	9.412.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			4.986.000		4.986.000		4.986.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terselenggaranya penyusunan profil kecamatan / kelurahan	1 dokumen	4.986.000	1 dokumen	4.986.000	1 dokumen	4.986.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			40.000.000		5.278.000		5.278.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	30 orang	40.000.000	80 orang	5.278.000	80 orang	5.278.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			120.000.000		173.838.000		173.838.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 bulan	120.000.000	12 laporan	173.838.000	12 laporan	173.838.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			8.000.000		6.471.000		6.471.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggarakan pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	8.000.000	30 orang	6.471.000	30 orang	6.471.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			8.000.000		7.599.000		7.599.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggarakan lomba K3 tingkat kelurahan	1 kegiatan	8.000.000	1 lomba	7.599.000	1 lomba	7.599.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.500.000		4.452.000		4.452.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 orang	4.500.000	30 orang	4.452.000	30 orang	4.452.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			8.500.000		3.417.000		3.417.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	8.500.000	12 bulan	3.417.000	12 bulan	3.417.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			12.000.000		30.683.000		30.683.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 kegiatan	12.000.000	2 acara	21.828.000	2 acara	21.828.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang		110 orang	8.855.000	110 orang	8.855.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			40.000.000		19.050.000		19.050.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kegiatan	40.000.000	1 macam	19.050.000	1 macam	19.050.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			20.500.000		18.100.000		18.100.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kegiatan	20.500.000	1 acara	18.100.000	1 acara	18.100.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			8.500.000		5.886.000		5.886.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2 kelompok	8.500.000	2 kelompok	5.886.000	2 kelompok	5.886.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			14.500.000		8.919.000		8.919.000				
					1,730,060,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)- PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25 orang	14.500.000	25 orang	8.919.000	25 orang	8.919.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.500.000		31.651.000		31.651.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	70 orang	25.500.000	150 orang	31.651.000	150 orang	31.651.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			25.000.000		24.457.000		24.457.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	18.500.000	2 dokumen	18.996.000	2 dokumen	18.996.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana, Pemberantasan Korupsi
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 kegiatan	6.500.000	1 dokumen	5.461.000	1 dokumen	5.461.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana, Pemberantasan Korupsi
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			13.500.000		196.941.000		196.941.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	4 lokasi	8.500.000	4 lokasi	192.521.000	4 lokasi	192.521.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	4.420.000	1 lokasi	4.420.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			10.000.000		8.302.000		8.302.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggarakan ya penyuluhan kader posyandu balita	50 orang	10.000.000	40 orang	8.302.000	40 orang	8.302.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			17.500.000		15.360.000		15.360.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggarakan ya penyuluhan kader posyandu lansia	40 orang	17.500.000	150 orang	15.360.000	150 orang	15.360.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			7.500.000		8.007.000		8.007.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%									
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%									
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya kegiatan senam hamil untuk ibu hamil	20 orang	7.500.000	30 orang	8.007.000	30 orang	8.007.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			35.000.000		329.833.000		329.833.000				
1	1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	9,1 m/sisi		0 9m/sisi	18.939.000	9m/sisi	18.939.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	175 m2		0 175 m2	43.399.000	175 m2	43.399.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	200 m2		0 200 m2	42.499.000	200 m2	42.499.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.42.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	120 m2	0	120 m2	27.099.000	120 m2	27.099.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	33 m	0	33 m	36.499.000	33 m	36.499.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.42.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10 RW	35.000.000	10 RW	50.000.000	10 RW	50.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.42.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	12,5 m/sisi	0	12,5 m/sisi	26.899.000	12,5 m/sisi	26.899.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.42.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	98 m	0	98 m	84.499.000	98 m	84.499.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya Penyuluhan Masyarakat pola hidup Sehat	60 orang	0	60 orang	0	60 orang	0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	30 orang	0	30 orang	0	30 orang	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.557.000		6.557.000		6.557.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		6.557.000	30 orang	6.557.000	30 orang	6.557.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			4.460.000		4.460.000		4.460.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya sosialisasi kesetaraan gender	40 orang	4.460.000	40 orang	4.460.000	40 orang	4.460.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			12.021.000		12.021.000		12.021.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2									
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terselenggaranya pembinaan keluarga berencana	25 orang	12.021.000	25 orang	12.021.000	25 orang	12.021.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			10.000.000		10.000.000		10.000.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan keperc ayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc ayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
				TOTAL	784.416.000		1.276.351.000		1.282.447.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Kramat Utara
 URUSAN : Kelurahan Kramat Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			145.040.000		135.464.000		135.492.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	14.230.000	4 item	14.220.000	4 item	13.500.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit kendaraan	2.750.000	8 unit kendaraan	2.365.000	8 unit kendaraan	2.365.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	605 m2	25.750.000	605 m2	23.364.000	605 m2	24.888.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 Item	15.730.000	64 Item	10.142.000	64 Item	10.142.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	5.450.000	2 jenis	5.411.000	2 jenis	5.411.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 Item	2.420.000	13 Item	2.299.000	13 Item	2.299.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Item	4.420.000	3 Item	3.433.000	3 Item	3.433.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	4.870.000	1 Jenis	4.800.000	1 Jenis	3.600.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 Macam	2.430.000	2 Macam	2.232.000	2 Macam	2.232.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Orang Pegawai	9.590.000	60 Orang Pegawai	16.942.000	60 Orang Pegawai	15.842.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	36.300.000	4 Kegiatan	30.240.000	4 Kegiatan	30.240.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 Orang	21.100.000	1 Orang	20.016.000	1 Orang	21.540.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			125.250.000		72.573.000		77.498.000				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 unit kendaraan	16.720.000	7 unit kendaraan	22.304.000	7 unit kendaraan	22.304.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4 Jenis	9.370.000	4 Jenis	4.369.000	4 Jenis	4.369.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605 m2	57.560.000	605 m2	41.800.000	605 m2	41.800.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	41.600.000	0 Unit	0	1 Paket / 1 Unit	4.925.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala	4 Item		4 Item	4.100.000	4 Item	4.100.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.220.000		4.918.000		4.918.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	4.220.000	30 orang	4.918.000	30 orang	4.918.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.610.000		11.833.000		11.833.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	32 Orang	5.610.000	42 Orang	7.751.000	42 Orang	7.751.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	50 Orang		50 Orang	4.082.000	50 Orang	4.082.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			55.372.000		148.044.000		150.542.000				
					37,792,592,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8 RW	55.372.000	8 RW	138.044.000	8 RW	140.542.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung organik Kelurahan Kramat Utara	40 KK		40 KK	10.000.000	40 KK	10.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.010.000		24.861.000		26.385.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 Jenis	4.010.000	3 Jenis	24.861.000	3 Jenis	26.385.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			15.180.000		19.134.000		16.199.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 Orang	4.600.000	25 Orang	3.770.000	25 Orang	3.770.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	100 Orang	10.580.000	100 Orang	9.097.000	60 Orang	6.162.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelatihan RT dan RW di lingkungan Kelurahan Kramat Utara	47 Orang (39 RT 8 RW)		47 Orang (39 RT 8 RW)	6.267.000	47 Orang (39 RT 8 RW)	6.267.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			4.600.000		3.775.000		3.775.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2									
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 Kader KB	4.600.000	25 Kader KB	3.775.000	25 Kader KB	3.775.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			16.280.000		9.402.000		9.402.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 Bulan	9.680.000	12 Bulan	7.902.000	12 Bulan	7.902.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
2	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya mesin barcode	1 Unit	6.600.000	1 Unit	1.500.000	1 Unit	1.500.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		4.934.000		4.934.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terpenuhinya data informasi Kelurahan melalui penyusunan profil Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	4.934.000	1 Dokumen	4.934.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4.620.000		3.680.000		4.430.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 Orang	4.620.000	40 Orang	3.680.000	40 Orang	4.430.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			96.950.000		133.904.000		133.904.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 Laporan	96.950.000	12 Laporan	133.904.000	12 Laporan	133.904.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.880.000		6.997.000		6.997.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	3 juara	7.880.000	3 juara	6.997.000	3 juara	6.997.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			3.610.000		3.965.000		3.965.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 Orang	3.610.000	30 Orang	3.965.000	30 Orang	3.965.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.390.000		3.262.000		3.262.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 Bulan	9.390.000	12 Bulan	3.262.000	12 Bulan	3.262.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.820.000		31.581.000		31.581.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 Orang		100 Orang	12.533.000	100 Orang	12.533.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Kegiatan	7.820.000	1 Kegiatan	19.048.000	1 Kegiatan	19.048.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			17.090.000		30.599.000		30.599.000				
			DISPORA		2,200,359,320								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	2 Kegiatan	17.090.000	2 Kegiatan	30.599.000	2 Kegiatan	30.599.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			21.620.000		22.370.000		22.370.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4 Kegiatan	21.620.000	4 Kegiatan	22.370.000	4 Kegiatan	22.370.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			16.190.000		12.538.000		12.538.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)- PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 Orang	16.190.000	30 Orang	12.538.000	30 Orang	12.538.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			27.810.000		23.780.000		23.780.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaraan ya kegiatan olahraga	60 Orang	27.810.000	60 Orang	23.780.000	60 Orang	23.780.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			22.310.000		20.754.000		20.754.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaraan ya musrenbang tingkat kelurahan	2 Dokumen	18.080.000	2 Dokumen	17.047.000	2 Dokumen	17.047.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Implementasi RAD MEA
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaraan ya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 Dokumen	4.230.000	1 Dokumen	3.707.000	1 Dokumen	3.707.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.540.000		5.720.000		5.720.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya pengelolaan WPA	30 Orang	4.540.000	30 Orang	5.720.000	30 Orang	5.720.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			12.810.000		12.072.000		12.072.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 Bulan	12.810.000	12 Bulan	12.072.000	12 Bulan	12.072.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			8.850.000		4.289.000		5.119.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	40 Orang	8.850.000	40 Orang	4.289.000	40 Orang	5.119.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.390.000		13.724.000		13.724.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	150 Orang	5.390.000	150 Orang	13.724.000	150 Orang	13.724.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Tema RKPD 2019
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			42.350.000		130.443.000		130.443.000				
1	1.3.43.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 m	0	70 m	33.849.000	70 m	33.849.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m	0	50 m	24.844.000	50 m	24.844.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	42.350.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.43.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	80 m2	0	80 m2	21.750.000	80 m2	21.750.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			50.000.000		34.669.000		34.669.000				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	30 m3	50.000.000	30 m3	34.669.000	30 m3	34.669.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			0		0		0				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0									
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88									
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%									
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%									
			Cakupan penanganan korban bencana	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%									
			#NAME?	2									
			#NAME?	0									
			#NAME?	0									
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada									
1	1.5.22.10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 1 Kelurahan	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terwujudnya masyarakat yang dengan pola hidup sehat	60 orang		0	0	0	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terwujudnya Tenaga Penyuluh Kesehatan di Kelurahan Kramat Utara	30 Orang		0	0	0	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		5.191.000		5.191.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada									
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	40 Orang		40 Orang	5.191.000	40 Orang	5.191.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		10.000.000		10.000.000				
				-	5,139,479,000	-		-					
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok KIM dalam pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	35 Orang		35 Orang	10.000.000	35 Orang	10.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		7.549.000		7.549.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 Orang		20 Orang	7.549.000	20 Orang	7.549.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		4.314.000		4.314.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR	25 Orang		25 Orang	4.314.000	25 Orang	4.314.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			0		4.951.000		4.951.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%									
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%									
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya Pemantapan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	100 Orang		100 Orang	4.951.000	100 Orang	4.951.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	734.792.000		961.290.000		968.910.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Kramat Selatan
 URUSAN : Kelurahan Kramat Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			183.818.000		168.570.000		193.966.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	12 tagihan	10.230.000	12 tagihan	11.100.000	12 tagihan	13.200.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan	8 unit	3.740.000	8 unit	3.020.000	8 unit	3.020.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan	1 orang	21.618.000	1 orang	22.584.000	1 orang	24.108.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	19 jenis	14.300.000	19 jenis	10.000.000	19 jenis	10.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	2 jenis	4.950.000	2 jenis	5.400.000	2 jenis	5.400.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi	9 jenis	10.450.000	9 jenis	3.500.000	9 jenis	3.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	2 jenis	4.010.000	2 jenis	3.000.000	2 jenis	3.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	2 jenis	4.620.000	2 jenis	4.080.000	2 jenis	4.080.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	14 tabung	2.310.000	14 tabung	2.776.000	14 tabung	2.776.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 jenis	17.050.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	20.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi	3 orang	33.000.000	3 orang	18.562.000	3 orang	35.762.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honore	3 orang	57.540.000	3 orang	60.048.000	3 orang	64.620.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	8 jenis		8 jenis	4.500.000	8 jenis	4.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			36.230.000		49.017.000		80.267.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara	1500 m2	5.500.000	1500 m2	18.000.000	1500 m2	18.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	DAU		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion	8 unit	23.580.000	8 unit	24.717.000	8 unit	24.717.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	17 unit	7.150.000	17 unit	6.300.000	17 unit	6.300.000	Kel.Kramat Sel	DAU		ExBAU
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor			-		1 unit	4.750.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor			-		1 unit	9.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
6	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor			-		22 buah	17.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.500.000		5.000.000		5.000.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang	53%									
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga	30 orang	5.500.000	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			102.672.000		156.022.000		130.044.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	40 orang		40 orang	10.050.000	40 orang	10.050.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan	11 RW	102.672.000	11 RW	145.972.000	11 RW	119.994.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.400.000		28.516.000		30.040.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan	40%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan	3 jenis	4.400.000	3 jenis	28.516.000	3 jenis	30.040.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			34.760.000		29.000.000		24.000.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan	25 orang	18.260.000	25 orang	16.000.000	25 orang	16.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi	68 RT/RW	16.500.000	68 RT/RW	13.000.000	68 RT/RW	8.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			7.150.000		11.000.000		11.000.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2									
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 kader	7.150.000	25 kader	11.000.000	25 kader	11.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			9.630.000		11.660.000		11.660.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pelayanan melalui e-	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 orang	9.630.000	1 orang	11.660.000	1 orang	11.660.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		2.500.000		2.500.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	1 Dokumen		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			2.420.000		8.500.000		8.500.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%									
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan	<20%									
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas	<45%									
			Proporsi obesitas pada penduduk usia	<15,4%									
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulanga	30 kader	2.420.000	30 kader	8.500.000	30 kader	8.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			125.400.000		161.980.000		161.980.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan Perda	0									
			pelarangan peredaran	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas	12 Laporan	125.400.000	12 laporan	161.980.000	12 laporan	161.980.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.150.000		7.500.000		7.500.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi	30%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Terselenggaranya lomba K3 tingkat	1 lomba	7.150.000	1 lomba	7.500.000	1 lomba	7.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.060.000		4.500.000		4.500.000				
			Persentase organisasi pemuda yang	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi	30 pemuda	5.060.000	30 pemuda	4.500.000	30 pemuda	4.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.900.000		9.000.000		9.000.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip	12 dokumen	9.900.000	12 dokumen	9.000.000	12 dokumen	9.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.700.000		31.000.000		31.000.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang	35,19%									
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam	2 acara	18.700.000	2 acara	22.500.000	2 acara	22.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	100 orang		100 orang	8.500.000	100 orang	8.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			16.500.000		14.000.000		14.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Jumlah festival seni dan budaya.	15,32									
			Cakupan gelar seni 75%	12									
				100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festiva	1 kontingen	16.500.000	1 kontingen	14.000.000	1 kontingen	14.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			20.900.000		24.000.000		24.000.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti	2 kegiatan	20.900.000	2 kegiatan	24.000.000	2 kegiatan	24.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			19.800.000		26.500.000		26.500.000				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	20 m	19.800.000	20 m	26.500.000	20 m	26.500.000	RW X Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			18.150.000		16.500.000		16.500.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	35%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat Rata-rata jumlah kelompok	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok Cakupan	143									
			Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK	30 orang	18.150.000	30 orang	16.500.000	30 orang	16.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga			20.900.000		25.000.000		25.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	5 cabang OR	20.900.000	5 cabang OR	25.000.000	5 cabang OR	25.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			22.000.000		26.000.000		26.000.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaraan ya musrenbang tingkat	2 kegiatan	16.500.000	2 kegiatan	20.500.000	2 kegiatan	20.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaraan ya survey musrenbang	11 RW	5.500.000	11 RW	5.500.000	11 RW	5.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.700.000		6.000.000		6.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case)	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case)	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan	30 orang	7.700.000	30 orang	6.000.000	30 orang	6.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			11.000.000		10.000.000		10.000.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 Lokasi	11.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			14.300.000		14.000.000		14.000.000				
			Cakupan neonatus dengan	85%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu	22 kader	14.300.000	22 kader	14.000.000	22 kader	14.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.500.000		8.000.000		8.000.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu	30 kader	5.500.000	30 kader	8.000.000	30 kader	8.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			7.150.000		10.000.000		10.000.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%									
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang	100%									
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh	92%									
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%									
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu	20 bumil	7.150.000	20 bumil	10.000.000	20 bumil	10.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			160.600.000		426.350.000		411.350.000				
1	1.3.44.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	126 m2		126 m2	140.250.000	126 m2	140.250.000	RW VI Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	200 m2		200 m2	52.650.000	200 m2	52.650.000	RW I Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di	46,5 m2	0	46,5 m2	6.500.000	46,5 m2	6.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	50 m2	19.800.000	50 m2	12.000.000	50 m2	12.000.000	RW II Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	30 m2	19.800.000	30 m2	20.000.000	30 m2	20.000.000	RW III Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	29,4 m2	16.500.000	29,4 m2	19.400.000	29,4 m2	19.400.000	RW VIII Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	30 m2	22.000.000	30 m2	19.800.000	30 m2	19.800.000	RW IX Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.44.45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	38.500.000	1 paket	50.000.000	1 paket	35.000.000	Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
9	1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	68 m2	17.600.000	68 m2	45.000.000	68 m2	45.000.000	RW V Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
10	1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong	50 m2	26.400.000	50 m2	42.000.000	50 m2	42.000.000	RW VII Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Akomodasi Musrenbang
11	1.3.44.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong			26 m	18.750.000	26 m	18.750.000	RW I Kelurahan Kramat Selatan	DAU		Pokok Pikiran DPRD
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.500.000		7.500.000		7.500.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan	47.37%		47.37%		47.37%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan	20 m	5.500.000	20 orang	7.500.000	20 orang	7.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya penyuluhan pola hidup			-		-	0	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas			-		-	0	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		25.000.000		25.000.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah	14.26%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat			320 oh	15.500.000	320 oh	15.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat			55 ok	9.500.000	55 ok	9.500.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		10.000.000		10.000.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi	7									
			Jumlah pembangunan kebijakan terkait kontrol	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui			35 orang	10.000.000	35 orang	10.000.000	Kel.Kramat Sel	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	882.790.000		1.332.615.000		1.344.807.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Wates
 URUSAN : Kelurahan Wates

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			128.150.000		122.978.000		153.951.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	13.530.000	4 item	17.400.000	4 item	21.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 kendaraan	2.310.000	8 kendaraan	2.306.000	8 kendaraan	2.306.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	296 m2	20.720.000	296 m2	20.816.000	296 m2	23.840.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	14.300.000	64 item	10.136.000	64 item	10.136.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 macam	3.180.000	2 macam	4.041.000	2 macam	4.041.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 macam	2.200.000	5 macam	2.200.000	5 macam	2.200.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	4.020.000	4 item	3.647.000	4 item	3.647.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1macam	4.100.000	1macam	4.800.000	1macam	4.800.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 macam	860.000	2 macam	1.750.000	2 macam	1.750.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	10.750.000	60 orang	10.666.000	450 org	33.491.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 kegiatan	33.000.000	5 kegiatan	25.200.000	5 kegiatan	25.200.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1orang	19.180.000	1orang	20.016.000	1orang	21.540.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			48.560.000		46.765.000		75.715.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	296m2	25.190.000	296m2	20.000.000	296m2	20.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 kendaraan	17.320.000	7 kendaraan	17.950.000	7 kendaraan	17.950.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3 macam	6.050.000	3 macam	3.700.000	3 macam	3.700.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 macam		3 macam		3 macam	4.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	8macam		8macam	5.115.000	8macam	5.115.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional					0 1 unit	24.950.000	kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			0		3.303.000		3.303.000				
			APK PAUD	66%		66%		66%					
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		53%		53%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD	24 orang		24 orang	3.303.000	24 orang	3.303.000	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.670.000		12.670.000		12.670.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		92%		92%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,46		6,46					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		11,67		11,67					
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%		95%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		74,25		74,25					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		14.26%		14.26%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		12		12					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	280 orang	5.670.000	280 orang	5.670.000	280 orang	5.670.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan	50 orang		50 orang	7.000.000	50 orang	7.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			39.742.000		70.000.000		40.155.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		4,3		4,3					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		89%		89%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		4,3%		4,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	13 rw	27.972.000	13 rw	59.000.000	13 rw	28.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	40org	11.770.000	40org	11.000.000	40org	12.155.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			5.230.000		29.016.000		30.540.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		935		935					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		50%		50%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		40%		40%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 macam	5.230.000	3 macam	29.016.000	3 macam	30.540.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			29.750.000		45.135.000		45.135.000				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya ketua RT/RW	97 rt/rw		97 rt/rw	8.615.000	97 rt/rw	8.615.000	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	6.870.000	25 orang	22.120.000	25 orang	22.120.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	97 rt/rw	22.880.000	97 rt/rw	14.400.000	97 rt/rw	14.400.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			4.540.000		4.540.000		4.540.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 kader KB	4.540.000	25 kader KB	4.540.000	25 kader KB	4.540.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3.300.000		7.656.000		7.656.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		5,6		5,6					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		6,26					
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	52,13		52,13		52,13					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		21,33		21,33					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		2%		2%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		12.50%		12.50%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselel nggaran ya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	3.300.000	1 lokasi	7.656.000	1 lokasi	7.656.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6.080.000		4.396.000		4.396.000				
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikann ya informasi penanggulanga n maslaah kesehatan	150 orang	6.080.000	150 orang	4.396.000	150 orang	4.396.000	Kel. Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			153.990.000		216.326.000		218.666.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		1		1					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		3		3					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.47%		1.47%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		6%		6%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,84		0,84					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	13 rw	153.990.000	13 rw	216.326.000	13 rw	218.666.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			4.230.000		6.078.000		6.078.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		30%		30%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 pertemuan	4.230.000	1 pertemuan	6.078.000	1 pertemuan	6.078.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7.350.000		6.600.000		6.600.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		95.00%		95.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,40%		6,40%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	50 anggota karang taruna	7.350.000	50 anggota karang taruna	6.600.000	50 anggota karang taruna	6.600.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			2.960.000		2.690.000		2.690.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln					
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		52%		52%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		53%		53%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	2.960.000	12 bulan	2.690.000	12 bulan	2.690.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			37.430.000		28.153.000		28.153.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		72,2%		72,2%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		71.00%		71.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		35,19%		35,19%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 kegiatan	37.430.000	2 kegiatan	20.951.000	2 kegiatan	20.951.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang		100 orang	7.202.000	100 orang	7.202.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			33.180.000		74.455.000		77.005.000				
			DISPORA		2,200,359,320								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,32		15,32					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		12		12					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	3 kegiatan	33.180.000	3 kegiatan	74.455.000	3 kegiatan	77.005.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			22.980.000		35.000.000		35.000.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kegiatan	22.980.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			16.700.000		14.415.000		14.415.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		35%		35%					
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		11		11					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		47%		47%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		35%		35%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143		143		143					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)- PKK aktif	61%		61%		61%					
			PKK Aktif	100%		100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	70 kader	16.700.000	70 kader	14.415.000	70 kader	14.415.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			16.940.000		25.000.000		25.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		6					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		6		6					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			#NAME?	15		15		15					
			#NAME?	20		20		20					
			#NAME?	NA		NA		NA					
			#NAME?	20		20		20					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		35					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100 peserta	16.940.000	100 peserta	25.000.000	100 peserta	25.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.300.000		18.336.000		18.336.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	11.430.000	2 kegiatan	13.466.000	2 kegiatan	13.466.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 kegiatan	4.870.000	1 kegiatan	4.870.000	1 kegiatan	4.870.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			9.350.000		10.290.000		8.370.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	9.350.000	1 lokasi	10.290.000	1 lokasi	8.370.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana, Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			81.000.000		307.800.000		277.800.000				
1	1.3.40.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	143m, 86m	46.000.000	143m, 86m	175.000.000	143m, 86m	175.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.40.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	55 m		0 55 m		0 55 m	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.40.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	47 m		0 47 m		0 47 m	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.40.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	35.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	20.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
5	1.3.40.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW II	30 m		30 m	22.600.000	30 m	22.600.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.40.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VII	30 m		30 m	22.600.000	30 m	22.600.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.40.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan Kelurahan	75m2, 80 m2		75m2, 80 m2	37.600.000	75m2, 80 m2	37.600.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			0		0		0				
					4,068,071,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terbangunnya MCK di RW 7 & 8 Kelurahan Wates				0		0	RW 7 & 8 Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0		0				
1	1.2.5.7	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta penyuluhan	35 orang		35 orang	0	35 orang	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		97%		97%					
1	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya Survey Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa				0		0	kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				0		0	kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.162.000		6.162.000		6.162.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terwujudnya Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		6.162.000		6.162.000		6.162.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			10.000.000		10.000.000		10.000.000				
				-	5,139,479,000	-		-					
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln					
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		80%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		1		1					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		SDGs
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			7.190.000		7.190.000		7.190.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		80%		80%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terfasilitasinya pengembangan data/informasi		7.190.000		7.190.000		7.190.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.000.000		7.000.000		7.000.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		47.37%		47.37%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			5.915.000		5.915.000		5.915.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		20%		20%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		23%		23%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		78,50%		78,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terciptanya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		5.915.000		5.915.000		5.915.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.000.000		6.000.000		6.000.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<104		<104					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit aids		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		SDGs
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.000.000		5.000.000		5.000.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		18%		18%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	terselenggarakannya penyuluhan kesehatan anak balita		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.000.000		5.000.000		5.000.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		75%		75%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		18%		18%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya peningkatan pelayanan kesehatan lansia		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.000.000		5.000.000		5.000.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		92%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Tercapainya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
			TOTAL		730.699.000		1.148.869.000	TOTAL	1.153.441.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Tengah

URUSAN : Kecamatan Magelang Tengah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			594.929.400		956.175.000		991.429.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12 bulan	25.363.000		68.400.000	12 bulan	78.900.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10 kendaraan dinas	2.668.000		3.000.000	10 Kendaraan Dinas	3.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12 bulan	358.461.000		426.300.000	12 laporan	426.300.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	12 bulan	42.152.000		302.318.000	7 Kantor	324.414.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	10 jenis	37.213.000		16.087.000	10 Jenis	16.087.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 kegiatan	9.159.000		5.572.000	12 bulan	5.572.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9 jenis	3.191.000		4.859.000	11 Jenis	4.859.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2 jenis	3.811.000		3.465.000	3 Jenis	4.545.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1 tahun	2.979.000		2.818.000	2 Jenis	2.818.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	30 pegawai	41.233.000		47.810.000	30 Pegawai	47.810.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1 tahun	68.699.400		55.914.000	1 tahun	55.914.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam	12 bulan			19.632.000	12 bulan	21.210.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			251.250.000		348.020.000		348.020.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	82,25 m2	10.000.000		10.000.000	82,25 m2	10.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 gedung kantor	45.000.000		45.124.000	1 Gedung Kantor	45.124.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 kendaraan dinas	85.000.000		105.677.000	10 Kendaraan Dinas	105.677.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	2 jenis	250.000		4.235.000	2 Jenis	4.235.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	6 jenis	17.000.000		10.868.000	5 'Jenis	10.868.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	1			39.928.000	1 unit	39.928.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	9	69.000.000		80.138.000		80.138.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		25.000.000			0	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya Pergola				52.050.000	1 pergola	52.050.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			10.977.000		10.837.000		10.837.000				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1 kegiatan, 6 kelurahan	10.977.000		10.837.000	1 kegiatan	10.837.000	Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			91.850.000		107.820.000		107.820.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4	27.500.000		25.726.000	4 Laporan	25.726.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2 dokumen	22.000.000		19.298.000	2 dokumen	19.298.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2	31.350.000		30.131.000	2 Dokumen	30.131.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	1 laporan	11.000.000		9.013.000	1 dokumen	9.013.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terpenuhinya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan dengan baik dan tepat waktu				23.652.000	1 Dokumen	23.652.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			19.498.000		23.410.000		23.410.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	3 macam lomba	19.498.000		23.410.000	3 Jenis	23.410.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			44.000.000		37.664.000		37.664.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembinaan dan pemantauan kegiatan linmas	triwulan, 85 linmas	44.000.000		37.664.000	85 Linmas	37.664.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.870.000				0				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraa n pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Jumlah Artikel yang Dipublikasikan Melalui Website	70	9.870.000			0	0	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			122.538.000		125.375.000		125.375.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 pagelaran wayang g	122.538.000		125.375.000	1 Pagelaran Wayang	125.375.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			122.668.000		129.659.000		129.659.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4 laporan	22.871.000		21.848.000		21.848.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Keamanan	12 kali kegiatan	99.797.000		91.584.000	12 Kegiatan	91.584.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terlaksananya lomba Poskamling	1 lomba			16.227.000	1 Lomba	16.227.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.775.000		14.764.000		14.764.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	forum anak yang terfasilitasi	6 kegiatan	5.775.000		14.764.000	6 kegiatan	14.764.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			51.160.000		46.937.000		46.937.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2 kegiatan	51.160.000		46.937.000		46.937.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			15.630.000		34.337.000		34.337.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				17.093.000	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	17.093.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1 kegiatan	15.630.000		17.244.000		17.244.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.671.000		19.082.000		19.082.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Kegiatan Karnaval pembangunan	1 kali karnaval pembangunan	11.671.000		19.082.000		19.082.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			33.259.000		50.727.000		50.727.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%									
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%									
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%									
			Jumlah Juara FASI	4									
			Jumlah Juara MTQ	1									
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170 peserta lomba	33.259.000		50.727.000		50.727.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		22.303.000		22.303.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	4 pokja			22.303.000		22.303.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			34.567.000		44.860.000		44.860.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	7 TP PKK	34.567.000		44.860.000		44.860.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			13.396.000		8.984.000		8.984.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60 peserta	13.396.000		8.984.000		8.984.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			27.500.000		24.036.000		24.036.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	3 lomba	27.500.000		24.036.000		24.036.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			30.454.000		29.206.000		29.206.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	1 laporan pra musrenbang	13.140.000		12.857.000		12.857.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	160 peserta	17.314.000		16.349.000		16.349.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			153.960.000		60.000.000		60.000.000				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan	kelurahan dan kecamatan	153.960.000		60.000.000		60.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			62.700.000		64.218.000		68.952.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	12 bulan	62.700.000		64.218.000	12 bulan	68.952.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		7.988.000		7.988.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12 kegiatan					12 Kegiatan	7.988.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		9.505.000		9.505.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	1 Kegiatan				9.505.000	1 Kegiatan	9.505.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		15.432.000		15.432.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kegiatan Monitoring Yang Dilaksanakan				15.432.000	4 movev	15.432.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			0		14.513.000		14.513.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				14.513.000	12 laporan	14.513.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0		22.621.000		22.621.000				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%									
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%									
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				22.621.000	4 Kegiatan	22.621.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		273.631.000		290.988.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%									
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	12 Bulan			273.631.000	12	290.988.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		SDGs
				TOTAL	1.707.652.400		2.502.104.000		2.559.449.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Kemirirejo
 URUSAN : Kelurahan Kemirirejo

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	ARGET APB	APBD 2019	T RENJA	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			111.225.345		129.599.000		134.417.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	14.691.600		13.920.000		14.400.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pembayaran STNK	10 Kendaraan	1.848.000		1.900.000		1.900.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan	20.790.000		1.812.000		1.812.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pembelian ATK	100	9.331.245		8.584.000		8.584.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	4.042.500		8.805.000		9.999.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	1.386.000		1.125.000		1.125.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	1.386.000		3.960.000		3.960.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya logistik kantor/pembelian gas elpiji	12 bulan	2.310.000		1.812.000		1.812.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	100	20.790.000		23.205.000		23.205.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi keluar daerah	4 kegiatan	34.650.000		25.200.000		25.200.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga kontrak/honoror	12 bulan	0		39.276.000		42.420.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			51.166.500		41.069.000		47.113.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	18.826.500		12.787.000		24.187.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	10 Kendaraan	24.255.000		22.329.000		16.973.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	10 Unit	8.085.000		4.653.000		4.653.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis			1.300.000		1.300.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercapainya Pengadaan Peralatan gedung kantor	2 Jenis			0	0	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis			0	0	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.179.250		5.479.000		5.479.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									

1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pendidikan anak usia dini	100	6.179.250		5.479.000		5.479.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			9.831.360		13.573.000		13.573.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan lingkungan	100	9.831.360		13.573.000		13.573.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			100.490.775		124.881.000		123.144.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									

			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tercapainya kebersihan lingkungan kelurahan	100	83.685.525		106.360.000		104.623.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya pengembangan kampung organi	100	16.805.250		11.088.000		11.088.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Tercapainya monitoring dan evaluasi pelaporan	12			7.433.000		7.433.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8.893.500		23.113.000		23.113.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									

1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya peningkatan pelayanan	100	8.893.500		6.120.000		6.120.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya pembuatan laporan kependudukan	12 Laporan			16.993.000		16.993.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			29.066.730		25.818.000		25.818.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Tercapainya pemilihan dan pelantikan Ketua LPM Kelurahan Kemirirejo	1	18.480.000		3.199.000		3.199.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Tercapainya pembinaan RT/RW	12	10.586.730		11.830.000		11.830.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Tercapainya Pelantikan RT dan RW	1			10.789.000		10.789.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			2.922.150		7.080.000		7.080.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercaya an									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercaya an									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tercapainya pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100	2.922.150		7.080.000		7.080.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			11.088.000		10.870.000		10.954.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e- Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									

1	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Terpenuhinya pengadaan buku taman bacaan	50 buku	3.465.000		0	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Tercapainya pengelolaan buku perpustakaan	12	7.623.000		10.870.000	10.954.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan									
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			4.661.580		3.801.000	3.801.000			
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%							
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%							
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tercapainya prmbuatan profil kelurahan	100	4.661.580		3.801.000	3.801.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			136.035.900		175.532.000	175.532.000			
			SATPOL PP		2,884,343,000						
			KESBANGPOL		273,950,000						
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%							
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0							

			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	100	136.035.900		162.302.000		162.302.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya kegiatan lomba siskamling	1			13.230.000		13.230.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			11.550.000		7.808.000		7.808.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya peningkatan lembaga perempuan dan anak	100	11.550.000		7.808.000		7.808.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.063.750		11.475.000		11.475.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									

1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya K3	100	6.063.750		11.475.000		11.475.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7.318.080		5.160.000		5.160.000			
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%								
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1								
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%								
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya pembinaan karangtaruna	100	7.318.080		5.160.000		5.160.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan										
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			29.274.630		5.847.000		5.847.000			
					839,992,000							
			SETWAN	12 bln	26,000,000							
			DPPKD		143,000,000							
			KESBANGPOL		28,587,000							
			BKD		15,000,000							
			DPP		25,830,200							
			LITBANG		50,000,000							
			PERPUS		247,075,000							
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%								
			Persentase arsip dan risalah	82%								
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%								
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tercapainya penataan arsip/dokumen	100	29.274.630		5.847.000		5.847.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		8.828.000		8.828.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya kerukunan dalam beragama	1 kegiatan			8.828.000		8.828.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			25.166.295		37.814.000		37.814.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100	5.775.000		21.105.000		21.105.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya	2	19.391.295		16.709.000		16.709.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			15.142.050		19.598.000		19.598.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									

1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya BBGRM	100	15.142.050		19.598.000		19.598.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			17.325.000		11.338.000		11.338.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tercapainya pembinaan PKK	100	17.325.000		11.338.000		11.338.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			16.008.300		19.362.000		19.362.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tercapainya kegiatan porseni kelurahan dan senam PKK	100	16.008.300		19.362.000		19.362.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.362.885		16.076.000		16.076.000				

1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang	1 kegiatan	12.671.505		12.313.000		12.313.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang	2 kegiatan	3.691.380		3.763.000		3.763.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			11.550.000		9.463.000		9.463.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terpeliharaan kesehatan masyarakat	1 kegiatan	11.550.000		9.463.000		9.463.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			13.513.500		10.797.000		10.797.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Tercapainya pemeliharaan RTH	100	13.513.500		10.797.000		10.797.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Program 100-100
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											

	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			27.054.720		30.983.000		30.983.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan kesehatan anak balita	12	27.054.720		30.983.000		30.983.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			16.092.615		45.648.000		45.648.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tercapainya pemeliharaan kesehatan	2 jenis	16.092.615		45.648.000		45.648.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			40.425.000		83.980.000		83.980.000				
1	1.3.45.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Tercapainya pemeliharaan infrastruktur	100	40.425.000		50.000.000		50.000.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.45.13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IV	1 kegiatan			15.480.000		15.480.000	Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.45.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW VIII	1 kegiatan			18.500.000		18.500.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.45.18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IX	1 kegiatan			0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											

	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Tercapainya peningkatan tenaga penyuluh kesehatan di kelurahan				0	30 Oran	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Tercapainya masyarakat dengan pola hidup sehat				0	60 orang	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		7.742.000		7.742.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA			92,000,000							
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tirakatan hari jadi kota magelang				7.742.000	110 ora	7.742.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		19.632.000		21.210.000				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%									

1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tercapainya pelayanan kedinasan yang profesional				19.632.000	1 orang	21.210.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		9.732.000		9.732.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Tercapainya peran perempuan dalam pembangunan				9.732.000	12 kali	9.732.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		3.806.000		3.806.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tercapainya pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba				3.806.000		3.806.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
				TOTAL	724.407.915		925.904.000	30 orang	936.691.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Cacaban
 URUSAN : Kelurahan Cacaban

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APE	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			181.621.000		175.575.000		176.424.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, internet	4 Jenis	24.200.000		24.200.000	12 Bulan	17.256.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	10 Unit	1.210.000		2.350.000	11 Unit	2.350.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan bahan pembersih dan upah petugas kebersihan kantor	9 Jenis	21.780.000		2.136.000	1 Kantor	2.136.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12 Jenis	12.705.000		12.705.000	13 Jenis	12.705.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak buku register administrasi, banner/spanduk dan photo copi.	2 jenis	7.260.000		9.080.000	5 Jenis	9.640.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja koponen listrik	5 Jenis	2.420.000		2.420.000	6 Jenis	2.420.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pengadaan koran/uahbahan bacaan	48 eksemplar	1.815.000		3.780.000	2 Jenis	3.780.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	pengadaan LPG/BBM	3 Jenis	1.331.000		1.444.000	3 jenis	1.444.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman parat dan karyawan	8 Jenis	22.990.000		22.990.000	2 Jenis	25.490.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU

10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	4 Kegiatan	42.350.000		35.574.000	4 Kegiatan	35.574.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	pnediaan tenaga kontrak	2 orang	43.560.000		58.896.000	3 Orang	63.629.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			263.780.000		219.880.000		222.130.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	229.900.000		37.931.000	1 Kantor	37.931.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	9 Unit	21.780.000		21.785.000	9 Unit	24.035.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 Unit	2.420.000		5.000.000	3 jenis	5.000.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	7 Unit	9.680.000		5.164.000	4 Jenis	5.164.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor				150.000.000	1 Kantor	150.000.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.470.000		8.470.000		8.470.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kegiatan PAUD	7 Pos PAUD	8.470.000		8.470.000	7 Pos PAUD	8.470.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			49.610.000		79.659.000		82.374.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Upah petugas dan biaya operasional	14 Orang	36.300.000		57.954.000	14 Orang	60.669.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU

2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1 Lokasi	13.310.000		13.310.000	1 Lokasi	13.310.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Evaluasi pelaksanaan Kampung organik	1 Lokasi			8.395.000	4 Laporan	8.395.000	Kelurahan cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8.470.000		27.323.000		27.323.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pembinaan administrasi kependudukan	120 Orang	8.470.000		8.470.000		8.470.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Penyusunan laporan kependudukan	12 Laporan			18.853.000		18.853.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			34.485.000		17.675.000		5.648.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Pembinaan administrasi RT/RW	120 Orang	10.285.000		8.450.000		0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW Masa Bakti 2019-2022	120 Orang	24.200.000		5.648.000		5.648.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Pelantikan LPM	100 Orang			3.577.000		0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											

	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.865.000		11.796.000		11.910.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	1 Orang	7.865.000		11.796.000		11.910.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.630.000		3.630.000		3.630.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Penyusunan buku profil kelurahan	5 Buku	3.630.000		3.630.000		3.630.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			145.200.000		200.271.000		200.271.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									

			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	koordinasi keamanan dan ketertibant	120 Orang	145.200.000		195.691.000		195.691.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dlm Kamtibmas (Lomba Poskamling)	12 Peserta			4.580.000		4.580.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			6.050.000		6.050.000		6.050.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	50 Anak	6.050.000		6.050.000		6.050.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.050.000		6.050.000		6.050.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	pembinaan kepemudaan (karang taruna)	50 Pemuda	6.050.000		6.050.000		6.050.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			19.360.000		3.160.000		3.160.000				

					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	penataan dan pengamanan arsip	12 Bulan	19.360.000		3.160.000		3.160.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		7.910.000		7.910.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan toleransi masyarakat	125 Orang			7.910.000		7.910.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			33.880.000		33.880.000		35.280.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Grebeg Gethuk dan Grebeg Besar	2 Kegiatan	21.780.000		21.780.000		23.180.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval 17 agustus	1 Kegiatan	12.100.000		12.100.000		12.100.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU

	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			21.780.000		12.530.000		12.530.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	peren serta masyarakat dalam pembangunan	4 Lomba	21.780.000		12.530.000		12.530.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			15.730.000		15.730.000		15.730.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Penyelenggaraan keg PKK	40 Orang	15.730.000		15.730.000	1 Organisasi	15.730.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga			18.150.000		18.150.000		26.900.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	kegiatan Pekan Olahraga antar Kelurahan	5 CabOr	18.150.000		18.150.000	5 Cabor	26.900.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			19.360.000		19.360.000		19.360.000				

1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan musyawarah rencanapembangunan tahunan	150 Orang	15.730.000		15.730.000	150 Orang	15.730.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	kegiatan survey hasil musrenbang	28 Orang	3.630.000		3.630.000	12 Lokasi	3.630.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			7.260.000		7.260.000		8.520.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	pemeliharaan taman-taman lingkungan	5 RTH	7.260.000		7.260.000	5 RTH	8.520.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			15.730.000		15.730.000		15.730.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	penyelenggaraan Posyandu balita	13 Posyandu Balita	15.730.000		15.730.000	13 Posyandu Balita	15.730.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			18.150.000		18.150.000		18.150.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Penyelenggaran Posyandu Lansia	12 Posyandu Lansia	18.150.000		18.150.000		18.150.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			42.350.000		253.554.000		253.554.000				
1	1.3.46.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Pemeliharaan saluran air	150 m2			17.244.000		17.244.000	RW. I	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

2	1.3.46.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	20000000	30 m2			13.520.000		13.520.000	RW. V	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.46.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Pemeliharaan infrastur kelurahan	12 Lokasi	42.350.000		199.890.000	12 Lokasi	199.890.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.46.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Pemeliharaan saluran air	50 m2			12.900.000		12.900.000	RW. III	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.46.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Pemeliharaan jalan lingkungan	10 m2			10.000.000		10.000.000	RW.4	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		14.214.000		14.214.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									

1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terbinanya Organisasi Perempuan (PKK) Kelurahan Cacaban				14.214.000	1 Organisasi	14.214.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		5.040.000		4.800.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan				5.040.000	40 anggota	4.800.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		7.460.000		7.460.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									

			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang				7.460.000	150 Orang	7.460.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan		0		0	30 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.19.4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Tingkat Kota Magelang	1 kegiatan	0		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
3	1.2.19.6	Kader piket bersama davis	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi	2 laporan	0		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.2.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terselenggaranya Pengajian Akbar Peringatan Tahun Baru Islam	1 kegiatan	0		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya Penyuluhan Pola Hidup Sehat	3 kegiatan			0	60 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.2.19.3	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Terselenggaranya kegiatan 3 Peringatan Hari Besar Islam, Natal, dan Nyepi	5 kegiatan	0		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Pokok Pikiran DPRD
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		5.388.000		5.388.000				
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								

			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya sumber daya kelompok informasi masy kelurahan				5.388.000	50 orang	5.388.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		4.396.000		4.396.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									

1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	terwujudnya lingkungan yang nyaman, sehat, dan bersih				4.396.000	3 RW	4.396.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		5.257.000		5.257.000			
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100								
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100								
			Angka Kesakitan DBD	<50								
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104								
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90								
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%								
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%								
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS									
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	terlaksananya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS				5.257.000	40 orang	5.257.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		8.360.000		8.360.000			
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%								
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1								
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1								
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA								

			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	terselenggaranya keg penanggulangan peredaran miras dan narkoba				8.360.000	50 orang	8.360.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	926.981.000		1.211.908.000		1.216.979.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Rejowinangun Utara
 URUSAN : Kelurahan Rejowinangun Utara

NO	KODE	PROGRAM KERJA KE	KATOR KINERJA CAPA	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan									
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			222.112.470		190.240.000		195.652.000		
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	16.380.000		25.200.000	12 bulan	25.230.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas	10 motor, 1 pick up	4.200.000		2.500.000		2.100.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	14 item	57.637.650		2.289.000		2.289.000	Kel Rejo Utara	DAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39 item	11.012.820		10.122.000		10.122.000	Kel Rejo Utara	DAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	9.985.500		13.585.000	12 bulan	9.535.000	Kel Rejo Utara	DAU

6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	7 jenis	1.856.400		2.772.000		6.772.000	Kel Rejo Utara	DAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	3 jenis	5.607.000		6.720.000		6.720.000	Kel Rejo Utara	DAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	1.816.500		2.120.000		1.640.000	Kel Rejo Utara	DAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	26.321.400		25.068.000		25.068.000	Kel Rejo Utara	DAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 jenis	31.500.000		21.336.000		21.336.000	Kel Rejo Utara	DAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	3 orang	36.615.600		58.896.000		63.630.000	Kel Rejo Utara	DAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan SKPD	1 orang	19.179.600		19.632.000		21.210.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			198.492.000		67.202.000		137.629.000		
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	14 unit	136.794.000		0	14 unit	41.427.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10 kendaraan	33.752.250		30.997.000		29.997.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 unit	10.421.250		6.000.000		6.000.000	Kel Rejo Utara	DAU

4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	2.593.500		10.205.000		10.205.000	Kel Rejo Utara	DAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung kantor	14.931.000		20.000.000	100%	50.000.000	Kel Rejo Utara	DAU
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	0	0		0	-	0	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			43.950.900		41.594.000		44.684.000		
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari							
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%							
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46							
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67							

			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertarikan dan ketertarikan umum (K3)	95%							
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25							
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%							
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12							
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	30 orang	43.950.900		41.594.000		44.684.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup									
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan			38.850.000		51.960.000		50.710.000		
					37,792,592,000						
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3							
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%							

			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%							
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	7 orang	26.250.000		24.470.000		24.470.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terselenggaranya pengembangan kampung organik	1 kegiatan	12.600.000		9.790.000	100%	8.540.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring kampung organik	21 RW			17.700.000		17.700.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil									
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			20.113.800		36.508.000		32.508.000		
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%							
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%							
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%							
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935							
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%							
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%							

			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%							
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya data kependudukan yang akurat	12 laporan	20.113.800		26.008.000		22.008.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya cetak surat pengantar	2 item			10.500.000		10.500.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			16.443.000		33.220.000		33.220.000		
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	4.467.750		9.689.000		9.689.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terbinanya administrasi RT/RW	1 kegiatan	11.975.250		15.282.000		15.282.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terwujudnya Pelantikan Ketua RT dan RW	1 kegiatan			8.249.000		8.249.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan									
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			18.900.000		21.796.000		23.374.000		

					3,138,426,000						
			Persentase peningkatan judul buku	5,6							
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26							
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13							
			Presentase perpustakaan aktif	21,33							
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%							
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%							
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya Buku Perpustakaan	1 orang	18.900.000		21.796.000		23.374.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan									
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			6.184.500		7.756.000		7.756.000		
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%							
			Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%							

1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kelurahan	3 buku	6.184.500		7.756.000		7.756.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			159.447.750		411.169.000		249.559.000		
			SATPOL PP		2,884,343,000						
			KESBANGPOL		273,950,000						
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%							
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0							
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1							
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3							
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%							
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%							

			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84							
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA							
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA							
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan	12 bulan	159.447.750		249.559.000		249.559.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terwujudnya pelaksanaan lomba siskamling antar RW se Kelurahan Rejowinangun Utara	1 kegiatan			0		0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan									
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			25.585.350		4.675.000		4.675.000		
					839,992,000						
			SETWAN	12 bln	26,000,000						
			DPPKD		143,000,000						
			KESBANGPOL		28,587,000						
			BKD		15,000,000						
			DPP		25,830,200						
			LITBANG		50,000,000						
			PERPUS		247,075,000						

			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%							
			Persentase arsip dan risalah	82%							
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%							
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip daerah	3 jenis	25.585.350		4.675.000		4.675.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			22.538.250		14.971.000		14.971.000		
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000						
			KESBANGPOL		124,600,000						
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%							
			Database ormas yang akurat	71.00%							
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%							
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 kegiatan	10.116.750		0	-	0	Kel Rejo Utara	DAU

2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	1 kegiatan	12.421.500		14.971.000		14.971.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan									
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			38.871.000		67.083.000		50.242.000		
			DISPORA		2,200,359,320						
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32							
			Jumlah festival seni dan budaya.	12							
			Cakupan gelar seni 75%	100%							
1	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasinya budaya daerah	1 kegiatan	0		16.841.000		0	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	1 kegiatan	17.503.500		22.392.000		22.392.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan kualitas budaya daerah	1 kegiatan	21.367.500		27.850.000		27.850.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan									

	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			27.678.000		40.870.000		40.870.000		
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100							
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat	3 kgt ; lomba mev	27.678.000		40.870.000		40.870.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			39.228.000		25.549.000		25.549.000		
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%							
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%							
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%							
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pemberdayaan PKK	12 bulan	39.228.000		25.549.000		25.549.000	Kel Rejo Utara	DAU

	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga									
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			42.000.000		54.904.000		54.904.000		
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6							
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional								
			#NAME?	6							
			#NAME?	15							
			#NAME?	20							
			#NAME?	NA							
			#NAME?	20							
			Jumlah klub olah raga	183							
			Jumlah organisasi olah raga	35							
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	4 cabang olahraga	42.000.000		54.904.000		54.904.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan									
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			26.250.000		29.423.000		29.423.000		

1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan	1 kegiatan	21.000.000		24.051.000		24.051.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Tersusunnya data dan informasi pembangunan yang akurat	1 kegiatan	5.250.000		5.372.000		5.372.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup									
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.300.000		6.976.000		20.276.000		
			Luas RTH Kota	18%							
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 kegiatan	6.300.000		6.976.000	100%	20.276.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			37.800.000		35.960.000		35.960.000		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%							
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%							
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%							
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%							
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan kesehatan balita	18 posyandu	37.800.000		35.960.000		35.960.000	Kel Rejo Utara	DAU

	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			14.700.000		10.425.000		10.425.000		
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%							
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%							
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kesehatan lansia	8 posyandu	14.700.000		10.425.000		10.425.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1.3.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			30.000.000		325.663.000		261.837.000		
1	1.3.47.78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	Terpeliharanya Gorong - gorong	1	10.000.000		65.120.000		65.120.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	1.3.47.79	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	Terpeliharanya gorong-gorong RW XVI	1	10.000.000		54.299.000		54.299.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	1.3.47.77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya gorong-gorong RW XIV	1	10.000.000		65.658.000		0	Kel Rejo Utara	DAU
4	1.3.47.85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Pedesaan	100	0		50.000.000		0	Kel Rejo Utara	DAU

5	1.3.47.75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya pemeliharaan gorong-gorong	100			28.868.000		28.868.000	Kel Rejo Utara	DAU
6	1.3.47.45	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW III	100			34.843.000		0	Kel Rejo Utara	DAU
7	1.3.47.43	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW I	100			26.875.000		26.875.000	Kel Rejo Utara	DAU
8	1.3.47.82	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIX	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase	45 m'			0	45 m'	51.832.000	Kel Rejo Utara	DAU
9	1.3.47.66	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase	35 m'			0	35 m'	34.843.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga									
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.053.250		6.197.000		6.197.000		
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%							
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1							
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%							
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda	1 kegiatan	6.053.250		6.197.000		6.197.000	Kel Rejo Utara	DAU

	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			8.400.000		9.191.000		9.191.000		
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%							
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	1 kegiatan	8.400.000		9.191.000		9.191.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan									
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.400.000		7.150.000		7.150.000		
			APK PAUD	66%							
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%							
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	3 kegiatan	8.400.000		7.150.000		7.150.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan									
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		10.610.000		10.610.000		

			Jumlah gedung kesenian	1							
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12							
			Cakupan kajian seni 50%	76							
			Cakupan fasilitas seni 30%	37							
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78							
			Cakupan tempat 100%	100							
			Cakupan organisasi 34%	100							
			DISPORA		92,000,000						
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang				10.610.000	100%	10.610.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		11.630.000		11.630.000		
					1,730,060,000						
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%							
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4							
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan								

			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11							
			LPM berprestasi								
			Tingkat kota	47%							
			Tingkat provinsi	peringkat 1							
			Tingkat nasional	peringkat 1							
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%							
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143							
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%							
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%							
			PKK Aktif	100%							
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terwujudnya organisasi perempuan yang dapat diandalkan				11.630.000	100%	11.630.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		7.601.000		7.601.000		
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100							

			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100							
			Angka Kesakitan DBD	<50							
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104							
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90							
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%							
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%							
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS								
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya sosialisasi mengenai HIV/AIDS				7.601.000	100%	7.601.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0		
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%							
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan pola hidup sehat	60 orang			0	60 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU

2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	30 orang			0	30 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			0		0		0		
					4,068,071,000						
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat								
1	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terlaksananya pemeliharaan pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	2 unit			0	2 unit MCK	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika									
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		6.543.000		6.543.000		
				-	5,139,479,000						
			SETWAN	12 bln	36,500,000						
			DISHUB		240,000,000						
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%							

			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :								
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan							
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan							
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3							
			Jumlah KIM	17							
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7							
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1							
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pembinaan sumber daya komunikasi dan informasi yang terbentuk				6.543.000	1 kegiatan	6.543.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup									

	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		14.060.000		14.060.000		
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%							
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan yang sehat dan rapi				14.060.000	100%	14.060.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		5.657.000		5.657.000		
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%							
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1							

			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1							
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA							
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA							
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Meningkatnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya miras dan narkoba				5.657.000	100%	5.657.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		
1	1.4.1.30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MCK	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana MCK	2 unit	0		0	2 unit	0	Kel Rejo Utara	DAU
		TOTAL			1.058.298.270		1.394.973.000		1.402.863.000		

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Magelang
 URUSAN : Kelurahan Magelang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			142.782.986		150.928.000		160.520.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Air, Telephon dan Internet	12 Bulan	18.522.000		20.700.000		24.900.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang dibayar pajaknya	6 Unit	2.425.500		2.308.000		2.308.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Terbeli	29 jenis	21.010.343		1.467.000		1.467.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	35 jenis	13.000.000		9.291.000		9.291.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	15.365.543		4.644.000		5.411.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang dibeli	5 jenis	1.653.750		1.803.000	5 jenis	1.803.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	5.500.000		5.940.000	2 jenis	5.940.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	3 jenis	2.750.000		3.335.000	3 jenis	3.335.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah karyawan Kelurahan Magelang	15 Orang	19.126.170		17.236.000	15 Orang	17.236.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibiayai	4 kegiatan	25.688.250		25.200.000	4 kegiatan	25.200.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam dan petugas front office yang tersedia di Kelurahan Magelang	3 Orang	17.741.430		59.004.000	3 Orang	63.629.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			148.962.400		46.986.000		46.986.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	50.000.000		20.000.000	1 Unit	20.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 Unit	20.462.400		20.955.000	6 Unit	20.955.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	8.500.000		2.238.000	3 jenis	2.238.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor Yang Terehab	0			0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terbeli	2 Unit	50.000.000		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terbeli	2 Unit	20.000.000		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
7	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur yang dipelihara	0			0	4 unit	2.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis			3.793.000	3 jenis	1.793.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbeli	0			0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.327.183		6.823.000		6.823.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terselenggara	48 Kegiatan	8.327.183		6.823.000	48 Kegiatan	6.823.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			67.383.488		127.607.000		128.279.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas kebersihan sampah dan kebersihan sungai di Kelurahan Magelang	5 Orang	56.883.488		115.500.000	5 Orang	121.479.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung Organik yang terpelihara	5 kampung	10.500.000		6.800.000	5 kampung	6.800.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Kampung Organik Yang Dimonitor dan Dievaluasi	4 kampung			5.307.000	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.000.000		24.242.000		24.242.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	150 orang			6.778.000	150 Orang	6.778.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta pembinaan RT/RW	160 orang	10.000.000		9.260.000	80 orang	9.260.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Peserta Pelantikan	65 orang			8.204.000		8.204.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			0		21.310.000		22.665.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya buku perpustakaan	12 Bulan			21.310.000		22.665.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			2.513.700		2.285.000		2.285.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah buku profil yang tersedia	5 buku	2.513.700		2.285.000		2.285.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			108.750.600		154.121.000		154.121.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 Laporan	108.750.600		151.186.000		151.186.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terbinanya Anggota Poskamling	25 Orang			2.935.000		2.935.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			8.500.000		12.150.000		12.150.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lomba K3 Yang Terselenggara	1 Kegiatan	8.500.000		12.150.000		12.150.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			14.000.000		2.601.000		2.601.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya Dokumen / Arsip di Kelurahan Magelang	12 Bulan	14.000.000		2.601.000		2.601.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.500.000		10.439.000		10.439.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	200 Orang	7.500.000		10.439.000		10.439.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			20.500.000		25.123.000		25.123.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Karnaval Budaya	1 Kegiatan	14.000.000		14.640.000		14.640.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Festival Grebeg gethuk	1 Kegiatan	6.500.000		10.483.000		10.483.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan			15.000.000		10.831.000		10.831.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan BBGRM	200 Orang	15.000.000		10.831.000		10.831.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			13.650.000		5.654.000		5.654.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	1 Kegiatan	13.650.000		5.654.000		5.654.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			15.774.570		21.562.000		21.562.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	5 Cabang	15.774.570		21.562.000		21.562.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			15.000.000		13.120.000		13.120.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang	150 Orang	10.500.000		8.725.000		8.725.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Lokasi yang tersurvey	12 RW	4.500.000		4.395.000		4.395.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			9.525.600		12.750.000		12.750.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Balita yang menerima PMT	450 Balita	9.525.600		12.750.000		12.750.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	SDGs
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			8.500.000		13.860.000		13.860.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Lansia yang menerima PMT	485 Orang	8.500.000		13.860.000		13.860.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	SDGs
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			195.000.000		107.668.000		107.668.000				
1	1.3.48.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Yang Terpelihara	0			0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.48.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase yang terpelihara	50 m	65.000.000		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.48.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Saluran Drainase yang terpelihara	30 m	45.000.000		22.212.000	30 m	22.212.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.48.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Infrastruktur Perdesaan Yang Terpelihara	13 RW	45.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.48.37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Jalan yang Terpelihara	250 m	40.000.000		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.48.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Yang Terpelihara	0			35.456.000	200 m	35.456.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.48.38	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	Jalan Yang Terpelihara	0			0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.767.178		7.370.000		7.370.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Luas Taman Yang Terpelihara	100 m2	5.767.178		7.370.000		7.370.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Sejuta Bunga
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			0		25.537.000		25.537.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	80 orang			8.970.000	80 orang	8.970.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Monografi yang Tersusun	12 laporan			16.567.000	12 Laporan	16.567.000	Kel	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		10.605.000		10.605.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Anggota Forum Anak Yang Terbina	60 orang			10.605.000	60 Orang	10.605.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		2.250.000		2.250.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dikirim	75 Orang			2.250.000	75 Orang	2.250.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya Pola Hidup Sehat	0	0		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya Pola Hidup Sehat	0	0		0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		7.857.000		7.857.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta sosialisasi	80 Orang			7.857.000	80 orang	7.857.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		9.124.000		9.124.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP. PKK yang dibina	12 Kelom pok			9.124.000	12 Kelompok	9.124.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		8.334.000		8.334.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggara seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terdukungnya pelaksanaan pentas seni budaya daerah	1 Kegiatan			8.334.000	1 Kegiatan	8.334.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			0		12.490.000		12.490.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang Terbina	52 Orang			12.490.000	52 Orang	12.490.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		4.330.000		4.330.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta sosialisasi	40 Orang			4.330.000	40 Orang	4.330.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		6.361.000		6.361.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napsa, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	80 Orang			6.361.000	80 orang	6.361.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
				TOTAL	817.437.705		864.318.000		875.937.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Panjang
 URUSAN : Kelurahan Panjang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			128.892.000		137.416.000		143.563.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, telepon dan internet	12 bulan	15.500.000		18.360.000		19.440.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan yang diurus	6 kendaraan dinas	1.800.000		2.388.000	6 unit	2.388.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	8 alat kebersihan dan bahan pembersih	37.000.000		1.710.000		1.710.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	40 jenis	6.000.000		9.872.000		9.872.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan	12000 lembar	7.646.000		4.090.000	3 jenis	5.377.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 item	1.474.000		1.641.000		1.641.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia	3 media cetak	1.600.000		4.380.000	3 jenis	4.380.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah isi ulang bahan bakar/pelumas yang dibeli	3 jenis	1.600.000		2.162.000		2.162.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah persediaan makan dan minum	16 pegawai	8.272.000		12.497.000		11.507.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	4 perjalanan dinas	30.000.000		21.420.000		21.420.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	2 pegawai	18.000.000		58.896.000		63.666.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah tenaga pelayanan front office	0 orang	0		0	0	0	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			25.000.000		23.524.000		25.470.000				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/motor yang dipelihara	6 kendaraan dinas	12.500.000		19.074.000		15.020.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	4.000.000		4.450.000		4.450.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah printer dibeli	2 unit	8.500.000		0	2 unit	4.800.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan dibeli	0 unit	0		0	0	0	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	0 gedung kantor			0	0	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	2 jenis			0	2 jenis	1.200.000	Kantor Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			13.640.000		6.480.000		6.480.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pos PAUD yang mendapat bantuan transport	6 PAUD	13.640.000		6.480.000		6.480.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			91.634.000		132.678.000		129.030.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev kampung organik	3 kampung organik			5.044.000		5.044.000	Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program prioritas RPJM
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas pengambilan sampah	11 orang	76.634.000		117.757.000		114.109.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
3	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik dipelihara	3 kampung organik	15.000.000		9.877.000	3 kelompok	9.877.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			6.000.000		23.665.000		23.665.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT dan RW yang diberi pengarahan	68 orang	6.000.000		10.851.000		10.851.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan monografi tersusun	12 laporan			12.814.000		12.814.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			7.000.000		14.106.000		14.106.000				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah RT/RW yang dilantik	68 orang			5.552.000		5.552.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	68 orang	7.000.000		6.219.000		6.219.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah kegiatan pelantikan LPM	1 kegiatan			2.335.000		2.335.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.000.000		7.344.000		9.760.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah buku dibeli	20 buku			0	20 eksemplar	1.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
2	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan	1 orang	7.000.000		7.344.000		8.760.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.500.000		2.223.000		2.223.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen data Kelurahan yang tersusun	2 dokumen	3.500.000		2.223.000		2.223.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.000.000		3.751.000		3.751.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	1 organisasi	4.000.000		3.751.000		3.751.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			22.972.000		4.177.000		4.177.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dikelola	3 jenis	22.972.000		4.177.000		4.177.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		7.685.000		7.685.000				
			DISNAKERTRAN SOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan syawalan terselenggara	1 kegiatan			7.685.000		7.685.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			22.500.000		24.990.000		24.990.000				
			DISPORA		2,200,359,320								
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32									
			Jumlah festival seni dan budaya.	12									
			Cakupan gelar seni 75%	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah gunungan Grebek Gethuk dan pengiring yang dikirim	1 kelompok	12.000.000		12.650.000		12.650.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah mobil hias dan pengiring yang dikirim	1 kelompok	10.500.000		12.340.000		12.340.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.000.000		7.076.000		7.076.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100									
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah jenis lomba BBGRM yang dilaksanakan	2 jenis lomba	10.000.000		7.076.000		7.076.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			13.000.000		5.353.000		5.353.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pelatihan untuk ibu2 dan TP PKK	1 kegiatan	13.000.000		5.353.000		5.353.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			4.000.000		3.711.000		3.711.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang menerima penyuluhan	30 orang	4.000.000		3.711.000		3.711.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			9.000.000		17.645.000		17.645.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis/cabang olahraga yang dilombakan di Porkel	4 cabang olahraga	9.000.000		17.645.000		17.645.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.226.000		14.463.000		14.463.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkel	90 orang	7.226.000		10.662.000		10.662.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvei	8 RW	3.000.000		3.801.000		3.801.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.000.000		4.010.000		4.010.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	12 bulan	6.000.000		4.010.000		4.010.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			7.500.000		21.600.000		21.850.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang diberi PMT	9 Posyandu	7.500.000		21.600.000		21.850.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			6.480.000		25.200.000		23.050.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia yang dibina dan diberi PMT	6 Posyandu Lansia	6.480.000		25.200.000		23.050.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			51.000.000		55.681.000		55.681.000				
1	1.3.49.22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Panjang jalan terpelihara/paving dan aspal	197 m2	10.000.000		0	0	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.49.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Panjang jalan terpelihara/paving	70 m2	10.000.000		11.660.000	70 m2	11.660.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.49.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Panjang jalan terpelihara/paving	80 m2	10.000.000		17.660.000		17.660.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Panjang jalan kampung terpelihara	200 m2	21.000.000		26.361.000		26.361.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			100.662.000		157.608.000		157.608.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan lomba Siskamling	1 kegiatan			3.822.000		3.822.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah laporan stabilitas keamanan yang disusun	12 laporan	100.662.000		153.786.000		153.786.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									
1	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	35 orang			0	0 orang	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
2	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	70 orang			0	0 orang	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			0		0		0				
					4,068,071,000								
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Jumlah MCK terbangun	2 lokasi			0	0 lokasi	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			5.235.000		5.235.000		5.235.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggara seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah peserta kegiatan tirakatan Hari Jadi	80 orang	5.235.000		5.235.000	80 orang	5.235.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			3.657.000		3.657.000		3.657.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah anggota forum anak yang dibina	25 anak	3.657.000		3.657.000	25 anak	3.657.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.348.000		7.348.000		7.348.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lomba K3 diselenggarakan	1 kegiatan	7.348.000		7.348.000	1 kegiatan	7.348.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			3.711.000		3.711.000		3.711.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah peserta sosialisasi HIV AIDS	30 orang	3.711.000		3.711.000	30 orang	3.711.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			3.624.000		3.624.000		3.624.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				-	5,139,479,000								
			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta sosialisasi KIM	30 orang	3.624.000		3.624.000	30 orang	3.624.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.125.000		5.125.000		5.125.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi Linmas	30 orang	5.125.000		5.125.000	30 orang	5.125.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			4.872.000		4.872.000		4.872.000				
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah kegiatan PKK	12 bulan	4.872.000		4.872.000	12 bulan	4.872.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	583.578.000		733.958.000		738.919.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Kelurahan Gelangan
 URUSAN : Kelurahan Gelangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			148.212.174		164.115.000		170.425.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	16.259.496		15.000.000	12 bulan	15.000.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	8 kendaraan dinas	2.295.975		3.996.000	8 kendaraan dinas	3.996.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	23 alat / bahan pembersih	23.015.652		2.835.000	23 alat/bahan pembersih	2.835.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	23 jenis	14.641.000		10.142.000	27 jenis	10.142.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	2 jenis	14.573.119		5.410.000	2 jenis	5.410.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	3 komponen listrik	2.662.000		1.656.000	3 komponen listrik	1.656.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	1.437.480		4.380.000	2 jenis	4.380.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	0		2.700.000	3 jenis	2.700.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan harian kantor	10 pegawai	11.979.000		18.048.000	8 pegawai dan 575 orang	18.048.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	4 kegiatan	39.930.000		21.420.000	4 kegiatan	21.420.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi umum, administrasi kependudukan dan keamanan kantor	4 orang	21.418.452		78.528.000	4 orang	84.838.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			50.717.755		46.382.000		46.382.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	482 m2	15.386.360		19.632.000	482 m2	19.632.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas operasional	7 kendaraan dinas	24.517.020		21.900.000	7 kendaraan dinas	21.900.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	20 unit	10.814.375		4.400.000	7 unit	4.400.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Genset dan Mesin potong rumput	3 Unit			450.000	2 unit	450.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			90.398.858		75.301.000		75.462.000				
					37,792,592,000								
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3									
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%									
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%									
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sampah dan pemeliharaan mobil sampah	3 orang dan 1 unit mobil sampah	73.401.988		57.614.000	3 orang dan 1 mobil sampah	57.775.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pengembangan kampung organik	1 RW	16.996.870		10.000.000	1 RW	10.000.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya money evaluasi pengelolaan kampung organik	5 kampung organik			7.687.000	5 kampung organik	7.687.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.456.718		27.729.000		27.729.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%									
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%									
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%									
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935									
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%									
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%									
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%									
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan	10 RW dan 65 RT	7.500.000		10.364.000	10 RW dan 65 RT	10.364.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan yang akurat	12 Bulan	7.956.718		17.365.000	12 bulan	17.365.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			27.221.348		28.420.000		28.420.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan RT/RW	10 RW dan 65 RT	7.397.698		8.345.000	10 RW dan 65 RT	8.345.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelantikan dan Pertemuan Rutin Pengurus LPM/Tokoh Masyarakat	35 orang	5.523.650		9.540.000	35 orang	9.540.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	10 RW dan 65 RT	14.300.000		10.535.000	10 RW dan 65 RT	10.535.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan											

	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			6.788.100		10.373.000		10.480.000				
					3,138,426,000								
			Persentase peningkatan judul buku	5,6									
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26									
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13									
			Presentase perpustakaan aktif	21,33									
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%									
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%									
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terlaksananya jasa petugas pengelolaan buku perpustakaan	2 orang	6.788.100		10.373.000		10.480.000				Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan						2 orang		Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.327.500		2.469.000		2.469.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%									
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%									
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	4 buku	3.327.500		2.469.000		2.469.000				Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			136.387.570		162.210.000		162.210.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000								
			KESBANGPOL		273,950,000								

			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%									
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0									
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1									
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%									
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%									
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84									
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA									
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	136.387.570		162.210.000		162.210.000		Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya lomba keamanan lingkungan	10 RW			0		0		Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.616.820		5.120.000		5.120.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%									

			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1									
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%									
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan/karang taruna	40 orang	5.616.820		5.120.000	40 orang	5.120.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			31.966.627		4.684.000		4.684.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12 bulan	31.966.627		4.684.000	12 bulan	4.684.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		8.823.000		8.823.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000								
			KESBANGPOL		124,600,000								
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%									
			Database ormas yang akurat	71.00%									
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%									

1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	90 orang			8.823.000	90 orang	8.823.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan										
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.106.850		29.772.000		29.772.000			
			DISPORA		2,200,359,320							
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32								
			Jumlah festival seni dan budaya.	12								
			Cakupan gelar seni 75%	100%								
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya partisipasi karnaval hari kemerdekaan RI	1 kegiatan	15.106.850		16.082.000	1 kegiatan	16.082.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya grebek gethuk dalam rangka hari jadi Kota Magelang	1 kegiatan			13.690.000	1 kegiatan	13.690.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Kota Sejuta Bunga
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan										
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			11.979.000		17.951.000		17.951.000			
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100								
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong	3 kegiatan	11.979.000		17.951.000	3 kegiatan	17.951.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			22.061.325		8.052.000		8.052.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%									
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%									
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%									
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	70 orang	22.061.325		8.052.000	70 orang	8.052.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			24.224.200		21.918.000		21.918.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6									
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6									
			#NAME?	15									
			#NAME?	20									
			#NAME?	NA									
			#NAME?	20									
			Jumlah klub olah raga	183									
			Jumlah organisasi olah raga	35									
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Porkel	5 Cabor	24.224.200		21.918.000	5 cabor	21.918.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			15.286.535		17.762.000		17.762.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersusunnya daftar rencana kegiatan pembangunan	1 kegiatan	11.167.090		13.160.000	1 kegiatan	13.160.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	1 kegiatan	4.119.445		4.602.000	1 kegiatan	4.602.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.651.007		5.653.000		5.653.000				
			Luas RTH Kota	18%									
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau	3 taman	6.651.007		5.653.000	3 taman	5.653.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			0		178.788.000		178.788.000				
1	1.3.50.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	32 m'			20.152.000	32 m2	20.152.000	RW. VII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	100			0	0	0	RW. X Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.50.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	104 m'			45.675.000	104 m2	45.675.000	RW. VIII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

4	1.3.50.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	230 m²			62.961.000	230 m2	62.961.000	RW. VIII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.50.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	10 RW			50.000.000	10 RW	50.000.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		4.152.000		4.152.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%									
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembentukan forum anak	40 Orang	0		4.152.000	40 orang	4.152.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		7.560.000		7.560.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari									
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%									
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46									
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67									
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	95%									
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25									
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%									

			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12									
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pengganti transport bagi anggota linmas	60 orang	0	7.560.000	60 orang	7.560.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum			Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0	10.202.000		10.202.000					
					1,730,060,000								
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%									
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4									
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11									
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%									
			Tingkat provinsi	peringkat 1									
			Tingkat nasional	peringkat 1									
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143									
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%									
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%									
			PKK Aktif	100%									

1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin tim penggerak PKK Kelurahan				10.202.000		10.202.000				Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						35 orang					
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		4.306.000		4.306.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100									
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100									
			Angka Kesakitan DBD	<50									
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104									
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90									
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%									
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%									
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksannya sosialisasi mengenai HIV/AIDS				4.306.000		4.306.000				Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
								30 orang					
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			0		17.140.000		17.140.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%									
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%									
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%									

1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya pemberian makanan dan gizi kepada Kelompok Posyandu Balita dan PAUD				17.140.000	14 posyandu balita dan 8 PAUD	17.140.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			0		8.117.000		8.117.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%									
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%									
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbinannya posyandu Lansia				8.117.000	10 posyandu lansia	8.117.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan											
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		6.610.000		6.610.000				
			Jumlah gedung kesenian	1									
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12									
			Cakupan kajian seni 50%	76									
			Cakupan fasilitas seni 30%	37									
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78									
			Cakupan tempat 100%	100									
			Cakupan organisasi 34%	100									
			DISPORA		92,000,000								
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksanakannya kegiatan grebek gethuk				6.610.000	1 kegiatan	6.610.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		10.000.000		10.000.000				
				-	5,139,479,000								

			SETWAN	12 bln	36,500,000								
			DISHUB		240,000,000								
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%									
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.??????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan									
			b.??????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan									
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3									
			Jumlah KIM	17									
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7									
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1									
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi				10.000.000		10.000.000				Mempe rkuat Implem entasi Master plan Smartci ty
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						2 kegiatan					
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			0		0		0				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%									

1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan pola hidup sehat				0	60 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan				0	30 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			0		9.228.000		9.228.000				
			APK PAUD	66%									
			Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	53%									
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta sosialisasi				9.228.000	80 orang	9.228.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		10.400.000		10.400.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%									
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan yang sehat dan rapi				10.400.000	1 kegiatan	10.400.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		4.465.000		4.465.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%									
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1									
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1									
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA									
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA									
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran miras dan narkoba				4.465.000		4.465.000				Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
							40 orang			Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		
			TOTAL		611.402.387		907.702.000		914.280.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Inspektorat
 URUSAN : Inspektorat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		264.873.000		321.703.000				
1	4.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000 surat	0		3.000.000		3.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12 kali	0		12.498.000		12.498.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	0		10.524.000		10.524.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12 kali	0		64.413.000		64.413.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	15 jenis	0		3.296.000		3.296.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	14 jenis	0		12.143.000		12.143.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	0		5.669.000		5.669.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	4 Jenis	0		3.600.000		3.600.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6 Kali	0		900.000		900.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22 Kegiatan	0		41.650.000	22 kegiatan	48.250.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Keg	0		107.180.000	15 kegiatan	157.410.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			0		7.447.929.000		8.235.108.000				
1	4.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeler kantor					0 jumlah kursi auditor 25 unit	47.585.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pe- meliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapanny a	5 Jenis	0		4.356.000		4.356.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	22 unit	0		209.768.000		209.768.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63 buah	0		10.185.000		10.185.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	88 buah			3.600.000		3.600.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.2.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya perawatan mebeler	50 buah			3.000.000		3.000.000	inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor					CCTV, laptop,table t,dan printer	273.177.500	inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor					Pembelian AC,Genset, Gordeng, Dan Tralis,Kulkas , TV,leminating,alat potong kertas,alat ukur digital,jangk a digital	466.416.500	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya sarana prasarana gedung inspektorat				7.217.020.000	1 unit gedung kantor	7.217.020.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10.362.000		45.787.000		45.787.000				
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB									
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%									
			Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	70%?									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	50%									
			Penurunan kasus temuan LKPD	1									
			Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	90%									
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%									
			Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD	95									
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP										
			Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	75%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	50%									
			Persentase implementasi SPIP	78%									
1	4.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4 lapora n	0		10.303.000		10.303.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2 lapora n	0		3.699.000		3.699.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 lapora n	0		3.582.000		3.582.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	4.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2 dokum en	0		4.064.000		4.064.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2 dokum en	0		10.608.000		10.608.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1 dokum en	0		3.169.000		3.169.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.2.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya perubahan Renstra OPD		10.362.000		10.362.000	1 dokumen	10.362.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			0		2.738.652.000		2.344.611.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%									
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%									
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%									
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB									
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%									
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%									
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%									
			Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Capaian Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan	70%									
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%									
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.42	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH	Terlaksananya sosialisasi APIP- APH				18.354.000	Di geser ke belanja modal	0	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
2	4.2.15.37	Evaluasi LKjIP	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	2 Kegiatan			53.212.000		53.212.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.15.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80 obyek pemeriksaan	0		555.990.000	80 obyek pemeriksaa n	527.990.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.2.15.2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Audit kasus, Audit Kinerja, Audit Tematik, Probitiy Audit, pengawasan SPIP	15 obyek pemeriksaan	0		88.215.000	15 obyek pemeriksaa n	128.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.2.15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000 Rekomendasi	0		284.080.000		284.080.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1 keg	0		35.056.000	1 kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.2.15.10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD OPD dan Reviu BUD	2 kegiatan	0		65.192.000		65.192.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.2.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan dan verifikasi aksi PPK	4 Laporan	0		77.000.000		77.000.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
9	4.2.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	...jumlah ASN	0		22.000.000		22.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.2.15.25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	4 laporan	0		153.620.000	4 laporan	135.620.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.2.15.33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya REVIU RKPD, RENJA, KUAPPAS, RKA	4 laporan	0		95.234.000		95.234.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.2.15.34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Terevaluasinya pelaksanaan PBJ dan Penyerapan Anggaran	3 kegiatan			46.039.000		46.039.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.2.15.35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aparaturnegara	6 laporan			251.889.000	6 laporan	167.709.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
14	4.2.15.40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Penyajian data hasil pengawasan sebagai bahan pertimbangan keputusan kepada pimpinan	2 laporan			23.172.000		23.172.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
15	4.2.15.47	Review Dana Alokasi Khusus	terpenuhinya revidana alokasi khusus (DAK)	2 kegiatan			0	2 kegiatan	59.299.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
16	4.2.15.43	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	Terselenggaranya aduan dan permasalahan di lingkungan pemda	6 laporan			650.344.000	6 laporan	340.594.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
17	4.2.15.44	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Terlaksananya Koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan pendampingan pembangunan gedung kantor				319.255.000	1 unit gedung	319.255.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
	4.2.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturnegara			0		186.444.000		266.444.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2									
			Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	65%									
			Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	70%									
1	4.2.16.3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan audiwan	34 laporan hasil penilaian angka kredit jabfung	0		26.900.000		26.900.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.2.16.6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tercapainya Kapabilitas APIP yang lebih baik	Leveling Kapabilitas APIP mendekati level 4	0		101.219.000	4 levelling kapabilitas	181.219.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.16.8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Terlayannya OPD dalam penyelesaian masalah	12 laporan			58.325.000		58.325.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			0		104.065.000		100.065.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%									
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?									
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%									
1	4.2.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 dokumen	0		17.970.000		17.970.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.2.17.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi	2 laporan			52.110.000	2 laporan	48.110.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.2.17.11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi	4 laporan			33.985.000		33.985.000	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
	4.2.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal			185.346.000		247.246.000		208.461.000				
			prosentase implementasi SPIP										
1	4.2.18.1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	6 kegiatan	6 kegiatan	0		61.900.000	6 kegiatan	61.900.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.2.18.2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	4 kegiatan	132.100.000		132.100.000	4 kegiatan	109.315.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
3	4.2.18.3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya kegiatan SPIP	2 kegiatan	53.246.000		53.246.000	2 laporan	37.246.000	Inspektorat	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
				TOTAL	195.708.000		11.034.996.000		11.522.179.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
URUSAN : Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			653.546.000		693.632.000		789.698.000				
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	91 materai, 10 paket pengiriman	755.000	91 materai, 10 paket pengiriman	755.000	91 materai, 10 paket pengiriman	755.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik	72.000.000	2 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik	72.000.000	2 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik	81.600.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	26 kendaraan dinas	8.283.000	26 kendaraan dinas	8.085.000	26 kendaraan dinas	9.650.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	142.152.000	11 orang, 24 bendel	167.352.000	11 orang, 24 bendel	167.352.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	69.151.000	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	68.558.000	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	73.292.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	30 item	17.437.000	30 item	17.437.000	30 item	16.436.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	16.219.000	3 item	16.220.000	3 item	15.220.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen	5.094.000	14 komponen	5.094.000	14 komponen	5.094.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7.080.000	5 jenis	7.080.000	5 jenis	7.080.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	14.538.000	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	10.602.000	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	10.602.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	47 pegawai, 10 rapat, 150 org tamu	32.005.000	47 pegawai, 10 rapat, 150 org tamu	32.005.000	47 pegawai, 10 rapat, 150 org tamu	24.015.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	41 perjalanan dinas luar daerah	172.972.000	41 perjalanan dinas luar daerah	172.950.000	45 perjalanan dinas luar daerah	262.960.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam	95.860.000	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam	115.494.000	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam	115.642.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			250.856.000		244.156.000		303.141.000				
1	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	3 jenis pemeliharaan gedung	35.537.000	3 jenis pemeliharaan gedung	35.537.000	3 jenis pemeliharaan gedung	39.822.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26 kendaraan dinas	170.400.000	26 kendaraan dinas	166.200.000	26 kendaraan dinas	209.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 item	13.319.000	11 item	13.319.000	11 item	13.319.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	26.600.000	14 item	24.100.000	14 item	35.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	5.000.000	4 item	5.000.000	4 item	5.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			85.349.000		85.349.000		85.349.000				
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	16.490.000	12 laporan	16.490.000	12 laporan	16.490.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 buku	8.508.000	6 buku	8.508.000	6 buku	8.508.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	8.509.000	5 buku	8.509.000	5 buku	8.509.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 kegiatan	13.656.000	2 kegiatan	13.656.000	2 kegiatan	13.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	18.356.000	2 dokumen	18.356.000	2 dokumen	18.356.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJP Bappeda	1 dokumen	4.830.000	1 dokumen	4.830.000	1 dokumen	4.830.000	Bappeda kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.3.6.28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya dokumen perubahan renstra OPD	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			105.000.000		57.000.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		90%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		80%		80%					
1	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku	105.000.000	40 buku	57.000.000	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			4.545.000		4.545.000		4.545.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln					
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		52%		52%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		53%		53%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan	4.545.000	1 kegiatan	4.545.000	1 kegiatan	4.545.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			212.934.000		132.766.000		0				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		3		3					
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1 kegiatan	212.934.000	1 kegiatan	132.766.000	0	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			2.465.468.000		2.486.676.000		3.649.893.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.47	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD	Terlaksananya verifikasi Renstra OPD	29 OPD	123.700.000	29 OPD	114.700.000	29 OPD	114.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	2 dokumen	302.506.000	2 dokumen	298.966.000	2 dokumen	298.966.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang	200 peserta	144.121.000	200 peserta	142.539.000	200 peserta	142.539.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.3.21.10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen Perwal RKPD	1 perwal	32.645.000	1 perwal	32.645.000	1 perwal	32.645.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	4 laporan	19.000.000	4 laporan	19.000.000	4 laporan	19.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum OPD	1 forum 10 FGD	199.823.000	1 forum 10 FGD	199.823.000	1 forum 10 FGD	199.823.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	4 Media Publikasi	57.800.000	4 Media Publikasi	84.080.000	4 Media Publikasi	84.080.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	121.032.000	29 OPD	121.032.000	29 OPD	121.032.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	2 dokumen	137.700.000	2 dokumen	132.950.000	1 dokumen	132.950.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen perubahan RKPD	1 dokumen perwal	27.043.000	1 dokumen perwal	27.043.000	1 dokumen perwal	27.043.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	121.074.000	29 OPD	121.074.000	29 OPD	121.074.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 laporan	51.000.000	4 laporan	51.000.000	4 laporan	51.000.000	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	2 dokumen	157.000.000	2 dokumen	149.000.000	2 dokumen	133.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 Laporan	93.000.000	4 Laporan	97.000.000	4 Laporan	111.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
15	4.3.21.49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis	1 dokumen	180.950.000	1 dokumen	170.650.000	1 dokumen	170.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	4.3.21.6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya musrenbang RPJMD	29 OPD	85.360.000	29 OPD	91.120.000	29 OPD	91.120.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
17	4.3.21.44	Konsultasi Publik RPJMD	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD	29 OPD	55.050.000	29 OPD	55.050.000	29 OPD	55.050.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
18	4.3.21.46	Forum OPD dan FGD RPJMD	Terlaksananya Forum OPD dan FGD RPJMD	29 OPD	138.150.000	29 OPD	138.150.000	29 OPD	138.150.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
19	4.3.21.70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan	1 dokumen	86.404.000	1 dokumen	86.844.000	0	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
20	4.3.21.75	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya perubahan RPJMD	29 OPD	332.110.000	29 OPD	354.010.000	29 OPD	354.010.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
21	4.3.21.79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya laporan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		0		0	6 dokumen	1.252.061.000	bappeda	Banprov & DAU		Kota Layak Anak, SDGs, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			1.114.152.000		915.468.000		884.618.000				
1	4.3.22.67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB	1 dokumen	116.102.000	1 dokumen	108.402.000	1 dokumen	104.352.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	1 dokumen	145.500.000	1 dokumen	145.500.000	1 dokumen	145.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.22.64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	1 dokumen	196.980.000	1 dokumen	188.232.000	1 dokumen	161.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	4.3.22.52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Tersusunnya dokumen rencana induk Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	1 dokumen	475.000.000	1 dokumen	473.334.000	1 dokumen	473.334.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	4.3.22.62	Penyusunan Dokumen Pengembangan Agribisnis Hortikultura	tersedianya dokumen pengembangan agribisnis hortikultura	1 dokumen	180.570.000	0	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya			952.388.000		801.386.000		489.966.000				
					5,025,879,000								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%		100%		100%					
1	4.3.23.52	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1 Dokumen	171.880.000	1 Dokumen	157.552.000	1 Dokumen	153.552.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	1 dokumen	165.877.000	1 dokumen	113.913.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
3	4.3.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Dokumen Laporan Monev	0		0 2 laporan	53.211.000		0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		SDGs
4	4.3.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 laporan, 4 kegiatan	116.914.000	2 laporan, 4 kegiatan	75.197.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
5	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	4 laporan	27.919.000	4 laporan	28.214.000	4 laporan	28.214.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.3.23.49	Monitoring dan Evaluasi SDG's	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang			0 4 laporan	60.999.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.3.23.50	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya pedoman pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang	25 buku	167.507.000	25 buku	159.927.000	25 buku	155.827.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.3.23.947	Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro	Tersusunnya dokumen masterplan wisata diponegara			1 Dokumen	152.373.000	1 Dokumen	152.373.000	Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.3.23.54	Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman	Tersusunnya dokumen masterplan pengembangan wisata sudirman	1 dokumen	163.398.000					Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.3.23.33	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's	Terlaksananya RAD SDG's	100%	138.893.000					Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			1.508.882.000		1.455.888.000		1.446.008.000				
			cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%		100%		100%					
1	4.3.26.44	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	tersedianya dokumen	1 dokumen	363.472.000	1 dokumen	359.906.000	1 dokumen	355.406.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
2	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	1 dokumen	68.694.000	1 dokumen	100.095.000	1 dokumen	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.3.26.39	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	1 dokumen	317.593.000	1 dokumen	254.683.000	1 dokumen	254.000.000	Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	4.3.26.41	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	1 dokumen	146.770.000	1 dokumen	209.270.000	1 dokumen	209.000.000	Kawasan Sukarno Hatta Cangkuk (delineasi kawasan Pasar Induk)	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	4.3.26.43	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum	1 dokumen	294.953.000	1 dokumen	295.010.000	1 dokumen	294.000.000	Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang, dan Sumber Mata Air Daerah	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.3.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	tersedianya arahan visual pengembangan kawasan prioritas yang segera untuk ditangani : koridor jalan, taman, landmark, lapangan olah raga, PKL dsb	1 dokumen	99.000.000	1 dokumen	95.602.000	1 dokumen	95.602.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.3.26.45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	1 Laporan	121.575.000	1 Laporan	141.322.000	1 Laporan	139.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.3.26.49	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	Tersedianya dokumen masterplan kampung tematik, terpadu dan hijau					0 1 dokumen	74.000.000	Kelurahan se-kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
9	4.3.26.40	Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Tersedianya dokumen monev program dan kegiatan OPD mendukung percepatan pembangunan sanitasi daerah	1 dokumen	96.825.000					Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			124.752.000		124.752.000		47.137.000				
			cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	37 pegawai	85.742.000	37 pegawai	85.742.000	37 pegawai	10.127.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah	29 OPD	39.010.000	29 OPD	39.010.000	29 OPD	37.010.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	7.473.972.000		7.001.618.000		7.700.355.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 URUSAN : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			578.358.000		629.005.000		417.890.000				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000		107.712.000	12 laporan	107.712.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	1 perwal	105.000.000		133.563.000	1 perwal	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000		63.296.000	12 laporan	46.664.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000		29.606.000	4 laporan	29.606.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000		218.564.000	29 OPD	157.644.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000		76.264.000	7 laporan	76.264.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.301.011.000		2.251.988.000		2.136.791.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000		460.882.000	1 raperda	451.882.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	1 dokumen	243.813.000		264.798.000	1 dokumen	261.294.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 raperda	372.118.000		378.100.000	1 raperda	339.667.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000		352.348.000	2 raperwal	314.320.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000		175.157.000	2 dokumen	169.157.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000		92.086.000	2 dokumen	92.086.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000		149.445.000	2 dokumen	136.865.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000		92.345.000	2 dokumen	92.345.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000		42.123.000	29 OPD	40.071.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000		46.302.000	29 OPD	42.802.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	74.783.000		72.351.000	29 OPD	67.151.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000		37.866.000	2 laporan	45.966.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000		43.151.000	29 OPD	41.651.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000		45.034.000	29 OPD	41.534.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			401.731.000		399.859.000		401.659.000				
1	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000		217.831.000	74 sekolah	219.631.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000		86.445.000	60 pegawai	86.445.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000		95.583.000	12 laporan	95.583.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			876.826.000		840.758.000		855.732.000				
1	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000		123.993.000	6 laporan	142.963.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	3000 SP2D	158.713.000		148.115.000	3000 SP2D	163.247.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000		53.764.000	29 OPD	53.764.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000		34.372.000	700 SPM	34.372.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000		29.786.000	29 OPD	29.786.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000		141.461.000	800 berkas	118.098.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000		38.671.000	1100 SP2D	38.671.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000		107.557.000	1500 berkas	107.557.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000		24.218.000	4 jenis dokumen	24.218.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000		138.821.000	470 daftar gaji	143.056.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.533.474.000		1.534.056.000		1.479.010.000				
1	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000		232.322.000	1 aplikasi	215.680.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000		202.699.000	12 dokumen	200.677.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000		111.196.000	348 laporan OPD	103.996.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000		108.027.000	12 laporan	108.817.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000		61.118.000	12 laporan	61.118.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000		254.275.000	120 orang	224.303.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000		43.782.000	1 dokumen	43.782.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000		465.853.000	12 laporan	465.853.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000		54.784.000	2 kegiatan	54.784.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			223.968.000		175.330.000		169.250.000				
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000		45.216.000	12 laporan	43.416.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000		13.608.000	2 laporan	13.608.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000		7.874.000	2 laporan	7.874.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000		65.197.000	1500 berkas	61.037.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000		6.161.000	1 dokumen	6.161.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.4.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tercapainya perubahan perencanaan dan strategi OPD		15.000.000		10.042.000	1 dokumen	10.042.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000		27.232.000	2 dokumen	27.112.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			366.120.000		366.120.000		188.400.000				
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000		1.000.000	12 bulan	1.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000		365.120.000	12 bulan	187.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.641.494.000		1.714.605.000		1.797.976.000				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000		874.396.000	12 bulan	861.196.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000		20.440.000	65 kendaraan	16.415.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000		60.271.000	22 jenis/item, 2 orang	63.951.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000		34.223.000	48 jenis	34.223.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000		25.971.000	15 jenis	25.971.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000		7.571.000	17 jenis	7.571.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000		15.400.000	3 jenis	15.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000		10.127.000	3 jenis	5.643.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000		105.862.000	12 bulan	134.626.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000		219.960.000	12 bulan	274.560.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honoror daerah	169.479.000		208.740.000	9 orang	226.776.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000		131.644.000	82 file	131.644.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			56.356.000		56.354.000		56.354.000				
1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000		56.354.000	1 dokumen	56.354.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			396.521.000		405.458.000		385.958.000				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000		199.965.000	1 Perda	192.465.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000		205.493.000	1 Perwal	193.493.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.307.269.000		3.308.487.000		3.401.818.000				
1	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000		130.700.000	36.200 SPPT	130.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek pajak PBB	219.676.000		239.876.000	1 peta obyek pajak PBB	237.735.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000		93.595.000	100 laporan	96.235.000	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	5 laporan, 1 kegiatan	317.051.000		318.457.000	5 laporan; 1 kegiatan	401.101.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000		50.739.000	4 laporan	42.803.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000		134.196.000	12 laporan; 1200 WP	131.096.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000		146.757.000	4 laporan	146.757.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	data tunggal pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000		162.878.000	120 data WP	164.268.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000		317.581.000	3 kegiatan	371.911.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000		383.023.000	12 bulan	371.023.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000		166.329.000	12 bulan	163.969.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000		118.448.000	12 bulan	121.088.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000		63.228.000	4 LHP atas Wajib Pajak	62.028.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000		281.043.000	17 kelurahan	272.643.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.863.000		103.580.000	50 SK	97.604.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000		199.351.000	28 laporan	199.351.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000		146.387.000	16 laporan	146.387.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	540 wajib pajak	54.674.000		54.670.000	540 Wajib Pajak	47.470.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000		53.058.000	12 laporan	53.058.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000		144.591.000	800 SKPD Pajak Reklame; 960 SKPD PAT; 12 Laporan Penataush. Pjk Reklame; 12 laporan Penataush.PAT	144.591.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			697.303.000		696.608.000		745.482.000				
1	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000		83.962.000	1 unit	83.962.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000		359.912.000	52 unit	317.015.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000		36.984.000	39 unit	30.365.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	10 jenis	207.000.000		206.500.000	10 jenis	158.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	29 buah	9.250.000		9.250.000	29 buah	12.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	ruang rapat	1 ruang rapat	0		0	1 ruang rapat	119.940.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC	2 unit	0		0	2 unit	23.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			150.858.000		137.214.000		137.214.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000		137.214.000	40000 dokumen	137.214.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.511.658.000		6.515.332.000		6.727.132.000				
1	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000		66.900.000	223 bidang	66.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	17 unit	433.984.000		442.883.000	17 unit	446.039.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000		51.276.000	4 laporan	51.276.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000		30.000.000	20 SPPT	30.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.19.34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	12 orang	489.250.000		485.608.000	12 orang	538.362.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000		86.495.000	1 laporan	86.495.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	120.925.000		119.384.000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	94.584.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000		43.287.000	3 kegiatan penelitian	43.287.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000		256.559.000	8 jenis laporan; 1 aplikasi SIM Aset	366.715.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelola barang	92.220.000		86.861.000	185 pejabat pengelolaan barang	84.221.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000		124.516.000	10 dokumen	114.746.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.4.19.16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000		214.990.000	12 bulan; Papan Kepemilikan Tanah	307.490.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000		64.111.000	2 lapangan	67.267.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000		52.521.000	4 paket	52.521.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000		90.045.000	12 keg	85.590.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/ mess	628.612.000		628.281.000	7 rumah dinas/ mess	565.536.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000		71.486.000	7 kegiatan	107.654.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	25.617.000		25.466.000	6 keg	36.244.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.19.15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000		87.592.000	3 paket	63.992.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	328.807.000		326.557.000	12 bidang	321.981.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
21	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000		38.400.000	17 unit	38.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000		54.027.000	3 Kegiatan	131.722.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
23	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000		132.706.000	4 kegiatan	132.706.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
24	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 paket	354.195.000		354.024.000	3 paket	312.047.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
25	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000		18.070.000	2 bidang	18.070.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000		55.455.000	3 kecamatan	55.455.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
27	4.4.19.38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodifikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodifikasi barang	1 Perwal	47.575.000		55.358.000	1 Perwal	55.358.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	4.4.19.39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000		2.452.474.000	2 bus	2.452.474.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
				TOTAL	19.042.947.000		19.031.174.000		18.900.666.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT AS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			350.408.000		393.237.000		396.393.000				
1	4.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	150 buah	780.000	150 buah	600.000	150 buah	600.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy dan faksimili	12 bulan	29.400.000	12 bulan	33.600.000	12 bulan	33.600.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	16 unit	6.000.000	16 unit	6.780.000	16 unit	6.780.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang mendapat honorarium	108 ob	100.310.000	108 ob	142.469.000	108 ob	142.469.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	20 jenis	7.300.000	20 jenis	7.300.000	20 jenis	7.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 jenis	25.518.000	53 jenis	14.001.000	53 jenis	14.001.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 jenis	21.195.000	13 jenis	12.985.000		12.985.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 jenis	2.000.000	6 jenis	1.062.000	6 jenis	1.062.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12 bulan	4.990.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU

10	4.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman dan Jumlah Peserta Rapat	390 orang dan 12 bulan	25.208.000	12 bln dan 390 orang	25.256.000	12 bulan dan 390 orang	25.256.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	4.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	117.450.000	12 bulan	99.686.000	12 bulan	99.686.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	4.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	41 dokumen	10.257.000	41 dok	7.235.000	41 dokumen	7.235.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	4.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga front office			24 ob	39.263.000	24 ob	42.419.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			215.960.000		178.605.000		271.368.000			
			Persentase SKPD yang menerapkan finger print	79%								
1	4.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 unit	157.424.000	16 unit	140.080.000	16 unit	138.912.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 unit	5.536.000	11 unit	7.315.000	11 unit	7.315.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	41 unit	40.000.000	55 unit	27.810.000	55 unit	27.810.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	20 buah	5.000.000	17 buah	3.400.000	17 buah	3.400.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	71 unit	8.000.000	0	0	18 unit	66.516.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	4.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			0	0	1 unit	7.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	4.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 buah		0	0	4 buah	13.590.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	4.5.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 buah		0	0	1 unit	6.325.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			197.900.000		135.410.000		130.150.000			
			Persentase kehadiran ASN	97%								
			Persentase pelanggaran disiplin ASN	0.21%								
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	95%								

			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	85%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%									
1	4.5.3.6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin PNS	1800 laporan	197.900.000	1800 laporan	135.410.000	1800 laporan	130.150.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
	4.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			64.831.494		75.763.000		75.763.000				
1	4.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 buku	13.602.750	12 buku	12.404.000	12 laporan	12.404.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
2	4.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	6.390.321	1 laporan	5.206.000	1 laporan	5.206.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
3	4.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 laporan	10.442.523	1 laporan	9.854.000	1 laporan	9.854.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
4	4.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 dokum en	7.717.500	2 dok	9.079.000	2 dokume n	9.079.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
5	4.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 dokum en	19.792.500	2 dok	20.178.000	2 dokume n	20.178.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
6	4.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokum en	6.885.900	1 dok	4.042.000	1 dokume n	4.042.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
7	4.5.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Jumlah dokumen Perubahan Renstra			1 dok	15.000.000	1 dokume n	15.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Rencan a

	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.941.551.000		4.017.357.000		3.856.671.000				
					6,926,097,000								
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	47%									
			Pendidikan S2	9%									
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46									
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%									
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%									
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.08%									
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%									
1	4.5.15.70	Manajemen Kinerja Aparatur	Jumlah pedoman penilaian kinerja pegawai	1 dokum en		1 dok	140.973.000	1 dokume n	140.973.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
2	4.5.15.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12 bulan	125.116.000	12 bln dan 390 orang	229.354.000	12 bulan	229.354.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
3	4.5.15.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	3000 orang	624.589.000	3000 org	592.510.000	3000 orang	0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
4	4.5.15.3	Penempatan PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan Mengikuti sumpah/janji	150 orang	39.888.000	150 org	37.664.000	150 orang	37.664.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM

5	4.5.15.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, kartu ID card, DUK, buku jabatan, Struktur jabatan	3100 orang	195.000.000	3100 org	138.049.000	3100 orang	138.049.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
6	4.5.15.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Tanda Jasa Satya Lancana yang diusulkan dan kepesertaan BPJS Kesehatan/Bapertarum	150 orang	40.500.000	150 org	23.481.000	150 orang	23.481.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	4.5.15.9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	5 kasus & 6 laporan konsultasi	167.600.000	5 kasus dan 6 lap	92.914.000	5 kasus dan 6 laporan	87.342.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	4.5.15.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan BinteK	240 orang	750.000.000	300 orang	438.144.000	225 orang	253.844.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	4.5.15.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 dokumen	50.000.000	1 dok	38.133.000	1 dokumen	48.103.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
10	4.5.15.22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	150 SK	14.000.000	150 SK	9.242.000	150 SK	9.242.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
11	4.5.15.23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	25 orang	25.477.000	25 org	29.900.000	36 orang	35.650.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

12	4.5.15.24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	400 SK	17.150.000	400 SK	17.150.000	400 SK	17.150.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
13	4.5.15.26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah Nota persetujuan NIP dan SK CPNS	150 buah	102.670.000	150 buah	104.345.000	150 buah	104.345.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
14	4.5.15.28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perjanjian kontrak	66 buah	19.000.000	66 buah	23.773.000	66 buah	17.473.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
15	4.5.15.30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah layanan dan update data pegawai (mutasi, gelar, KP, dan pensiun)	1200 PNS	68.750.000	1200 PNS	65.095.000	1200 PNS	65.095.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Mempe rkuat Implem entasi Masterp lan Smartcit y
16	4.5.15.31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150 buah	56.852.000	150 buah	78.229.000	150 buah	73.972.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
17	4.5.15.33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	176 orang	308.000.000	176 orang	427.411.000	176 orang	427.411.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
18	4.5.15.34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	3 kali	116.618.000	3 kali	91.425.000	4 kali	100.580.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
19	4.5.15.35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen elektronik dan jumlah buku formasi	1 dokum en dan 3 buku	73.686.000	1 dok dan 3 buku	79.983.000	1 dokume n dan 3 buku	79.983.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM

20	4.5.15.40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	450 buah	88.875.000	450 buah	90.550.000	450 buah	88.550.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
21	4.5.15.41	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6106 dokumen	45.000.000	6106 dok	37.121.000	6106 dokumen	37.121.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
22	4.5.15.42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian digital	20000 dokumen	59.000.000	20000 dok	48.586.000	20000 dokumen	48.586.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
23	4.5.15.44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK Pensiun dan piagam penghargaan penghargaan purna tugas	370 buah	74.980.000	370 bh	103.949.000	370 buah	146.710.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
24	4.5.15.55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah penyelenggaraan Mutasi dan seleksi JPT	3 kegiatan		3 keg	423.775.000	6 kegiatan	505.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
25	4.5.15.60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	206 orang	626.900.000	206 org	109.322.000	206 orang	109.322.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

26	4.5.15.61	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK	6 orang	45.000.000	6 org	47.799.000	4 orang	32.799.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
27	4.5.15.63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar	18 orang	20.000.000	20 org	11.000.000	20 orang	11.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
28	4.5.15.67	Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur	Jumlah rancangan peraturan/pedoman manajemen SDM aparatur	4 dokum en		4 dok	86.214.000	4 dokume n	86.214.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
29	4.5.15.79	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi calon ASN		0	3000 org	0	4500 orang	542.744.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
30	4.5.15.38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji kompetensi	100 orang	186.900.000	100 org	203.682.000	100 orang	169.172.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
31	4.5.15.27	Penataan dan Penyelesaian Adminsitasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	Jumlah KARIS/KARSU/KPE/KARPEG/TASPEN yang diterbitkan	300 buah		300 bh	86.093.000	200 buah	48.773.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
32	4.5.15.65	verifikasi dan Monitoring STK SKP	Jumlah dokumen PSTK SKP	29 dokum en		29 dok	16.541.000	29 dokume n	16.541.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
33	4.5.15.68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN	1 dokum en		1 dok	47.907.000	1 dokume n	47.907.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
34	4.5.15.72	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah SK mutasi PNS	150 SK		150 sK	47.043.000	150 SK	47.043.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM

35	4.5.15.59	Penetapan Jabatan Fungsional Umum ASN	Jmlah SK			0		29.443.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Progra m prioritas RPJM
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan										
	4.6.15	Program Pendidikan Kedinasan			1.350.000.000		1.503.478.000		1.560.178.000			
1	4.6.15.1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	92 orang	350.000.000	72 org	200.000.000	100 orang	270.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
2	4.6.15.2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan perjenjangan struktural	32 orang	1.000.000.000	38 org	1.303.478.000	38 orang	1.290.178.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan										
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			15.000.000		6.571.000		6.571.000			
					839,992,000							
			SETWAN	12 bln	26,000,000							
			DPPKD		143,000,000							
			KESBANGPOL		28,587,000							
			BKD		15,000,000							
			DPP		25,830,200							
			LITBANG		50,000,000							
			PERPUS		247,075,000							
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%								
			Persentase arsip dan risalah	82%								
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%								
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan arsip	12 bulan	15.000.000	12 bln	6.571.000	12 bulan	6.571.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4,6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan										
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			850.000.000		1.837.617.000		2.009.223.000			
1	4.6.16.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	450 orang		450 org	46.767.000	450 orang	46.767.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	Progra m prioritas RPJM

2	4.6.16.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	150 orang	600.000.000	154 org	1.620.850.000	154 orang	1.620.850.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.6.16.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	27 orang	250.000.000	24 org	170.000.000	44 orang	341.606.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
				TOTAL	6.985.650.494		8.148.038.000		8.306.317.000				

MATRIKS
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
 URUSAN : Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan											
	4.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			543.800.000		472.155.000		491.446.000				
1	4.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	12 bulan	38.000.000		32.004.000	12 bulan ; 4 rekening	25.404.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
2	4.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjang STNK dan PKB Kendaraan Dinas	10 Kendaraan Dinas operasional	6.500.000		6.000.000	10 Kendaraan dinas/operasional : 7 motor, 3 mobil	6.250.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
3	4.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 bulan	95.000.000		84.000.000	12 bulan	85.092.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
4	4.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	33 jenis ; 2 THL	53.000.000		55.898.000	31 jenis ; 2 THL	56.198.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
5	4.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	46 jenis	22.000.000		19.000.000	52 jenis	19.000.000	BALITBANG	DAU		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor	9 jenis	22.000.000		17.000.000	9 jenis	17.000.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
7	4.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	9 jenis	14.000.000		7.000.000	9 jenis	7.000.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
8	4.7.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	8 jenis	13.000.000		3.320.000	8 jenis	3.320.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
9	4.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	12 bulan : 3 jenis surat kabar	12.500.000		4.500.000	12 bulan ; 3 surat kabar	3.480.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
10	4.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	12 tabung	5.000.000		1.643.000	9 tabung	1.350.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
11	4.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, snack dan Minum	600 orang	22.000.000		20.000.000	26 pegawai ; 420 rapat : 150 tamu	24.620.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
12	4.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100 kegiatan	175.000.000		130.603.000	74 kegiatan	150.745.000	Dalam dan luar Jateng-DIY	DAU		ExBAU
13	4.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	2 orang ; 2 jenis pakaian lapangan	55.800.000		87.440.000	4 orang tenaga tidak tetap	88.040.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
14	4.7.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	2 jenis	10.000.000		2.747.000		2.747.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
15	4.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen dinas	75 perangko ; 28 surat/dokumen			1.000.000	60 perangko, 30 surat/dokumen	1.200.000	Dalam dan luar Kota Mgl	DAU		ExBAU
	4.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			383.000.000		162.833.000		151.342.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	4 jenis	0		0	0	0	BALITBANG	DAU		ExBAU
2	4.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	1900 m2	70.000.000		31.063.000	488,73 m2 gedung, 1500 m2 halaman	31.063.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
3	4.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	9 kendaraan dinas operasional	230.000.000		116.000.000	10 kendaraan dinas : 3 mobil dan 7 motor	98.509.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
4	4.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	12 jenis	30.000.000		5.020.000	8 jenis	5.020.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
5	4.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	2 jenis	45.000.000		7.750.000	5 jenis	13.750.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
6	4.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	4 buah kursi tamu	8.000.000		3.000.000	4 buah kursi tamu	3.000.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
7	4.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur Kantor	0	0		0	0	0	BALITBANG	DAU		ExBAU
8	4.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	0	0		0	0	0	BALITBANG	DAU		ExBAU
	4.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			93.000.000		90.236.000		90.236.000				
1	4.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	4 jenis	13.000.000		25.260.000	4 jenis laporan	25.260.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
2	4.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja SKPD dan Renja perubahan SKPD	2 dokumen	13.000.000		13.297.000	2 dokumen	13.297.000	BALITBANG	DAU		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKAP	4 dokumen	30.000.000		13.494.000	4 dokumen	13.494.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
4	4.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD	5 buku	11.000.000		6.804.000	5 buku	6.804.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
5	4.7.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD	2 dokumen	11.000.000		14.999.000	1 dokumen	14.999.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
6	4.7.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian kegiatan operasional dan Focus Discussion Group (FGD)	4 laporan	15.000.000		16.382.000	4 laporan	16.382.000	BALITBANG	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan, ExBAU
	4.7.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi			412.970.000		623.810.000		599.510.000				
1	4.7.15.6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk teknologi dan inovasi	3 kegiatan			146.216.000	3 kegiatan	151.216.000	Jawa Tengah, dan luar Jawa Tengah	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	4.7.15.1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova Terjaring	17 produk berkualitas	140.000.000		135.594.000	3 kegiatan	115.294.000	Kota Magelang	DAU		Tema RKPD 2019, Program prioritas RPJM
3	4.7.15.4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDA sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDA)	2 kegiatan	53.125.000		42.384.000	2 kegiatan	42.384.000	Kota Magelang	DAU		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.7.15.2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya	3 Kegiatan	219.845.000		228.097.000	3 kegiatan	218.097.000	Pemerintah Kota Magelang	DAU		Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
5	4.7.15.5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya Inovasi OPD-BUMD sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan OPD-BUMD	3 Pemenang ; 34 Peserta			71.519.000	3 kegiatan	72.519.000	Kota Magelang	DAU		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		12.000.000		12.000.000				
					839,992,000								
			SETWAN	12 bln	26,000,000								
			DPPKD		143,000,000								
			KESBANGPOL		28,587,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		25,830,200								
			LITBANG		50,000,000								
			PERPUS		247,075,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%									
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	12 bulan	0		12.000.000	12 bulan	12.000.000	BALITBANG	DAU		ExBAU
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan											
	4.7.16	Program Penelitian dan Pengkajian			245.000.000		567.063.000		563.463.000				
1	4.7.16.37	Fasilitasi Penelitian Mandiri	Terfasilitasinya penelitian mandiri	0			0	0	0	Kota Magelang	DAU		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.7.16.2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 dokumen	140.000.000		115.667.000	1 dokumen	115.667.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
3	4.7.16.3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	50 buku	105.000.000		94.320.000	1 dokumen	90.720.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
4	4.7.16.38	Fasilitasi Penyusunan Buku Ilmiah/Bunga Rampai	Terfasilitasinya penyusunan buku ilmiah/bunga rampai	0			0	-	0	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
5	4.7.16.9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang	2 Dokumen			99.326.000	2 Dokumen	99.326.000	Kota Magelang	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
6	4.7.16.8	Pengelolaan Open Journal System	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan	2 nomor jurnal			101.611.000	2 volume jurnal	101.611.000	Kota Magelang	DAU		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.7.16.36	Analisis Budaya Lokal Kota Magelang	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.	1 dokumen			105.270.000	1 dokumen	105.270.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
8	4.7.16.39	Jajak Pendapat Masyarakat	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.	1 dokumen			50.869.000	1 dokumen	50.869.000	Kota Magelang	DAU		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4.7.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan			23.000.000		27.572.000		27.572.000				
			Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	12%									
			Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	60%									
			Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	5%									
			Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	10%									
			Cakupan Penguatan SIDA	45%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	45%									
1	4.7.17.2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terkelolanya pelaksanaan riset dan kebijakan dengan baik	1 dokumen	23.000.000		27.572.000	3 kegiatan	27.572.000	Kota Magelang	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4.7.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi			100.475.000		50.211.000		50.211.000				
1	4.7.18.1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar selain Merk	10 produk yang didaftarkan	100.475.000		50.211.000	10 produk yang didaftarkan	50.211.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
	4.7.19	Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan			337.544.000		559.588.000		579.688.000				
					5,240,000,000								
			Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	14%									
			Presentase krenova OPD yang berkualitas	6%									
			Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	35%									

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2019	RENJA 2019	TARGET APBD	APBD 2019	TARGET RENJA P 2019	RENJA P 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	12%									
1	4.7.19.5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi berbasis Peningkatan Kapasitas SDM	4 Produk			218.020.000	4 Produk	218.020.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
2	4.7.19.14	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	Terfasilitasinya inkubasi bisnis teknologi dan inovasi	2 produk			71.536.000	2 produk	74.441.000	Kota Magelang, Puspipstek Serpong	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
3	4.7.19.1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan, dan jejaring penelitian dan pengembangan	1 seminar & 1 workshop	173.994.000		70.467.000	1 seminar dan workshop	71.012.000	Kota Magelang	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
4	4.7.19.3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	4 kegiatan	163.550.000		84.845.000	4 kegiatan	88.445.000	Kota Magelang	DAU		Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
5	4.7.19.16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	Terfasilitasinya Jejaring Penelitian dan Pengembangan	2 seminar			41.800.000	2 seminar	39.900.000	Indonesia	DAU		Program prioritas RPJM
6	4.7.19.9	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Anugerah IPTEK	3 Penghargaan			72.920.000	mengikuti 3 penghargaan	87.870.000	Kota Magelang	DAU		Program prioritas RPJM
				TOTAL	2.138.789.000		2.565.468.000		2.565.468.000				

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimulai sejak penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Penetapan Indikator Kinerja Daerah dipertegas dalam bab tersendiri. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda dari regulasi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Utama Kota Magelang dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang sebagaimana tertuang pada Tabel 6-1 dan 6-2 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,18% ± 0,25%	5,04% ± 0,25%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahundasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	58.309.122,98	63.394.588,17	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,57% - 5,15%	3,36% - 4,94%	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,3435-0,3637	0,343-0,3569	0,3421-0,3523	0,341-0,3489	0,3397-0,3461	0,338-0,3438	0,338-0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0892	0,0804	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	7,41% – 8,09%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,61	76,9	77,26	77,61	78	78,37	78,37
a	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
b	Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,27 Tahun	13,45 Tahun	13,63 Tahun	13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
c	Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,67 Tahun	76,71 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
d	Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	10.886.000	11.083.570	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,79	95,9	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	78,96	79,2	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,43% - 6%	6% - 5%	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,353%	0,244%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	FokusUrusanPemerintahanWajibPelayananDasar								
a	Pendidikan								
1	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
2	Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	APM SD	96,51%	96,91%	97,31%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
4	APK SD	108,15%	110%	112%	114%	116%	118%	120%	120%
5	APM SMP	74,62%	75%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
6	APK SMP	81,92%	82%	85%	88%	90%	96%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
8	Persentase sarana prasarana penyedia layananpendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan								
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	3 buah(23%)	5 buah(15%)	7 buah(54%)	10 buah (77%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)
2	Angka KematianIbu/ 100.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
3	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
4	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
8	Angka Prevalensi TB	128.33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
1	Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau								
	- Privat	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasi obangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
	2 Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
	3 Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4 Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
	5 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4 Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	13,14%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	11,50%	12%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial								
	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar								
a	Tenaga Kerja								

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	PemberdayaanPerempuanPerlindunganAna k								
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
c	Pangan								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.780 Ton	12.831 Ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	LingkunganHidup								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	58	62	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuangke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	PemberdayaanMasyarakatdanDesa								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
h	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal								
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5buah	6buah	6buah	7buah	7buah	8buah	8buah	8buah
	- Regional	4buah	4buah	4buah	5buah	5buah	6buah	6buah	6buah
	- Nasional	1buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah
	- internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14buah	17buah	17buah	17buah	17buah	17buah	20buah	20buah
	- Regional	8buah	10buah	10buah	10buah	10buah	10buah	11buah	11buah
	- Nasional	4buah	5buah	5buah	5buah	5buah	5buah	6buah	6buah
	- internasional	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	3buah	3buah
k	Statistik								
1	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan								
1	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
2	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
3	Perlindungan situs a tau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
m	Perpustakaan								
1	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
2	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan								
1	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan								
a	Pariwisata								
1	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,40%	3,60%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
2	Jumlah Wisatawan								
-	Nusantara (orang)	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
-	Mancanegara (orang)	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan								
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
2	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar Inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
3	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a	Perencanaan								
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Keuangan								
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	19,73%	26,34%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
2	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
3	Rasioke tergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	NilaiOpini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, PendidikandanPelatihan								
1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	PenelitiandanPengembangan								
1	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain								
1	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
2	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
4	Persentasepelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
5	Persentase perkembangan kerja sama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
6	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
7	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C	APEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,26	56,21	57,00	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	74,80 (B)	75 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
3	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	79%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
4	Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (48,90 – 51,5)	Scattered (51,6 – 54,5)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
5	Tingkat Kerukunanhidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6-2
Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan menuju cerdas dan berdaya saing.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Banyaknya murid (SD/MI) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SD/MI) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Banyaknya murid usia (7-12 th) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (7-12 th) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	Banyaknya murid (SMP/MTs) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SMP/MTs) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Banyaknya murid usia (12-15 th) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (12-15) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
	6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	- Dinas Kesehatan	- Data IPM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. AKI/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	3. AKB/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	4. AKABA	Angka	Jumlah kematian balita dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	5. Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita penderita gizi buruk berdasarkan pengukuran Berat Badan Menurut Umur serta Berat Badan Menurut Tinggi Badan berada di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Balita pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Balita yang ditimbang x 100%	- Dinas Kesehatan	- Data F3 Gizi
	6. Angka Kesakitan DBD	Angka	Jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibagi Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama x 10.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Kewaspadaan Dini RS
	7. Angka Prevalensi Kasus TB	Angka	Jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati selama setahun dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistim Informasi TB Terpadu
	8. Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	%	Jumlah penderita HIV usia 15-49 tahun yang ditemukan selama setahun dibagi Jumlah estimasi populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi HIV-AIDS
Meningkatnya kontribusi sektor, perdagangan bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	PDRB sektor perdagangan/Total PDRB	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Data PDRB
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dengan 3 Indeks yaitu: Indeks pencemaran air, Indeks	- Dinas Lingkungan Hidup	- Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pencemaran udara dan Indeks tutupan vegetasi; Indeks Pencemaran Air sbb: $P_i = \sqrt{(C_i/L_i)_{\max}^2 + (C_i/L_i)_{\text{rataan}}^2}$ Indeks Pencemaran Udara sbb: $IP = NO_2 + IP_{SO_2}$ Indeks Tutupan Vegetasi sbb: $LHP + LHS$		
Meningkatnya kualitas infrastruktur Kota Magelang	1. Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	%	Panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1. Luas Kawasan Kumuh	ha	Rasio Luas kawasan kumuh (Luas Kawasan Kumuh dalam Ha)	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Kawasan Kumuh per Kelurahan
	2. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah RTLH dibagi Jumlah total rumah x 100%	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Perumahan per Kelurahan
Meningkatnya keamanan, dan keselamatan transportasi di Kota Magelang	1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	Tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk per 100.000	- Dinas Perhubungan	- Data Keselamatan Lalu Lintas
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Jumlah Investor	Investor	Jumlah investor	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investor
	2. Pertumbuhan nilai investasi PMA	%	$\{(\text{nilai investasi PMA th n} - \text{nilai investasi PMA th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100 \%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
	3. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	$\{(\text{nilai investasi PMDN th n} - \text{nilai investasi PMDN th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100 \%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	Jumlah Stok Beras (Ton)	- Dinas Pertanian dan Pangan	- Data Ketersediaan Pangan
Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	$(\text{Jumlah pengangguran terbuka} / \text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100 \%$	- Dinas Tenaga Kerja	- Data Ketenagakerjaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Penurunan PMKS	%	$(\text{Jumlah PMKS tahun n-1} - \text{jumlah PMKS tahun n} / \text{jumlah PMKS tahun n-1}) \times 100 \%$	- Dinas Sosial	- Data Kesejahteraan Sosial
	2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	Pendapatan yang diterima oleh masing-masing kepala penduduk. Pendapatan perkapita	- OPD Lintas Sektor	- Data PDRB

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		
	3. Angka Kemiskinan	%		- OPD Lintas Sektor	- Data Kemiskinan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	Angka	Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	- DP4KB	- Data pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	- DP4KB	- Data IPG
	2. Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	- DP4KB	- Data KDRT
Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1. Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	%	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Sarana Prasarana Kebudayaan - Data Pelaku Budaya - Data Jenis Adat Budaya
	2. Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	situs/bcb	Dihitung berdasarkan jumlah situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Situs dan Bangunan Cagar Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	1. Jumlah Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	a. Nusantara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	b. Mancanegara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	2. Lama Tinggal Wisatawan	hari	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Magelang	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Lama Tinggal Wisatawan
Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat	%	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masyarakat tahun n))/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP - Dinas Sosial	- Data Penyakit Masyarakat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	%	Komponen dari indikator adalah kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama. Masing - masing komponen bernilai 25%. Rumus 100% - (% komponen konflik)	- Badan Kesbangpolinmas	- Data Konflik Masyarakat
			dikalikan 100%		
Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1. Angka kriminalitas	Angka	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk) dikalikan 10.000	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP	- Data Kriminalitas
	2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	(Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan) dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Perda
	3. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran K3

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota Magelang merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2020, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2020.